



**PEMENANGAN PEMILU
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI INDONESIA 1999-2009
DAN ADELET VE KALKINMA (AKP) DI TURKI 2002-2007: STUDI PERBANDINGAN**

DISERTASI

Diajukan untuk Sidang Terbuka

Oleh :

SITARESMI S. SOEKANTO

NPM. 0706222492

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK UNIVERSITAS INDONESIA
JAKARTA 2012**

ABSTRAK

Program Pascasarjana
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Indonesia
9-07-2012

Sitairesmi S. Soekanto

NPM: 0706222492

Komparasi Faktor-faktor yang Berpengaruh dalam Pemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009) dan AKP di Turki (2002-2007)

330 halaman + 8 tabel + 17 grafik + 31 lampiran

Disertasi ini meneliti tentang kemenangan Pemilu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki. PKS sebagai *the survival party* berhasil meningkatkan perolehan suara dari Pemilu ke Pemilu (1999-2009) sedangkan AKP di Turki merupakan *the rulling party* yang menang berturut-turut di dua Pemilu (2002 dan 2007). Penelitian ini mencari sebab-sebab keberhasilan kedua partai politik di dua negara yang berbeda tersebut.

Dengan merujuk pada konsep Sigmund Neumann dan Duverger mengenai unit-unit analisis yang diperbandingkan, penulis meneliti bagaimana faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi PKS mempengaruhi keberhasilannya menjadi *the survival party* di tiga Pemilu (1999-2009). Disertasi ini juga meneliti bagaimana AKP yang lahir di 2001 mampu secara terus menerus menjadi partai pemenang Pemilu sejak 2002 hingga 2007. Demikian pula bagaimana aspek-aspek eksternal berupa situasi sosial, politik dan budaya kedua negara ikut mempengaruhi kemenangan Pemilu kedua partai tersebut. Lebih lanjut dalam disertasi ini diteliti pula apa yang menyebabkan adanya kesenjangan keberhasilan antara PKS dengan AKP.

Pisau analisis yang digunakan untuk meneliti adalah teori komparasi partai politik menurut Neumann dan Duverger yakni faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi. Teori Olivier Roy, Asef Bayat dan Greg Fealy digunakan untuk menganalisis ideologi. Selanjutnya teori organisasi Duverger, teori basis massa Martin Lipset, Vali Nasr dan Mehmet Altan, teori sistem rekrutmen Alan Ware dan Duverger, teori kepemimpinan Max Weber, Pareto dan Mosca serta teori strategi *vernacular politics* Jenny B. White juga digunakan. Metodologi yang digunakan adalah memadukan metode komparatif dengan metode kualitatif.

Dari hasil observasi dan wawancara mendalam baik dengan pendiri dan pengurus PKS di Indonesia yang kemudian dianalisis dengan teori yang digunakan maka ditemukan adanya inkompatibilitas antara transisi ideologi PKS ke Pos-Islamis dengan organisasi *cell*, basis massa *middle class*, sistem rekrutmen *cell*, kepemimpinan kolektif dan strategi *vernacular politic* PKS. Inkompatibilitas tersebut menyebabkan hambatan optimalisasi keenam aspek sehingga kurang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu PKS (1999-2009) ditambah pula aspek-aspek sosial, politik dan budaya di Indonesia yang kurang mendukung.

Sebaliknya dengan metode yang sama penulis mendapatkan kesimpulan bahwa formula kemenangan AKP adalah kompatibilitas pilihan model organisasi *branch*, jenis basis massa *middle class* plus, sistem rekrutmen *hybrid*, tipe kepemimpinan kharismatis dan strategi

vernacular politic plus dengan ideologi Pos-Islamis AKP sejak awal berdirinya. Ditambah pula dengan aspek-aspek sosial, politik dan budaya di Turki yang kondusif karena memang dibutuhkan kondisi eksternal tertentu agar partai politik pos-Islamis berkembang dan menang.

Lebih lanjut dari penelitian ini didapatkan bahwa kesenjangan PKS dengan AKP di Turki disebabkan rendahnya tingkat pengaruh aspek-aspek ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi PKS pada pemenangan Pemilu PKS. Demikian pula perbedaan aspek-aspek eksternal berupa lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya Indonesia dan Turki turut menyebabkan adanya kesenjangan tersebut. Oleh karena itu penulis pun merekomendasikan bahwa karakteristik Pos-Islamis harus tercermin dalam semua sisi wajah PKS karena ideologi Pos-Islamis harus kompatibel dengan model organisasi, keragaman jenis basis massa, sistem rekrutmen, model kepemimpinan dan strategi yang digunakan agar berpengaruh signifikan bagi pemenangan Pemilu PKS.

Sumbangan disertasi ini bagi ilmu politik adalah membuktikan bahwa politik aliran masih tetap relevan karena keberhasilan kelompok Islamis yang direpresentasikan oleh PKS di Indonesia dan AKP di Turki bertahan dalam sistem demokrasi. Lebih jauh lagi keberhasilan kedua partai politik Islam terutama AKP di Turki telah mematahkan tesis Olivier Roy di akhir 1990-an yang dipertegasnya lagi di 2006 bahwa Islam politik atau Islamis telah gagal dan mundur ke Neo-fundamentalis yang parsial dan apolitik. Sebab kedua partai politik tersebut alih-alih mundur menjadi Neo-fundamentalis malah bertransformasi menjadi Pos-Islamis. Ideologi Pos-Islamis bahkan telah menyebabkan AKP menjadi *the rulling party* dan PKS sebagai *the survival party* dan keberhasilan kedua partai politik tersebut juga sekaligus membuktikan kompatibilitas Islam dengan Demokrasi.

ABSTRACT

Postgraduate Program
Faculty of Social and Political
Sciences
University of Indonesia
9th July 2012

By: Sitaesmi S. Soekanto
Student ID: 0706222492

This dissertation is to examine the winning in the general elections of the Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia and Adalet ve Kalkinma Partitioning (AKP) or Justice and Development Party in Turkey. PKS successfully managed to improve the survival of votes from election to election (1999-2009) while the AKP in Turkey is now the ruling party that won in two consecutive elections (2002 and 2007). This research observes the causes of the success of both political parties in two different countries.

With reference to the concept of Sigmund Neumann and Duverger on the units of analysis that are compared, the authors examined how ideological factors, organizational structure, voters basis, the system of recruitment, leadership and success strategies of the PKS that affect the survival of the party in three consecutive general elections (1999-2009). This dissertation also examines how the AKP which was born in 2001 were able to triumph the general elections from 2002 to 2007. To the same end we learned on how the external aspects of the social, political and cultural of the countries has influenced their winning in the general elections. Further, this dissertation observe also the different winning milestones between the PKS and the AKP.

Moreover, this dissertation also looks into rationales behind distinct success and achievements from both PKS in Indonesia and AKP in Turkey. It argues that the electoral underperformance of PKS is a direct result of its lower attainment in influencing areas such as ideology, organization, mass based support, member recruitment, leadership and strategies. The present study discusses these 6 influencing internal factors from PKS and then compared with those of AKP. The analytical methodology used for the present study is the Neumann and Duverger's theoretical comparison of political party, which takes into account factors covering of ideology, organization, mass based support, member recruitment, leadership and strategy. In the ideological comparison, the studies performed by Oliver Roy Asef Bayat and Greg Fealy are presented. Furthermore, the organization theory by Michels and Duverger, the mass support theory of Martin Lipset, Vali Nasr and Mehmet Altan, the analysis of recruitment system by Alan Ware and Duverger, the leadership theory of Max Weber, Pareto and Mosca, as well as the political strategy of *vernacular politics* by Jenny B. White are presently adopted.

From the observations and direct conversations with the founders and members of the central governing boards from both the PKS in Indonesia and the AKP in Turkey and using the aforementioned analytical theories it is found that the central underlying problem lies in the incompatibilities between the evolutionary process of interpretation of ideology within the organization, mass based support, recruitment system, leadership and strategy implemented by

both parties. The incoherence shown by the PKS in those influencing and determine factors reveals itself in distant reality from their counterpart AKP in Turkey. Moreover, Neuman and Duverger argues that the AKP's winning formula lies in its compatible choice of organization model, mass based support, recruitment system, leadership model and strategy following its transformation of ideology from Islamic to Post-Islamic movement. Therefore, the author recommends that PKS should adjust their characters in their Post-Islamic movement era and adopts a more compatible organization model, more variety of mass based support, more compatible recruitment system, leadership model and strategy if they want to increase their influences and triumph more significantly in the coming General Elections, and therefore become the anti-thesis of Oliver Roy.

This dissertation contributions for political study/science is proving/demonstrate that political currents remained of relevant following the success of Islamist groups in Indonesia as represented by the PKS and the AKP in Turkey that survive in a democratic system. Furthermore the success of both political parties, especially the Islamic AKP in Turkey has challenged and broken Olivier Roy thesis in the late 1990s as reaffirmed again in 2006 that the failure of Islamic political movements or Islamists has led it to the Neo-fundamentalists which are becoming apolitical movements. By fact both of the political parties rather than converted into neo-fundamentalists actually has transformed into the Post-Islamist. Post-Islamist ideology has even led the AKP became the rulling party and the PKS to survive in the democratic system and the successes of both political parties are also prove the compatibility of Islam with democracy.



UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa Disertasi yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Doktor dari Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia merupakan hasil karya tulis saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan disertasi yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam Disertasi ini, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Sitairesmi S. Soekanto

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN DISERTASI

Nama : Sitaresmi S. Soekanto
NPM : 0706222492
Departemen : Ilmu Politik

Disertasi ini telah dipertahankan di hadapan sidang akademik terbuka

Prof. Dr. (Alm) Ahmad Suhelmi MA ()
(Promotor)

Prof. Dr. Burhan Magenda, MA ()
(Co-Promotor I)

Chusnul Mar'iyah, Ph.D ()
(Co-Promotor II)

Prof. Dr. Maswadi Rauf, MA ()
(Anggota Penguji)

Dr. Isbodroini Suyanto. MA. ()
(Anggota Penguji)

Prof. Dr. Gregory Fealy ()
(Penguji Ahli)

Dr. Valina Singka Subekti. MSi. ()
(Ketua Program Pascasarjana Ilmu Politik
Universitas Indonesia)

UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ILMU POLITIK
PROGRAM PASCASARJANA ILMU POLITIK

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

PEMENANGAN PEMILU
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) DI INDONESIA 1999-2009
DAN ADELET VE KALKINMA (AKP) DI TURKI 2002-2007:
STUDI PERBANDINGAN

Promotor

Prof. Dr. (Alm) Ahmad Suhelmi, MA.

Co-Promotor I



Prof. Dr. Burhan Magenda, MA

Co-Promotor II



Chusnul Mar'iyah, Ph.D

Mengetahui,
Ketua Program
Pascasarjana Ilmu Politik
Universitas Indonesia



Dr. Valina Singka Subekti, MSi

KATA PENGANTAR

Allahumma laa sahla illa maa ja'altahu sahla, wa Anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla

“Ya Allah tak ada yang mudah melainkan apa yang telah Engkau jadikan mudah dan Engkau menjadikan yang sulit, jika Engkau kehendaki, menjadi mudah”

Subhanallah, Alhamdulillah, Astaghfirullahalazhim (Q.S An Nashr: 3). Maha Suci Allah, Segala Puji bagi Allah dan aku memohon AmpunanMu ya Allah. Engkau mengajariku ya Allah adab menyambut sebuah keberhasilan, jika menuntaskan disertasi ini bisa dianggap sebagai keberhasilan, yakni dengan mengucap *tasbih* dan *tahmid* serta *istighfar*. Nikmat dariMu, ya Allah, tak akan mampu hambaMu ini menghitungnya. Kebahagiaan menuntut ilmu, terbukanya wawasan dan keberanian berubah ke arah yang lebih baik, semuanya dariMu. Hidayah dariMu. Ya Allah, Engkaulah yang menuntun hambaMu ini dalam menuliskan setiap Bab, paragraf, kalimat dan kata dalam disertasi ini. Ampuni hamba atas segala khilaf dan ajarkan hamba agar mampu ikhlas dalam setiap langkah hidup. Kiranya Engkau berkenan, Ya Allah untuk menerima disertasi ini sebagai bagian dari ketaqwaan dan pengabdian padaMu, karena hanya dengan demikian hamba boleh berharap kesuksesan di sisiMu. (Qur'an surat Al Maidah: 35).

Tepat 30 tahun yang lalu yakni tahun 1982, ketika penulis pertama kali memasuki bangku kuliah di Sastra Jerman UI, penulis sudah bercita-cita untuk menjadi Doktor di usia 30 tahun, walaupun belum terpikir dalam bidang apa. Cita-cita itu tetap terpelihara dan setelah tertunda 18 tahun dari target semula (karena sebuah fase untuk “berhenti sejenak” dari pemenuhan rasa haus akan ilmu untuk membesarkan ketujuh anak penulis), akhirnya Allah takdirkan menjadi sebuah kenyataan. Apa yang menjadi mimpi dan cita-cita 30 tahun yang lalu menjadi kenyataan hari ini, dengan izin dan keridhaanNya semata.

Semua inspirasi yang penulis dapatkan semua bermula dari sebuah surat almarhumah Ibuku yang dibuatnya 40 tahun yang lalu (1972):

Surat Ibuku untuk kelima anak perempuannya

(Kepada: Santi Widayanti Ekaningsih (Ani), Sitaesmi Sulistyawati (Kokok), Dumilah Ayuningtyas (Yas) Hasti Purwantiningsih(Ninik), Dian utami (Yan))

Kau berlima adalah wanita, anakku. Dalam usia Ibu 35 tahun kini, Ibu merasa bahwa apa yang tertanam dan tumbuh sejak Ibu masih anak-anak sebesar kalian, sangat menentukan jalan hidup ibu sebagai manusia, sebagai Ibumu, sebagai warga bangsa. Indonesia tempat kalian hidup adalah Indonesia yang merdeka dan berkembang pesat, sibuk, sangat sibuk. Dalam kesibukan hidup, kita manusia sering lupa kepada cita-cita, bahkan lupa untuk bercita-cita.

Cita-cita, anakku, sangat penting artinya bagi hidup tiap manusia. Ia tidak hanya memberi arah kita berjalan, tetapi juga sumber kekuatan hidup. Ia membuat kita mengenal harga diri dan sekaligus memiliki harga diri itu. Kau berlima adalah wanita, anakku. Kalian perlu karenanya bercita-cita, agar kelak menjadi wanita yang mulia. Karena ketahuilah, hanya wanita yang mulia dapat melahirkan bangsa yang mulia.

Dan jika kelak kau menjadi wanita yang mulia, memadailah sudah hidup ibu di dunia. Untuk itulah kujalin cerita ini, dan jika dengan membaca cerita ini terbangkitlah gairah hidupmu, cita-citamu, memang itulah tujuan ibu.

Jakarta 1972. Surtiningsih WT. (Lahir di Malang 29 Juli 1937, Wafat di Depok 3 Mei 2005).

Ibuku tercinta, *the inspiring mother*, almarhumah Surtiningsih WT. yang mengajarku untuk berani bercita-cita dan berjuang mencapai cita-cita. Disertasi ini untuk membahagiakan Ibu di tempatnya kini beristirahat. Terimakasih Ibu sayang yang telah melahirkanku ke dunia, mengukir watakku dan menjadikanku mencintai ilmu. “Allahummaghfirlaha, warhamha., wa’afiha, wa’fu’anha...” Ya Allah berikan surga bagi Ibuku tercinta.

Tentu saja tak lupa disertasi ini untuk Ayahanda tercinta, Soekanto SA, pendiri majalah Si Kuncung dan bapaknya anak-anak Indonesia, penulis bangga menjadi putrimu dan selalu

ingin membuatmu bangga. “Rabbighfirli wali walidayya warhamhumma kama Rabbayani shaghiro” Begitu pula untuk Ibu Mertua, Ibu Musrifah di Tegal yang sejak awal penulisan disertasi selalu bertanya ‘jadi ini ujian yang keberapa’ setiap kali penulis meminta doanya di setiap rangkaian ujian yang sangat panjang.

Dengan bimbingan Allah yang Maha Sempurna serta semua pembimbing yang dalam tuntunan Allah, penulis sungguh menikmati “a long journey”, perjalanan panjang mencari ilmu yang penuh dengan “enjoyment”. “enthusiasm”, “passion”, “stories”, “friendship”, “laughters”, “tears”, “happiness”, “sorrows” dan “exhausted”. Masa-masa mencari ilmu yang tak terlupakan ternyata memberikan penulis lebih dari itu, hakikat hidup dan mati, kebijaksanaan dan kesadaran bahwa di atas segala-galanya, ridha Allah adalah yang utama. Tanpa ridhaNya tak akan mungkin penulis mencapai cita-cita ini. *Laqad khalaqnal insaana fi kabad* (QS. Al Balad: 4.) “Sungguh Aku ciptakan manusia dalam perjuangan”. *Das Leben ist wie ein Kampf*. “Hidup adalah sebuah perjuangan”. Berjuang mendaki jalan yang terjal dan berliku yakni jalan-jalan kebajikan untuk mendapatkan ridhaNya semata. *It’a all about patience and endurance*.

Rasa terima kasih tak terhingga juga penulis haturkan pada berbagai pihak yang sangat membantu penulis dalam proses menyelesaikan disertasi ini:

Almarhum Prof. Dr. Ahmad Suhelmi MA, yang wafat pada hari Senin 4 Juni 2012, selaku Promotor yang di tengah segala rasa sakit dan penderitaannya tetap produktif menulis buku dan sekaligus juga membimbing penulis. Almarhum memiliki rasa humor yang tinggi namun sekaligus kritikan-kritikan yang tajam dan membangun. Semasa hidupnya, almarhum selalu memberikan bimbingan dan mengajari penulis bahwa kematian adalah sebuah keniscayaan namun bagaimana mengisi hidup sebelum kematian adalah hal yang jauh lebih penting untuk dipikirkan. Bahkan sepekan sebelum wafat tepatnya pada tanggal 29 Mei 2012, beliau masih berjuang memaksakan hadir di Sidang Pra-Promosi penulis dan menjadi reuni indah yang terakhir baginya dengan sahabat lamanya Prof Greg Fealy. Di hari-hari terakhir menjelang wafat beliau berulang kali mengucapkan pada penulis ‘selamat kamu sudah lulus’ serta menggumamkan kalimat pada mbak Ike, sang istri tercinta, di hari terakhir (Ahad 3 Juni) sebelum berpulang ke rahmatullah ‘Alhamdulillah ya untung disertasi mbak Sita sudah selesai’. Hal tersebut menunjukkan dedikasi beliau yang sangat tinggi dalam mengemban amanahnya

sebagai pendidik dan pembimbing. Terima kasih, Pak Helmi, semoga bahagia di sisiNya. *Allahummaghfirlahu warhamhu, wa'afihi, wafu'anh.*

Prof. Dr. Burhan Magenda MA, selaku Co.Promotor 1. Sejak awal kuliah memasuki program Ilmu Politik Pascasarjana FISIP UI, lima tahun yang lalu dengan sifat humanisnya, beliau senantiasa membesarkan hati, memberikan optimisme dan mencontohkan pada penulis cara mencintai ilmu serta selalu memberikan tambahan ilmu terkini dan info buku terbaru. Terima kasih, Pak Burhan, atas segala kesabaran dan limpahan *tacit knowledgenya* yang begitu banyak.

Ibu Chusnul Mar'iyah Ph.D selaku Co.Promotor 2 dengan segala idealisme, perfeksionisme dan ketelitiannya telah mem'push' penulis agar menghasilkan yang terbaik, walau terkadang terasa begitu berat dan membuat penulis terengah-engah. Terima kasih, Bu Chusnul atas segala keterbukaan, ketelitian dan kecermatan dalam mencurahkan ilmu pada penulis. Semua *guidelines* dari Ibu membuat disertasi ini menjadi layak dibaca dan bermakna padahal sebelumnya hanya sebuah *draft* tak berbentuk.

Ibu Dr. Valina Singka Subekti MA, selaku Ketua Program Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP yang dengan kearifan dan ketegasannya telah menghadirkan kemajuan di Pasca Sarjana Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia. Para Dosen Penguji yang menyeleksi dan mengevaluasi perjalanan pembuatan disertasi ini: Bapak Prof. Dr. Maswadi Rauf dengan integritas keilmuannya yang tidak diragukan, Ibu Dr. Isbodroini Soeyanto MA, yang keibuan dan penuh dedikasi. Prof Dr. Greg Fealy, Penguji Ahli, dari ANU, Australia yang sangat menguasai tentang Indonesia, Islamis dan juga tentang PKS. Terima kasih Pak Greg, Anda telah membuat disertasi ini menjadi lebih bisa dipertanggungjawabkan dari segi integritas keilmuan. Serta semua staf pengajar yang tidak akan pernah penulis lupakan jasanya. Terima kasih banyak atas segala ilmu yang diberikan kepada penulis. Tak lupa pula, penulis ucapkan terima kasih kepada Mas Saiful, Mas Firman Noor, Mbak Hera, Mbak Romlah, Mbak Retno, Mas Andri, Mas Woso, Mas Anto, Mas Denny dan Mas Yanto yang banyak membantu dan memudahkan urusan penulis sehingga terasa berkesan kuliah di Ilmu Politik UI.

Demikian pula terima kasih penulis tujukan untuk segenap Pimpinan DPP PKS di Indonesia beserta staf dan juga Pimpinan AKP di Turki. Teman-teman di Turki: Andhika, Azi, Hizby dan

Fatmanur Samasti. Asistenku Nona Lebeharia dan mbak Ike, istri almarhum Prof Helmi yang keduanya sejak awal mengikuti proses panjang penelitian dan penulisan disertasi ini. Juga Sekjen DPP PKS Bapak Anis Matta dan Sekretariat DPP beserta seluruh staf Bidang Arsip dan Sejarah: Asep, Awis, Hadi, Jejen, Dwi dan Vina. Teman-teman *Amilah*, teman-teman *liqa* "Ummu Sulaim". Anak-anak Insure: Pak Imam, Bram cs penulis ucapkan, *Jazakumullah khairan katsiran*.

Begitu pula untuk Guruku tercinta Ustadz Hilmi Aminuddin Lc beserta Ibu, yang menuntun penulis menggapai hidup penuh makna dalam jalan dakwah. Kakak-kakak dan adik-adik tersayang, Om Tus, Pakde Win, Te Indah, Ode, Paman, Tyas, Paman Beni, Ninik, Om Memed, Dian dan Om Tommy beserta seluruh keponakan-keponakan terima kasih atas support dan doanya yang tak pernah putus. Teman-teman seperjuangan di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik UI, penulis merasakan kegembiraan dalam menuntut ilmu bersama kalian.

Last but not least, suamiku tercinta, Ahmad Feri Firman Yusuf yang telah mendampingiku habis-habisan sebagai sponsor dan supporter yang dengan ikhlas memberikan keleluasaan dan dukungan penuh dalam berbagai hal agar penulis bisa terus mengejar cita-cita. Semoga Allah membalas semua cinta dan kebaikanmu. Dan tentu saja anak-anakku tercinta: Sofi, Nida, Zulfa, Sammy, Mona, Inas dan Kiki, menantu-menantuku: Dhani dan Rhama serta cucu-cucuku sayang: Haifa dan Gaza yang selalu menjadi penyemangat, terima kasih atas pengertian kalian atas terbaginya perhatian Ibu. Maafkan Ibu, Ibu hanya ingin membuat kalian juga mencintai ilmu, Nak.

Akhir kata, penulis mengharapkan disertasi ini bermanfaat, walaupun masih banyak kekurangannya, baik secara akademis maupun secara empiris buat pengembangan parta-partai politik Islam dan PKS pada khususnya serta bagi dakwah di Indonesia dan di dunia pada umumnya.

Allahu Kaafiy, wa Rabbunal Kaafiy, waqashaddul Kaafiy, wawajaddul Kaafiy, wakafaniyal Kaafiy, wani'mal Kaafiy, walillahilhamd.

“Allah Maha Sempurna dan Pembimbing yang Sempurna. KehendakNya Sempurna, WujudNya Sempurna dan KesempurnaanNya Sempurna serta NikmatNya pun Sempurna. Baginya Segala Puji.

Depok 9 Juli 2012

Sitairesmi S. Soekanto



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Abstrak	ii
Abstract	iv
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vi
Lembar Pengesahan	vii
Lembar Pengesahan dan Persetujuan	viii
Kata Pengantar	ix
Daftar Isi	xiv
Istilah Kata (<i>Glossary</i>)	xviii
Daftar Tabel	xxii

BAB I PENDAHULUAN

I.1.	Latar Belakang	1
I.2.	Pokok Permasalahan	6
I.3.	Pertanyaan Penelitian	17
I.4.	Tujuan Penelitian	18
I.5.	Signifikansi Penelitian	18
I.6.	Keterbatasan Penelitian	18
I.7.	Kajian Literatur	19
I.8.	Kerangka Teori	24
	I.8.1. Partai Politik	24
	I.8.2. Ideologi	25
	I.8.3. Organisasi	31
	I.8.4. Basis Massa	32
	I.8.5. Sistem Rekrutmen	35
	I.8.6. Kepemimpinan	36

I.8.7.	Strategi	38
I.9.	Model Analisis	41
I.10.	Metodologi Penelitian	41
I.10.1.	Metode Komparatif	42
I.10.2.	Metode Kualitatif	43
I.11.	Sistematika Penulisan Disertasi	46
BAB II	SEJARAH KEMUNCULAN PKS DI INDONESIA (1998) DAN AKP DI TURKI (2001)	48
II.1.	Demokratisasi di Negara-negara Muslim	50
II.2.	Gerakan-gerakan Islam Internasional	56
II.3.	Latar Belakang Kemunculan PKS di Indonesia (1998)	64
II.3.1.	Situasi di Indonesia sebelum Reformasi tahun 1998	64
II.3.2	Gerakan Tarbiyah	69
II.3.3.	Kemunculan Kembali Partai-partai Islam di Indonesia di Era Reformasi dan lahirnya PKS	72
II.4.	Latar Belakang Kemunculan AKP di Turki (2001)	81
II.4.1.	Situasi di Turki Sebelum Lahirnya Partai Politik Islam	82
II.4.2	Gerakan Dakwah <i>Milli Görüş</i> (Pandangan Kebangsaan)	86
II.4.3	Partai-partai politik Islam sebelum AKP dalam dinamika politik di Turki dan lahirnya AKP	91
BAB III	PENGARUH ASPEK-ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL PARTAI PADA PEMENANGAN PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (1999-2009)	103
III.1.	Pengaruh Positif Ideologi Pos-Islamis Pada Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009)	104
III.2.	Kurang Optimalnya Aspek Organisasi Pada Pemenangan Pemilu PKS 1999-2009	119
III.3.	Perluasan Basis Massa Berpengaruh Positif pada Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009)	125

- III.4. Sistem Rekrutmen Anggota di PKS Masih Berpengaruh Positif 134 pada Pemenangan Pemilu PKS
- III.5. Aspek Kepemimpinan Belum Menjadi Aspek Utama yang 144 berpengaruh pada pemenangan Pemilu PKS
- III.6. Kurangnya Optimalisasi Strategi *Vernacular Politics* pada 152 Pemenangan Pemilu PKS.
- III.7. Aspek-aspek Eksternal yang Ikut Mempengaruhi Pemenangan 162 Pemilu PKS (1999-2009)

BAB IV PENGARUH ASPEK-ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL PARTAI PADA PEMENANGAN PEMILU ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP, 2002-2007) 165

- IV.1. Besarnya Pengaruh Ideologi Pos-Islamis Pada Pemenangan 166 Pemilu AKP (2002-2007)
- IV.2. Kekokohan dan Independensi Organisasi *Branch* AKP 181 Berpengaruh Positif Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)
- IV.3. Perluasan dan Keberagaman Basis Massa AKP Berpengaruh 189 Positif Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)
- IV.4. Aspek Keragaman dan Kemudahan dalam Sistem Rekrutmen 194 Berpengaruh Positif Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)
- IV.5. Aspek Kepemimpinan Erdogan adalah Aspek Dominan pada 201 Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)
- IV.6. Optimalisasi Aspek Strategi Berpengaruh Positif pada 214 Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)
- IV.7. Aspek-aspek Eksternal Ikut Berpengaruh pada Pemenangan 224 Pemilu AKP (2002-2007)

V.	PERBANDINGAN PEMENANGAN PEMILU PKS (1999-2009) DAN AKP (2002-2007)	228
V.1.	Perbedaan antara ideologi PKS yang masih berproses menjadi Pos-Islamis sejak 2004 dengan AKP yang sudah Pos-Islamis sejak 2001 mempengaruhi Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)	232
V.2.	Perbedaan Model Organisasi PKS dan AKP Berpengaruh pada Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)	244
V.3.	Perbedaan Ragam Basis Massa PKS (<i>middle class</i>) dengan AKP (<i>middle class plus</i>) Mempengaruhi Perbedaan Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)	252
V.4.	Perbedaan Model Sistem Rekrutmen “Cell” PKS dan “Hybrid” AKP Mempengaruhi Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)	257
V.5.	Kepemimpinan Kolektif PKS versus Pemimpin kharismatik AKP mempengaruhi Perbedaan Keberhasilan PKS di Pemilu (1999-2009) dan AKP di Pemilu (2002-2007)	264
V.6.	Optimalisasi Strategi <i>Vernacular Politics</i> PKS dan Strategi <i>Vernacular Politics</i> Plus AKP Berpengaruh pada Perbedaan Keberhasilan PKS di Pemilu (1999-2009) dan AKP di Pemilu (2002-2007)	270
V.7.	Perbandingan Aspek-aspek Eksternal yang Ikut Mempengaruhi Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)	276
BAB VI	KESIMPULAN	285
	DAFTAR PUSTAKA	299
	LAMPIRAN	306

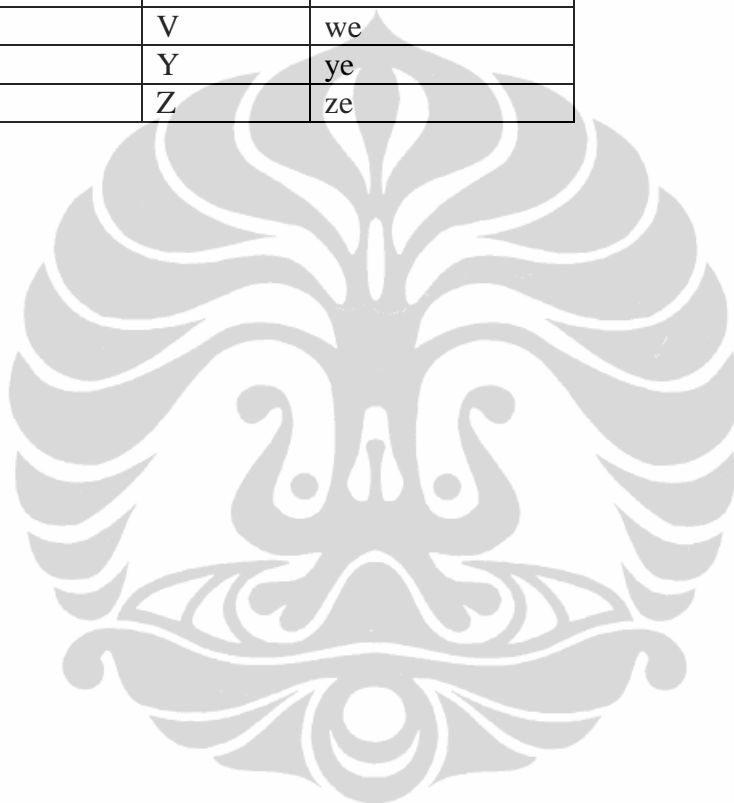
GLOSSARY

AKP (<i>Adalet ve Kalkinma Partisi</i>), Justice and Development Party	Partai Keadilan dan Pembangunan
"Gonuller bir, dualar bir. Bir Allahu kuluyuz biz"	Hati kita satu, do'a kita satu. Kita menyembah Allah yang Esa
AK Party Communications Center (AKİM)	Pusat Komunikasi AK Parti
Akhwat	Saudari, sebutan untuk kader perempuan PKS
Al Aghniya	Orang-orang kaya
Asholah	Orisinalitas/kemurnian
Ataturk	Bapak Turki
Ayne Yoldan	Jalan yang sama
BGMZ (Bağımsiz)	Independen
Bid'ah	Menambah atau merubah ibadah ritual transendental sehingga menyimpang aturan yang sudah baku dari Qur'an dan Sunnah
CDAC (<i>The Central Decision-Making and Administrative Committee</i>)	Komite Pusat Administratif dan Pengambilan Keputusan seperti Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di PKS. CDAD Pelaksana harian umum sedangkan DPTP Pelaksana harian di Majelis Syuro
CEC (<i>Central Executive Committee</i>)	Dewan Pimpinan Pusat
CHP (<i>Cumhuriyet Halk Partisi</i>) atau <i>Republican People's Party</i>	Partai Rakyat Republik
Dakwah bil qalam	Dakwah dengan tulisan
Daurah	Seminar, Pelatihan
DYP (<i>Doğru Yol Partisi</i>), <i>True Path Party</i>	Partai Jalan Kebenaran
ECHR (<i>European Court of Human Rights</i>)	Pengadilan HAM Eropa
Evet	Ya
Fark var	Memang berbeda
FIS (<i>Front Islamic Salut</i>) di Aljazair	Partai Penyelamatan Islam
FP (<i>Fazilet Partisi</i>)/ <i>Fadilah Party</i>	Partai Kebajikan
Governing elite	Elit yang memerintah
Halaqah	Pertemuan, di Gerakan Tarbiyah merupakan unit pembinaan Kader Pendukung (KP)
Harokah	Gerakan/Pergerakan
HAS Parti (<i>Halkin Sesi Partisi</i>), <i>People's Voice Party</i>	Partai Suara Rakyat
Herkes İçin	Untuk semua orang
Herşey Türkiye İçin (<i>Everything is for Turkey</i>)	Semua untuk Turki
Hizb al-Wasat	Partai Tengah
Hizbu Nahdhah	Partai Kebangkitan
Hudud	Hukum pidana dalam Islam
IDP (<i>Islahatçı Demokrasi Partisi</i>)/	Partai Demokrasi Reformis

<i>Reformist Democracy Party</i>	
IGMG (<i>Islamische Gemeinschaft Milli Görüş</i>)/Islamic Community <i>Milli Görüş</i>	Perkumpulan kaum Islamis yang memiliki pandangan kebangsaan
IHH (<i>İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı</i>)/ <i>The Foundation for Human Rights and Freedoms and Humanitarian Relief</i>	Hak dan Kebebasan Manusia
<i>Ikhwan</i>	Saudara, sebutan untuk kader laki-laki di PKS
<i>il</i>	Provinsi
<i>ilce</i>	Distrik
<i>Infaq, shadaqah</i>	Harta seseorang yang dikeluarkan dalam jumlah tertentu untuk yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim tapi tidak bersifat wajib seperti zakat
Islamis (<i>islamiyyun, al Islam as siyasi</i>)	Kelompok muslim yang memperjuangkan perealisasi ajaran Islam melalui politik. Mereka beranggapan ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan termasuk politik
<i>İstikrar Sürsün, Türkiye Büyüsün</i>	Lanjutkan (menjaga) stabilitas, membangun kejayaan Turki
<i>Izzah</i>	Martabat, harga diri
<i>Khithob wathoni</i>	Terminologi kebangsaan
<i>Kurafat</i>	Takhayul, Hasil khayalan
<i>Lajnah</i>	Komite
<i>Mahalle /neighborhood</i>	Kecamatan
MCP (<i>Milliyetçi Çalışma Partisi</i>)/ <i>The Nationalist Task Party</i>	Partai Kewajiban Nasional
MHP (<i>Milliyetçi Hareket Partisi</i>), <i>Nationalist Movement Party</i>	Partai Gerakan Nasional
<i>Millah</i>	Bangsa dalam bahasa Arab
<i>Millet</i>	Bangsa dalam bahasa Turki
<i>Milli Görüş</i>	Pandangan Bangsa/pandangan kebangsaan
MNP (<i>Milli Nizam Partisi</i>)/ <i>National Order Party</i>	Partai Keteraturan Bangsa
MSP (<i>Millî Selâmet Partisi</i>)/ <i>The National Salvation Party</i>	Partai Keselamatan Bangsa
<i>Muhsinin</i>	Orang-orang yang baik, donatur yang dermawan
<i>Mujaddid</i>	Tokoh pembaharu
<i>Murabbi</i>	Guru halaqah di unit pembinaan Kader Pendukung
MÜSİAD (<i>Müstakil sanayici ve işadamları derneği</i>)/ <i>Independent Industrialists' and Businessmen's Association</i>	Asosiasi Industrialis dan pengusaha Independen
<i>Musyarakah</i>	Koalisi
<i>Naqib</i>	Pembina di unit pembinaan Kader Inti PKS

<i>Nereden-Nereye</i>	Dahulu dan Kini
<i>Non-governing elite</i>	Elit yang tidak memerintah
<i>ÖKM (Özürlüler Koordinasyon Merkezi), Coordination Center for the Handicapped</i>	Pusat koordinasi untuk para penyandang cacat
<i>Post-Islamist</i>	Pos-Islamis merupakan kelanjutan dari Gerakan Islamis bedanya pos-Islamis lebih memperjuangkan substansi ajaran Islam dibandingkan formalitasnya
<i>Rabthul 'Am</i>	Simpul massa
<i>Rahat bir nefes alacak</i>	Anda akan sempat bernafas
<i>RP (Refah Partisi), Welfare Party</i>	Partai Kesejahteraan
<i>Sayyid</i>	Bangsawan ,panggilan untuk Tuan dalam bahasa Arab
<i>Ses Ver Turkiye</i>	Berikan untuk Turki
<i>Sevlik atau chifhood</i>	Sistem Partenalistik
<i>SP (Saadet Partisi), Felicity Party</i>	Partai Kebahagiaan
<i>Syirik</i>	Mempersekutukan Allah dengan cara mengimani dan beribadah pada selain Allah
<i>Syumuliyatul Islam</i>	Integralitas ajaran Islam (konprehensif)
<i>Ta'awun</i>	Tolong-menolong
<i>Tadayyun sya'bi</i>	Relijiusitas masyarakat
<i>Takaful</i>	Sepenanggungan
<i>Taklid</i>	Memahami suatu ajaran secara kaku tanpa disertai ilmu
<i>Tamhidiyah</i>	Tingkat pembinaan dasar di PKS
<i>TP (Türkiye Partisi)</i>	Partai Turki
<i>Türkiye Hazır Hedef 2023</i>	Turki siap menghadapi Tahun 2023
<i>Türkiye İstatistik Kurum</i>	Badan Statistik Turki
<i>Türkiye Sizinle Gurur Duyuyor</i>	Turki bangga padamu (ungkapan rakyat Turki pada Erdogan dalam bentuk yel-yel)
<i>TÜSIAD (Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği)/ The Turkish Industrialist and Businessman Association</i>	Asoosiasi Industrialis dan Pengusaha Turki
<i>Usrah</i>	Kelompok pembinaan Kader Inti (KI) di PKS
<i>Vernacular politics</i>	Politik kedaerahan
<i>Wajihah</i>	Lembaga dalam bahasa Arab
<i>Yeni CHP, Yeni Lider</i>	CHP baru, Pemimpin baru
<i>YKM (Yaşlılar Koordinasyon Merkezleri), Coordination Center for the Elderly</i>	Pusat koordinasi untuk lansia (orang lanjut usia)

Penulisan	Cara membaca	Penulisan	Cara membaca
a	a	m	me
b	be	n	ne
c	je	O	o
ç	ce	ö	ou
d	de	p	pe
e	e	r	re
f	fe	S	se
g	ge	ş	sye
ğ	yumusyak-g	t	te
h	he	U	u
i	i	ü	uw
j	je	V	we
k	ke	Y	ye
l	le	Z	ze



DAFTAR TABEL

Grafik I.1.	Perolehan Kursi PKS di Pemilu 1999 – 2009	4
Grafik I.2.	Perolehan Kursi AKP pada Pemilu Umum (2002 dan 2007) di antara partai-partai lain	6
Tabel I.1.	Komparasi antara Neo-fundamentalisme, Islamisme dan Pos-Islamisme	10
Daftar I.1.	Narasumber yang diwawancarai	45
Tabel II.1.	Perolehan Suara Partai-partai Islam dalam Pemilu di Era Reformasi	74
Grafik II.1.	Hasil Pemilu Turki 1973-2007	88
Grafik III.1.	Perolehan Suara PKS	104
Grafik III.2.	Perolehan Kursi PKS di Kalimantan Timur Pada Pemilu 1999-2009	114
Grafik III.3	Perolehan Kursi PKS di Bali pada Pemilu 1999-2009	115
Grafik III.4	Perolehan Kursi PKS di NTT pada Pemilu 1999-2009	115
Grafik III.5	Perolehan Kursi PKS di Papua pada Pemilu 1999-2009	117
Grafik III.6	Data Jumlah Kader PKS	135
Grafik III.7	Perolehan Suara PKS di daerah Minoritas Muslim	140
Grafik III.8	Perolehan Suara PKS Turun Namun Jumlah Kader Meningkat	141
Grafik III.9	Perbandingan Perolehan Suara dan Jumlah Kader di Wilda Jatijaya	142
Grafik III.10	Perbandingan Jumlah Kader dengan Perolehan Suara 1999-2009	143
Grafik IV.1	Perolehan Kursi AKP di Pemilu 2002 – 2007	166
Bagan IV.1	Peta Ideologis Partai-partai di Turki	170
Grafik IV.2	Perolehan Suara 3 Partai Besar	178
Bagan IV.2.	Struktur Organisasi AKP	182
Tabel IV.1.	Komparasi Hasil yang Dicapai Oleh CHP – MHP dengan AKP	205
Tabel IV.2	Komparasi Strategi Media antara AKP dan CHP	222

Grafik V.1.	Perbandingan Perolehan Suara PKS dan AKP	232
Grafik V.2.	Perbandingan Jumlah Kader dengan Perolehan Suara Pemilu 1999-2009	258
Tabel VI.1.	Komparasi antara Neo-fundamentalisme, Islamisme dan Pos-Islamisme	285



BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Disertasi ini meneliti tentang kemenangan Pemilu partai politik Islam Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia dan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki. PKS berhasil meningkatkan perolehan suara dari Pemilu pertama yang diikutinya (1999), berlanjut di Pemilu 2004 dan di Pemilu 2009 sehingga menjadi *the survival party* hingga saat ini. Sementara AKP di Turki sejak pertama kali mengikuti Pemilu di 2002 berhasil menang berturut-turut di dua Pemilu (2002 dan 2007) dan menjadi *the rulling party* sampai saat ini. Penelitian ini mencari sebab-sebab keberhasilan kedua partai politik di dua negara yang berbeda tersebut dengan cara melihat bagaimana aspek-aspek internal partai yakni ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi berpengaruh pada kemenangan kedua parpol tersebut di Pemilu. Selain itu bagaimana aspek-aspek eksternal berupa kondisi sosial, budaya dan politik di Indonesia dan Turki ikut mempengaruhi. Lebih jauh lagi mengapa AKP di Turki mampu memperoleh keberhasilan yang jauh lebih besar dibanding dengan PKS di Indonesia.

Globalisasi menyebabkan gagasan demokrasi menyebar hampir di seluruh dunia termasuk dunia Islam dan negara-negara Muslim yang memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II, umumnya termasuk yang terkena gelombang demokrasi ketiga.¹ Proses demokratisasi telah membuka peluang pula bagi gerakan Islam yang disebut juga kelompok Islamis di banyak negara-negara Muslim untuk membangun basis sosial-politik dan secara bertahap menjadi kekuatan politik yang semakin diperhitungkan serta sekaligus menandai munculnya gejala *Islamic revivalism* (kebangkitan Islam) di bidang sosial politik. Fenomena tersebut nampak di berbagai negara-negara Muslim, misalnya di tahun 1980-an gerakan Ikhwanul Muslimin eksis di Mesir, di Yordania dan Kuwait, demikian pula di Turki dan Tunisia.²

¹Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (edisi terjemahan dari “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997, h: 13.

²Gerakan Islam (*Islamic movements*) berasal dari bahasa Arab: *Harakah Islamiyyah* dan pertama kali digunakan oleh Hasan Al Banna dari Mesir untuk menyebut organisasi Ikhwanul Muslimun, sebuah gerakan perubahan atau reformasi yang kemudian populer dengan Ikhwanul Muslimin yang didirikannya pada tahun 1928.

Pada 1990, di dalam kabinet Yordania, kader-kader Ikhwanul Muslimin menduduki pos Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Pembangunan Sosial dan Kementerian Penerangan. Perkembangan selanjutnya sejak tahun 1991 terjadi penindasan atas *Front Islamic du Salut* (FIS) atau Partai Penyelamatan Islam di Aljazair dan partai *Nahdhah* di Tunisia serta tidak dilibatkannya kader-kader Ikhwanul Muslimin di kabinet baru di Yordania. Fase tersebut dianggap Olivier Roy sebagai fase kemunduran gerakan Islam dan menurutnya merupakan bukti kegagalan Islamis atau Islam politik.³ Tesis yang dibuatnya di tahun akhir 1990-an dipertegasnya lagi pada tahun 2006, dalam bukunya *Globalized Islam* bahwa gerakan Islamisme bergerak mundur ke arah Neo-fundamentalisme yakni sebuah upaya mewujudkan *transnational ummah* (keumatan global) melalui penyebaran dakwah di masyarakat.⁴

Namun di awal abad ke-21 di Turki terjadi fenomena yang sama sekali berbeda dengan yang diasumsikan Roy, karena AKP menang dua kali berturut-turut pada Pemilu 2002 dan 2007 serta dua kader utamanya Abdullah Gul dan Recep Tayyip Erdogan menduduki kursi jabatan Presiden dan Perdana Menteri. Gerakan Islam di Turki dianggap sukses mentransformasikan Islam dalam wacana modernisme dan demokrasi. Peran itu tidak terlepas dari kontribusi pemikiran arus utama Ikhwanul Muslimin yang mempopulerkan kembali adanya relasi antara agama, politik dan negara pasca keruntuhan Turki Usmani pada 1924.⁵

Fenomena kebangkitan kembali partai-partai politik Islam selain AKP di Turki, PKS di Indonesia, Parti Islam Se-Malaysia (PAS)⁶ di Malaysia, *Front Islamic du Salut* (FIS) atau Partai Penyelamatan Islam di Aljazair dan *Parti de la Justice et tu Developpement* (PJD) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko tidak bisa dilepaskan dari gejala kebangkitan Islam. Gejala kebangkitan Islam ini secara historis bisa ditelusuri mulai dari munculnya gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di Mesir pada dekade kedua abad ke-20, Jami'at Islami di Pakistan, gerakan Jama'ah Said An Nursi di Turki, hingga terbentuknya gerakan *Milli Görüş* (MG) atau Pandangan Kebangsaan yang melahirkan *Milli Nizam Partisi* (MNP) atau Partai Keteraturan Bangsa di Turki pimpinan Necmettin Erbakan pada tahun 1969. Selanjutnya

³ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik*. Ed. Terjemahan dari: *The Failure of Political Islam*. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996, h: 98-99.

⁴ <http://cup.columbia.edu/static/interview-roy-olivier-globalized>. November 2004.

⁵ Ahmad Dzakirin. *Transformasi Politik dan Demokrasi Kalangan Islamis: Potret Gerakan Islam di 2009*. Jakarta: INSURE, 2009, h: 1.

⁶ <http://www.pas.org.my/index.php>

peristiwa Revolusi Islam Iran di tahun 1979 yang menumbangkan Dinasti Kerajaan Pahlevi pro-Barat di bawah Shah Iran Reza Pahlevi telah menandai pula bahwa kekuatan Islam telah mampu berhadapan dengan kekuatan-kekuatan hegemonik sekuler Barat (Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat) dengan tampilnya para ulama dalam panggung politik internasional. Sejak saat itu seluruh dunia, terutama Barat mulai tertarik pada dinamika perubahan yang terjadi di negeri-negeri Muslim. Baik negara-negara Barat yang maju, maupun negara-negara sosialis atau komunis yang relatif miskin serta negara-negara berkembang tidak bisa mengabaikan adanya *Islamic revivalism* (kebangkitan Islam).⁷

Di Indonesia, menurut Bahtiar Effendy era Reformasi 1998 merupakan momentum yang tepat bagi bangkitnya kekuatan Islam dalam dinamika politik karena menghadirkan keterbukaan dan memberikan peluang pula bagi munculnya 42 partai politik Islam baru. Dari jumlah tersebut hanya sebagian yang lolos uji verifikasi dan mengikuti Pemilu 1999 seperti Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan (PK). Ada juga partai lama yang kembali memakai asas dan lambang Islam setelah sebelumnya di larang di masa Orde Baru (Orba) tidak boleh menggunakan asas dan lambang Islam yakni Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Selain itu ada partai politik berbasis massa Islam seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh pemimpin Muhammadiyah, Amien Rais dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dicetuskan oleh Abdurahman Wahid atau Gus Dur, pemimpin Nahdlatul Ulama (NU).⁸

PK dalam pemilu 1999 meraih 1,4 juta suara atau 1,3% dan tidak dapat melampaui batas *Electoral Threshold* (ET): 2%. Di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid, PK memutuskan bergabung dengan PKS yang dipimpin Al Muzammil Yusuf dan PKS hasil penggabungan ini kemudian dipimpin oleh Presiden PKS Hidayat Nur Wahid. Di Pemilu 2004 PKS berhasil memperoleh peningkatan suara yang signifikan yakni 700% dari 1,3% (1,4 juta suara) di tahun 1999 menjadi 7,2% (8,2 juta suara) melebihi target 8 juta suara yang dicanangkan.⁹ Selanjutnya di Pemilu 2009 PKS mengalami kenaikan sedikit dari perolehan suara 7,3% dengan jumlah 45 kursi (8%) menjadi 7,88 % dengan 57 kursi (10,3%), namun hasil tersebut membuat PKS secara bertahap dapat meningkatkan representasinya di parlemen dari pemilu ke pemilu selama rentang waktu 1999-2009 dan menjadi *the survival party*,

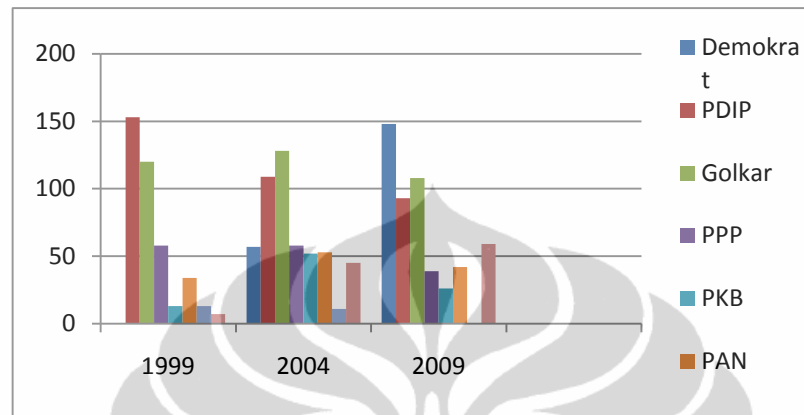
⁷ Hussin Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (Ed.). *Islam, Muslims and the Modern State. Case-Studies of Muslims in Thirteen Countries*. Macmillan Press LTD, Houndmills, Basingstoke and London: 1996. h: ix.

⁸ Bahtiar Effendy. *Islam and The State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003, hal: 202.

⁹ Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. *Draft Kronologi Sejarah PKS*. Jakarta, 2008.

sementara partai-partai politik lainnya di Pemilu 2009 baik nasionalis maupun Islam pada umumnya mengalami penurunan suara yang cukup signifikan.¹⁰

Grafik I.1. Perolehan Kursi PKS di Pemilu 1999 - 2009



Sumber: www.kpu.go.id

Gejala kebangkitan partai Islam atau berbasis massa Islam juga terjadi dewasa ini di Turki. Hal itu nampak dari kemenangan AKP yang signifikan dalam Pemilu 2002-2007. Kemenangan AKP mengejutkan kehidupan politik di Turki dewasa ini karena untuk pertama kalinya dapat terbentuk pemerintahan tanpa harus berkoalisi dan dipimpin oleh partai politik berhaluan Islam. Turki adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim namun sejak keruntuhan kekhalifahan Usmani di tahun 1924, menjalankan program sekularisasi politik. Konstitusi Turki juga melarang sebuah organisasi maupun partai politik menunjukkan nama atau simbol-simbol agama dalam politik. Sehingga itu tidak mungkin sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam karena berarti melanggar konstitusi. Oleh karena itu menurut Hakan Yavuz¹¹ kemenangan AKP dalam Pemilu 2002 merupakan pembuktian hilangnya kepercayaan rakyat pada kubu sekuler karena korup dan tidak mensejahterakan rakyat dan sekaligus restorasi partai politik berhaluan Islam.

Walaupun konstitusi sekuler di Turki tidak memungkinkan sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam, AKP secara implisit hadir sebagai partai politik berhaluan Islam bila ditinjau dari akar ideologisnya, aktivitas dakwah Islamnya, praktek cara hidup tokoh dan basis massanya Islami. Fakta historis yang sulit disangkal adalah bahwa AKP merupakan kelanjutan dari mata rantai gerakan Islam: *Milli Görüş* atau

¹⁰ <http://www.kpu.go.id>

¹¹ M.Hakan Yavuz. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: University Press, 2003, h: 257.

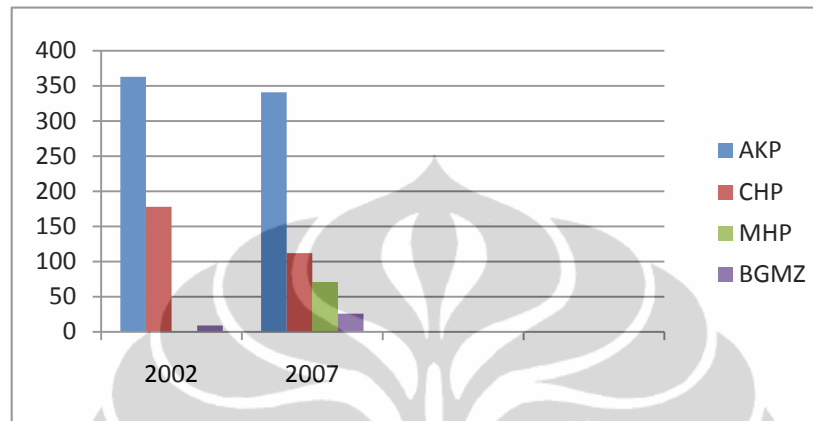
Pandangan Kebangsaan yang didirikan oleh Necmettin Erbakan. Dari gerakan tersebut pertama-tama lahir partai politik berhaluan Islam, MNP pada awal 1970-an yang tak lama kemudian dibubarkan. Erbakan mendirikan kembali *Millî Selâmet Partisi* (MSP) atau Partai Keselamatan Bangsa namun kembali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ia kemudian mendirikan *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan yang berhasil mengikuti Pemilu 1991 dan memperoleh 62 kursi dari 550 kursi. Pada Pemilu berikutnya yakni 1995, *Refah Partisi* pimpinan Erbakan bahkan memenangkan Pemilu, dengan perolehan kursi sebanyak 158 kursi dari 550 kursi dan Erbakan menjadi Perdana Menteri serta memimpin pemerintahan koalisi. Namun satu tahun kemudian yakni 1996 terjadi kudeta militer dan *Refah Partisi* dibubarkan. Partai politik baru segera dibentuk lagi yakni *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan dan mengikuti Pemilu 1999 serta masih memperoleh jumlah kursi yang cukup besar yakni 111 kursi dari 550 kursi, tetapi kembali terulang seperti pada 1996, *Fazilet Partisi* dibubarkan dan Erbakan dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Para penerus Erbakan mendirikan *Saadet Partisi* namun hanya memperoleh suara sebesar 2,5% sehingga tidak melewati *Parliamentary Threshold* (PT) sebesar 10%.¹²

Pada saat kader-kader Erbakan yang lain mendirikan *Saadet Partisi*, mantan Walikota Istanbul yang juga kader Erbakan yakni Recep Tayyip Erdogan mendirikan AKP pada 2001 dan langsung mengikuti Pemilu 2002. Di antara 18 partai yang berkompetisi di pemilu 2002 hanya 2 partai yang memenangkan kursi parlemen karena harus melewati ambang PT 10% dari suara nasional. AKP muncul sebagai pemenang dengan 34,26% suara atau setara dengan 363 dari 550 kursi di parlemen dan di tempat kedua *Cumhuriyetçi Halk Partisi* (CHP) atau Partai Rakyat Republik dengan suara 19,40% dan setara dengan perolehan 170 kursi. Sedangkan calon-calon anggota legislatif dari kelompok independen memenangkan 9 kursi. AKP pun dapat membentuk pemerintahan tanpa koalisi di 2002 untuk pertama kalinya sejak dua dekade dengan berhasil memenangkan jumlah kursi hampir dua pertiga dari 550 kursi karena partai politik yang tidak melewati PT 10% kehilangan kursinya di parlemen pusat. Pada Pemilu berikutnya yakni 2007 perolehan suara AKP bahkan meningkat menjadi 47%, walaupun perolehan jumlah kursi malah menurun menjadi 341, karena *Milliyetçi Hareket Partisi* (MHP) atau Partai Kewajiban Nasional yang di Pemilu 2002 tidak melewati PT 10%

¹² Sumber: CD dari *Türkiye İstatik Kurumu* (Badan Statistik Turki) tahun 2009.

di Pemilu 2007 berhasil melewati PT 10% sehingga menempatkan pula wakil-wakilnya di parlemen.¹³

Grafik I.2. Perolehan Kursi AKP pada Pemilu Umum (2002 dan 2007) di antara partai-partai lain.



Keterangan: BGMZ (*Bağımsız*), CHP (*Cumhuriyetçi Halk Partisi*), MHP (*Milliyetçi Hareket Partisi*), AKP (*Adalet ve Kalkınma Partisi*). Sumber: CD dari *Türkiye İstatik Kurumu* di Turki.

I.2. Pokok Permasalahan

Reformasi 1998 menandai pula bangkitnya kekuatan Islam dalam dinamika politik di Indonesia dengan bermunculannya partai-partai politik Islam. Di Pemilu pertama setelah Reformasi yakni 1999, gabungan perolehan suara 10 partai politik Islam yang menempatkan wakilnya di parlemen berjumlah 42%. Namun di Pemilu 2004 hanya 6 partai politik Islam yang berhasil masuk ke parlemen dan gabungan perolehan suaranya pun mengalami penurunan yakni menjadi 39%. Bahkan selanjutnya di Pemilu 2009 hanya tinggal 4 partai politik Islam dan berbasis massa Islam yang berhasil menempatkan wakilnya di parlemen dengan gabungan perolehan suara sebesar 24%. Padahal sejatinya kontribusi parpol Islam di Indonesia adalah sebuah keniscayaan karena Islam merupakan salah satu kekuatan politik di Indonesia sebagaimana Herbert Feith juga menyebutkan bahwa dalam tradisi politik di Indonesia sejak Pemilu 1955 ada lima aliran politik dan Islam adalah salah satunya.¹⁴

Sementara di Turki, yang seperti halnya Indonesia juga merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, sejak awal 1970 partai-partai politik berhaluan Islam yang

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://benangmerah1.wordpress.com/2011/02/27/5-pemikiran-politik-indonesia-oleh-herbert-faith/>

dilahirkan dari gerakan Islam *Milli Gorus* (Pandangan Kebangsaan) telah mengalami tahapan jatuh bangun, karena setiap kali berdiri selalu dibekukan oleh kelompok sekuler di Turki yang direpresentasikan oleh militer dan Mahkamah Konstitusi (MK) serta elit pemerintahan yang sedang berkuasa, bahkan ketika pada 1995 RP menang dan memimpin koalisi juga dikudeta oleh militer kemudian dibekukan dan Erbakan dilarang berpolitik dengan dakwaan mengancam konstitusi sekuler dengan menyebarkan paham Islam. Ketika pada 2001 *Fazilet Partisi* pecah menjadi dua parpol yakni *Saadet Partisi* dan AKP, maka AKP pun memperoleh kemenangan pada Pemilu 2002 dan memimpin pemerintahan tanpa harus koalisi. Ketua Umum AKP yakni Recep Tayyip Erdogan menjadi Perdana Menteri pada tahun 2003 serta Abdullah Gul menjadi Presiden pada tahun 2007.

Hal yang menjadi pokok permasalahan bagi penulis dalam konteks politik di Indonesia adalah situasinya yang berbanding terbalik dengan di Turki. Di Indonesia justru terjadi kecenderungan penurunan perolehan suara parpol-parpol Islam dari Pemilu ke Pemilu sehingga dikhawatirkan bila tidak ada parpol Islam yang berhasil masuk ke parlemen, maka berarti tidak ada yang merepresentasikan salah satu unsur kekuatan politik di Indonesia yakni Islam dan hal itu membahayakan keseimbangan demokrasi di Indonesia. Partai politik adalah institusi penting dalam sistem demokrasi sehingga partai politik yang sehat akan mempengaruhi pula kualitas demokrasi. Oleh karena itu cukup banyak yang berharap pada PKS dan salah satu di antaranya adalah Greg Fealy yang mengatakan bahwa PKS adalah partai politik Islam di Indonesia yang masih memiliki sistem kaderisasi yang sistemik dan menjaga kualitasnya sehingga sangat penting bagi kesehatan demokrasi di Indonesia.¹⁵

Karakter ideologis PKS dan AKP memiliki kesamaan dapat memadukan nilai-nilai Islam dengan wacana global demokrasi sehingga diyakini membuat mereka bertahan. Persamaan lainnya adalah fakta bahwa kedua partai politik ini berasal dari gerakan dakwah Islam yang memiliki ideologi dari Islamis menjadi Pos-Islamis dan bertujuan menciptakan *good governance* dan *clean government* yang terbuka pada wawasan global. Selain itu juga memiliki basis massa utama yang sama yakni kelas menengah di perkotaan. Akan tetapi hal yang tak bisa disangkal adalah perbedaan hasil antara PKS dan AKP. PKS masih merupakan partai menengah yang berusaha tetap eksis, sementara AKP sudah *leading* dan saat ini menjadi *the ruling party*. Gerakan Tarbiyah yang didirikan Hilmi Aminuddin di tahun 1980 baru melahirkan Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998 atau berjarak 18 tahun sementara

¹⁵ Greg Fealy dalam presentasinya di acara Bedah Buku: PKS dan kembarannya: Bergiat jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki. Bedah Buku ini diselenggarakan di FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012.

Milli Gorus didirikan Necmettin Erbakan pada tahun 1969 dan satu tahun kemudian sudah mendirikan *Milli Nizhom Partisi* (Partai Keteraturan Bangsa). Perbedaan usia sejarah dan pengalaman politik kedua gerakan Islam tersebut turut menjadi sebab kesenjangan antara PKS dan AKP.¹⁶ Demikian pula bila dilihat dari aspek kepemimpinan ada perbedaan antara AKP dengan PKS. AKP memiliki figur sentral Erdogan yang dikenal keberhasilannya ketika menjadi Walikota Istanbul sehingga sangat berpengaruh pada perolehan suara AKP. Sementara PKS tidak memiliki figur sentral yang sangat dikenal di skala nasional dan figur sentral di internal PKS yakni pendirinya Hilmi Aminuddin lebih menempatkan diri sebagai *King-maker* sehingga tidak dikenal luas di masyarakat.

Menurut Duverger untuk membandingkan antara partai-partai politik tidak cukup hanya dari satu aspeknya saja misalnya organisasinya, melainkan harus dilihat pula aspek ideologi, basis massa, sistem rekrutmen kepemimpinan dan lain-lain.¹⁷ Demikian pula Sigmund Neumann menyebutkan ada beberapa unit analisis yang lazim dipbandingkan bila melakukan studi banding antar partai-partai politik yakni aspek ideologi, basis sosial dan kepemimpinan.¹⁸ Penulis disertasi pun mengambil aspek-aspek tersebut di atas sebagai unit-unit analisis untuk membandingkan PKS dengan AKP secara lebih detail dan mendalam dimulai dari aspek ideologi.

Ideologi menurut Ian Adams merupakan konsep yang terdiri dari seperangkat kepercayaan (*beliefs*) politik tentang bagaimana masyarakat seharusnya dibentuk. Ideologi juga memiliki nilai-nilai (*values*) dan menawarkan visi masyarakat ideal yang akan menegakkan nilai-nilai tersebut. Selain itu ideologi mengarahkan pula tindakan politik berdasarkan nilai-nilai ideal yang diyakini dan tujuan yang diperjuangkan sehingga memberi arti identitas dan tujuan (*goals*) tertentu pada yang mengikutinya.¹⁹ Untuk membandingkan antara ideologi PKS di Indonesia dengan ideologi AKP di Turki penulis menggunakan teori Neo-fundamentalis Olivier Roy, Islamis Greg Fealy dan Pos-Islamis Asef Bayat. Bagaimana aspek keyakinan, nilai dan perilaku politik partai-partai politik yang

¹⁶ Wawancara dengan Anis Matta, Sekjen PKS. Senin 22 Februari 2010, pukul 14.00-14.30 WIB, di gedung DPR Jakarta.

¹⁷ Maurice Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (edisi terjemahan). Editor: Afan Gaffar. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984, h: 10.

¹⁸ Miriam Budiardjo (ed.) *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia, 1982, h: 14.

¹⁹ Ian Adams. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Penerbit CV. Qalam, Yogyakarta, 1993, h: 6.

didasari ideologi Islamis yang kemudian bertransformasi ke Pos-Islamis mempengaruhi kemenangan Pemilu PKS di Indonesia dan AKP di Turki.

Globalisasi telah menyebarkan “Islamic Revival” pasca runtuhnya Imperium Turki Utsmani dalam bentuk Islamisme atau Islam politik yang pada awalnya berupa gerakan dakwah dan sosial namun kemudian membentuk partai politik Islamis. Sebagian gerakan Islam mengalami trauma karena tokohnya dibuang atau dipenjara sehingga kemudian menjauhkan diri dari politik. Demikian pula gerakan Islam Hizbut Tahrir (HT) yang menganggap demokrasi adalah sistem kafir sehingga HT tidak mau masuk ke dalam sistem demokrasi. Namun kelompok Islamis yang berbalik mundur ke Neo-fundamentalis merupakan kelompok minoritas, sementara mayoritas atau arus utama memilih tetap berjuang di jalur politik dan bertransformasi dari partai Islamis menjadi partai Pos-Islamis. Transformasi tersebut dianggap mampu membuat partai-partai politik Islam bertahan atau bahkan unggul dalam sistem demokrasi yang kompetitif.

Asef Bayat menjelaskan bahwa AKP di Turki dan PKS di Indonesia menganut Pos-Islamisme. Berbeda halnya dengan Islamisme yang memaksakan *Islamic-State* atau teokrasi, Pos-Islamisme menolak sekularisme yang memusuhi agama, namun juga menolak gagasan teokrasi. Bayat juga menyatakan bahwa revolusi di Arab adalah sebuah Revolusi Pos-Islamis karena walaupun *an-Nahdah* (gerakan Kebangkitan) di Tunisia dan Ikhwanul Muslimin di Mesir terlibat di dalam revolusi Arab tersebut, kelompok-kelompok Islamis tersebut tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya yang menggerakkan revolusi tersebut dan mereka juga tidak mendorong terbentuknya teokrasi atau Negara Islam seperti di Iran.²⁰ Berikut tabel komparasi antara ideologi Neo-fundamentalis, Islamis, Pos-Islamis:

²⁰ Noorhaidi, peneliti dari UIN, Jakarta juga berpendapat bahwa Revolusi di Mesir dan Tunisia digerakkan orang-orang muda yang pengorganisasian dan ideologinya tak terlalu jelas dan berkumpul karena ajakan melalui jejaring di media sosial dan karena sama-sama menginginkan negara lebih memberi ruang kebebasan berpendapat, menyingkirkan kesewenang-wenangan rezim, menghapus korupsi dan berharap kehidupan lebih baik dan lapangan pekerjaan. Ikhwanul Muslimin (IM), juga tidak bisa mengklaim revolusi di Mesir sebagai murni revolusi kelompok tersebut. Pos-islamisme merupakan sintesis antara revitalisasi Islam yang dikembangkan oleh kelompok Islamis dengan komunikasi massa yang dimungkinkan oleh internet dan telepon seluler sehingga Muslim di Indonesia akan semakin toleran, dewasa dan matang, karena sudah terbiasa dengan perbedaan dengan syarat demokrasi tetap dipertahankan.

Tabel I.1. Komparasi antara Neo-fundamentalisme, Islamisme dan Pos-Islamisme

Neo-fundamentalisme	Islamisme	Pos-Islamisme
<p>Neo-fundamentalisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam yang secara parsial mengkhususkan pada pemurnian tata cara ritual peribadatnya saja dan menjauhi politik (apolitis dan anti demokrasi)</p>	<p>Islamisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama dan mengajarkan tentang <i>syumuliyatul Islam</i> yakni bahwa tidak ada satu aspek kehidupanpun yang tidak tersentuh aturan Islam.</p>	<p>Pos-Islamisme adalah juga sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam dan juga mengajarkan tentang <i>syumuliyatul Islam</i> yakni bahwa ajaran Islam meliputi pula semua aspek kehidupan.</p>
<p>Neo-fundamentalisme merupakan sebuah aliran pemikiran hasil gabungan dari westernisasi, individualisme, kesenjangan antargenerasi, krisis sosial dan sikap keberagamaan yang emosional, sehingga tidak menekankan aspek intelektualisme.</p>	<p>Islamisme merupakan gerakan global yang berupaya mewujudkan negara Islam (<i>Daulah Islamiyah</i>) atau teokrasi melalui kontestasi di dalam sistem demokrasi di negaranya masing-masing. Kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir haruslah terwujudnya <i>Islamic State</i> dan tegaknya syariah Islam.</p>	<p>Pos Islamisme juga merupakan gerakan global yang menekankan aspek substantif sehingga menganggap <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Pos-Islamisme mengusung konsep masyarakat Madani.</p>
<p>Neo-fundamentalisme merupakan gerakan yang bersifat global menolak baik budaya Muslim yang dianggap bid'ah maupun budaya Barat modern yang dianggap sesat.</p>	<p>Kelompok Islamis menyuarakan pesan-pesan moral secara eksplisit dalam bentuk jargon-jargon politik. Mereka dianggap cukup eksklusif dan sulit menerima perbedaan.</p>	<p>Kelompok Pos-Islamis menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktivis dan pemimpinya.</p>
<p>Kelompok Neo-fundamentalis dianggap paling eksklusif dan paling sulit menerima perbedaan. Mereka bergerak dalam skala internasional dan mengedepankan <i>transnational-ummah</i> serta menolak demokrasi karena dianggap sistem kafir.</p>	<p>Kelompok Islamis menerima demokrasi dan melakukan perjuangan politik melalui kontestasi Pemilu</p>	<p>Kelompok yang mengusung Pos-Islamis paling inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan keberagaman.</p>
<p>Contohnya adalah Hizbut Tahrir (berpusat di Yordania), dan Salafiy (Saudi Arabia)</p>	<p>Islamisme diinisiasi oleh gerakan Islam <i>mainstream</i> Ikhwanul Muslimin (IM) Contoh kelompok-kelompok Islamis adalah gerakan Tarbiyah di Indonesia yang menjadi PK, gerakan Milli Gorus menjadi Partai Refah yang Islamis, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia. <i>Front Islamic du Salut</i> (FIS)</p>	<p>Kelompok Pos-Islamis menerima demokrasi dan mengikuti Pemilu</p>
		<p>Partai-partai politik Islamis tersebut (AKP, PKS, FIS) kemudian berevolusi menjadi partai Pos-Islamis di awal abad ke-21.</p>

Kemudian variabel yang juga diperbandingkan adalah aspek organisasi dengan menggunakan teori Maurice Duverger tentang tipologi struktur organisasi yakni model *caucus*, *branch*, *cell* dan *militi*.²¹ Bila *branch* yang merekrut anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya dan bersifat otonom dan desentralistik²², maka model *cell* yang lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya dan bersifat sentralistik karena diarahkan oleh pusat.²³

Aspek basis massa adalah variabel berikutnya yang diperbandingkan dengan menggunakan teori Lipset tentang karakteristik *middle class* atau kelas menengah berikut indikator-indikatornya yang menurutnya memiliki korelasi dengan proses demokratisasi di suatu negara²⁴ yakni sebagai berikut: kemakmuran, industrialisasi, urbanisasi dan tingkat pendidikan. Huntington berpendapat perkembangan ekonomi memang mendorong meningkatnya jumlah kelas menengah, karena terjadinya mobilitas vertikal seiring dengan meningkatnya strata pendidikan dan taraf hidup. Demokrasi akan menjadi baik bila yang menjadi mayoritas adalah kelas menengah hasil proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Gerakan-gerakan demokratisasi dalam gelombang ketiga tidak dipimpin oleh kaum tuan tanah, petani atau buruh industri, melainkan oleh kelas menengah perkotaan.²⁵

Aspek basis massa yang dimiliki partai juga dianalisis berdasarkan teori *voting behavior* Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt yang menyebutkan adanya mazhab sosiologi dan mazhab psikologis. Dalam mazhab sosiologis, perilaku pemilih didasari oleh aspek-aspek sosiologis berupa kedekatan geografis, ras dan suku bangsa, sedangkan dalam mazhab psikologis pilihan ditentukan atas dasar kedekatan emosional yang terbangun dari interaksi. Kedua jenis basis massa yang memilih berdasarkan pertimbangan sosiologis dan psikologis umumnya berasal dari kalangan menengah bawah dan kelas bawah.²⁶ Sementara basis massa yang menurut Franz Urban Pappi menggunakan mazhab pilihan rasional (*rational choice theory*) pada umumnya berasal dari kelas menengah atas. Jenis pemilih atau

²¹ Alan Ware. *Political Parties and Party System*. Oxford University Press, New York, 1999, h: 95.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, h: 96.

²⁴ Seymour Martin Lipset. *Political Man, Basis Sosial Tentang Politik* (ed. Terj). Pustaka Pelajar, 2007. h: 24-25.

²⁵ Samuel P. Huntington. *Op.Cit.* h: 81

²⁶ Lihat Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 228, 238.

komunitas pemilih yang didasarkan pada alasan rasional dan cenderung pragmatis disebut sebagai *reasoning voter*.²⁷

Selanjutnya sistem rekrutmen anggota berdasarkan teori Duverger yang pada saat menguraikan tipologi partai politik juga melihat sistem rekrutmennya yakni model *caucus* yang sangat selektif dalam rekrutmen.²⁸ Kemudian model *branch* yang disebut juga partai massa (*a mass membership party*) karena merekrut anggota secara luas dari beragam segmen dan kelas sosial (*hybrid*) sehingga terjadi 'hibridisasi/percampuran' antara *supporter*, *member* dan *activist* di partainya.²⁹ Berikutnya Duverger menyebut model *cell* yang lebih menekankan aspek kualitas rekrutmen dibanding kuantitasnya.³⁰ Serta *militia*, yang model jenjang keanggotaannya mengikuti alur karir militer.³¹

Terkait dengan aspek kepemimpinan digunakan teori elit Pareto (1848-1923) yakni sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas untuk berada di lingkaran kekuasaan sosial dan politik. Elit adalah orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi di masyarakat dan diyakini Pareto pada umumnya berasal dari kelas yang sama yang mempunyai keunggulan di dalam bidang matematika, musik, karakter moral dan sebagainya. Menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas yakni lapisan atas yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan lapisan bawah yaitu non-elit.³² Bila Pareto membagi elit ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), maka Mosca memperkenalkan konsep “sub-elit” yang terdiri dari kelompok kelas menengah baru yakni para pegawai sipil, manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa. Mosca menilai konsep “sub-elit” merupakan elemen vital dalam masyarakat dan tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas para sub-elit ini sangat berpengaruh pada stabilitas politik tergantung”³³

Teori Max Weber tentang jenis-jenis otoritas kepemimpinan yakni otoritas kepemimpinan kharismatis, tradisional dan legal formal juga digunakan untuk membandingkan aspek kepemimpinan di PKS dan di AKP. Kepemimpinan disebut

²⁷ Franz Urban Pappi dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 255-56

²⁸ Alan Ware. *Op. Cit.* h: 95.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*, h: 96.

³¹ Maurice Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (edisi terjemahan). Editor Afan Gaffar. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984. h: 10.

³² SP. Varma. *Teori Politik Modern*. PT RajaGrafindo. Jakarta, 1995. h: 202.

³³ *Ibid.*, h: 206.

kharismatis jika pengabsahannya tersebut berasal dari kekuatan supra natural yang diyakini para penganutnya dan kepemimpinan berotoritas tradisional terjadi manakala memperoleh pengakuan dari para pendahulu dan masyarakatnya. Sedangkan kepemimpinan yang berotoritas legal formal, pengabsahannya berasal dari pengakuan di depan hukum karena dipilih oleh yang memiliki hak memilih melalui koridor aturan yang sudah dibakukan.³⁴

Aspek keenam yang menjadi variabel yang diperbandingkan adalah aspek strategi dan menurut Scruton strategi dimaksudkan bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan melainkan juga untuk memastikan bahwa kemenangan tersebut dapat dipertahankan. Selain itu strategi lebih menekankan aspek penggalian kekuatan-kekuatan potensial secara optimal dibandingkan penggunaan kekuatan secara efisien.³⁵ Hal tersebut di atas nampak dalam strategi *vernacular politics* (politik lokal atau kedaerahan) yang digambarkan oleh Jenny B. White sebagai bentuk kerjasama jejaring masyarakat lokal dengan partai politik, pemerintahan lokal dan lembaga-lembaga *civil society* dalam sebuah gerakan sosial politik yang berkesinambungan. *Vernacular politics* adalah sebuah proses politik akar rumput yang otonom dan menggabungkan beragam pelaku yang memiliki beragam ideologi.³⁶ Dengan kata lain, istilah *vernacular politics* mengacu pada metode mobilisasi yang didasari oleh jejaring personal yang longgar dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi baik lokal maupun nasional serta kekuatan politik nasional. Partai politik kemudian mendapatkan kepercayaan berdasarkan penguasaan pada jejaring sosial yang relatif independen. Menurut White kesuksesan partai-partai Islam pada tahun 1990-an di Turki bukan karena mengandalkan pesan-pesan agama, melainkan lebih pada kemampuan organisasinya menggabungkan beragam segmen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam proses politik nasional.³⁷ Namun selain enam variabel di atas yang merupakan faktor internal sebuah partai politik, penulis menganggap perlu juga membandingkan faktor eksternal yang melingkupi PKS dan AKP berupa faktor perbedaan budaya bangsa dan budaya politik di Indonesia dan Turki, sedangkan perbedaan situasi sosial politik diuraikan di dalam Bab II.

Jarak geografis Indonesia dan Turki berjauhan, namun keduanya sama-sama mulai mengembangkan dirinya menjadi aktor di pentas politik dunia dan menjadi anggota G-20.

³⁴ Ratmond Aron. *Main Currents in Sociological Thought. Volume II Durkheim, Pareto, Weber*. Anchor Books Doubleday and Company, New York. 1970. h: 286.

³⁵ Thomas C. Shelling. *The Strategy of Conflict*. Lihat dalam The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought karya Roger Scruton. h: 666-667.

³⁶ Jenny B. White. *Islamist Mobilization in Turkey, A Study in Vernacular Politics*. University Washington Press. Amerika, 2002. h: 273.

³⁷ *Ibid.*

Kedua negara ini berperan strategis terutama di kawasan dan negara-negara Muslim. Baik Indonesia maupun Turki sama-sama sedang membangun prinsip-prinsip demokrasi, memiliki *civil society* yang kuat dan kebebasan pers. Keduanya merupakan negara berpenduduk mayoritas Muslim namun menolak konsep negara agama. Walaupun cukup banyak kesamaan antara Indonesia dan Turki, pada saat penelitian didapatkan pula fakta ada perbedaan-perbedaan peradaban dan budaya.

Indonesia dan Turki sebagai dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam yang merupakan salah satu peradaban mayor kontemporer di samping peradaban Tionghoa, Jepang, Hindu, Ortodoks dan Amerika Latin. Namun penyebaran Islam membuat peradaban Islam yang berasal dari Semenanjung Arabia pada abad 7 Masehi terbentang dari dunia Arab, Afrika Utara, Semenanjung Iberia (Andalusia, Spanyol) hingga ke Asia Tengah, Anak Benua dan Asia Tenggara. Menurut Samuel Huntington, penyebaran Islam menyebabkan peradaban Islam memiliki beberapa sub peradaban yang terdiri dari kebudayaan Arab, Turki, Persia dan Melayu.³⁸ Sub-sub peradaban Islam tersebut memiliki pula perbedaan satu sama lain termasuk antara kebudayaan Islam Turki dan kebudayaan Islam Melayu dengan Indonesia termasuk di dalamnya. Perbedaan sub peradaban sekaligus budaya antara Islam di Indonesia dan Turki diyakini berpengaruh pula pada perbedaan hasil pemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009) dan AKP di Turki (2002-2007).

Cihangir Isbilir³⁹, ketua UNIW menyatakan bahwa budaya Islam di Turki memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan lama. Islam di Turki menurut Isbilir berakar kuat di masyarakat dalam bentuk jama'ah-jama'ah dan tarekat-tarekat, sehingga sekularisasi yang dicanangkan Mustapha Kamal sejak 1923 tidak pernah membuat rakyat Turki menjadi benar-benar sekuler. Selain itu, perbedaan dasar lainnya ialah Indonesia pernah dijajah oleh negara-negara Barat seperti Portugal, Inggris dan Belanda, sementara Turki tidak pernah dijajah bahkan pernah menjadi imperium besar semasa *Ottoman Empire* atau Kekhilafahan Turki Utsmani. Perbedaan tersebut membawa dampak pada karakter bangsa Indonesia dan Turki yang menjadi berbeda pula.

Perbedaan budaya juga berpengaruh pada perbedaan budaya politik Indonesia dan Turki sebagaimana dikatakan Julie Chernov Hwang⁴⁰ dari Goucher University, AS bahwa budaya politik di Indonesia dan di Turki berbeda. Di Turki, unsur feodalisme di dalam

³⁸ Samuel P. Huntington. *Op. Cit.* h: 48-49

³⁹ Wawancara dengan Cihangir Isbilir pada penutupan Youth Camp di Bandung, Sabtu 26 Januari 2010. Pukul 16.00-16.15 WIB.

⁴⁰ Wawancara dengan Prof. Julie Chernov Hwang. Jakarta, MD Building. Rabu 20 Januari 2010.

budaya politiknya menjadi jauh berkurang di masa pemerintahan AKP dibanding masa pemerintahan sekuler CHP seperti nampak dalam orasi kemenangan Erdogan “Kami memimpin untuk melayani kalian, wahai rakyat Turki dan bukan untuk memerintah kalian”⁴¹. Sementara di Indonesia unsur feodalisme masih cukup kental mewarnai budaya politik Indonesia yang berasal dari model aristokrasi Jawa yakni pemimpin harus dihormati dan dilayani. Konteks budaya politik yang sangat berbeda ini membuat PKS menghadapi tantangan yang berat bila ingin mengejar ketertinggalannya dibandingkan AKP.

Ibnu Khaldun⁴² dalam bukunya *Muqaddimah* menggambarkan secara historis proses terbangunnya masyarakat, kota dan negara sejak dari bangsa Badui yang nomaden sampai masyarakat Madani yang *civilized*, ber peradaban.⁴³ Menurut Ibnu Khaldun peradaban dipengaruhi oleh wilayah geografis dan dunia dibagi menjadi 7 daerah iklim yang membentang dari Timur ke Barat dengan lebar yang sama namun panjang yang berbeda-beda. Daerah-daerah yang dianggap mendekati kesempurnaan karena kondisi iklim dan tanahnya yang bagus sebagai awal peradaban adalah Syria, Turki sampai Irak karena berada pada posisi paling tengah (3, 4 dan 5) bila ditinjau dari segala jurusan, kemudian meluas hingga Saudi Arabia, Maroko, Yaman, Irak, India, China, Spanyol, Eropa, Romawi, Yunani. Tanahnya tetap sehingga diyakini hampir tidak pernah ada gempa, dibandingkan Jepang, Asia dan Amerika. Selain daerah iklim berpengaruh pula ke warna kulit dan pada karakter manusia.⁴⁴

Menurut Ahmad F. Syaifuddin, guru besar antropologi UI, bila dilihat dari perspektif antropologis memang banyak temuan arkelogis yang menunjukkan asal-usul peradaban di daerah-daerah yang sekarang ini Iran, Irak, Yordania, termasuk Turki dan sedikit wilayah Mesir. Peradaban kuno berada di satu daerah yang subur membentuk bulan sabit (*fertile crescent*) yang sangat kaya dengan peninggalan-peninggalan sehingga membuat orang-orang di daerah tersebut sangat bangga. Salah satu *cultur revival* adalah munculnya kebanggaan (*pride*) tradisi. Kebanggaan akan tradisi ini kemudian bercampur dengan keyakinan keagamaan sehingga terjadi sintesis atau peleburan antara nilai-nilai tradisi keunggulan sebagai bangsa yang memiliki banyak peninggalan peradaban pertama dengan nilai-nilai keislaman yang datang berikutnya. Keberadaan situs arkeologis *Catalhuyuk* di Turki bagian

⁴¹ Anthony Shadid, New York Times, Rabu, 1 Juni 2011.

⁴² Ibnu Khaldun yang memiliki nama asli Waliudin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan lahir di Tunisia, Afrika pada 1 Ramadhan 732 H/ 27 Mei 1332 M. Jadi Ibnu Khaldun hidup di abad ke-14.

⁴³ Ibnu Khaldun. *Muqaddimah*, (terj. Ahmadie Thoaha), Tim Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986

⁴⁴ *Ibid.*,

Selatan menurut Ahmad Syaifuddin membuktikan bahwa manusia telah mulai menetap karena ketersediaan sumber-sumber makanan dan juga memelihara hewan sejak 1,2 juta tahun yang lalu sehingga meletakkan dasar-dasar bagi sebuah masyarakat yang beradab atau *civilized society*. Salah satu ciri masyarakat berperadaban kuno menurut Ahmad Syaifuddin adalah justru kesederhanaan.⁴⁵ Bila ditinjau dari segi peradaban dengan teori Ibnu Khaldun tersebut jelas ada perbedaan antara peradaban kuno Turki dengan peradaban Indonesia yang jauh dari pusat peradaban dunia.

Selain itu menurut Ahmad ada pula perbedaan dalam budaya keislaman di Indonesia dan di Turki. Budaya Islam di Turki yang jumlah penduduknya 99% Muslim menurutnya relatif homogen, terlebih lagi pernah menjadi pusat kekuasaan Islam di masa kekhilafahan Turki Utsmani atau *Ottoman Empire*. Sedangkan budaya Islam di Indonesia menurutnya sangat heterogen karena terdiri dari peradaban Jawa, Hindu dan Islam yang datang belakangan sehingga memunculkan istilah Islam abangan yang sinkretis antara nilai-nilai Jawa lokal, Hindu dan Islam. Hal tersebut juga menyebabkan adanya heterogenitas kultur politik Islam yang terfragmentasi karena karakter kelompok Islam yang berbeda-beda misalnya Muslim di Jawa saja terbagi atas kelompok santri, priyayi dan abangan sehingga membuat umat Islam di Indonesia sulit bersatu dalam satu payung politik Islam yang besar.⁴⁶

Bila dilihat dari pernyataan di atas jelas perbedaan dalam latar belakang peradaban dan budaya bangsa serta kultur politik kedua negara membawa dampak yang sangat menentukan perbedaan keberhasilan *electoral* PKS dan AKP. Sehingga faktor peradaban tinggi, kultur keislaman yang relatif homogen di Turki menjadi sebuah lahan yang baik bagi tumbuhnya partai politik berhaluan Islam yang modern seperti AKP. Sementara PKS tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang masih dalam proses menuju *civilized society* sehingga tidak mudah “menjual” program dan *platform*, karena hampir di setiap Pemilu yang lebih berperan adalah operasi intelijen dan serangan subuh sebelum pencoblosan di kotak-kotak suara dengan *money politics*. Akibatnya terhapuslah usaha edukasi konstituen yang dilakukan PKS melalui *permanent campaign*. Perbedaan tingkat peradaban, budaya dan kultur politik di Indonesia dan Turki sangat mempengaruhi kesenjangan hasil kemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dengan AKP (2002-2007).

Dalam perkembangannya, kesenjangan peradaban dan kultur politik juga berdampak pada perbedaan dalam budaya internal PKS dan AKP. Beberapa pengamat seperti

⁴⁵ Wawancara dengan Prof. Ahmad Fedyani Syaifuddin, staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Budaya dan Agama. Kamis, 21 April 2011, pukul 10.35-11.20 WIB.

⁴⁶ *Ibid.*,

Burhanuddin Muhtadi dan Greg Fealy menengarai adanya penurunan dalam budaya “Bersih” secara politis dan moralitas di elit PKS dengan menyebut kasus Misbakhun, Nunun istri Adang Darajatun, Kasus daging berjanggut di Kementrian Pertanian, terakhir tuduhan tersangka kasus mafia Anggaran di Banggar DPR RI, Wa Ode yang menyebut pula nama Tamsil Linrung dan Anis Matta. Menurut Greg Fealy, penurunan moralitas elit seperti itu belum terjadi di AKP. Oleh karena itu setelah penulis memilih aspek-aspek internal partai ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen dan kepemimpinan serta strategi politik sebagai unit analisis dalam studi banding antara PKS dengan AKP, disertai ini pun meneliti bagaimana aspek-aspek ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, model kepemimpinan dan strategi kedua partai politik tersebut mempengaruhi proses pemenangan Pemilu PKS dan AKP. Selain itu hal yang diteliti pula adalah mengapa perolehan suara AKP jauh lebih besar dibanding PKS dan terakhir yang tak kalah pentingnya adalah bahwa faktor eksternal berupa lingkungan sosial budaya politik kedua negara yakni Indonesia dan Turki turut mempengaruhi pemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009) dan AKP di Turki (2002-2007).

I.3. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana aspek-aspek internal PKS berupa ideologi Pos-Islamis (sejak 2004), model organisasi *cell*, basis massa kelas menengah Muslim konservatif, model *cell* dalam sistem rekrutmen anggota, model kepemimpinan kolektif dan strategi kampanye permanen melalui *vernacular politics* mempengaruhi perolehan suara PKS pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009. Demikian pula bagaimana aspek-aspek internal AKP yakni ideologi Pos-Islamis (sejak 2001), model organisasi *branch*, basis massa kelas menengah Muslim konservatif dan sekuler serta kelas bawah, model *hybrid* dalam sistem rekrutmen keanggotaan, model kepemimpinan personal karismatik dan ragam strategi yang tidak hanya mengandalkan kampanye permanen melalui *vernacular politics* mempengaruhi perolehan suara AKP sehingga menjadi *the ruling party* pada Pemilu 2002 dan 2007
2. Mengapa perolehan suara AKP di Turki (Pemilu 2002 dan 2007) jauh lebih besar dibanding PKS di Indonesia (Pemilu 1999, 2004 dan 2009)? Apakah perbedaan dalam jenis dan pemanfaatan keenam aspek internal yang diteliti di PKS dan AKP menyebabkan adanya kesenjangan tersebut.

3. Bagaimana aspek-aspek eksternal berupa konteks budaya dan politik nasional maupun internasional di Indonesia dan di Turki turut mempengaruhi kesenjangan keberhasilan antara PKS di Indonesia dan AKP di Turki.

I.4. Tujuan Penelitian

Disertasi ini dapat menjelaskan bagaimana aspek-aspek internal berupa ideologi, model organisasi, ragam jenis basis massa, model sistem rekrutmen anggota, model kepemimpinan dan jenis dan ragam strategi serta aspek-aspek eksternal mempengaruhi perolehan suara PKS di Indonesia pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 serta AKP di Turki pada Pemilu 2002 dan 2007. Kemudian disertasi ini dimaksudkan dapat pula mengungkapkan sebab-sebab kesenjangan antara perolehan suara PKS dan AKP di Pemilu. Akhirnya disertasi ini dapat menjelaskan bahwa formulasi yang tepat atau adanya kesesuaian antara ideologi tertentu dengan model organisasi, ragam jenis basis massa, model kepemimpinan serta jenis dan ragam strategi akan menyebabkan keberhasilan sebuah partai politik di Pemilu.

I.5. Signifikansi Penelitian

Dari segi akademis, penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemahaman yang lebih objektif dan komprehensif dan bukan hanya terkait pembahasan ideologinya saja, melainkan secara lebih spesifik menjelaskan keberhasilan dua partai politik Islam yang berasal dari kelompok Islamis setelah bertransformasi menjadi Pos-Islamis yakni PKS dan AKP di dua negara yakni Indonesia dan Turki. Selain itu penelitian ini diharapkan juga dapat menjelaskan rumus atau formula kemenangan AKP di Turki sehingga dapat menjadi model keberhasilan bagi partai-partai Islam atau berhaluan Islam lainnya. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan inspirasi bagi munculnya penelitian-penelitian serupa yang lebih mendalam dan komprehensif di masa mendatang.

I.6. Keterbatasan Penelitian

Kesulitan utama melakukan penelitian ini adalah “membuat jarak” dengan objek penelitian mengingat posisi penulis disertasi sebagai aktivis Gerakan Tarbiyah sejak awal 1980-an dan pengurus pusat di Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKS sejak awal berdirinya PK pada Agustus 1998 sampai saat penelitian ini (2009), sehingga sangat mungkin munculnya

subyektivitas sebagai *participant observer*. Oleh karena itu penulis selalu berusaha mengedepankan unsur obyektivitas dan meminimalisir *emotional touch* agar dapat menghasilkan sebuah studi politik yang objektif dan bebas dari bias pribadi penulis. Namun keterbatasan lain berupa faktor jarak antara Indonesia dan Turki diubah penulis menjadi kelebihan karena berhasil mengatasi kesulitan memperoleh data-data AKP dari sumber-sumber primer dengan melakukan penelitian lapangan selama dua kali di Turki dan mendatangi kantor-kantor AKP serta mewawancarai tokoh-tokoh AKP.

I.7. Kajian Literatur

Dari penelusuran kepustakaan didapati bahwa sebagian besar kajian mengenai PKS berkaitan dengan akar ideologis PKS saja. Belum ada studi yang mengelaborasi secara mendalam tentang PKS dalam hal bagaimana proses dan hasil implementasi ideologi tersebut dalam bentuk kinerja atau faktor-faktor yang membuatnya tetap bertahan dalam tiga Pemilu sejak 1999 hingga 2009. Terkait dengan studi komparasi PKS memang ada penelitian Sri Murniati yang membandingkan dengan PBB dan PPP namun itu selagi masih menjadi PK di tahun 2003 dan belum menjadi PKS.

Demikian pula terkait dengan penelitian tentang AKP, pada umumnya juga masih membahas ideologi AKP sebagai kelanjutan mata rantai partai-partai politik berhaluan Islam yang dilahirkan oleh Gerakan Dakwah *Milli Görüş* yang didirikan oleh Necmettin Erbakan. Dan latar belakang pembahasannya adalah pertarungan ideologi antara Islam dan sekulerisme.⁴⁷ Sejauh ini belum ada penelitian yang membandingkan antara PKS di Indonesia dengan AKP di Turki. Sehingga menjadi penting untuk diteliti adalah perolehan suara AKP yang jauh lebih besar dibanding PKS. Penelitian ini kiranya menjadi semakin penting saat ini karena perkembangan di dunia Islam menunjukkan bahwa Turki dan Indonesia akan menjadi dua poros penting yang merupakan wajah dunia Islam kontemporer dan karenanya dapat menjadi kiblat bagi perkembangan Islam di negara-negara Muslim lainnya.⁴⁸

Ada penelitian politik tentang PK oleh Aay Muhammad Furkon, namun hanya terkait dengan ideologisnya yakni bahwa ideologi PKS dipengaruhi oleh pemikiran Ikhwanul

⁴⁷ Sri Murniarti. *Conditions for Moderation: Unpacking the Inclusion Experience of Islamist Parties in Three Different Political Systems in Indonesia*. A thesis presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University, August 2008. h: 56.

⁴⁸ M.Hakan Yavuz. *Op. Cit.* h: 257.

Muslimin, khususnya pemikiran Hasan Al Banna.⁴⁹ Imdadun Rahmat, peneliti dari ormas Islam NU, mengkaji apakah keberadaan PKS akan memberikan kontribusi positif terhadap *nation state* dan pengembangan Pancasila sebagai ideologi Negara serta bukannya menyimpan *hidden agenda* sebagaimana yang dituduhkan. Menurut Imdadun PKS bukanlah fenomena politik baru di tanah air, karena dari segi pemikiran partai ini merupakan kelanjutan Masyumi yang dinilainya juga terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin.⁵⁰

Masih berupa penelitian tentang PK di saat belum menjadi PKS dilakukan juga oleh Sri Murniati untuk tesisnya di *College of Arts and Sciences of Ohio University* dengan judul: *Conditions for Moderation: Unpacking the Inclusion Experience of Islamist Parties in Three Different Political Systems in Indonesia*. Dari hasil penelitiannya disimpulkan bahwa usulan amandemen yang diajukan PK tidak banyak berbeda dari yang diajukan PBB; satu-satunya perbedaan adalah penolakan PK pada Piagam Jakarta. Sebenarnya kedua partai tersebut bersepakat dalam beberapa hal yakni tentang urgensi negara non-sekuler karena meyakini bahwa agama dan politik tidak dapat dipisahkan, dan bahwa kepercayaan-kepercayaan lokal bukanlah agama yang murni. Namun menurut Murniati, “*However, PK is more moderate than PBB.*”⁵¹

Ada pula peneliti-peneliti dari luar Indonesia yang membahas tentang PKS sejak masih berupa PK misalnya Robert W. Hefner dari Boston University. Pada saat membahas Islam dan masa depan perpolitikan Indonesia, Hefner mengulas pula tentang ideologi dan asal mula PK sebagai cikal bakal PKS. Hefner mengatakan bahwa kader PK, seperti halnya aktivis Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) memperlihatkan kecenderungan moderat dalam aktivitas gerakannya. PK memperlihatkan strategi yang moderat, walaupun komitmennya pada penegakkan nilai-nilai Islam membuatnya termasuk ke dalam kategori berideologi Islam konservatif.⁵²

Bila Hefner dan Hwang membahas saat masih berupa PK, maka peneliti dari Australia, Greg Fealy dan Anthony Bubalo meneliti saat PK sudah menjadi PKS. Fealy dan Bubalo menyatakan bahwa bentuk awal PKS adalah gerakan Tarbiyah yakni gerakan keagamaan yang muncul di awal 1980-an. Kemudian pada awal 1990-an gerakan ini mulai

⁴⁹ Aay Muhammad Furqon. *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Penerbit TERAJU, 2004. h: 124.

⁵⁰ Imdadun Rahmat. *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008. h: 90.

⁵¹ Sri Murniati. *Op. Cit.*

⁵² Robert W Hefner. *Islam in Indonesia's Political Future*. Project Asia, CAN, Alexandria, Virginia, 2002. h:34.

“menguasai” dewan mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi terbesar di Indonesia. Para aktivis Tarbiyah membentuk organisasi mahasiswa bernama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada bulan April 1998 yang ikut memainkan peran besar dalam demonstrasi besar-besaran yang melengserkan rezim ORBA pada Mei 1998. Setelah itu para pemimpin gerakan Tarbiyah ini mendirikan partai bernama PK dan mengikuti Pemilu 1999. Saat itu PK memiliki sekitar 60.000 anggota dan ketika pembentukan PKS diumumkan pada pertengahan 2003, partai ini telah memiliki lebih dari 300.000 anggota.⁵³ Fealy mengatakan bahwa PKS secara ideologis terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin yang sudah dikompromikan dengan nilai-nilai, situasi dan kondisi lokal di Indonesia serta terlihat lebih dekat dengan generasi muda Ikhwanul Muslimin yang membentuk *Hizb al-Wasat*, yang sama-sama menerima demokrasi dan pembaruan ekonomi.⁵⁴

Sementara itu Rachel Rinaldo dari Chicago University meneliti tentang keterkaitan antara ketaatan beragama seorang perempuan Muslim dan pemahamannya tentang Islam dengan kiprahnya di ruang publik. Rachel melakukan penelitian ini saat PK sudah menjadi PKS dan meneliti perempuan PKS yang dianggapnya mewakili kelompok Muslim modern serta membandingkannya dengan Solidaritas Perempuan (SP) yang disebutnya perempuan sekuler karena tidak memakai diskursus keagamaan sebagai legitimasi kiprahnya. Selain itu dibandingkan juga dengan perempuan di Rahima dan Fatayat (NU) yang dianggap mewakili kelompok Muslim tradisional namun kini sama-sama berkiprah di ruang publik. Kiprah perempuan di Solidaritas Perempuan (SP), Rahima, Fatayat (NU) dan PKS, betapapun ada perbedaan ideologis diyakini Rachel didorong oleh pengaruh yang luas dari kebangkitan Islam, meningkatnya ketaatan (*tadayyun sya’bi*/religiusitas masyarakat), orientasi ke arah modernitas dan terinspirasi nilai-nilai Islam untuk melakukan perubahan sosial. Temuan Rachel dalam penelitiannya adalah: *Pertama*, perempuan-perempuan dari empat kelompok ini sama-sama berasal dari kelas menengah bawah. *Kedua*, berkat pendidikan tinggi dan kemudian berkarir serta berpenghasilan meningkat menjadi kelompok kelas menengah modern yang taat. *Ketiga*, memiliki kemiripan gaya hidup terkait dengan status sosial mereka. Hampir semuanya lulusan universitas, memiliki mobil, televisi dan atribut-atribut kelas

⁵³ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan, 2007. h: 111.

⁵⁴ *Ibid.*, h:116.

menengah lainnya. *Keempat*, memiliki karir profesional namun tetap mementingkan keluarga serta pendidikan anak.⁵⁵

Selanjutnya, terkait dengan penelitian yang membahas tentang AKP, buku Marvine Howe⁵⁶ yang berjudul *Turkey, A Nation divided over Islam's Revival*, membicarakan akar ideologis AKP berupa Gerakan Islam Modern yang dikenal sebagai *Milli Görüş (National View)* dan digagas oleh Necmettin Erbakan. pada 1995. Howe menggambarkan Turki seolah berada di antara dua dunia yakni semangat tradisi dan keyakinan Islam yang sudah sangat mengakar di masyarakat dan Negara serta militer sebagai penjaga konstitusi sekuler. Howe mengatakan Turki terbelah di antara dua ideologi dan tradisi. Di satu sisi misalnya, Gulsen, seorang tokoh sekuler, menganggap *Islamic Revival* adalah ancaman yang membahayakan kelangsungan Republik Turki yang sekuler. Dan di sisi lain masyarakat mendukung partai berhaluan Islam tersebut meskipun setiap kali dibekukan karena sejak 1980-an partai ini menjanjikan perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Turki. Namun tetap saja militer dan Mahkamah Konstitusi yang mewakili kubu sekuler menghambat gerak langkah partai-partai berhaluan Islam tersebut.

Berikutnya adalah penelitian oleh Jenny B. White⁵⁷ yang walaupun diterbitkan sebagai buku pada tahun 2002, dilakukan sebelum AKP berdiri sehingga baru pada edisi revisi ia menambahkan bagian *postscript* berupa sedikit uraian tentang AKP yang intinya menegaskan keberhasilan AKP sudah diprediksikannya dalam buku tersebut. Sehingga White lebih banyak menguraikan strategi *Refah Partisi* berupa model politik: *vernacular politics* dan diperbandingkannya dengan cara-cara yang dilakukan oleh kubu sekuler dari CHP. White tidak lagi membahas apakah *civil society* adalah organisasi formal atau informal, otonom atau di bawah kontrol, atau apakah mobilisasi politis didasari agama memiliki tempat di dalam demokrasi modern. White menegaskan di *postscriptnya*, bahwa AKP sebagai kelanjutan mata rantai partai-partai berhaluan Islam meneruskan strategi *vernacular politics* yang sudah dilakukan secara baik oleh *Refah Partisi*.⁵⁸

Sedangkan penelitian tentang AKP itu sendiri antara lain dimulai oleh Yakan Yavuz dalam bukunya, *Islamic Political Identity in Turkey* dan itupun baru sebatas menguraikan sejarah latar belakang munculnya AKP. Menurut Yavuz sejarah Turki modern adalah sejarah

⁵⁵ Rachel Rinaldo. *Mobilizing Piety: Women, Islam, and the Public Sphere in Indonesia*. A dissertation Submitted to Faculty of the Division of the Social Science in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Chicago, August 2007. H: 300-302.

⁵⁶ Marvine Howe. *Turkey, A Nation divided over Islam's Revival*. Westview Press, Amerika Serikat, 2000. h: xii.

⁵⁷ Jenny B. White. *Op. Cit.* h: 273.

⁵⁸ *Ibid.*, h: 200.

pertarungan antara sekularisme Kemalis *versus* Islam. Buku ini menguraikan latar belakang yang memunculkan AKP yakni pertarungan ideologi sekuler yang menjadi konstitusi negara dengan nilai-nilai Islam yang mengakar di masyarakat. Namun buku ini belum menguraikan lebih jauh faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan AKP.⁵⁹

Seda Demiralp dan Todd A. Eisenstadt juga menguraikan eskalasi konflik sosial di Turki antara kubu sekuler dan kubu Islamis yang dianggap sebagai satu kesatuan, padahal menurut cara pandang konservatif sebelumnya kubu Islam terbagi menjadi radikal kiri, kiri tengah dan sebagian besar kanan tengah yang tergabung ke dalam kubu sekuler. Namun kebangkitan gerakan Islam yang berkembang sebagai kekuatan politik yang menantang rezim menyebabkan militer dan institusi sekuler lainnya kembali pada peran tradisionalnya yakni menjaga eksisnya negara sekuler dan kondisi *status quo*.⁶⁰ Buku Demiralp dan Eisenstadt ini juga menambah panjang buku yang menguraikan pertarungan kubu sekuler dan Islam serta fakta bahwa gerakan Islam yang mewujud dalam bentuk partai politik telah menjadi kekuatan yang nyata di Turki saat ini.

Penelitian yang termasuk terbaru tentang AKP, walau hanya dalam satu bab saja, ditulis oleh Vali Nasr di penghujung 2009 dengan judul: *Forces of Fortune: The Rise of The New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. Dalam bab 9 Vali Nasr mengulas tentang AKP sebagai contoh bangkitnya kelas menengah Muslim yang memiliki semangat keislaman melawan sekularisme dengan prestasinya di bidang ekonomi. Vali Nasr membahas secara rinci dinamika kebangkitan Islam di Turki yang dimulai dari Gerakan Islam modern yakni *Milli Görüş* yang dibangun oleh Necmettin Erbakan pada awal 1970 dengan partai berhaluan Islam modern dan moderat yang didirikannya yakni MNP dan kemudian MSP. Namun diceritakan pula bagaimana berturut-turut MNP, MSP, *Refah Partisi*, *Fazilet Partisi* dibubarkan baik oleh kudeta militer maupun lewat pembekuan oleh Mahkamah konstitusi karena dianggap berbahaya dan melanggar konstitusi negara: Sekularisme. Ketika *Fazilet Partisi* dibubarkan pada 2000, aktivis *Milli Görüş* terbagi ke dalam dua haluan yakni aliran konservatif yang tetap dengan arahan Erbakan mendirikan *Saadet Partisi* sedangkan yang progresif mendirikan AKP di bawah pimpinan Erdogan, salah seorang murid Erbakan yang mencoba berkompromi dengan kubu sekuler dan militer. Nasr membahas secara menyeluruh bangkitnya kelas menengah baru yang religius di dunia Islam dengan Turki sebagai salah satu contohnya, sehingga pembahasan tentang AKP masih sedikit sekali dan

⁵⁹ M.Hakan Yavuz. *Op.Cit.* h: 257.

⁶⁰ Seda Demiralp and Todd A. Eisenstadt. *Prisoner Erdogan's Dilemma and the Origins of Moderate Islam in Turkey*. Departement of Government American University, August 31, 2006, h: 1-3.

itupun diletakkan dalam mata rantai panjang partai-partai berhaluan Islam sejak awal 1970. Nasr belum membahas jati diri AKP secara utuh berikut faktor-faktor kemenangan AKP selain faktor basis massa kelas menengah yang didukung pengusaha-pengusaha Muslim serta kegagalan kubu sekuler menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Turki.⁶¹

Dari paparan kajian literatur di atas nampak bahwa studi tentang PKS dan AKP telah cukup banyak dilakukan para peneliti dalam dan luar Indonesia serta Turki, namun studi mengenai kedua partai politik Islam itu umumnya berkisar tentang asal muasal terbentuknya partai tersebut dan ideologi kedua partai tersebut. Walaupun studi-studi tersebut tentu saja bermanfaat untuk dapat memahami PKS dan AKP, sejauh ini belum ada yang secara khusus membandingkan antara PKS dan AKP, terutama tentang bagaimana kedua partai itu memperoleh keberhasilan dalam Pemilu di negaranya masing-masing. Serta mengapa pula ada perbedaan tingkat keberhasilan AKP dengan PKS.

I.8. Kerangka Teori

Untuk menganalisis kasus kemenangan PKS dalam Pemilu di Indonesia dan AKP dalam Pemilu di Turki, penelitian disertasi ini menggunakan kerangka teoritis faktor-faktor yang dimiliki oleh sebuah partai politik yakni ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi.

I.8.1. Partai Politik.

Alan Ware menganggap keberadaan partai politik dalam dinamika politik di negara modern adalah keniscayaan.⁶² Selain itu keberadaan partai politik juga penting karena merupakan institusi yang membawa rakyat mencapai tujuan bersama dengan cara menjalankan kekuasaan di dalam negara.

Definisi partai politik menurut Ware adalah:

*“A political party is an institution that (a) seeks influence in a state, often by attempting to occupy positions in government, and (b) usually consists of more than a single interest in the society and so to some degree attempts to ‘aggregate interests’.”*⁶³

⁶¹ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. Free Press, New York. 2009. H: 232-251.

⁶² Alan Ware. *Op. Cit.* h: 1.

⁶³ *Ibid.*, h: 5.

Partai politik adalah sebuah institusi yang mencari pengaruh dalam sebuah negara dengan cara merebut posisi-posisi di pemerintahan dan membawa lebih dari satu kepentingan di masyarakat serta berusaha mengagregasi kepentingan-kepentingan tersebut.

Definisi tersebut menekankan bahwa berada di pemerintahan merupakan sarana penting untuk memainkan pengaruh dan hal ini pula yang membedakannya dengan *pressure groups* (kelompok-kelompok penekan). Pada umumnya partai politik akan mengikuti Pemilu untuk menunjukkan realitas kekuatan politiknya.

I.8.2. Ideologi

Partai politik dipahami sebagai wadah yang dapat menghimpun orang-orang yang berpandangan politik sama dan dapat dibedakan satu dari yang lain berdasarkan ideologi yang dianutnya yang antara lain mengandung gagasan terkait tentang relasi antara negara dan masyarakat serta tentang peran negara. Klaus von Beyme sebagaimana dikutip oleh Ware: “*Over the longer term only parties based on an ideology have succeeded in establishing themselves*”, nampak menekankan pentingnya arti ideologi bagi sebuah partai politik dan menegaskan bahwa dalam kurun waktu panjang hanya partai-partai politik berbasis ideologi yang akan mampu bertahan lama. Oleh karena itu tidak heran bahwa studi perbandingan politik harus dimulai dengan melihat partai politik sebagai organisasi yang memiliki ideologi.⁶⁴

Ian Adams menyebutkan bahwa dewasa ini ideologi lebih dianggap sebagai konsep yang netral yakni konsep yang terdiri dari seperangkat kepercayaan (*beliefs*) politik untuk mengatur bagaimana masyarakat seharusnya dibentuk dan bagaimana memperbaikinya, tanpa memandang apakah ide itu benar atau salah, baik atau buruk. Ideologi juga berkenaan dengan nilai (*values*), yakni menawarkan visi tentang masyarakat ideal yang akan menegakkan nilai-nilai yang dianutnya tersebut. Selain itu ideologi mengarahkan pula tindakan politik, berisikan nilai-nilai ideal untuk diyakini, tujuan untuk diusahakan dan alasan untuk diperjuangkan. Dengan demikian, ideologi memberi arti identitas dan tujuan (*goals*) tertentu pada yang menganutnya.⁶⁵

Selanjutnya di era Reformasi, menurut Bahtiar Effendy walaupun banyak partai politik Islam yang muncul, tetap saja fenomena politik aliran di era Reformasi tidak sekuat di

⁶⁴ *Ibid.* h: 21.

⁶⁵ Ian Adams. *Op. Cit.* h: 6.

tahun 1950-an masa Orde lama (Orla). Mayoritas Muslim di Indonesia masih lebih memilih partai nasionalis, karena keseluruhan partai Islam hanya memperoleh 17,8 persen (87 kursi), jauh di bawah perolehan partai-partai nasionalis yakni 62,5 persen (290 kursi). Ketidakberhasilan partai-partai politik Islam memperoleh dukungan suara signifikan di Pemilu 1999 menurut Bahtiar Effendy paling tidak bisa dijelaskan dengan dua sebab sebagai berikut:

“First is the law of the argument that religious adherence will automatically be translated into political affiliation. Even when the aliran politics was at its height, religious sentiments could not entirely be used to marshal majority support. The unwillingness to accept this very fact has led many Muslim political practitioners to take Islam vis-à-vis politics for granted, instead for focusing their energies and potential on factors –not necessary related to programmes and substance –which will enable them to attract swinging as well as non-traditional voters. Secondly, even though it is a mistake to see Islam parties in the light of the past, the fact remain that the historical stigma still haunted the 1999 general elections. The inability of Islamic Parties to articulate themselves in a way which differed from other existing non-Islamic parties only intensified that stigma. Because of this, the mere existence Islam political parties would always be equated with the idea of Islamic state or the insertion of the shari’a into the country’s legal system. This sentiment hardly dies and is likely to continue in the foreseeable future of Indonesia’s political development.”

Pertama, ketidaktepatan argumen bahwa keyakinan pada agama tertentu secara otomatis pasti mengarahkan pada afiliasi politik tertentu. Bahkan ketika politik aliran sedang hangat-hangatnya, sentimen keagamaan ternyata juga tidak sepenuhnya dapat digunakan untuk meraih dukungan mayoritas. Ketidakmauan untuk menerima kenyataan tersebut telah membuat praktisi politisi muslim semata-mata hanya mengandalkan Islam dan bukannya memusatkan perhatian, energi dan potensinya (tidak harus berkaitan dengan program dan substansi) yang akan dapat memungkinkan mereka menarik *swinging voter* dan bukan pemilih tradisionalnya semata. **Kedua**, bahkan seandainya merupakan kesalahan melihat partai-partai Islam dengan perspektif masa lalu, faktanya tetap ada stigma historis yang menghantui di Pemilu 1999. Ketidakmampuan partai-partai Islam untuk mengartikulasikan diri mereka sendiri dengan cara yang berbeda dari partai yang bukan Islam hanya memperbesar stigma tersebut. Karena hal inilah partai politik Islam hanya akan selalu disamakan dengan gagasan Negara Islam atau menerapkan syariah Islam di dalam perundang-undangan dan hukum di Indonesia. Pendapat atau prasangka ini sulit hilang dan akan terus membayangi perkembangan politik Indonesia di masa mendatang.

Nurcholish Madjid juga beranggapan di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat kini lebih melihat substansi dari pada simbol. Oleh

karena itu selama partai-partai politik Islam tidak mampu mengartikulasikan gagasannya dalam perspektif kepentingan masyarakat luas, maka sangat sulit untuk menjadi kekuatan utama di Indonesia.⁶⁶

Dalam faktanya hal yang dituduhkan bahwa partai politik Islam identik dengan gagasan negara Islam dan hukum syariah tidak terbukti karena di semua *platform* partai-partai politik Islam di Indonesia tidak pernah dicantumkan gagasan negara Islam atau pemberlakuan syariah Islam, seperti diungkapkan Bahtiar Effendy sebagai berikut:

“If one cares to examine the written platform to any existing Islamic parties, one will find the idea of Islam as the basis of the state is hardly mentioned. During the transition to democracy period, no single Islamic party has ever publicly demonstrated its commitment to replacing Pancasila with Islam as the basis of the state. In fact, the idea of inserting the Jakarta Charter into Article 29 of the Constitution was entertained only after the parliamentary decision to amend the Constitution was taken in the MPR’s 1999 general assembly.”

Bila seseorang meneliti platform tertulis semua partai Islam sebenarnya tidak ada sama sekali gagasan Negara Islam. Selama masa transisi demokrasi tidak ada satu pun partai Islam yang menunjukkan komitmennya ke masyarakat bahwa mereka akan menggantikan dasar Negara: Pancasila dengan Islam. Dalam kenyataannya gagasan memasukkan kembali Piagam Jakarta di tahun 1999 ke dalam pasal 29 UUD 45 hanya sebentar mengemuka ketika ada keputusan mengamandemen UUD 45.

Oleh karena itu menurut Bahtiar Effendy kemunculan ideologi politik Islam sah saja karena dewasa ini secara substansial terjadi interaksi yang saling mempengaruhi antara aspek spiritual dan non-spiritual dengan mengutip pendapat Richard Falk bahwa dewasa ini *spiritually engaged politics* merupakan suatu keniscayaan.⁶⁷

Sebagai pisau analisis untuk memahami akar ideologis PKS dan AKP, maka teori Olivier Roy dan Greg Fealy diungkapkan dalam kerangka teori ideologi ini. Olivier Roy mengemukakan kenyataan empirik tentang berkembangnya Islam politik dan ideologis yang menghadirkan tantangan kepada dunia Barat dan para rezim penguasa negara-negara Islam itu sendiri namun kemudian menurut Roy dalam realitas empirik praktek politik Islam mengalami kegagalan. Menurut Roy pada awalnya di tahun 1980-an, anggota-anggota Ikhwanul Muslimin di Mesir ikut dalam pemilihan politik dan berhasil menempatkan beberapa wakil mereka dalam jabatan pemerintahan melalui jalur independen. Demikian pula

⁶⁶ Bahtiar Effendy. *Op.Cit.* h: 216.

⁶⁷ Olivier Roy. *Op. Cit.* h: i.

di Yordania dan Kuwait anggota-anggota Ikhwanul Muslimin masuk ke dalam kabinet pemerintahan. Di Turki, para teknokrat yang menjadi staf Presiden Turgut Ozal sebagian besar terdiri dari para Islamis di MSP yang kemudian berganti nama menjadi RP di tahun 1983 yakni gerakan Islam atau kelompok Islamis yang ikut dalam pemilihan parlemen dan turut serta dalam pemerintahan. Di Tunisia, Partai *Nahdhah* pada 1989 berupaya mereposisi diri dengan masuk ke dalam sistem politik resmi walaupun mendapat perlawanan dari pemerintah. Namun usaha kelompok Islamis di dunia politik mengalami kemunduran ketika pada tahun 1991 terjadi penindasan atas FIS di Aljazair, Partai *Nahdhah* di Tunisia dan dikeluarkannya para anggota Ikhwanul Muslimin dari kabinet baru di Yordania. Menurut Roy kemunduran gerakan Islam yang memiliki ideologi Islamisme ditandai dengan *set back* berupa munculnya Neo-fundamentalisme yang kembali lebih berkonsentrasi pada masalah peribadatan, penerapan syariah dan sebagainya yang ditandai dengan menguat dan menyebarnya paham Salafy yang anti politik.⁶⁸ Roy menyebutnya sebagai pergeseran karena tidak ada pemisahan tegas antara Neo-fundamentalisme, Islamisme dan Pos-Islamis. Pergeseran ini mencakup seluruh gerakan Islamis yang kini mulai mengambil bentuk baru yang konservatif dan lebih berupa pendidikan sosial dibandingkan politik. Aliran ideologi Neo-fundamentalisme ini menolak nilai-nilai Barat, merencanakan pemberlakuan syariat Islam dan pembersihan moral, sementara bidang politik, ekonomi dan sosial hanya sebatas retorika dan wacana negara diganti dengan wacana masyarakat.⁶⁹

Pada tahun 2006 Olivier Roy menegaskan tesisnya tersebut hanya saja merevisi sedikit tentang konsep Neo-fundamentalisme yang kini disebutnya sebagai trend kontemporer dan hasil konvergensi beragam Fundamentalisme modern. Neo-fundamentalisme sebagaimana halnya Fundamentalisme tetap menekankan untuk kembali kepada prinsip-prinsip sejati agama Islam namun kini menjadi sebuah trend kontemporer yang memadukan antara modernisme, globalisasi dan penolakan terhadap tradisi Muslim dan sekaligus budaya Barat modern. Menurut Roy bila Islamis berjuang mewujudkan teokrasi atau negara Islam dalam skala nasional, maka Neo-fundamentalis berjuang dalam skala internasional melalui gerakan dakwah atau aktivisme dan tidak melalui jalur politik serta dengan mengedepankan *transnational-ummah* atau keumatan yang mendunia. Isu sentral dari semua bentuk reislamisasi termasuk Neo-fundamentalis menurut Roy didasari oleh proses westernisasi, individualisme, kesenjangan antargenerasi, krisis sosial, sikap keberagaman yang emosional,

⁶⁸ *Ibid.*, Olivier Roy. h: 98-99

⁶⁹ *Ibid.*, h: 96-97

sehingga menurutnya tidak menekankan aspek intelektualisme serta pemisahan antara keimanan dan budaya.

Sementara Greg Fealy dan Bubalo dalam penelitiannya tentang dampak pengaruh Gerakan Islam di Indonesia mengupas banyak hal tentang corak Islamisme dan kaitannya dengan politik dan demokrasi. Ia mengutip tesis Samuel Huntington pada 1993 tentang *The Clash of Civilization* (Benturan Peradaban) yang menyatakan dengan berakhirnya perang dingin bentuk konflik masa depan lebih bersifat benturan budaya dan peradaban atau konflik antara Barat dan Muslim. Pemerintahan Barat pun menuding kelompok Islamis dari Gerakan Islam sebagai sumber konflik karena menjadikan Islam sebagai ideologi bukan sekedar agama.⁷⁰

Islamisme memandang hubungan antara Islam, politik dan masyarakat sebagai satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Islamisme lahir dari satu ide sentral kebangkitan atau pembaharuan Islam. Kelompok Islamis memperluas ide tradisional Islam yang menganggap agama hanya pada ibadah ritual, menjadi sebuah agama yang mencakup segala dimensi kehidupan masyarakat modern mulai dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan dan ekonomi. Islamisme merupakan upaya menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial dan ekonomi yang dianggap sebagai watak inheren dari Islam dan bukan sekedar perluasan dari agama ke wilayah politik. Selain politik, elemen mendasar lainnya dari Islamisme adalah aktivisme atau gerakan dakwah. Sebagian besar kelompok Islamis menyerap inspirasi langsung pada Ikhwanul Muslimin Mesir namun juga dapat dilihat sebagai pewaris tradisi dua gerakan revivalis yakni gerakan pada abad 18 yang dipelopori Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia dan gerakan abad 19 dan 20 yang dipimpin oleh tiga pemikir Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.⁷¹

Berbeda halnya dengan Olivier Roy yang mengemukakan tesis bahwa kelompok Islamisyang mencoba menggabungkan antara dakwah Islam, politik dan masyarakat telah gagal karena setelah kelompok Islamis atau Islam politik, muncul kelompok Neo-fundamentalis, Greg Fealy justru mengemukakan tesis pos-Islamisme adalah bentuk pengembangan atau kemajuan dari Islamisme karena pos-Islamisme justru direpresentasikan

⁷⁰ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Op. Cit.* h: 20-21

⁷¹ *Ibid*, h: 30-31.

oleh kelompok Islamis yang semakin moderat, toleran, terbuka dan inklusif di dalam berpolitik dan bernegara.⁷²

Ahmad Moussalli menyimpulkan bahwa ada dua jenis fundamentalis yakni Islam fundamentalis radikal dan moderat. Fundamentalis radikal adalah sebuah gerakan yang didukung oleh sekelompok minoritas yang memiliki perilaku eksklusif dan *rigid* (kaku). Di sisi lain fundamentalisme moderat dalam batas tertentu mau membuka dialog dan menunjukkan bahwa mereka menerima sistem dan pemikiran politik Barat dalam rangka mencapai tujuan mereka yang lebih besar dan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Sementara fundamentalisme radikal menurut Moussalli menolak dialog dan kerjasama dengan rezim lokal dan negara-negara Barat pada umumnya. Kelompok Fundamentalis moderat bertujuan mendirikan sistem Islam atau Kekuasaan Tuhan (*hakimiyyah*) yang di dasari pada hukum Islam. Di dalam konteks ini, sebagian ilmuwan berpendapat bahwa kelompok-kelompok fundamentalis berusaha diterima di masyarakat agar menguntungkan bagi tercapainya tujuan mereka sesungguhnya.⁷³

*“...an umbrella term for a wide range of discourses and activism which tends to move from a high level of moderate pluralism, and thus inclusive democracy, to extreme radicalism, intolerant unitarianism and thus exclusive majority rule. While some fundamentalist groups are pluralistic in terms of inter-Muslim relations and relations between Muslims and minorities, other are not. Even at the scientific level, Western science and technology are argued for by some fundamentalists as Islamically sound, while others exclude them because of their presumed un-Islamic nature. More important, while most fundamentalists call for pluralistic democracy and argue for it as an essentially Islamic point of view, the radicals brand it as unbelief”.*⁷⁴

“Istilah dan aktivitas sosial politik (aktivisme) yang memiliki dimensi yang sangat luas berkisar dari pluralisme moderat serta demokrasi yang inklusif hingga ke radikalisme ekstrim yang tidak toleran pada perbedaan. Sebagian kelompok fundamentalis bersikap pluralistik dalam hubungan sesama Muslim dan antara Muslim dengan kaum minoritas, namun sebagiannya tidak. Sebagian kelompok fundamentalis secara politis bersikap pluralistik, namun secara teologis eksklusif, sementara yang lainnya sebaliknya. Bahkan di tataran ilmiah pun, ilmu pengetahuan dan teknologi Barat pun diargumentasikan oleh sebagian fundamentalis sebagai mengandung nilai-nilai Islam sementara sebagian lainnya dihindari karena dianggap tidak sesuai

⁷² *Ibid*, h: 28.

⁷³ Ahmad Moussalli sebagaimana dikutip oleh Firman Noor. *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998-2005. A sub-thesis submitted for the degree of Master of Arts (Asian Studies) of the Australian National University*. The Australian National University. Faculty of Asian Studies. 2006. h: 10.

⁷⁴ *Ibid*.

dengan nilai-nilai Islam. Hal yang terpenting adalah ketika sebagian besar kelompok fundamentalis menerima demokrasi yang pluralistik dan secara substantif mencerminkan pandangan Islam, sebagian kecil menilai hal itu bertentangan dengan keimanan”.

Namun Esposito mengkritisi penggunaan kata fundamentalis dan juga kata moderat secara dangkal sehingga mempersulit Barat dalam memahami Islam. Istilah “fundamentalis” secara berlebihan diterapkan setiap kali konservatisme terhubung dengan kekuatan politik dan mengancam pemerintahan dan kebijakan liberal. Bila menganjurkan peran agama dalam masyarakat atau menentang homoseksual untuk secara sah menikah dilabeli “fundamentalis”, maka non-Muslim pun dapat terkategori fundamentalis, karena Paus juga melarang pernikahan homoseksual. Selama ini kelompok fundamentalis dengan mudahnya disamakan dengan kelompok ekstrimis dan teroris sementara yang disebut sebagai Muslim moderat adalah Muslim yang menganjurkan liberalisme sekuler dan Muslim konservatif dianggap fundamentalis.⁷⁵

Asef Bayat menjelaskan pos-Islamisme berbeda dengan Islamisme yang memaksakan *Islamic-State* atau teokrasi karena Pos-Islamisme menolak sekularisme yang memusuhi agama, namun juga menolak gagasan teokrasi. Bayat juga menyatakan bahwa revolusi di Arab adalah sebuah Revolusi Pos-Islamis karena walaupun al-Nahda di Tunisia, IM di Mesir dan Suriah dan oposisi Islam di Yaman terlibat di dalam revolusi Arab tersebut, kelompok-kelompok Islamis tersebut tidak bisa mengklaim sebagai satu-satunya yang menggerakkan revolusi tersebut dan juga tidak mendorong ke arah terbentuknya teokrasi atau Negara Islam seperti di Iran.⁷⁶

I.8.3. Organisasi

Menurut Ware ada empat aspek organisasi yang penting untuk dianalisis: *Pertama*, terkait tentang bagaimana dan mengapa ada kesamaan-kesamaan sekaligus variasi yang berbeda dalam bentuk organisasi partai-partai politik. *Kedua*, penjelasan sumber-sumber daya yang tersedia bagi organisasi partai dan bagaimana perubahan dalam ketersediaan beberapa sumber daya mempengaruhi partai-partai politik. *Ketiga*, mempertimbangkan isu yang secara

⁷⁵ Jhon L. Esposito. *Islam dan Barat: Konflik atau Benturan Peradaban?* Dalam buku Ancaman Islam: Mitos atau Realitas? Ed. Revisi menggugat Tesis Huntington. Mizan, Bandung. 1996. h: 194-195.

⁷⁶ Noorhaidi. *Op. Cit.*

orisinal diajukan oleh Michels, siapa yang mengontrol organisasi partai dan sumber daya yang dimilikinya. Dan *keempat*, melihat apa yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi-organisasi partai dewasa ini.

Salah satu tipologi Duverger tentang organisasi-organisasi partai dilihat dari *basic elements of parties* atau elemen-elemen dasar partainya yakni: *pertama*, **Caucus** yaitu bentuk tertua organisasi partai berdasarkan elemen dasarnya dan juga merupakan bentuk dominan di parlemen. Struktur partai yang dikenal dengan model kaukus adalah struktur organisasi berbasis elit politik.⁷⁷ *Kedua*, **Branch**. Atau cabang yang juga dipadankan oleh Duverger dengan jenis partai politik yang bila dikategorisasikan berdasarkan keanggotaannya disebut partai massa (*a mass membership party*). Struktur “branch” berbeda dengan struktur kaukus karena struktur “branch” mencoba merekrut anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya yang mereka miliki di setiap bagian dan bukan merupakan pengelompokan elit politik lokal.⁷⁸ *Ketiga*, **Cell**. Model struktur organisasi *cell* (sel) awalnya merupakan temuan partai-partai komunis. Mirip dengan partai model kaukus dan tidak seperti partai *branch*, partai komunis lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya. Namun berbeda dari partai kaukus dalam hal sentralisasi karena model sel diarahkan oleh pusat dan bukan oleh elit lokal.⁷⁹ *Keempat*, **Militia**, yaitu bentuk organisasi partai yang awalnya dimiliki oleh kaum fasis dan partai sayap kanan ekstrim lainnya dalam fase-fase Perang Dunia. Bahkan lebih dari model partai komunis, organisasi ini dirancang untuk menghasilkan banyak gugus-gugus tugas yang bekerja di luar jalur politik elektoral yang konvensional. Menurut Duverger model milisia memiliki model jenjang keanggotaan yang mengikuti alur karir militer. Karakter militer dari model milisia tak hanya nampak dalam komposisi namun juga dalam strukturnya. Organisasi ini dimulai dari grup yang sangat kecil yang dibangun ke atas membentuk piramida yang membentuk unit-unit yang lebih besar.⁸⁰

1.8.4. Basis Massa.

Lipset menguraikan ciri-ciri kelompok *middle class* atau kelas menengah berikut indikator-indikatornya yang menurutnya memiliki korelasi dengan proses demokratisasi di

⁷⁷ Alan Ware. *Op. Cit.* h: 95.

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ *Ibid.*, h: 96.

⁸⁰ Maurice Duverger. *Op. Cit.* h: 10.

suatu negara⁸¹ yakni sebagai berikut: *Pertama*, kemakmuran: ukuran-ukuran utama kemakmuran yang digunakan adalah: (a). Pendapatan per kapita atau per orang; (b). Perbandingan banyaknya orang per mobil; dan (c). Banyaknya orang per dokter. *Kedua*, industrialisasi: ukuran-ukuran yang digunakan adalah: (a). Prosentase penduduk pria yang bekerja di sektor pertanian; dan (b). Pemakaian energi yang diproduksi secara komersial di negara tersebut. *Ketiga*, urbanisasi: tiga ukuran yang berbeda di bawah ini, seperti yang ditunjukkan dari data yang dihimpun oleh *Institute of International Urban Research*, Berkley, California, boleh jadi mencerminkan hubungan antara urbanisasi dan demokrasi: (a). Prosentase penduduk pada komunitas sedikitnya 20.000; (b). Prosentase penduduk pada komunitas antara 100.000 orang atau lebih; dan (c). Prosentase penduduk di kawasan metropolitan atau kota besar. *Keempat*, pendidikan: semakin tinggi tingkat pendidikan sebuah negara, maka akan semakin besar peluangnya bagi demokrasi. Indikator tingkat pendidikan adalah berdasarkan: (1). Keyakinan mereka pada toleransi terhadap oposisi; (2). Perasaan mereka terhadap kelompok minoritas nasional dan ras; (3). Pendapat mereka tentang sistem politik dengan multi partai dibandingkan dengan sistem partai tunggal.

Pendapat Lipset tersebut diperkuat oleh hasil studi sosiolog Amerika, Daniel Lerner dalam bukunya: *The Passing of Traditional Society, The Free Press* bekerja sama dengan *Bureau of Applied Social Research* yang menemukan hubungan erat antara urbanisasi, literasi (melek huruf), tingkat pemberian suara, media komunikasi dan produksi yang digunakan serta pendidikan, meskipun terdapat perbedaan tingkat pembangunan di negara-negara yang diteliti.⁸² Menurut Huntington perkembangan ekonomi memang mendorong meningkatnya jumlah kelas menengah, karena terjadinya mobilitas vertikal seiring dengan meningkatnya strata pendidikan dan taraf hidup. Demokrasi yang didasarkan pada premis kekuasaan mayoritas, akan sulit berkembang bila mayoritasnya miskin berhadapan dengan oligarki kecil yang kaya. Lain halnya bila yang menjadi mayoritas adalah kelas menengah hasil proses industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi. Bila proses modernisasi berlanjut maka jumlah kelas menengah perkotaan membesar sehingga mereka semakin yakin untuk memajukan kepentingan-kepentingannya melalui percaturan politik dalam sistem pemilihan. Gerakan-gerakan demokratisasi dalam gelombang ketiga tidak dipimpin oleh kaum tuan tanah, petani atau buruh industri, melainkan oleh kelas menengah perkotaan.⁸³

⁸¹ Seymour Martin Lipset. *Op. Cit.* h: 24-25.

⁸² *Ibid.*, h: 27-28.

⁸³ Samuel P. Huntington. *Op.Cit.* h: 81

Tanpa mengabaikan lapisan masyarakat kelas bawah (*lower class*), dan kelas atas (*upper class*), nampak bahwa penggerak utama perubahan dan kemajuan di suatu negeri adalah basis massa yang berasal dari masyarakat kelas menengah (*middle class*). Kebangkitan Islam di bidang politik menurut Vali Nasr *Islamic revival* diawali dengan kemajuan di bidang pemikiran dan ekonomi yang memunculkan *new muslim middle class* yang kemudian mendirikan partai-partai politik Islam. Keberhasilan partai Refah di pertengahan tahun 1990-an misalnya diawali dengan meningkatnya kemampuan pengusaha-pengusaha Muslim di Turki yang bergabung di dalam asosiasi *Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği* (MUSIAD) atau Asosiasi Industrialis dan Pengusaha Independen. Begitupun keberhasilan AKP dalam satu dekade sangat ditunjang oleh faktor kekuatan ekonomi para pengusaha.⁸⁴

Teori tentang karakteristik kelas menengah dan peran pentingnya akan digunakan untuk menganalisis apakah benar basis massa utama PKS dan AKP yang disebutkan mayoritas berasal dari kelas menengah sesuai dengan teori tersebut baik dari ciri-ciri maupun signifikansi perannya. Demikian pula dalam kaitannya dengan gejala kebangkitan Islam di kalangan kelas menengah di dunia Muslim akan coba ditelusuri keterkaitan mereka dengan suksesnya AKP dan PKS.

Selanjutnya juga dapat dianalisis basis massa yang dimiliki partai dengan dengan alasannya memilih sebuah partai politik, Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt menyebutkan ada dua mazhab yakni mazhab sosiologi dan mazhab psikologis. Dalam mazhab sosiologis, perilaku pemilih atau komunitas pemilih didasari oleh faktor-faktor sosiologis berupa kedekatan geografis, ras dan suku bangsa, kelas sosial, latar belakang pendidikan, adat dan budaya serta gender dengan sebuah partai politik bila dilihat dari para elit dan pengurus terasnya. Sedangkan dalam mazhab psikologis pilihan ditentukan atas dasar kedekatan emosional yang terbangun dari interaksi antara pemilih dengan partai politik atau para elitnya. Kedua jenis basis massa yang memilih berdasarkan pertimbangan sosiologis dan psikologis umumnya berasal dari kalangan menengah bawah dan kelas bawah.⁸⁵

Sementara basis massa yang menurut Franz Urban Pappi menggunakan mazhab pilihan rasional (*rational choice theory*) pada umumnya berasal dari kelas menengah atas. Jenis pemilih atau komunitas pemilih yang didasarkan pada alasan rasional dan cenderung

⁸⁴ Vali Nasr. *Op. Cit.* h: 249

⁸⁵ Lihat Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt. *Op. Cit.* h: 228, 238.

pragmatis disebut sebagai *reasoning voter*. Mereka lebih mementingkan faktor isu, kandidat serta program apa yang ditawarkan sebagai alasan untuk memilih sebuah partai politik atau kandidat. Jenis pemilih rasional ini cenderung tidak loyal dan dapat berubah-ubah pilihannya di setiap Pemilu karena tidak mendasarinya atas kedekatan sosiologis atau psikologis melainkan berdasarkan kepentingan sehingga disebut penganut mazhab *rational choice theory*.⁸⁶

1.8.5. Sistem Rekrutmen

Bila dikategorisasikan berdasarkan keanggotaannya maka ada beberapa jenis partai politik menurut Richard S Katz dan William Crotty dalam *Handbook of Party Politics* yang mengelompokkan partai-partai politik sebagai berikut: 1. *Elite, caucus and cadre parties* (partai-partai elit, anggota dan kader) atau partai patronase (Max Weber) dan partai-partai tokoh (Neumann), 2. *Mass-parties* (partai-partai massa), 3. *Catch-all, electoralist parties*. 4. *Cartel parties* (partai kartel) dan 5. *Business-firm parties* (partai yang seperti perusahaan).⁸⁷

Selanjutnya Duverger juga menguraikan tipologi partai politik yang selain dilihat dari struktur organisasinya juga dari sistem rekrutmennya. *Pertama, Caucus* adalah partai politik berbasis elit politik dengan sistem rekrutmen yang sangat selektif dalam penger.⁸⁸ *Kedua, Branch* yakni partai politik yang bila dikategorisasikan berdasarkan keanggotaannya disebut partai massa (*a mass membership party*) yang merekrut anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya yang mereka miliki di setiap wilayah dan bukan pengelompokan elit politik lokal.⁸⁹ *Ketiga, Cell*. Mirip dengan partai model kaukus dan tidak seperti partai *branch*, partai yang terinspirasi oleh partai komunis ini lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya.⁹⁰ *Keempat, Militia*, yang dirancang untuk menghasilkan banyak gugus-gugus tugas yang bekerja di luar jalur politik elektoral yang konvensional. Model milisia memiliki model jenjang keanggotaan yang mengikuti alur karir militer.⁹¹

Partai yang secara ideologi disebut sebagai partai Konservatif saat ini memiliki 'hibridisasi/percampuran' antara *supporter, member* dan *activist* di partainya. Partai yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya kini memiliki jumlah anggota yang relatif

⁸⁶ Franz Urban Pappi. *Op. Cit.* h: 255-56

⁸⁷ Richard S Katz dan William Crotty. *Handbook of Party Politics*. Designs and Patents Act, 1988. h: 251

⁸⁸ Alan Ware. *Op. Cit.* h: 95.

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ *Ibid.*, h: 96.

⁹¹ Maurice Duverger. *Op. Cit.* h: 10.

besar, walaupun jenis hubungan keanggotannya berbeda dengan partai sosialis yang memiliki hubungan lebih erat satu sama lain.⁹² Ada beberapa dasar untuk rekrutmen relawan, anggota dan aktivis di antaranya karena insentif materil, insentif kesetiakawanan dan insentif berupa keterlibatan aktif dalam politik. Di negara maju, insentif jenis pertama yakni insentif materiil dianggap tidak relevan karena sudah sejahtera maka orang tidak lagi membutuhkan insentif materiil yang tidak seberapa, sehingga insentif kesetiakawanan dan insentif keterlibatan aktif dalam politik yang lebih mendorong seseorang menjadi relawan, anggota atau aktivis sebuah partai politik. Namun insentif kesetiakawanan pun relatif menurun pula di negara-negara maju tersebut, sehingga yang dominan adalah keinginan terlibat aktif dalam politik.⁹³

Terkait dengan keterlibatan seseorang dalam sebuah partai politik, maka dapat dibedakan menjadi tiga kategori: *Pertama*, relawan (*supporter*) yang terkait dengan partai karena aksi bersama atau isu yang mereka perjuangkan sejalan dengan kebijakan partai tertentu. Selain masalah advokasi terkait dengan isu kebijakan, maka ada pula yang bergabung dengan partai karena insentif atau dorongan materiil, misalnya dibayar untuk melakukan tugas-tugas kampanye tertentu dalam pemilu, dan diberi pekerjaan sebagai imbalan untuk melakukan berbagai tugas partai secara teratur, diberi kontrak pemerintah dan sebagai balasannya diharapkan dapat memberikan kontribusi keuangan untuk kas partai.⁹⁴ *Kedua*, anggota yakni mereka yang bergabung dengan partai karena masalah ideologi, kesamaan nilai dan tujuan serta kesetiakawanan. *Ketiga*, aktivis adalah mereka yang menjadi pengurus selain alasan ideologis, dorongan keterlibatan aktif dalam politik menjadi lebih dominan sebagai alasan.

I.8.6. Kepemimpinan

“Leadership is the capacity to inspire confidence in the rightness of one’s purposes, courage in their collective execution, and obedience in the face of any threat of resistance. Leadership has sometimes been propounded as a supreme political virtue, although it is also one of the characteristics that make politics impossible. Leadership is a matter of degree, and consists in the extent to which a single person can build control on a foundation of influence. Some argue that leadership results from charisma Others now reject attempts to explain leadership in terms of the personal characteristics of as a relation

⁹² Alan Ware. *Op. Cit.* h: 66.

⁹³ *Ibid.*, h: 69.

⁹⁴ *Ibid.*, h: 67.

dependent upon social context, so that those who are leaders in one situation may not be leaders in another.”⁹⁵

Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menginspirasi keyakinan akan kebenaran tujuan seseorang, keberanian dalam pelaksanaan kolektifnya, dan ketaatan dalam menghadapi ancaman resistensi. Kepemimpinan kadang-kadang dikemukakan sebagai kebajikan atau keutamaan politik tertinggi. Derajat kepemimpinan seseorang ditentukan dari sejauh mana dapat membangun kendali atas dasar pengaruh. Ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hasil karisma yang merupakan karakteristik pribadi. Sementara yang lainnya menganggap kepemimpinan lebih tergantung pada konteks sosialnya, sehingga mereka yang menjadi pemimpin di dalam satu negara atau satu situasi tertentu belum tentu dapat menjadi pemimpin di negara lain atau di dalam situasi yang berbeda.

Menurut Scruton selain terkait dengan aspek kepribadian, kepemimpinan juga tergantung pada konteks sosialnya. Sementara Pareto (1848-1923) meyakini bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang terbaik dan dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi di masyarakat. Diyakini pula oleh Pareto bahwa para elit tersebut umumnya berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Oleh karena itu menurut Pareto, masyarakat terdiri dari 2 kelas yakni lapisan atas yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan lapisan bawah yaitu non-elit.⁹⁶ Pareto menyebutkan kelas politik berisikan kelompok-kelompok sosial yang beraneka ragam, sementara lebih jauh lagi Mosca meneliti komposisi elit dengan mengenali peran “kekuatan sosial” tertentu. Bila Pareto membagi elit ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), Mosca memperkenalkan konsep “sub-elit” yang berisikan seluruh “kelas menengah baru” dari para pegawai sipil, manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa serta menganggapnya sebagai elemen vital dalam masyarakat dan menurut Mosca stabilitas politik tergantung pada tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas para sub-elit ini.”⁹⁷

⁹⁵ Roger Scruton. *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*. Macmillan Press. New York, 1982. h: 384.

⁹⁶ SP. Varma. *Op. Cit.* h: 202.

⁹⁷ *Ibid.*, h: 206.

Sedangkan Max Weber membahas tentang tipe kepemimpinan didasarkan sumber legitimasi atau otoritas yang dimilikinya. Teori Max Weber tentang otoritas kepemimpinan yang terdiri dari otoritas kepemimpinan kharismatis, tradisional dan legal formal memperlihatkan adanya proses evolusi secara linear yaitu dari otoritas kharismatis ke tradisional dan ke legal formal. Kepemimpinan disebut kharismatis jika pengabsahannya tersebut berasal dari kekuatan supra natural yang diyakini para penganutnya. Kemudian kepemimpinan yang berotoritas tradisional terjadi manakala memperoleh pengakuan dari para leluhurnya dan masyarakatnya. Lalu, kepemimpinan yang berotoritas legal formal, pengabsahannya berasal dari pengakuan di depan hukum dan karena dipilih oleh mereka yang memiliki hak memilih melalui koridor aturan yang sudah dibakukan:

“The three types of domination correspond approximately to three of the types of behavior, with one type of behavior left over. Between rational behavior (Zweckrational) and rational or legal domination, the parallelism is perfect, between affective behavior and charismatic domination, the analogy is at least justifiable, in the case of traditional behavior and traditional domination, the terms are even the same. Thus it might be said-and the German philosopher Schmalenbach, whom I discuss in my book on German sociology, has so maintained- that the classification of types of behavior is erroneous, that there are really only three types of behavior because there are three basic motivations and hence three types of domination. The three basic motivations are reason, emotion, and sentiment, whence rational, affective (or emotional) and traditional behavior and similarly, rational, charismatic and traditional domination.”⁹⁸

Tiga tipe dominasi atau legitimasi pemimpin memiliki hubungan dengan nilai, perilaku afektif dan perilaku tradisional. Di antara perilaku rasional (*Zweckrational*) dengan legitimasi legal rasional terdapat paralelisme atau kesejajaran. Demikian pula antara perilaku afektif dan legitimasi kharismatis juga paralel dan terakhir bahkan sama yakni antara perilaku tradisional dengan legitimasi tradisional. Oleh karena itu sebagaimana juga pendapat Schmalenbach klasifikasi 4 tipe perilaku tidak tepat sehingga seharusnya hanya ada 3 tipe perilaku karena hanya ada 3 motivasi dasar dan 3 tipe legitimasi. Tiga motivasi dasar adalah akal, emosi dan sentimen, kemudian 3 tipe perilaku adalah; rasional, afektif/emosional dan perilaku tradisional dan sejalan pula dengan legitimasi rasional, kharismatik dan tradisional.

I.8.7. Strategi

“Greek: Strategos, the office of a general, from stratos, an army. The art of the commander-in-chief, i.e. the art of projecting and achieving the larger

⁹⁸ Ratmond Aron. *Op. Cit.* h: 286.

objectives of a campaign; as opposed to 'tactics': the art of local deployment and small-scale manoeuvre through which a strategic purpose is achieved.”⁹⁹

Strategos (Bahasa Yunani), jabatan jendral, dari kata *stratos*, angkatan perang. Strategi adalah seni seorang komandan mengarahkan untuk mencapai tujuan pertempuran yang lebih luas. Hal ini berbeda dengan taktik yang merupakan seni persiapan perang lokal dan manuver dalam skala kecil sebagai sarana untuk mencapai tujuan strategis.

Strategi dimaksudkan bukan hanya untuk mendapatkan kemenangan melainkan juga untuk memastikan bahwa kemenangan tersebut dapat dipertahankan. Selain itu strategi lebih menekankan aspek penggalian kekuatan-kekuatan potensial secara optimal dibandingkan penggunaan kekuatan secara efisien.

Hal tersebut di atas nampak dalam strategi *vernacular politics* atau *ordinary politics* yang digunakan oleh PKS dan AKP sebagai partai politik yang berasal dari sebuah gerakan Islam yang mengakar di masyarakat. Jenny B. White menggambarkannya sebagai bentuk kerjasama jejaring masyarakat lokal dengan partai politik dan lembaga-lembaga *civil society* dalam sebuah gerakan sosial politik yang berkesinambungan:

“Vernacular politics is an autonomous, grassroots political process, incorporating a variety of actors and views, in which local networks work in tandem with political parties and civic organizations in a sustained social and political movement It is generally associated with an ideological platform, but, on closer examination, the outward appearance of homogeneity and unity under an ideological banner breaks down when differences of background, motivation, and gender are taken into account These differences filter and distort both ideological message and political practice.”¹⁰⁰

Vernacular politics adalah sebuah proses politik akar rumput yang otonom yang bergabung dengan beragam pelaku yang memiliki beragam ideologi. Di dalam proses *vernacular* tersebut jejaring masyarakat lokal bekerja sama atau *tandem* dengan partai politik dan lembaga-lembaga *civil society* dalam sebuah gerakan sosial politik yang berkesinambungan. Secara umum hal ini akan diasosiasikan dengan sebuah *platform* ideologis tertentu, akan tetapi jika diteliti lebih dekat lagi tampilan luar homogenitas di bawah satu ideologi tertentu menjadi hilang oleh kenyataan adanya begitu banyak perbedaan latar belakang, motivasi, dan masalah gender. Perbedaan-perbedaan tersebut dengan sendirinya menepiskan kecurigaan adanya pesan ideologis atau kepentingan politik praktis tertentu.

⁹⁹ Thomas C. Shelling. *Op. Cit.* h: 666-667.

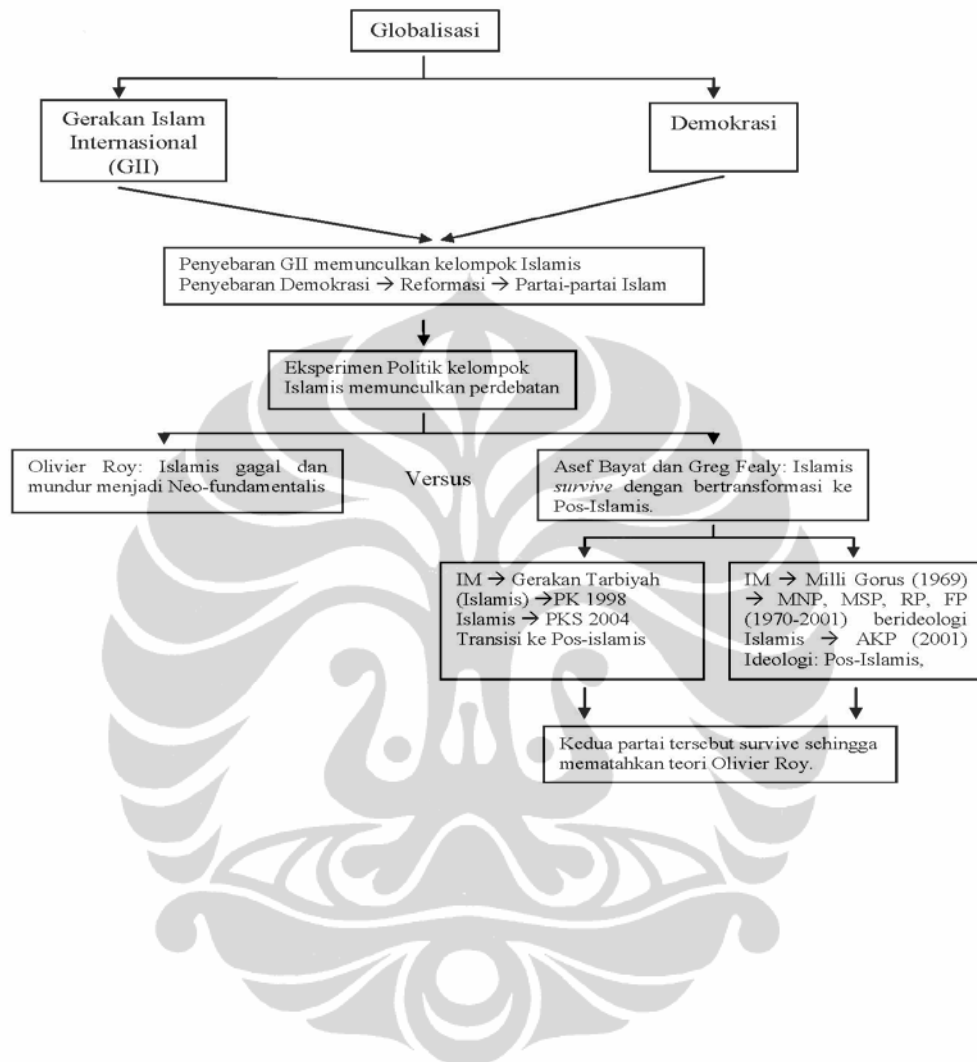
¹⁰⁰ Jenny B White. *Op. Cit.*

Perbedaan-perbedaan yang potensial memecah belah di dalam gerakan tersebut tidak muncul karena beberapa hal: *Pertama*, retorika, isu dan simbol-simbol kepedulian pada masyarakat menjadi konteks bersama. *Kedua*, hubungan-hubungan politik yang bersifat personal. *Ketiga*, pesan-pesan ideologis disampaikan dengan bahasa nilai dan kepentingan lokal komunal yang mudah dicerna. Politik lokal mencerminkan adanya koalisi dan perbedaan di dalamnya merefleksikan pluralitas yang bersifat lokal maupun nasional.

Strategi ini memadukan dan membangun sinergi antara organisasi akar rumput, pemerintahan di tingkat daerah dan partai politik. Dengan kata lain, istilah *vernacular politics* (politik kedaerahan) mengacu pada sebuah metode mobilisasi yang didasari oleh jejaring personal yang longgar dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi baik lokal maupun nasional serta kekuatan politik nasional. Partai politik kemudian mendapatkan kepercayaan berdasarkan penguasaan pada jejaring sosial yang relatif independen. Menurut White kesuksesan partai-partai Islam pada tahun 1990-an di Turki tidak mengandalkan pesan-pesan agama, melainkan lebih pada kemampuan organisasi menggabungkan beragam segmen masyarakat yang ingin berkontribusi dalam proses politik nasional.¹⁰¹

¹⁰¹ *Ibid.*

1.9. Model Analisis



I.10. Metode Penelitian

Kajian disertasi ini sekaligus menggunakan metode komparatif dan metode kualitatif. Metode komparatif adalah metode yang membandingkan satu kasus dengan kasus lainnya dalam hal ini berupa studi perbandingan kemenangan Pemilu PKS di Indonesia dengan AKP di Turki. Disertasi ini kemudian juga menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara menyusun secara eksplisit penilaian dan pendapat peneliti tentang faktor-faktor yang menentukan perbedaan kemenangan AKP di Pemilu 2002-2007 di Turki dengan keberhasilan PKS di Pemilu 1999, 2004 dan 2009. Interpretasi peneliti yang bersifat subyektif terhadap

data yang dihimpun dari proses pemenangan Pemilu PKS dan AKP memang akan menonjol, namun untuk menjaga obyektifitas, peneliti berusaha menjaga prinsip netralitas dengan tidak menunjukkan keberpihakan atau antipati kepada kedua partai politik yang diteliti. Selain itu juga berusaha memberikan penilaian obyektif terhadap fakta apa adanya dan bukan apa yang dikehendaki oleh peneliti.

I.10.1. Metode Komparatif

Metode perbandingan yang digunakan merujuk pada konsep Sigmund Neumann yakni bahwa ketika membandingkan partai politik perlu diperhatikan hal-hal berikut: *Pertama*, perbandingan tentang definisi partai politik. *Kedua* perbandingan sistem kepartaian, karena sistem satu partai kontradiktif dengan sistem demokrasi yang hanya dimungkinkan bila minimal ada dua partai yang berkompetisi secara *fair* dan terbuka serta langsung melalui Pemilu. *Ketiga*, perbandingan antar partai politik berkaitan dengan fungsi partai politik di dalam sistem demokratis dan rezim diktatorial. *Keempat*, perbandingan di aspek sosiologis partai-partai politik, karena ada perbedaan dalam istilah-istilah seperti pemimpin dan pengikut (*leader and follower*), partisipasi dan aparatnya dalam sistem politik yang juga berbeda. *Kelima*, perbandingan tentang bagaimana penyikapan sebuah partai politik terhadap pluralitas masyarakat, yakni bahwa ada unsur-unsur kekuatan politik lain di masyarakat seperti *pressure groups*, *civil society* dan lain-lain. Rezim demokratis akan mengelola dinamika perbedaan dan tarik menarik di antara kekuatan-kekuatan politik itu, sementara rezim kediktatoran membatasi ruang gerak atau bahkan meniadakan perbedaan itu. *Keenam*, perbandingan antara partai politik berdasarkan ideologinya secara internasional. Globalisasi memungkinkan adanya internasionalisasi partai-partai yakni perbedaan partai berdasarkan ideologi dan penggabungan kekuatan antar partai politik di berbagai negara yang memiliki kesamaan ideologi.¹⁰² Beberapa faktor yang diungkapkan oleh Neumann tersebut juga diperbandingkan dalam disertasi ini misalnya tentang aspek ideologi, kepemimpinan, sistem kepartaian dan juga keterbukaan terhadap pluralitas yang ditunjukkan baik oleh PKS dan AKP serta bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut dengan pemenangan Pemilu kedua partai politik tersebut.

Terkait dengan penggunaan metode komparatif menurut Hans Keman juga sangat penting sejak dari awal mengetahui apa yang diperbandingkan, kemudian dalam rentang

¹⁰² Miriam Budiardjo. *Op. Cit.*

waktu kapan membandingkannya dan bagaimana teknik membandingkannya. Dalam disertasi ini dijelaskan dari awal bahwa yang diperbandingkan adalah faktor-faktor yang berperan dalam kemenangan Pemilu PKS dalam rentang waktu 1999-2009 pada kemenangan Pemilu AKP dalam rentang waktu 2002-2009. Hal yang juga tak kalah pentingnya adalah pertanyaan: Mengapa membandingkan antara dua unit analisis yang sedang diteliti. Hal itupun diuraikan secara cukup detil terkait alasan-alasan membandingkan antara kedua partai politik Islam di dua negara tersebut di bagian pendahuluan sebelum menguraikan permasalahan dan pertanyaan-pertanyaan penelitian. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan apa yang diperbandingkan, kapan dan bagaimana cara membandingkan unit-unit analisis antara PKS dan AKP sudah ditentukan sebelum penelitian ini dianalisis secara sistematis dan diinterpretasikan.¹⁰³

I.10.2. Metode Kualitatif

Penelitian kualitatif disebut juga sebagai penelitian naturalistik¹⁰⁴ yakni rangkaian kegiatan atau proses menjangkau data dan informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi aspek kehidupan tertentu pada obyeknya. Oleh karena itu peneliti menghimpun berbagai data yang dibutuhkan baik berupa pendapat masyarakat mengenai masalah yang diteliti, pendapat para pakar dan para pelaku mengenai masalah yang diteliti. Dalam disertasi ini juga telah dihimpun berbagai data terkait dengan kemenangan Pemilu kedua partai politik Islam yakni PKS dan AKP, baik dari masyarakat di Indonesia dan Turki berupa wawancara langsung dengan berbagai komponen masyarakat baik umum, mahasiswa, maupun LSM, para pakar politik dan juga para politisi PKS dan AKP.

Selain menghimpun data dari beberapa sumber data, penulis disertasi juga melakukan pengamatan langsung sebagai *observer* dengan menjadi peserta partisipatif baik di PKS dan AKP. Oleh karena penelitian kualitatif ini bersifat induktif yakni bertolak dari data-data individual untuk merumuskan kesimpulan umum, maka penelitian ini juga tidak untuk menguji hipotesis atau tidak bertitik tolak dari teori tertentu. Teori digunakan hanya sebagai kerangka dan alat analisis. Selain menggunakan pendekatan kualitatif penelitian ini juga

¹⁰³ Hans Keman. *Comparative Methodology*, London: Sage Published, 1999. h: 39.

¹⁰⁴ H. Hadari Nawawi dan H. Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, h: 174-175.

menggunakan tambahan data kuantitatif misalnya beberapa hasil survey yang sudah ada baik tentang PKS maupun tentang AKP sebagai informasi pendukung atau pelengkap.

Penelitian disertasi ini menggunakan beberapa sumber data: *Pertama*, publikasi-publikasi ilmiah berupa disertasi-disertasi doktoral, tesis, skripsi, jurnal-jurnal internasional dan nasional. Buku dan karya-karya ilmiah mengenai PKS dan AKP juga menjadi sumber data yang penting. Publikasi-publikasi pemerintah mengenai Pemilu di Turki dan Indonesia juga penting sebagai sumber data. Penerbitan-penerbitan dan brosur-brosur kegiatan partai PKS dan AKP juga menjadi bahan dan sumber data. Dalam urutan terakhir sumber data media massa cetak maupun *website* yang terbit berkaitan dengan pemberitaan kemenangan Pemilu PKS dan AKP juga menjadi bagian pelengkap sumber data.

Kedua, wawancara mendalam (*indepth interview*) juga merupakan cara terpenting memperoleh data penelitian dalam metode kualitatif. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan di Indonesia dan di Turki karena penulis disertasi juga dua kali meneliti langsung di Turki. Para tokoh PKS dan AKP yang berhasil diwawancarai adalah mereka yang memiliki peran dan posisi strategis di partainya masing-masing. Di antara mereka adalah: Ustadz Hilmi Aminuddin (Pendiri dan Ketua Majelis Syuro PKS), Luthfi Hasan Ishaq (Presiden PKS), Anis Matta (Sekjen PKS), Untung Wahono (Ketua Majelis Pertimbangan Pusat/MPP PKS), Soeripto (Ketua Komisi Kebijakan Strategis MPP PKS), Surahman Hidayat (Ketua Dewan Syariah Pusat/DSP PKS), Ahzami Samiun Jazuli (DSP PKS), Hidayat Nur Wahid (mantan Presiden PKS dan mantan Ketua MPR RI), Nursanita Nasution (MPP, Anggota Dewan 2004-2009), Wirianingsih (Ketua PP Salimah 2004-2009), Ketua-ketua Wilayah Dakwah/Wilda, Ketua-ketua Bidang DPP dan lain-lain.

Sedangkan tokoh AKP yang berhasil ditemui maupun diwawancarai Recep Tayyip Erdogan (Perdana Menteri dan Ketua Umum AKP), Bilal Erdogan (putra PM Erdogan), Huseyin Kansu (Tokoh FP dan juga salah seorang Pendiri AKP), Yunus Sonmez (Ketua *Youth Branch* AKP), Fatmazehra (kader perempuan AKP), Fatmanur Samasti (peneliti Sosiologi), Enez Tuzgen (aktivis Hayrat Foundation) Omer Faruk Kalaychi (DPD AKP di Istanbul), Necmi Sadikoglu (Sekjen *Union NGO's Islamic World/UNIW*), Mustafa Ozkaya (Direktur TV-Net), Ahmed Semiz (pendiri *Hayrat Foundation*), Senol Ozturk (pengurus IHH), Erol Erogan (ketua DPD SP), Prof. Mehmet Ali Behan (*Marmara University* Istanbul) dibantu beberapa penterjemah bahasa Turki yakni Andika, Fatmanur dan Faride. Wawancara mendalam juga dilakukan terhadap sejumlah ilmuwan politik yang menguasai topik kajian ini

yaitu Prof. Julie Chernov Hwang dari AS yang juga meneliti tentang AKP dan PKS dan Prof. Greg Fealy, Indonesianis dari ANU Australia yang sering mengkaji tentang PKS.

Daftar I.1. Narasumber yang diwawancarai

Nama	Keterangan
Agus Purnomo	Kader PKS Yogyakarta, Aleg DPR RI.
Ahmad Feri Firman	Staf Komisi Kajian Strategis MPP PKS
Ahmad Zaenuddin	Ketua Bidang Pembangunan Keumatan DPP PKS
Ahmed Semiz	pendiri Hayrat Foundation
Ali Yelgun	Anggota Saadet Parti (SP)
Anis Matta	Sekretaris Jenderal PKS
Ari Rosandi	Pengurus PASIAD Turki perwakilan Jakarta
Aus Hidayat Nur	Aleg DPR RI 2009-2014, Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi DPP Periode 2010-2015
Bilal Erdogan	Pengurus AKP Istanbul
Chaerul Anwar	Ketua Wilda Sumatera DPP PKS
Darocky	Staf Badan Hubungan Luar Negeri
Emre Elchkan	Sekjen <i>Youth Branch</i> AKP di seluruh Turki dan s anggota Dewan Pimpinan Pusat.
Erol Erdogan	Partai Saadet DPW Istanbul
Esra Korkmaz	aktivis di <i>Youth Branch</i> AKP di Istanbul
Fatma Zehra	(Youth the board member of AK Party Assembly Samlias Branch). Mahasiswi di Bosphorus University dan mengajar di Chemistry Department
Fatmanur	Kandidat Doktor Sosiologi di Bosphorus University, Istanbul
Firdaus	Staf Badan Hubungan Luar Negeri
Greg Fealy	Associate Professor and Senior Fellow, Indonesian Politics Joint Appointment, School of International, Political & Strategic Studies ANU College of Asia and the Pacific
Hadi Mulyadi	Ketua Wilda Kalimantan, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur
Hidayat Nur Wahid	Presiden PKS 2002-2005
Hilmi Aminuddin	Pendiri Gerakan Tarbiyah, Ketua Majelis Syuro PKS
Huseyin Kansu	Pendiri AKP
Setiawan	Wakil Ketua Wildayah Dakwah Sulawesi
Julie Chernov Hwang	Asisten profesor di Goucher College Amerika
Mehmed Ali Behan	Guru besar di Universitas Marmara, Istanbul
Memed Sosiawan	Anggota Dewan PKS dari Dapil Jatim VIII
Mustafa Ozkaya	Direktur TV-Net
Musyafa Ahmad Rahim	Ketua Bidang Kaderisasi PKS 2010-2015
Najamudin	Ketua Wilda Sulawesi
Navis Murbiyanto	Sekretaris Bidang Kaderisasi 1998-sekarang
Necmi Sadikoglu	Sekretaris Jenderal UNIW Turki
Nursanita Nasution.	staf Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Ketua Bidang Kewanitaan DPP 2000-2005, Aleg PKS 2004-2009
Oktan Hidayat	Ketua Wilayah Dakwah Bali-Nusra

Omer Faruk Kalayci	Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri AKP DPW Istanbul
Razikun.	Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu 2000-2005
Senol Ozturk	Asia coordinator (koordinator wilayah Asia), calon Ph.D (Asian Countries Coordinator)
Soeripto	Ketua <i>Woman, Family and Youth Commission UNIW (The Union of NGO's of the Islamic World cabang Indonesia</i>
Sumaryatin	Ketua Bidang Perempuan DPW Yogyakarta
Sunmanjaya	Aleg DPR 1999-2004, 2009-2014 dan Ketua Komisi Legislasi MPP PKS
Suryama	Pembina LSM Sosial
Tusy Wardani	Kader Perempuan PKS di Yogyakarta
Untung Wahono	Ketua MPP PKS 2010-2015
Wahyu Tusy Wardani,	kader perempuan PKS Yogyakarta dan staf Bidang Kaderisasi PKS.
Wiryaningsih	Anggota Majelis Syuro, staf Bidang Pembinaan kader DPP PKS
Yudi Widiana Adia	Wakil Ketua Wilda Banjabar, Aleg DPR RI 2009-2014
Yunus Sonmez	Pengurus <i>Youth Branch</i> saat masih di Partai Refah
Zuber Syafawi	Ketua Wilda Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta Jati Jaya

I.11. Sistematika Penulisan Disertasi

Bab I. “Pendahuluan”. Bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, permasalahan penelitian (*research questions*), kajian literatur, kerangka teori dan model analisis, metode penelitian dan sistematika penulisan disertasi.

Bab II. “Sejarah Kemunculan PKS di Indonesia (1998) dan AKP di Turki (2001)”. Bab ini menjelaskan latar belakang sejarah, konteks zaman global berupa demokratisasi dan gerakan Islam Internasional bagi kemunculan kembali partai politik Islam di Indonesia pada 1998 dan Turki pada 1969 sebagai salah satu gejala *Islamic Revival* di bidang politik di kedua negara tersebut hingga kelahiran PKS pada saat Reformasi 1998 dan kemunculan AKP di Turki pada 2001.

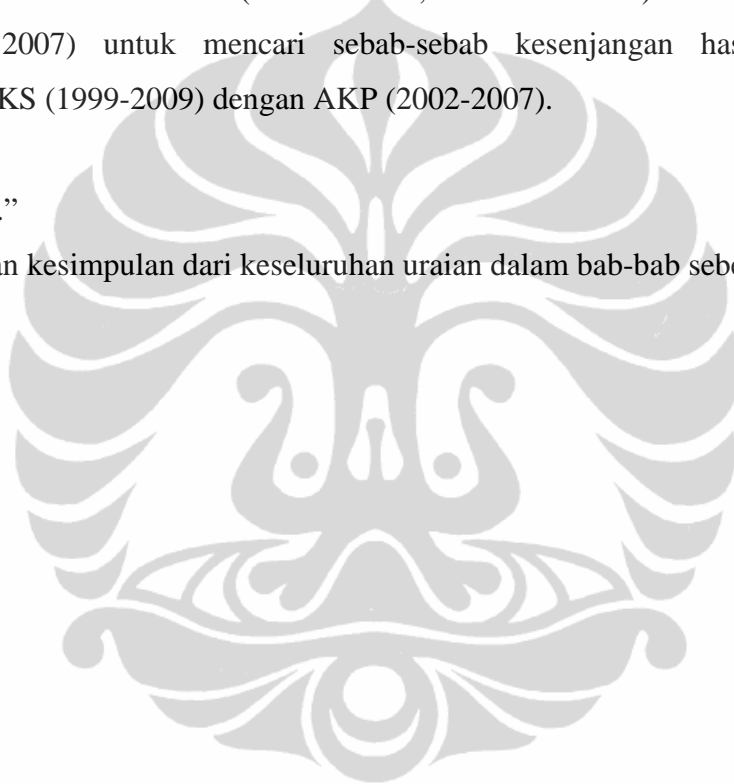
Bab III. “Pengaruh Aspek-aspek Internal dan Eksternal pada kemenangan Pemilu PKS (1999-2009).” Bab ini merupakan pembahasan tentang bagaimana aspek-aspek internal PKS berupa ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi serta aspek-aspek eksternal berupa kondisi sosial, politik dan budaya di Indonesia mempengaruhi kemenangan Pemilu PKS (1999-2009).

Bab IV. “Pengaruh Aspek-aspek Internal dan Eksternal pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)”. Bab ini merupakan pembahasan tentang bagaimana aspek-aspek internal AKP berupa ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi serta aspek-aspek eksternal berupa kondisi sosial, politik dan budaya di Turki mempengaruhi pemenangan Pemilu AKP (2002-2007).

Bab V. “Perbandingan Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2001-2007). Bab ini membandingkan aspek-aspek internal serta aspek-aspek eksternal yang mempengaruhi pemenangan Pemilu PKS di Indonesia (Pemilu 1999, 2004 dan 2009) dan AKP di Turki (Pemilu 2002 dan 2007) untuk mencari sebab-sebab kesenjangan hasil perolehan pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dengan AKP (2002-2007).

Bab VI. “Kesimpulan.”

Bab terakhir merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian dalam bab-bab sebelumnya.



BAB II

SEJARAH KEMUNCULAN

PKS DI INDONESIA (1998) DAN AKP DI TURKI (2001)

Bab II disertasi ini menguraikan latar belakang kemunculan kembali partai politik Islam di Indonesia di era Reformasi 1998 dan lahirnya PKS di tahun yang sama serta di Turki sejak 1969 hingga lahirnya AKP pada 2001. Bab ini diawali dengan gambaran demokratisasi yang terjadi di negara-negara Muslim dan bagaimana demokratisasi memberi dampak positif bagi gerakan Islam. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang gerakan-gerakan Islam internasional yang menginspirasi banyak gerakan Islam di berbagai negeri Muslim dan menjadi cikal bakal lahirnya partai-partai politik Islam. Berikutnya diuraikan pula kondisi sosial politik dan ekonomi Indonesia sebelum era Reformasi serta munculnya gerakan Tarbiyah hingga lahirnya PK (1998) yang kemudian menjadi PKS pada 2003. Demikian pula kondisi sosial politik dan ekonomi di Turki serta munculnya gerakan Islam *Milli Görüş* yang melahirkan partai-partai Islam sejak 1970-an hingga berdirinya AKP pada 2001 diuraikan di bab ini.

Globalisasi menyebarkan ide gerakan-gerakan Islam Internasional dengan arus utamanya gerakan Ikhwanul Muslimin yang antara lain juga mengimbas ke Indonesia melalui interaksi global Hilmi Aminuddin ketika studi di Saudi Arabia yang mengilhaminya untuk mendirikan gerakan Tarbiyah pada tahun 1980. Selain itu juga mengimbas ke Turki melalui persentuhan Erbakan dengan tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin ketika menempuh studi doktoral di Jerman yang membuatnya mendirikan gerakan *Milli Görüş* atau Pandangan Kebangsaan pada tahun 1969.

Terbukanya demokratisasi di era Reformasi 1998 di Indonesia memunculkan animo yang besar di kalangan aktivis Islam untuk mendirikan partai politik Islam, namun perolehan partai-partai Islam secara keseluruhan hanya 39%. Oleh karena itu Bahtiar Effendy¹ menyatakan persepsi bahwa demokrasi secara otomatis akan menyebabkan keunggulan partai politik Islam di negara mayoritas Muslim tidak terbukti di dalam sejarah politik Indonesia modern berdasarkan fakta sejak Pemilu 1955 gabungan perolehan suara partai-partai politik

¹ Bahtiar Effendy. *Islam and The State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003. h: 211

Islam selalu lebih sedikit dari perolehan suara partai-partai nasional. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Muslim di Indonesia tidak memiliki aspirasi politik yang tunggal sehingga keyakinan mereka pada agama Islam tidak bisa dikorelasikan langsung dengan pilihan parpol Islam.

Performa partai-partai Islam di Indonesia yang menurun pada pemilu 1999 jika dibandingkan Pemilu 1955 di satu sisi menurut Nurcholish Madjid menunjukkan politik aliran sudah tidak dianggap penting di Indonesia pasca Soeharto. Namun di sisi lain hal itu juga tidak bisa dianggap karena rakyat sudah lebih melihat faktor substansi dan program partai dibanding slogan dan jargon partai. Sebab sebagai kontrasnya juga sangat sulit untuk mengatakan kemenangan Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P) di Pemilu 1999 karena faktor substansi dan program partai. Kemenangan tersebut dianggap lebih sebagai bentuk protes rakyat kepada rezim terdahulu yakni Orde Baru (Orba) dengan Megawati sebagai simbol oposisi.²

Di tengah kecenderungan deklinasi partai-partai politik Islam, lahirnya Partai Keadilan (PK) dari gerakan Tarbiyah yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dianggap cukup memberikan harapan kemungkinan bangkitnya kembali partai politik Islam di Indonesia. PK di Pemilu 1999 meraih 1,3% (7 kursi) dan tidak melampaui batas *Electoral Threshold* (ET) 2% namun di pemilu 2004 PK yang telah menjadi PKS memperoleh peningkatan suara yang signifikan yakni menjadi 7,2% (45 kursi). Selanjutnya di Pemilu 2009, PKS memperoleh 7,8% (57 kursi).³

Sejarah partai politik berhaluan Islam di negara Turki yang memiliki konstitusi sekuler pun diwarnai dinamika fluktuasi namun bukan berupa fluktuasi dukungan suara rakyat melainkan berulang kali dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Partai-partai politik berhaluan Islam yang dilahirkan oleh gerakan Islam *Milli Görüş* dianggap melakukan proses Islamisasi sehingga melanggar konstitusi. Dari gerakan *Milli Görüş* pertama-tama lahir *Milli Nizam Partisi* (MNP) atau Partai Keteraturan Bangsa pada awal 1970-an dan tak lama kemudian dibubarkan. Erbakan kembali mendirikan *Millî Selâmet Partisi* (MSP) atau Partai Keselamatan Bangsa dan sempat mengikuti Pemilu serta memperoleh lebih dari 50 kursi namun kembali dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai gantinya segera didirikan *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan yang berhasil mengikuti Pemilu 1991 dan

² *Ibid.*, h: 217.

³ Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. *Draft Kronologi Sejarah PKS*. Jakarta, 2008.

memperoleh 62 kursi dari 550 kursi. Pada Pemilu berikutnya yakni 1995, *Refah Partisi* bahkan memenangkan Pemilu dengan perolehan kursi sebanyak 158 kursi dan Erbakan menjadi Perdana Menteri serta memimpin pemerintahan koalisi. Namun satu tahun kemudian yakni 1996 terjadi kudeta militer dan *Refah Partisi* dibubarkan. Partai politik baru segera dibentuk lagi yakni *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan dan mengikuti Pemilu 1999 serta masih memperoleh jumlah kursi 111, tetapi pada 1996, *Fazilet Partisi* juga dibubarkan dan Erbakan dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Para penerus Erbakan mendirikan *Saadet Partisi* (SP) atau Partai Kebahagiaan namun hanya memperoleh suara sebesar 2,5% sehingga tidak melewati *Parliamentary Threshold* (PT) 10%. Sementara mantan Walikota Istanbul yang juga kader Erbakan yakni Recep Tayyip Erdogan mendirikan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan pada 2001 dan langsung mengikuti Pemilu 2002 serta muncul sebagai pemenang dengan 34,26% suara.⁴

Kemenangan AKP di Pemilu 2002 mengejutkan kehidupan politik Turki kontemporer karena untuk pertama kalinya dapat terbentuk pemerintahan tanpa harus koalisi. Konstitusi Turki melarang sebuah organisasi maupun partai politik menunjukkan nama atau simbol-simbol agama dalam politik, sehingga tidak mungkin sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam. AKP secara implisit hadir sebagai partai politik berhaluan Islam bila ditinjau dari akar ideologisnya, aktivitas dakwah Islamnya dan basis massanya Islami. Fakta historis yang sulit disangkal adalah bahwa AKP merupakan kelanjutan dari mata rantai gerakan Islam: *Milli Görüş* yang didirikan oleh Necmettin Erbakan sehingga menurut Hakan Yavuz⁵ kemenangan AKP dalam Pemilu 2002 merupakan pembuktian hilangnya kepercayaan rakyat pada kubu sekuler karena korup dan tidak mensejahterakan rakyat dan sekaligus restorasi partai politik berhaluan Islam.

II.1. Demokratisasi di Negara-negara Muslim

Mayoritas Muslim termasuk gerakan Islam arus utama yang juga disebut kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin memandang demokrasi sebagai sistem yang netral dan merupakan alat untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan universal seperti keadilan dan kesejahteraan. Sebaliknya gerakan Islam lainnya seperti Salafy memiliki prinsip apolitis,

⁴ Sumber: CD dari *Turkiye Istatik Kurumu* (Badan Statistik Turki) tahun 2009.

⁵ M.Hakan Yavuz. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York: University Press, 2003, h: 257.

sementara Hizbut Tahrir (HT) walaupun tidak apolitis memilih tidak masuk ke dalam sistem politik saat ini karena menganggap demokrasi bukan berasal dari Islam dan bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.⁶ Sebagai jalan tengah di antara umat Islam yang menerima secara utuh maupun yang menolaknya mentah-mentah, Robert W. Hefner menawarkan sebuah sikap kritis dan pengadaptasian demokrasi dengan nilai-nilai dan budaya lokal. Menurutnya pula perspektif dialogis lintas budaya antara negara-negara Barat dan negara-negara mayoritas Muslim merupakan cara yang lebih baik untuk memaknai demokrasi modern.⁷

John L. Esposito dari Amerika Serikat meminta negara-negara Barat melakukan otokritik karena memiliki standar ganda dalam menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Esposito menekankan bahwa Barat seharusnya lebih dulu menjalankan nilai-nilai toleransi yang harus tercermin dalam kebijakan negaranya misalnya dengan tidak memaksakan para migran Muslim di Eropa untuk memiliki kultur yang homogen dengan mereka yakni kultur Barat yang bebas nilai. Terlebih lagi *trend* negara global saat ini adalah multikultural sehingga bukan hanya dunia Islam yang perlu memahami dan menerapkan multikulturalisme serta toleran pada pluralitas masyarakat, melainkan Barat yang harus lebih dulu menerapkan nilai-nilai yang diusungnya tersebut. Bila Barat menginginkan agar dunia Islam tidak terus memiliki dendam masa lalu dan menolak segala hal yang berasal dari Barat termasuk demokrasi, maka menurut Esposito, Barat yang juga seharusnya lebih dulu tidak berprasangka pada dunia Islam dengan selalu menyebut Islam sebagai teroris sementara mereka yang selalu melakukan agresi di dunia Islam.⁸

Terlepas dari perbedaan pendapat di kalangan gerakan Islam tentang konsep demokrasi, faktanya demokratisasi telah memberi dampak positif bagi gerakan Islam dengan adanya peluang kebebasan. Gerakan Islam yang memilih jalur politik sebagai metode perjuangannya sehingga lazim disebut kelompok *Islam siyasi*, Islam politik atau Islamis di Turki dan di Indonesia serta di negara-negara Muslim lainnya mendapatkan keuntungan dari berkembangnya nilai-nilai demokrasi selama tahun 1990-an yang menekankan pada kebebasan, keterbukaan dan kesamaan peluang serta kesiapan untuk hidup berdampingan

⁶ <http://hizbuttahrir.or.id/2009/06130/demokrasi-sistem-kufur-menyalahi-orang-Yahudi-dan-Nasrani-termasuk-prinsip-agama-kita>. Dan lihat pula di <http://koranMuslim.com/2011/jubir-salafi-mesir-demokrasi-paham-yang-berbahaya/>

⁷ Robert W. Hefner. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: ISAI, 2001. h: 356.

⁸ John L. Esposito. *Islam dan Barat: Konflik atau Benturan Peradaban?* Dalam buku *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?* Ed. Revisi menggugat Tesis Huntington. Mizan, Bandung. 1996. h: 192-193.

dalam perbedaan, karena kemudian mereka dapat berkompetisi di dalam kehidupan politik bersama kelompok-kelompok sekuler.

Di Indonesia demokratisasi di era Reformasi memunculkan 42 partai Islam, walaupun hanya 20 partai Islam yang lolos verifikasi sehingga bisa mengikuti Pemilu 1999 dan hanya 10 partai Islam yang berhasil mendapatkan 1 kursi atau lebih di parlemen Pusat. Gerakan Tarbiyah yang lahir di tahun 1979 baru dapat memunculkan partai Islam yakni Partai Keadilan (PK) pada tahun 1998 yang kemudian sejak 2003 menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) karena di era Soeharto atau Orde Baru tidak boleh ada organisasi kemasyarakatan ataupun partai politik yang berideologi selain Pancasila atau dikenal dengan Asas Tunggal sehingga tidak mungkin sebuah partai memilih ideologi Islam sebagai dasarnya.

Demikian pula di Turki demokratisasi telah memberi peluang bagi gerakan Islam *Milli Görüş* yang lahir di tahun 1969 segera melahirkan partai-partai berhaluan Islam sejak 1970 yakni MNP, MSP dan *Refah Partisi* yang di tahun 1994 menjadi pemenang dan memimpin pemerintahan koalisi dengan Ketua Umumnya Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri.⁹ Padahal sebelumnya konflik antara prinsip-prinsip sekularisme dengan Islam yang telah berlangsung di Republik Turki selama lebih dari 80 tahun sejak runtuhnya Khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924 membuat gerakan Islam atau kelompok Islamis selalu ditekan oleh kelompok sekuler dan militer yang berkuasa. Tindakan represif kubu sekuler dan militer malah memunculkan semangat kebangkitan Islam di berbagai bidang termasuk politik.¹⁰

Demokratisasi memberi kebebasan bagi gerakan Islam atau kelompok Islamis di negeri-negeri Muslim untuk menampilkan identitas keislamannya dalam berbagai aspek kehidupan karena keyakinan mereka Islam bukan hanya agama ritual melainkan agama yang mewarnai segala aspek kehidupan mulai dari pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan, politik dan ekonomi. Kemunculan partai-partai politik Islam menurut Greg Fealy merupakan kelanjutan aplikasi wacana yang dimulai sejak awal abad ke-20

⁹ Ziya Öniş. *The Political Economy of Islamic Resurgence in Turkey: The Rise of the Welfare Party in Perspective* Author(s): Ziya Öniş Source: Third World Quarterly, Vol. 18, No. 4 (Sep., 1997), pp. 743-766 Published by: Taylor & Francis, Ltd. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/3993215> Accessed: 23/07/2009 03:57 Paper presentasi di BRISMES International Conference di Middle Eastern Studies, diselenggarakan di St Catherine's College, Universitas Oxford, 6-9 Juli 1997.

¹⁰ *Ibid.*

tentang hubungan yang tidak terpisahkan antara Islam, politik dan masyarakat yang diyakini lahir dari ide sentral: Kebangkitan Islam.¹¹

Semangat menampilkan identitas Islam memunculkan pula partai politik Islam yang bila ditelusuri berawal dari munculnya gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di Mesir pada awal abad kedua puluh, Jami'at Islami di Pakistan dan gerakan Jama'ah Said An Nursi di Turki pada pertengahan abad kedua puluh. Kemudian mendekati akhir abad kedua puluh, terjadi Revolusi Islam Iran di tahun 1979 yang menumbangkan dinasti kerajaan Pahlevi pro-Barat di bawah Shah Iran Reza Pahlevi membuat gerakan Islam secara politik berhadapan *vis a vis* dengan kekuatan hegemonik sekuler Barat, khususnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.¹²

Revolusi Islam Iran menurut Zayyar, ilmuwan politik Timur Tengah telah menimbulkan pengaruh yang luar biasa di seluruh dunia Islam baik Islam Syiah maupun mayoritas dunia Islam yang menganut Sunni. Semangat kebangkitan untuk membebaskan diri dari diktator bangsanya yang terkooptasi negara-negara imperialis menyebar di seluruh dunia Islam, karena mayoritas dunia Islam terutama negara-negara Timur Tengah memiliki kekayaan sumber daya alam yang luar biasa. Gelombang demokrasi yang menyebar dari Barat dan memasuki dunia Islam malah menyadarkan dunia Islam untuk melepaskan diri dari imperialisme ekonomi Barat.¹³ Kemunculan Nahdhah di Tunisia, *Front Islamique du Salut* (FIS) atau Partai Penyelamatan Islam di Aljazair, *Refah Partisi* di Turki, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia dan di awal abad ke-21 ini keberhasilan AKP sebagai partai pemenang di Turki serta PKS sebagai partai pemenang ke-4 dari 9 partai politik yang berhasil masuk parlemen di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari semangat menampilkan identitas keislaman di bidang politik dan efek gelombang ketiga demokratisasi.

Semangat menampilkan identitas keislaman menurut Vali Nasr diawali dengan kemajuan di bidang pemikiran dan ekonomi yang memunculkan *new Muslim middle class* yang kemudian mendirikan partai-partai politik Islam. Nasr menyebutkan indikator meningkatnya semangat Islam di bidang ekonomi adalah meningkatnya kesadaran masyarakat menjadi nasabah bank-bank syariah sehingga menyebabkan meningkatnya industri perbankan syariah. Ada lebih kurang 300 bank Islam atau bank syariah dan

¹¹ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah* (edisi Bahasa Indonesia). Mizan, 2005. h: 27.

¹² Hussin Mutalib and Taj ul-Islam Hashmi (Ed.). *Islam, Muslims and the Modern State. Case-Studies of Muslims in Thirteen Countries*. Macmillan Press LTD, Houndmills, Basingstoke and London: 1996. Hal: ix

¹³ Prof. Zayar. *Revolusi Iran: Sejarah dan Hari Depan*nya (Ed. Terjemahan dari *The Iranian Revolution: Past, Present and Future*. Senin, 15 Desember 2003). Lihat di www.marxist.com/iran-latar-belakang-sejarah.htm

perusahaan investasi Islam di lebih dari 75 negara Muslim. Pada akhir 2006, simpanan dana pihak ketiga (DPK) yang ada di 218 bank syariah berjumlah lebih kurang 14 milyar dollar AS. Bahkan laporan aset bank syariah di Iran pada 2007 menunjukkan angka sebesar 155 milyar dollar AS, diikuti oleh Saudi Arabia dan Malaysia masing-masing 69 milyar dollar AS dan 65 milyar dollar AS, kemudian Kuwait 38 milyar dollar AS dan Uni Emirat Arab sebesar 35 milyar dollar AS.¹⁴

Indikator semangat identitas keislaman di Indonesia juga muncul dalam aspek sosial, politik, budaya dan ekonomi. Salah satu indikator di bidang budaya dan pendidikan adalah meningkatnya minat membaca buku-buku Islam sehingga menyebabkan peningkatan penerbitan buku-buku Islam di Indonesia. Bambang Trimansyah, Ketua Forum Editor Indonesia mengatakan buku-buku spiritual khususnya buku Islam merupakan buku yang paling diminati oleh masyarakat. Kini rata-rata sekitar 2.000 judul buku per bulan diterbitkan dari sebelumnya hanya 500 judul per bulan. Sekarang bisa sampai 12.000 judul buku per tahun dan hampir 50 persennya adalah buku Islam. Selain itu juga terjadi peningkatan animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji dan menjadikan umrah sebagai wisata rohani. Demikian pula bisnis busana muslim menjadi marak seiring munculnya *trend* menggunakan busana muslim. Indikator meningkatnya semangat keislaman juga nampak dalam fenomena tersedianya musholla dan bahkan masjid di hampir semua perkantoran dan juga pusat-pusat perbelanjaan.¹⁵

Semangat memunculkan identitas keislaman juga muncul di Turki sejak awal 1970-an yang menurut Ziya Önis sejak 1970-an diawali dengan semangat mendukung partai berhaluan Islam dari kalangan pengusaha yang memberikan dukungan finansial sekaligus menjadi basis sosial utama MSP yang merupakan pendahulu *Refah Partisi*. Selama tahun 1970-an, pengusaha kecil dan pemilik toko skala kecil atau sedang di kota Anatolia merupakan konstituen penting MSP. Hal tersebut berlanjut di tahun 1980-an ketika kelompok borjuis Islam di Turki pasca 1980 yang tergabung dalam asosiasi *Müstakil Sanayici ve İşadamları* (MUSIAD) atau Asosiasi Industrialis dan Pengusaha Independen menjadi basis ekonomi yang utama bagi *Refah Partisi* berperan penting sebab tanpa sumber keuangan yang memadai *Refah Partisi* tidak dapat mengimplementasikan strategi organisasionalnya menuju

¹⁴ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of The New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. New York: Free Press, 2009. h: 16

¹⁵ Yogira, *Feature Editor*. Sumber: <http://indonesiabuku.com/?p=4271>

suksesnya di Pemilu 1995.¹⁶ Formula menjadikan kelas menengah Muslim sebagai basis utama sekaligus menjadi faktor kekuatan ekonomi penunjang partai dilanjutkan oleh AKP di bawah Recep Tayyip Erdoğan dengan penyempurnaan sehingga berdampak lebih signifikan bagi kemenangan AKP di 2 Pemilu berturut-turut (2002 dan 2007). Keberhasilan AKP dalam satu dekade sangat ditunjang oleh faktor kekuatan ekonomi para pengusaha yang juga bergabung dalam MUSIAD.¹⁷

Semangat menampilkan identitas keislaman juga diungkapkan oleh Hamdi Arsalan, seorang ulama dan imam masjid Jami' Al Fatih, Istanbul yaitu bahwa masyarakat Turki sejak AKP berkuasa menjadi jauh lebih religius dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hamdi menengarai bahwa kini dari penduduk Turki yang 99% Muslim, paling tidak di atas 70% menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadhan, sekitar 60% menunaikan sholat 5 waktu dan lebih kurang 60% menggunakan busana muslimah.¹⁸ Demikian pula Ahmed Semiz, ulama pendiri Hayrat Foundation yang menyebarkan pemikiran Said Nursi seorang pembaharu di Turki, menyatakan bahwa kondisi keislaman di Turki saat ini sudah jauh lebih membaik dan masjid-masjid mulai ramai terutama di bulan Ramadhan. Hanya satu hal yang masih belum terealisasi namun menurutnya tinggal soal waktu yakni pencabutan larangan mengenakan jilbab di kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintahan.¹⁹

Bila wacana demokratisasi dianggap menguntungkan bagi gerakan Islam digunakan untuk melihat fenomena kontemporer PKS di Indonesia dalam rentang waktu 1999-2009 dan AKP di Turki di kurun waktu 2002-2007, maka tetap saja ada variasi dalam tingkat keberhasilannya. Greg Fealy juga menyatakan bahwa demokrasi baru sebatas memberikan peluang bagi gerakan Islam untuk mengekspresikan dirinya dan mengukur penerimaan masyarakat terhadap cita-cita dan konsep yang ditawarkannya. Sedangkan sejauh mana partai politik Islam atau berbasis massa Islam diterima oleh masyarakat masih harus dibuktikan dengan ukuran seberapa besar keberhasilan *electoral* yang diraih. Di Indonesia, misalnya gelombang demokrasi pasca Reformasi memang memunculkan 42 partai politik Islam termasuk PK kemudian PKS, namun yang bisa bertahan hingga saat ini (Pemilu 2009) di parlemen hanya 2 partai berasas Islam yakni PKS dan PPP serta dua partai berbasis massa

¹⁶ Ziya Önis. *Op. Cit.*

¹⁷ Vali Nasr. *Op. Cit* Vali. h: 247-248

¹⁸ Wawancara dengan Hamdi Arsalan di Bab-el Aleem, Istanbul pada hari Selasa 11 Agustus 2009. Pukul 14.00-14.30 waktu Turki.

¹⁹ Wawancara dengan Ahmed Semiz di Istanbul, pendiri Hayrat Foundation. Sabtu 15 Agustus 2009.

Islam yakni PKB dan PAN, sedangkan 5 partai lainnya dari 9 partai yang ada di parlemen adalah partai nasionalis serta 3 besar di Pemilu 2009 juga partai-partai nasionalis.

Demokrasi memang memberi peluang tumbuh dan berkembang bagi PKS yang lahir dari gerakan Islam yakni gerakan Tarbiyah namun yang akan menentukan keberhasilan elektoralnya adalah sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari kehadirannya. Bila kenyataannya besaran elektoral PKS masih di tahapan *middle size*, berarti penerimaan masyarakat pada PKS masih terbilang sedang. Hal tersebut seharusnya menjadi tantangan bagi PKS yakni bagaimana memanfaatkan iklim demokrasi yang kondusif untuk berkompetisi mendapatkan simpati dan penerimaan masyarakat dengan kerja nyata.

Sementara di Turki, walaupun pada awal abad ke-21 yakni di tahun 2000 pihak militer masih selalu bekerja sama dengan kubu sekuler di MK untuk membekukan terutama setiap partai politik berhaluan Islam yang dianggap melanggar konstitusi negara Turki, AKP mampu meraih kemenangan di 2 pemilu umum. Selain berusaha berkompromi dengan militer dan kubu sekuler serta tidak mengambil langkah-langkah konfrontatif dengan keduanya, AKP juga kembali mengajukan proposal keanggotaan di Uni Eropa. Pengajuan tersebut menuntut sejumlah persyaratan yang mengharuskan Turki lebih demokratis, seperti misalnya mengembalikan peran militer di bawah kontrol sipil, penghargaan pada HAM, kebebasan pers dan sebagainya yang kesemuanya justru sangat menguntungkan bagi AKP. Ketika pada tahun 2008 AKP digugat kembali untuk dibekukan, jumlah hakim di MK yang menyetujui pembekuan tidak cukup karena begitu kuatnya argumentasi pembelaan para akademisi bahwa AKP tidak melanggar konstitusi. Di tengah berbagai tantangan yang cukup berat, AKP memanfaatkan kesempatan yang dimilikinya sebagai partai berkuasa untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif serta memperbaiki perekonomian Turki sehingga demokratisasi yang berlangsung di Turki benar-benar berpengaruh pada kemenangan Pemilu AKP.

II.2. Gerakan-gerakan Islam Internasional

Greg Fealy dan Bubalo dalam penelitiannya tentang dampak pengaruh Gerakan Islam di Indonesia terlebih dulu mengupas tentang ragam Gerakan Islam atau Islamisme dan kaitannya dengan politik dan demokrasi. Fealy dan Bubalo mengutip tesis Samuel Huntington pada 1993, di jurnal Amerika *Foreign Affairs* dengan judul *The Clash of Civilization* (Benturan Peradaban) yang menyebutkan bahwa dengan berakhirnya perang

dingin antara AS dan Uni Soviet maka bentuk konflik masa depan lebih bersifat benturan budaya dan antar-peradaban. Meskipun yang dimaksud oleh Huntington adalah menyangkut 7 peradaban besar, tesisnya tetap saja dianggap sinonim dengan konflik antara Barat dan Muslim karena umumnya pemerintahan Barat pun menuding kelompok Islamis sebagai biang konflik atau pelaku terorisme.²⁰

Islamisme didefinisikan oleh kelompok Islamis sebagai Islam yang dipahami sebagai sebuah ideologi yang menganggap agama bukan sebagai ibadah ritual semata melainkan mencakup segala dimensi kehidupan masyarakat modern. Menurut mereka Islam memiliki aturan-aturan di segala bidang kehidupan dalam masyarakat mulai dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan dan ekonomi. Dalam hal ini Islamisme lebih merupakan upaya untuk menegaskan kembali pesan-pesan politik, sosial dan ekonomi yang dianggap sebagai sifat inheren agama Islam dan bukan sekedar merupakan perluasan agama ke wilayah politik. Selain itu elemen Islamisme lainnya yang juga mendasar adalah aktivisme atau dakwah horizontal yang harus selalu berlangsung. Namun ada perdebatan di kalangan kelompok Islamis antara pilihan fokus pada dakwah (Salafy), politik (Ikhwanul Muslimun) atau bentuk paramiliter dan revolusi (kelompok jihad). Selain itu juga ada perdebatan terkait pilihan apakah membentuk partai politik yang berpartisipasi dalam politik parlementer atau tidak.²¹

Greg Fealy mengartikan Islamisme sebagai wacana tentang hubungan antara Islam, politik dan masyarakat yang lahir dari satu ide sentral: kebangkitan atau pembaharuan Islam. Sebagian besar kelompok Islamisme menyerap inspirasi langsung dari Ikhwanul Muslimin Mesir namun juga sekaligus dapat dilihat sebagai pewaris tradisi revivalis. Ada dua gerakan revivalis yang menjadi dasar perkembangan kelompok Islamis kontemporer di Timur Tengah yakni gerakan pada abad 18 yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabia dan gerakan abad 19 dan 20 yang dipimpin oleh 3 pemikir: Jamaluddin al-Afgani, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha.²²

Pewaris tradisi revivalis yang kemudian menjadi Gerakan Islam *mainstream* atau kelompok Islamis adalah Ikhwanul Muslimin yang didirikan di Mesir pada 1928 oleh Hasan Al-Banna yang prihatin atas kemunduran umat Islam khususnya kebobrokan masyarakat Mesir. Bila Afgani, Abduh dan Ridha memberikan kontribusi pada ide kebangkitan Islam

²⁰ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Op. Cit.* h: 20-21.

²¹ *Ibid*, h: 28.

²² *Ibid*, h: 30-31.

melalui ide dan kiprah individual mereka maka sumbangan Al-Banna adalah pada pembentukan sebuah gerakan Islam. Strategi Al-Banna sifatnya bertahap dan reformis dengan cara mencetuskan kebangkitan spiritual yang luas di kalangan umat Islam. Al-Banna mengembangkan sebuah gerakan berbasis luas melalui berbagai aktivitas sosial akar rumput yang kemudian ditiru oleh gerakan-gerakan Islam lainnya. Selain bergerak di bidang pendidikan, kesejahteraan sosial dan kegiatan ekonomi, Ikhwanul Muslimin juga mengorganisasi masjid, sekolah, klinik kesehatan dan memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat miskin serta mendirikan klub atletik. Ikhwanul Muslimin tidak anti terhadap kegiatan politik bahkan menjadikannya sebagai sarana untuk mendorong amandemen konstitusi Mesir dan melawan korupsi.²³

Pada periode 1979-1992, kelompok Islamis mencatat sejumlah prestasi dengan meraih puncak kekuasaan baik di Iran (1979), Sudan (1989), Afganistan (1992), di Aljazair (1992) maupun Ikhwanul Muslimin yang memenangkan banyak kursi di parlemen Mesir melalui jalur independen dengan penguasaan segmen luas masyarakat Mesir, khususnya asosiasi-asosiasi dan kelompok-kelompok profesional. Namun pada akhir dekade 1990-an sebagian besar gagal mempertahankan puncak kekuasaan sehingga Olivier Roy menyimpulkan bahwa Islam politik telah gagal karena kemenangan gerakan Islam di Mesir dan Aljazair diberangus oleh militer dan rezim yang berkuasa. Demikian pula gerakan Islam *mainstream* seperti Ikhwanul Muslimin di berbagai negara juga menghadapi tekanan-tekanan.²⁴

Menurut Olivier Roy, gerakan Islam politik berada di persimpangan jalan untuk memilih di antara dua lintasan yang berbeda yakni apakah akan memilih normalisasi politik ataukah mundur ke neo-fundamentalisme. Gerakan Islam yang memilih normalisasi dan tetap mengikuti aturan permainan politik yang ada umumnya memiliki hubungan yang sangat kuat dengan masyarakat, sensitif terhadap problem lokal dan disibukkan dengan agenda perbaikan hidup para konstituen mereka. Namun sebagian lainnya menurut Roy beralih ke Neo-fundamentalisme, yakni kelompok Islamis yang memiliki pendekatan konservatif dan literalis terhadap Islam baik yang melakukan reformasi praktek keagamaan (Salafy) maupun Islam garis keras (*Jihadis Salafism*).²⁵

²³ *Ibid*, h: 34-35.

²⁴ *Ibid*, h: 55.

²⁵ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik*. Ed. Terjemahan dari: *The Failure of Political Islam*. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996. hal: 98-99.

Ahmad S. Moussali²⁶ menyebut gerakan Islamisme sebagai Islam fundamentalis. Islam fundamentalis menurutnya lebih dari sekedar gerakan lokal melainkan melingkupi negara-negara bangsa dan tatanan dunia karena tidak hanya mempersoalkan isu dan aspirasi lokal, melainkan juga di skala regional dan universal. Moussali membagi fundamentalisme menjadi fundamentalis moderat dan fundamentalis radikal:

“To radical fundamentalism, tawhid becomes a justification for the domination of others; to moderate fundamentalism, it becomes a justification for not being dominated by others”.

“Bagi fundamentalisme radikal, tauhid menjadi justifikasi untuk mendominasi yang lain, sedangkan untuk fundamentalisme moderat, tauhid menjadi justifikasi untuk tidak didominasi oleh pihak-pihak lain.”

Menurut Moussali gejala fundamentalisme agama tidak selalu bermakna negatif hanya saja perlu diwaspadai bila mengarah pada radikalisme yang dapat mencederai citra agama Islam dan nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Bila fundamentalis moderat lebih menekankan *amar ma'ruf* dalam metode dakwahnya yakni dengan berdialog secara persuasif, maka fundamentalisme radikal menitikberatkan pada *nahy munkar* sehingga cenderung menggunakan kekerasan.²⁷

Gerakan Islam yang disebut Esposito sebagai gerakan Islam arus utama yakni Ikhwanul Muslimin memilih mengikuti sistem politik yang ada sebagaimana pendirinya Hasan Al-Banna menyatakan bahwa politik adalah wilayah yang boleh dimasuki selama dimanfaatkan untuk kebaikan masyarakat. Sebagian generasi muda kemudian membentuk *Hizb Al-Wasat* sebagai partai politik dan memiliki *platform* partai yang tidak jauh berbeda dari pandangan-pandangan Ikhwanul Muslimin. Namun *Al Wasat* bukan satu-satunya gerakan Islam yang mengintegrasikan dakwah dan politik karena saat ini ada AKP di Turki yang menjadi contoh bagi banyak gerakan Islam setelah melakukan perubahan dari *Refah Partisi*, pendahulunya yang frontal dalam memperjuangkan Islam. Partai-partai Islam lainnya juga memasuki parlemen di Yordan, Kuwait dan Bahrain dalam batas-batas yang ditentukan oleh otokrasi. Di Aljazair partai Islam seperti Partai *Nahdah* diperbolehkan ikut dalam pemilihan dan menyerap banyak konstituen FIS. Demikian pula Hamas di Palestina

²⁶ Ahmad S. Moussali sebagaimana dikutip oleh Firman Noor. *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998-2005. A sub-thesis submitted for the degree of Master of Arts (Asian Studies) of the Australian National University.* The Australian National University. Faculty of Asian Studies. 2006. h: 23.

²⁷ *Ibid.*

membentuk partai politik. Namun di sisi lain kelompok-kelompok Islamis garis keras juga ada yang terus melakukan kekerasan, terutama jika kesempatan berekspresi dalam politik terbatas.²⁸

Pergerakan Islam Internasional juga telah mengimbas ke Indonesia sejak di awal abad ke-20 dengan terjadinya persentuhan antara ideologi Islam dengan modernitas. Deliar Noer menyatakan bahwa modernisasi ideologi Islam terjadi karena adanya gerakan pemurnian agama kembali ke Qur'an dan Sunnah, nasionalisme dan keinginan kuat komunitas Muslim mendirikan organisasi sosial-ekonomi serta meningkatnya perhatian pada pendidikan Islam.²⁹ Gerakan kebangsaan dan juga gerakan Islam yang muncul dan ikut mewarnai perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan adalah Boedi Oetomo (BO), kemudian Sarekat Islam (SI), Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama (NU). BO dan SI muncul sebagai gerakan politik, sedangkan Muhammadiyah dan NU muncul sebagai gerakan sosial keagamaan.³⁰

Jauh sebelum kemerdekaan, pada awal abad ke-20 selain BO, maka gerakan Islam pertama yang muncul di Indonesia adalah Syarikat Dagang Islam (SDI) didirikan pada 16 Oktober 1905 oleh KH Samanhudi di Solo dan kemudian berubah menjadi Syarikat Islam serta disahkan dengan Akta Notaris pada 10 September 1912. SI memiliki tujuan untuk berjuang merebut kemerdekaan Indonesia dengan asas Islam sebagai dasar perjuangannya, asas kerakyatan sebagai dasar himpunan organisasi dan asas sosial ekonomi sebagai usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi yang masih sangat miskin dalam penjajahan dengan cara menghadapi konglomerasi etnis Cina yang mendapatkan banyak keistimewaan dari penjajah Belanda. Asas Islam dipakai karena keyakinan bahwa hanya landasan Islamlah yang mampu mempersatukan ummat Islam yang tertindas. Kata "Dagang" dihilangkan sehingga SDI menjadi Syarikat Islam (SI) agar seluruh umat Islam memiliki rasa tanggung jawab menghadapi tantangan bersama. Selain itu SI memiliki pula cita-cita politik yakni mewujudkan persatuan umat bahkan persatuan umat Islam sedunia yang dikenal dengan istilah *Pan-Islamisme*. Kemudian memperjuangkan kemerdekaan umat yang berarti kemerdekaan bangsa Indonesia dalam bidang politik dan bidang ekonomi dengan "melenyapkan perbudakan manusia atas manusia". Dalam hal sistem pemerintahan, pada saat Kongres SI di Bandung 18 Juni 1916, HOS Tjokroaminoto menyatakan bahwa SI berjuang

²⁸ *Ibid*, h: 64-65

²⁹ Deliar Nor. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. LP3ES, Jakarta, 1980. h: 20.

³⁰ Syarifuddin Jurdi, lihat di Siti Nurhayaty Dewi. *Muhammadiyah sebagai Civil Society dan Pengaruhnya terhadap. Demokratisasi Pasca Orde Baru (1998-2009)*. Program Pascasarjana Ilmu Politik. FISIP UI. Juni 2009.

agar bangsa Indonesia merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri yang mengatur nasibnya sendiri.³¹

Dalam sejarah di Indonesia, para pemimpin Muslim telah memainkan peran penting dalam menentukan reformasi sosial dan politik. Di era Orde Lama (Orla) para pemimpin Muslim berperan melalui Partai Masyumi yang merupakan kepanjangan dari Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi adalah sebuah partai politik yang berdiri pada tanggal 7 November 1945 di Yogyakarta melalui sebuah Kongres Umat Islam pada 7-8 November 1945 dengan tujuan sebagai partai penyatu umat Islam dalam bidang politik. Masyumi pada akhirnya dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960 karena tokoh-tokohnya diduga terlibat dalam gerakan pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pada masa pemerintahan Soeharto, terjadi rehabilitasi sebagian tokoh-tokoh Masyumi yang diperbolehkan aktif kembali dalam politik dengan meleburkan diri ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Masyumi pada awalnya didirikan 24 Oktober 1943 oleh pemerintah penjajah Jepang karena membutuhkan suatu badan untuk menggalang dukungan masyarakat Indonesia melalui lembaga Islam, namun tidak tertarik dengan partai-partai Islam yang telah ada sejak zaman Belanda yang kebanyakan berlokasi di perkotaan dan berpola pikir modern. Jepang melarang Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Indonesia (PII) dan berusaha memisahkan golongan cendekiawan Islam di perkotaan dengan para kyai di pedesaan. Para kyai di pedesaan memainkan peranan lebih penting bagi Jepang karena dapat menggerakkan masyarakat mendukung Perang Pasifik, sebagai buruh atau tentara. Setelah gagal mendapatkan dukungan dari kalangan nasionalis di dalam Putera, Jepang mendirikan Masyumi.

Masyumi pada zaman pendudukan Jepang belum menjadi partai namun merupakan federasi dari empat organisasi Islam yang diijinkan pada masa itu, yaitu NU, Muhammadiyah, Persatuan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam Indonesia. Setelah menjadi partai, Masyumi mendirikan surat kabar harian Abadi pada 1947. NU adalah salah satu organisasi massa Islam yang sangat berperan dalam pembentukan Masyumi dan tokoh NU, KH Hasyim Asy'arie, terpilih sebagai pimpinan tertinggi Masyumi saat itu. Tokoh-tokoh NU lainnya banyak yang duduk dalam kepengurusan Masyumi sehingga keterlibatan NU

³¹ <http://serbasejarah.wordpress.com/2009/04/28/cita-dasar-pergerakan-syarikat-islam/>

dalam masalah politik menjadi sulit dihindari. Nahdlatul Ulama kemudian keluar dari Masyumi melalui surat keputusan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pada tanggal 5 April 1952 akibat adanya pergesekan politik di antara kaum intelektual Masyumi. Demikian pula hubungan antara Muhammadiyah dengan Masyumi pun mengalami pasang surut secara politis dan sempat merenggang pada saat Pemilu 1955. Hasil penghitungan suara dalam Pemilu 1955 menunjukkan bahwa Masyumi mendapatkan suara yang signifikan dalam percaturan politik pada masa itu dan menjadi partai Islam terkuat, dengan menguasai 20,9 persen suara, sementara Partai Nasional Indonesia (PNI) memperoleh 22,3%, Nahdlatul Ulama 18,4% dan Partai Komunis Indonesia (PKI) 16%. Di antara tokoh-tokoh Masyumi yang cukup dikenal adalah: Hasyim Asy'arie. Wahid Hasjim, putra KH Hasyim Asy'arie, Haji Abdul Malik Karim Amrullah (Hamka), Muhammad Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Mr. Mohammad Roem, Muhammad Isa Anshari, Kasman Singodimedjo dan Anwar Harjono, merupakan juru bicara terakhir Partai Masyumi yang dibekukan oleh pemerintah Orde Lama. Kemudian lahirlah Keluarga Besar Bulan Bintang yang di masa Orde Baru mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) dan pada masa Reformasi menjadi inspirator bagi penerus perjuangan Masyumi yakni Partai Bulan Bintang (PBB).³²

Selanjutnya pada masa pasca Orba dua organisasi Islam terbesar NU dan Muhammadiyah yang lahir jauh lebih dulu dari Masyumi yakni sebelum kemerdekaan secara proaktif terlibat langsung dalam proses perubahan kepemimpinan untuk membangun sistem demokrasi di Indonesia. *Nahdlatul Ulama* (NU) atau Kebangkitan Ulama adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan, sosial dan ekonomi. Sebelum NU berdiri, berturut-turut berdiri organisasi pergerakan *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916, *Taswirul Afkar* atau *Nahdlatul Fikri* (kebangkitan pemikiran) pada 1918 dan *Nahdlatul Tujjar* (pergerakan kaum saudagar). Baru kemudian musyawarah para kyai memunculkan kesepakatan untuk membentuk organisasi yang lebih lengkap dan tertata rapi bernama *Nahdlatul Ulama* (NU) atau Kebangkitan Ulama pada 16 Rajab 1344 H atau 31 Januari 1926 dan dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Umum NU yang juga sekaligus merumuskan *Qanun Asasi* (prinsip dasar) dan *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua prinsip tersebut kemudian dijabarkan dalam *khittah* NU dan dijadikan rujukan warga NU di bidang sosial, keagamaan dan politik. NU menganut paham *Ahlussunnah waljama'ah* yang mengambil jalan tengah antara kelompok ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan ekstrim *naqli* (skripturalis) dengan merujuk pemikiran Abu Hasan Al-

³² Majelis Syuro Muslimin Indonesia. <http://id.wikipedia.org/wiki/Masyumi>

Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dan di bidang fiqih cenderung mengikuti mazhab: Imam Syafi'i namun tetap mengakui tiga madzhab yang lain yakni madzhab Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hanbali. Sementara dalam bidang tasawuf mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi. Gagasan mengembalikan NU kepada *khittah* nya pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk merumuskan kembali metode berpikir baik dalam bidang fikih maupun sosial serta pola hubungan NU dengan negara dengan lebih menekankan lagi NU sebagai gerakan sosial keagamaan.³³

Selain NU, Muhammadiyah juga berperan penting sebagai gerakan sosial keagamaan di masa Orde Baru. Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam yang besar di Indonesia, memiliki potensi kekuatan politik karena faktor historis Muhammadiyah yang pernah berkecimpung dalam politik praktis pada masa Orla. Pada Muktamar Ujung Pandang tahun 1971, Muhammadiyah memutuskan untuk terlepas dengan segala bentuk politik praktis, tapi anggotanya diberi kebebasan untuk menyalurkan aspirasi politiknya kepada kekuatan-kekuatan politik yang ada selama tidak merugikan Islam dan Muhammadiyah, membedakan dengan kelompok 'Islam Politik'. Ketua Umum Muhammadiyah Amien Rais pada 1998 muncul menjadi tokoh penting yang berperan dalam Reformasi dan juga di dalam perkembangan politik pasca rezim Orba. Walaupun Amien Rais kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional yakni partai politik nasionalis yang memiliki basis massa dari anggota Muhammadiyah, namun Muhammadiyah sendiri setelah Amien Rais tidak lagi menjadi Ketua Umum tetap mengukuhkan diri sebagai gerakan sosial keagamaan atau menurut istilah Bahtiar Effendy, Islam kultural yang membedakannya dari Islam politik³⁴

Evolusi Islamisme menurut Greg Fealy juga terefleksikan dalam perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia di bidang politik, sosial dan ekonomi. Di Indonesia, masih menurut Fealy kalangan Salafy telah cukup berkembang di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir, namun gagasannya tidak banyak diikuti kalangan Muslim. Sementara gerakan Islam yang diilhami oleh Ikhwanul Muslimin seperti misalnya gerakan Tarbiyah atau PKS, berpotensi memiliki dampak lebih luas dibandingkan dengan gerakan Salafy atau Salafi-jihadi, karena sebagian besar aktivitas PKS difokuskan untuk mencari dukungan massa dan secara hati-hati melakukan kompromi demi mendulang dukungan tersebut.³⁵

³³ http://id.wikipedia.org/wiki/Nahdlatul_Ulama

³⁴ . Siti Nurhayati Dewi. *Op.cit*

³⁵ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Op. Cit*

Berbeda dengan Olivier Roy yang menganggap gerakan Islam atau kelompok Islamisme mengalami deklinasi dan kemudian mundur menjadi neo-fundamentalisme yang sibuk mengurus aspek ritual saja, maka Fealy justru beranggapan bahwa kini banyak gerakan Islam yang semula bertentangan dengan masyarakatnya sendiri kini mengalami kemajuan dengan melakukan integrasi politik dan mendukung penguatan demokrasi politik sehingga tidak lagi menganut Islamisme melainkan Pos-Islamisme.³⁶

II.3. Latar Belakang Kemunculan PKS di Indonesia (1998)

Sejarah kemunculan PKS di dalam konstelasi politik di Indonesia berawal dari didirikannya gerakan sosial keagamaan yakni gerakan Tarbiyah sejak 1980 oleh Hilmi Aminuddin, Salim Segaf Al Jufri, Alm. Encep Abdusyukur dan Abdullah Baharmus. Gerakan Tarbiyah ini merupakan gerakan yang terilhami gerakan arus utama Islamis yakni Ikhwanul Muslimin (IM). Di tengah kondisi sosial politik era Orde Baru yang sangat represif terhadap gerakan Islam, gerakan Tarbiyah pun menjadi wadah pendidikan dan pembentukan karakter kader-kader muda yang berasal dari SMP, SMA dan perguruan tinggi yang kemudian menjadi penggerak kegiatan-kegiatan dakwah di Rohis sekolah menengah maupun di perguruan tinggi.

II.3.1. Situasi di Indonesia sebelum Reformasi tahun 1998

Setelah berkuasa sejak 1966, Soeharto dengan Orde Barunya yang disebut sebagai Negara Birokratik Otoriter (NBO) ternyata di akhir 1960-an mulai mengecewakan harapan komponen aktivis Islam karena menolak permintaan untuk menghidupkan kembali partai Masyumi. Selanjutnya di awal 1970-an, pemerintahan Orba juga mengecewakan komponen mahasiswa karena menunjukkan keberpihakannya pada kekuatan modal asing dan bertindak represif terhadap para demonstran di peristiwa Malari (Malapetaka Lima Belas Januari) yang terjadi pada tanggal 15 Januari 1974. Unjuk rasa besar-besaran para mahasiswa di peristiwa Malari merupakan kerusuhan sosial pertama yang sangat terkenal di masa Rezim Soeharto atau Rezim Orde Baru karena terjadi dalam skala yang besar di masa itu.³⁷

Peristiwa Malari merupakan bentuk protes para mahasiswa terhadap dominasi modal asing yang masuk ke Indonesia dan tercetus ketika Perdana Menteri (PM) Jepang Tanaka

³⁶ Greg Fealy dalam presentasinya di acara Bedah buku: *PKS dan kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Bedah buku ini diselenggarakan di FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012.

³⁷ <http://id.wikipedia.org/wiki/Malari>

Kakuei berkunjung ke Jakarta (14-17 Januari 1974). Para mahasiswa merencanakan menyambutnya dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, namun karena dijaga ketat, rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk pangkalan udara. Demikian pula pada saat akan pulang pada tanggal 17 Januari 1974, PM Jepang tersebut diantar dari Istana oleh Presiden Soeharto dengan helikopter dari Bina Graha langsung menuju pangkalan udara. Sebelumnya kedatangan Ketua *Inter-Governmental Group on Indonesia* (IGGI), Jan P. Pronk juga telah dijadikan momentum awal untuk demonstrasi anti-modal asing dan klimaksnya terjadi berupa Peristiwa Malari pada saat kedatangan PM Jepang pada Januari 1974.³⁸

Di dalam buku Otobiografi Soeharto (1989), kasus Malari (Malapetaka lima belas Januari) 1974 dilewatkan begitu saja, tidak disinggung sama sekali. Padahal dalam peristiwa tersebut tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan termasuk 50 tokoh pemimpin mahasiswa dan cendekiawan, seperti Hariman Siregar, Sjahrir, Yap Thiam Hien, Mohtar Lubis, Rahman Tolleng, dan Aini Chalid. Selain itu sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak dan dibakar, 144 buah bangunan rusak berat, 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan. Perusakan kantor Toyota Astra dan Coca Cola.³⁹

Dari peristiwa yang tidak pernah diungkap secara tuntas ini Tokoh Malari yang juga ketua Dema UI, Hariman Siregar melihat kejanggalan dalam peristiwa demonstrasi mahasiswa yang berujung kerusuhan tersebut karena aksi mahasiswa sudah selesai pada pukul 14.30, sementara kerusuhan berupa peristiwa penjarahan dan pembakaran terjadi satu jam setelahnya. Massa yang mengaku dari kalangan buruh menyerbu Pasar Senen, Blok M, dan kawasan Glodok. Mereka melakukan penjarahan toko-toko dan membakar mobil buatan Jepang sehingga Jakarta membara. Akibatnya pada tanggal 17 Januari Hariman dan teman-temannya ditahan berdasarkan Undang-Undang Antisubversi. Pengadilan berdasar UU Antisubversi itu menuai kecaman dan sebagian mahasiswa dibebaskan setelah setahun berada di penjara, karena terbukti tak terlibat.⁴⁰

Dalam buku-buku yang ditulis oleh Ramadhan KH (1994) dan Heru Cahyono (1998) Soemitro menekankan peran Ali Moertopo dan Soedjono Humardani “membina” orang-orang eks DI/TII dalam GUPPI (Gabungan Usaha Perbaikan Pendidikan Islam). Dalam

³⁸ *Ibid.*

³⁹ <http://serbasejarah.wordpress.com/2011/12/21/jejak-soeharto-peristiwa-malarithe-shadow-of-an-unseen-hand/>

⁴⁰ *Ibid.*

kasus Malari, lewat organisasi tersebut dilakukan pengerahan massa oleh Ramadi dan Kyai Nur dari Banten. Bambang Trisulo disebut-sebut mengeluarkan Rp 30 juta untuk membayar para preman. Sementara Roy Simandjuntak mengerahkan tukang becak dari sekitar Senen.⁴¹

Pola pemanfaatan unsur Islam radikal sering berulang pada era Orde Baru namun ironisnya Jenderal Ali Moertopo menuduh eks PSII dan Partai Masyumi yang disebutnya sebagai kelompok ekstrem kanan sebagai dalang peristiwa tersebut, tetapi setelah para tokoh Malari seperti Syahrir dan Hariman Siregar diadili, tuduhan tersebut tidak terbukti. Bahkan belakangan terungkap dari pernyataan Jenderal Soemitro bahwa besar kemungkinannya justru Ali Moertopo dengan CSIS-nya yang mendalangi peristiwa Malari.⁴² Namun dalam buku MALARI peristiwa Malari 1974 sebagai sebuah kecelakaan yang tidak terduga dan merupakan akibat rivalitas dua orang Jenderal di sekitar Soeharto yakni Soemitro dengan Ali Moertopo yang masing-masing mempunyai pasukan dan bergerak atas loyalitasnya kepada Soeharto. Hal yang juga ikut mengemuka dalam peristiwa Malari 1974 tersebut adalah bahwa kejadian tersebut sebagaimana tertera dalam “dokumen Ramadi” mengindikasikan “ada seorang Jenderal S akan merebut kekuasaan dengan menggulingkan presiden sekitar bulan April hingga Juni 1974.

“Revolusi sosial pasti meletus dan Pak Harto bakal jatuh”, tuduhan dalam “dokumen” itu tentu mengacu kepada Jenderal Soemitro sementara Ramadi dikenal dekat dengan Soedjono Hoemardani dan Ali Moertopo. Ramadi pun ditangkap dan beberapa waktu kemudian meninggal secara misterius dalam status tahanan. Pasca Malari Soeharto langsung mengambil alih jabatan Soemitro sebagai Pangkopkamtib tersebut, dan posisi aspri Presiden yang dijabat Ali Murtopo juga ditiadakan dan Kepala BAKIN Soetopo Juwono diganti dengan Yoga Sugama.⁴³

Dalam buku “Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974” yang ditulis oleh Heru Cahyono, tergambar betapa kompleksnya *power interplay* (interaksi kekuatan yang saling mempengaruhi) dan bahwa diyakini oleh Soemitro, mahasiswa hanya merupakan salah satu unsur kekuatan di masyarakat yang digunakan oleh kubu Ali Murtopo untuk menciptakan kerusuhan massal tahun 1974 tersebut. Kelompok Islam radikal juga diyakini ikut dimanfaatkan oleh Ali Murtopo untuk menciptakan kerusuhan di daerah Senen-Glodok.

⁴¹ Heru Cahyono. Pangkopkamtib Soemitro dan Peristiwa 15 Januari 1974. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1998. h: 166

⁴² <http://serbasejarah.wordpress.com>. *Op.cit*

⁴³ *Ibid.*

Baik Jenderal Soemitro, mahasiswa dan kelompok Islam radikal eks Masyumi menjadi tercitrakan negatif akibat peristiwa Malari 1974 tersebut. Soemitro menyatakan ada *an unseen hand* dalam peristiwa tersebut dan bahwa Ali Murtopo juga dinilai telah melibatkan Pastur Beek dari Ordo Jesuit yang merupakan unsur ‘asing’, organisasi akademisi yang menjadi *think tank* Ali Murtopo CSIS dan juga lembaga Operasi Khusus (Opsus) dalam rekayasa peristiwa Malari 1974.⁴⁴

Terlepas dari berbagai spekulasi mengenai latar belakang peristiwa kerusuhan Malari, peristiwa tersebut telah menjadi fakta sejarah bahwa ketidakindependensian gerakan mahasiswa berdampak negatif baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi rakyat yang menganggap mahasiswa sebagai *moral force* yang memperjuangkan mereka. Dewan Mahasiswa (Dema) UI di bawah pimpinan Hariman Siregar terbawa masuk ke dalam arena *power interplay* karena secara sadar atau tidak sadar telah terintervensi dan terkooptasi oleh unsur-unsur kekuasaan pemerintahan Orba. Rezim Soeharto yang disebut pula sebagai rezim militer selain juga NBO didominasi dengan persaingan kekuatan para Jendral yang saling berebut pengaruh dan posisi di dekat Soeharto telah menjadikan mahasiswa sebagai alat untuk saling menjatuhkan. Keresahan mahasiswa terhadap dominasi Jepang sebagai investor asing di Indonesia menjadi isu yang tidak lagi benar-benar *genuine* karena telah dimanfaatkan oleh kubu Ali Murtopo dengan anak buahnya yang “membina” kampus UI untuk memberikan pencitraan negatif dan pembuktian ketidakmampuan Jendral Soemitro sebagai Panglima ABRI yang sekaligus juga Pangkoptantib saat itu. Dalam penuturan Soemitro terungkap bahwa Hariman Siregar sebelum peristiwa Malari 1974 sempat mendatangi Soemitro dan melapor sebagai Ketua Dema UI yang baru (1973) dan memiliki hubungan dengan ‘Tanah Abang III’ yang merupakan kode bahwa ia dekat dengan Letkol Utomo, ajudan Ali Murtopo yang ditugaskan ‘membina’ mahasiswa UI.⁴⁵

Sementara bagi rezim militer Soeharto peristiwa tersebut terlepas dari siapa dalangnya dan apakah peristiwa tersebut murni atautkah hanya sebuah rekayasa yang jelas telah menjadi sebuah alasan kuat untuk bertindak semakin represif dengan melakukan penangkapan para aktivis mahasiswa dan Menteri Pendidikan Daoed Joesoef⁴⁶ menerapkan kebijakan kontroversial Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan

⁴⁴ *Ibid.* h: 34-35

⁴⁵ Heru Cahyono. *Op.cit.* h: 99.

⁴⁶ Daoed Joesoef adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dari 1978 sampai 1983 dalam Kabinet Pembangunan III. Ia juga salah seorang tokoh yang mendirikan CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*), sebuah tangki pemikiran yang banyak dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Ia mendapatkan dua gelar Doktor (PhD) dari Universitas Sorbonne, Perancis, di bidang ekonomi.

(NKK/BKK) yang intinya membersihkan kampus dari kegiatan-kegiatan politik praktis. Pemerintah beranggapan kegiatan politik hanya boleh dilakukan di luar kampus dan tugas utama mahasiswa adalah belajar. Joesoef pun menghapuskan organisasi mahasiswa saat itu yakni Dewan Mahasiswa (Dema) di universitas-universitas di seluruh Indonesia sehingga praktis melumpuhkan kegiatan politik mahasiswa.⁴⁷

Pelanjut pelaksana NKK adalah Prof. Dr. Nugroho Notosusanto⁴⁸ yang namanya kemudian identik dengan konsep NKK yang terus diberlakukannya ketika dilantik sebagai Rektor UI dan kemudian menjadi Mendikbud. Di tahun 1983 terjadi demonstrasi menjelang Sidang Umum MPR sehingga aparat keamanan (ABRI) masuk ke kampus Institut Teknologi Bandung (ITB) dan sejumlah aktivis mahasiswa Jakarta dan Bandung yang dianggap bertanggungjawab ditahan di rumah tahanan militer di Jakarta dan Bekasi. Di masa Nugroho menjadi Rektor UI, dua tokoh mahasiswa Teknik UI yakni Biner Sitompul dan Peter Sumariyoto yang bersikukuh tetap menghidupkan Dema diskors dan akhirnya dipecat dari kampus UI.⁴⁹

Tindakan represif Orba berupa NKK/BKK di kampus-kampus negeri terkemuka pada awal 1980-an menyebabkan stagnasi gerakan mahasiswa dan melahirkan berbagai bentuk “pelarian” bagi para mahasiswa karena mulai menimbang resiko dipecat sebagai mahasiswa dan dipenjarakan seperti yang sudah terjadi pada para aktivis karena menentang represi rezim Orba. Oleh karena itu ada mahasiswa yang melarikan diri ke dalam hedonisme dan menghidupkan slogan: Pesta, Buku dan Cinta serta memilih bersikap apatis karena dipaksa menjauh dari pengabdian dan kepedulian terhadap rakyat. Sebagian lagi menyibukkan diri dengan seni musik dan teater sehingga banyak musisi dan seniman yang lahir dari kampus UI pada masa itu seperti Iqbal Fauzi dari FISIP, Christine Panjaitan dari Fakultas Sastra (FS), Grup musik Chaseiro dipimpin Chandra Darusman dari FH, grup orkes dangdut: Pancaran Sinar Petromak (PSP) dipimpin Sys Ns dan Ferrasta Soebardi alias Pepeng dari FISIP dan Neno Warisman dari FS yang aktif di teater kampus.

Kemudian banyak pula mahasiswa yang berkonsentrasi pada kegiatan organisasi di luar Kampus seperti misalnya menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ataupun

⁴⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Daoed_Joesoef

⁴⁸ Direktur Pusat Sejarah dan Tradisi TNI dan Museum Satria Mandala yang berpangkat Brigadir Jenderal TNI tituler. Nugroho Notosusanto adalah mantan guru besar dan rektor Universitas Indonesia (1982-1983) yang pada tahun 1983 diangkat menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud).

⁴⁹ Forum Pembaca KOMPAS. Senin, 28 Apr 2008 20:12:06 -0700.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Ada pula yang memilih berkonsentrasi di dunia akademik dan mendapatkan beasiswa ke luar negeri serta baru kembali ke Indonesia menjelang peristiwa Reformasi 1998. Sedangkan sebagian mahasiswa lainnya “melarikan” diri ke kegiatan positif pengajian-pengajian di kampus seperti Kuliah Keputrian setiap hari Jum’at, menyelenggarakan Seminar Hari-hari Besar Islam, *Daurah* atau Pesantren Kilat dan *halaqah* atau kelompok kajian di mushola-mushola dan masjid-masjid kampus seperti Masjid Arif Rahman Hakim (ARH) di Salemba atau Masjid At Taqwa di Rawamangun, Masjid Shalahudin di Yogyakarta, Masjid Al Ghiffari di IPB Bogor dan Masjid Salman ITB. Selain itu mereka juga aktif juga di kegiatan bakti sosial untuk korban banjir, pemeriksaan kesehatan gratis, khitanan massal dan pelajaran Kursus Membaca Al Qur’an baik di masjid-masjid ekstra kampus seperti aktif di Remaja Islam Sunda Kelapa (RISKA) maupun masjid-masjid kampus.

Efek berikutnya dari meningkatnya kesadaran beragama adalah bertambahnya jumlah Muslimah yang berjilbab, di kampus Sastra (sekarang FIB) di awal 1980-an semula hanya sekitar 5 orang, di Fakultas Psikologi 3 orang, di FH 1 orang, di FISIP 4 orang, namun di akhir 1980-an sudah berlipat-lipat yang memakainya. Namun represifnya rezim Orba terasakan pula dampaknya pada kehidupan beragama pelajar dan mahasiswa. Peraturan yang ketat berupa larangan mengenakan jilbab di sekolah negeri menyebabkan banyak anak SMA Negeri yang dikeluarkan, kemudian juga ada mahasiswa yang batal mendapatkan beasiswa karena fotonya mengenakan jilbab.

II.3.2. Gerakan Tarbiyah

Sebagian besar dari para aktivis Rohis (Rohani Islam) di sekolah dan kampus kemudian tertarik bergabung dengan gerakan Tarbiyah yang didirikan oleh Hilmi Aminuddin, seorang alumni Universitas Madinah di Arab Saudi pada awal 1980.⁵⁰ Hilmi Aminuddin menekuni pembinaan kader-kader melalui *halaqah* dan *usrah*.⁵¹ Bila melihat pola *Tarbiyah* atau pembinaan melalui *halaqah* dan *usrah* yang perkembangannya melalui sistem *stel-sel*, nampak gerakan Tarbiyah Hilmi Aminuddin terilhami dan mengadopsi model pembinaan Ikhwanul Muslimin yang digagas Hasan Al Banna. Sebuah persentuhan

⁵⁰ Wawancara dengan Ahmad Feri Firman, murid Hilmi Aminuddin, staf Komisi Kajian Strategis MPP PKS. Jakarta, 31 Oktober 2010, pukul 10.30-11.00.

⁵¹ *Halaqah* (dalam bhs Arab: lingkaran) adalah kelompok pembinaan para calon kader Tarbiyah membentuk lingkaran ketika belajar mendengarkan pembina, sedangkan *usrah* (keluarga) bagi kader inti Tarbiyah.

pemikiran yang sangat dimungkinkan dalam pergaulan mancanegara di Universitas di Timur Tengah.⁵²

Pengaruh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin (IM) di Indonesia yang meningkat pesat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Salah satu penyebabnya adalah faktor kekecewaan baik terhadap rezim Suharto maupun organisasi-organisasi Islam dan para pemimpinnya yang dianggap kurang memiliki integritas, sehingga mereka mencari model baru bagi perjuangan Islam. (Alm.) Rahmat Abdullah dikutip oleh Greg Fealy pada September 2002 menyebutkan banyak kalangan muda Muslim tertarik dengan model perjuangan IM yang menawarkan pendekatan baru dalam kegiatan dakwah Islam. Mereka kemudian mengadopsi model IM dengan membentuk kelompok-kelompok kecil atau sel-sel yang dikenal dengan *halaqah* dan *usrah* sebagai unit terkecil yang menekankan ketaatan pada kewajiban ritual, rasa saling tolong menolong, pengkajian pengetahuan Islam dan aktivitas sosial berupa layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.⁵³

Kegiatan-kegiatan di masjid kampus, seperti Kuliah Jum'at Kajian Keputrian diisi oleh kader-kader Gerakan Tarbiyah di hampir seluruh fakultas di UI. Demikian pula kegiatan Integrasi Studi Tentang Islam (ISTI) di FEUI, Formasi di FSUI atau SALAM UI dan lain-lain juga dipimpin para kader Tarbiyah dan pada perkembangannya kemudian bahkan memimpin pula organisasi kemahasiswaan resmi kampus yakni BEM di kampus-kampus sekuler yang utama yakni UI, IPB, ITB, UGM, IKIP, STAN dan lain-lain. Sepanjang dekade 1980-an dan awal 1990-an gerakan Tarbiyah masih menampakkan diri sebagai gerakan keagamaan dan mulai mengakses sumber daya negara yakni para alumnus STAN yang telah menjadi kader Tarbiyah ketika kuliah dan kemudian bertugas di daerah-daerah sehingga memudahkan gerakan ini tersebar ke seluruh kampus di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Gerakan Tarbiyah yang terorganisasi rapi ini juga meningkatkan jumlah anggota dalam upaya merebut kepemimpinan di lembaga-lembaga kampus, sehingga pada awal 1990-an para aktivis gerakan Tarbiyah memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi terbesar di Indonesia.⁵⁴

⁵² Imdadun Rahmat. *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008.

⁵³ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan, 2007.

⁵⁴ *Ibid.*

Imdadun Rahmat, peneliti NU, berpendapat bahwa PKS bukan fenomena politik baru di tanah air melainkan kelanjutan dari Masyumi yang terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin.⁵⁵ Namun Greg Fealy berpendapat bahwa kelahiran PK (PKS) tidak bisa dilepaskan dari pengaruh gerakan Islam Ikhwanul Muslimin di Indonesia yang meningkat pesat pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Salah satu penyebabnya adalah faktor kekecewaan baik terhadap rezim Suharto maupun organisasi-organisasi Islam dan para pemimpinnya yang dianggap kurang memiliki integritas, sehingga mereka mencari model baru bagi perjuangan Islam. (Alm) Rahmat Abdullah dikutip Greg Fealy pada September 2002 menyebutkan banyak kalangan muda Muslim tertarik dengan model perjuangan Ikhwanul Muslimin yang menawarkan pendekatan baru dalam kegiatan dakwah Islam melalui *halaqah* dan *usrah* sebagai unit terkecil yang menekankan ketaatan pada kewajiban ritual, rasa saling tolong menolong, mengkaji pengetahuan Islam dan melakukan aktivitas sosial berupa layanan bagi masyarakat yang membutuhkan.⁵⁶

Sepanjang dekade 1980-an dan awal 1990-an gerakan Tarbiyah masih menampakkan diri sebagai gerakan keagamaan dan mulai mengakses sumber daya negara yakni para alumnus STAN yang telah menjadi kader Tarbiyah ketika kuliah dan kemudian bertugas di daerah-daerah sehingga memudahkan gerakan ini tersebar ke seluruh kampus di Jawa, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi. Gerakan Tarbiyah yang terorganisasi rapi ini juga meningkatkan jumlah anggota dalam upaya merebut kepemimpinan di lembaga-lembaga kampus, sehingga pada awal 1990-an gerakan Tarbiyah memimpin Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi terbesar dan paling bergensi.⁵⁷

Selanjutnya terjadi perkembangan lain di luar prediksi para kader Tarbiyah yakni jatuhnya Soeharto karena krisis finansial, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di samping adanya krisis sosial-politik dan krisis kepercayaan pada pemerintahan sehingga muncul kondisi *chaos* di mana-mana pada 1998. Golkar yang selama dua dekade telah menjadi mayoritas tunggal (*single majority*) dalam sistem perpolitikan di Indonesia ikut tumbang seiring runtuhnya Orde Baru dan lengsernya Soeharto di tahun 1998. Kondisi politik pun berubah drastis dengan jatuhnya Soeharto dan berakhirnya rezim Orde Baru serta dimulainya era Reformasi. Perasaan tertekan selama lebih dari tiga dekade karena tidak ada kebebasan menemukan momentumnya yang tepat. Gerakan mahasiswa bersama rakyat menumbangkan

⁵⁵ Imdadun Rahmat. *Op. Cit.*

⁵⁶ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Op.cit.* h: 112.

⁵⁷ *Ibid.*.

Soeharto, dengan didukung oleh perubahan zaman berupa keterbukaan di era globalisasi, gelombang demokratisasi dan terpecahnya militer di Indonesia antara yang ingin mempertahankan *status quo* dengan kubu militer yang lebih demokratis.⁵⁸

Gerakan Tarbiyah pun dihadapkan pada terbukanya peluang membentuk partai politik. Musyawarah para kader inti gerakan Tarbiyah yang saat itu berjumlah sekitar 3000 orang di seluruh Indonesia diselenggarakan untuk memilih apakah gerakan dakwah ini akan menjadi sebuah partai politik atau ormas saja. Sebanyak lebih dari 72 persen kader menyatakan setuju untuk membentuk partai politik sementara 28 persen ingin mendirikan ormas. Sementara itu pada saat yang hampir bersamaan aktivis-aktivis muda generasi kedua dan ketiga gerakan Tarbiyah mendirikan organisasi Islam ekstra kampus Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) pada 1997 di Malang dengan Fahri Hamzah sebagai Ketua Umum. Organisasi ini berperan menggerakkan kampus-kampus bekerjasama dengan ormas-ormas Islam dan seluruh elemen masyarakat dalam memunculkan gerakan Reformasi yang melengserkan Soeharto dan berperan memblow up Amien Rais untuk menjadi *icon* tokoh Reformasi. Pada Agustus 1998, KAMMI dan para pemimpin Gerakan Tarbiyah dengan pendirinya Hilmi Aminuddin di belakang layar mendirikan partai politik Islam yakni Partai Keadilan (PK) dan memunculkan Dr. Nur Mahmudi Ismail lulusan AS sebagai presiden PK serta Dr. Hidayat Nurwahid lulusan Madinah sebagai Ketua Majelis Syuro.⁵⁹

II.3.3. Kemunculan Kembali Partai-partai Politik Islam di Indonesia di Era Reformasi dan Lahirnya PKS.

Adanya *euphoria* kebebasan di masa reformasi 1998 menyebabkan munculnya begitu banyak parpol yang dulu tidak dimungkinkan di zaman Orde Baru. Reformasi politik memberikan keleluasaan berlangsungnya demokrasi multipartai. Dikeluarkannya UU No. 2 Tahun 1999 tentang partai politik yang ditandatangani pada bulan Februari 1999 oleh Presiden Republik Indonesia pertama di era Reformasi yakni BJ. Habibie membuka babak baru dalam sistem politik dan kepartaian di Indonesia. UU tersebut kembali membuka tradisi sistem politik multipartai di Indonesia seperti di era awal kemerdekaan, namun partai-partai baru telah bermunculan jauh sebelum UU tersebut disahkan dan partai-partai yang paling

⁵⁸ Irsyad Zamjani. *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif*. Dian Rakyat. Jakarta, 2009. h: 216.

⁵⁹ Penulis diwawancarai wartawati RRI: Yolanda, di MD Building, Oktober 2009.

cepat bermunculan sepanjang tahun 1998 hingga awal 1999 adalah partai bersimbol keislaman. Sebagian besar merupakan warisan ideologis dari partai maupun organisasi Islam yang pernah sukses di masa lalu.⁶⁰

Bahtiar Effendy berpendapat perkembangan Islam di dunia politik menjadi signifikan setelah berakhirnya era Soeharto dan dimulainya era Reformasi. Kebangkitan kembali kekuatan Islam politik di Indonesia ditandai dengan berdirinya lebih dari 40 partai politik Islam. Setelah selama bertahun-tahun dinamika politik Indonesia dibatasi situasi segera menjadi berbalik ketika Soeharto mundur dan partai politik yang muncul di era Reformasi mencapai jumlah 181 dengan dengan 42 di antaranya adalah partai Islam. Ada yang semakin meyakini bahwa akhirnya Islam tidak bisa dipisahkan dari politik, sehingga menempatkan nilai agama sebagai sumber daya politik yang besar. Sementara yang lainnya berpendapat kelahiran kembali Islam politik adalah fenomena logis karena terpinggirkan sekian lama oleh rezim Orde Baru, sehingga jatuhnya Soeharto memberi kesempatan untuk mengembangkan diri dalam politik.⁶¹

Partai politik Islam yang muncul di era Reformasi dapat dikategorikan ke dalam tiga varian. Varian pertama adalah partai Islam warisan masa Orde Lama (Orla) yakni partai pewaris ideologi partai Islam di masa tersebut. Kemudian varian kedua adalah partai politik Islam warisan Orde Baru yakni PPP sebagai satu-satunya peninggalan masa Orba. Partai ini berusaha kembali pada citra keislamannya dengan memakai lambang Ka'bah lagi. Lalu varian ketiga adalah partai Islam generasi baru yang tidak memiliki hubungan dengan partai Islam di masa Orla atau Orba dan memiliki struktur organisasi dan sistem yang baru serta berbeda dengan partai-partai Islam sebelumnya.⁶²

Walaupun partai politik Islam yang muncul di era Reformasi begitu banyak dengan beberapa variannya, Bahtiar Effendy menganggap fenomena politik aliran di era Reformasi tidak sekuat di tahun 1950-an masa Orla, karena dari 42 partai politik Islam yang ada hanya 20 yang bisa ikut Pemilu 1999 dan hanya 10 yang menempatkan wakilnya di parlemen yakni PPP (58), PKB (51), PAN (34), PBB (13), PK (7), PNU (5), PP (1), PSII (1), PPII Masyumi (1) dan PKU (1). Hasil tersebut menunjukkan mayoritas Muslim di Indonesia masih lebih memilih partai nasionalis, karena keseluruhan partai Islam hanya memperoleh 17,8 persen

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ Bahtiar Effendy. *Op. Cit.* Hal: 202. Lihat juga dalam Irsyad Zamjani. *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif.* Dian Rakyat, Jakarta, 2009. h: 222-224.

⁶² Irsyad Zamjani. *Op. Cit.* h: 216.

(87 kursi), jauh di bawah perolehan partai-partai nasionalis yakni 62,5 persen (290 kursi). Nurcholish Madjid beranggapan di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat kini lebih melihat substansi dari pada simbol. Oleh karena itu selama partai-partai politik Islam tidak mampu mengartikulasikan gagasannya dalam perspektif kepentingan masyarakat luas, maka sangat sulit untuk menjadi kekuatan utama di Indonesia.⁶³

Tabel II.1. Perolehan Suara Partai-partai Islam dalam Pemilu di Era Reformasi

No	Partai	Pemilu 1999		Pemilu 2004		Pemilu 2009	
		Suara	Kursi	Suara	Kursi	Suara	Kursi
1	PPP	11.329.905	58	9.248.764	58	5.533.214	
2	PP	551.028	1				
3	PBR			2.764.998	13	1.264.333	
4	PKB	13.336.982	51	11.989.564	52	5.146.122	
5	PKU	300.064	1				
6	SUNI	180.167	-				
7	PNU/PPNUI	679.179	5	895.610	-	146.779	
8	PKNU					1.327.593	
9	PAN	7.528.956	37	7.303.324	52	6.254.580	
10	PMB					414.750	
11	PBB	2.049.708	14	2.970.487	11	1.864.752	
12	PPII Masyumi	456.718	1				
13	Masyumi baru	152.289	-				
14	PSII	375.920	1				
15	PSII 1905	152.820	-				
16	PIB	192.712	-				
17	PCD	168.097	-				
18	PUI	269.309	-				
19	PK/PKS	1.436.565	7	8.325.020	45	8.206.955	
20	PID	62.901	-				
21	P. KAMI	289.489	-				
22	PAY	213.979	-				
23	PUMI	49.839	-				

Sumber: Irsyad Zamjani. *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif*. Hal: 226

Greg Fealy dan Anthony Bubalo menyebutkan bahwa bentuk awal PKS adalah gerakan Tarbiyah yang muncul pada permulaan 1980-an dan hingga awal 1990-an merupakan gerakan keagamaan. Pada awal 1990-an kader-kader Tarbiyah mulai memimpin dewan mahasiswa atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di banyak perguruan tinggi

⁶³Bahtiar Effendy. *Op.Cit.* h: 216.

terbesar. Pada Agustus 1998, KAMMI dan para pemimpin Gerakan Tarbiyah dengan pendirinya Hilmi Aminuddin di belakang layar mendirikan partai politik Islam yakni Partai Keadilan dan memunculkan Dr. Nur Mahmudi Ismail lulusan AS sebagai presiden PK serta Dr. Hidayat Nurwahid lulusan Madinah sebagai Ketua Majelis Syuro. PK pada 1998 memiliki sekitar 60.000 anggota baik inti maupun pendukung dan ketika pembentukan PKS diumumkan pada pertengahan 2003, partai ini telah memiliki lebih dari 300.000 anggota.⁶⁴

Pada tanggal 20 Juli 1998, Partai Keadilan (PK) didirikan dan diumumkan dalam sebuah konferensi pers di aula Masjid Al Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta.⁶⁵ Para pendiri PK terdiri dari 52 orang tokoh dari berbagai latar belakang institusi, pendidikan, gender, suku bangsa dan profesi. Pendirian PK ini sebelumnya didahului dengan sebuah angket atau jajak pendapat di kalangan 6000 orang kader inti gerakan Tarbiyah di seluruh Indonesia, bahkan juga yang tengah berada di luar negeri. Jajak pendapat internal partai ini dilakukan sebagai upaya merespon situasi sosial politik setelah jatuhnya Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi pada tahun 1998. Jajak pendapat yang diikuti oleh 6000 kader inti ini dan dengan jumlah formulir yang kembali sebanyak 5800 (97%) menunjukkan hasil bahwa 68% responden menginginkan pendirian partai politik, sedangkan 27% responden menginginkan bentuk organisasi massa dan sisanya ingin bertahan dalam bentuk asal gerakan Tarbiyah yakni berupa yayasan, dakwah kampus, pesantren, dan lembaga-lembaga dakwah lainnya. Maka berdasarkan hasil tersebut 52 tokoh gerakan Tarbiyah kemudian merumuskan dan mendirikan Partai Keadilan (PK). Namun dalam dinamikanya, ada beberapa orang pendiri di antaranya adalah: Yusuf Supendi (2010), Dr. H. Daud Rasyid Sitorus (2010), Tizar Zein (2010), Syamsul Balda dan Zirly Rosa Jamil (2003) yang menurut Aus Hidayat Nur, ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) dikeluarkan karena pelanggaran disiplin organisasi partai dan ada juga yang memilih keluar karena merasa sudah tidak sejalan lagi dengan arah kebijakan partai dewasa ini.⁶⁶

Partai Keadilan (PK) dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar Jakarta dengan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa. Partai ini menjadikan Islam sebagai asas partai serta berlambangkan Ka'bah yang di dalamnya terdapat dua bulan sabit di antara garis tegak. Partai ini memilih nama "Partai Keadilan", karena dengan menegakkan keadilan, Bangsa Indonesia diharapkan bisa lebih baik lagi di masa depan. Susunan pengurus PK terdiri atas

⁶⁴ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Op.Cit.* h:116.

⁶⁵ Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. *Draft Kronologi Sejarah PKS*. Jakarta, 2007. h: 1.

⁶⁶ Wawancara dengan Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO): Aus Hidayat Nur. Sabtu: 4 Desember 2010, pukul: 9:44-10.00 WIB.

Majelis Syuro yang diketuai oleh Dr. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. sekaligus sebagai Ketua Majelis Pertimbangan Partai dan Dewan Syariah yang dipimpin Dr. Salim Segaf Al Jufri, M.A., serta Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dengan Dr. Ir. Nur Mahmudi Ismail, M.Sc. sebagai Presiden dan Syamsul Balda sebagai wakilnya. Partai Keadilan yang memiliki visi: keadilan, kemajuan, persatuan nasional dan kerja sama internasional bermarkas di sebuah Ruko (Rumah Toko) sewaan di Jl. Mampang Prapatan Raya No. 98 D-E Jakarta Selatan 12720. Setelah itu pada bulan 27 September di tahun yang sama PK mendeklarasikan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PK DKI Jakarta di Istora Senayan yang dihadiri sekitar 50.000 massa dan diketuai Ahmad Heryawan, Lc. (kini Gubernur Jawa Barat). Kemudian berturut-turut dideklarasikan pula DPW PK Jawa Timur di Gelora Pancasila dan diketuai oleh Rofi' Munawar, Lc. Kemudian DPW PK Jawa Tengah yang diketuai Zuber Syafawi dan DPW Lampung yang diketuai oleh KH. Ir. Abdul Hakim. Dalam waktu yang bersamaan juga dilakukan peresmian DPW di beberapa daerah, antara lain di Kaltim, Kalbar, Kalsel dan Bengkulu serta di hampir seluruh wilayah di Indonesia dan juga terbentuk PIP (Pusat Informasi dan Pelayanan) di berbagai negara.⁶⁷

PK langsung mengikuti pemilu pertama di era Reformasi yakni 1999 dan hanya memperoleh suara sebesar 1.436.565 atau 1,36 % sehingga tidak menembus batas *electoral threshold*.⁶⁸ PK berada diperingkat tujuh besar setelah PDI Perjuangan, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB dan mendapatkan 7 kursi di DPR RI serta membentuk Fraksi Reformasi bersama PAN. Partai ini memunculkan KH. Didin Hafidhudin MS sebagai calon Presiden RI dan membangun aliansi Poros Tengah dengan PPP, PAN, PBB yang kemudian memunculkan Gus Dur sebagai calon alternatif presiden dengan didukung pula oleh PKB. Setelah penolakan MPR atas laporan pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie, poros tengah tersebut mengusung Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI pengganti BJ Habibie dengan mengalahkan Megawati.⁶⁹

Pada tanggal 20 Oktober 1999, Partai Keadilan memutuskan menerima tawaran kursi menteri dalam Kabinet Persatuan Nasional (KPN) yang dipimpin KH. Abdurrahman Wahid, yaitu dengan menempatkan Presiden Partai Keadilan Dr. Ir. Nur Mahmudi Isma'il, M.Sc sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan. Nur Mahmudi direkomendasikan DPP PK dari hasil Musyawarah Pimpinan Partai yang terlibat dalam Tim *Falah* Sidang Umum MPR

⁶⁷ Draft Kronologi Sejarah PKS. *Op. Cit.*

⁶⁸ Greg Fealy dan Antonio Bubalo. *Op. Cit.*

⁶⁹ Draft Kronologi Sejarah PKS. *Op. Cit.*. h: 9.

(unsur MPP, Dewan Syari'ah dan DPP) yang menganggap pemerintahan KH. Abdurrahman Wahid terpilih berkat dukungan Poros Tengah yang terdiri dari PPP, PK, PBB, PAN, PKB dan sebagian Golkar.⁷⁰

Melalui rapat gabungan Majelis Pertimbangan Partai, Dewan Syariah dan Dewan Pimpinan Pusat PK, pengunduran diri Nur Mahmudi Ismail sebagai Presiden PK pada tanggal 16 April 2000 diterima dan disahkan. Nur Mahmudi mengundurkan diri karena diangkat oleh Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sebagai Menteri Perhutanan dan Perkebunan (Menhutbun) dalam Kabinet Pembangunan Nasional. Sebagai penggantinya, Rapat Gabungan PK memutuskan mengangkat Wakil Presiden PK Untung Wahono, sebagai pejabat sementara Presiden PK.⁷¹

Pada tanggal 18 Mei 2000, DPP Partai Keadilan (PK) menyelenggarakan Musyawarah Nasional I (Munas I) di Bumi Wiyata Depok. Acara pembukaan diikuti sekitar 150 orang utusan dari 27 DPW PK se-Indonesia dan ribuan penggembara. Munas dilaksanakan selama empat hari (18-21 Mei 2000) dengan acara inti berupa pembahasan AD/ART PK, penyusunan program kerja PK serta pemilihan pengurus baru. Acara Munas I PK pada tanggal 19 diwarnai dengan kampanye calon presiden PK periode 2000-2005. Selanjutnya pada tanggal 2 Mei 2000, Munas I PK memilih Hidayat Nur Wahid sebagai Presiden PK periode 2000-2005 dengan menyisihkan dua calon lainnya, Irwan Prayitno (Ketua Komisi VIII DPR) dan Anis Matta (mantan Sekjen DPP PK). Dalam proses pemilihan dengan cara voting tersebut, Hidayat Nur Wahid memperoleh 21 suara, Irwan Prayitno (13 suara) dan Anis Matta memperoleh 5 suara.

Pada tanggal 3 Maret 2001 Hidayat Nurwahid didampingi Fahri Hamzah dalam konferensi pers di Kantor DPP PK menyampaikan kepada publik bahwa kredibilitas Presiden Wahid sebagai pemimpin bangsa sangat merosot di mata masyarakat dengan indikator diterimanya secara bulat kesimpulan Pansus yang menyatakan presiden telah melakukan kebohongan publik. "Kebohongan publik serta tindakan-tindakan yang menjurus pada praktek KKN kasus *Buloggate* dan *Bruneigate* sebenarnya hanyalah merupakan puncak gunung es yang demikian besar." Secara lebih tegas, Hidayat mengatakan bahwa Presiden Wahid sudah semestinya mengakhiri sendiri masa kepemimpinan kontroversialnya karena

⁷⁰ Jullie Chernov Hwang, *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World. What Went Right*. Pai Grave MacMillan, New York, 2009. h: 81.

⁷¹ *Sikap Kami (Kumpulan Seruan, Pernyataan Politik, Bayanat dan Pidato Politik DPP PK)*. Humas DPP PK, Jakarta, 2001. h:100.

tidak mampu melaksanakan amanah reformasi secara totalitas. "Wahid akan dikenang secara indah dan dipuji oleh bangsa Indonesia," lanjutnya. *Buloggate* menghasilkan keputusan pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid dan Wakil Presiden Megawati menggantikan posisi sebagai Presiden RI kelima dan Hamzah Haz menjadi Wakil Presiden.⁷²

Pada perkembangan selanjutnya yakni tanggal 17 April 2003 sebanyak 264 peserta dan 131 peninjau dari 30 provinsi menghadiri pembukaan Musyawarah Nasional Istimewa (Munasis) Partai Keadilan di Asrama Haji Jawa Barat, Bekasi. Acara dibuka oleh KH Rahmat Abdullah selaku Ketua Majelis Pertimbangan Partai Keadilan dan dihadiri oleh Presiden PK, Sekjen, Ketua MPP, Ketua Dewan Syariah Pusat PK, utusan dari unsur Majelis Syuro, DPP, MPP, DSP serta utusan dari 30 provinsi. Pada Munasis ini pula Sidang Majelis Syuro XIII Partai Keadilan merekomendasikan agar PK bergabung dengan PK Sejahtera yang saat itu dipimpin Almuzammil Yusuf. Hasil Majelis Syuro itu disampaikan langsung oleh Presiden PK, Hidayat Nur Wahid yang menyebutkan ada dua alasan PK bergabung dengan PKS yaitu: (1) PK memiliki kedekatan visi dan misi dengan PK Sejahtera yakni ingin mensejahterakan rakyat. (2) PK Sejahtera memiliki SDM yang handal. Pada tanggal 20 April 2003 ratusan kader dan simpatisan PKS memadati Monumen Nasional (Monas), Jakarta untuk mengikuti deklarasi PKS. Dalam acara tersebut, selain deklarasi PKS juga ada pernyataan resmi penggabungan Partai Keadilan (PK) ke PK Sejahtera dan Ketua Umum PK Sejahtera Almuzammil Yusuf menyatakan menerima penggabungan itu. Menurut Almuzammil, PKS merupakan kelanjutan dari PK dengan berbagai pembaharuan dan perbaikan yang belum dapat dicapai PK. Dasar bergabungnya PK adalah Munas I PK yang berlangsung 17 hingga 19 April 2003 yang menentukan bahwa Partai Keadilan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera.⁷³

Seusai Pemilu 2004, Musyawarah Majelis Syuro (MMS) IV PKS yang berlangsung 24-25 April 2004 menghasilkan beberapa keputusan.⁷⁴ *Pertama*, PKS menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas perolehan suara PKS pada Pemilu 2004 dan ungkapan apresiasi kepada kader, konstituen, simpatisan maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah menyelenggarakan Pemilu 2004 dengan lancar. *Kedua*, berdasarkan hasil Jaring Capres Emas di lingkungan internal PKS, Hidayat Nur Wahid mendapat suara terbanyak akan tetapi karena perolehan suara PKS tak mencapai 20%, maka sesuai hasil keputusan Musyawarah

⁷² *Ibid.* h: 16.

⁷³ *Ibid.*

⁷⁴ *Ibid.* h: 22.

Majelis Syuro III, PKS tidak mengajukan Hidayat Nur Wahid sebagai Capres/Cawapres RI. Kemudian setelah Amien Rais, calon yang didukung PKS pada putaran pertama kalah, pada tanggal 26 Agustus 2004 PKS membuat nota kesepahaman dengan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemilihan Presiden putaran kedua, 20 September 2004. Beberapa kesepakatan yang dilakukan, adalah: (1) konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, diantaranya dalam keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi, (2) mempertahankan kedaulatan NKRI, (3) melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia, (4) meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat, (5) mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya.

Walau pun gagal menjadi capres, Hidayat Nur Wahid pada tanggal 6 Oktober 2004 dengan selisih hanya dua suara, terpilih menjadi Ketua MPR RI periode 2004-2009. Hidayat yang juga Presiden PKS, dicalonkan oleh koalisi keummatan yang terdiri PPP, PKB, PAN, PKS dan PD, satu paket dengan AM Fatwa dari PAN, Aksa Mahmud dan Mooryati Soedibyo yang menjadi Wakil Ketua MPR.⁷⁵ Hidayat mengatakan akan mengembalikan lembaga MPR menjadi lembaga terhormat untuk mewakili rakyat setelah pengucapan sumpah janji pimpinan MPR dipimpin Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan.

Setelah pada tanggal 11 Oktober 2004 atau lima hari setelah dilantik sebagai Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid resmi mengundurkan diri sebagai Presiden PKS, Majelis Pertimbangan Partai menunjuk Ketua DPP Wilayah Dakwah I Tifatul Sembiring sebagai Pejabat Sementara. Tak lama setelah itu terjadi bencana besar di Aceh berupa gelombang Tsunami pasca gempa besar. PKS pun segera membentuk Komite Kemanusiaan Indonesia untuk Aceh (KKIA) guna membantu korban gempa bumi dan gelombang tsunami di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) dan Sumatera Utara, pada tanggal 7 Januari 2005 bekerja sama dengan Ikatan Dai Indonesia (IKADI) dalam pemulihan (*recovery*) mental para pengungsi Aceh.⁷⁶

Pada tanggal 29 Mei 2005, Majelis Syuro PKS menetapkan Tifatul Sembiring sebagai Presiden DPP PKS Periode 2005-2010.⁷⁷ Dalam pemilihan presiden partai, tidak dilakukan kampanye lazimnya dilakukan partai politik lainnya karena semuanya diputuskan melalui

⁷⁵ *Ibid.* h: 24.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, h: 26.

musyawarah di Majelis Syuro. Dengan melalui pemilihan raya internal kader inti PKS, KH. Hilmi Aminudin oleh 51 orang anggota Majelis Syuro didaulat sebagai Ketua Majelis Syuro menyisihkan kandidat lainnya yakni Abdul Hasib, Salim Segaf Al Jufri dan Surahman Hidayat. Sementara Surahman Hidayat terpilih menjadi Ketua Dewan Syariah Pusat dan kursi Ketua Majelis Pertimbangan Partai ditempati Suharna Surapranata. Mendampingi Tifatul, Anis Matta menjabat Sekretaris Jenderal dan Mahfudz Abdurrahman sebagai Bendahara Umum. Dalam musyawarah tersebut juga dihasilkan beberapa keputusan strategis partai di antaranya, (1) penambahan jumlah anggota Majelis Syuro untuk mengakomodasi peningkatan jumlah kader PKS, (2) penegasan kembali PKS sebagai partai dakwah dan Majelis Syuro sebagai lembaga tertinggi partai, sehingga keputusan Majelis Syuro mengikat seluruh organisasi, termasuk keputusan suksesi pemilihan Ketua lembaga tinggi partai.

Tak lama setelah ditetapkannya Tifatul Sembiring sebagai presiden PKS, Musyawarah Nasional (Munas) I PKS digelar pada 23 hingga 31 Juli 2005, di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta. Di antara agendanya adalah amandemen AD/ART dan Rencana Strategi PKS ke depan. Munas ini merupakan rangkaian dari Musyawarah Majelis Syuro II. Dalam Munas I ini, selain agenda utamanya Musyawarah Majelis Syuro II, juga dilakukan sosialisasi produk Majelis Syuro. Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memberikan sambutan pada pembukaan Munas I PKS di Jakarta, 27 Juli 2005 mengatakan "PKS sebagai bagian dari komponen bangsa harus ikut bersama-sama menyelesaikan persoalan bangsa."⁷⁸

Tifatul Sembiring beserta sejumlah ketua umum partai pada tanggal 3 Januari 2006 hadir dalam penyerahan bantuan dana pemerintah di Gedung Depdagri. Sebanyak 14 partai politik dari 16 partai politik yang mendapatkan kursi di DPR RI menerima bantuan dana partai politik dengan besaran dana yang disesuaikan jumlah kursi masing-masing di legislatif. Dasar perhitungan yang dilakukan adalah, pemerintah menghargai satu kursi di DPR sebesar Rp 21 juta dan jumlah yang diterima partai adalah harga tersebut dikalikan dengan perolehan kursi masing-masing partai dalam Pemilu 2004.⁷⁹

Menghadapi Pemilu 2009, PKS menargetkan peningkatannya dari 500 ribu orang menjadi 2 juta orang. Menurut Presiden PKS, Tifatul Sembiring dalam orasinya pada tanggal 26 Juli 2006 menyatakan optimis bisa meraih 20 persen suara pada Pemilu 2009 mendatang mengingat pertumbuhan jumlah kader PKS cukup tinggi. Dari tahun 1999 ke

⁷⁸ *Ibid.* h: 28.

⁷⁹ *Ibid.* h: 29.

2004, jumlah kader PKS meningkat dari 60.000 orang menjadi 500 ribu orang atau hampir 8 kali lipat. Untuk lima tahun yang akan datang diperkirakan akan mencapai lima kali lipatnya. Menjelang Pemilu 2009, DPP PKS juga melakukan konsolidasi dalam bentuk Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang diselenggarakan 25–27 Agustus 2006 di Hotel Century Jakarta. Rapimnas ini mensosialisasikan program-program yang sudah disusun melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) dan salah satunya adalah pencapaian target Pemilu 2009 sebesar 20% dan untuk mencapai perolehan suara tersebut akan dilakukan perekrutan kader besar-besaran pada tahun 2006 hingga 2008.⁸⁰ Namun ternyata target pertumbuhan kader yang dicanangkan tidak tercapai, demikian pula dengan target perolehan suara, hanya terjadi peningkatan suara yang kecil, dari 7,2% menjadi 7,88%. Walaupun demikian peringkat PKS naik di urutan ke-4 dan perolehan kursi juga meningkat dari 45 menjadi 57 kursi.⁸¹

II.4. Latar Belakang Kemunculan AKP di Turki (2001).

Kemunculan *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) di tahun 2001 dan memperoleh keberhasilan luar biasa di Pemilu 2002 bukanlah sesuatu yang tiba-tiba melainkan merupakan kelanjutan dari rangkaian partai-partai berhaluan Islam yang didirikan oleh gerakan sosial keagamaan *Milli Görüş*. Situasi sebelum lahir *Milli Görüş* dan partai-partai politik berhaluan Islam yang didirikannya, sangat tidak kondusif bagi setiap gerakan Islam bahkan boleh dibilang sangat represif. Republik Turki yang sejak berdirinya pada tahun 1923 memiliki konstitusi sekuler memang menganggap agama dan simbol-simbol keagamaan sebagai ancaman bagi konstitusi negara. Pendiri dan pemimpin gerakan Islam An Nur yakni Said Nursi berulang kali dipenjarakan atau diasingkan karena pemerintahan Turki sangat represif terhadap setiap manuver gerakan Islam yang dianggap sebagai upaya makar terhadap konstitusi sekuler. Republik Turki disebut sebagai negara ultra sekuler, sebab melebihi standar sekulerisme negara-negara Barat sekuler yang masih memberi ruang bagi masyarakat untuk menunjukkan pula sisi keagamaannya.

Namun faktanya selama puluhan tahun paham sekuler dipaksakan di Turki, masyarakat Turki tetap memegang teguh keyakinan, tradisi dan budaya Islam yang sudah berakar lama di masyarakat sejak di masa Khilafah Utsmaniyah atau *Ottoman Empire*, sehingga sekulerisme hanya dianut oleh kelompok elit Kemalis (pengikut Kemal Pasha) dan

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ www.kpu.go.id

militer. Pada akhir 1960-an militer mengganti taktiknya dan mulai mendekati kelompok-kelompok Islam karena menghadapi ancaman serius dari gerakan sosialisme-marxisme yang di tengah kondisi perekonomian Turki yang terpuruk mengkritik tajam elit borjuis pemerintahan Turki dan melakukan demonstrasi-demonstrasi menuntut perbaikan nasib rakyat, pemberantasan korupsi dan memperdengarkan pula ide revolusioner. Beberapa tokoh gerakan Islam dibebaskan dari penjara dan kelompok-kelompok Islam memperoleh keleluasaan yang lebih untuk bergerak di bidang sosial keagamaan. Strategi militer yang mendekati kelompok Islam untuk menghadapi kelompok sosialis-marxis membawa hikmah berupa perkembangan pesat Islam di Turki.

Maka sejak 1969, *Milli Görüş* didirikan oleh Necmettin Erbakan, tokoh Muslim yang lama studi di Jerman dan sejak 1970 berturut-turut mendirikan *Milli Nizam Partisi* (MNP) atau Partai Keteraturan Bangsa, *Milli Selamet Partisi* (MSP) atau Partai Keselamatan Bangsa, *Refah Parti* atau Partai Kesejahteraan dan *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan di tahun 1997 yang dibubarkan pada tahun 2001. Sikap militer berubah menjadi kembali represif setelah melihat partai-partai politik berhaluan Islam yang didirikan *Milli Görüş* memperoleh dukungan yang cukup besar dari masyarakat Turki yang tidak pernah berhasil disekulerkan. Akibatnya partai-partai berhaluan Islam yang didirikan berulang kali selalu dibekukan dan tokoh-tokohnya dipenjarakan.

Kondisi sosial politik yang tidak stabil semakin memperburuk kondisi perekonomian Turki sehingga berpengaruh pada minimnya kesejahteraan rakyat Turki. Oleh karena itu Recep Tayyip Erdogan berbeda dengan teman-temannya sesama kader *Fazilet Partisi* yang mendirikan *Saadet Partisi* atau Partai Kebahagiaan yang tetap berhaluan Islam *Milli Görüş*, mendirikan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di tahun yang sama dengan berdirinya *Saadet Partisi* yaitu tahun 2001. AKP memilih berkompromi dan bekerjasama dengan militer dan kelompok elit sekuler agar terwujud stabilitas politik yang memungkinkan pemerintahan Turki untuk memperbaiki ekonomi.

II.4.1. Situasi di Turki Sebelumnya Lahirnya Partai Politik Islam.

Pada periode Kemal Ataturk dan penerusnya di era satu partai yakni CHP, ideologi negara sekuler dijaga ketat dari setiap penyimpangan. Militer di Turki masuk ke dalam dunia politik beberapa kali untuk mengambil kekuasaan, melakukan kudeta tahun 1960, 1971, dan

1980 serta sejak tahun 1990-an bertindak diam-diam, menggunakan Ketua Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan pemerintah yang tidak mereka sukai.

Ironisnya, kebangkitan kembali Islam dalam kehidupan di negara ini, sebagian besar dimungkinkan karena peran militer yang selama tahun 1980-an mengurangi represinya pada Islam, karena saat itu kelompok kiri radikal telah mendapatkan pengikut yang kuat di Turki. Konflik antara kelompok kiri radikal dengan golongan kanan menyebabkan keributan yang luar biasa. Ideologi sekuler kelompok kanan seperti fasis nasionalisme dan kelompok kiri (campuran Marxisme-Leninisme) tumbuh dari keresahan sosial dan mereka menyerukan revolusi atau perubahan sosial secara radikal. Mahasiswa dan pekerja melakukan pawai, menyerukan pemogokan dan melahirkan protes jalanan besar-besaran. Faksi kiri dan kanan terlibat dalam bentrokan kekerasan di kampus dan di jalan-jalan kota sehingga terjadi konfrontasi berdarah serta pembunuhan-pembunuhan. Kondisi ini terjadi ketika militer melancarkan kudeta ketiga, tahun 1980 dan memenjarakan ribuan militan sampai keamanan pulih kembali.

Oleh karena itu sebagai sebuah strategi, kepemimpinan militer mulai berpaling ke Islam, sebagai upaya melawan kelompok radikal. Dengan memaafkan sebagian kecil dari kelompok konservatisme agama sehingga dapat kembali ke ranah publik, para jenderal berharap untuk mengalihkan perhatian rakyat dari hasutan revolusi. Larangan pendidikan Islam ditiadakan dengan harapan bahwa pendidikan agama di sekolah akan membuat siswa tidak mudah direkrut oleh ekstremis sekuler, sehingga setelah sekian lama dimarginalkan, kelompok-kelompok Islam yang terkait dengan gerakan *Nurcu* (pengikut ulama besar Turki Said Nursi) dan gerakan sufi mulai muncul kembali. Saat itulah Fethullah Gulen mendapatkan popularitas yang luar biasa dengan pesan-pesan keagamaannya. Partai politik baru yang berhaluan Islam dibentuk untuk mengambil keuntungan dari kebangkitan Islam serta menjadi saluran pengaruh sosial ke dalam politik. Militer beranggapan bahwa mereka bisa memanfaatkan Islam untuk sementara waktu untuk kemudian pada saatnya ditekan kembali. Mereka tidak sadar bahwa Islam tetap merupakan kekuatan vital di bawah permukaan kehidupan sekuler Turki, yang bila sekali diberi kesempatan dengan cepat menjadi kuat. Seorang pemimpin oposisi terkemuka Islam mengatakan bahwa "Kemalisme sekuler adalah sebuah penyimpangan dan bukan norma yang baku. Kemalisme pernah

berakar di bagian kecil elit berpendidikan tinggi dari universitas di pusat-pusat kota Ankara dan Istanbul Turki, namun Turki selamanya adalah *Ottoman Empire*.”⁸²

Ironi lainnya yang terjadi di Turki adalah fakta bahwa provinsi-provinsi konservatif yang sangat mendorong kebangkitan Islam dan memberikan suara bagi partai-partai Islam, pada saat bersamaan juga menjadi pendukung kuat liberalisasi Turki dan untuk diterima ke dalam Uni Eropa. Mereka tidak menuntut dibentuknya negara Islam fundamentalis, sebaliknya mereka mendorong perkembangan pluralisme politik dan globalisasi ekonomi.

Periode pasca Atatürk yang panjang dan kacau antara lain disebabkan oleh dominasi negara dalam pengelolaan ekonomi. Negara membuat semua perencanaan dan pengelolaan perdagangan serta investasi, termasuk memutuskan siapa memproduksi apa. Kondisi demikian amat menguntungkan industri besar dalam hal biaya untuk membatasi pertumbuhan sektor swasta. Kontrol negara yang kuat seperti itu memang diharapkan oleh aliran kemalisme, namun Atatürk sendiri mulai mengakui perlunya liberalisasi sampai tingkat tertentu terkait peran negara di dunia usaha. Atatürk mengizinkan pembentukan Partai Republik Liberal pada tahun 1930 untuk mendorong terciptanya keadaan itu. Tapi liberalisasi saat itu hanya sedikit mengurangi peran dan kendali negara atas perekonomian nasional di Turki, sehingga konsep ekonomi di Turki menyerupai campuran antara kapitalisme dan sosialisme. Pada era 1980-an, para jenderal Kemalis telah menghancurkan kelompok agitator radikal kiri dan kanan untuk mengalihkan perhatian dari tuntutan reformasi ekonomi. Pertumbuhan ekonomi untuk waktu yang lama diabaikan sehingga perekonomian negara berada dalam masa yang sangat sulit, menghadapi beban hutang yang besar dan tingkat inflasi yang sangat tinggi. Membengkaknya sektor publik adalah kerugian dalam menaikkan pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja serta bertambahnya para pengangguran yang memadati perkotaan.

Kepemimpinan militer mulai mengakui pengurangan peran dan kontrol negara serta penguatan kapitalisme memang dibutuhkan dan tugas itu kemudian diemban oleh Turgut Özal, seorang teknokrat dipilih menjadi perdana menteri dengan dukungan para jenderal. Seorang insinyur elektrik dan sudah bekerja sebagai birokrat sejak lama sebelum menjadi seorang manager di Bank Dunia dan pimpinan dari sejumlah perusahaan swasta di Turki. Özal juga dianggap mempunyai dasar yang kuat dalam merumuskan kebijakan bisnis dan

⁸² Marvin Howe. *Turkey a Nation Divided over Islam's Revival*. Wetsview Press, 2000. h: 232-251.

ekonomi. Secara politis dia adalah kanan tengah dan mempunyai hubungan baik dengan kelompok-kelompok Islam, tapi cukup sekuler untuk mendukung terciptanya negara militer Turki. Dia memadukan antara kesalehan kelompok Muslim dengan kebijakan yang bersahabat dengan dunia usaha. Özal mengesahkan perbankan syariah dan menjadi perdana menteri pertama yang pergi haji dalam masa jabatannya, namun dia juga mengajukan lamaran untuk menjadi anggota Uni Eropa pada tahun 1987. Özal juga merumuskan titik-titik pusat baru dan lebih layak dari politik Turki, liberalisme ekonomi, aliran kanan tengah, dan Islam yang ringan, semuanya dibingkai didalam kemalisme. Kebanyakan orang Turki melihatnya sebagai figur penting dalam sejarah Turki sesudah era Atatürk.⁸³

Ketika Özal berkuasa pada tahun 1983, perekonomian masih merupakan warisan dari Kemalisme. Upaya industrialisasi besar-besaran melahirkan manfaat bagi elit dunia usaha di Istanbul tapi juga memberikan kesempatan yang jelas untuk usaha kecil, termasuk lapangan kerja untuk kelas pekerja rendah dan menengah. Industri menggantungkan pada import dan pabrik rakitan, dengan sedikit upaya untuk menghasilkan barang jadi untuk ekspor. Negara melindungi industri tertentu dengan tarif tinggi dan nilai tukar yang baik serta juga subsidi. Özal menjamin pinjaman dari bank dunia dan IMF, yang dengan mereka, Özal bekerja menyusun rencana restrukturisasi yang menjadi engsel bagi perubahan dari neo-liberal menjadi fokus kepada desentralisasi, privatisasi dan fokus pertumbuhan yang didorong oleh ekspor dan redistribusi kewenangan dari negara kepada pasar. Akan ada tekanan baru antara keterbukaan sosial dan partisipasi warga masyarakat. Banyak industri di swastakan sementara perusahaan lain yang sudah tidak menguntungkan ditutup. Özal dengan tegas mengalihkan arah pemerintahan yang mendukung para eksportir dan menghasilkan pendapatan devisa. Ketentuan tarif nilai tukar dan subsidi diubah guna meningkatkan ekspor. Di antara yang tumbuh subur adalah pabrik tekstil dan furnitur, kebanyakan berada di kawasan industri di jantung Anatolia yang cukup jauh dari Istanbul.⁸⁴

Poros birokrasi tingkat tinggi dan pengusaha besar Ankara-Istanbul mulai kehilangan kontrol atas ekonomi sampai lahirnya pengusaha baru dari kota-kota kecil di Anatolia, mirip yang terjadi di American Midwest, di mana Istanbul adalah New York City. Generasi pengusaha baru yang sukses masuk golongan yang konservatif, tapi mereka menyadari bahwa pertumbuhan bisnis mereka bergantung pada bergabungnya dengan ekonomi global melalui peningkatan perdagangan. Rezim ekonomi lama belum pernah mendukung mereka, sehingga

⁸³ <http://www.allaboutturkey.com/ozal.htm>

⁸⁴ *Ibid.*

mereka tidak begitu tertarik dalam model yang dikendalikan oleh negara. Sebaliknya, mereka cenderung mendukung pengurangan kontrol dengan membangun demokrasi yang sebenarnya serta membangun suatu ekonomi pasar bebas. Reformasi Özal membuka jalan bagi *booming* pertumbuhan ekonomi karena nilai komoditi ekspor. Transformasi ekonomi berlangsung sangat pesat di saat globalisasi mengubah kehidupan ekonomi dan sosial Turki. Kekuatan ekonomi beralih kepada usaha kecil dan menengah dan jantung Anatolia menaungi Istanbul sebagai mesin pertumbuhan. Pada tahun 2004, perusahaan-perusahaan kecil dan menengah menyumbang seperempat dari ekspor Turki. Sebanyak 80% dari perusahaan-perusahaan tersebut bahkan belum ada saat Özal menjadi perdana menteri.

II.4.2. Gerakan Dakwah *Milli Görüş* (MG) atau Pandangan Kebangsaan

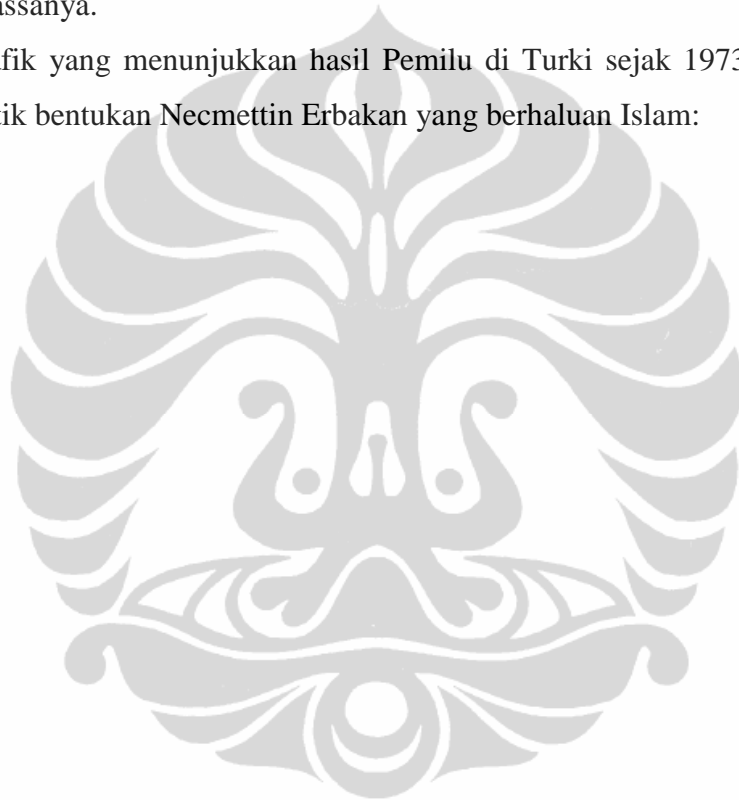
Kelompok Kemalis terus berada dalam kendali kekuasaan selama beberapa dekade setelah kematian Atatürk di tahun 1938, dengan militer menjadi pemandu Kemalisme yang secara ketat menegakkan sekularisme Atatürk dalam negara dan masyarakat. Di bawah kepemimpinan Atatürk itu, Turki menjadi sebuah Republik yang dipimpin seorang presiden dan ada parlemen. Partai yang berkuasa di parlemen melalui pemungutan suara akan menentukan siapa yang menjadi perdana menteri dan biasanya ketua partai. Walaupun perangkat-perangkat demokrasi sudah dimiliki, Atatürk memerintah dengan otoriter dan CHP menjadi satu-satunya partai untuk waktu yang lama sebelum adanya partai-partai baru yang lain. Seiring berjalannya waktu Atatürk berkeinginan melakukan evolusi demokrasi parlementer dan bahkan mempelopori pembentukan partai-partai oposisi selama masa jabatannya, meskipun partai-partai tersebut belum pernah mendapatkan momentum yang cukup untuk mengambil kekuasaan.⁸⁵

Sampai akhirnya tahun 1950 Partai Demokrat akhirnya berhasil menang di Pemilu parlemen dengan *platform* campuran antara ideologi Kemalisme sekularisme militan dengan liberalisme ekonomi yakni mengurangi peran negara dalam perekonomian. Namun proses evolusi demokrasi di Turki penuh dengan ketegangan. Partai Demokrat memenangkan 2 pemilu lagi, pada tahun 1954 dan 1957, tetapi akhirnya dibubarkan pada tahun 1960 karena berbicara terlalu banyak tentang Islam dan pemimpinnya, Perdana Menteri Adnan Menderes, diadili serta dihukum mati pada tahun 1961 karena dianggap berkhianat pada negara.

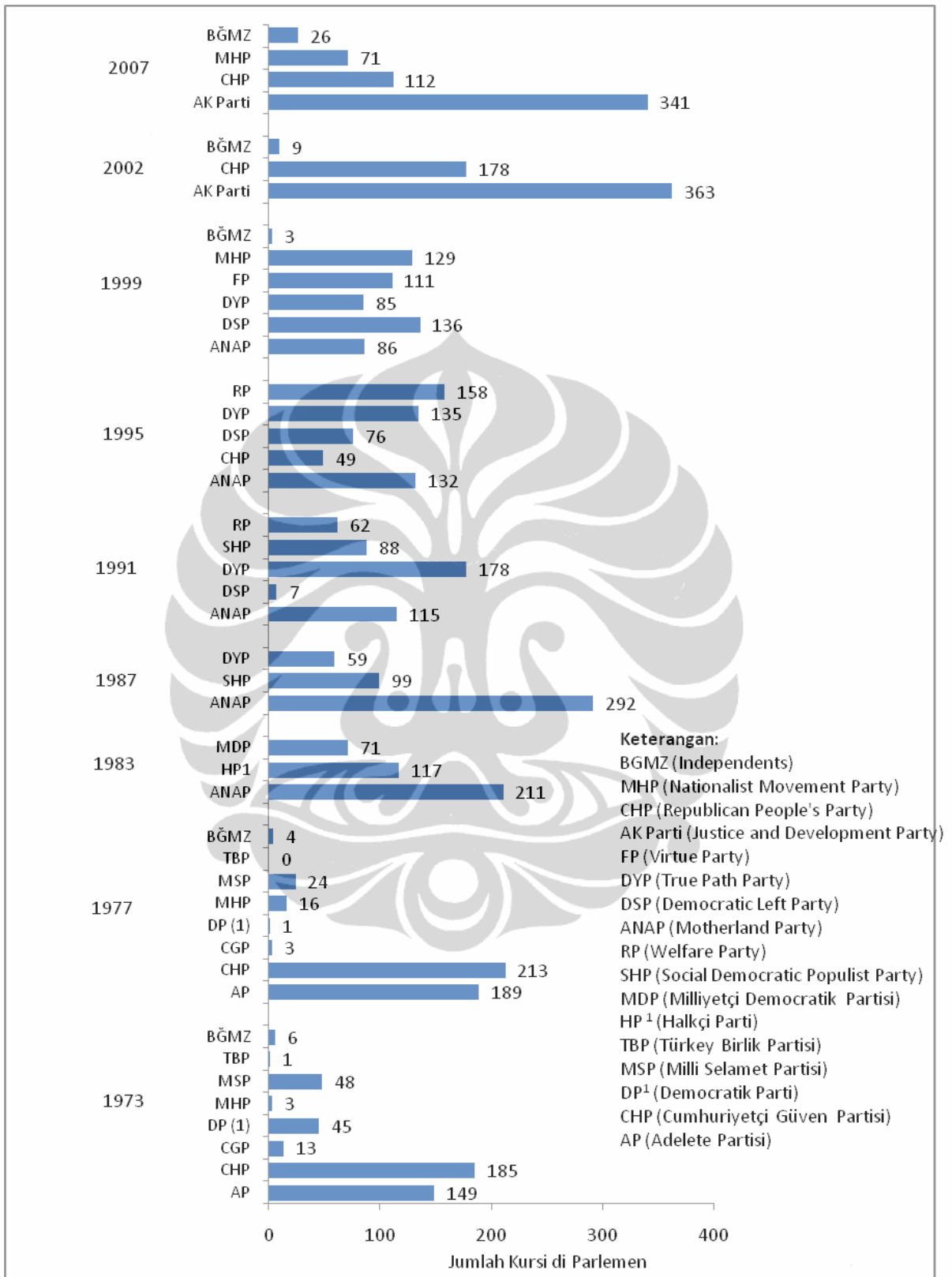
⁸⁵ Marvin Howe. *Op. Cit.* h: 232-251.

Turki yang tidak pernah dijajah telah 23 kali menyelenggarakan Pemilu sejak pertama kali Republik Turki terbentuk di tahun 1923 hingga Pemilu terakhir tahun 2007. Walaupun yang bisa disebut Pemilu yang lebih bebas dan terbuka baru sejak 2002, karena tidak ada kudeta atau pembekuan sebuah partai. Di bawah ini bagan hasil Pemilu di Turki sejak mulai adanya partai berhaluan Islam. Namun karena konstitusi melarang seseorang atau sebuah organisasi maupun partai politik menunjukkan nama atau simbol-simbol agama, maka jelas tidak mungkin sebuah partai politik menyebut dirinya sebagai partai politik Islam. Namun orang bisa melihatnya sebagai partai politik berhaluan Islam dari aktivisme Islamisnya, para tokohnya dan basis massanya.

Berikut ini grafik yang menunjukkan hasil Pemilu di Turki sejak 1973, yakni sejak munculnya partai politik bentukan Necmettin Erbakan yang berhaluan Islam:



Grafik II.1. Hasil Pemilu Turki 1973-2007



CD dari *Turkiye Istatik Kurumu* (Badan Statistik Turki) tahun 2009

Setelah runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani (*Ottoman Empire*) Islam di Turki sejak pemerintahan Mustafa Kemal Pasha sangat ditekan. Kemal Ataturk menganut paham sekulerisme dan mengubah Turki menjadi negara sekuler setelah menghapuskan Khilafah Islamiyah dengan berdirinya Republik Turki pada 1923. Undang-undang Islam diganti Kemal Ataturk dengan undang-undang nasionalis sekuler dan ia memegang kekuasaan hingga kematiannya pada tahun 1938. Ismet Ainnu kemudian menggantikannya selama 21 tahun hingga wafatnya pada tahun 1959 dan setelah itu Ba Yar selama 13 tahun (1960-1973).

Munculnya semangat keislaman yang bertolak belakang dari semangat sekulerisme justru muncul dari tokoh-tokoh Muslim yang kuliah di Eropa. Ketika kembali ke Turki mereka memiliki semangat demokratisasi dan semangat keislaman. Salah seorang yang menonjol adalah Necmettin Erbakan yang mendirikan gerakan Islam modern *Milli Görüş*⁸⁶. Erbakan lahir pada 29 Oktober 1926 di Sinop, Turki Utara dan hingga wafatnya tanggal 27 Februari 2011 kini masih aktif di dunia politik sebagai Ketua Umum Saadet Partisi menggantikan Nurman Kurtulmus. Beliau seorang insinyur lulusan Istanbul Technical University dan memperoleh gelar *PhD* dari *RWTH Aachen University*, Jerman yang setelah kembali ke Turki, menjadi dosen di almamaternya serta menjadi profesor pada tahun 1965. Selanjutnya bekerja sebagai pimpinan di beberapa perusahaan dan kemudian beralih ke dunia politik serta terpilih sebagai Deputy di Konya pada 1969. Sebelum mencapai kesuksesan di dalam karir politiknya, Erbakan sebenarnya telah memperoleh kesuksesan juga dalam dunia bisnis industri dan menghasilkan beberapa penemuan. Ideologi Erbakan yang berhaluan Islam tergambar jelas dalam manifesto *Islamische Gemeinschaft Milli Görüş* (IGMG) yang diterbitkannya pada tahun 1969 yang kemudian menjadi nama bagi organisasi yang didirikannya.

Istilah *Milli Görüş* berasal dari manifesto ideologi Necmettin Erbakan. Awalnya, yang dimaksudkan dengan *Milli* dalam *Milli Görüş* adalah *millah* Ibrahim, atau dalam pengertian yang luas: *ummat* yang didasari kesamaan tauhid. Jadi sebenarnya nama ini tidak ada kaitannya dengan *millet* dalam bahasa Turki yang berarti rakyat atau bangsa. Namun nampaknya hal itu dibiarkan dipahami secara luas sebagai Pandangan Kebangsaan karena terkait dengan konstitusi Turki yang sekuler. Sejarah dibentuknya asosiasi Islam *Milli Görüş* berawal dari direkrutnya pekerja-pekerja Turki oleh pemerintah Jerman Barat pada tahun 1960-an. Berjuta-juta Muslim dari Turki dan negara Muslim lainnya sejak saat itu mulai bermigrasi ke Eropa. Walaupun sebagian sudah pulang ke tanah airnya masing-masing,

⁸⁶ http://en.wikipedia.org/wiki/Necmettin_Erbakan

hingga kini masih ada lebih kurang 15 juta Muslim yang bermukim di Eropa Barat. Dan sejak awal tahun 1970-an pekerja-pekerja Turki di Eropa, terutama di Jerman sudah mulai mendirikan masjid-masjid dan tempat kegiatan umat Islam. Sehingga mulanya asosiasi ini dimaksudkan untuk mengkoordinasikan kebutuhan ummat akan tempat ibadah, kemudian pengadaan dan pembinaan imam-imam dan khatib, barulah kemudian berkembang juga ke aspek budaya dan layanan sosial. Organisasi juga melakukan pemeliharaan dan pemakmuran masjid-masjid di Jerman, Belanda, Belgia, Perancis, Swiss, Austria, Italia, Inggris, Denmark, Swedia dan Norwegia. Ada 30 cabang *Milli Görüş*, 15 di antaranya di Jerman, 4 di Perancis, 2 di Austria, 2 di Belanda, dan di beberapa negara lainnya.⁸⁷

Di satu sisi, organisasi *Milli Görüş* di tiap negara memiliki hubungan kerja dengan IGMG pusat dan dengan cabang-cabang *Milli Görüş* lainnya, serta di sisi lain mereka juga bekerja sama dengan masyarakat lokal di mana mereka berada. Organisasi ini bertanggung jawab mengkoordinasikan pelayanan ibadah dan pendidikan, termasuk pembinaan para imam dan khatib serta menyelenggarakan perayaan-perayaan Hari Besar Islam. Kantor pusat di Jerman mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan kantor cabang, bekerja sama dengan masyarakat regional dan lokal terkait penyelenggaraan haji, penyembelihan hewan kurban, penentuan jadwal shalat atau penyelenggaraan jenazah. IGMG mengkoordinasikan 514 masjid beserta jamaahnya, 323 di antaranya berada di Jerman. Mereka juga menyediakan berbagai fasilitas pendidikan, fasilitas untuk kegiatan perempuan, remaja dan olah raga. Fasilitas yang tersedia berjumlah 1833 lokal dan saat ini memiliki 87000 anggota. Shalat Jum'at di masjid-masjid anggota IGMG secara teratur dihadiri oleh 300.000 orang. IGMG pada dasarnya adalah sebuah institusi yang bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi Muslim, mencari solusi untuk permasalahan dan membantu proses integrasi Muslim dengan masyarakat Eropa. Karena itu IGMG juga mengimplementasikan dan mengembangkan konsep serta bersedia menjadi partner pemerintah dalam bidang sosial-politik. IGMG juga memiliki pedoman pandangan yang jelas terkait dengan: demokrasi, dialog antar-agama, integrasi, pendidikan dengan menggunakan bahasa ibu, hubungan antar-laki-laki dan perempuan serta cara berpakaian. Terkait dengan aliran politiknya yang berhaluan Islam, maka Erbakan pun menjadi pendiri dan pemimpin dari rangkaian partai Islam yang dibangunnya sejak 1969 yakni MNP, MSP, *Refah Partisi*, *Fazilet Partisi* dan *Saadet Partisi*.⁸⁸

⁸⁷ <http://www.igmg.de/verband/islamic-community-milli-goerues/what-does-milli-goerues-mean.html>

⁸⁸ *Ibid.*

II.4.3. Partai-partai politik Islam sebelum AKP dalam dinamika politik di Turki dan Lahirnya AKP.

Di Turki tidak henti-hentinya terjadi instabilitas politik yang salah satu penyebabnya adalah campur tangan militer di dalam pemerintahan di Turki. Pada tahun 1980, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa kudeta militer. Walaupun keadaan ini berangsur-angsur mulai berkurang, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia secara terang-terangan masih sering terjadi. Perlawanan suku Kurdi dan etnis Armenia yang ada di negara ini merupakan sumber konflik politik yang terus berlangsung di negeri ini. Belum lagi dengan negara Armenia dan Yunani sebagai negara tetangga Turki. Ketika partai buruh al-Kurdastani melakukan pemberontakan bersenjata karena ingin mendirikan negara Kurdi, maka militer Turki menumpasnya dan korban yang terbunuh dalam peristiwa ini mencapai lebih dari 40.000 orang. Pada saat itu Turki dipimpin oleh Turgut Özal yang setelah wafat digantikan oleh Süleyman Damirel pada tahun 1993 dengan Tansu Çiller sebagai perdana menteri wanita pertama pada tahun yang sama.⁸⁹

Pada tahun 1996 Turki menjalin kerja sama di bidang militer dengan Israel yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kemarahan bangsa Arab dan kaum Muslimin. Padahal sejak awal 1990 Turki sedang mengalami krisis sosial, politik dan ekonomi atau krisis multidimensional yang sangat berat. Krisis politik ditandai dengan berganti-gantinya pemerintahan sejak tahun 1995, dimulai dari Necmettin Erbakan (Islam), kemudian Tansu Çiller yang berduet dengan Mesut Yilmaz, berganti lagi Erbakan bersama Çiller, kemudian Yilmaz. Pada tahun 1999, Yilmaz dipecat dan digantikan oleh Bülent Ecevit. Dan pada tahun 1999, pemerintah Turki menangkap Abdullah Öcalan (tokoh Kurdi) yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Akibatnya kondisi politik di Turki semakin tidak stabil.

Dan ditambah krisis ekonomi, maka puncaknya pada tahun 2001 krisis ekonomi meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Turki. Rakyat dan pihak swasta kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan. Mereka menginginkan perubahan. Masalah serius di dalam aspek sosial, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bangsa Turki. Selain kondisi sosial-politik dan ekonomi yang buruk sehingga menyebabkan krisis kepercayaan rakyat dan swasta terhadap pemerintahan, terjadi pula represi terhadap

⁸⁹ Ahmad al-Usaury. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Akbar Media Eka Sarana. Jakarta, 2003. h: 495.

kebebasan *civil society*. Masyarakat Turki yang memiliki akar keislaman yang sangat kuat sangat ditekan oleh pemerintah ultra sekuler.⁹⁰

Momentum yang tepat bagi kemunculan kembali partai berhaluan Islam adalah ketika Turki mengajukan proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa sehingga semakin menguat tuntutan melakukan demokratisasi yang secara tidak langsung melemahkan posisi militer dan sekuler yang represif terhadap Islam serta sebaliknya memberi keleluasaan pada partai berhaluan Islam. Bila dilakukan kilas balik terhadap kemunculan partai politik berhaluan Islam, maka dengan jelas nampak bahwa itu semua itu bermula dari Erbakan pemimpin *Milli Görüş* yang pada 1969, di tengah kondisi Turki yang sangat ultra sekuler dan militer yang sangat represif, mendirikan MNP yakni partai berhaluan Islam yang dikategorikan Kanan-Tengah. Mereka menyebut diri mereka sendiri partai Konservatif-Demokrat. Tak lama setelah berdiri segera dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap melanggar konstitusi sekuler yakni mendirikan sebuah partai yang bernuansa Islam atau mencirikan simbol keislaman. Tak lama kemudian Erbakan kembali mendirikan partai politik yakni MSP berhasil mengikuti dua kali Pemilu yakni pada 1973 memperoleh 48 kursi. Pada tahun itu pula Erbakan yang juga adalah Ketua Umum MSP berkoalisi dengan CHP yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mustafa Bülent Ecevit selama terjadinya peristiwa krisis Cyprus di tahun 1974. Pada 1977 perolehan suara MSP menurun menjadi 24 kursi. Ketika terjadi kudeta militer pada tahun 1980, partainya tersebut dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi dan Erbakan dilarang berpolitik.

Namun setelah ada referendum pencabutan larangan pada tahun 1987, Erbakan mendirikan kembali di Ankara partai politik bernama *Refah Partisi* yang dipimpin oleh Ahmet Tekdal serta memiliki slogan: *Justice is our goal*. Ideologi *Refah Partisi* adalah *İslamis Mili Görüş* dan didirikan oleh kelompok Islamis dengan para tokohnya adalah Ali Türkmen, Ahmet Tekdal, dan Necmettin Erbakan. *Refah Partisi* ikut berpartisipasi pada beberapa Pilkada dan menang di tiga kota: Konya, Sanliurfa, dan Van. Prosentase pemilih mereka hampir mendekati 5%. *Refah Partisi* kemudian ikut dalam Pemilu tahun 1991 dan berkoalisi dengan *The Nationalist Task Party* (Turkish: *Milliyetçi Çalışma Partisi/MCP*) dan *Reformist Democracy Party* (Turkish: *Islahatçı Demokrasi Partisi/IDP*). Prosentase suara yang diperoleh 16,9% dan koalisi ini memenangkan 62 deputi, namun 19 deputi yang diperoleh MCP dan 2 IDP meninggalkan *Refah Partisi* setelah itu.⁹¹

⁹⁰ Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*). Makalah: *Introductory Brief About AKP*. 2008.

⁹¹ http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_Party

Partai ini mendapatkan keuntungan dari persaingan tajam yang terjadi di antara dua pemimpin dari dua partai konservatif sekuler yang berbeda, yakni Mesut Yilmaz dan Tansu Çiller. Sehingga Erbakan bisa membawa partainya kepada keberhasilan yang mengejutkan pada Pemilu 1995, menjadi partai terbesar dan memenangkan Pemilu serta ketua mereka Erbakan menjadi perdana menteri tahun 1996 dan merupakan perdana menteri pertama dari kelompok Islam. Erbakan berkoalisi dengan Tansu Çiller dari *Doğru Yol Partisi* (DYP) atau Partai Jalan Kebenaran. Erbakan berusaha lebih mengembangkan hubungan Turki dengan negara-negara Arab dalam upayanya mengikuti program-program kesejahteraan ekonomi mereka untuk dikembangkan di tengah masyarakat Turki. Pemerintahan Turki berusaha untuk melaksanakan pendekatan politik yang multi dimensional dengan negara-negara tetangga. Pandangan politik luar negerinya memiliki dua pilar, hubungan kerja sama yang erat dan persatuan di antara negeri-negeri Muslim, serta pertarungan melawan Zionisme. Ia membentuk persatuan *The Developing Eight* D-8 yang bertujuan mencapai persatuan ekonomi dan politik yang kuat di antara negara-negara Muslim yakni Turki, Iran, Malaysia, Indonesia, Mesir, Bangladesh, Pakistan dan Nigeria. Jumlah penduduk keseluruhan negara ini dengan jumlah lebih dari 800 juta orang atau 14% dari populasi dunia.

Citra Erbakan memburuk setelah isi pidatonya yang terkenal dianggap meremehkan demonstrasi menentang skandal *Susurluk*. Walaupun pemerintahannya tidak memiliki kaitan dengan skandal tersebut akan tetapi ia dipersalahkan pada saat itu karena tidak melakukan penolakan secara jelas terhadap skandal tersebut. Maka militer Turki secara bertahap mulai memberikan peringatan pada pemerintahan Erbakan dan bahkan akhirnya menekan Erbakan untuk mundur pada 1997. Sebenarnya pada saat itu sudah ada perjanjian resmi antara Perdana Menteri Erbakan dengan Tansu Çiller untuk saling bergantian dalam kurun waktu tertentu; Erbakan misalnya menjadi perdana menteri untuk suatu waktu tertentu dan dia akan turun untuk kemudian digantikan dengan Tansu Çiller. Akan tetapi karena partainya Çiller pemenang ketiga di parlemen maka ketika Erbakan turun, Presiden Süleyman Demirel menunjuk perdana menteri dari partai terbesar kedua yakni perdana menteri sebelumnya: Mesut Yilmaz. Namun karena perjanjian tersebut diketahui dan diarahkan oleh militer yang ternyata kemudian malah memberangus pemerintahan Erbakan.

Pemerintahan koalisi yang dipimpin oleh Erbakan dipaksa meletakkan pemerintahan oleh militer Turki pada tahun 1997 terkait dengan tuduhan memiliki agenda Islam. Pada tahun 1998 *Refah Partisi* dibekukan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap mempromosikan Islam fundamentalis di Turki dan Erbakan kembali dilarang dari kegiatan politik karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sekularisme yang menjadi konstitusi

Negara Turki. Keputusan pembekuan ini didukung oleh *European Court of Human Rights* (ECHR) pada 13 Februari 2003. Keputusan ECHR dikritik oleh *Human Rights Watch* karena ketidakkonsistennya, setelah mereka sebelumnya menolak membekukan partai-partai lain pada kesempatan yang berbeda.

Mantan Perdana Menteri Necmettin Erbakan pada tanggal 23 Nopember 1997 selesai membacakan tiga hari pidato pembelaannya di hadapan Mahkamah Konstitusi terkait kasus yang dapat menyebabkan partainya dan dirinya dilarang melakukan aktifitas politik selama lima tahun. Erbakan menolak tuduhan bahwa *Refah Partisi* mengabaikan konstitusi negara yang sekuler dan mengubahnya menjadi negara Islam. Walaupun sidang ini tertutup untuk publik, Erbakan mengungkapkan argumen-argumennya di hadapan wartawan-wartawan asing di Istanbul. Erbakan mengatakan, “Tidak ada satu pun organisasi yang tidak terlibat terorisme yang dapat dibekukan. Mereka mengatakan *Refah Partisi* adalah sarang teroris untuk melawan negara sekuler. Namun jika ditanya mereka sendiri juga tidak memiliki bukti.” Undang-undang di negara Turki menegaskan bahwa partai politik tidak boleh bertujuan merubah karakter sekuler Republik Turki. Undang-undang ini juga melarang partai-partai memperoleh suara melalui penyalahgunaan isu-isu keagamaan. Tapi jaksa penuntut umum, Vural Savaş, menyatakan bahwa *Refah Partisi* pantas ditutup. Karena telah menjadi pusat aktifitas yang dapat membahayakan konstitusi negara. Savaş mencontohkan *Refah Partisi* berkampanye untuk menghapuskan larangan mengenakan jilbab di kampus, sekolah-sekolah dan kantor-kantor pemerintahan serta ingin mendirikan sekolah agama atau *madrasah* yang menurut Savaş, akan mempropagandakan fundamentalisme.⁹²

Maka pada tanggal 17 Januari 1998 Mahkamah Agung Turki menjatuhkan sanksi berupa pembekuan terhadap partai politik terbesar saat itu yakni *Refah Partisi* karena dianggap melakukan tindakan subversif untuk menggantikan konstitusi negara yang sekuler menjadi berdasarkan Islam. Salah seorang pemimpin muda di *Refah Partisi*, Abdullah Gül, mengatakan keputusan tersebut menghambat proses demokrasi di Turki. Menurut Gül, ummat Islam adalah tulang punggung negeri Turki dan sebagian besar mendukung *Refah Partisi* sehingga dalam masyarakat demokratis, kelompok ini harus terwakili. Ia menyatakan akan segera mendirikan partai politik lain. Negara-negara asing termasuk sahabat Turki (Amerika dan beberapa negara di Uni Eropa) memberikan peringatan pada pemerintah Turki

⁹² www.surrey.ac.uk/politics

untuk menghindari keputusan seperti itu karena akan menghambat proses demokratisasi yakni adanya penghargaan terhadap pluralitas dan kebebasan berekspresi.

Walaupun *Refah Partisi* dibekukan dan Erbakan dilarang berpolitik selama 2 tahun oleh Mahkamah Agung Turki, ia tetap menjadi tokoh dan mentor politik bagi para kadernya. Tak lama setelah *Refah Partisi* dibekukan, pada 1997 sekelompok kecil politisi Islam membentuk partai bernama *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan yang akan menjadi wadah baru bagi para pemimpin *Refah Partisi* dan ternyata pada Pemilu 1999 masih memperoleh 111 kursi. Namun para jaksa Federal pada tanggal 26 Februari 1998 mengamati mereka dengan seksama, walaupun *Fazilet Partisi* memiliki basis yang lebih luas dan mengurangi unsur relijiusitasnya dibanding *Refah Partisi* serta lebih inklusif dan membolehkan perempuan menjadi fungsionaris partai dan calon anggota legislatif. Pemimpin *Fazilet Partisi*, Ismail Alpin pun mengatakan bahwa partai ini bukan pelanjut dari partai sebelumnya. Tetapi para jaksa dan pengamat tidak mempercayainya, mereka segera melakukan investigasi terhadap partai ini apakah mereka masih seperti *Refah Partisi* dalam bentuk yang baru. Savaş, mengatakan bila ditemukan bukti bahwa FP sama saja dengan *Refah Partisi*, maka akan kembali berusaha dibekukannya.

Ketika para pengurus Uni Eropa sedang mengevaluasi dan memperbaharui tuntutannya agar Turki menjadi negara yang lebih demokratis, pengadilan pada tanggal 11 Maret 2000 malah menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Erbakan karena pidato yang diucapkannya 6 tahun yang lalu yakni pada 1994. Keputusan ini segera mendatangkan kritik dari para pemimpin Eropa dan memperingatkan bahwa semakin kecil kemungkinan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Pemimpin Uni Eropa, Gunter Verheugen, menyatakan bahwa Turki sebenarnya secara historis, ekonomi dan budaya adalah bagian dari Eropa, tetapi menurutnya masih dibutuhkan perubahan politik yang mendasar jika masih ingin bergabung dengan Uni Eropa. Turki dianggap belum memenuhi kriteria tersebut, karena Turki belum mengakomodasi kebebasan menyatakan pendapat, demokrasi yang lebih stabil, penegakan hukum dan HAM.⁹³

Setelah *Fazilet Partisi*, Erbakan mendirikan *Saadet Partisi* yang memiliki strategi perjuangan yang sama dengan partai-partai Islam sebelumnya dan menjadikan Nu'man Kurtulmus sebagai Ketua Umumnya dan tidak ingin Turki bergabung dengan Uni Eropa.

⁹³ *Ibid.*

Sejarah dinamika naik turunnya partai-partai politik berhaluan Islam di Turki sejak MNP, MSP, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi* membuat murid dan tokoh muda *Fazilet Partisi* yakni Recep Tayyip Erdoğan mendirikan AKP pada tahun 2001 sebagai partai politik berhaluan Islam yang lebih moderat, terbuka dan bersedia berkompromi dengan kubu sekuler dan militer serta mengajukan kembali proposal resmi Turki sebagai calon anggota Uni Eropa.

Ketika prospek Turki menjadi anggota penuh Uni Eropa mulai nampak setelah menjadi anggota kehormatan Uni Eropa, tiba-tiba saja Kongres AS mengajukan kembali ke PBB kasus genosida 95 tahun yang lalu dalam PD I yang menurutnya dilakukan tentara Turki Utsmani terhadap etnis Armenia. Hubungan Armenia dan Turki selama ini memang relatif buruk, karena kesenjangan ekonomi di antara dua negara. Armenia terletak di antara Turki dan Azerbaijan di Rusia namun sementara hubungan kerjasama karena kesamaan agama dan budaya antara Turki dan Azerbaijan sangat baik, tidak demikian halnya dengan Armenia yang terpuruk kondisi ekonominya. Armenia juga menyimpan dendam yang belum kunjung hilang karena masih ada beberapa puluh orang saksi mata pada saat itu yang masih hidup hingga saat ini dan selalu menceritakan ulang peristiwa yang terjadi saat itu. Armenia memiliki jumlah penduduk yang tidak terlalu besar yakni sekitar 600 ribu orang dan mayoritas atau 95% lebih beragama Kristen Ortodoks dan selebihnya animis.

Pengajuan kasus genosida 95 tahun yang lalu dalam PD I yang dilakukan tentara Turki Utsmani terhadap etnis Armenia oleh kongres AS agar PBB mengeluarkan resolusi pada Turki memperburuk hubungan bilateral AS-Turki yang selama ini dianggap bersekutu dan sama-sama merupakan negara anggota NATO. Turki menarik pulang Duta Besarnya di Washington, AS. Bila PBB mengeluarkan resolusinya terhadap Turki maka hal itu dapat berwujud ancaman embargo bagi Turki serta semakin mempersulit proses realisasi keanggotaan Turki ke dalam Uni Eropa. Fenomena di atas merupakan gejala yang nampak di permukaan gunung es, namun bila dielaborasi lebih jauh maka akan nampak *core problem* atau *root causes* atau akar permasalahan sesungguhnya multifaktor. Munculnya persoalan Armenia terkait dengan peristiwa “genocide” 95 tahun silam terhadap ratusan ribu orang Armenia pada PD I (April 1915) oleh Tentara Turki Utsmani setelah turun tahtanya Sultan Abdul Hamid karena diangkat kembali oleh Kongres AS dan akan diajukannya ke PBB, menurut Kemal Stamboel⁹⁴ adalah murni persoalan tarik menarik kepentingan dalam hubungan bilateral AS dan Turki.

⁹⁴ Wawancara dengan Kemal Stamboel, Ketua Komisi I, DPR RI pada Sabtu 3 Maret 2012.

Seperti diketahui, Armenia memiliki dendam masa silam dan sulit melupakan peristiwa yang terjadi 95 tahun silam pada saat Perang Dunia I. Saat itu tentara Turki Utsmani mendesak dan mendeportasi etnis Armenia dari wilayah Turki yang dalam perjalanan tersebut banyak yang mati terbunuh atau mati kelaparan. Dalam kampanyenya saat akan menjadi Presiden, Obama memang sempat menjanjikan di beberapa negara bagian bahwa ia akan mengungkap kembali kasus *genocide* di Armenia oleh tentara Turki Utsmani pada PD I. Namun ketika saat ini Kongres AS mengangkat hal tersebut dalam rapat Kongres untuk mengajukannya ke Dewan Keamanan PBB agar Turki mendapat resolusi, Gedung Putih melalui Menlu Hillary Clinton menginginkan agar Kongres menunda proses *voting* di Kongres karena akan mengganggu hubungan bilateral AS dengan Turki dan meminta agar istilah *genocida* tidak digunakan. Karena bagaimanapun juga selama ini Turki telah menjadi sekutu utama AS di dunia Muslim dan sama-sama merupakan anggota NATO.

Menurut Kemal Stamboel, Turki dengan posisinya sebagai salah satu negara Islam moderat yang maju ekonominya memang tak terhindarkan tengah menjadi sorotan dunia. Dan pengungkapan kembali oleh Turki kasus *genocida* etnis Armenia di PD I oleh AS adalah sebuah cara AS untuk mengkespresikan diri bahwa AS tetap negara yang memperjuangkan pelaksanaan HAM di dunia dan mengecam pelanggaran HAM walaupun kejadiannya di masa silam dan dilakukan oleh sekutunya. Turki sendiri awalnya terus berupaya melakukan berbagai cara untuk mencegah rencana kongres AS mengajukan ke DK PBB dengan melalui jalur eksekutif dan juga legislatif, salah satu di antaranya mengirimkan para anggota parlemen Turki dari Komisi Luar Negeri untuk menghadiri Kongres AS. Selain itu Turki juga membuat pernyataan yang mengakui bahwa saat itu memang telah terjadi kekejian terhadap etnis Armenia namun bukan sesuatu yang sistemik dan direncanakan melainkan menjadi tidak terkendali karena dalam kondisi perang. Ketika nampaknya usaha Turki dan bahkan juga usaha eksekutif AS yakni pemerintahan Obama mencegah hal tersebut tidak dihiraukan oleh AS, maka pemerintahan Turki mengambil langkah drastis dengan menarik Dubes Turki untuk AS. Dan menurut Kemal Stamboel kesemuanya itu juga merupakan ekspresi Turki bahwa ia berani mengambil sikap tegas pada AS. Turki memiliki kepercayaan diri yang baik terkait dengan kemajuan ekonominya, posisi geopolitisnya sehingga siap mengambil resiko apapun termasuk tekanan ekonomi berupa embargo.

Namun Kemal menilai kasus ini belum tentu memiliki efek negatif terhadap Turki karena dewasa ini konfigurasi kekuatan politik dunia terus mengalami perubahan, termasuk bahwa AS bukan satu-satunya pusat kekuatan dunia. Menurut AS juga memiliki banyak

kepentingan dalam hubungan bilateralnya dengan Turki sehingga akan berusaha pula mencari titik temu dengan Turki terkait dengan kasus Armenia. Jadi persoalan Armenia hanyalah *political tool* (sarana politik) yang digunakan oleh AS dalam tarik menarik kepentingan dengan Turki. Pelanggaran HAM adalah kasus yang sulit diungkapkan dan sulit dilupakan dan masih tetap relevan serta *applicable* sebagai alat politik. Seperti kasus Timor Timur 35 tahun lalu selalu bisa diungkit-ungkit kembali di dunia internasional sebagai bentuk pelanggaran HAM oleh militer Indonesia. Kita melihatnya sebagai pembelajaran dan bahwa ketika kasus pelanggaran HAM diangkat kembali di permukaan belum tentu secara substansial permasalahannya adalah persoalan HAM *an sich*, melainkan persoalan kepentingan negara dan sebagai alat tarik menarik antara kepentingan dua negara, atau antara dua negara yang sama-sama memiliki kepentingan atau kebutuhan satu sama lain, namun sedang melakukan tawar-menawar, yang boleh jadi ujung-ujungnya adalah motif ekonomi. Selain mungkin juga ada kaitannya dengan sikap tegas Erdogan terhadap Israel dan *lobby* Yahudi di kongres AS kuat, dan AS adalah pelindung utama Israel). Namun hal yang tak diduga AS adalah bahwa bagi Turki ini adalah masalah *sovereignty*, (kedaulatan) yakni bahwa Turki tidak takut digertak oleh AS dan tak sudi diintervensi atau ditekan oleh AS.

Ketika ditanya kaitannya dengan kepentingan dunia Muslim, menurut Kemal dunia Muslim (*moslem world*) tentunya juga tidak ingin dikaitkan dengan peristiwa kekerasan atau *genocide*. Islam juga saat menentang *genocide* seperti yang terjadi di Kosovo, Bosnia dan Palestina. Apalagi menurut Kemal, solidaritas dunia Muslim saat ini belum sampai di tataran politik atau menjadi blok politik yang kuat melainkan baru sebatas solidaritas sesama muslim yang berlandaskan keyakinan agama. Menurut Kemal yang lebih penting dilihat adalah pasca peristiwa ini, konsensus seperti apa yang akan dibuat atau ditawarkan oleh masing-masing negara yakni AS, Turki dan Armenia yang terlibat dalam kasus ini. Bila dikaitkan dengan kemungkinan Turki mendapatkan keanggotaan Uni Eropa, maka kasus ini juga akan dijadikan senjata sekaligus bukti oleh Armenia dan Yunani untuk tidak mengabulkan permintaan Turki menjadi anggota Uni Eropa. Sikap Uni Eropa yang selama ini sudah menerima Turki sebagai mitra Uni Eropa diprediksi akan mendua antara negara-negara yang menyetujui keanggotaan Uni Eropa misalnya karena motif ekonomi, kemudahan suplai gas Turki ataupun yang menentang dan juga dominan motif ekonomi karena jumlah penduduk Turki yang sangat banyak akan mengancam negara-negara anggota Uni Eropa lainnya dalam hal kesempatan kerja dan sebagainya. Atau sebagaimana dikatakan oleh Presiden Perancis saat itu Giscard D'estaing dan dibenarkan oleh Kanselir Jerman Barat bahwa Turki bukanlah

bagian dari Eropa, karena mayoritas wilayahnya ada di Asia dan memiliki perbedaan yang sangat mencolok dalam hal budaya, agama dan lain-lain dengan negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.⁹⁵

Suripto SH, tokoh senior PKS dan mantan anggota Komisi I DPR-RI periode 2004-2009 secara lebih tegas menyatakan bahwa AS selalu memiliki standar ganda dan memiliki dua kaki di tempat yang berbeda. Di Turki memang masih senantiasa terjadi rivalitas antara militer dan sipil. Turki mengetahui dan meyakini bahwa AS berada di belakang militer Turki dalam peristiwa kudeta yang gagal pada 2003. Sebagai bentuk konsensus kerjasama Turki dan AS, maka di Turki didirikan pangkalan militer AS, namun belakangan ini sangat sering didemo dan AS menuding sentimen nasionalisme dan keislaman yang dibangkitkan oleh pemerintahan AKP adalah penyebabnya. Selain itu juga sikap tegas PM Turki, Erdogan yang dalam pertemuan di Davos menuding PM Shimon Peres dari Israel bertanggung jawab terhadap pembantaian di Palestina, boleh jadi turut menjadi pemicu. Jadi AS bersikap mendua dengan Turki antara membutuhkannya sebagai mitra dan mendukung proses keanggotaan Turki di Uni Eropa agar dapat menjadi perpanjangan tangan kepentingan AS di Uni Eropa yang merupakan kompetitor AS dalam mengukuhkan hegemoninya di dunia.

Namun di sisi lain juga merasa terancam dengan sikap tegas, independen dan Islamisasi di Turki di bawah AKP. Namun dalam kenyataannya menurut Suripto sangat sulit untuk Turki menjadi anggota Uni Eropa karena berbagai faktor seperti intervensi militer yang masih kerap terjadi dalam persoalan sosial politik Turki, selain itu kasus migran Turki yang sangat besar di Eropa terutama di Jerman yang menimbulkan banyak masalah dalam hal adaptasi dan integrasi. Namun yang paling besar saat ini adalah faktor merebaknya Islamophobia di Eropa yang kini memiliki jumlah penduduk Muslim lebih kurang 30 juta dengan jumlah terbesar di Perancis. Berbagai tekanan dialami oleh para Muslim yang berada di Swiss, Perancis, Jerman, Denmark, Inggris seperti larangan mengenakan jilbab, memasang menara mesjid. Populasi Muslim yang besar di Eropa dan populasi minim penduduk asli Eropa turut menjadi ancaman. Menguatnya ekonomi Turki yang sudah menjadi kandidat anggota Uni Eropa selama 30 tahun dan lima tahun belakangan meningkat menjadi mitra utama Uni Eropa memunculkan ketakutan munculnya kembali Kehilafahan atau *Islamic Empire* di Turki. Meningkatnya *Moslem middle class* yang maju dari segi ekonomi dan

⁹⁵ Michael S. Teitelbaum and Philip L. Martin. *Is Turkey Ready for Europe?* Source: Foreign Affairs, Vol. 82, No. 3 (May - Jun., 2003), pp. 97-111 Published by: Council on Foreign Relations Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/20033581> Accessed: 23/07/2009 00:00

pendidikan menjadi salah satu pemicu dugaan bangkitnya Islam menjadi salah satu pusat kejayaan dunia dewasa ini.⁹⁶

Sehingga bila disimpulkan ada beberapa faktor penyebab mengemukanya kembali kasus genosida oleh tentara Turki Utsmani terhadap Armenia 95 tahun silam yakni pada saat Perang Dunia I, di antaranya adalah *Islamophobia* terkait dengan ketakutan munculnya kembali khlilafah Islam dengan menguatnya kembali posisi Turki baik secara politik dan ekonomi di mata dunia). Padahal menurut Professor Mehmet Behan dari Universitas Marmara, Istanbul saat ini yang lebih mungkin adalah terbentuknya Blok antara negara-negara Islam seperti halnya Uni Eropa dibanding kemungkinan terbentuknya kembali Khilafah. Keinginan menghambat masuknya Turki menjadi anggota Uni Eropa dengan cara membuat pencitraan buruk terhadap Turki sebagai negara pelanggar HAM sehingga akan menjadi bahan pertimbangan yang semakin menyulitkan penerimaan Turki sebagai negara anggota Uni Eropa padahal Turki sudah melamar menjadi anggota Uni Eropa sejak 1985. Namun banyak tokoh Turki sendiri termasuk Prof Mehmet Behan Guru Besar Ilmu sejarah di Universitas Marmara di Istanbul pesimis akan kemungkinan diterimanya Turki menjadi anggota Uni Eropa dan menurutnya hal itu tidak menjadi masalah bagi Turki, Professor Mehmet Behan.⁹⁷ Selain itu juga diduga ada keinginan Armenia mendapatkan kompensasi dari Turki terkait dengan dosa masa lalu Turki, dan berawal dari kecemburuan ekonomi karena Turki saat ini baik ekonominya sementara Armenia terpuruk terkait dosa Turki di masa silam terhadap Armenia.

Hubungan AS dan Turki akan semakin memburuk yang saat ini ditandai dengan ditariknya Duta Besar Turki di AS. Sesuatu yang menurut keterangan resmi Gedung Putih bukanlah hal yang mereka inginkan, yakni melalui pernyataan Menlu AS: Hillary Clinton. Padahal AS masih membutuhkan Turki sebagai sekutunya, misalnya bila AS ingin menarik kembali tentaranya dari Irak maka jalan teraman dan termurah adalah melalui Turki dan pangkalan militer AS juga masih ada di Turki. Namun memang sikap AS mendua terhadap Turki terutama dalam kaitannya dengan pembelaannya terhadap Israel. Turki boleh jadi diharuskan memberikan kompensasi buat Armenia yang memang kondisi ekonominya buruk. Karena tidak cukup nampaknya hanya dengan pernyataan resmi pemerintah Turki saat ini

⁹⁶ Wawancara dengan Soeripto SH., mantan anggota Komsis I, anggota DPR-RI periode 2004-2009, Sabtu tanggal 3 Maret 2012.

⁹⁷ Wawancara dengan Profesor Sejarah di Universitas Marmara, Mehmet Ali Behan di Istanbul, Rabu 12 Agustus 2009.

yang mengakui bahwa telah terjadi pembunuhan massal terhadap etnis Armenia oleh tentara Turki Utsmani 95 tahun yang lalu karena dalam kondisi Perang Dunia, namun bukan sesuatu yang direncanakan secara sistemik.

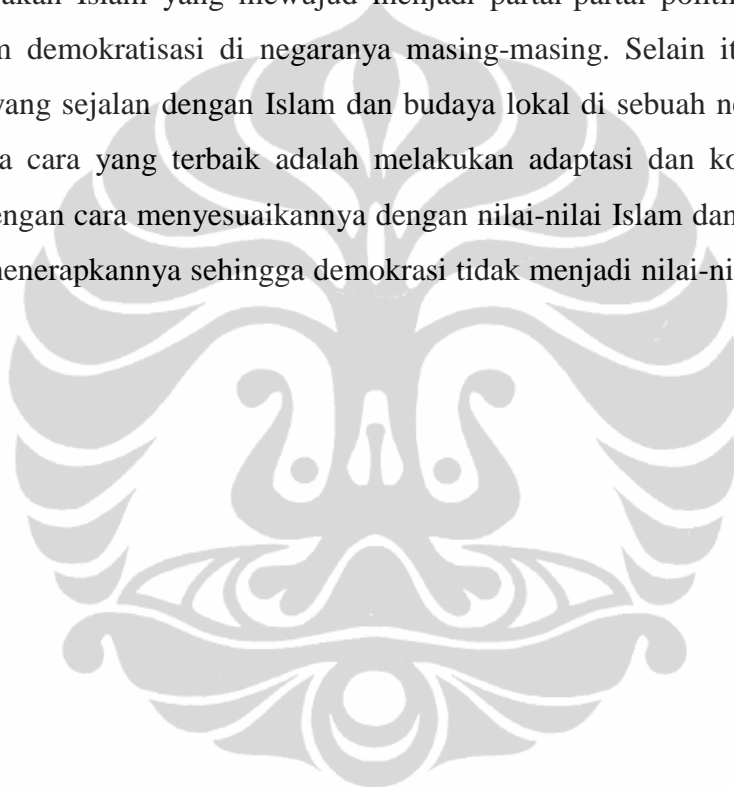
Turki yang selama ini bisa dianggap simbol kebangkitan Islam (*Islamic Revival/ Islamic Resurgent*) dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya kemudian tidak bisa lagi menjadi model yang ideal bagi negara-negara berpenduduk Muslim lainnya karena pencitraan dirinya sebagai negara pelanggar HAM. Semakin jauhnya Turki dari realisasi menjadi anggota Uni Eropa, karena negara-negara anggota Uni Eropa yang menentang keanggotaan Turki seperti Perancis dan juga Yunani (yang terlibat konflik dengan Turki dalam persoalan Cyprus). Bila memang akhirnya Turki benar mendapatkan resolusi dari PBB maka Turki hendaknya segera membuat pernyataan resmi terhadap Armenia dan memberikan kompensasi kepada Armenia serta memperbaiki hubungan dengan negara-negara tetangga termasuk dengan Armenia.

Namun Prof Burhan.D.Magenda, Guru Besar Ilmu Politik UI tetap optimis bahwa AS masih tetap membutuhkan Turki, yang merupakan sekutunya selama ini di NATO. Sikap Kongres yang keras menurutnya berbeda dengan sikap pemerintahannya yang ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan Obama dan Hillary Clinton. Menurutnya hal itu juga boleh jadi disebabkan oleh para senator yang dipilih di beberapa negara bagian yang banyak penduduk migran dari Armenia. Burhan Magenda meyakini kasus ini tak akan berdampak jauh. AS memang dikenal keras bersikap dalam kasus genosida atau *cleansing ethnic* sehingga kasus 95 tahun lalu diungkit kembali, namun AS dikenal juga memiliki standar ganda. Menurut Burhan, Turki masih merupakan mitra strategis buat AS sehingga menurutnya AS masih tetap akan mendukung peluang Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa, walaupun kasus Armenia ini jelas memperlambat prospek tersebut.⁹⁸

Namun yang jelas ada kesamaan kondisi sosial, politik dan ekonomi di Indonesia menjelang Reformasi 1998 dengan kondisi di Turki menjelang abad 21. Pemerintahan rezim Soeharto yang represif di Indonesia dan pemerintahan sekuler CHP yang korup dan militer yang represif menyebabkan sebuah situasi yang menyebabkan baik rakyat Indonesia maupun Turki sama-sama mengharapkan perubahan ke arah yang lebih demokratis dan lebih sejahtera. Indonesia yang semula unggul dan memimpin di persatuan negara kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai ASEAN menjadi terpuruk. Inflasi sangat tinggi juga membuat Turki semakin jauh dari keinginannya menjadi anggota Uni Eropa. Di tengah-tengah situasi

⁹⁸ Wawancara dengan Prof. Burhan. D. Magenda, Guru Besar Ilmu Politik UI. Sabtu, 3 Maret 2012.

kondisi seperti itu PKS dan AKP yang sama-sama berasal dari sebuah gerakan Islam yakni gerakan Tarbiyah di Indonesia dan gerakan di Turki lahir berturut-turut pada tahun 1998 dan 2001. Kemunculan AKP sudah menuai keberhasilan dan memenuhi sebagian besar harapan rakyat Turki akan stabilitas politik dan kesejahteraan, sementara kehadiran PKS belum memberikan arti yang signifikan sehingga masih panjang jalan yang harus ditempuh PKS untuk menuai keberhasilan dan untuk memenuhi harapan rakyat Indonesia. Bila disimpulkan maka sudah bukan saatnya lagi mempertanyakan apakah demokrasi sesuai dengan Islam atau sebaliknya apakah Islam bisa sejalan dengan demokrasi, karena persoalan yang lebih penting adalah bagaimana gerakan Islam yang mewujud menjadi partai-partai politik Islam dapat berperan positif dalam demokratisasi di negaranya masing-masing. Selain itu karena ada nilai-nilai demokrasi yang sejalan dengan Islam dan budaya lokal di sebuah negara dan ada pula yang tidak, maka cara yang terbaik adalah melakukan adaptasi dan kontekstualisasi terhadap demokrasi dengan cara menyesuaikan dengan nilai-nilai Islam dan budaya lokal di negara yang akan menerapkannya sehingga demokrasi tidak menjadi nilai-nilai asing yang diadopsi begitu saja.



BAB III

PENGARUH ASPEK-ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL PARTAI PADA PEMENANGAN PEMILU PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (1999-2009)

Bagian ini menguraikan pengaruh aspek-aspek internal partai yakni ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi serta aspek-aspek eksternal berupa lingkungan sosial, budaya dan politik pada kemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009). Pertama-tama dibahas ideologi yang dimiliki PKS dan bagaimana berimplikasi pada keberhasilan PKS. Kemudian dibahas aspek organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan PKS serta bagaimana implikasinya pada kemenangan Pemilu PKS. Demikian pula diuraikan strategi PKS serta pengaruhnya dalam keberhasilan PKS meningkatkan dirinya dari partai yang tidak lolos *electoral threshold* 2% di Pemilu 1999 meningkat menjadi partai menengah di Pemilu 2004 dan bertahan serta tidak mengalami penurunan suara di Pemilu 2009. Terakhir juga diuraikan tentang bagaimana aspek eksternal partai berupa kondisi sosial, budaya dan politik di Indonesia ikut mempengaruhi dinamika perolehan suara PKS dalam tiga Pemilu (1999-2009).

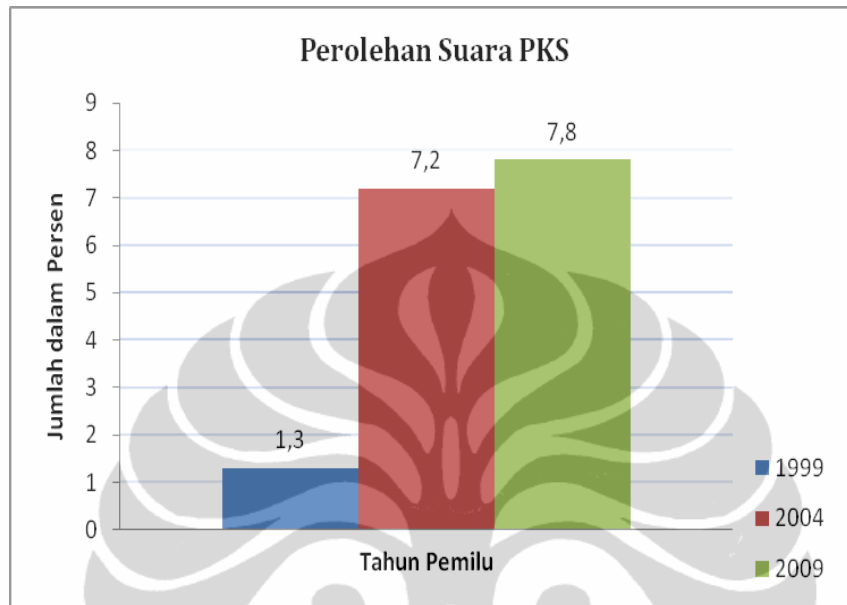
Dalam dinamika Perolehan Suara Partai Keadilan (PK) di Pemilu 1999 hingga PKS di Pemilu 2004 dan 2009 PKS berhasil menjadi *the survival party* dengan mentransformasi dirinya dari partai kecil di Pemilu 1999 menjadi partai menengah di 2004 dan bertahan di Pemilu 2009. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang merupakan kelanjutan dari PK dalam pemilu 1999 meraih 1,4 juta suara atau 1,3% (7 kursi DPR, 26 kursi DPRD Propinsi dan 163 kursi DPRD Kota/Kabupaten) dan karena tidak dapat melampaui batas *Electoral Threshold (ET)*: 2%, maka kemudian PK di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid memutuskan bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipimpin Al Muzammil Yusuf.

PKS hasil penggabungan ini kemudian dipimpin oleh Presiden PKS: Hidayat Nur wahid. PKS menargetkan dalam pemilu 2004 melampaui batas *Electoral Threshold (ET)* 2% dan ternyata di luar dugaan para pengamat dan internal PKS sendiri berhasil memperoleh peningkatan suara yang signifikan yakni 700% dari 1,3% (1,4 juta suara) di tahun 1999 menjadi 7,2% (8, 2 juta suara) melebihi target 8 juta suara yang dicanangkan. Perolehan suara sebesar itu setara dengan 45 kursi di DPR RI dan 1112 kursi DPRD I dan II serta berada di posisi keenam melampaui PAN dan PBB yang semula di atas PKS.¹ Selanjutnya pada Pemilu 2009 PKS menetapkan target dan sasaran utamanya menjadi 3 besar, memperoleh

¹ Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Draft Kronologi Sejarah PKS. Jakarta, 2008.

20% kursi DPR dengan cara mendapatkan suara pemilih 24 juta suara. Namun hasil Pemilu 2009 menunjukkan bahwa target perolehan suara PKS sebesar 20% tidak tercapai. Perolehan suaranya pun hanya 7,8% atau sepertiga pula dari target 20%.

Grafik III.1. Perolehan Suara PKS



Sumber: www.kpu.go.id

Untuk melihat bagaimana sebuah partai politik dapat memperoleh keberhasilan di Pemilu, maka Ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi merupakan faktor-faktor internal partai yang sangat penting dan memberikan pengaruh pada kemenangan Pemilu partai tersebut.

III.1. Pengaruh Positif Ideologi Pos-Islamis Pada Kemenangan Pemilu PKS (1999-2009)

Bila Alan Ware dan Klaus von Beyme menyatakan bahwa dalam kurun waktu panjang hanya partai-partai politik berbasis ideologi yang akan mampu bertahan lama, maka PKS termasuk partai yang berideologi menurut Greg Fealy² dan memiliki prospek bertahan lama. Demikian pula bila menilik yang disampaikan beberapa tokohnya seperti Hidayat Nur Wahid mantan Presiden PKS dan Ahzami Samiun Jazuli, Dewan Syariah Pusat bahwa di PKS, ideologi adalah motor penggerak yang mengarahkan tindakan politik para kader PKS. Sebagaimana Ian Adams mengatakan ideologi mampu memberi arti, identitas dan tujuan

² Greg Fealy dalam presentasinya di acara Bedah buku: *PKS dan kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Bedah buku ini diselenggarakan di FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012.

(goals) pada yang menganutnya, maka Islam sebagai basis ideologi PKS memberi identitas dan arti bagi para kader PKS.

Robert W. Hefner mengategorikan Partai Keadilan (PK) sebelum menjadi PKS sebagai partai Islam konservatif moderat karena komitmennya pada penegakan nilai-nilai Islam namun moderat dalam aplikasinya.³ Moderasi PKS menurut peneliti Murniati nampak ketika PPP dan PBB bersikeras ingin mengembalikan tujuh kata dalam Piagam Jakarta (kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya) di pembukaan UUD '45, sementara PKS tidak ikut memaksakan.⁴ Sikap moderat PKS juga terlihat dengan tidak pernah mengajukan ide negara Islam melainkan mengusung masyarakat Madani dalam NKRI sebagaimana dalam *platform* PKS.⁵

Di dunia Islam internasional, Gerakan Islam arus utama Ikhwanul Muslimin yang memilih memperjuangkan cita-citanya melalui jalur politik disebut pula sebagai Islam politik oleh Olivier Roy dan Islamis oleh Greg Fealy. Gagasan Islamis lahir dari satu ide sentral kebangkitan Islam dan kelompok Islamis ini memperluas ide Islam tradisional yang menganggap agama hanya kumpulan ibadah ritual, menjadi sebuah agama yang mencakup segala dimensi kehidupan masyarakat modern mulai dari cara pemerintahan, pendidikan, sistem hukum hingga kebudayaan dan ekonomi. Namun ada perdebatan sentral di antara tiga kelompok Islamis terkait dengan pilihan antara memfokuskan diri pada dakwah (Salafy), politik (Ikhwanul Muslimun) atau bentuk militeristik revolusioner (Kelompok Jihad). Perdebatan tersebut juga mencakup pilihan-pilihan seperti kebutuhan membentuk partai politik dan partisipasi dalam politik parlementer.⁶

Sebagaimana Alan Ware mengatakan bahwa sebuah ideologi antara lain mengandung gagasan tentang relasi antara negara dan masyarakat serta peran negara, maka gagasan PKS tentang relasi yang jelas antara negara dan masyarakat yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam yang universal membuatnya terkategori ke dalam partai politik yang terinspirasi oleh aliran Islamis Ikhwanul Muslimin. Bila dianalisis dengan teori Olivier Roy, Ikhwanul

³ Robert W Hefner. *Islam in Indonesia's Political Future*. Project Asia, CAN, Alexandria, Virginia, 2002. h:34.

⁴ Sri Murniati. *Conditions for Moderation: Unpacking the Inclusion Experience of Islamist Parties in Three Different Political Systems in Indonesia*. A thesis presented to the faculty of the College of Art and Sciences of Ohio University, August 2008. h: 56.

⁵ Dalam dokumen resmi PKS yakni AD/ART PKS sikap PKS menghargai kebangsaan dan keberagaman suku bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tertuang jelas yakni: "Terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai NKRI." PKS menyadari pluralitas etnik dan agama di masyarakat Indonesia yang terdapat di beribu pulau dengan beratus suku yang membentang dari Sabang hingga Merauke. PKS memiliki konsep yang jelas terkait wacana bentuk negara atau hubungan antara agama-negara. Bentuk negara dan hubungan agama-negara yang realistik-obyektif untuk Indonesia dengan pluralitas dan keimanan penduduknya adalah Masyarakat Madani, NKRI Yang Berketuhanan Yang Maha Esa. Platform Kebijakan Pembangunan PKS. h: iv.

⁶ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah* (edisi Bahasa Indonesia). Mizan, 2005, h: 28.

Muslimin disebut dengan kaum Islamis⁷ dan Roy menyatakan bahwa kemunduran kelompok Islamis ditandai dengan adanya langkah mundur atau *set back* dari Islamis ke Neo-fundamentalis yang lebih berkonsentrasi pada masalah peribadatan dan penerapan syariah serta anti politik yang merupakan paham Salafy.⁸ Kelompok Neo-fundamentalis menolak nilai-nilai Barat dan menekankan soal pemberlakuan syariah Islam dan pembersihan moral, sementara bidang politik, ekonomi dan sosial hanya sebatas retorika serta wacana negara diganti dengan wacana masyarakat.⁹

Greg Fealy tidak sependapat dengan Olivier Roy yang beranggapan bahwa gerakan Islam politik telah menemui kegagalan sehingga menyebabkan mereka melakukan langkah 'set back' dengan menjauhi politik dan berkonsentrasi pada ibadah khusus dan ibadah *muamalah* sebatas keluarga dan masyarakat. Fealy menganggap perubahan yang terjadi pada gerakan Islam atau kelompok-kelompok Islamis seperti di Turki, Aljazair dan Mesir, yang kini mengubah cara perjuangannya menjadi lebih inklusif, moderat dan terbuka bukanlah langkah 'set back' ke arah Neo-fundamentalisme melainkan sebagai langkah maju gerakan Islamis atau Islam politik menuju pos-Islamis.

Tesis Olivier Roy bahwa Islamis *al Islam as Siyasi* yang menempatkan Islam tidak hanya sebagai agama semata, namun juga sistem dan identitas politik yang bersumberkan pada prinsip dan hukum Islam (syariah), eliminasi nilai-nilai *jahiliyah* (Barat) dan Pan Islamisme telah gagal dengan munculnya Neo-fundamentalisme yang direpresentasikan oleh kelompok Salafy yang apolitis dibantah oleh Vali Nasr, Asef Bayat dan Greg Fealy yang mengemukakan bahwa kelompok Islamis telah bergeser menjadi kelompok Post-Islamis sebagai bentuk kemajuan karena direpresentasikan oleh kelompok Islamis yang semakin moderat, toleran, terbuka dan inklusif di dalam berpolitik dan bernegara.¹⁰

Islamis di Indonesia, Mesir dan Turki menurut Greg Fealy, Bubalo dan Mason mengalami pergeseran saat berinteraksi dengan kekuatan-kekuatan lain dalam proses demokrasi. Pergeseran dari cita-cita negara syariah menjadi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai-nilai syariah, dari pemerintahan Islam ke pemerintahan yang baik (*good governance*), dari pesan moral menjadi integritas moral sang pembawa pesan. Selain itu juga

⁷ Islamisme adalah gerakan Islam yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan masuk ke dalam sistem politik yang ada dan menganggap demokrasi sebagai alat.

⁸ Kaum Neo-fundamentalis mengajak umat kembali ke Islam murni bersih dari segala sinkretisme nilai-nilai dan pengaruh materialism Barat sehingga mereka menolak masuk ke dalam system demokrasi.

⁹ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik*. Ed. Terjemahan dari: *The Failure of Political Islam*. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996. h: 98-99.

¹⁰ Ahmad Dzakirin. *Kebangkitan Pos-Islamisme. Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Era Adicitra Intermedia, Solo, 2012. h: 37.

ada perubahan dari keanggotaan yang terbatas dan selektif menjadi keragaman keanggotaan yang lebih luas serta peralihan generasi. Pos-Islamisme merupakan transformasi pemikiran Islamisme para Islamis (*islamiyyun*) progresif yang berupaya melakukan objektifikasi gagasan Islam ke dalam realitas politik dan ranah kehidupan yang plural. Pos-Islamisme adalah bentuk lanjutan, adaptasi dan kontekstualisasi Islamisme, sebagaimana ia juga melakukan adaptasi dan kontekstualisasi terhadap demokrasi.¹¹

Asef Bayat juga menjelaskan Pos-Islamisme berbeda dengan sebagian penganut Islamisme yang memaksakan *Islamic-State* atau teokrasi karena Pos-Islamisme menolak sekularisme yang memusuhi agama, namun juga menolak gagasan teokrasi.¹² Berkembangnya gerakan demokratis di Timur Tengah menurut Bayat mendorong wacana Islamis menuju wacana Pos-Islamis dan Islam inklusif berperan penting di dalam demokratisasi tersebut sehingga Revolusi Arab bisa pula diistilahkan ‘post-Islamist refo-lutions’ atau perpaduan antara reformasi dan revolusi Pos-Islamis. PKS disebut Asef Bayat sebagai salah satu kelompok Islamis yang mentransformasi dirinya menjadi Pos-Islamis:

“Post-Islamism is not anti-Islamic or secular; a post-Islamist movement dearly upholds religion but also highlight citizens’ rights. It aspires to a pious society within a democratic state. Early examples of such movements include the reform movement in Iran in the late 1990s and the country’s Green Movement today, Indonesia’s Prosperous Justice Party, Egypt’s Hizb al-Wasat, Morocco’s Justice and Development Party (PJD), and Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP). Each was originally fundamentalist but over time came to critique Islamist excess, in violation of democratic rights and its use of religion as a tool to sanctify political power. They all eventually opted to work within the democratic state.”

“Pos-Islamisme tidak anti Islam dan juga tidak sekuler. Pos-Islamis adalah sebuah aspirasi tentang masyarakat religius dalam sebuah negara bangsa yang demokratis. Contoh gerakan seperti yang sudah lebih dulu adalah gerakan

¹¹ *Ibid.*,

¹² Noorhaidi, peneliti dari UIN, Jakarta juga berpendapat bahwa Revolusi di Mesir dan Tunisia digerakkan orang-orang muda yang pengorganisasian dan ideologinya tak terlalu jelas dan berkumpul karena ajakan melalui jejaring di media sosial dan karena sama-sama menginginkan negara lebih memberi ruang kebebasan berpendapat, menyingkirkan kesewenang-wenangan rezim, menghapus korupsi dan berharap kehidupan lebih baik dan lapangan pekerjaan. Ikhwanul Muslimin (IM), juga tidak bisa mengklaim revolusi di Mesir sebagai murni revolusi kelompok tersebut. Pos-islamisme merupakan sintesis antara revitalisasi Islam yang dikembangkan oleh kelompok Islamis dengan komunikasi massa yang dimungkinkan oleh internet dan telepon seluler. Pos-islamisme kini juga melanda Indonesia berawal di dunia maya banyak orang menafsirkan simbol keagamaan menurut cara masing-masing sehingga Muslim di Indonesia akan semakin toleran, dewasa dan matang, karena sudah terbiasa dengan perbedaan dengan syarat demokrasi tetap dipertahankan. Sumber: okefarid.wordpress.com/2011/02/26/post-Islamisme/

reformasi di Iran di akhir 1990-an dan gerakan cinta lingkungan (*green party*), Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, Hizb al-Wasat di Mesir, *Justice and Development Party* di Maroko, Partai pemerintah di Turki yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (*Adalet ve Kalkinma Parti/AKP*). Masing-masing gerakan semula merupakan fundamentalis namun kemudian kritis terhadap Islamis yang berlebihan menggunakan agama sebagai alat untuk melegitimasi kekuatan politisnya Mereka semua akhirnya memilih untuk bekerja, berjuang di dalam sebuah negara yang demokratis”¹³

Suharna Surapranata (Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknologi, mantan Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS periode 2005-2010, mantan Menristek) berpendapat bahwa wacana Pos-Islamisme sejalan dengan wacana Indonesia Madani yang di satu sisi melakukan objektifikasi Islam di ruang publik dengan berbasis asas manfaat, rasional, serta obyektif namun di sisi lain menafsirkan Pancasila sebagai sekumpulan nilai yang nyata di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta bukan sebuah “nilai baru” yang diindoktrinasikan dan dikeramatkan:

“Bagaimana Islam dapat berkontribusi dalam negara bangsa” adalah pertanyaan menarik; bukan hanya untuk Turki dan AKP, melainkan juga untuk Indonesia dan partai-partai Islam yang ada. Cara AKP memandang sekularisme lebih sebagai institusi dan bukannya pengejawantahan nilai dalam pribadi menjadi penanda era pos-Islamisme Turki. Hal ini serupa dengan gagasan Indonesia Madani (di *platform* PKS) yang di satu sisi menerapkan objektifikasi Islam dalam ruang publik berbasis asas manfaat, rasional, serta obyektif, dan di sisi lain menafsirkan Pancasila sebagai sekumpulan nilai, yang nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, bukan sebagai sebuah “nilai baru” yang diindoktrinasikan secara simbolik dan dikeramatkan. Tafsir ideologis seperti ini kompatibel, baik bagi Islam maupun negara. Inilah jalan tengah yang menyejukkan.”¹⁴

Greg Fealy juga membenarkan bahwa PKS sedang mengalami transisi dari partai Islamis ke partai Pos-Islamis dengan menjadi partai terbuka dengan anggota dan canggota legislatif non-muslim, melepaskan cita-cita mendirikan negara Islam di Indonesia dan menerima Pancasila dan UUD 45 sebagai bentuk final:

¹³ Asef Bayat. *The Post-Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab World Mean*. April 26, 2011 for free weekly updates from ForeignAffairs.com.

¹⁴ Suharna Surapranata. *Endorsement* di halaman belakang buku Ahmad Dzakirin: *Kebangkitan Pos-Islamisme. Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012.

“PKS sedang mengalami transisi dari partai Islamis ke partai Pos-Islamis dengan menjadi partai terbuka yang secara formal juga tidak mendorong penerapan syariah di Indonesia dan mengadopsi konsep simbol nasional dalam wacana dan programnya. Mereka semakin bersedia berkompromi dan bekerja sama dengan partai lain sehingga saya menyimpulkan bahwa PKS mengalami proses normalisasi demokratis sejak 3 tahun yang lalu dan membawa konsekuensi positif dan juga negatif, hanya sayangnya, *mudharatnya* lebih banyak daripada manfaatnya. Hal yang positif, PKS menjadi partai yang semakin inklusif dan heterogen walaupun hanya sampai batas tertentu. PKS tetap satu-satunya partai Islam yang mempunyai sistem kaderisasi yang serius dan sistematis serta betul-betul menjaga kapasitas anggotanya. PKS juga masih punya kepedulian sosial yang menurut saya jauh lebih tinggi dari partai Islam lain. Sedangkan yang negatif, yang paling menonjol adalah semacam kemerosotan etika dan moralitas kalangan-kalangan elite partai.”¹⁵

PKS di tahun 2008 di Mukernas PKS di Bali memang mulai mewacanakan nilai-nilai kebangsaan menyebut dirinya sebagai partai Islam terbuka sebagai upaya menjadikan PKS lebih inklusif dan toleran terhadap pluralitas masyarakat. Dengan menggelar acara Mukernas di Bali yang notabene berpenduduk mayoritas Hindu, PKS boleh jadi langkah awal bersikap lebih toleran terhadap non-muslim. Walaupun proses transisi ideologi Islamis menuju pos-Islamis sempat memunculkan konflik internal di antara para pemimpin PKS, dengan tradisi ilmiah yang kuat di PKS persoalan tersebut relatif terselesaikan. Ternyata persoalan utamanya lebih kepada adanya kesenjangan informasi dan kesenjangan komunikasi serta cara mewacanakan konsep-konsep Pos-Islamis tersebut, walaupun kemudian sebagian pendiri PK yang tergabung dalam FKP (Forum Kader Peduli) menyatakan keluar atau dikeluarkan dari PKS. Namun pilihan ideologi Pos Islamis atau Islam *mainstream* membuat PKS tetap dapat memperjuangkan aspirasi dan cita-citanya melalui jalur politik, menerima demokrasi dan memperoleh peningkatan suara dari pemilu ke pemilu berikutnya di Indonesia.

Perubahan yang nampak pada PKS dari sebelumnya PK sering dipahami orang bahwa PKS telah mengalami perubahan dalam hal ideologi. Hal tersebut terbantah dari pernyataan *founding father* PK, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS yang menegaskan bahwa bentuk ideal yang diperjuangkan oleh PKS bukan *Islamic state* atau model teokrasi seperti negara Islam Iran misalnya melainkan masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal.¹⁶ Menurut beliau yang

¹⁵ Greg Fealy dalam presentasinya di acara Bedah buku: *PKS dan kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Bedah buku ini diselenggarakan di FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012.

¹⁶ Wawancara dengan Ustadz Hilmi Aminuddin, Pendiri Gerakan Tarbiyah dan Ketua Majelis Syuro PKS. Jakarta. Sabtu 17 Maret 2012.

dimaksud dengan pemerintahan Islam dalam pandangan PKS adalah bukan sebuah pemerintahan yang dideklarasikan sebagai negara Islam, melainkan negara yang secara substantif memiliki dan melaksanakan nilai-nilai Islam sehingga boleh jadi apa yang kini disebut sebagai *good governance* dan *clean government* pada hakikatnya adalah pemerintahan Islam.

Terkait dengan tuduhan bahwa banyak kelompok Islamis yang memiliki *hidden agenda* sehingga penerimaannya terhadap demokrasi, nilai-nilai moderasi, toleransi dan pengakuan pada pluralitas hanyalah sebuah taktik sehingga ketika kemudian berkuasa akan membentuk negara Islam dan memberlakukan syariah Islam, Hilmi mengatakan bahwa tidak mungkin terjadi pemaksaan karena pelaksanaan nilai-nilai syariah adalah ibadah dan ibadah tidak mungkin dipaksakan. Selain itu menurutnya pada hakikatnya dalam keseharian masyarakat Muslim sudah melaksanakan syariah Islam seperti sholat, puasa, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, berbakti kepada orang tua, berbuat baik pada tetangga dan lain-lain sudah mencakup 98% syariah Islam. Sementara bagian syariah lainnya berupa *hudud* atau hukum pidana dalam Islam yakni mengenai hukuman rajam, cambuk bagi para pezina, *qishash* bagi pembunuh dan potong tangan bagi para pencuri hanyalah 2% saja dari syariah Islam yang pelaksanaannya harus didasari oleh sebuah konsensus bersama.¹⁷

Dalam arahannya kepada para kader pimpinan PKS dari seluruh Indonesia, Hilmi Aminuddin juga menegaskan bahwa ada lima prinsip yang harus diperhatikan PKS dalam aktivitas politiknya. Kelima prinsip tersebut pertama adalah *ruhul wihdah*, jiwa persatuan dan kedua adalah *ruhul dimokratiah* atau semangat berdemokrasi. Selanjutnya prinsip ketiga adalah pengakuan pada pluralitas (*ta'adudiyah*) karena pluralitas adalah *fitrah* dan *fitrah* adalah *sunnatullah*. Pengakuan PKS akan pluralitas menurut Hilmi bukanlah soal taktis atau strategis, melainkan bagian dari nilai-nilai perjuangan karena tidak mungkin mewujudkan misi *rahmatan lil alamin* tanpa adanya pengakuan pada pluralitas. Berikutnya prinsip keempat yakni *al wasathiyah* atau sikap moderat yang juga merupakan prinsip ajaran Islam dan akhirnya prinsip kelima adalah *ruhul muwathonah*, semangat hidup berbangsa dan bernegara.¹⁸

Fakta adanya pergeseran dinamis karakter PKS yang Islamis ke arah Pos-Islamisme nampaknya bukan hanya pernyataan Hilmi Aminuddin selaku pendiri PKS karena beberapa dokumen terutama sejak PK menjadi PKS telah menunjukkan adanya proses transformasi

¹⁷ *Hudud* atau hukum pidana dalam syariah Islam tersebut tidak mudah pelaksanaannya dalam kasus pencurian misalnya, bila secara kuantitatif disetarakan dengan rupiah, orang yang sekali mencuri dan jumlahnya di bawah 1 juta rupiah, dia tidak dikenai hukum potong tangan karena kemiskinan yang mendorongnya berbuat seperti itu.

¹⁸ KH Hilmi Aminuddin. *Khitob Qiyadi* (Arahan Pemimpin) di Mukernas di Yogyakarta 25 Februari 2011.

tersebut. Misalnya dalam Anggaran dasar dan Manifesto PKS tidak menyebutkan keinginan mendirikan negara Islam melainkan masyarakat madani:

Partai memandang perlu pembentukan masyarakat madani yakni sebuah masyarakat yang memegang teguh ideologi yang benar, akhlak mulia dan secara politik-ekonomi-budaya bersifat mandiri dan memiliki pemerintahan sipil. Pemerintahan sipil wajib menghormati hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, mengembangkan semua potensi bangsa, melindungi kaum lemah dan menjamin kebebasan warganya. Tak ada peluang bagi otoritarianisme dan tirani politik, baik dari kelompok sipil maupun kekuatan militer sehingga diperlukan sebuah organisasi pemerintahan yang kuat, mandiri dan dapat mengakomodasi semua pihak yang sejalan dengan cita-cita perbaikan dan keadilan. Masyarakat madani merupakan model masyarakat berkeadilan, ketika keragaman menjadi sumber dinamika bangsa dengan setiap kelompok mengembangkan budaya demokrasi produktif, berinteraksi secara positif dengan semangat kebersamaan dalam persatuan dan kesatuan.¹⁹

Dokumen lainnya yang juga menjelaskan bahwa PKS berkoalisi dan bersedia bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat madani, pemerintahan yang bersih dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional adalah dokumen berupa nota kesepahaman pada tanggal 26 Agustus 2004 dengan calon Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan calon Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam pemilihan Presiden putaran kedua, 20 September 2004. Nota kesepahaman tersebut dilakukan untuk menjalin kebersamaan dalam melaksanakan perubahan menuju Indonesia madani yang adil, aman dan sejahtera. Beberapa kesepakatan yang dilakukan, yaitu (1) konsisten melakukan perubahan untuk membangun pemerintahan yang bersih, peduli, dan profesional, di antaranya dalam keteladanan dan kesiapan memberhentikan anggota kabinet yang melakukan korupsi, (2) mempertahankan kedaulatan NKRI, (3) melanjutkan proses demokratisasi dan reformasi di Indonesia, (4) meningkatkan moralitas bangsa, kualitas masyarakat dan kesejahteraan rakyat, (5) mendukung upaya perjuangan bangsa Palestina dalam mencapai kemerdekaannya. Tindak lanjut keputusan itu, tiga Lembaga Tinggi Partai (DPP, MPP, DSP) berdasarkan mandat dari Majelis Syuro PKS memutuskan untuk menginstruksikan kepada kader, konstituen, dan simpatisan untuk menyukseskan kesepakatan tersebut.²⁰

Burhanuddin Muhtadi menganggap Pemilu 2009 sebagai ujian historis apakah PKS sukses dengan eksperimen baru sebagai *catch all party* atau partai elektoralis yang meraup

¹⁹ Manifesto Partai Keadilan Sejahtera. DPP, Jakarta, 2004. h: 1.

²⁰ Bidang Arsip dan Sejarah Sekretariat Jendral DPP PKS. Draft Kronologi Sejarah PK-PKS. Jakarta, 2008.

suara dari berbagai segmen pemilih atau tidak dan ternyata menurut Muhtadi hasilnya tidak terlalu menggembirakan karena pencitraan sebagai partai Islam terbuka tidak dipercayai begitu saja oleh para pemilih sehingga perolehan suara PKS di kantong-kantong suaranya di 2004 malah mengalami penurunan di 2009. Pemilih rasional perkotaan dari kelas menengah Muslim banyak yang tidak lagi memilih PKS karena menganggap PKS sudah mengidap pragmatisme dengan ide keterbukaannya tersebut, namun di sisi lain Muhtadi juga mengakui bahwa keterbukaan PKS direspon positif di daerah-daerah di mana Muslim adalah minoritas, demikian pula di masyarakat pedesaan terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur.²¹ Terkait dengan pernyataan Burhanuddin Muhtadi tersebut, Sekjen PKS menjelaskan bahwa pergeseran tersebut adalah cerminan dinamika ekspresi PKS dalam perjuangannya di ranah politik dan bukan sebuah strategi karena menyembunyikan jati diri dan agendanya yang terselubung. Keterbukaan dan menghargai keberagaman di dunia yang semakin terjadi hibridisasi adalah merupakan karakter asli ajaran Islam yang menjadi ideologi PKS.²²

Para penulis dari Amerika Serikat yang menulis secara umum tentang Islamisme dengan pandangan negatif bahwa Islamisme merupakan antitesa Demokrasi sehingga tidak mungkin terwujud kompatibilitas adalah Daniel Pipes, Martin Kramer dan Barry Rubin. Sedangkan yang secara khusus tentang menulis tentang Islamisme dan kelompok Islamis di Indonesia termasuk tentang PKS adalah Zachary Abuza, Bilveer Singh dan juga Sadanand Dhume yang misalnya menyebut PKS lebih berbahaya dari jaringan Islamis teroris Jama'ah Islamiyah.²³

Memang ketakutan beberapa akademisi seperti Daniel Pipes dan Sadanand Dhume bahwa PKS adalah merupakan partai Islamis yang memiliki agenda terselubung untuk mendirikan teokrasi berupa negara Islam sempat mendapatkan pembenaran di awal tahun 2004 ketika Dewan Keamanan PBB sempat menerbitkan daftar Komite Kontrateroris PBB pada tanggal 26 Januari 2004 dan di dalamnya menyebutkan bahwa salah satu dari empat organisasi yang memiliki kaitan dengan Al Qaeda, adalah Yayasan Lembaga Pelayanan Pesantren Dan Studi Islam (LP2SI) Al Haramain yang dipimpin oleh Hidayat Nur Wahid, Presiden PKS dan memasukkan alamat Yayasan LP2SI Al Haramain di Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4 Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur sebagai alamat jaringan teroris. Hidayat menyatakan akan membawa tudingan itu ke Mahkamah Internasional, namun

²¹ Burhanuddin Muhtadi. *Dilema PKS, Suara dan Syariah*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia, 2012. h: 242-243.

²² *Ibid.* Kata Pengantar Anis Matta. h: xxiii.

²³ *Ibid.* Kata Pengantar Greg Fealy. h: xv-xvi.

dibatalkan setelah Atase Penerangan Kedubes AS untuk Jakarta, Stanley Harsha, memberikan keterangan pers pada 6 Februari 2004 menjelaskan kekeliruan pencantuman LP2SI sebagai bagian Al Haramain Arab Saudi yang dicap sebagai teroris oleh PBB.²⁴

Namun para akademisi yang mempercayai bahwa ada kompatibilitas antara Islamisme dengan Demokrasi pada umumnya mengajukan contoh AKP di Turki, PKS di Indonesia dan PAS di Malaysia dengan melihat bukti pragmatisme, kompromi partai-partai Islamis tersebut yang mau bekerja sama dalam sistem politik demokrasi. Bahkan beberapa sarjana seperti Vali Nasr, Greg Fealy, Asef Bayat dan Peter Mandaville melihat bahwa banyak partai Islamis yang masuk ke dalam sistem demokrasi akhirnya beradaptasi dan mengenyampingkan cita-cita ideologis berupa pendirian negara Islam atau teokrasi dan pemberlakuan syariat Islam secara formal melalui instrumen negara serta kini lebih menekankan nilai-nilai substantif Islam dengan mengedepankan agenda yang universal terkait isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Para intelektual tersebut meyakini adanya transformasi dari partai-partai Islami ke pos-Islamis.²⁵

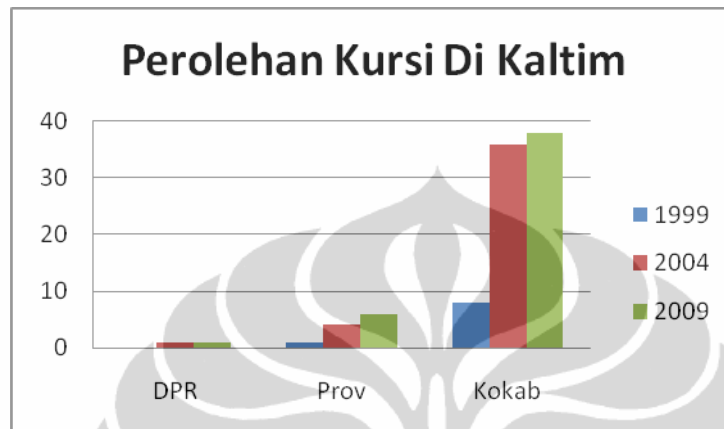
Menurut Ketua Wilayah Dakwah Kalimantan, Hadi Mulyadi secara nilai tidak pernah ada yang berubah dari ideologi Islam yang dimiliki PKS, namun yang mengalami perubahan adalah kemampuan para kader PKS dalam memahami dan mengimplementasikannya secara utuh. Hadi Mulyadi mengatakan bahwa Partai Keadilan di Pemilu 1999 di provinsi Kaltim sempat dianggap oleh masyarakat sebagai partai yang berideologi Islam garis keras yang eksklusif, sementara di daerah itu juga ada penduduk Kristen atau suku Dayak yang animis. Namun kesan itu berubah ketika PKS sudah nampak lebih cair, mau berkomunikasi dan mengurangi kesan eksklusifnya serta aktif menunjukkan kepeduliannya dengan aksi pelayanan sosial. Maka aplikasi ideologis yang berubah ini pun mempengaruhi persepsi dan penerimaan publik sehingga misalnya di Kaltim di tahun 1999 belum mendapatkan kursi di DPR RI dan hanya 1 kursi Provinsi serta 8 kursi di Kota-Kabupaten (Kokab) meningkat menjadi 1 kursi DPR, 4 kursi Provinsi dan 36 kursi Kokab. Bahkan di tahun 2009 menurut Hadi Mulyadi PKS lebih dikenal sebagai partai terbuka yang religius nasionalis dan jauh dari kesan eksklusif sehingga membuat PKS semakin diterima di masyarakat Kaltim. Maka terjadi

²⁴ Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Draft Kronologi Sejarah PKS. Jakarta, 2008

²⁵ Greg Fealy. *Op.cit.* h: xv-xvi.

kembali peningkatan perolehan kursi. Kursi Pusat tetap 1, tetapi ada orang yang didukung oleh PKS yang menjadi anggota DPR, 6 kursi Provinsi dan 38 kursi di Kokab.²⁶

Grafik III.2. Perolehan Kursi PKS di Kalimantan Timur Pada Pemilu 1999-2009

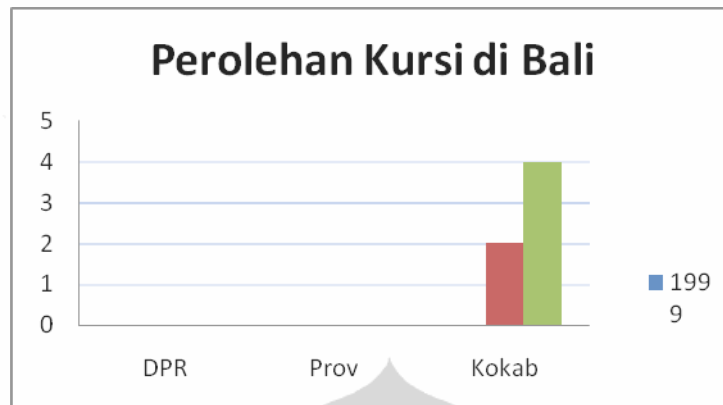


Sumber: Data Wilda Kaltim DPP PKS

Dampak perubahan aplikasi ideologi yang berpengaruh pada penerimaan publik menurut Oktan Hidayat, Ketua Wilda Bali-Nusra (Wilayah dakwah Bali-Nusa Tenggara) nampak pula di DPW Bali dan NTT, daerah di mana umat Islam merupakan minoritas. Masyarakat di Bali pada umumnya memberikan dukungannya pada sebuah partai politik lebih karena pertimbangan ideologis. Oleh karena itu mereka secara tradisi dikenal sebagai daerah basis PDIP karena dukungan mereka terhadap ideologi nasionalis Marhaenis PDIP. Sebaliknya pada tahun 1999 Partai Keadilan dilihat oleh orang Bali sebagai partainya orang Islam yang mereka kesankan eksklusif dan tertutup sehingga benar-benar tidak mendapatkan 1 kursi pun baik di Pusat maupun Kabupaten. Di tahun 2004 perubahan pemahaman dan aplikasi ideologis para kader PKS mulai mempengaruhi persepsi publik karena pada kader sudah mulai menjalin komunikasi dan bergaul dengan masyarakat luas sehingga mendapatkan 2 kursi di tingkat Kokab. Bahkan di tahun 2009, ada lebih kurang 1000 pemilih non muslim di Bali yang memilih PKS karena tokohnya memiliki pertemanan dengan Anggota legislatif PKS yang sangat mendukung program petani dan nelayan, memberikan bibit jagung dan memperbaiki terumbu karang yang rusak di laut. Maka Pemilu 2009 pun terjadi perolehan kursi PKS di tingkat Kota dan Kabupaten sebanyak 4 kursi.

²⁶ Wawancara dengan Oktan Hidayat, Ketua Wilda Bali-Nusra. Jakarta, 13 Maret 2011.

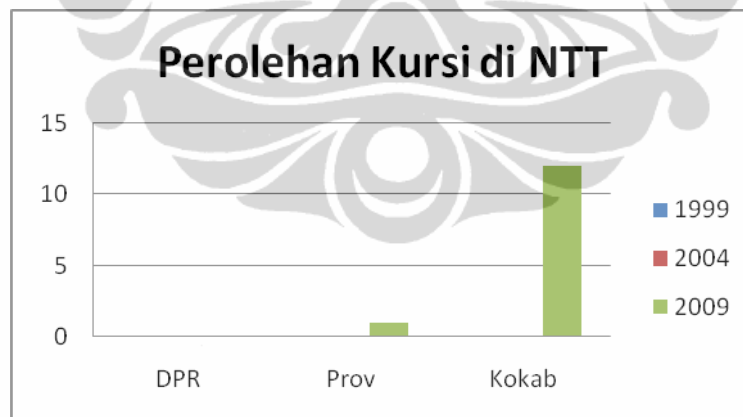
Grafik III.3. Perolehan Kursi PKS di Bali pada Pemilu 1999-2009



Sumber: Data Wilda Bali-Nusra DPP PKS

Sementara di NTT walaupun umat Islam juga minoritas, masyarakat menetapkan pilihan pada sebuah partai politik lebih berdasarkan faktor kekerabatan dan kekeluargaan. Maka kecenderungan perolehan kursi PKS pun terus meningkat sehingga di Pemilu 2009 memperoleh 1 kursi Provinsi dan 12 kursi Kokab.²⁷

Grafik III.4. Perolehan Kursi PKS di NTT pada Pemilu 1999-2009



Sumber: Data Wilda Bali-Nusra DPP PKS

Demikian pula di DPW Yogyakarta, faktor ideologi turut menjadi salah satu alasan utama penduduk di kotamadya Yogyakarta untuk memilih sebuah partai, walaupun bila di daerah pedesaan rawan terkena politik uang dalam menentukan pilihan. Agus Purnomo, Anggota legislatif Pusat dari Yogyakarta (2004-2009) dan terpilih lagi di 2009 menyatakan

²⁷ *Ibid.*,

ada pola pergeseran pemilih di kota madya Yogyakarta dari kelompok Islam santri PAN dan PPP ke PKS namun sedikit yang berasal dari Islam abangan (konstituen PDIP dan partai nasionalis lainnya) dan kader NU (konstituen loyal PKB). Menurut Gus Pur upaya PKS mendekati kader Islam abangan dan juga sedikit kader NU dengan mengedepankan isu utama anti korupsi dan kepedulian kepada rakyat yang ditunjukkan melalui slogan Bersih dan Peduli. Dengan kata lain alasan ideologis untuk selalu memilih PDIP atau memilih PKB ternyata bisa dipengaruhi dengan berbagai pelayanan sosial, seperti baksos dll, sementara beralihnya kader PAN dan PPP ke PKS umumnya karena proses tarbiyah atau kaderisasi.²⁸

Kondisi berbeda terjadi di dua wilayah dakwah yang kondisinya benar-benar bertolak belakang yakni Wilda Banjabar (Banten, Jakarta dan Jawa Barat) serta Wilda Indonesia Timur (Intim) terutama di DPW Papua dan DPW Maluku. Di kedua wilayah dakwah tersebut baik menurut Yudi Widiyana Adiya, wakil ketua Wilda Banjabar, maupun Ahmad Feri Firman, mantan ketua Wilda III 2000-2005 dan Muhammad Aidil, wakil ketua Wilda Indonesia Timur (Intim) saat ini, ideologi bukan menjadi alasan utama seseorang memilih partai politik. Namun bedanya bila di Wilda Banjabar, ketidakmampuan para anggota legislatif dan Kepala Daerah di wilayah Banjabar untuk menyampaikan isu penting atau menunjukkan performa kerja merupakan alasan utama beralihnya ratusan ribu suara pemilih PKS ke Partai Demokrat dan partai lainnya.²⁹

Sedangkan di Sulawesi menurut Setiawan, Wakil Ketua Wilda Sulawesi, alasan masyarakat Sulawesi Selatan memilih sebuah partai politik sangat ideologis, sehingga PKS misalnya dipilih karena dianggap partai Islam, namun sebaliknya begitu PKS dianggap sudah tidak islami menurut standar mereka, maka dengan mudahnya pula meninggalkan PKS.³⁰ Demikian pula di Sumatera, menurut Iie Sumirat, Sekretaris Wilda Sumatera, prinsip “Adat bersendi Syara’, Syara’ bersendi Kitabullah” di Sumatera Barat menyebabkan masyarakat di wilayah ini sejak Pemilu 1955 hingga saat ini tetap memiliki kecenderungan memilih partai Islam. Sebagaimana halnya di Kota Padang, maka di kota Medan di Pemilu 2004, PKS berada di urutan pertama perolehan suara dan menjadi nomor dua baik di Padang maupun di Medan di Pemilu 2009. Sementara masyarakat Jawa yang umumnya kaum transmigran di beberapa wilayah Sumatera seperti Lampung umumnya lebih memilih partai nasionalis. Oleh karena alasan ideologis merupakan faktor penting bagi preferensi masyarakat ketika memilih, maka menurut Chairul Anwar, Ketua Wilda Sumatera, perolehan suara PKS sangat signifikan

²⁸ Wawancara dengan Agus Purnomo, Kader PKS Yogyakarta yang menjadi Anggota legislatif DPR RI. Jakarta, 13 Maret 2012.

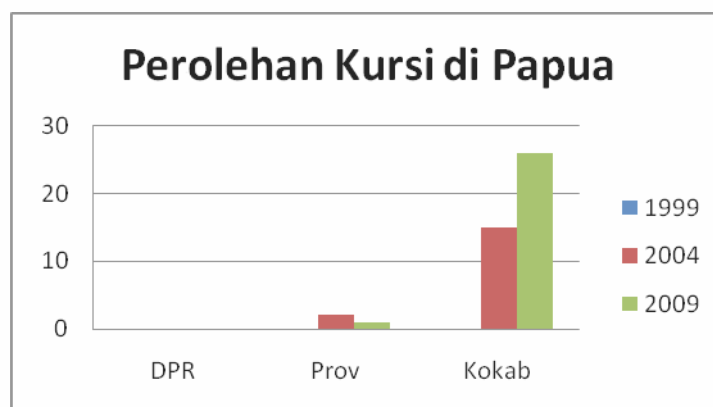
²⁹ Wawancara dengan Yudi Widiyana. Wakil Ketua Wilda Banjabar. Jakarta, 13 Maret 2012.

³⁰ Wawancara dengan Iwan, Wakil Ketua Wilda Sulawesi. Jakarta, Rabu 5 Januari 2011, jam 19.15 WIB.

di daerah Aceh dan Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sumsel dan Lampung. Menangnya Partai Demokrat di Aceh di Pemilu 2009 menurut Chairul merupakan sebuah anomali. Chairul menambahkan bahwa pemilih PKS di desa-desa lebih loyal memilih PKS.³¹

Transisi ideologi PKS dari Islamis ke Pos-Islamis mempengaruhi beberapa kebijakan. Ideologi Pos-Islamis yang menunjukkan keterbukaan dan toleransi pada perbedaan sesuai dengan perkembangan tantangan bagi PKS di lapangan. di Papua pragmatisme masyarakat memang menyebabkan politik uang menjadi alasan dominan bagi sebuah partai politik untuk memenangkan pemilu di daerah tersebut. Oleh karena itu dari Pemilu 1999-2009 PKS belum mengantarkan seorang kadernya ke Pusat dari wilayah Papua, Papua Barat dan Maluku. Di Papua dan Papua Barat misalnya di Pemilu 1999, PK mendapatkan 0 kursi baik di tingkat Pusat, provinsi maupun Kokab. Namun seiring dengan terjadinya transisi pemahaman dan aplikasi ideologi Pos-Islamis PKS maka terjadi sedikit peningkatan di Pemilu 2004 karena PKS mulai menempatkan calon anggota legislatif Kristen di tingkat Kota dan Kabupaten. Sehingga di 2004 tersebut PKS mendapatkan 2 kursi Provinsi dan 15 kursi Kokab di Papua serta hanya 1 kursi di tingkat kokab di Papua Barat. Kondisi ini membaik di 2009 masih karena penempatan calon anggota legislatif Kristen di tingkat Kokab maka di Papua PKS memperoleh 1 kursi provinsi dan 26 kursi Kokab dengan 10 aleg Kokab di antaranya merupakan aleg beragama Kristen. Sementara di Papua Barat 2 kursi provinsi dan 5 kursi Kokab.³²

Grafik III.5. Perolehan Kursi PKS di Papua pada Pemilu 1999-2009



Sumber: Data Wilda Indonesia Timur DPP PKS

³¹ Wawancara dengan Chairul Anwar. Ketua Wilda Sumatera. Jakarta, 13 Maret 2012.

³² Wawancara dengan Ahmad Feri Firman. Komisi Kebijakan Strategis MPP PKS. Jakarta, 20 Maret 2012.

Menurut Aidil, Wakil Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur (Intim), Di Papua, di beberapa kabupaten yang benar-benar hampir 100% Kristen, PKS memiliki total 10 aleg.³³ Kabupaten-kabupaten tersebut keseluruhannya ada di Papua dengan jumlah alegnya sebagai berikut:

- 1) Kab. Yahukimo - 1 aleg PKS
- 2) Kab. Pegunungan Bintang - 1 aleg PKS
- 3) Kab. Yalimo - 2 aleg PKS
- 4) Kab. Lanny Jaya - 2 aleg PKS
- 5) Kab. Nduga -1 aleg PKS
- 6) Kab. Jayawijaya - 1 aleg PKS
- 7) Kab. Pania - 1 aleg PKS
- 8) Kab. Intan Jaya - 2 aleg PKS

Perubahan kondisi tersebut bermula dari fakta di lapangan karena banyak orang-orang Kristen di kabupaten-kabupaten Kristen yang menuntut diizinkan membentuk DPC PKS dan ingin memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya melalui PKS sementara AD/ART PKS mencantumkan anggota PKS adalah WNI yang beragama Islam, maka dengan berbagai pembahasan di Dewan Syariah Pusat dan Majelis Syuro maka pada tahun 2005 terjadi amandemen AD/ART PKS di pasal 6 ayat 1 yang terkait syarat keanggotaan PKS. Sehingga kini, anggota PKS adalah setiap Warga Negara RI dapat menjadi anggota PKS. Perubahan AD/ART yang kemudian berdampak pada perubahan kebijakan pendirian struktur organisasi PKS di daerah-daerah Kristen di Papua yang dengan sendirinya diisi oleh orang-orang Kristen dan juga mengajukan caleg-caleg Kristen di tingkat kabupaten ternyata meningkatkan perolehan suara dan kursi PKS di Papua, sehingga di daerah-daerah Kristen pun PKS memiliki wakil-wakilnya yang juga beragama Kristen namun menjalankan kebijakan partai terkait dengan peraturan tidak boleh korupsi dan berjuang menyejahterakan rakyat.

Dari semua uraian di atas nampak bahwa selain mempengaruhi kader untuk bergerak, aplikasi ideologi Islamis yang tercermin pada perilaku kadernya yang lebih terbuka dan inklusif serta kebijakan partai yang juga lebih akomodatif terhadap perbedaan seperti ditunjukkan dalam kasus di Papua yang ditunjukkan antara lain dengan adanya indikator-indikator kuantitatif berupa peningkatan perolehan kursi di daerah-daerah yang secara

³³ Data diperoleh dari Aidil, Wakil Ketua Wilda Intim, DPP PKS, Jakarta. Selasa 20 Juni 2012.

ideologis merupakan basis PKS seperti di Sumatera Barat misalnya dan relatif stagnan atau di daerah-daerah yang secara ideologis bukan basis PKS seperti Bali, NTT dan Papua. Hanya saja sebagaimana diungkapkan Nurcholish Madjid bahwa di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat lebih melihat substansi dari pada simbol, maka penulis beranggapan bila PKS tidak mampu mengartikulasikan ideologi Pos-Islamis dalam perspektif kepentingan masyarakat luas akan sulit untuk menjadi kekuatan utama di Indonesia.

Oleh karena itu walaupun sudah berpengaruh secara positif, PKS masih harus terus melakukan adaptasi dalam hal aplikasi ideologisnya dengan cara mengemas nilai-nilai Islam dengan bahasa yang lebih memasyarakat dan mudah dicerna rakyat Indonesia. Lebih jauh lagi, ideologi Pos-Islamis masih harus terus dibuktikan dan diterjemahkan ke dalam program-program yang universal dan menyentuh semua komponen bangsa seperti program-program yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.³⁴

III. 2. Kurang Optimalnya Aspek Organisasi Pada Pemenangan Pemilu PKS 1999-2009

Faktor berikutnya yang tidak kalah pentingnya bagi upaya pemenangan Pemilu PKS adalah organisasi sebagaimana diuraikan Ostrogorski dan Michels bahwa setiap partai politik harus memiliki organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang dimilikinya secara efektif. Selain itu pertumbuhan struktur partai telah menjadi salah satu perkembangan utama proses demokrasi di masyarakat industri.³⁵ Partai Keadilan (PK) tak lama setelah dideklarasikan pada 9 Agustus 1998 di Masjid Al Azhar Jakarta, berturut-turut mendirikan DPW-DPW di seluruh Indonesia dan beberapa PIP (Pusat Informasi dan Pelayanan) di luar negeri.³⁶

Bila dilihat dari pengkategorisasian model organisasi- partai menurut Duverger maka struktur organisasi PKS terkategori model sel yang bersifat sentralistik.³⁷ Sedangkan berdasarkan klasifikasi model partai Richard S. Katz dan William Crotty, PKS termasuk partai kader.³⁸ Pengkategorisasian PKS sebagai partai sel dan partai kader bila dilihat dari segi struktur organisasinya dibenarkan oleh Hidayat Nur Wahid yang menyatakan bahwa

³⁴ Wawancara dengan Hidayat Nur Wahid. Presiden PKS periode 2002-2005 di DPR RI, Rabu, 3 Januari 2011.

³⁵ Alan Ware. *Political Parties and Party System*. Oxford University Press, New York, 1999, h: 93.

³⁶ Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. *Draft Kronologi Sejarah PKS*. Jakarta, 2008. h: 1.

³⁷ Maurice Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (edisi terjemahan). Editor: Afan Gaffar. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984. h: 10.

³⁸ *Ibid.*,

organisasi PKS berbasis kekaderan yang membangun struktur di seluruh wilayah Indonesia walaupun belum seluruhnya terjangkau.³⁹

Hal itu sejalan dengan pernyataan Sunmanjaya anggota legislatif PKS (2009-2014) yang mengatakan bahwa organisasi PKS sejak 1999 hingga 2009 masih merupakan organisasi kekaderan dan karena sistem kaderisasinya seperti *cell system*, maka otomatisnya organisasinya berbentuk seperti sel.⁴⁰ Terbentuknya struktur organisasi di tingkat DPRa, DPC, DPD dan DPW memang berawal dari terbentuknya kelompok-kelompok pembinaan berupa *usrah* dan *halaqah*. Misalnya di sebuah kelurahan terdapat sekian *usrah* (kelompok pembinaan kader inti) dan sekian *halaqah* (kelompok pembinaan kader pendukung) maka kemudian terbentuklah SPU (Struktur Pengelola Usrah) dan dapat terbentuk sebuah DPRa. Sehingga struktur organisasinya memang dimulai dari sebuah pembinaan model sistem sel (*cell system*). PKS dianggap cukup mampu mempertahankan daya saing elektabilitasnya di Pemilu karena soliditas organisasinya, walaupun lemah di persaingan ketokohan dan logistik di tingkat nasional.⁴¹

Salah satu ciri partai sel adalah bersifat sentralistik dan hal itu dibenarkan oleh Ahmad Feri Firman dari Komisi Kebijakan Strategis MPP bahwa struktur organisasi PKS memang sentralistik dilihat dari kewenangan penuh Majelis Syuro, DPTP (Dewan Pimpinan Tingkat Pusat sebagai pelaksana harian Majelis Syuro) dan DPP yang tertera di AD/ART. Dalam penentuan akhir soal calon walikota atau bupati misalnya maka mekanismenya dimulai dengan pemilihan internal di DPD dengan melibatkan seluruh kader inti, lalu lima besar dipelajari di DPW dan dipilih lalu diusulkan ke DPP karena keputusan akhir di ada DPP. Sementara untuk calon Gubernur atau calon Wakil Presiden dan calon Presiden keputusan akhir ada di DPTP.⁴²

³⁹ Hidayat Nur Wahid. *Op. Cit.*

⁴⁰ Wawancara dengan Sunmanjaya di Mukernas PKS, Jogjakarta. Ahad 26 Februari 2010 jam 15.30

⁴¹ Wawancara dengan Ketua Majelis Pertimbangan Partai: Ir.Untung Wahono M.Si pada hari Jum'at, 31 Desember 2010. Pkl 15.30-17.30 WIB.

⁴² Majelis Pertimbang Partai PKS. *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta, Maret 2006. h: 591-592. Dalam bab IV pasal 10 AD/ART PKS, disebutkan: *pertama*, struktur organisasi partai di tingkat pusat adalah Majelis Syuro, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat, Majelis Pertimbangan Pusat dan Dewan Syari'ah Pusat. *Kedua*, struktur organisasi partai di tingkat propinsi adalah Majelis Pertimbangan Wilayah, Dewan Pengurus Wilayah dan Dewan Syari'ah Wilayah. *Ketiga*, struktur organisasi partai di tingkat kabupaten atau kota adalah Majelis Pertimbangan Daerah, Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Syariah Daerah (kini telah diamandemen menjadi hanya Dewan Pengurus Daerah). *Keempat*, struktur organisasi partai di tingkat kecamatan adalah Dewan Pengurus Cabang. *Kelima*, struktur organisasi partai di tingkat kelurahan/desa/dengan sebutan lainnya lainnya adalah Dewan Pengurus Ranting. *Keenam*, selain struktur organisasi tersebut, partai membentuk unit pembinaan dan pengkaderan anggota. *Ketujuh*, ketentuan berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud dengan ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) diatur dalam Panduan Dewan Pengurus Pusat.

Lembaga tertinggi di PKS adalah Majelis Syuro yang terdiri dari 99 orang dengan rincian 57 berasal dari utusan daerah dan 42 orang pakar yang dipilih oleh 57 orang anggota terpilih sebelumnya. Lembaga ini bertugas memilih Ketua Majelis Syuro (MS) dan menetapkan Presiden partai, Ketua Dewan Syariah Pusat (DSP), Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP), Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Bendahara Umum (Bendum). Keenam anggota Majelis Syuro yang terpilih tersebut disebut Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP). Majelis Syuro memiliki hak dan kewajiban menentukan arah kebijakan partai, menentukan calon Presiden RI dari partai serta melakukan amandemen konstitusi. Majelis Syuro melakukan sidang 6 bulan sekali sehingga bila pada masa antara tersebut ada keputusan-keputusan strategis yang harus diambil, maka ditetapkan oleh DPTP yang akan dipertanggungjawabkan di sidang Majelis Syuro. DPP yang dipimpin oleh Presiden adalah badan eksekutif yang melaksanakan keputusan-keputusan DPTP, sementara MPP merupakan badan legislasi dan pertimbangan dan DSP merupakan badan legislasi dalam bidang syariah. Sementara Sekretaris Jenderal menjalankan manajemen organisasi dan Bendahara menerapkan strategi pendanaan kegiatan-kegiatan partai.⁴³

Sehingga bila menurut Ware yang mengutip Michels bahwa salah satu aspek organisasi yang penting untuk dianalisis adalah siapa yang mengontrol organisasi partai dan sumber daya yang dimilikinya, maka AD/ART PKS memperlihatkan bahwa Majelis Syuro yang terdiri dari representasi 33 DPW di seluruh Indonesia yang dipilih kader telah mempercayakan 6 pimpinan yakni Ketua Majelis Syuro yang sekaligus Ketua DPTP, Presiden PKS/Ketua DPP, Ketua MPP, Ketua DSP, Sekjen dan Bendum adalah pihak yang mengontrol pengelolalan organisasi partai dan sumber daya yang dimilikinya sebagai pelaksana harian Majelis Syuro. Namun kemudian wewenang tersebut secara teknis operasional dilimpahkan ke Badan Eksekutif Partai yakni DPP, sehingga dalam hal ini yang memegang kekuasaan cukup besar untuk mengontrol organisasi adalah Presiden PKS.

Dari hasil survei internal PKS yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPP PKS untuk meneliti kinerja struktur organisasi partai dengan responden Kader Inti (KI) baik anggota Madya, Dewasa dan Ahli, ditemukan fakta bahwa lebih dari separuh responden (59%) mengatakan sistem manajemen partai kurang berhasil dan struktur organisasi partai dinilai belum berhasil membangun dan melaksanakan sistem manajemen yang baik sehingga lemah dalam pengorganisasian, perencanaan, implementasi dan kontrol terhadap program dan kegiatan partai. Hal lain yang dianggap mengganggu kinerja struktural adalah rangkap

⁴³ *Ibid.*,

jabatan pengurus struktur partai dengan amanah jabatan di lembaga publik. Temuan yang lain menunjukkan bentuk keterlibatan paling aktif ada di DPC, padahal yang terbaik adalah jika struktur terbawah (DPRa) yang menjadi wadah terbesar bagi para kader karena interaksi yang langsung dan intensif di masyarakat terjadi di struktur terbawah, yakni DPRa yang ada di setiap kelurahan. Sementara jumlah kader yang tidak terlibat dalam struktur kepengurusan partai level manapun cukup besar yakni sebanyak 19%, padahal KI merupakan motor dan motivator bagi aktivitas dakwah kepartaian pada struktur.⁴⁴

Pentingnya menghidupkan struktur organisasi agar tetap dinamis termasuk hal yang sudah disampaikan oleh Ketua Majelis Syuro yakni bahwa siklus manajemen PKS harus terus bergulir dari mobilisasi ke konsolidasi lalu ke kordinasi dan kembali lagi ke mobilisasi dan seterusnya:

“Dalam siklus manajemen PKS setelah memobilisasi seluruh potensi yang dimiliki di Pemilu dan pemilihan Presiden, dibutuhkan kembali langkah-langkah konsolidasi. Mobilitas vertikal mengantarkan kader-kader terbaik PKS ke dalam lembaga-lembaga penyelenggara negara. Semua keberhasilan adalah karunia Allah SWT yang didukung oleh jerih payah seluruh kader dan pendukung kita serta bahkan dukungan umat dan bangsa. Oleh karena itu saya ingin menggarisbawahi bahwa mobilitas horizontal telah melibatkan seluruh potensi, bahkan potensi *dlu’afa, fuqara, masakin*, sehingga dalam merancang program yang harus diingat adalah program pengentasan fakir miskin. Langkah-langkah konsolidasi ini selanjutnya diikuti dengan langkah-langkah koordinasi dan kemudian pada fase siklus berikutnya kembali dilakukan mobilisasi seluruh potensi untuk umat dan bangsa serta bagi kemanusiaan”.⁴⁵

Faktor kelengkapan struktur organisasi sekaligus soliditasnya diakui oleh Chairul Anwar, Ketua Wilda Sumatera memiliki pengaruh pada keberhasilan perolehan suara di wilayah Sumatera baik untuk tingkat Pusat (DPR-RI), Provinsi dan Kota Kabupaten/Kokab. Misalnya dibandingkan di Pemilu 1999 Partai Keadilan hanya memperoleh 2 kursi pusat dari seluruh wilayah Sumatera dari 10 DPW hanya Sumatera Barat dan Lampung, karena saat itu boleh di bilang kelengkapan struktur organisasinya masih minim. Sementara di 2004 wilayah Sumatera mengirim 11 kadernya ke Pusat (DPR-RI) dan meningkat lagi menjadi 15 di Pemilu 2009. Sedangkan kursi di tingkat Provinsi pada tahun 2004 berjumlah 53 menjadi 58 di tahun 2009, sedangkan kursi di tingkat Kokab sejumlah 321 menjadi 322. Chairul

⁴⁴ Survei dilakukan oleh Sekretariat Jenderal DPP PKS, Jakarta 2008 dengan responden terdiri dari: Laki-laki sebanyak 62% dan Perempuan 38%, sedangkan jenjang keanggotaan kader yang disurvei sebagai responden adalah Anggota Madya sebanyak 69%, Anggota Dewasa 24,9% dan Anggota Ahli 6,1%.

⁴⁵ Taujih Hilmi Aminuddin di Rapat Majelis Syuro. Jakarta JW. Marriot, 16 Mei 2010.

menambahkan daerah yang sudah lengkap kepengurusan strukturalnya, umumnya bisa meningkatkan perolehan.⁴⁶

Sementara menurut Ahmad Dzakirin, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) aspek struktur organisasi belum terlalu berpengaruh di Jawa Tengah karena misalnya kelengkapan struktur DPC pada 2009 baru 75%. Kemudian mengenai sifat sentralistik struktur organisasi model sel yang dimiliki PKS menurut Dzakirin juga sempat menuai protes dari DPW Jawa Tengah terkait penentuan Anggota legislatif DPR-RI yang ditentukan oleh Pusat padahal bukan kader atau belum dikenal karena belum berinteraksi dengan para kader. Di Pemilu 2009, 3 dari 6 anggota legislatif pusat adalah dari tokoh eksternal atau bukan kader, sementara anggota legislatif di tingkat provinsi dan daerah adalah para kader dan memberikan kontribusi perolehan suara yang signifikan.⁴⁷

Struktur organisasi PKS pada Pemilu 1999 karena pada umumnya diisi oleh kader-kader terbaiknya yang umumnya adalah para Murabbi maka berfungsi sangat efektif sebagai mesin partai. Berbagai program dikerjakan dengan efektif dan efisien melalui jalur komando struktural. Selain itu organisasi saat itu juga menjadi sarana pembinaan dan magang para kader dalam memimpin serta menggerakkan roda organisasi partai. Akibatnya walaupun belum lolos ET 2%, Partai Keadilan (PK) yang hanya memiliki kader sejumlah 30 ribu orang mampu memperoleh suara sebesar 1,4 juta. Setelah Pemilu 1999 yakni tepatnya tahun 2000 dilakukan konsolidasi struktural dan kader, kemudian tahun 2001 dijadikan tahun rekrutmen besar-besaran dan organisasi berbentuk sel ini menjadi jalur komando yang efektif untuk menginstruksikan kader melakukan rekrutmen. Pada saat itu kader-kader yang berada di struktur umumnya juga adalah para kader senior yang menjadi para instruktur atau Murabbi dan Naqib. Maka selama masa 4 tahun setelah 1999 terjadi lonjakan jumlah kader menjadi sebesar 372.746 orang dan kader inti 21.444 orang (394.190). Di Pemilu 2004 PKS memperoleh pula lonjakan suara 7 kali lipat menjadi 7,2% dan dari 7 kursi anggota DPR RI menjadi 45 kursi, demikian pula di DPR Provinsi dan kota/kabupaten dari hanya 186 menjadi 1112.

Namun mobilitas vertikal berupa berpindahnya kader-kader terbaik di struktur organisasi partai terjadi secara besar-besaran sehingga menimbulkan kekosongan di struktur organisasi baik pusat maupun daerah. Walaupun sebagian masih melakukan rangkap jabatan antara posisinya di struktur lembaga tinggi Negara dan di struktur partai, jelas sangat tidak

⁴⁶ Wawancara dengan Chaerul Anwar. *Op. Cit.*

⁴⁷ Wawancara dengan Ahmad Dzakirin, ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Jawa Tengah. Jakarta, 20 Maret 2012.

optimal karena keterbatasan waktu. Sementara regenerasi untuk menduduki jabatan struktural organisasi kurang dipersiapkan dengan baik. Dampaknya secara nyata segera terlihat sejak 2004 hingga 2009, boleh dibilang struktur organisasi kehilangan wibawa untuk menjalankan fungsi komandonya menggerakkan mesin organisasi. Ketaatan kepada Murabbi dan Naqib relatif masih terpelihara, namun ketaatan terhadap struktur berkurang drastis.⁴⁸

Kader-kader yang duduk di struktur organisasi baik pusat maupun daerah banyak yang masih baru atau masih muda usia tarbiyah atau pembinaannya sehingga sedikit pula pengalamannya dalam mengelola struktur organisasi. Akibatnya sulit memunculkan kewibawaan struktur, sementara bentuk organisasi sel yang bersifat sentralistik membutuhkan kewibawaan struktur. Lain halnya bila berbentuk *branch* yang desentralistik dan otonom, maka yang menonjol adalah kompetensi profesionalitas dan kapasitas tanpa harus ada beban menunjukkan kewibawaan.

Selanjutnya struktur sel di 2004-2009 tidak menjadi sarana rekrutmen yang efektif karena kewibawaannya yang menurun. Di sisi lain, bentuk struktur yang terbatas dan cukup ketat aturannya untuk menjadi pengurus didalamnya membuatnya juga tidak cukup luas untuk menjadi sarana pembelajaran bagi para kader yang baru terekrut. Ada begitu banyak persyaratan bagi seseorang untuk menempati pos di struktur organisasi. Oleh karena itu pada tahun 2009, walaupun ada peningkatan jumlah yakni menjadi 532.803 orang terdiri dari 496.782 kader pendukung dan 36.021 kader inti, tetap tidak sebesar pertumbuhan jumlah kader dari 1999 ke 2004.⁴⁹ Demikian pula halnya dengan hasil perolehan suara di Pemilu 2009 yang mengecewakan karena jauh di bawah target 20% . Hal itu tidak mengherankan mengingat struktur organisasi sebagai mesin partai jauh berkurang lebih efektifitasnya.

Selain itu manajemen organisasi termasuk manajemen SDM, kaderisasi, informasi yang belum rapi dan profesional kesemuanya menyebabkan faktor organisasi berpengaruh secara signifikan hanya di Pemilu PKS di 2004, sementara di Pemilu 1999 belum berpengaruh karena tidak memiliki kelengkapan struktur. Sedangkan di Pemilu 2009, kurangnya kemampuan pengendalian struktur organisasi yang membesar menyebabkan pemanfaatan yang kurang optimal terutama di struktur terdepan yakni DPRa sehingga kurang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu 2009.⁵⁰

⁴⁸ Sitaresmi S. Soekanto. *Pengembangan Budaya 'Knowledge Sharing' Melalui Pengadaan 5 'Enabler Nonaka' Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. Tesis Pascasarjana Psikologi UI. Depok 2006.

⁴⁹ Data dari Bidang Kaderisasi DPP PKS, 2011

⁵⁰ Wawancara dengan Sunmanjaya. *Op. Cit.*

III.3. Perluasan Basis Massa Berpengaruh Positif pada Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009)

Faktor basis massa diyakini ikut berperan dalam pemenangan Pemilu PKS, walaupun tingkat dan jenis pengaruhnya berbeda-beda di 33 DPW di seluruh Indonesia yang memiliki karakteristik penduduk yang berbeda-beda. Robert W. Hefner menyatakan bahwa kader-kader PK sebelum menjadi PKS adalah hasil rekrutmen aktivis Muslim di kampus-kampus.⁵¹ Rachel Ricardo dalam disertasinya meneliti tentang perempuan PKS yang dianggapnya mewakili kelompok Muslim modern dan membandingkannya dengan Solidaritas Perempuan (SP) yang disebutnya perempuan sekuler karena tidak memakai diskursus keagamaan sebagai legitimasi kiprahnya serta dengan perempuan di Rahima dan Fatayat (NU) mewakili kelompok Muslim tradisional. Kiprah perempuan di Solidaritas Perempuan, Rahima, Fatayat dan PKS, betapapun didasari oleh ideologi yang berbeda diyakini Rachel didorong oleh pengaruh kebangkitan Islam, meningkatnya ketaatan atau relijiusitas masyarakat, orientasi ke arah modernitas dan terinspirasi nilai-nilai Islam untuk melakukan perubahan sosial. Temuan Rachel lainnya adalah bahwa perempuan-perempuan dari empat kelompok ini sama-sama berasal dari kelas menengah bawah, namun berkat pendidikan tinggi, kemudian berkarir dan berpenghasilan meningkat menjadi kelompok kelas menengah modern yang taat. Mereka memiliki kemiripan gaya hidup terkait dengan status sosial mereka yakni hampir semuanya lulusan universitas, memiliki mobil, televisi dan atribut-atribut kelas menengah lainnya, memiliki karir profesional namun tetap mementingkan keluarga serta pendidikan anak.⁵²

Direktur Eksekutif LSI Saiful Mujani pun menyatakan karakteristik pemilih PKS adalah kelas menengah ke atas yaitu golongan masyarakat yang menentukan pilihan dengan pertimbangan yang matang. "Karakteristik pemilih PKS itu kelas menengah yang biasanya tidak cepat menentukan pilihan dan bersikap *wait and see*," ungkap Saiful. Hal yang sama juga terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN) karena karakteristik pemilihnya juga berasal dari kelas menengah. Dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menurutnya berdasarkan karakteristik pemilihnya biasanya dukungan publik terhadap PKS akan mengalami kenaikan sebesar 2 hingga 3 persen pada hari H Pemilu.⁵³

⁵¹ Robert W. Hefner. *Op.cit.* h: 34.

⁵² Rachel Rinaldo. *Mobilizing Piety: Women, Islam, and the Public Sphere in Indonesia. A Dissertation Submitted to Faculty of the Division of the Social Science in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy.* The University of Chicago, August 2007, h: 300-302.

⁵³ /http://www.inilah.com/Agus Priatna. Oleh: Sumitro Nasional - Minggu, 26 Februari 2012 |03:15 WIB

Kesimpulan Hefner, Rachel Ricardo dan Syaiful Mujani bahwa basis massa konstituen PKS berupa kelas menengah dari perkotaan dan berpendidikan sesuai dengan karakteristik kelas menengah (*middle class*) yang diuraikan Lipset⁵⁴ memiliki indikator berasal dari masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan cukup tinggi. Sebagaimana Daniel Lerner menemukan hubungan erat antara urbanisasi, *literasi* (melek huruf), pendidikan dengan tingkat pemberian suara.⁵⁵ Demikian juga Huntington⁵⁶ yang meyakini perkembangan ekonomi telah mendorong meningkatnya jumlah kelas menengah dengan terjadinya mobilitas vertikal karena meningkatnya strata pendidikan dan taraf hidup yang kemudian berusaha memajukan kepentingan-kepentingannya melalui politik. Pendapat Huntington tersebut sejalan dengan kesimpulan Vali Nasr bahwa kebangkitan Islam politik diawali dengan kemajuan di bidang pemikiran dan ekonomi yang memunculkan *new muslim middle class* yang kemudian mendirikan partai-partai politik Islam.⁵⁷

Hilmi Aminuddin menyatakan bahwa di dalam AD/ART PKS sebenarnya basis massa PKS adalah setiap warga negara Indonesia dari semua lapisan masyarakat dengan aturan-aturan yang sangat terbuka dan mudah. Namun karena di awal gerakan Tarbiyah yang kemudian melahirkan PKS, harus ada penanaman ideologi serta agen-agen perubah, maka yang menjadi sasaran awal pembentukan basis massa utama adalah masyarakat kampus, terdidik, ilmiah dan urban perkotaan yang notabene adalah kelas menengah.⁵⁸ PKS merupakan partai kader yang lebih berkonsentrasi ke dalam untuk membina internal kader dan kurang melakukan ekspansi untuk perluasan basis massa. Salah satu penyebab kurangnya ekspansi adalah kapasitas rekrutmen kader yang rendah. Kurangnya tenaga instruktur dan rendahnya kapasitas rekrutmen kader menyebabkan laju ekspansi perluasan basis massa juga tersendat. Akibatnya tingkat pengenalan masyarakat luas kepada PKS juga menjadi terbatas.⁵⁹

Dalam teori *voting behavior* yang mengungkap alasan seseorang memilih sebuah partai politik, menurut Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt ada *mazhab* sosiologi

⁵⁴ Seymour Martin Lipset. *Political Man, Basis Sosial Tentang Politik* (ed. Terj). Pustaka Pelajar, 2007. h: 24-25.

⁵⁵ *Ibid.*, h: 27-28.

⁵⁶ Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (edisi terjemahan dari "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century"). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997, h: 81.

⁵⁷ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. Free Press, New York. 2009. h: 249.

⁵⁸ Wawancara dengan Hilmi Aminuddin, dilakukan pada hari Minggu 6 Desember 2009, jam 17.00-17.45 WIB.

⁵⁹ Sitaresmi S. Soekanto. *Pengembangan Budaya "Knowledge Sharing" Melalui Lima "Enabler Ba" Nonaka Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. Tesis Program Pascasarjana, Depok: F. Psikologi UI, 2006. h: 4.

yaitu perilaku pemilih yang memilih dengan didasari faktor-faktor sosiologis, psikologis dan umumnya berasal dari kelas menengah bawah dan kelas bawah.⁶⁰ Sementara Franz Urban Pappi menambahkan adanya jenis *mazhab* pilihan rasional (*rational choice theory*) yang umumnya berasal dari kelas menengah atas yakni *reasoning voter* yang lebih mementingkan faktor isu, kandidat serta program sebagai alasan untuk memilih sebuah partai politik. Jenis pemilih rasional ini cenderung berubah-ubah pilihannya di setiap Pemilu karena tidak mendasarinya atas kedekatan sosiologis atau psikologis.⁶¹

Bila dilihat dari teori *voting behavior* tersebut maka fenomena basis massa PKS yang merupakan kelas menengah dan umumnya terdiri dari kaum terdidik di perkotaan adalah basis massa yang bisa berubah-ubah pilihannya di setiap Pemilu.⁶² Oleh karena itu untuk meningkatkan jumlah perolehan suara, PKS harus mendapatkan pula dukungan basis massa yang memilih atas dasar kedekatan secara sosiologi dan psikologis serta umumnya berasal dari masyarakat akar rumput. Hal ini terbukti di Pemilu 2009 yakni walaupun suara PKS menurun, terutama di daerah-daerah kantong suara PKS seperti misalnya di DKI Jakarta yang di Pemilu 2004 menempati urutan pertama kini di 2009 berada di peringkat dua di bawah Partai Demokrat, ternyata bila dilihat dari perolehan kursi secara keseluruhan malah meningkat. Oleh karena itu dengan perolehan suara yang hanya naik tipis menjadi sebesar 7,88% di Pemilu 2009 jumlah kursi PKS meningkat menjadi 57 dari sebelumnya 45 karena ada penambahan dukungan suara dari Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera juga Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Madura. Nampak ada perluasan peta basis massa PKS sehingga tidak hanya berasal dari kelas menengah melainkan juga dari basis massa yang umumnya memilih atas dasar kedekatan secara sosiologis dan psikologis yakni masyarakat akar rumput.

Sebaliknya di Wilayah dakwah Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta (Wilda Jatijaya) yang merupakan basis utama kedua PKS setelah Banjabar memperlihatkan bahwa yang mudah didekati justru masyarakat kelas menengah Muslim “abangan” di perkotaan yang berpendidikan dan relatif berpikiran terbuka sehingga perolehan PKS di basis utama kedua wilayah ini meningkat pesat di Pemilu 2004 dan 2009 dibandingkan perolehan PK di Pemilu 1999. Bahkan basis massa akar bawah namun berbasis ideologis kuat seperti santri

⁶⁰ Lihat Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 228, 238.

⁶¹ Franz Urban Pappi dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 255-256.

⁶² Wawancara dengan Sekretaris Wilda Banjabar, Ade Suherman, 1 Desember 2010, jam 14.00 WIB.

NU (umumnya ke PKB) atau akar bawah berbasis nasionalis kuat (umumnya ke PDIP) lebih sulit ditarik untuk memilih PKS.⁶³

Hal tersebut dibenarkan oleh Ahmad Dzakirin yang menyatakan bahwa basis massa utama PKS di Jawa Tengah memang di daerah komunitas Muslim abangan yang terpelajar dan banyak berinteraksi dengan para kader PKS, sementara di daerah Pantura (Pantai Utara) yang umumnya masyarakat akar bawah dan Muslim santri masih sedikit. Menurutny masih sangat sulit bagi PKS untuk menguasai basis massa tradisional NU tersebut karena selain fanatik dengan partai politik yang didirikan oleh warga NU seperti PKB misalnya, mereka juga rawan politik uang.⁶⁴

Hal senada juga diungkapkan oleh Agus Purnomo bahwa pada umumnya basis utama PKS di Yogyakarta adalah kelas menengah perkotaan yang berusia muda dan berpendidikan. Umumnya mereka adalah para mahasiswa yang mengikuti proses Tarbiyah, lalu sebagian ada yang menikah dan menetap di Yogyakarta. Mereka memiliki tradisi ilmiah yang baik sehingga bila ada berita-berita negatif tentang PKS di media, biasanya bisa diselesaikan dengan konfirmasi dan diskusi.⁶⁵ Tusy Wardani menambahkan bahwa baik secara ideologis maupun sosiologis, Yogyakarta merupakan daerah basis utama PDIP terutama masyarakat akar bawah nasionalis dan kelas menengah Muslim abangan. Namun beberapa partai Islam seperti PAN dan PKS, juga berhasil memperoleh suara dari masyarakat kelas menengah Muslim abangan di Yogyakarta, sementara PPP dan PKB memperoleh suara dari masyarakat akar bawah yang santri. Perolehan suara PKS di kabupaten Yogyakarta lebih kecil dibanding di kotamadya Yogyakarta karena masyarakat di pedesaan lebih rawan politik uang.⁶⁶

Sementara pendapat berbeda dilontarkan oleh Memed Sosiawan yang menyatakan bahwa peningkatan perolehan kursi di DPW Jatim di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004 yakni dari 3 menjadi 6 kursi lebih disebabkan oleh faktor eksternal berupa *chaos* politik di tubuh PKB yang sebelumnya sangat dominan di Jawa Timur. Pecahnya PKB menjadi PKB Muhaimin dan PKB Yenni Wahid serta penentangan Muhaimin pada pamannya sendiri yang sekaligus pendiri PKB yakni Gus Dur memiliki pengaruh sangat kuat pada merosotnya perolehan suara PKB dan para konstituennya banyak yang mengalihkan suara ke partai-partai lain termasuk ke PKS. Ditambah lagi menurut Memed, adanya pergeseran nilai-nilai ideologis seperti misalnya para Kyai yang menjadi panutan di basis massanya mulai bersikap

⁶³ Wawancara dengan Zuber Syafawi, Ketua Wilda Jawa Timur, Jawa Tengah dan Yogyakarta, di Jakarta, Jum'at 21 Januari 2011, jam 21.00 WIB.

⁶⁴ Wawancara dengan Ahmad Dzakirin. *Op. Cit.*

⁶⁵ Agus Purnomo. *Op. Cit.*

⁶⁶ Wahyu Tusy Wardani, kader perempuan PKS Yogyakarta dan staf Bidang Kaderisasi PKS. Jakarta, 13 Maret 2012.

pragmatis, yakni bahwa untuk merekrut mereka berikut basis massa yang dikuasainya harus ditunjukkan dengan komunikasi dan kontribusi dana. Sehingga basis massa utama PKS di Jawa Timur tetap masih dari masyarakat *middle class* yang berpendidikan seperti dari kampus-kampus dan sekolah-sekolah serta perkantoran, sementara *lower class* di *grass root* sangat pragmatis dan mudah terkena politik uang.⁶⁷

Demikian pula di daerah yang selama ini dianggap basis utama PKS yakni di wilayah dakwah Banten, Jawa Barat dan DKI Jakarta (Wilda Banjabar), basis loyal PKS juga masih di seputar Kampus, Sekolah dan Pesantren, walaupun sudah mulai ada perluasan hingga ke pelosok desa-desa.⁶⁸ PKS juga memiliki PIP (Pusat Informasi dan Pelayanan) di Luar Negeri dan suara konstituen di Luar Negeri disalurkan ke Dapil Jakarta Pusat. Menurut Darocky basis massa PKS lebih kuat di ibu kota negara-negara di mana ada KBRI dan jumlah penduduk Indonesia di kota ini juga biasanya terbanyak dibanding dengan di kota lain. Kemudian di kota tersebut banyak kegiatan yang dilakukan oleh kader PKS baik dengan nama PKS ataupun tidak misalnya berupa pengajian, seminar hingga kegiatan sosial.⁶⁹ Secara umum basis massa PKS di luar negeri yang terbesar memberikan kontribusi suara adalah di negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Timur Tengah.⁷⁰

Namun pada Pemilu 2009, daerah Wilda Banjabar mengalami penurunan perolehan suara dan kursi yang cukup besar sehingga membuat secara keseluruhan suara PKS pun menurun. Yudi Widiana Adia, Wakil Ketua Wilda Banjabar berpendapat bahwa faktor basis massa PKS yang merupakan masyarakat kelas menengah di Banjabar berpengaruh positif dengan meningkatnya perolehan suara PKS di Pemilu 2004 namun tidak berpengaruh positif di Pemilu 2009, terbukti dengan menurunnya perolehan suara PKS wilayah tersebut. Banjabar menurutnya lebih tepat dikatakan sebagai basis kader PKS dan belum bisa disebut basis massa PKS karena tipikal masyarakat Banjabar memiliki kohesifitas yang rendah sehingga menyebabkan mereka mudah berganti-ganti pilihan dan bersedia menerima parpol baru bila mampu menjadi *opinion leader* terutama masyarakat di wilayah Banjabar tengah, dari Tangerang sampai Bandung yang umumnya *middle class*. Sementara di wilayah Banten Barat dan Selatan serta Jabar Selatan dan Timur karakteristik paternalistiknya masih cukup

⁶⁷ Wawancara Memed Sosiawan, Anggota legislatif PKS dari Dapil Jatim VIII (Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kota dan Kabupaten Madiun, Kabupaten Jombang dan Kabupaten Nganjuk). Jakarta, 20 Maret 2012.

⁶⁸ Wawancara dengan Ade Suherman. *Op. Cit.*

⁶⁹ Wawancara dengan Darocky dan Firdaus, Badan Hubungan Luar Negeri (BHLN) PKS di kantor DPP PKS, Jakarta, Rabu, 1 Desember 2010; 14.00-14.30.

⁷⁰ *Ibid.*,

tinggi sehingga cenderung mengikuti tokoh masyarakatnya yang sudah pragmatis dalam pengertian rawan politik uang.⁷¹

Banjabar mengalami penurunan perolehan suara yang cukup besar di Pemilu 2009 misalnya di DKI turun sampai 30%, di Banten 15% dan Jawa Barat 14% sehingga total di Banjabar turun 19% akibat kehilangan suara sekitar 700.000-800.000 suara. Di Jawa Barat 54% *swing voter* lari ke partai Demokrat. Penurunan suara PKS di Banjabar sebesar 800.000 berdampak di skala nasional.⁷² Penurunan perolehan suara PKS terutama di basis massa terdidik di perkotaan karena segmen kelas menengah terdidik merupakan *swing voter* yang *well informed*, sementara di DKI paling mudah terkena isu problem-problem nasional. Ditambah pula ada fenomena lain berupa kehadiran partai baru Gerindra yang memperoleh suara di Jakarta sebesar 600.000 dan Hanura sekitar 500.000.

Karakter *swing voter* atau pemilih yang inkonsisten di wilayah perkotaan Banjabar jelas berbeda dengan kondisi *swing voter* di Papua sebagaimana jenis pragmatisme masyarakat Banjabar juga berbeda dengan pragmatisme masyarakat di Papua. Bila pragmatisme masyarakat Banjabar lebih karena pertimbangan *rational choice* sehingga ketika menjatuhkan pilihan karena melihat program perbaikan yang ditawarkan, maka pragmatisme di Papua terutama di pedalaman lebih karena terkena politik uang. Wenti, kader perempuan PKS di Papua mengatakan bahwa modus politik uang untuk membeli suara sangat dominan di setiap Pemilu. Sementara basis massa PKS di Papua terutama berada di daerah perkotaan yang terdiri dari masyarakat pendatang. Namun PKS juga memperoleh suara sebagian kecil penduduk asli Papua terutama di daerah yang Kepala Sukunya sudah didekati oleh kader PKS atau ada warga tersebut yang menjadi canggota legislatif di tingkat Kabupaten atau Kota.⁷³

Pernyataan Wenti tersebut dibenarkan oleh Ahmad Feri Firman, Ketua Wilda III (periode 2000-2005) di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Namun Feri Firman juga menambahkan bahwa di daerah ini bahwa selain uang maka faktor kekerabatan seperti kesamaan marga, warna kulit dan bahasa juga berpengaruh bagi penduduk asli Papua untuk menetapkan pilihannya. Senada dengan Wenti, Feri Firman juga mengatakan bahwa basis massa utama PKS di Papua ada di daerah perkotaan yang merupakan warga pendatang dan umumnya beragama Islam. Sedangkan penduduk asli bisa saja mendukung partai Islam bila misalnya Kepala Suku yang karena didekati kader PKS atau karena persaingan dengan marga

⁷¹ Wawancara dengan Yudi Widiana Adia. *Op. Cit.*

⁷² Presentasi Rapat Kerja Wilayah Dakwah Banten, Jakarta dan Jawa Barat (Wilda Banjabar). Lembang, Sabtu-Ahad, 20-21 November 2010.

⁷³ Wawancara dengan Wenti. Kader Perempuan PKS Papua. Jakarta, 20 Maret 2012.

lain yang memilih partai tertentu memutuskan memilih PKS, maka satu desa yang merupakan satu marga juga akan memilih PKS.⁷⁴

Di daerah-daerah lainnya di mana Islam adalah minoritas dalam jumlah yang jauh lebih seperti di Bali dan Nusa Tenggara Timur (NTT) menurut Oktan Hidayat, Ketua Wilda Bali-Nusra (Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat) ada perbedaan karakteristik pemilih yang harus dicermati. Masyarakat Bali misalnya merupakan pemilih tetap PDIP dari Pemilu ke Pemilu sehingga jauh lebih sulit ditarik untuk menjadi konstituen PKS. Namun masyarakat di NTT yang sebenarnya juga merupakan daerah minoritas Muslim bersikap lebih pragmatis, oleh karena itu ada juga basis massa PKS di NTT walaupun tidak besar. Faktor yang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu PKS di NTT adalah faktor tokoh dan kekerabatan sehingga bila berhasil mengajak tokoh besar kemungkinannya besar untuk bisa menarik massa pengikutnya.⁷⁵

Logika tersebut juga ditemui di wilayah yang sebaliknya yakni di daerah-daerah mayoritas Muslim seperti di Sumatera, Sulawesi atau Kalimantan. Menurut Hadi Mulyadi, kader PKS yang diterima dan dipilih oleh masyarakat kelas menengah perkotaan di Kalimantan Timur misalnya adalah mereka yang memiliki status sosial ekonomi sebagai guru, dosen, ustadz, anggota dewan, pengusaha atau karena memiliki lembaga seperti sekolah dan yayasan yang dikelola secara baik. Sedangkan masyarakat “akar rumput” mayoritas bersikap pragmatis sehingga harus dihadapi oleh para tokoh dan kader PKS di Kalimantan secara realistis yakni dirawat dengan memberikan perhatian dan bantuan. Konstituen yang berasal dari kelas bawah sangat menguntungkan bila dirawat karena jumlahnya yang banyak.⁷⁶

Demikian pula basis massa PKS di Sumatera menurut Chairul Anwar, adalah Muslim kelas menengah berpendidik, melek politik, egaliter, akomodatif, menerima keberagaman sehingga memilih sebuah partai politik lebih berdasarkan pilihan rasional. Namun di masyarakat kelas bawah atau akar rumput, faktor kekerabatan atau kekeluargaan menjadi alasan kuat untuk memilih sebuah partai politik.⁷⁷ Sedangkan di Sulawesi ada penambahan perolehan suara dan kursi di parlemen Pusat yang cukup signifikan dari seluruh Daerah Pemilihan di Sulawesi dan perolehan kursi di parlemen Provinsi dan Kota/Kabupaten juga meningkat pesat. Di Sulawesi Tenggara (Sultra) misalnya terjadi peningkatan dari hanya mendapatkan 2 kursi Kokab di Pemilu 1999 menjadi memperoleh 3 kursi Provinsi dan 11

⁷⁴ Wawancara dengan Ahmad Feri Firman. *Op. Cit.*

⁷⁵ Oktan Hidayat. *Op. Cit.*

⁷⁶ *Ibid.*,

⁷⁷ Wawancara dengan Chairul Anwar. *Op. Cit.*

kursi Kokab di Pemilu 2004 dan di Pemilu 2009 memperoleh 1 kursi Pusat, 5 kursi Provinsi dan 24 kursi Kokab. Sementara Provinsi Sulbar memang belum ada di Pemilu 1999 dan baru mengikuti Pemilu 2004 sebagai daerah pemekaran dari Sulsel serta belum memperoleh kursi pusat, 3 kursi Provinsi dan 10 kursi Kokab, sementara di Pemilu 2009 mendapatkan 2 kursi Provinsi dan 6 kursi Kokab. Di Gorontalo pada tahun 1999 memperoleh 1 kursi Provinsi menjadi 3 kursi Provinsi di Pemilu 2004 dan berhasil mendapatkan 3 kursi Provinsi dan 8 kursi Kokab di Pemilu 2009.⁷⁸

Menurut Setiawan Ketua Wilda Sulawesi, PKS terutama memperoleh suara dari basis massa Muslim di Provinsi-provinsi yang mayoritas berpenduduk Muslim seperti Sulawesi Selatan (Sulsel) dan Sulawesi Tengah (Sulteng). Alasan mereka memilih PKS adalah karena partai Islam, namun begitu mereka menganggap PKS keluar dari standar mereka, maka dengan mudah pula mereka meninggalkan PKS. Basis massa PKS berasal dari pesantren dan lembaga perguruan Islam *Al Khairat*, sekolah dan kampus-kampus dengan kata lain basis massa utama PKS adalah kelas menengah terdidik. Namun sejak Pemilu 2004 di Provinsi-provinsi Sulawesi sudah mulai terjadi perluasan basis massa dari basis massa yang ideologis menjadi lebih bercampur dengan para pemilih awal yang lebih pragmatis dan rasional.⁷⁹ Sedangkan di daerah Gorontalo atau Sulawesi Utara, PKS memperoleh suara hanya di kantong-kantong Muslim sehingga di Sulawesi Utara pada Pemilu 1999 tidak memperoleh suara sama sekali baik di Pusat, Provinsi maupun di Kota/Kabupaten (Kokab), di Pemilu 2004 tidak memperoleh kursi Pusat dan Provinsi dan baru di Pemilu 2009 memperoleh 1 kursi Provinsi dan 6 kursi Kokab.⁸⁰

Basis massa PKS yang bila dianalisis dari teori Lipset, Lerner dan Huntington adalah kelas menengah yang kemudian dibenarkan oleh Hefner, Rachel Ricardo dan Saiful Mujani memiliki keuntungan dan sekaligus kerugian untuk daerah-daerah yang berbeda. Basis massa kelas menengah ini menurut teori Franz Urban Pappy pada umumnya menentukan pilihan atas sebuah partai politik berdasarkan mazhab *rational choice* sehingga cenderung pragmatis dan berubah-ubah. Di daerah-daerah tertentu seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur karakteristik tersebut menguntungkan bagi PKS karena bisa membidik masyarakat kelas menengah Muslim abangan yang terdidik serta pada umumnya merupakan *swing voter* dan menurut Gus Pur, di Yogyakarta jauh lebih sulit untuk menarik basis massa Muslim santri berlatar belakang NU.

⁷⁸ Data Wilda Sulawesi.

⁷⁹ Wawancara dengan Setiawan. Ketua Wilda Sulawesi DPP PKS. Jakarta, Jum'at 21 Januari 2011, jam 21.00 WIB.

⁸⁰ *Ibid.*,

Karakteristik basis massa PKS di Banjabar kurang menguntungkan karena pemilih kelas menengah ini berada di pusat-pusat informasi yang menyebabkannya pragmatis rasional dan sangat mudah berganti-ganti pilihan atau bahkan menjadi golongan putih alias golput. Dampak negatifnya terlihat di perolehan suara PKS yang menurun cukup signifikan di wilayah ini di Pemilu 2009 dibandingkan Pemilu 2004. Namun sikap pragmatis dengan alasan yang berbeda ditemukan juga di daerah seperti Papua, Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara, juga di daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pragmatisme masyarakat di daerah ini lebih terbentuk karena politik uang dan bukan atas dasar pertimbangan rasional.

Bila disimpulkan segmen basis massa PKS terbatas hanya kelas menengah Muslim konservatif di perkotaan dan masih sedikit yang berasal dari kelompok Muslim tradisional ataupun Muslim sekuler di perkotaan dan jauh lebih sedikit lagi yang dari kelompok minoritas Kristen. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Navis Murbiyanto, Sekretaris Bidang Kaderisasi, bahwa basis massa PKS terutama masih di Pesantren, Kampus dan Sekolah.⁸¹ Ade Suherman, staf Wilda Banjabar membenarkan keterbatasan basis massa tersebut dan menengarai hal itu antara lain disebabkan oleh kegamangan kader-kader PKS untuk memperluas basis massa.⁸²

Para kader umumnya berpendapat bahwa untuk menysar kelas bawah di perkotaan dan kelas bawah di pedesaan membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Sedangkan bila menysar ke kelas menengah sekuler ada kekhawatiran tidak dapat membinanya. Oleh karena itu keterbatasan basis massa PKS memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem rekrutmen PKS yang sebenarnya tertutup dan sangat rumit, akibatnya disadari atau tidak disadari ada upaya menahan laju perluasan basis massa karena masalah keterbatasan pendanaan untuk merawat basis massa serta keterbatasan kapasitas rekrutmen dan pembinaan kader. Keterbatasan basis massa PKS di kelas menengah Muslim konservatif di perkotaan membuat perolehan suara PKS pun terbanyak hanya di daerah kota-kota besar di pulau Jawa, yang nilai kursinya karena dihitung berdasarkan proporsi kepadatan penduduk merupakan kursi mahal. Padahal hasil Pemilu 2009 bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 sudah memperlihatkan bahwa ketika PKS juga mendapatkan dukungan dari kelas bawah di pedesaan atau Muslim abangan di berbagai daerah selain daerah basis kader PKS yakni Banjabar maka terdapat peningkatan perolehan kursi karena kursi murah. Akibatnya aspek

⁸¹ Wawancara dengan Navis Murbiyanto. *Op. Cit.*

⁸² Wawancara dengan Ade Suherman. *Op. Cit.*

basis massa tidak besar pengaruhnya bagi kemenangan Pemilu PKS di 1999, 2004 namun sedikit meningkat pengaruhnya di 2009.

III.4. Sistem Rekrutmen Anggota di PKS Masih Berpengaruh Positif pada Kemenangan Pemilu PKS

Dilihat dari pengelompokan partai-partai politik oleh Richard S. Katz dan William Crotty dalam *Handbook of Party Politics*, PKS termasuk partai kader.⁸³ Sebagai partai kader, PKS dikomentari oleh Greg Fealy:

“PKS tetap satu-satunya partai Islam yang mempunyai sistem kaderisasi yang serius dan sistematis dan mereka betul-betul menjaga kapasitas anggotanya dan itu sangat penting untuk kesehatan demokrasi di Indonesia”⁸⁴

Sedangkan dilihat dari tipologi partai politik menurut Duverger berdasarkan sistem rekrutmennya maka di antara jenis *caucus*, *branch*, *cell* dan *militia*⁸⁵ maka PKS termasuk jenis partai *cell* yang sistem rekrutmennya mirip dengan partai komunis yang lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya dan bersifat sentralistik. Walaupun di AD/ART disebutkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia (WNI) dapat menjadi anggota PKS sebagaimana disebutkan oleh Alan Ware bahwa partai-partai yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya seperti misalnya partai Konservatif kini memiliki jumlah anggota yang relatif besar karena berubah menjadi lebih inklusif dengan sistem rekrutmen 'hibridisasi/percampuran' antara *supporter*, *member* dan *activist* di partainya.⁸⁶

Ada beberapa jalur rekrutmen untuk menjadi *supporter*, *member* dan *activist* di PKS. *Supporter* di PKS disebut sebagai simpatisan, kemudian *member* atau anggota terbina baik anggota pendukung maupun anggota inti. PKS yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya, kini memiliki jumlah anggota yang relatif besar, walaupun jenis hubungan keanggotaannya yang dahulu erat satu sama lain mulai berkurang. Sedangkan yang disebut sebagai *activist* atau aktivis Partai adalah para Naqib dan Murabbi (Pembina Kader Inti dan Kader Pendukung), Muwajih (Pemateri dalam seminar atau loka karya internal PKS) dan para pengurus struktur dari tingkat Pusat hingga tingkat ranting atau DPRa.⁸⁷

⁸³ Richard S Katz dan William Crotty. *Handbook of Party Politics*. Designs and Patents Act, 1988. h: 251.

⁸⁴ Greg Fealy. *Op. Cit.* Acara Bedah buku: PKS dan kembarannya.

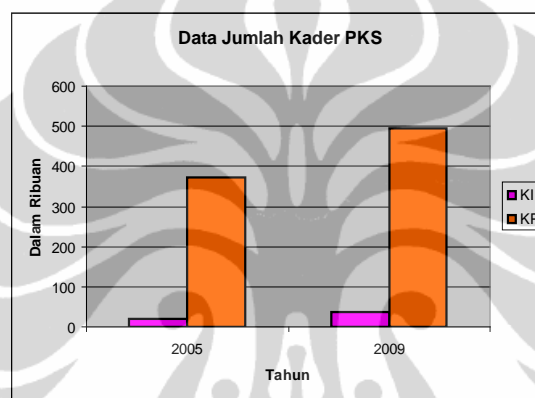
⁸⁵ Alan Ware. *Partai Politik dan Sistem Partai*. Oxford University Press.1996. h: 95.

⁸⁶ *Ibid.*, h: 66.

⁸⁷ *Ibid.*

Di dalam AD/ART PKS keanggotaan dibedakan: anggota pendukung yang terdiri dari anggota pemula dan muda, serta anggota inti yang terdiri dari anggota madya, dewasa dan ahli. Dari data Bidang Kaderisasi didapatkan data bahwa pada tahun 2004, jumlah kader/anggota pendukung PKS sebesar 372.746 orang dan kader inti 21.444 orang. Sementara pada tahun 2009, jumlah kader pendukung 496.782 orang dan kader inti 36.021 orang. Dan perolehan suara tahun 1999 sebesar 1.431.482, tahun 2004 sebesar 8.325.020 dan tahun 2009 sebesar 8.204.946. Kader Inti adalah kader dengan tingkatan: Madya, Dewasa dan Ahli, sedangkan Kader Pendukung adalah kader Pemula dan Muda.⁸⁸

Grafik III.6. Data Jumlah Kader PKS



Sumber: Bidang Kaderisasi DPP PKS

Pada Pemilu 2009 PKS menetapkan target dan sasaran utamanya menjadi 3 besar, memperoleh 20% kursi DPR dengan cara mendapatkan suara pemilih 24 juta suara. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) 2005, PKS harus mendayagunakan seluruh potensi aset yang dimilikinya secara modern, efektif dan efisien.⁸⁹ Peningkatan target perolehan suara dengan sendirinya menuntut pula adanya peningkatan target di aspek lainnya, di antaranya yang paling penting adalah peningkatan jumlah kader dari 300.000 menjadi 2 juta kader, karena mereka ibarat *sales agent* bagi PKS dalam meraih pertambahan konstituen. Pertambahan jumlah kader memang menjadi salah satu indikator keberhasilan baik dalam Amanat Munas 2005 maupun 2010.⁹⁰

Pada Pemilu 2009 terbukti pertumbuhan kader sebesar 2 juta tidak tercapai karena jumlah kader PKS terdaftar pada 2009 hanya sekitar 532.803 orang.⁹¹ Menilik data pertumbuhan kader PKS hingga 2009 tersebut, Zaenuddin mengakui adanya ketidaklancaran

⁸⁸ Data dari Bidang Kaderisasi DPP PKS, 2011

⁸⁹ MPP. *Op.cit.* h: vii.

⁹⁰ Sitaresmi S. Soekanto. *Op.Cit.*

⁹¹ Data Sekretariat DPP PKS pada bulan Desember 2009.

pertumbuhan kader. Menurutnya paling tidak ada beberapa sebab: *Pertama*, hambatan aspek konsepsional yakni *manhaj* (konsep dan kurikulum) rekrutmen anggota PKS baru diselesaikan desainnya setelah 2007 dan belum lengkap pula isinya, sehingga belum sampai pada bagaimana mengimplementasikan *manhaj* agar kader lebih berkualitas, berpengaruh dan daya rekrutnya lebih banyak. *Kedua*, masalah kontrol atau evaluasi pertumbuhan kader yang kurang.⁹²

Musyaffa Ahmad Rahim⁹³, Ketua Bidang Kaderisasi periode 2010-2015 mengakui ada ketersendatan pertumbuhan kader sehingga tidak tercapai target pertumbuhan kader di tiga periode Pemilu (1999, 2004 dan 2009) dan menurutnya antara lain disebabkan kemampuan manajerial struktur:

”Kalau dari sisi grafiknya atau tren pertumbuhan dari 2004 ke 2009 memang agak datar demikian pula dari sisi fakta angka dan penyebabnya lebih karena faktor kemampuan manajerial PKS. Secara umum tata kelola kita kurang baik. Buktinya begitu kita datang ketemu dengan para pimpinan unit pembinaan kader, berdialog, ternyata potensi itu juga membludak”.

Selain itu faktor pengelolaan, rendahnya kapasitas rekrutmen kader, juga menyebabkan adanya ketersendatan pertumbuhan kader, terlebih lagi selama ini hanya mengandalkan rekrutmen di pesantren, kampus dan sekolah karena dianggap lebih mudah untuk direkrut dan dibina.⁹⁴

Fakta bahwa mayoritas kader PKS adalah generasi muda yang masih produktif dan terdidik tercermin dari profil kader PKS di Wilda Banten, DKI Jaya dan Jawa Barat merupakan gambaran profil kader PKS secara nasional. Hasil survei internal PKS yang dilakukan oleh sekretariat DPP PKS menunjukkan data bahwa mayoritas kader PKS yakni sebanyak 75,9% berasal dari rentang usia 25-44 tahun dan dari tingkat pendidikan rata-rata kader PKS ada lebih dari separuh kader PKS (55,7%) yang berpendidikan sarjana strata 1 (S1) dan yang berpendidikan SLTA/ sekolah yang sederajat dan Akademi/Diploma sebesar 35,3%.⁹⁵

⁹² Wawancara dengan Ahmad Zainuddin. Ketua Bidang Pembangunan Keummatan. DPR RI, Senayan, 25 Desember 2010.

⁹³ Wawancara Musyaffa Ahmad Rahim. MD Building, Jakarta. Sabtu 25 Desember 2010. Pukul: 10.00-10.30 WIB.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Riset TPPN DPP PKS berupa riset kuantitatif dengan melakukan survei ke pemilih 2004 dan 2009. Survei dilakukan pada tanggal 30 Agustus – 6 September 2009. *Op. Cit.*

Profil gambaran kader PKS tersebut ada hubungannya dengan hasil penelitian yang menunjukkan rendahnya kapasitas rekrutmen para kader PKS. Kemampuan ekspansi basis massa tidak dibarengi dengan kemampuan mesin rekrutmen kader karena kekurangan instruktur. Usia muda produktif para kader PKS membuat mereka juga banyak yang meniti karir di berbagai profesi sehingga memiliki keterbatasan waktu untuk membesarkan partai dengan misalnya menjadi pengurus di struktur atau berkontribusi dalam rekrutmen kader baru. Sebagian lagi kader-kader utama PKS yang umumnya adalah instruktur produktif banyak yang mulai yang membina karir di politik. Sementara regenerasi sebagai instruktur atau pengurus di struktur belum berjalan lancar, sehingga kapasitas rekrutman yang dimiliki kader masih rendah.⁹⁶

Ditambah lagi sistem rekrutmen anggota dan kaderisasi atau pembinaan di PKS membutuhkan rentang waktu yang cukup panjang karena berjenjang dengan seleksi serta evaluasi di setiap jenjang. Di setiap pekan misalnya ada pertemuan rutin berupa pembinaan kader untuk memantapkan ideologi, memahirkan membaca dan menghafal Qur'an serta memantau aktivitas kader setiap pekannya termasuk kinerja kader dalam rekrutmen kader baru. Namun pola kaderisasi dan *manhaj* (metode serta kurikulum) yang baku dikhawatirkan dapat memunculkan kejenuhan di sebagian kader yang merasa terbebani banyak kewajiban dan kurang mendapatkan penyegaran. Oleh karena itu tidak boleh ada stagnasi dalam sistem rekrutmen dan kaderisasinya dengan cara memunculkan inovasi secara terus menerus sebagai hasil budaya "sharing" yang belum sepenuhnya terbangun di PKS.⁹⁷

Ahmad Dzakirin menyatakan bahwa trend perolehan suara PKS di Jawa Tengah yang meningkat lebih banyak disebabkan karena kinerja para kadernya.⁹⁸ Jumlah Kader Inti (KI) dan Kader Pendukung di Jawa Tengah misalnya di tahun 2009 adalah 54.252 padahal sebelumnya di 2004 berjumlah 52.793 maka perolehan suara pun meningkat dari 839.356 di Pemilu 2004 menjadi 1.076.033 di Pemilu 2009. Peningkatan jumlah kader di Jawa Tengah berdampak positif dengan meningkatnya perolehan suara dan kursi PKS di Jawa Tengah.

Hal ironis terjadi di Wilda Banjabar yang merupakan basis kader PKS atau dengan kata lain memiliki jumlah kader terbanyak di 3 provinsi tersebut (Banten, DKI Jaya dan Jawa Barat) malah mengalami kehilangan suara hingga 800 ribu. Memed Sosiawan anggota legislatif PKS dari Dapil Jatim VIII berpendapat bahwa meningkatnya perolehan kursi PKS di Provinsi Jawa Timur lebih disebabkan karena faktor eksternal berupa *chaos* politik yang

⁹⁶ Sitaresmi S. Soekanto. *Op. Cit.*

⁹⁷ *Ibid.*,

⁹⁸ Wawancara dengan Ahmad Dzakirin. *Op. Cit.*

dialami partai yang selama ini dominan di Jawa Timur yakni PKS sehingga secara tidak langsung memberikan imbas positif pada perolehan suara bagi partai-partai lain termasuk PKS. Sementara sistem rekrutmen kader di Jatim tetap hanya mengandalkan para mahasiswa dan kaum terdidik lainnya di perkotaan demikian pula dalam metode rekrutmen yang dilakukan oleh struktur dan kader nyaris tidak banyak perbedaan atau dengan kata lain tidak ada inovasi dan berjalan seperti biasanya dari waktu ke waktu.⁹⁹

Setiawan menyatakan bahwa faktor kader dari pemilu 1999 ke 2004 memang sangat berpengaruh, dalam pemenangan Pemilu, namun hal itu tidak lagi cukup di 2009 karena bila akan membesarkan partai tidak mungkin hanya mengandalkan kader. Menurutnya, boleh dibilang pertumbuhan kader ideologis sudah mencapai titik jenuh, sehingga harus ada variasi dalam sistem rekrutmen misalnya merekrut relawan atau *rabhtul 'am* (tokoh massa).¹⁰⁰

Pada tahun 1999 tercatat jumlah Kader Inti (KI) hanya 3000 orang dan Kader Pendukung (KP) sebesar 57.000 atau total 60 ribu kader. Peningkatan luar biasa/lompatan perolehan jumlah kader terjadi di 2004 dengan adanya gerakan tahun pembinaan dari 3000 kader inti menjadi 21.444 atau 7 kali lipat. Ditambah KP menjadi 372.746 dari 57.000 atau 6,5 kali lipat. Maka pertumbuhan kader itu berbanding lurus dengan peningkatan perolehan suara dari 1.431.482 menjadi 8.325.020 atau sebesar 5,8 atau hampir 6 kali lipat, demikian juga dengan perolehan kursi di pusat dari 7 kursi di Pemilu 1999 menjadi 45 kursi di Pemilu 2004 atau lebih dari 6 kali lipat.¹⁰¹

Selama ini diyakini ada sebuah aksioma di PKS bahwa kader adalah *vote getter* atau alat untuk mendapatkan dukungan suara, namun fenomena menarik dan bertolak belakang dari aksioma tentang peran kader yang dominan dalam pemenangan Pemilu adalah perolehan suara PKS yang justru meningkat di daerah-daerah minus Muslim dan oleh karena itu juga minus kader, seperti misalnya di Bali, NTT, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Dengan kekecualian terjadi di Kepulauan Riau yang juga mengalami fenomena berupa penurunan jumlah suara dari 1.658 di 2004 menjadi 1.304 di Pemilu 2009 namun tetap mengalami peningkatan jumlah suara dari 61.565 menjadi 69.722.

Bila diperbandingkan dari tahun 2004 ke 2009 misalnya di Bali dari total jumlah kader baik kader inti maupun kader pendukung sebesar 1761 berhasil didapatkan suara

⁹⁹ Memed Sosiawan. *Op. Cit.*

¹⁰⁰ Setiawan. *Op. Cit.*

¹⁰¹ Data Sekretariat Jenderal DPP PKS.

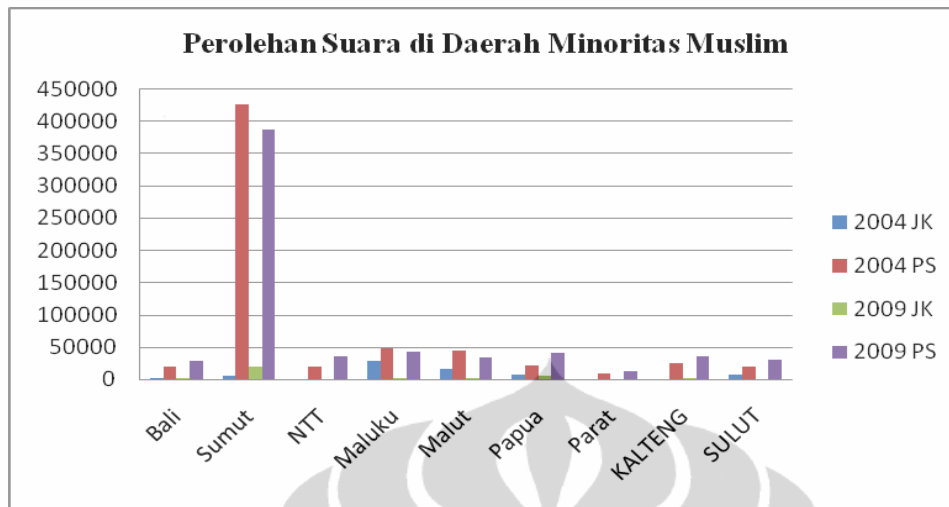
pemilih sebesar 18.837 artinya bila dibagi rata-rata maka 1 kader bisa menarik lebih dari 10 pemilih. Kemudian di tahun 2009 jumlah kader meningkat menjadi 2631 dan dengan jumlah sekian berhasil meningkatkan perolehan suara menjadi 28.472 atau 1 kader berhasil menarik hampir 11 kader. Demikian pula di NTT, jumlah kader di tahun 2004 dari total kader sebesar 1213 terdiri dari hanya 28 orang kader inti dengan kader pendukung sejumlah 1185 berhasil diperoleh suara sebesar 19.827 atau rata-rata satu orang kader dianggap berhasil merekrut lebih dari 16 suara pemilih. Fenomenanya benar-benar terbalik dari logika umum di PKS bahwa peningkatan jumlah kader akan berdampak pada peningkatan perolehan suara pemilih di Pemilu karena ketika terjadi penurunan jumlah kader menjadi 459 orang, perolehan suara malah meningkat pesat menjadi 35.997 atau 1 kader menarik lebih dari 78 suara pemilih.

Kejadian serupa juga ada di Provinsi Sulawesi Utara, terjadi penyusutan jumlah kader dari 6.714 di 2004 menjadi hanya 761 di 2009. Ketika dikonfirmasi ke Ahmad Feri Firman, Ketua Wilda III (2000-2005) yang melingkupi pula Sulawesi Utara hal itu terjadi karena perubahan mekanisme penghitungan jumlah kader berubah karena kategorisasi orang yang bisa dicatat menjadi kader berubah menjadi lebih ketat misalnya bila baru mengikuti ta'lim atau pengajian rutin di kantor belum bisa dikategorikan lagi sebagai kader pendukung. Hanya mereka yang sudah mengikuti halaqah rutin per pekan sekali dengan jumlah terbatas sekitar 12 orang baru bisa dianggap sebagai kader. Namun setelah 2011 dengan adanya amandemen AD/ART maka kategorisasi kembali diperluas bahwa ada anggota terdaftar dan anggota terbina artinya orang yang sudah memiliki Kartu Tanda Anggota sudah dianggap sebagai anggota terbina atau juga kader PKS walaupun belum dianggap anggota atau kader PKS terbina (yang sudah mengikuti *halaqah*).¹⁰²

Di Sulawesi Utara juga terjadi fenomena seperti di NTT yakni jika di 2004 1 orang kader berhasil merekrut suara hampir 3 orang, maka di 2009 dengan jumlah kader yang berkurang, perolehan suara malah meningkat hampir 2 kali lipat sehingga 1 orang kader berhasil menarik lebih dari 40 orang pemilih. Kelemahan soal mekanisme pendataan kader juga terjadi di provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, terkecuali Papua Barat yakni terjadi penyusutan jumlah kader yang diyakini Ahmad Feri Firman lebih karena belum adanya kesamaan persepsi tentang kriteria siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai kader. Namun hal yang pasti adalah terjadi peningkatan perolehan suara di keempat provinsi yang jumlah Muslimnya lebih sedikit dibanding yang non-Muslim.

¹⁰² Ahmad Feri Firman. *Op. Cit.*

Grafik III.7. Perolehan Suara PKS di daerah Minoritas Muslim



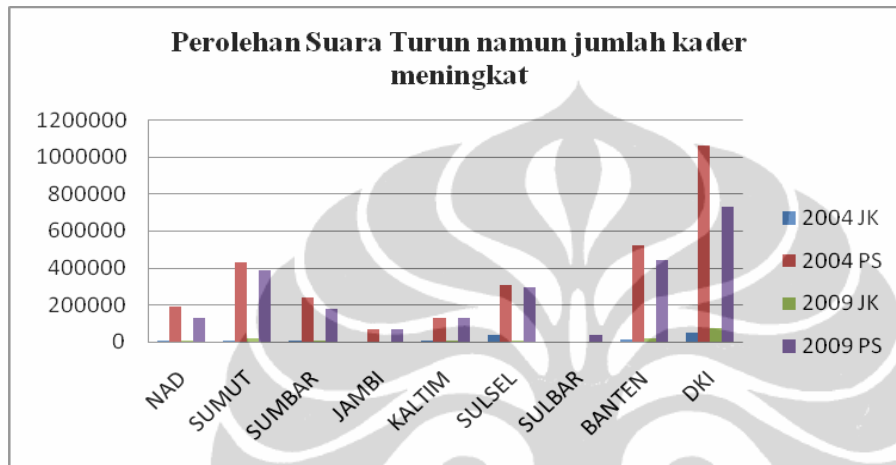
Sumber: Diolah dari Data Wilda DPP PKS

Sebaliknya secara kontras malah terjadi penurunan perolehan suara malah di provinsi-provinsi yang merupakan daerah basis kader misalnya di Provinsi Nangro Aceh Darusalam (NAD) jumlah kader meningkat lebih dari 2 kali lipat dari 4.281 kader menjadi 9.689 kader di 2009 namun perolehan suara malah menurun lebih dari 62 ribu orang yakni dari 192.469 di 2004 menjadi 130.278 di 2009. Di Sumatera Utara (Sumut) bahkan jumlah kader lebih dari 3 kali lipat dari 6090 orang menjadi 19.862, namun perolehan suara menurun sebesar 40 ribu 610 dari 427.724 di Pemilu 2004 menjadi 387.724 di Pemilu 2009. Demikian pula hal yang ironis terjadi di Sumatera Barat (Sumbar), jumlah kader meningkat hampir dua kali lipat (dari 6.605 menjadi 11.717) namun terjadi penurunan perolehan di Pemilu 2009 sebesar 56.832 suara (dari 236.858 menjadi 180.026). Di Jambi, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat juga terjadi hal yang sama yakni penambahan jumlah kader di satu sisi, namun di sisi lain malah terjadi penurunan perolehan suara hanya saja jumlah penurunannya relatif sedikit seperti misalnya di Jambi sekitar 3200, di Kalimantan Timur sekitar 3400 orang.

Namun hal yang lebih mengejutkan justru di daerah-daerah basis kader yang selama ini diandalkan sebagai sumber perolehan suara terbesar yakni Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat (Banjabar). Di Banten misalnya pertumbuhan kader hampir dua kali lipat dari 11.632 menjadi 22.204, namun perolehan suara menurun 77.927 dari 520.202 menjadi 442.275. Kondisi serupa juga terjadi di basis kader PKS lainnya yakni di DKI Jakarta, jumlah kader yang meningkat dari 52.287 menjadi 75.491 atau meningkat lebih dari 23 ribu malah juga diikuti dengan penurunan jumlah suara sebesar 330890 dari 1.057.246 menjadi 726.356.

Akhirnya peningkatan jumlah kader hingga 2 kali lipat (dari 59.595 menjadi 117.716) namun yang diikuti pula dengan penurunan jumlah perolehan suara hingga ratusan ribu (dari 2.369.231 menjadi 2.025.755) yakni sebesar 343. 476 juga terjadi di basis kader PKS lainnya yakni di Jawa Barat.

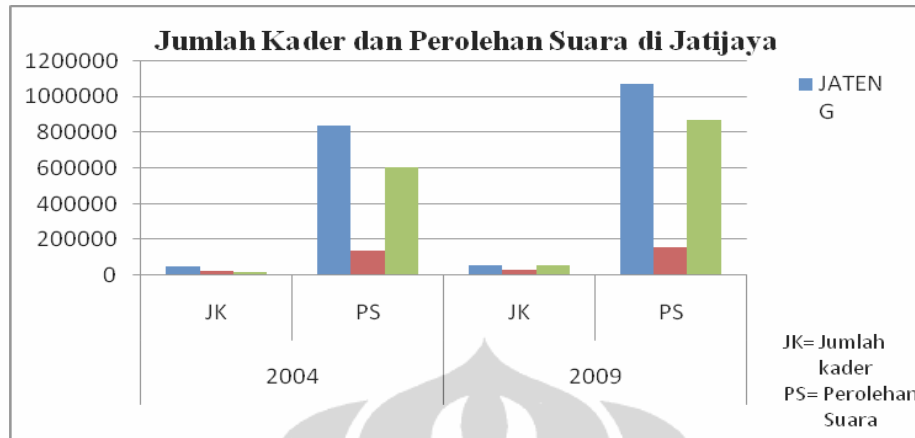
Grafik III.8. Perolehan Suara PKS Turun Namun Jumlah Kader Meningkat



Sumber: Diolah dari Data Wilda DPP PKS

Sementara di 13 provinsi selebihnya berlaku aksioma yang diyakini PKS selama ini yaitu bahwa bila jumlah kader meningkat maka akan otomatis terjadi penambahan perolehan suara walaupun jumlah peningkatan suaranya juga tidak signifikan. Sebagai contoh fenomena yang terjadi misalnya di Jawa Tengah, Yogyakarta atau Jawa Timur (Jatijaya) yang juga disebut sebagai daerah basis kader PKS kedua. Di Jawa Tengah jumlah kader bertambah hanya sebesar 1459 orang dari 52.793 di Pemilu 2004 menjadi 54.252 di Pemilu 2009, namun perolehan suara meningkat hingga ratusan ribu yakni sebesar 236. 677. Kondisi serupa juga terjadi di Yogyakarta yang mengalami penambahan kader hanya sebesar 5186 dari 25.235 menjadi 30.421 namun juga memperoleh peningkatan perolehan suara walaupun tidak besar yakni 18.018 dari 141.114 menjadi 159.132. Sementara di provinsi Jawa Timur, terjadi pertumbuhan jumlah kader yang besar yakni 30.896 dari 16.578 menjadi 57.474 dan mengalami peningkatan suara yang besar yakni hingga ratusan ribu tepatnya 260.043 dari 608.810 di Pemilu 2004 menjadi sebesar 868.853 di Pemilu 2009.

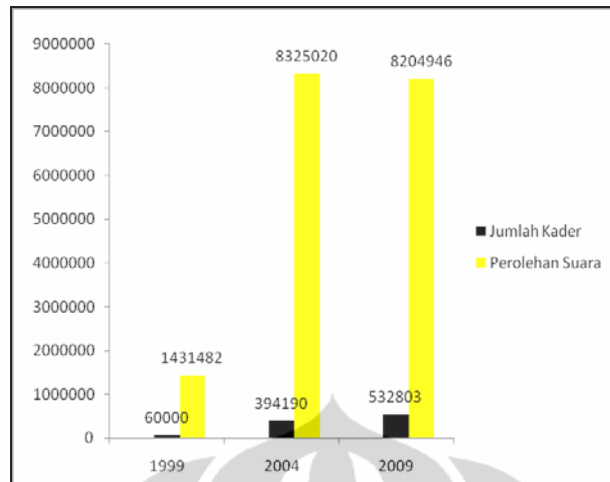
Grafik III.9. Perbandingan Perolehan Suara dan Jumlah Kader di Wilda Jatijaya



Sumber: Data Wilda Jati Jaya DPP PKS

Kesimpulannya di 9 provinsi dengan rincian 8 daerah minoritas Muslim jumlah kader ditambah Kepulauan Riau sebagai kekecualian, tidak mengalami peningkatan jumlah kader bahkan beberapa menurun, namun memperoleh peningkatan suara yang cukup besar. Sementara di 10 provinsi yang memiliki mayoritas berpenduduk Muslim dan daerah basis kader malah menunjukkan fenomena sebaliknya, jumlah kader terus bertambah namun perolehan suara dari Pemilu 2004 malah menurun di Pemilu 2009 termasuk daerah basis utama kader PKS yakni Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara di 14 provinsi selebihnya berlaku aksioma yang diyakini PKS selama ini yaitu bahwa bila jumlah kader meningkat maka akan otomatis terjadi penambahan perolehan suara. Dengan demikian dari 33 provinsi hanya ada 13 provinsi yang pertumbuhan jumlah kadernya berbanding lurus dengan peningkatan perolehan suara PKS, karena di 9 provinsi yang minim jumlah kadernya bahkan terjadi penurunan tetap terjadi peningkatan perolehan suara dan sebaliknya di 10 provinsi yang memiliki jumlah kepadatan kader PKS sangat tinggi malah terjadi penurunan perolehan suara.

Grafik III.11. Perbandingan Jumlah Kader Dengan Perolehan Suara 1999-2009



Sumber: Diolah dari Data Bidang Kaderisasi DPP PKS

Dari grafik di atas nampak bahwa di Pemilu 1999, peran kader sangat terlihat pengaruhnya bagi kemenangan PK karena saat itu hanya dengan jumlah kader inti 3000 orang dan kader pendukung 57 ribu orang atau keseluruhan berjumlah 60 ribu orang berhasil memperoleh 1,4 juta suara berarti diasumsikan satu kader berhasil menarik 24 orang pemilih. Hal tersebut dapat dikatakan murni hasil interaksi kader dengan masyarakat, karena PK tidak memiliki dana untuk iklan di media dan pendanaan kegiatan bakti sosial seperti pelayanan kesehatan gratis serta penjualan sembako murah pun dibiayai sepenuhnya oleh para kader.

Sedangkan di Pemilu 2004, walaupun faktor kader masih cukup berpengaruh namun mengalami penurunan karena dengan jumlah kader 394.190 atau hampir 400 ribu, PKS memperoleh suara 8 juta 325 ribu atau dengan kata lain 1 kader berhasil menarik 21 orang pemilih. Hasil perolehan suara PKS di 2004, berbeda dengan PK di 1999, tidak sepenuhnya bisa diklaim sebagai murni hasil kerja keras kader, karena sudah ada dukungan finansial dari 7 anggota dewan pusat dan 179 di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten sehingga sudah bisa beriklan di media cetak maupun elektronik. Selain itu faktor ketokohan Hidayat Nurwahid sebagai Presiden PKS cukup membantu peningkatan perolehan suara ditambah pula slogan Bersih dan Peduli menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih PKS.

Demikian pula halnya di Pemilu 2009, peran kader kembali mengalami penurunan dalam hal pengaruhnya bagi kemenangan Pemilu PKS. Dengan jumlah kader sebesar 532.803 atau mengalami peningkatan yang luar biasa dibanding 30.000 di tahun 1999 dan 394.190 di tahun 2004 sehingga perbandingannya adalah 1 kader menarik 15 orang pemilih. Hal tersebut jelas menunjukkan menurunnya pengaruh kader bagi kemenangan Pemilu 2009 karena

perolehan suara yang menurun sementara jumlah budget yang dikeluarkan struktur untuk mendukung pemenangan Pemilu termasuk untuk belanja iklan TV jauh lebih besar dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya. Dukungan pendanaan meningkat mengingat sudah ada 45 kader di parlemen pusat dan bila digabung dengan aleg Provinsi dan Kota/Kabupaten berjumlah 1112.

Oleh karena itu walaupun kader masih cukup penting perannya bagi pemenangan Pemilu PKS namun jelas bukan lagi satu-satunya aspek. Selain itu sistem rekrutmen model *cell* yang sangat mementingkan aspek kualitas dan tidak bisa massif menyebabkan di setiap Pemilu atau Pemilukada, mulai dirasakan kurangnya jumlah kader untuk melakukan *direct selling* dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye serta penjagaan di setiap TPS (Tempat pemungutan suara). Berpindahnya sebagian besar tokoh-tokoh utama kader yang selama ini menjadi murabbi, naqib yang memobilisasi kader juga menimbulkan kekosongan dan menurunnya pula tingkat mobilisasi kader. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor kader masih tetap penting bagi perolehan suara PKS namun seiring dengan perkembangan partai, kader bukan lagi menjadi faktor pertama dan utama untuk memenangkan Pemilu.

III.5. Aspek Kepemimpinan Belum Menjadi Aspek Utama yang berpengaruh pada pemenangan Pemilu PKS

Kepemimpinan politik kontemporer merupakan interaksi antara antara faktor karakter personal pemimpin, karakteristik konstituen yang dipimpin, pola interaksi di antara keduanya serta pengaruh konteks sejarah, politik, sosial dan budaya tertentu. Di Indonesia setelah sekian lama Soeharto berkuasa selama 32 tahun memang tidak pernah ada kaderisasi kepemimpinan nasional di Indonesia karena dianggap tidak akan pernah ada yang pantas untuk menggantikan Soeharto, akibatnya di era Reformasi juga terjadi krisis kepemimpinan nasional. Gerakan Tarbiyah yang kemudian mewujud menjadi Partai Keadilan (PK) sebenarnya terus melakukan pengkaderan para tokoh di kalangan mahasiswa yang ikut berperan dalam peristiwa Reformasi, namun umumnya masih terbilang sangat muda dan jelas belum dikenal.¹⁰³ Selanjutnya teori Pareto (1848-1923) bahwa setiap masyarakat dipimpin oleh sekelompok kecil orang terbaik yang dikenal sebagai elit yakni orang-orang yang berhasil menduduki jabatan tinggi di masyarakat juga nampak di Indonesia bahwa rata-rata

¹⁰³ Prof. Dr. Hamdi Muluk. *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.

pejabat berasal dari keluarga kelas atas yang ayahnya atau kakeknya dulu pernah menjadi pejabat atau penguasa pula di masanya.¹⁰⁴

Terkait teori Pareto dan Mosca tentang sirkulasi elit, maka elit pengganti harus memiliki karakteristik mampu memimpin dan melakukan kontrol politik. Karakteristik tersebut ada di kelompok sub elit yang disebut oleh Mosca sebagai “kelas menengah baru” yang sangat menentukan stabilitas politik karena kepandaian dan moralitas mereka.¹⁰⁵ Baik Pareto maupun Mosca meyakini pendidikan dan latar belakang kelas sosial berpengaruh bagi kemampuan seseorang untuk memimpin. Namun di Indonesia mayoritas rakyat Indonesia masih lebih melihat faktor popularitas dan citra seorang tokoh dibandingkan faktor kapasitas, integritas dan reputasi atau rekam jejak keberhasilannya.¹⁰⁶

Sedangkan dilihat dari teori kepemimpinan Max Weber yakni kepemimpinan kharismatis, tradisional dan legal formal, maka tipe kepemimpinan di PKS pada umumnya terbagi dua yakni pemimpin legal formal yang terpilih menjadi pejabat publik melalui Pemilu atau Pemilukada seperti di Depok, Jawa Barat dan Sumatra Barat namun tidak terkategori sebagai pemimpin kharismati. Di sisi lain ada pula tokoh-tokoh PKS yang terkategori sebagai pemimpin tradisional dan kharismatis dengan menjadi ulama atau pemimpin Pesantren namun tidak secara otomatis meningkatkan elektabilitas PKS karena tidak menjadi menjadi calon anggota DPR RI atau calon Walikota misalnya.¹⁰⁷

Hilmi Aminuddin, pendiri PKS merupakan sosok yang disegani sebagai pendiri Gerakan Tarbiyah hingga kemudian menjadi PK dan PKS, namun menempatkan diri sebagai Pembina dan “King maker” dan bukan sebagai tokoh publik sehingga tidak dikenal luas di masyarakat. Bila ditanyakan kepada para kader PKS siapa pemimpin PKS sesungguhnya yang dipanggil Ustadz, “Engkong” dan disebut oleh majalah *Globe Asia* sebagai “the soul of PKS”, maka jawabannya adalah Hilmi Aminuddin. Hilmi pernah dipenjara selama dua tahun oleh rezim Orde Baru sebagai tahanan politik, namun kemudian membina dan memimpin para mahasiswa dan pemuda yang kemudian bangkit mencetuskan Orde Reformasi. PKS memiliki tokoh kharismatis seperti Hilmi Aminuddin di internal yang menjadi faktor perekat dan pemersatu, namun tidak memiliki tokoh kharismatis yang dapat dianggap identik dengan PKS dan dapat menjadi daya tarik bagi PKS untuk dipilih dan menang di Pemilu.

¹⁰⁴ SP. Varma. *Teori Politik Modern*. PT RajaGrafindo. Jakarta, 1995. h: 202.

¹⁰⁵ *Ibid.*, h: 204

¹⁰⁶ *Ibid.*

¹⁰⁷ Ratmond Aron. *Main Currents in Sociological Thought. Volume II Durkheim, Pareto, Weber*. Anchor Books Doubleday and Company, New York. 1970. h: 286

Persoalan itu pun muncul ketika di era Reformasi, gerakan Tarbiyah akan membentuk partai politik dan ketua KAMMI Fahri Hamzah bersama Anis Matta dan Hidayat Nur Wahid sebagai tokoh-tokoh muda Gerakan *Tarbiyah* sempat meminta Amien Rais memimpin partai politik Islam yang akan mereka bentuk namun Amien Rais menolak karena menginginkan wadah yang lebih besar yakni partai nasionalis dan kemudian mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Melihat kegalauan kader-kadernya menghadapi penolakan Amien Rais, Hilmi menyemangati dan mengatakan, “Kalian harus berani tampil dan tetap berjalan walau tidak ada satupun tokoh nasional yang kita miliki.”¹⁰⁸

Dalam perjalanan selanjutnya, PKS dalam wacana maupun praktek nampak masih lebih mengutamakan kepemimpinan kolektif dan bukan hanya menumbuhkan figur sentral secara nasional. Setiap kader PKS diarahkan untuk siap menjadi pemimpin baik secara formal di ranah politik maupun sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat sebagaimana Pareto dan Mosca membagi kelompok Elit atas elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*).¹⁰⁹ Namun nampaknya kebijakan tersebut tidak mengena untuk masyarakat Indonesia yang sulit untuk mengasosiasikan PKS dengan sosok pemimpin tertentu yang dikenal luas sehingga belum berpengaruh positif pada perolehan suara PKS di tiga Pemilu (1999, 2004 dan 2009)

Bila tiga orang Presiden PK dan PKS selama 1998-2004 dievaluasi tipe kepemimpinannya, maka Nur Mahmudi Ismail (1998-2000) merupakan pemimpin yang paling tidak kharismatik dan paling lemah komunikasi publiknya menurut salah seorang tokoh pendiri PKS dibandingkan Hidayat Nur Wahid dan Tifatul Sembiring. Sementara Hidayat Nur Wahid dinilai lebih kharismatik dibandingkan dengan Nur Mahmudi Ismail dan juga pelanjutnya Tifatul Sembiring, namun cara berpikir Hidayat Nurwahid dianggap terlalu ilmiah yang sulit untuk diterapkan dalam komunikasi publiknya karena masyarakat dianggap murid sementara dia sebagai dosennya. Hidayat Nurwahid juga dianggap sulit menerima masukan orang lain karena sudah memiliki *frame* berpikir sendiri dan kemampuan manajemen organisasinya juga lemah. Tifatul Sembiring dinilai tidak karismatik oleh tokoh pendiri PKS dan latar belakang pendidikannya yang eksakta menjadikannya kurang luwes dan fleksibel. Masalah kesukuan dinilainya juga berpengaruh pada kurang luwesnya Tifatul Sembiring dalam berkomunikasi sehingga kurang mengena di publik. Bahkan Tifatul dianggap sering melakukan komunikasi publik yang kontroversial. Selain itu Tifatul Sembiring dinilai senang berpikir yang detil namun kurang strategis serta tidak delegatif.

¹⁰⁸ Penulis diwawancarai oleh wartawati RRI, Yolanda di MD Building Jakarta, Oktober 2009.

¹⁰⁹ Pareto dan Mosca dalam SP. Varma. *Op. Cit.*

Bila partai-partai politik lain baik partai Islam, berbasis massa Islam, nasionalis semuanya dengan bangga menonjolkan faktor pemimpinnya atau ketua umumnya, maka PKS dengan bangga menyebut dirinya sebagai *cadre based party* bahwa kaderlah yang dianggap faktor paling penting dalam kemenangan Pemilu. Sementara dalam kenyataannya perolehan suara PKS yang hanya sedikit meningkat persentasenya di Pemilu 2009 lebih disebabkan karena tidak ada tokoh PKS yang menonjol dan dikenal luas oleh masyarakat. Padahal lonjakan perolehan suara PKS di Pemilu 2004 dibanding 1999 salah satunya disebabkan faktor ketertarikan masyarakat pada tokoh Hidayat Nurwahid. Sehingga bila memang saat ini yang ditekankan adalah penokohan kader di setiap wilayah tetap diperlukan penokohan di tingkat nasional misalnya terkait dengan pengajuan capres dari PKS.¹¹⁰

Di tahun 2000-2004 sebenarnya PKS sudah cukup berhasil melakukan penokohan terhadap sosok Hidayat Nurwahid, namun kemudian berkurang frekuensi penampilannya sebagai narasumber rujukan di tingkat nasional seiring dengan menurunnya peran Ketua MPR-RI setelah amandemen UUD '45. Persiapan para kader PKS untuk menempati jabatan-jabatan publik masih kurang karena ada kultur yang menghambat proses penyiapan pemimpin yakni kurangnya budaya *open minded* dan saling mengapresiasi. PKS dianggap belum cukup serius memunculkan kepemimpinan sebagai salah satu faktor yang signifikan untuk memenangkan pemilu, misalnya dengan tidak memunculkan figur sentral dalam konteks nasional.

Kebijakan PKS yang menekankan *collective leadership* di satu sisi menguntungkan secara internal PKS karena setiap kader punya kesempatan menjadi pemimpin, namun kelemahannya adalah di eksternal yakni tidak ada tokoh PKS yang sangat dikenal di tingkat nasional. Ambiguitas juga terjadi karena kader PKS sudah merasa memiliki figur sentral di dalam yakni Hilmi Aminuddin yang dengan sadar memilih tidak mau menjadi pejabat publik. Hal itu sebenarnya bisa diatasi jika tetap dilakukan penajaman fokus dalam penokohan kader PKS yang bisa dijual ke publik. Kepemimpinan seharusnya merupakan faktor penting kemenangan Pemilu sebuah partai politik, namun faktor ini kurang dioptimalkan oleh PKS sehingga tidak signifikan perannya dalam kemenangan PKS. Walaupun PKS selalu membanggakan diri sebagai partai yang tidak mengandalkan figuritas pemimpin dan mengandalkan soliditas struktur dan sistem kaderisasinya, tak bisa dipungkiri PKS berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih paternalistik sehingga alasan memilih sebuah partai masih didasari kekaguman pada sosok pemimpin partai tersebut.

¹¹⁰ Wawancara dengan Navis Murbiyanto. Sekretaris Bidang Kaderisasi 1998-sekarang. Jakarta, Sabtu 25 Desember 2010. Pukul: 11.00 WIB.

Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid meskipun bukan satu-satunya faktor, PKS berhasil melipatgandakan suaranya pada Pemilu 2004 sebesar 600% dari perolehan suara 1,4% suara nasional di pemilu 1999 menjadi meraih 7,34% pada pemilu 2004. Untuk sebuah partai yang baru dideklarasikan pada tahun 2003, menurut Saiful Mujani perolehan tersebut merupakan prestasi yang mengesankan. PKS bahkan mampu mengalahkan PAN, partai yang lebih awal berdiri dan dipimpin oleh tokoh nasional sekelas Amien Rais. Lompatan suara PKS itulah yang akhirnya mengantarkan Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam pemilihan yang berlangsung demokratis di dalam Sidang Paripurna V MPR tanggal 6 Oktober 2004. Setelah memimpin MPR, nama Hidayat Nur Wahid semakin dikenal luas sebagai tokoh yang sederhana dan anti KKN. Menurut Azyumardi Azra fenomena kemunculan Hidayat Nur Wahid dan kiprah PKS tersebut merupakan proses *mainstreaming of Islamic politics*, pengarusutamaan politik Islam.¹¹¹

Setelah Hidayat Nur Wahid menjadi Ketua MPR RI, maka Tifatul Sembiring menggantikannya sebagai presiden PKS, namun pada saat itu masih banyak yang menjawab Hidayat Nur Wahid bila ditanya siapa Presiden PKS dan bukan Tifatul Sembiring. Demikian pula tokoh muda PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah yang sangat cerdas namun juga sangat lugas dalam berbicara belum dapat diterima oleh rakyat karena gaya mereka yang masing-masing berasal dari Sumatra, Makasar dan NTB jelas berbeda dengan gaya politikus Jawa seperti Hidayat Nur Wahid yang dikenal santun dalam berbicara.

Pentingnya faktor pemimpin untuk memenangkan sebuah partai politik di Pemilu juga berlaku bagi Golkar dan PDIP, misalnya ketokohan Jusuf Kalla (JK) tak mampu meningkatkan elektabilitas Golkar karena hanya menjadi bayang-bayang Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) di pemerintahan 2004-2009. Begitu pula halnya dengan PDIP, ternyata pembenahan manajemen internal PDIP yang dilakukan Pramono Anung tidak mampu membuat suara PDIP bertahan karena faktor menurunnya pamor Megawati yang membuat suara PDIP ikut menurun. Hal itu juga dialami PAN dengan Sutrisno Bahir yang menggantikan Amien Rais, PPP dengan Surya Dharma Ali menggantikan Hamzah Haz dan PBB dengan MS. Ka'ban menggantikan sosok Yusril Ihza Mahendra. Ketiga partai politik tersebut mengalami penurunan perolehan suara yang cukup besar, bahkan PBB di Pemilu 2004 tidak lolos ET dan di Pemilu 2009 tidak lolos PT sehingga tidak berhasil menempatkan

¹¹¹<http://www.dakwatuna.com/2011/03/11469/skeTifatulSembiringa-biografi-hidayat-nur-wahid/#ixzz1oQPEAlFY>
23/3/2011 | 19 Rabbi al-Thanni 1432 H | Hits: 7.512. Oleh: sigit kamseno.

wakilnya di Parlemen Pusat. Demikian pula PKB yang menurun drastis elektabilitasnya karena hilangnya sosok Gus Dur akibat konflik elit yang terjadi. Sebaliknya fenomena Partai Demokrat memperlihatkan hal yang bertolak belakang. Partai yang dijuluki oleh Yudi Latif dari Reform Institute sebagai “bubble party” atau oleh media Tempo sebagai *SBY fans club party* sangat lemah dalam hal soliditas struktur dan sistem kaderisasinya, namun mampu meningkatkan suaranya menjadi 3 kali lipat dan menjadi pemenang pemilu 2009 dibanding 2004 karena daya tarik sosok SBY. Dari semua fenomena di atas, jelas faktor tokoh di Indonesia masih menjadi alasan kuat sebuah partai untuk dipilih oleh rakyat dan menjadi pemenang dalam Pemilu.

Di Banjarnegara pada tahun 2009 terjadi penurunan perolehan suara PKS menurut Yudi Widiana, Ketua Wilayah Dakwah (Wilda) Banten-DKI Jakarta- Jawa Barat (Banjarnegara) selain karena sosok SBY yang belum bisa diimbangi popularitasnya juga karena Kepala-kepala Daerah dari PKS di daerah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat belum bisa memanfaatkan kepemimpinannya untuk meningkatkan elektabilitas PKS karena belum menunjukkan performa terbaiknya, padahal menurut Yudi untuk menang dibutuhkan sedikitnya tiga hal yakni tokoh, penguasaan birokrasi dan penguasaan isu.¹¹² Najamudin, Ketua Wilda Sulawesi juga mengakui bahwa PKS masih lemah dari segi ketokohan, karena misalnya anggota legislatif dari Pusat yang dicalonkan untuk wilayah Sulawesi dan bukan putra daerah agak sulit karena ketokohnya kurang dikenal dan rekam jejak atau kiprahnya juga belum diketahui oleh masyarakat Sulawesi. Kelemahan lainnya adalah para kader PKS di daerah Sulawesi masih dianggap anak oleh para politisi senior dari partai Golkar misalnya.¹¹³

Nursanita Nasution¹¹⁴, Ketua Bidang Kewanitaan (2000-2005) melihat keberhasilan PKS di Pemilu 2004 selain karena PKS saat itu masih merupakan partai baru yang menjadi harapan rakyat setelah partai-partai lama mengecewakan mereka, juga karena Presiden PKS Hidayat Nur Wahid sebagai tokoh baru hampir selalu diliput oleh media dan dimintai pendapatnya tentang berbagai isu nasional. Salah satu penyebab bahwa Hidayat Nur Wahid lebih populer adalah juga karena kultur politik Indonesia masih diwarnai dengan kultur politik Jawa sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan masyarakat terhadap pemimpin yang memiliki gaya politik Jawa. Ditambah pula ketokohan lokal yang terbangun sangat

¹¹² Yudi Widiana. *Op. Cit.*

¹¹³ Wawancara dengan Najamudin, Ketua Wilda Sulawesi. Jakarta, Senin 18 Maret 2012.

¹¹⁴ Wawancara dengan DR. Nursanita Nasution. staf Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Ketua Bidang Kewanitaan DPP 2000-2005, Anggota legislatif PKS 2004-2009. Wawancara hari Selasa 27 Maret 2012

baik karena di tingkat DPRD Provinsi dan Kota/Kabupaten para anggota legislatifnya adalah para kader senior yang membangun dakwah di daerah-daerah tersebut sehingga ketokohnya sudah berakar di daerahnya masing-masing.

Ada lagi faktor kepemimpinan selain faktor para pejabat publik PKS baik di organisasi PKS, di lembaga eksekutif maupun lembaga legislatif yakni kepemimpinan perempuan di PKS. Menurut Nursanita pada saat ia memimpin bidang kewanitaan dari 2000-2005, Hidayat Nur Wahid mendorong perempuan untuk melakukan komunikasi publik dengan salah satunya selalu menerima tawaran berbicara di TV tentang isu apa saja. Ketokohan perempuan baik di Majelis Syuro, pengurus di struktur dan juga menjadi pejabat publik akan menghapus tuduhan bahwa PKS adalah Taliban atau fundamentalis berbaju politisi. Almarhumah Yoyoh Yusroh ketika menjadi Ketua kewanitaan Partai Keadilan (1998-2000) sudah mendorong agar perempuan mengejar ketertinggalannya dari kader laki-laki PKS baik ditingkat lokal maupun nasional dengan cara membangun jaringan ke masyarakat akar rumput melalui kegiatan Ta'lim pengajian, Posyandu dan Arisan karena perempuan pada dasarnya memiliki kemampuan personal untuk membangun hubungan emosional dengan konstituen perempuan dan juga aktif melakukan komunikasi publik dan menjalin hubungan eksternal. Program tersebut dilanjutkan di masa Nursanita (2000-2005) dan Ledia Hanifah (2005-2010) sehingga penokohan kader perempuan menimbulkan simpati pemilih perempuan yang akhirnya meningkatkan elaktibilitas PKS meningkat.¹¹⁵

Di Pemilu 1999 Partai Keadilan (PK) memang tidak memiliki tokoh karena Hilmi Aminuddin pendiri gerakan Tarbiyah yang melahirkan PK memilih berada di belakang layar, sehingga yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh muda seperti Hidayat Nurwahid (38 tahun) sebagai ketua MPP, Nur Mahmudi Ismail (38 tahun) sebagai Presiden PK dan Anis Matta (30 tahun) sebagai Sekjen PK. Tidak ada satupun dari ketiga tokoh PK tersebut yang sudah dikenal publik, apalagi secara nasional, termasuk Presidennya Nur Mahmudi Ismail sehingga kesan yang malah muncul dan identik dengan PK saat itu adalah partainya anak-anak muda terpelajar. Di periode 1998-2000, di masa kepemimpinan presiden PK Nur Mahmudi Ismail yang memberi pengaruh positif kepada perolehan suara PK pada pemilu 1999 adalah justru ketokohan lokal para kader yang menjadi juru dakwah di daerahnya masing-masing. Demikian pula dengan ketokohan kader perempuan yang sejak awal berada di garda terdepan PK dalam berinteraksi dan merebut hati masyarakat melalui layanan-layanan sosial seperti baksos, khitanan missal, layanan kesehatan gratis dan menjadi

¹¹⁵ *Ibid.*

pengurus posyandu. Oleh karena itu aspek kepemimpinan di tingkat nasional boleh dibilang sangat kecil pengaruhnya bagi pemenangan PK kecuali ketokohan lokal, perempuan atau ketokohan di kampus yang menjadi daya tarik bagi orang yang memilih PK.

Sementara di Pemilu 2004, Hidayat Nurwahid memang dengan sengaja diusung oleh DPP PKS untuk ditokohkan.¹¹⁶ Setiap ada kesempatan untuk tampil di media karena diundang maka akan dipergunakan dengan sebaik-baiknya dan di kantor DPP PKS di Mampang, Jakarta Selatan seringkali disinggahi mobil-mobil stasiun televisi. Selain itu Humas DPP pun aktif pula mengirimkan *pers release* ke berbagai media cetak mengenai sikap resmi PKS menyikapi berbagai permasalahan nasional sehingga popularitas PKS dan Presiden PKS Hidayat Nurwahid meningkat. Bila disimpulkan di periode kepemimpinan Hidayat Nur Wahid (2000-2005), ada tiga faktor yang berpengaruh dalam peningkatan perolehan suara PKS pada tahun 2004, dari 1,4% menjadi 7,3% yakni faktor ketokohan lokal para kader di daerah, ketokohan perempuan dan ditambah dengan ketokohan nasional Hidayat Nur Wahid. Jika perolehan suara PK di Pemilu 1999 ddipengaruhi oleh ketokohan lokal para kader yang menjadi juru dakwah dan ketokohan kader perempuannya, maka di periode Hidayat Nur Wahid perolehan suara menjadi lebih masif karena kedua faktor tersebut diperkuat dengan faktor ketokohan nasional Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. Kesemua aspek kepemimpinan tersebut memiliki pengaruh pada lonjakan keberhasilan PKS di Pemilu 2004 yang memperoleh 7,2% dari sebelumnya 1,3% di Pemilu 1999 atau dari 7 kursi menjadi 45 kursi di parlemen pusat.¹¹⁷

Sedangkan di Pemilu 2009, aspek kepemimpinan malah menurun pengaruh positifnya bagi pemenangan Pemilu PKS. Kemunculan Tifatul Sembiring di berbagai media sebenarnya cukup memadai seiring dengan peningkatan kemampuan pendanaan partai, namun gaya komunikasinya dinilai sering kontroversial seperti misalnya pernyataannya tentang Presiden RI harus Balita (Bawah Lima Puluh Tahun) dianggap menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati. Akibatnya kader yang bergerak di masyarakat secara langsung yang harus sibuk memberikan penjelasan-penjelasan dan menurut mereka malah menimbulkan pengaruh negatif bagi pemenangan Pemilu PKS. Bahkan para kader PKS yang terpilih menjadi Kepala Daerah sejak 2005, 2006 dan 2008 seperti di Depok, kabupaten Bekasi, Kabupaten Halmahera Selatan, Wakil Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Barat juga tidak memberi pengaruh yang berarti pada pemenangan Pemilu 2009 karena umumnya kurang siap dan kurang berani mengambil

¹¹⁶ Wawancara dengan Anis Matta. *Op. Cit.*

¹¹⁷ Wawancara dengan Navis Murbianto. *Op. Cit.*

langkah-langkah dan belum menunjukkan performa yang baik dalam kinerjanya. Sedangkan ketokohan lokal dan faktor ketokohan perempuan kembali memberi pengaruh positif pada perolehan suara PKS di Pemilu 2009 namun tidak cukup karena perolehan suara PKS di 2009 relatif stagnan yakni 7,88% dan jauh dari target yang dicanangkan DPP PKS sebesar 20%.¹¹⁸

III.6. Kurangnya Optimalisasi Strategi pada Pemenangan Pemilu PKS.

Faktor strategi merupakan faktor yang tak kalah pentingnya bagi partai politik untuk menuju pemerintahan. Demikian pula bagi PKS, walaupun ideologi dan sistem rekrutmen anggota berjalan baik dan berpengaruh signifikan bagi pemenangan PKS, namun bila faktor strategi tidak dimanfaatkan secara baik, maka akan sulit bagi PKS untuk memenangkan Pemilu. Pendefinisian strategi oleh Scruton sebagai penggalian dan pemanfaatan secara optimal kekuatan-kekuatan potensial sejalan dengan arahan Hilmi Aminuddin bahwa garis-garis besar strategi perjuangan politik PKS adalah menekankan pada strategi perencanaan dan penghimpunan serta pemanfaatan potensi.¹¹⁹

Penghimpunan dan pemanfaatan potensi nampak dalam strategi pemenangan Pemilu PKS yang utama yakni *permanent campaign* dalam bentuk *vernacular politics* berupa kerjasama jejaring masyarakat dengan partai politik dan lembaga-lembaga *civil society* serta pemerintah lokal dalam sebuah gerakan sosial politik.¹²⁰ PKS menurut Wiryaningsih, Ketua Ormas Salimah periode 2005-2010 menjalin komunikasi dengan pemilihnya secara terus menerus dan tidak hanya menjelang pemilu saja serta menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat dengan kerja-kerja sosialnya. Menurutnya pula kader PKS bila hendak menyampaikan pesan-pesan politiknya, telah lebih dulu membangun hubungan yang bersifat personal dan menyampaikan pesan-pesan ideologis dengan bahasa nilai dan kepentingan lokal yang mudah dicerna.¹²¹

Salah satu ciri *permanent campaign* lainnya adalah strategi *direct selling door to door* dan juga kunjungan ke tokoh-tokoh masyarakat sudah mulai dilakukan sejak menjelang Pemilu 1999, walaupun masih terbatas membagikan 1 brosur tentang jati diri PK dan

¹¹⁸ Wawancara dengan Tusy Wardani. *Op. Cit.*

¹¹⁹ Hilmi Aminuddin. *Menyusun Langkah-langkah Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS*. Jakarta, 2008. h: 7-32.

¹²⁰ Jenny B. White. *Islamist Mobilization in Turkey, A Study in Vernacular Politics*. University Washington Press. Amerika, 2002. *Vernacular politics yang diutarakan Jenny White memiliki kesamaan dengan ordinary politics yang berlangsung di Mesir sebagaimana dijelaskan Asef Bayat dalam Life as Politics: How Ordinary people Change the Middle East*. Stanford University, California. 2010. h: 241-248.

¹²¹ Wawancara dengan Wiryaningsih. Depok, 1 April 2012.

menawarkan visi, misi sekaligus memperkenalkan tokoh Capres Didin Hafidhudin. Selain itu juga para kader giat melakukan kerja sosial, pelayanan kesehatan gratis, baksos, khitanan missal, pertolongan pada korban banjir dan bencana. Keterbatasan dana juga membuat hampir semua kegiatan kampanye diselenggarakan dengan pembiayaan dari kader termasuk pengumpulan biaya menyewa bus ke tempat kampanye akbar PK yang dihadiri terutama oleh mahasiswa-mahasiswa dan pelajar-pelajar hasil rekrutmen Tarbiyah sehingga sempat dijuluki sebagai partainya anak muda. Dengan bersemangat *ikhwan* dan *akhwat* (sebutan untuk kader laki-laki dan perempuan PK) mengikuti kampanye dengan naik bus terbuka, mengenakan ikat kepala berlambang PK yang mereka jahit sendiri. Pengorbanan kader luar biasa dengan membuat *merchandise* atau *souvenir* partai, bendera, ikat kepala dan simbol-simbol lainnya.

Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS juga menyatakan bahwa strategi *permanent campaign* melalui politik lokal yang erat kaitannya dengan strategi teritorial berbasis kelurahan atau bahkan TPS, sudah mulai digunakan oleh PKS dengan turun langsung ke masyarakat secara terus menerus misalnya melalui *direct selling* oleh para kader. Menurut Untung, PKS juga telah bekerja sama dengan berbagai ormas Islam, tokoh-tokoh masyarakat, LSM-LSM seperti Salimah dan lembaga-lembaga sosial seperti Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU), Aksi Cepat Tanggap (ACT) serta dengan para kadernya yang menjadi anggota Dewan dan pejabat eksekutif, namun menurutnya belum optimal pengaruhnya bagi kemenangan PKS di Pemilu terutama di Pemilu 1999 dan 2009. Hal itu menurut Untung antara lain disebabkan karena jumlah masyarakat di Indonesia yang perlu dibantu masih sangat banyak sementara kemampuan finansial para kader dan struktur PKS masih terbatas sehingga sebagian masih menjadi sekedar penyalur bantuan yang terkadang mengandung resiko. Dalam kasus beras gratis misalnya yang disalurkan dari Badan Pangan Dunia atau FAO (*Food and Agricultural Organization*) oleh LSM Yasmina pimpinan Iim Nurrochimah sejak tahun 1999 untuk 40.000 keluarga, ternyata pada 2004, bantuan tersebut dihentikan oleh FAO, maka terpaksa berhenti pula Yasmina menyalurkan. Akibatnya kesan yang muncul, karena mereka tahu para pengurus Yasmina merupakan kader-kader PKS, adalah: "PKS udah menang *aja* tidak *ngasih* beras lagi".¹²²

Abu Syauqi, sebagai wakil dari struktur partai yakni Ketua Bidang Kelembagaan Sosial DPP PKS menyebutkan bahwa kerja-kerja sosial dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan akses informasi ke APBD, pemanfaatan jaringan serta mensinergikannya dengan kinerja parpol dan pemerintah lokal. Selain itu Syauqi juga menegaskan bahwa kerja-

¹²² Untung Wahono. *Op. Cit.*

kerja sosial sangat besar pengaruhnya untuk meningkatkan elektabilitas PKS, namun memang tidak mudah untuk selalu mengkomunikasikan atau mengasosiasikan kerja-kerja layanan sosial tersebut dengan PKS.¹²³ Sementara kader PKS lainnya yang berada di LSM sosial yakni Suryama salah seorang pendiri Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) berpendapat bahwa sinergi segitiga antara *local government* (pemerintah kota atau kabupaten) dengan partai politik dan LSM-LSM yang merupakan ciri strategi *vernacular politics* belum diterapkan dengan baik oleh PKS karena terkendala berbagai hal, di antaranya keterbatasan logistik yang dimiliki sementara jumlah rakyat yang membutuhkan bantuan jauh lebih banyak. Oleh karena itu irisan kerja sama antara LSM dan partai politik menguntungkan karena partai politik menyuplai SDM berkualitas untuk menjadi pegiat sosial atau bahkan menyuplai juga *stakeholder* berupa para donatur dari kader dan simpatisan partai. Sebaliknya manuver LSM akan sangat membantu partai politik karena banyak arena yang tidak bisa disentuh dengan partai namun bisa melalui lembaga *charity* yang dianggap cukup independen.¹²⁴

Hidayat Nur Wahid, Presiden PK dan PKS 2000-2004 juga meyakini pentingnya strategi *vernacular politic* yang mensinergikan partai politik, pemerintah lokal dan LSM-LSM, namun di PKS menurutnya memang baru mulai dirintis:

“Secara prinsip pada 2004 PKS sudah diperhitungkan. Usulan-usulan PKS juga sudah mulai didengar. Makanya beragam program pun sudah bisa diadvokasi. Tapi sekali lagi konteksnya adalah harus untuk melayani masyarakat ketika berbicara mengenai APBD atau regulasi dari bupati atau gubernur. Saya pikir hal ini dilakukan oleh seluruh partai, bahkan negara pun melakukan hal yang sama berdasarkan undang-undang dan dilakukan dengan cara yang amanah serta tidak terjadi penyimpangan karena APBD atau APBN untuk mensejahterakan rakyat sehingga dengan adanya organisasi-organisasi ini bisa memastikan bahwa dana akan sampai dengan amanah dan terselenggara dengan maksimal serta ada kontrol”.¹²⁵

Strategi tersebut pada periode awal 1999 hingga 2004 belum bisa diterapkan oleh PKS sebagai partai baru sehingga belum berpengaruh pada kemenangan Pemilu 1999 dan 2004 karena baru mulai diwacanakan sejak 2005 ketika Nur Mahmudi Ismail, Presiden Partai Keadilan pertama menjadi Walikota Depok untuk pertama kalinya. Kemudian berturut-turut Muhammad Kasuba menjadi Bupati Halmahera Selatan pada 2005, Sa’dudin menjadi Bupati

¹²³ Abu Syauqi mantan ketua LSM sosial: Rumah Zakat dan kini Ketua Kelembagaan Sosial DPP PKS. Wawancara dilakukan di Jakarta, 4 Januari 2011, pukul 19.00 WIB.

¹²⁴ Wawancara dengan Suryama, Pembina LSM Sosial, Jakarta hari Jum’at, 31 Desember 2010. Pkl 15.30-17.30.

¹²⁵ Hidayat Nur Wahid. *Op. Cit.*

Bekasi pada 2007, Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat pada 2008, Gatot menjadi wakil Gubernur Sumatra Utara pada 2008 dan Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumatra Barat pada 2010.

Namun ternyata di Pemilu 2009 pun, strategi tersebut belum berjalan dengan baik karena misalnya pengurus PKS di daerah seperti Depok belum memiliki hubungan relasi yang setara. Walikota menganggap dirinya lebih setara dengan pengurus DPP, struktur DPD malah di bawah kendali walikota. Akibatnya strategi tersebut belum menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan Pemilu PKS yang terbukti dengan menurunnya perolehan suara PKS di Pemilu 2009 dibanding Pemilu 2004 misalnya perolehan kursi di tingkat Provinsi dan Kota Depok di Pemilu 2004 ada satu orang kadernya menjadi anggota legislatif Provinsi dan 13 anggota legislatif Kota maka di Pemilu 2009 tetap 1 kursi Provinsi dan kursi Kota menurun menjadi 11. Nampak masih ada keengganan dan kegamangan beberapa kader yang menjadi kepala daerah untuk memberikan akses pada para kadernya. Demikian pula dengan para kader PKS yang ada di LSM sosial, yang karena berusaha mengedepankan independensinya juga menjadi kurang memberikan alokasi bantuan kepada para kader dan simpatisan PKS.

Selanjutnya terkait dengan strategi pendanaan ada kaitannya dengan strategi yang pertama di atas. Ciri strategi *vernacular* adalah memang kerjasama antara kader yang ada di *local government* dengan para kader yang ada di LSM dan di struktur partai. Partai memberikan informasi tentang *database* kader dan basis massa kemudian LSM-LSM mengalokasikan bantuan dengan prioritas berdasarkan *database* dari partai dan pemerintah daerah memberikan informasi tentang proyek-proyek dan meminta agar para kader pengusaha mengikuti proses *tender* namun akan lebih diutamakan untuk mendapatkan proyek tersebut dengan asumsi keuntungan tersebut akan digunakan untuk menggerakkan roda organisasi partai. di PKS strategi tersebut masih jauh dari optimal dalam aplikasinya karena masih sedikitnya kader yang menjadi pengusaha atau sedikitnya pengusaha yang berafiliasi ke PKS.

Oleh karena itu jalan yang terbaik adalah membangun tradisi *entrepreneurship* atau kewirausahaan para kader. Dalam Undang-undang No 2/2008 lalu diubah menjadi UU Pemilu No 2/2011 pendanaan partai-partai politik di Indonesia didapatkan dari bantuan pemerintah, sumbangan wajib para kader maupun sumbangan sukarela para simpatisan sementara khusus ketentuan dana kampanye diatur dalam UU Pemilu No.10/2008. Di samping mendapatkan dana pembinaan partai dari pemerintah berdasarkan jumlah suara yang diperoleh melalui Pemilu, PKS juga mendapatkan dana dari donasi para anggota dan

relawannya serta para pengusaha tetapi harus mengikuti peraturan undang-undang. Ada sejumlah aturan dalam pengelolaan keuangan partai yang mengakibatkan PKS tidak bisa sedemikian leluasa untuk menggalang dana. Selain itu juga prosentase yang lebih besar diperoleh dari para kader yang menjadi pengusaha dan pejabat publik. Berhubung partai politik tidak boleh membuat badan usaha maka dukungan finansial bagi partai diperoleh dari para kadernya yang menjadi pengusaha atau dari pengusaha non kader yang bersifat tidak mengikat dan lembaga-lembaga sosial yang dikelola para kader.

Menurut Igo Ilham, anggota DPRD DKI (2004-2009, 2010-2014) sebagian besar kader PKS adalah generasi muda yang berasal dari kalangan menengah bawah sehingga sulit untuk mengandalkan mereka dalam pendanaan berbagai kegiatan partai.¹²⁶ Di PKS saat ini mulai cukup banyak kader yang menjadi pengusaha kecil dan menengah seperti di bidang percetakan, penerbitan, industri busana, travel biro dan lain-lain yang sebenarnya dapat menjadi sebuah kekuatan atau basis ekonomi bagi PKS seandainya bersatu dalam sebuah asosiasi sehingga para kader pengusaha tersebut bisa menjadi operator-operator langsung dari proyek-proyek asalkan memenuhi prosedur yang ada.

Strategi berikutnya yang digunakan PKS adalah berusaha meyakinkan kubu nasionalis yang direpresentasikan oleh partai-partai politik nasionalis dan juga birokrasi serta militer bahwa PKS tidak memiliki "hidden agenda". Kedekatan PKS dengan kubu nasionalis dan militer diawali oleh ketua Majelis Syuro dengan sering bertemu dengan para jenderal dan pensiunan jenderal baik TNI maupun Polri untuk meyakinkan militer bahwa PKS menerima UUD '45 dan Pancasila serta tidak berbahaya bagi NKR. Juga meyakinkan mereka bahwa cita-cita PKS sesungguhnya adalah memperjuangkan kesejahteraan bagi rakyat. Nursanita menganggap ketokohan perempuan dengan segala perannya di ranah publik juga sangat penting untuk memberikan keyakinan bahwa PKS bukan Taliban yang mengekang perempuan dan sekaligus menghapus citra fundamentalis berbaju politisi yang memiliki agenda terselubung (*hidden agenda*) untuk mendirikan negara Islam jika kelak berkuasa.

Oleh karena juga menyadari bahwa boleh jadi PKS, di kawasan regional dan internasional, sebagaimana partai politik berhaluan Islam di berbagai negara yang berasal dari kelompok-kelompok Islamis dianggap pula sebagai ancaman, maka PKS juga melaksanakan strategi diplomasi di kawasan regional dan internasional. Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (BHLN), Budiyanto menyatakan bahwa PKS melalui BHLN melaksanakan hubungan dan diplomasi internasional antara PKS dengan berbagai pihak yang diharapkan berdampak

¹²⁶ Acara tanya-jawab pembekalan para observer ke Turki, MD Building, Selasa 7 Juli 2011.

positif kepada partai (*fruitful diplomacy*). Hal tersebut menyebabkan PKS memiliki hubungan dengan berbagai partai di berbagai negara yakni terutama di Asia Tenggara, kemudian di Timur Tengah, Australia maupun China melalui perwakilannya di berbagai PIP (Pusat Informasi dan Pelayanan) PKS di berbagai negara. Hubungan PKS yang sangat baik dengan AKP di Turki menggagas kerja sama yang lebih baik dan setelah melibatkan kerja sama antara dua negara maka memperoleh hasil berupa dihapuskannya persyaratan visa antara kedua negara bila akan saling mengunjungi negara masing-masing.

Strategi berikutnya adalah strategi dalam pemilihan isu utama. PK di Pemilu 1999 belum berhasil meraih banyak suara selain merupakan partai baru juga karena tidak membawa tema atau isu baru yang bisa mengesankan masyarakat, namun isu pemberantasan korupsi dan kepedulian pada rakyat yang diangkat PKS melalui jargon Bersih dan Peduli berhasil meningkatkan suara PKS lebih dari 600%. Sayangnya di Pemilu 2009 tema berupa tambahan kata profesional di belakang bersih dan peduli menjadi tidak menguntungkan bagi PKS karena beberapa Kepala daerah yang berasal dari kader PKS atau diusung oleh PKS masih jauh dari citra tersebut. Bahkan dalam kasus kota Depok, karakteristik PKS yang Pos-Islamis sejak 2008 dengan pergeseran dari menitikberatkan moralitas pemimpin dan bukan pemimpin yang bicara moralitas tidak diterapkan dengan baik sehingga Walikotanya malah sibuk menyampaikan pesan moral seperti nampak dalam banyak *billboard* atau baliho berisikan foto walikota yang menganjurkan makan dengan tangan kanan, sehingga menimbulkan kritik keras: "Jangan bicara etika moral makan dengan tangan kanan, kalau rakyat belum tahu apa yang mau dimakan".

Demikian pula dalam hal strategi menjual keberhasilan belum digunakan secara baik sehingga tidak mempengaruhi secara positif perolehan suara PKS di Pemilu 2009. Sekali lagi dengan contoh studi kasus kota Depok yang dipimpin oleh kader PKS sebagai Walikota belum bisa membuat skala prioritas yang benar dalam program-programnya karena mengedepankan program slogan yang tidak membumi yakni *cyber city* padahal persoalan pengelolaan sampah dan kemacetan di kota Depok belum selesai sampai saat ini. Akibatnya terkesan tidak fokus dalam penyelesaian masalah di kota Depok dan belum menunjukkan keberhasilannya yang bisa dijual ke masyarakat.

Di samping itu menurut Nursanita Nasution terkait dengan sistem rekrutmen pejabat publik, jenjang keanggotaan masih lebih diutamakan dibanding kapasitas sebagai politisi atau negarawan. Masyarakat yang semula berharap banyak dari partai intelektual seperti PKS yang 80% dari kadernya adalah minimal lulusan S1 ternyata menurut mereka lebih banyak kyai atau ahli agama yang masuk ke peta politik. Menurut Nursanita seharusnya mereka

ditraining selama 3 bulan sebelum masa kampanye dimulai untuk mendapatkan bekal yang cukup soal sistem ketatanegaraan dan APBD serta peta politik lokal maupun nasional sehingga di awal-awal pemerintahannya masih sibuk belajar memimpin daerah tersebut. Hal itu dinyatakan oleh Yudi Widiyana, anggota legislatif Pusat yang juga Wakil Ketua Wilda Banjabar bahwa Kepala-kepala daerah yang merupakan kader PKS belum bisa mengkapitalisasi posisinya untuk meningkatkan elektabilitas PKS. Demikian pula para anggota DPR dan DPRD tidak menemukan isu atau opini yang menjadikan mereka disukai media.¹²⁷

Selanjutnya tentu saja strategi media, ubungan PKS dengan media massa mengalami masa pasang surut sehingga setelah 2005 hingga saat ini PKS menilai media tidak bersikap *fair* pada PKS. Menurut Nursanita pada periode 200-2004, DPP PKS yang berkantor di Mampang benar-benar menjadi representasi PKS yang tidak pernah sepi dari liputan media massa dan Hidayat Nur Wahid saat itu sebagai tokoh pemimpin baru yang juga seorang pembelajar cepat hampir selalu diminta pendapatnya untuk berbagai isu nasional yang muncul. Hampir tidak ada isu yang tidak ikut dimintakan pendapat Hidayat Nur Wahid oleh media massa baik cetak ataupun elektronik. Permintaan atau order untuk menjadi pembicara di berbagai stasiun TV hampir setiap ada isu penting.

Kader-kader PKS belum memiliki kesadaran yang cukup tentang tidak bersahabatnya media massa dengan PKS, sehingga belum sigap beralih pada strategi media lain yang efektif seperti, misalnya mendirikan pusat-pusat informasi dengan akses yang luas kepada masyarakat. Strategi media adalah kombinasi cara untuk menyampaikan pesan-pesan yang terintegratif untuk sasaran target para pemilih dengan content reputasi para pejabat publik PKS dan visi ke depan yang ingin dibangun oleh PKS, namun hal itu masih sedikit sekali dilaksanakan. Strategi Media di 2004 berhasil sementara di 2009 kurang adanya pemanfaatan media sehingga membuat kegiatan-kegiatan sosial tersebut kurang terliput. Padahal awalnya kegiatan *charity* baik yang dilakukan langsung oleh partai seperti Tim P2B (Pencegahan dan Penanggulangan Bencana) Bidang Kepanduan dan Olahraga DPP PKS maupun oleh LSM yang berafiliasi ke PKS yakni di periode tahun 2000-2004 banyak diliput media massa dan dicitrakan sebagai Tim yang paling cepat tanggap bekerja bersama TNI. Namun sejak 2004 terjadi perubahan dalam konstelasi pemberitaan media massa karena banyak media massa cetak dan elektronik yang juga mendirikan lembaga penyaluran dana kemanusiaan, sehingga hanya meliput kegiatannya masing-masing. Akibatnya walaupun kegiatan sosial kemanusiaan

¹²⁷ Wawancara Yudi Widiyana. *Op. Cit.*

yang dilakukan oleh PKS atau lembaga-lembaga *charity* yang berafiliasi ke PKS terus meningkat hampir tidak diliput oleh media massa sehingga efeknya pada elektabilitas hanya sedikit karena masyarakat belum bisa mengasosiasikan bantuan dari lembaga *charity* yang berafiliasi ke PKS sebagai identik dari PKS.

Pada pemilu 2009 dibandingkan dengan di 2004 PKS kurang mendapatkan pemberitaan positif, bahkan sebaliknya yang diekspos oleh adalah berbagai *statement* elit PKS yang mengundang kontroversi sehingga malah berdampak negatif bagi PKS. Sumaryatin kader perempuan Yogyakarta menambahkan efek dari pemberitaan dan dinamika politik di Pusat juga dirasakan oleh mereka di daerah-daerah, seperti banyak yang meminta penjelasan kepada mereka tentang berbagai hal tentang media. Sementara partai-partai besar seperti Golkar dan PDIP dan partai pemerintah Demokrat memiliki *budget* iklan yang luar biasa serta demikian pula partai-partai baru seperti Gerindra dan Hanura, iklan-iklannya menyedot perhatian publik, iklan-iklan PKS malah menimbulkan kontroversi karena kurang bisa dipahami masyarakat Indonesia. Dalam banyak survey, disebutkan bahwa iklan sangat berpengaruh pada penentuan pilihan oleh publik, sehingga 2 partai baru seperti Hanura dan Gerindra dapat melejit dan langsung lolos *parliamentary threshold*.

Selanjutnya PKS juga menerapkan strategi penguasaan teritorial dilakukan dengan cara mendirikan sebanyak mungkin posko/*outlet* dan melakukan *canvassing/direct selling* seintensif mungkin. Salah satu strategi pemenangan Pemilu PKS adalah dengan melakukan penetrasi kampanye hingga ke kalangan *grass root* dan menyentuh langsung masyarakat dengan kampanye *face to face* atau *direct selling*. Untuk menguatkan penetrasi tersebut, PKS memiliki Pos WK (Pos Wanita Keadilan) di berbagai wilayah di seluruh tanah air yang juga berfungsi sebagai rumah aspirasi dan menjadi pusat kegiatan para wanita. Tusy Wardani menyatakan bahwa keberhasilan PKS lebih karena interaksi intensif kader-kader lokal terutama kader-kader perempuan PKS dengan masyarakat. Tusy mengatakan bahwa ketokohan kader perempuan sejak 1999-2009 merupakan ujung tombak pemenangan Pemilu PKS, karena mereka yang intensif berinteraksi dengan masyarakat dan berada di komunitas ibu-ibu dan remaja putri melalui Pos WK yang berjumlah 470 merupakan wadah interaksi dengan masyarakat.¹²⁸

Sumaryatin ketua Bidang Perempuan DPW Yogyakarta sejak 2005 membenarkan bahwa di Yogyakarta perempuan PKS terjun langsung ke *grass root* melalui Pos WK yang merupakan Majelis Taklim, Sekolah Ibu, Taman Bacaan dan sekaligus Pos Ekonomi yang

¹²⁸ Wawancara dengan Tusy Wardani. *Op. Cit.*

menyalurkan dana KUBE (Kelompok Usaha Bersama). Selain itu PKPU badan *charity* setiap tahun pada saat Idul Qurban membagikan hewan Qurban ke daerah-daerah binaan Perempuan PKS dan badan *charity* Rumah Zakat yang memberikan beasiswa kepada pelajar. Setiap tahun sekali Bidang Perempuan juga menyalurkan dana dari APBD kotamadya Yogyakarta berdasarkan info dari anggota legislatif PKS untuk pemberdayaan ekonomi wilayah sebesar 10 juta setahun. Dana reses para anggota legislatif diserahkan ke struktur dan biasanya struktur akan membagikan secara bergilir antara bidang-badan di DPW.¹²⁹

Namun ironisnya PKS masih setengah hati menggarap isu perempuan sehingga PKS dikesankan masih setengah hati dalam memberikan peran politik pada perempuan sehingga dapat menjatuhkan citra partai bahwa PKS *lips service* dalam hal pemuliaan perempuan. Dari 57 kursi di 2009 ini misalnya hanya 3 kursi buat perempuan PKS, maka berarti telah terjadi penurunan drastis dari prosentasi di 2004 yang juga masih minim (3 dari 45 anggota legislative Pusat). Salah satu penyebabnya adalah pemahaman ideologis yang belum utuh tentang aktivitas perempuan PKS yang sangat menonjol sejak 1999, 2004 hingga 2009, sehingga muncul anggapan bahwa kiprah perempuan PKS terpengaruh aliran feminisme. Padahal pernyataan Ari Darmastuti dalam sidang promosinya bahwa ada sebagian perempuan PKS yang feminis disanggah oleh Bahtiar Effendy, Guru Besar Ilmu Politik UIN. Menurut Bahtiar Effendy seharusnya bukan menggunakan teori feminisme ketika membedah tentang perempuan PKS melainkan teori pemikiran ulama besar Ikhwanul Muslimin Yusuf Qardhawiy yang memberikan dorongan semangat dan keberanian bagi para perempuan Muslim untuk berkiprah.¹³⁰

Strategi kampanye dengan strategi menjangkau konstituen secara langsung semakin menguat di periode PK/PKS Hidayat Nur Wahid. Razikun Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu 2000-2005 menyebutkan bahwa peningkatan perolehan suara PKS di Pemilu 2004 antara lain karena keberhasilan strategi pencitraan partai sebagai partai Bersih dan Peduli¹³¹ Hidayat sendiri merinci strategi-strategi yang digunakannya di pemenangan Pemilu 2004 yakni menguatkan pencitraan partai, mengokohkan konsolidasi internal, melakukan pengkaderan secara masif, komunikasi dan sosialisasi massa serta menguatkan pula basis ekonomi partai agar kebutuhan finansial partai dapat terpenuhi secara mandiri.¹³² Strategi yang digunakan PKS di periode 2000-2004 berpengaruh positif dengan meningkatnya

¹²⁹ Wawancara dengan Sumaryatin. Ketua Bidang Perempuan DPW Yogyakarta. Depok, 1 April 2012.

¹³⁰ Sidang Promosi Doktor Ari Darmastuti. Perempuan dalam Relasi Kekuasaan di PKS. Gedung AJB, FISIP UI Depok, 29 Oktober 2010.

¹³¹ Wawancara dengan Razikun. Ketua Lajnah Pemenangan Pemilu 2000-2005. Jakarta, Februari 2012.

¹³² <http://www.dakwatuna.com/2011/03/11469/sketsa-biografi-hidayat-nur-wahid>

terbukti terjadi penambahan jumlah kader secara masif dari semula berjumlah 60.000 kader yang terdiri dari 3000 orang Kader Inti (KI) dan 57.000 Kader Pendukung (KP) sehingga berjumlah 60.000 di tahun 1999 bertambah secara massif menjadi 7 kali lipat yakni 21.444 KI dan 372.746 KP atau total berjumlah 394.190 di 2004. Suara PKS pun meningkat dari 1.431.482 di Pemilu 1999 yang setara dengan 7 kursi di DPR RI menjadi 8.325.020 yang setara dengan perolehan 45 kursi di DPR RI. Namun aksioma bahwa kader adalah *vote getter* untuk mendapatkan dukungan suara hanya berlaku di Pemilu 1999 dan Pemilu 2004. Fakta di Pemilu 2009, jumlah kader yang meningkat menjadi 36.021 KI dan 496.782 KP atau total 532.803 kader tidak membuat perolehan suara PKS meningkat bahkan menurun dari 8.325.020 suara di Pemilu 2004 menjadi 8.204.946.¹³³

Memed Sosiawan, anggota DPR RI dari Dapil Jatim VIII berpendapat bahwa strategi PKS yang cukup berhasil di Jawa Timur adalah dengan memahami kultur santri dan Kyai, menjalin interaksi dan menempatkan orang NU sebagai canggota legislatif seperti misalnya anggota legislatif PKS Firdaus yang menggantikan Misbakhun adalah kader NU.¹³⁴ Strategi penempatan tokoh atau canggota legislatif yang tepat di daerah yang sesuai juga sangat mempengaruhi perolehan suara PKS di Sulawesi. Demikian pula strategi mengangkat canggota legislatif non-muslim di daerah-daerah yang mayoritas Kristen di Papua dan mendekati kepala sukunya menurut Ahmad Feri Firman, Ketua Wilda III (Sulawesi, Papua, Maluku) 2000-2004 sangat besar pengaruhnya.¹³⁵

Bila dilakukan kilas balik maka di Pemilu 1999, Partai Keadilan (PK) sangat mengandalkan strategi *vernacular politics* atau politik di tingkat lokal dengan memanfaatkan jejaring yang ada. Para kader PK umumnya menjadi tokoh yang aktif di masjid-masjid di dekat rumahnya atau di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah, almamaternya sehingga interaksi masyarakat di tingkat lokal seperti RT/RW, Kelurahan atau Kecamatan dengan para aktivis PK menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih PK. Strategi kampanye permanen melalui interaksi, komunikasi dan pelayanan sosial, dakwah dan pendidikan para aktivis ke masyarakat di tingkat lokal termasuk dengan jejaring sosial dan struktur partai di tingkat DPC merupakan strategi satu-satunya yang digunakan PK dan berpengaruh positif bagi perolehan suara PK. Namun aspek kurangnya pendanaan dan masih sedikitnya kader PK yang berada di pemerintahan juga membuat strategi ini kurang optimal dalam pelaksanaannya.

¹³³ Data Sekretariat DPP PKS.

¹³⁴ Wawancara Memed Sosiawan. *Op. Cit.*

¹³⁵ Wawancara Ahmad Feri Firman. *Op. Cit.*

Selanjutnya Pemilu 2004 strategi yang khas digunakan oleh partai politik yang berasal dari gerakan dakwah masih tetap menjadi strategi utama dan Hidayat Nurwahid menganggap strategi seperti ini baik untuk digunakan seperti bagaimana memanfaatkan akses ke pemerintahan sepanjang tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.¹³⁶ Namun PKS di masa kepemimpinan Hidayat Nurwahid tidak hanya mengandalkan strategi ini sebagai satu-satunya strategi yang digunakan melainkan juga dengan memanfaatkan strategi media, penokohan dan pembentukan citra partai melalui slogan Bersih dan Peduli sehingga memberi pengaruh positif pada lonjakan keberhasilan PKS di Pemilu 2004 yang memperoleh 7,2% dari sebelumnya 1,3% di Pemilu 1999.¹³⁷

Sedangkan di Pemilu 2009, PKS memang masih menjadikan strategi *vernacular politics* berupa kampanye permanen sebagai andalan dengan menjadikan satu kecamatan sebagai *hadhonah* atau daerah binaan sebuah *usrah* atau grup kader inti, namun aspek pemanfaatan strategi *vernacular politics* menurun intensitasnya karena kesibukan kader yang luar biasa akibat mobilisasi kader-kader ke berbagai instansi pemerintah. Sementara kader-kader PKS yang menjadi pejabat atau menjadi penggiat LSM pada umumnya masih enggan bersinergi dengan jejaring sosial kemasyarakatan dan struktur partai di tingkat lokal. Ditambah lagi strategi lainnya seperti strategi penokohan, pengusungan isu atau jargon, pencitraan partai dan pemanfaatan media kurang dioptimalkan. Akibatnya aspek strategi kurang menimbulkan pengaruh positif bagi kemenangan Pemilu PKS di 2009 yang relatif stagnan yakni 7,88%.

III.7. Aspek-aspek Eksternal yang Ikut Mempengaruhi Kemenangan Pemilu PKS (1999-2009)

PKS muncul di saat situasi sosial politik dan ekonomi Indonesia sedang terpuruk dan di saat itu pula Indonesia menurun peran kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara. Bila sebelumnya Indonesia di masa Soeharto dijuluki 'Saudara Tua' oleh Malaysia dan Singapura, maka sejak krisis moneter yang melanda Indonesia sejak 1998, posisi Indonesia terus merosot di mata negara-negara tetangga. Berbagai peristiwa seperti kasus penyiksaan dan pengusiran TKI/TKW di Malaysia, penangkapan nelayan-nelayan Indonesia yang melintasi perairan di wilayah Australia, kegagalan Indonesia melakukan perjanjian ekstradisi koruptor-koruptor Indonesia yang melarikan diri ke Singapura, serta lepasnya Pulau Sipadan dan Ligitan ke

¹³⁶ Wawancara dengan Hidayat Nur Wahid. *Op. Cit.*

¹³⁷ *Ibid.*

tangan Malaysia semakin memperburuk wajah Indonesia di daerah kawasan maupun internasional.

Reformasi yang sudah berjalan selama 14 Tahun masih belum berhasil menciptakan stabilitas sosial politik ekonom di Indonesia. Di beberapa pemerintahan sejak masa Habibie, kemudian masa Gus Dur, masa Megawati dan masa SBY dalam dua periode, belum ada tanda-tanda bahwa reformasi berhasil. Namun yang jelas karena hanya sebagai mitra koalisi maka keberhasilan pemerintahan SBY periode 2004-2009 di bidang pertanian misalnya tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan PKS walaupun Menteri Pertaniannya dari PKS, sehingga tidak berpengaruh pada kemenangan Pemilu PKS. Sebaliknya ironisnya ketika kinerja pemerintahan SBY dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, maka walaupun PKS mengkritisi dan memberikan alternatif solusi tetap saja dianggap sebagai bagian dari koalisi yang harus ikut bertanggung jawab. Bahkan seringkali PKS akan dikecam sebagai mitra koalisi yang tidak loyal atau bahkan dianggap berkhianat, maka yang memperoleh keuntungan adalah partai yang jelas-jelas berada di luar Koalisi seperti PDIP, Gerindra dan Hanura atau partai baru seperti Nasdem seperti terlihat dari elektabilitas partai-partai tersebut yang meningkat dalam beberapa survei akhir-akhir ini.

Selanjutnya faktor budaya juga berpengaruh pada kemenangan PKS di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, sehingga tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam yang merupakan salah satu peradaban mayor kontemporer di samping peradaban Tionghoa, Jepang, Hindu, Ortodoks dan Amerika Latin. Namun menurut Samuel Huntington, penyebaran Islam juga menyebabkan peradaban Islam memiliki beberapa sub peradaban yang terdiri dari kebudayaan Arab, Turki, Persia dan Melayu.¹³⁸ Sub-sub peradaban Islam tersebut memiliki pula perbedaan satu sama lain Indonesia termasuk memiliki kebudayaan Islam Melayu. Aspek budaya yang juga berpengaruh pada budaya politik Indonesia berpengaruh pula pada hasil kemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009).

Di Indonesia unsur feodalisme masih cukup kental mewarnai kultur politik Indonesia yang berasal dari model aristokrasi Jawa yakni bahwa pemimpin harus dihormati dan dilayani. Selain itu menurut Ahmad Syaifuddin, guru besar Antropologi budaya Islam di Indonesia sangat heterogen karena terdiri dari peradaban Jawa, Hindu dan Islam yang datang

¹³⁸ Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (edisi terjemahan dari "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century"). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997, h: 48-49

belakangan sehingga memunculkan istilah Islam abangan yang sinkretis antara nilai-nilai Jawa lokal, Hindu dan Islam. Hal tersebut juga menyebabkan adanya heterogenitas kultur politik karena karakter kelompok Islam yang berbeda-beda misalnya Muslim di Jawa saja terbagi atas kelompok santri, priyayi dan abangan sehingga membuat umat Islam di Indonesia sulit bersatu dalam satu payung politik Islam yang besar.¹³⁹

Selain itu PKS tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang masih dalam proses menuju *civilized society* sehingga tidak mudah “menjual” program dan *platform*, karena hampir di setiap Pemilu yang lebih berperan adalah serangan subuh sebelum pencoblosan di kotak-kotak suara dengan *money politics*. Akibatnya terhapuslah usaha edukasi konstituen yang dilakukan PKS melalui *permanent campaign*. Hal tersebut turut mempengaruhi hasil perolehan suara PKS di Pemilu 1999, 2004 dan 2009.

Bila disimpulkan berdasarkan observasi dan wawancara kepada para pendiri dan pengurus senior maka aspek internal partai yang paling berpengaruh di tiga Pemilu adalah ideologi dan sistem rekrutmen kader dan kaderisasinya. Namun bila ideologi semakin berpengaruh positif dari Pemilu 1999 ke 2004 dan ke 2009, maka peran kader berpengaruh paling positif di Pemilu 2004 dan menurun di 2009. Sedangkan aspek yang paling lemah mempengaruhi kemenangan Pemilu PKS adalah aspek kepemimpinan dan strategi. Sementara aspek eksternal yang berpengaruh positif adalah iklim demokrasi yang cukup kondusif dan aspek eksternal yang berpengaruh negatif adalah kondisi ekonomi dan budaya politik Islam yang heterogen.

¹³⁹ *Ibid.*

BAB IV

PENGARUH ASPEK-ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL PARTAI PADA PEMENANGAN PEMILU ADALET VE KALKINMA PARTISI (AKP, 2002-2007)

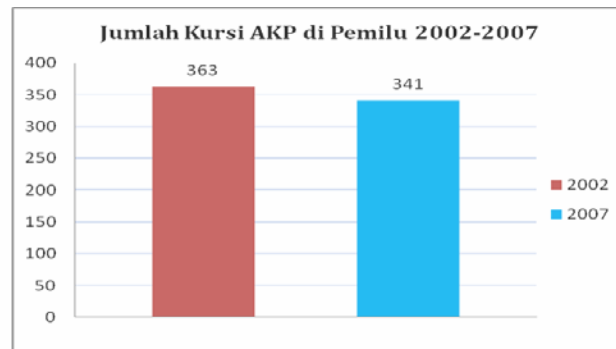
Bab IV mengkaji bagaimana faktor ideologi berimplikasi pada keberhasilan AKP. Kemudian bagaimana pula faktor organisasi, basis massa, sistem rekrutmen dan kepemimpinan AKP mempengaruhi kemenangan AKP. Selain itu juga diuraikan bagaimana faktor strategi AKP berpengaruh dalam keberhasilan AKP memenangkan Pemilu 2002 dan 2007. Terakhir dibahas pula bagaimana aspek-aspek eksternal seperti sosial, politik dan budaya turut mempengaruhi keberhasilan AKP sebagai *the ruling party* (2002-2007). Recep Tayyip Erdogan, Huseyin Karsu dan Abdullah Gul mendirikan AKP pada 2001, tak lama setelah *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan dibubarkan pada tahun 2001 dan Erbakan dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Sedangkan sebagian kader *Fazilet Partisi* lainnya meneruskan garis perjuangan Erbakan dengan mendirikan *Saadet Partisi*. Baik AKP maupun *Saadet Partisi*, keduanya segera mengikuti Pemilu di tahun berikutnya yakni 2002, namun berbeda dengan *Saadet Partisi* yang hanya memperoleh 2,5% sehingga tidak melewati *parliamentary threshold* sebesar 10%, AKP muncul sebagai pemenang dengan perolehan suara 34,26%.¹

Di antara 18 partai yang berkompetisi pada pemilu 2002 untuk mendapatkan kursi di parlemen, hanya 2 partai yang memenangkan kursi-kursi parlemen karena harus melewati ambang *parliamentary threshold* sebesar 10% dari suara nasional agar bisa mendapatkan perwakilan di parlemen. AKP muncul sebagai pemenang dengan 34,26% suara dan 363 dari 550 kursi di parlemen dan di tempat kedua *Cumhuriyetçi Halk Partisi* (CHP) atau Partai Rakyat Republik dengan suara 19,40% dan perolehan 170 kursi. Sedangkan calon-calon anggota legislatif dari kelompok independen memenangkan 9 kursi. AKP pun dapat membentuk pemerintahan tanpa koalisi untuk pertama kalinya sejak pembentukan Republik Turki oleh Kemal Pasha, karena berhasil memenangkan jumlah kursi hampir dua pertiga dari 550 kursi (partai politik yang tidak melewati *parliamentary threshold* 10% kehilangan kursinya). Kemudian di Pemilu 2007 perolehan suara AKP meningkat menjadi 47%.²

¹ CD *Turkiye İstatik Kurumu* (Badan Statistik di Turki) tahun 2009

² *Ibid.*,

Grafik IV.1. Perolehan Kursi AKP di Pemilu 2002 - 2007



Sumber: CD *Istatik Turkiye Kurumu*

Untuk melihat bagaimana sebuah partai politik dapat memperoleh keberhasilan di Pemilu, maka ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi merupakan faktor-faktor internal partai yang sangat penting dan memberikan pengaruh pada kemenangan Pemilu partai tersebut.

IV.1. Besarnya Pengaruh Ideologi Pos-Islamis Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)

Ada hal yang menarik pada saat meneliti soal ideologi AKP yakni hampir semua pendiri, pengurus dan kader AKP selalu menghindar dan bahkan mengatakan AKP tidak terlalu mementingkan persoalan ideologi, sementara menurut teori Alan Ware dan Klaus von Beyme hanya partai-partai politik yang memiliki kejelasan ideologi yang akan mampu bertahan lama. Namun faktanya AKP selama kurun waktu 8 tahun (2001-2007) menunjukkan konsistensi dalam performanya sehingga meyakinkan para pengamat bahwa AKP adalah partai yang akan bertahan lama dan hal itu tidak mungkin jika tidak memiliki kejelasan ideologi. Oleh karena itu pernyataan salah seorang pendiri AKP Huseyin Kansu bahwa AKP tidak mementingkan faktor ideologi harus dilihat dalam konteks negara Turki dan Konstitusi sekuler yang tidak memberi ruang bagi sebuah partai politik untuk memiliki dasar ideologi selain sekulerisme.

Para pemimpin AKP menyadari pedebatan seputar ideologi akan kembali menyudutkan mereka dengan tuduhan sebagai kelompok Islamis yang menyebarkan paham anti sekuler sehingga malah kontra produktif bagi kinerja AKP sebagai partai pemerintah. Oleh karena itu para pemimpin AKP tidak pernah membicarakan masalah ideologi dalam pernyataan-pernyataan resminya melainkan lebih memusatkan perhatian pada aspek pembangunan ekonomi dan

pemerataan kesejahteraan bagi rakyat Turki. Hal itu tidak lain karena di satu sisi, AKP menarik pelajaran baik dari partai-partai pendahulunya yang berhaluan Islam seperti *Milli Nizhom Partisi* (MNP), *Millî Selâmet Partisi* (MSP), *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi* dibekukan karena menonjolkan aspek simbol ideologisnya.

Di sisi lain para pemimpin AKP juga belajar dari pengalaman kegagalan pemerintahan *Cumhuriyet Halk Partisi* (CHP) atau Partai Rakyat Republik yang selalu sibuk dengan wacana pentingnya mempertahankan ideologi nasionalisme-sekulerisme tetapi korup dan tidak mampu memperbaiki kondisi perekonomian Turki yang sangat terpuruk sehingga rakyat tidak mendapatkan keadilan dan kesejahteraan. Maka ketika menjadi partai pemerintah, AKP pun mengaplikasikan ideologinya secara rasional ke dalam pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan demokrasi. AKP mampu menerjemahkan ideologi dalam bentuk *good governance* yang mengupayakan kesejahteraan untuk rakyat dan slogan AKP, *Hersey Turkey Icin* (*Everything is for Turkey*) membawanya pada keberhasilan di dua Pemilu (2002 dan 2007).

Sebagaimana dikatakan Ian Adams³ bahwa ideologi memberi arti, identitas dan tujuan (*goals*) bagi yang menganutnya, maka ideologi AKP konservatif demokrat yang memiliki tujuan menegakkan demokrasi dan membangun perekonomian memberi identitas dan arti bagi para kader AKP. Dilihat dari teori ideologi Martin Seliger, Alvin Gouldner dan Ian Adam, maka visi politik AKP yang tertuang di dalam *platformnya* merupakan cerminan keyakinan (*beliefs*), nilai-nilai (*values*), tujuan-tujuan (*goals*) dan kebijakan-kebijakan (*policies*) terkait konsep masyarakat ideal berupa masyarakat demokratis yang sejahtera yang dicita-citakan AKP.⁴

Bila dilihat dari pernyataan-pernyataannya, pemimpin-pemimpin AKP seolah ingin menghilangkan akar sejarahnya yakni sebagai kelanjutan dari partai-partai berhaluan Islam sebelumnya karena tidak mau kembali dibekukan seperti para pendahulunya. Sebagaimana nampak dalam perkataan Huseyin Kansu bahwa AKP bukan partai Islam dan menurutnya anggapan Barat bahwa AKP adalah partai Islam boleh jadi karena keseluruhan elit AKP memiliki gaya hidup sesuai ajaran Islam misalnya tidak meminum alkohol dan para wanitanya memakai hijab.⁵ Walaupun menyebut partainya bukan partai Islam, para pemimpin AKP tidak

³Ian Adams. *Ideologi Politik Mutakhir: Konsep, Ragam, Kritik dan Masa Depan*. Penerbit CV. Qalam, Yogyakarta, 1993. Hal: 5.

⁴Situs resmi AKP: <http://www.akparti.org.tr/>. *Pertama*, Kebijakan Dasar Hak-hak dan Kebebasan. “Kebebasan sipil dan politik terutama kebebasan berpikir, berekspresi, berkeyakinan, memperoleh pendidikan, berasosiasi dan berusaha adalah prakondisi terciptanya kedamaian dan konsiliasi”.

⁵Wawancara dengan Huseyin Kansu di Istanbul, Turki. Senin, 10 Agustus 2009.

pernah menyembunyikan ketaatannya sebagai Muslim. Selain itu nilai dan prinsip Islam sering pula tersirat secara substantif misalnya dalam jargon yang disitir Erdoğan dalam pidato-pidatonya yakni "Melayani Rakyat berarti melayani Tuhan (ibadah)". Demikian juga nampak di dalam lagu kampanye AKP "Ayne Yoldan" yang diakhiri dengan bait terakhir "gonuller bir, dualar bir. Bir Allahu kuluyuz biz" (hati kami satu, doa kami satu dan kami adalah hamba-hamba dari Allah yang Esa).⁶

Akan tetapi terlepas dari sanggahan para pendirinya di antaranya Recep Tayyip Erdoğan dan Huseyin Kansu bahwa AKP bukan partai Islam, di dunia Islam sendiri muncul keyakinan bahwa AKP adalah partai berhaluan Islam moderat seperti misalnya pernyataan Hamid Al Ghazali, salah seorang tokoh Ikhwanul Muslimin Mesir bahwa kemenangan AKP adalah kemenangan gerakan Islam moderat.⁷ Demikian pula Jenny B. White dalam bukunya: "*Islamist Mobilization in Turkey, A Study in Vernacular Politics*" menyebutkan bahwa AKP adalah partai politik berorientasi Islam. AKP menurut Vali Nasr bahkan dicurigai oleh militer sebagai Ikhwanul Muslimin Mesir dalam kemasan yang lebih baik sehingga dikhawatirkan akan merubah negara sekuler Turki menjadi negara Islam. Walaupun pemerintahan AKP berhasil membangun perekonomian Turki, tetap saja kelompok sekuler dan militer meragukan komitmen AKP pada nasionalisme dan sekularisme di Turki:

*"... they were (AKP and the Leaders) nothing more than a better-package version of the Egyptian Muslim Brotherhood, poised to shatter the achievements of Turkish secularism and turn the country into an Islamic Republic."*⁸

"....mereka (AKP dan para pemimpinnya) tidak lebih dari gerakan Ikhwanul Muslimin Mesir dalam kemasan lebih baik dan telah merusak dan menghancurkan capaian dari ideologi sekularisme Turki dan ingin mengubah negeri ini menjadi Republik Islam.

Sebagaimana teori Alan Ware⁹ bahwa partai politik umumnya bisa dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya berdasarkan ideologinya, maka AKP yang menyebut dirinya bukan partai Islam tetap bisa dibedakan secara ideologis dari CHP dan *Milliyetçi Hareket Partisi*

⁶ Pidato Recep Tayyip Erdoğan dalam buku Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Jakarta, 2011.

⁷ Lihat dalam John L. Esposito. *Siapakah Muslim Moderat?* Gaung Persada Press Group, 2008. Hal: 79. John L. Esposito dalam bukunya tersebut menyebutkan bahwa Muslim moderat adalah mereka yang hidup dan bekerja di dalam masyarakat, mengusahakan perubahan dari bawah dan menolak ekstrimisme agama.

⁸ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World.* Free Press, New York. 2009.

⁹ Alan Ware. *Political Parties and Party System.* Oxford University Press, New York, 1999. Hal: 1.

(MHP) atau Partai Gerakan Nasionalis. Partai oposisi utama yakni CHP bila dilihat dari faktor ideologinya merupakan partai sosialis sekuler atau partai Kiri-Tengah. Partai ini merupakan partai politik tertua di Turki yang didirikan oleh Kemal Ataturk pada 9 September 1923 di tahun berdirinya Republik Turki dan memimpin Turki selama puluhan tahun di fase partai tunggal (*single party*) di Turki. CHP dipimpin oleh Deniz Baykal (73 tahun) selama puluhan tahun dan kini digantikan oleh Kemal Kilicdaroglu, karena Deniz Baykal terungkap skandal seksnya.¹⁰ Partai oposisi kedua adalah MHP yang merupakan partai konservatif sekuler atau partai Kanan Jauh dan dipimpin oleh Dr. Bahçeli (63 tahun). Walaupun menyebut dirinya partai konservatif namun partai ini justru dikenal permisif dalam hal moralitas bahkan belum lama terungkap skandal seks beberapa anggota dewan dari MHP karena beredar di internet sementara di sisi lain mengemukakan kebijakan ekonomi AKP yang dinilai sangat menguntungkan para investor asing karena begitu bebasnya dan minim intervensi pemerintah.¹¹

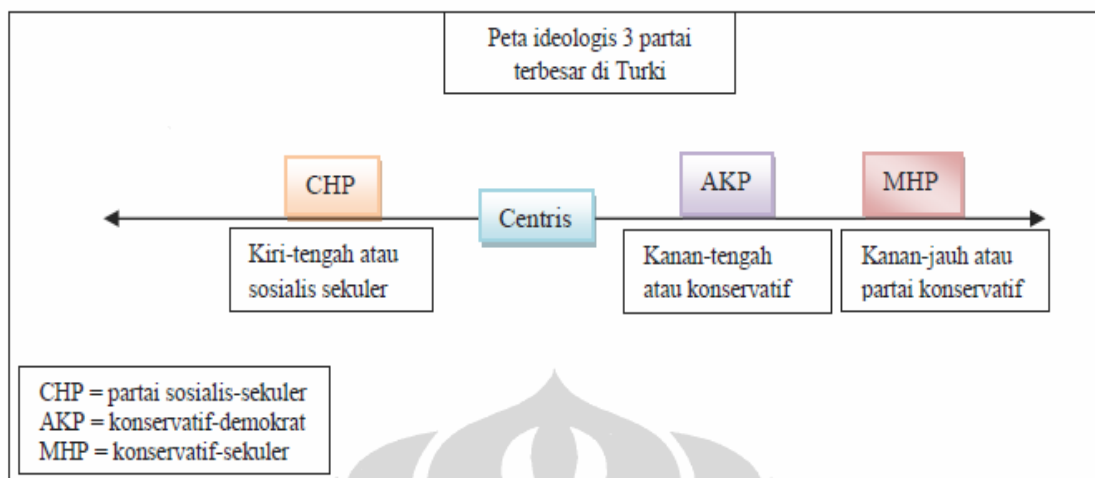
Recep Tayyip Erdoğan menegaskan bahwa AKP adalah partai konservatif demokrat, oleh karena itu AKP memiliki pandangan yang lebih rasional, empiris dan bahkan pragmatis terkait konsep membangun Turki. Ideologi konservatisme menurut Ian Adams adalah gagasan yang didasarkan pada pengalaman dan akal sehat sehingga konservatisme lebih bersifat pragmatis alih-alih ideologis.¹² Ideologi konservatif AKP tercermin pula pada kebijakan publik yang dihasilkannya misalnya bersikap ketat menentang tindakan-tindakan amoral di masyarakat namun permisif terhadap kebebasan swasta di antaranya dengan meringankan pajak bagi pengusaha-pengusaha besar dan justru membatasi peran negara terkait masalah ekonomi dan investasi. Posisi ideologis ketiga partai politik terbesar di Turki tersebut nampak dalam bagan di bawah ini:

¹⁰ http://en.wikipedia.org/wiki/Deniz_Baykal

¹¹ Laporan Observasi Pemilu di Turki. Bidang. *Op.Cit.* Hal: 182.

¹² Ian Adams. *Op. Cit.*

Bagan IV.1. Peta Ideologis Partai-partai di Turki



Sumber: Laporan Observasi Pemilu Turki

Ihsan Dagi melihat dari perspektif yang berbeda yakni bahwa AKP memang berasal dari kelompok Islamis *Milli Görüş*, namun ketika *Fazilet Partisi* pecah maka faksi Islamis tradisional membentuk *Saadet Partisi* atas arahan Erbakan, sementara faksi Islamis moderat dipimpin Erdoğan mendirikan AKP.¹³ Hal itu dibenarkan oleh Erol Erdoğan, salah seorang pemimpin *Saadet Partisi*, yakni bahwa sebelum berubah haluan AKP adalah juga partai politik berideologi Islamis karena merupakan kelanjutan dari partai-partai sebelumnya yakni MNP, MSP, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi* serta sama-sama dilahirkan dari kelompok Islamis *Milli Görüş*. Namun kemudian menurut Erol saat ini AKP telah berubah sehingga AKP, CHP maupun MHP secara ideologis terlihat sama. Sementara *Saadet Partisi* yang memiliki jargon *fark var* (memang beda) diyakininya tetap berbeda secara ideologis dengan semua partai politik lainnya, termasuk AKP karena *Saadet Partisi* menurutnya ingin membangun masyarakat madani yang berakar dari masa ribuan tahun yang lalu, sementara AKP malah membangun peradaban Amerika. *Saadet Partisi* memperjuangkan sistem ekonomi tanpa riba, tetapi AKP menganggap ekonomi tanpa riba tidak mungkin diterapkan dewasa ini”.¹⁴

¹³ Ihsan Dagi is professor of international relations at the Middle East Technical University in Ankara, Turkey, and the editor-in-chief of the quarterly. *Insight Turkey*. He is the author of *Turkey Between Democracy and Militarism: Post-Kemalist Perspectives* (2008). *Journal of Democracy* Volume 19, Number 3 July 2008© 2008 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

¹⁴ Wawancara dengan Erol Erdoğan dari Partai Saadet, DPW Istanbul pada hari Selasa 11 Agustus 2009.

Ali Yelgun, pengurus *Saadet Partisi* lainnya juga mengkritik AKP karena dianggapnya hanya memecahkan persoalan ekonomi jangka pendek atau kepentingan pragmatis belaka dan kurang mementingkan faktor ideologi. Perdana Menteri Erdoğan dinilai Yelgun kurang memperjuangkan ideologi Islam misalnya menghapuskan larangan jilbab, mengembangkan ekonomi non-riba dan memberantas minuman keras di tempat-tempat wisata.

*Bence AK parti sadece günlük ve kısa vadede bir çözüm oldu ve gelecek 50 seneye çözüm olamaz. Yaptığı herşey zaten kısa vadeli işler ve sadece koltukta oturabilmesi içindir.*¹⁵

“Menurut saya AKP boleh dikatakan hanya menjadi “problem solver” harian atau jangka pendek, namun tidak menjadi “problem solver” untuk 50 tahun ke depan. Semua yang dilakukannya hanya untuk jangka pendek dan semata-mata agar tetap berada di kursinya saja”

Erol Erdoğan pimpinan *Saadet Partisi* di Istanbul juga memaparkan perbedaan ideologis antara AKP dengan *Saadet Partisi* sejak AKP dianggap telah mengubah haluan ideologisnya. Hal yang dianggap Erol paling membedakan *Saadet Partisi* dari AKP adalah masalah motivasi yakni bahwa para kader *Saadet Partisi* berjuang di bidang politik sebagai ibadah serta memiliki visi jangka panjang hingga ribuan tahun ke depan dan bukan hanya tujuan pragmatis. *Saadet Partisi* menyatakan bahwa pemikiran *Saadet Partisi* masih *asholah* atau murni bersumber dari Al Qur'an dan Sunnah serta akan memunculkan kembali kejayaan Islam sebagaimana di masa *Ottoman Empire* atau Khilafah Utsmaniyah:

“Saadet partisi’nde çalışanlar, siyasete girmegi sırf bir siyaset uğraşı olarak değil, onu bir ibadet olarak algırlarlar. Böylece, diğer partilerle çatışmamız daha azdır. Psikolojik olarak günlük çalışırız, ama bin yıllık uzak bir geleceğe doğru planımızı kurarız. Fikirlerimiz asil ve kökenlidir. Çabamız Osmanlı imparatorunun kurmuş olduğu ideolojiyi, yani İslam ideolojisini tekrar egemen kılmaktır. Dördüncüsü ise, güçlü eğitim faaliyetimizin bulunmasıdır. Bu faaliyet kadrolarımızın en üst tepesinden en alt tabakasına kadar aynı düşünce paylaşabilmelerini sağlar. Son olarak, diğer islam ülkelerindeki islami hareketlerle sürekli diyalog kurmaktayız.”

“Orang-orang yang bekerja di *Saadet Partisi* berkecimpung di bidang politik memandangnya sebagai ibadah. Visi kami bukan untuk kerja harian namun juga

¹⁵ Wawancara dengan Ali Yelgun dilakukan pada hari Selasa 11 Agustus di kantor Bab-I Aleem, Istanbul dalam bahasa Turki yang diterjemahkan oleh Andhika, mahasiswa Indonesia yang sedang mengambil master sosiologi agama di Universitas Marmara di Istanbul.

membuat rencana ke depan ribuan tahun. Pemikiran kami juga mempunyai *asholah* dan kami terus berusaha bagaimana memunculkan ideologi Islam sebagaimana di masa *Ottoman Empire*, Khilafah Utsmaniyah. Oleh karena itu kami memiliki kaderisasi agar kader dari atas sampai ke bawah mempunyai pemikiran yang sama. Selain itu kami juga sering melakukan dialog dan kerjasama dengan gerakan-gerakan Islam di negara lain, di luar Turki.”

Sikap AKP yang tidak pernah mengajukan ide *Islamic state* (negara Islam) melainkan mengusung konstitusi sekuler dalam Republik Turki adalah juga yang kemudian membedakannya dari *Saadet Partisi*. Hal itu tak lain karena AKP telah bertransformasi dari karakter islamisnya menjadi pos-islamisme yang lebih terbuka, pragmatis dan inklusif. Mustafa Ozkaya, direktur TV-Net bahkan meyakini bahwa pertimbangan rasional pragmatis berdasarkan kepentingan perbaikan ekonomi justru menjadi alasan utama rakyat Turki memilih AKP berturut-turut dalam Pemilu 2002 dan 2007 memilih AKP yang dinilainya mampu membaca keinginan rakyat Turki:

*“Actually, Turkish people are pragmatic. Pragmatism is very important term. Pragmatism means people know best what are their needs. We have to see and read what are the people needs. AKP take the photographs, picture all the Turkish people needs.”*¹⁶

Sesungguhnya, rakyat Turki memang pragmatis. Pragmatisme adalah istilah yang sangat penting karena bermakna rakyat sangat mengetahui apa yang mereka butuhkan. Kita harus dapat melihat dan membaca apa yang dibutuhkan oleh rakyat. AKP mampu menangkap secara tepat gambaran kebutuhan seluruh rakyat Turki.

Menurut Huseyin Kansu dewasa ini telah terjadi perubahan cara pandang ideologis di Turki sehingga rakyat lebih fleksibel dalam memandang ideologi dan tidak memiliki afiliasi ideologi yang kaku dengan partai politik tertentu. Mereka lebih realistis dan rasional dalam memilih sebuah partai politik sehingga hanya akan memilih partai politik yang dianggap mampu mengatasi pengangguran, memperbaiki perekonomian, memberikan rasa aman dan kesejahteraan serta jaminan hari tua. Selain itu era informasi turut mempengaruhi keinginan rakyat Turki agar negaranya menerapkan wacana global seperti demokrasi, penegakan HAM dan kebebasan.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Mustafa Ozkaya, Direktur TV-Net dilakukan di kantor TV-net pada hari Kamis, 13 Agustus 2009: pukul 14.15 – 15.00 waktu Turki dengan bahasa pengantar Inggris.

¹⁷ Hüseyin Kansu . *Op. Cit.* 10 Agustus 2009.

Hal itu sejalan dengan pendapat Idris Güllüce, kader senior AKP bahwa mayoritas rakyat Turki kini menentukan pilihannya pada partai politik di Pemilu berdasarkan pesan, program dan prospek serta rencana pembangunan masa depan dan meninggalkan kecenderungan memilih atas dasar motivasi politis dan ideologis. Bertambahnya jumlah pemilih muda dan berkembangnya masyarakat perkotaan menjadi penyebab utama perubahan *voting behavior* rakyat Turki. Perubahan ini menurut Güllüce baik bagi perkembangan kualitas demokrasi di Turki sehingga partai-partai politik mengedepankan kontestasi program pembangunan Turki di masa mendatang dibanding konflik politik.

“Voters voicing their expectations and preferences regarding their quality of life prompts political parties to put aside ideological discourse and produce projects. This is a very positive development for the quality of our democracy,” Güllüce said.¹⁸

“Para pemilih menyuarakan harapan dan keinginannya mengenai standar kualitas hidup sehingga memaksa partai-partai politik mengenyampingkan persaingan wacana ideologis dan sebaliknya membuat tawaran-tawaran proyek pembangunan Turki. Hal ini sangat baik bagi perkembangan kualitas demokrasi.”

Prof Ozer Sencar, Ketua Pusat Riset Sosial dan Strategi Metropoll di Ankara membenarkan dari hasil penelitiannya bahwa telah terjadi perubahan poros ideologi dan trend sosial. Bila sebelumnya ada dikotomi ideologi antara ideologi kiri (komunis atau sosialis) dan ideologi kanan (liberalis) yang kemudian berubah menjadi polarisasi antara sekulerisme dan anti-sekulerisme, maka kini polarisasinya adalah antara yang mendukung AKP dan yang tidak, atau antara yang mempercayai Erdoğan dan yang tidak. Bahkan mereka yang mengatakan dirinya sekuler pun berbalik menjadi pendukung setia Erdoğan setelah polarisasi sekuler dan anti-sekuler berkurang sehingga 20% nasionalis (*ulkuju*), 19% sekuleris dan lebih dari 40% liberal mengatakan memilih AKP dan mengatakan akan tetap memilihnya pada Pemilu mendatang. Sencar berpendapat bahwa kecenderungan baru itu bahkan menjadi lebih mencolok pada Pemilu 29 Maret 2009 ketika serangan-serangan kasar para oposan malah mempercepat perubahan persepsi sehingga elektabilitas partai oposisi tidak meningkat dalam hasil *polling* hanya karena kritikan-kritikan tajamnya pada partai pemerintah AKP:

¹⁸Ali Aslan Kilic, İstanbul. “People no longer vote based on ideology but projects for future”. <http://www.todayszaman.com>. 15 May 2011.

“In this context, 20 percent of those who describe themselves as nationalist/idealist [ülküciü] and 19 percent of secularists as well as more than 40 percent of liberals say they voted for the AK Party and will vote for it again in the upcoming elections. People who do not regard secularism as a sort of religion but still define themselves as secular have found themselves siding with Erdoğan as the secular vs. anti-secular polarization wanes,” he added.

“Dalam konteks ini hal itu ditunjukkan oleh fenomena bahwa orang sekuler berbalik menjadi pendukung setia AKP dan Erdoğan. Bahkan ada 20% orang nasionalis dan 19% orang sekuleris dan lebih dari 40% liberalis mengatakan telah memilih AKP dan akan tetap memilihnya pada Pemilu-pemilu mendatang”, Sencar menambahkan penjelasannya.¹⁹

Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam polarisasi ideologi yang baru adalah di satu sisi gaya kampanye AKP dan pidato Erdoğan dan di sisi lain adalah kegagalan kompetitor-kompetitor AKP merespon tuntutan perubahan. AKP berhasil mencitrakan diri sebagai partai yang terbuka pada perubahan dan bertentangan dengan wacana *status quo* MHP dan CHP. Perubahan preferensi politik terbaru menurut Sencar disebabkan kecenderungan dominan saat ini bahwa kepentingan individu akan nasib yang lebih baik menjadi lebih dominan dibanding kesetiaan pada partai. Dua puluh tahun yang lalu ada tipe pemilih yang tidak akan pernah meninggalkan partai pilihannya namun kini 70% dari tipe pemilih tersebut telah berubah dan bahkan pemilih pemula jauh lebih tidak loyal terhadap partai tertentu dibanding generasi sebelumnya. Hal yang dapat diobservasi dalam perubahan sosial ini adalah bahwa faktor-faktor ekonomi menjadi motif dominan mereka. Perubahan persepsi tentang kepentingan, urbanisasi dan masa depan merupakan faktor penting dalam perubahan sikap pemilih yang mempengaruhi konstelasi politik secara keseluruhan, karena 70% pemilih adalah *floating voters* atau *swing voters*. Sulitnya pemilih memberikan kesetiiaannya pada partai politik tertentu sangat penting baik bagi kemajuan demokrasi maupun bagi partai agar mau mereformasi dirinya.

Hal lainnya yang didapat dari penelitian Sencar adalah fakta bahwa sebagian besar pemilih AKP adalah justru massa mengambang (*floating voters*), sementara pemilih AKP yang tipikal garis *Milli Görüş* hanya berjumlah 15%, namun kelompok pemilih ideologis yang setia inilah yang berhubungan dan menarik pemilih yang berjumlah 40% dari total pemilih. Sedangkan sisanya berasal dari mantan konstituen MHP dan CHP yang lebih menyukai stabilitas

¹⁹ Professor Özer Sencar (Head of the Ankara-based MetroPOLL Strategic and Social Research Center). *Social Polarization*. Sumber: www.sundayszaman.com. 12 Januari 2010.

dan tidak memiliki kesetiaan ideologi yang mengikat. Mereka memilih AKP karena secara realistis menganggap tidak ada partai politik lain saat ini yang lebih memiliki kapabilitas untuk menjadi partai yang berkuasa dibanding AKP.

Walaupun Necmettin Erbakan menyangkal *Milli Görüş* yang didirikannya terinspirasi oleh Ikhwanul Muslimin, banyak pengamat politik seperti Ihsan Dagi, Jenny White, Asef Bayat maupun Greg Fealy menggolongkannya ke dalam kelompok Islam politik atau Islamis yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan masuk ke dalam sistem politik yang ada dan menganggap demokrasi sebagai alat untuk mencapai agenda sesungguhnya. Ahmad Moussalli membagi kelompok yang dianggapnya fundamentalis menjadi dua yakni fundamentalis radikal dan moderat. Kelompok Islamis baik di Mesir, Turki, Tunisia maupun Indonesia dikategorikan fundamentalis moderat yang mau berdialog dan menerima sistem politik Barat selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam serta dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar serta yakni mendirikan sistem Islam atau *Islamic state* (teokrasi) berdasarkan kekuasaan Tuhan (*hakimiyyah*) dan hukum Islam.²⁰

Dalam perjalanannya perjuangan kelompok Islamis tersebut dianggap oleh Olivier Roy telah gagal yang ditandai dengan pembekuan beberapa partai kelompok Islamis seperti *Refah Partisi* di Turki dan FIS di Aljazair. Kegagalan kelompok Islamis tersebut menurut Roy menyebabkannya mengalami kemunduran dari Islamis ke Neo-fundamentalis yakni paham Salafy yang sepenuhnya menolak nilai-nilai Barat, menekankan pemberlakuan syariah Islam dan kurang memperhatikan aspek sosial, politik dan ekonomi.²¹ Tesis Roy jelas terbantahkan dengan fenomena kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh AKP dari Pemilu 2002 dan 2007 serta fakta bahwa selama 8 tahun berkuasa, AKP tidak menunjukkan karakter neo-fundamentalis yang kemudian menggantikan sistem demokrasi menjadi represif atau mengganti konstitusi sekuler dengan teokrasi. Hal itu diutarakan oleh Ihsan Dagi, guru besar di Ankara University:

²⁰ Ahmad Moussalli sebagaimana dikutip oleh Firman Noor. *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998-2005. A sub-thesis submitted for the degree of Master of Arts (Asian Studies) of the Australian National University.* The Australian National University. Faculty of Asian Studies. 2006. Hal: 10.

²¹ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik.* Ed. Terjemahan dari: *The Failure of Political Islam.* PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996. Hal 98-99.

“Turkey’s Justice and Development Party (AKP) is unique in the Muslim world by virtue of being a party whose foes charge it with pursuing an Islamist agenda, yet whose commitment to democracy can be assessed through its performance in government. In the Muslim world at large, Islamist parties are perennially confined to opposition status causing observers to wonder about the “real agenda” that they would pursue should they ever reach power. The AKP, by contrast, has been its country’s democratically elected ruling party since 2002. So far, it has overseen three free and fair elections, which should put to rest at least the commonly heard worry that “Islamist” will tolerate “one person, one vote” one time only”²²

“AKP di Turki adalah fenomena unik di dunia Islam yang dituduh Islamis namun komitmennya kepada demokrasi dapat dinilai melalui kinerja pemerintahannya di dunia muslim. Pada umumnya merupakan oposisi sehingga para pengamat selalu mencurigai bahwa mereka memiliki agenda tersembunyi yang akan direalisasi jika mereka berkuasa. Namun AKP justru kebalikannya, ia merupakan partai yang menang berturut-turut dalam tiga kali pemilu sejak tahun 2002. Sejauh ini tiga pemilu dan satu pemilu lokal berlangsung secara *fair* sehingga membantah tuduhan bahwa kelompok Islamis hanya menerima demokrasi satu kali saja ketika ia meraih kekuasaan”

Tesis Olivier Roy bahwa kelompok Islamis *al Islam as Siyasi* (Islam politik) yang menempatkan Islam tidak hanya sebagai agama semata, namun menyatukan antara dakwah Islam, politik dan masyarakat telah gagal juga dibantah oleh Greg Fealy yang mengemukakan bahwa kelompok Islamis seperti di Turki, Aljazair dan Mesir yang telah bergeser bukan ke arah Neo-fundamentalis melainkan menjadi kelompok Pos-Islamis sebagai bentuk keberhasilan dan kemajuan karena direpresentasikan oleh kelompok Islamis yang semakin moderat, toleran, terbuka dan inklusif di dalam berpolitik dan bernegara.²³

Menurut Ihsan Dagi kepemimpinan AKP memang tumbuh dari kader-kader organisasi politik kelompok Islamis di Turki yakni *Milli Görüş* yang didirikan oleh Erbakan dan Islamisme adalah aktivisme politik yang bertujuan membentuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menginginkan pembentukan negara Islam melalui peran Negara. Namun saat ini bila dinilai dari pernyataan-pernyataan publik AKP, basis massa, program dan sikap serta aktivitasnya setelah menjadi partai pemerintah di Turki lebih dari 5 tahun, AKP nampak bukan lagi sebagai gerakan Islamis namun sebagai partai konservatif yang di dalam tradisi politik Turki dikenal pula sebagai partai politik kanan-tengah.

²² Ihsan Dagi. *Op. Cit.*

²³ Ahmad Dzakirin, *Kebangkitan Pos-Islamisme. Analisis Strategi dan Kebijakan AKP Turki Memenangkan Pemilu*. Solo: Era Adicitra Intermedia, 2012. Hal: 37.

Asef Bayat menyebut AKP di Turki sebagai salah satu kelompok Islamis yang telah mentransformasi dirinya menjadi kelompok Pos-Islamis. Demikian pula menurut Greg Fealy, AKP sejak 2001 telah bertransformasi menjadi kelompok Pos-Islamis sebagai hasil interaksi mereka dengan kekuatan-kekuatan lain di dalam proses demokrasi sehingga terjadi pergeseran cita-cita dari menginginkan negara *syariah* menjadi masyarakat yang diwarnai nilai-nilai syariah, dari pemerintahan Islam ke pemerintahan yang baik (*good governance*) dan dari pesan moral menjadi integritas moral sang pembawa pesan. Selain itu juga ada perubahan dari keanggotaan yang terbatas dan selektif menjadi keragaman keanggotaan yang lebih luas serta peralihan generasi. Pemikiran Pos-Islamis merupakan transformasi pemikiran Islamis dengan cara melakukan objektifikasi gagasan Islam ke dalam realitas politik yang plural sebagai bentuk adaptasi dan kontekstualisasi pemikiran Islamis sebagaimana kelompok Islamis juga melakukan adaptasi dan kontekstualisasi terhadap demokrasi.²⁴

Asef Bayat juga menjelaskan bahwa Pos-Islamisme berbeda dengan Islamisme yang memaksakan *Islamic-State* karena Pos-Islamisme menolak sekularisme yang memusuhi agama, namun juga menolak gagasan teokrasi. Berkembangnya gerakan demokratis di Timur Tengah menurut Bayat mendorong wacana Islamis menuju wacana Pos-Islamis sehingga Revolusi Arab bisa pula diistilahkan ‘post-Islamist refo-lutions’ atau perpaduan antara reformasi dan revolusi Pos-Islamis:

“Post-Islamism is not anti-Islamic or secular; a post-Islamist movement dearly upholds religion but also highlights citizens’ rights. It aspires to a pious society within a democratic state. Early examples of such movements include the reform movement in Iran in the late 1990s and the country’s Green Movement today, Indonesia’s Prosperous Justice Party, Egypt’s Hizb al-Wasat, Morocco’s Justice and Development Party (PJD), and Turkey’s ruling Justice and Development Party (AKP). Each was originally fundamentalist but over time came to critique Islamist excess. They all eventually opted to work within the democratic state.”

“Pos-Islamisme tidak anti Islam dan juga tidak sekuler, gerakan pos-islamisme menjunjung tinggi agama, namun juga menghargai hak-hak warganegara. Pos islamisme adalah sebuah aspirasi tentang masyarakat religius dalam sebuah negara bangsa yang demokratis. Contoh gerakan seperti yang sudah lebih dulu adalah gerakan reformasi di Iran di akhir 1990-an dan gerakan cinta lingkungan (*green party*), Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia, Hizb al-Wasat di Mesir, *Justice and Development Party* di Maroko, Partai pemerintah di Turki yaitu Partai Keadilan dan Pembangunan Turki (*Adalet ve Kalkinma Partisi*/AKP).Masing-

²⁴*Ibid.*

masing gerakan di atas mula-mula merupakan fundamentalis namun kemudian mengkritisi cara Islamis yang berlebihan. Mereka semua akhirnya memilih untuk bekerja, berjuang di dalam sebuah negara yang demokratis”.²⁵

Sebenarnya yang terjadi pada AKP yang disebut oleh *Saadet Partisi* sebagai keluar dari ideologi Islamis adalah sebuah transformasi Islamis (Islam politik) di Turki menjadi Pos-Islamis menurut Asef Bayat dan Greg Fealy atau Islam sosial menurut Ihsan Dagi adalah proses panjang lebih dari 30 tahun sejak 1970 hingga terjadi di tahun 2001. Sebagian kader Islamis yang bergabung di *Milli Görüş* seperti Recep Tayyip Erdoğan dan Abdullah Gul mulai menyadari bahwa hampir mustahil memaksakan paham Islamis di negeri yang militer serta elit Kemalis di pemerintahannya sangat teguh dalam mengawal konstitusi negara yakni sekulerisme. Pembekuan *Refah Partisi* pada tanggal 28 Februari 1996 yang sedang memimpin pemerintahan dan pemimpinnya yakni Necmettin Erbakan menjadi Perdana Menteri dilarang berpolitik serta sempat dipenjara adalah bentuk semi kudeta yang dilakukan oleh militer bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi. Sebelumnya dua partai politik berhaluan Islam yang didirikan *Milli Görüş* yakni MNP dan MSP telah lebih dulu dibekukan. Selanjutnya setelah *Refah Partisi* dibekukan, para kader mendirikan *Fazilet Partisi* yang sempat ikut Pemilu dan masih memperoleh lebih dari 100 kursi parlemen namun kembali dibekukan pada tahun 2000.

Namun lebih dari itu, peristiwa 28 Februari 1996 berupa kudeta terhadap *Refah Partisi* menyisakan trauma pada kelompok-kelompok Islam seperti LSM-LSM dan jaringan-jaringan ekonomi yang berafiliasi ke *Refah Partisi* ikut dibekukan dan disita asetnya karena *Refah Partisi* dianggap ancaman yang membahayakan konstitusi negara sehingga mereka menarik dukungannya pada aktivitas politik *Refah Partisi*. Semua itu akhirnya menimbulkan trauma pula pada sebagian kader *Milli Görüş* sehingga Recep Tayyip Erdoğan dan Abdullah Gul mulai mempertanyakan keabsahan cara perjuangan Islamis *Milli Görüş*. Erdoğan, kader yang dididik oleh Erbakan mengajukan pada *murabbinya* atau mentor politiknya tersebut agar memperhalus metode perjuangan politiknya dengan menerima demokrasi, tidak menonjolkan nilai-nilai dan simbol Islam, merangkul kubu militer dan sekuler serta mengajukan kembali proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa.

²⁵ Asef Bayat. *The Post-Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab World Mean*. April 26, 2011 for free weekly updates from ForeignAffairs.com.

Namun usulan Erdoğan tersebut tidak diterima oleh Erbakan, yang saat itu sedang dipenjara, maka kemudian terjadi perpecahan kader-kader *Milli Görüş* dan masing-masing mendirikan partai politik baru di 2001 yang akan mengikuti Pemilu di 2002. *Saadet Partisi* yang menjaga ciri Islamisnya dibentuk oleh kader-kader Islamis tradisional pada waktu itu dan Erdoğan yang mewakili kelompok Islamis moderat membentuk AKP yang merangkul semua komponen rakyat Turki agar bisa berbuat nyata sebagaimana yang telah dilakukannya ketika menjadi wali kota Istanbul. Erdoğan juga melihat bahwa rakyat tidak mempersoalkan ideologi dan hanya menginginkan pemerintahan yang mampu memperbaiki kondisi ekonomi Turki yang sangat buruk serta memberantas korupsi sehingga bisa menyejahterakan rakyat atau dikenal sebagai *clean government* dan *good governance*. AKP yang berhati-hati dalam strategi perjuangannya membuktikan keberhasilannya ketika memenangkan hasil referendum di Turki pada bulan Oktober yang menyetujui perubahan konstitusi yang lebih mengedepankan kebebasan dan keterbukaan merupakan bukti kemenangan AKP dalam perjuangan ideologisnya yang bertahap. Pilihan aplikasi ideologi AKP dianggap Mehmet Ali Behan lebih realistis dibanding cara yang digunakan oleh *Saadet Partisi*. Menurutnya tidak mungkin sebuah partai politik di Turki mengaplikasikan ideologi Islam secara murni sehingga harus dikemas dalam strategi-strategi politik seperti yang dilakukan AKP. Aplikasi ideologi Islam AKP berupa keadilan dan pembangunan yang mensejahterakan rakyat Turki sebagaimana disebutkan PM Erdoğan bahwa melayani rakyat berarti melayani Tuhan terbukti menyebabkan AKP terus menjadi partai pemenang Pemilu dari tahun 2002 hingga 2009.²⁶

Bila disimpulkan memang AKP sejak awal berdirinya yakni 2001 telah mendeklarasikan diri bukan partai Islam dan para pendirinya di antaranya Huseyin Kansu menyebut AKP sebagai partai Konservatif Demokrat, tetap saja pengamat dan kelompok militer cenderung tidak mempercayai dan meyakini AKP tetap merupakan partai Islamis sebagaimana *Refah Partisi* atau *Fazilet Partisi*, tetap saja pernyataan resmi AKP membuat tidak ada alasan yang cukup bagi militer untuk membekukan AKP, selain itu juga menimbulkan harapan pada kalangan yang lebih luas karena telah berhasil menghilangkan resistensi pada partai Islamis sehingga banyak pula dari kelompok sekuler di Turki yang memberikan suaranya ke AKP.

²⁶ Wawancara dengan Mehmed Ali Behan, guru besar di Universitas Marmara, Istanbul di Bab-el-Aleem, Istanbul. Rabu, 12 Agustus 2009. Pukul 12.00-13.00 waktu Turki.

Selain itu masih banyak rakyat Turki yang mengingat keberhasilan Erdogan memimpin Istanbul ketika menjadi wakil Walikota Istanbul dari segi pengadaan air bersih, pengelolaan sampah dan pengaturan lalu lintas sehingga mengurangi kemacetan. Sehingga di tengah kondisi pemerintahan sekuler yang korup dan terhimpit masalah ekonomi maka rakyat tidak lagi bisa ditakut-takuti bahwa jika memilih partai berhaluan Islam maka mereka akan mendirikan negara Islam. Rakyat tidak melihat kebenaran tuduhan itu sehingga tetap memberikan suaranya ke AKP sehingga memenangkan Pemilu 2002 dan bahkan setelah 5 tahun memimpin Turki, pemerintahan AKP menyadari berbagai masalah dan melihat bahwa dalam 5 tahun pertama AKP tetap mempertahankan demokrasi, menghormati konstitusi sekuler dan tidak kemudian mendirikan negara Islam.

AKP dengan cerdas melakukan uji coba kesiapan rakyat dan terutama juga militer dalam menerima nilai-nilai Islam misalnya ketika pemerintahan AKP hendak membatasi peredaran minuman keras (miras) di daerah-daerah wisata dan mendapat kecaman sangat keras maka kemudian dikoreksi dan ditunda lebih dulu kebijakannya. Demikian juga ketika pada tahun 2008, parlemen sepakat untuk mencabut larangan berjilbab di kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintah, keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD Turki yang sekuler. Pemerintahan AKP pun menerimanya dan perjuangan menghapuskan larangan berjilbab pun tetap dilanjutkan atas nama perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh *civil society* berupa LSM-LSM Islam yang berafiliasi ke AKP.

Ternyata usaha penghapusan larangan berjilbab di tahun 2008 itu menimbulkan kemarahan militer yang kemudian melakukan usaha kudeta militer di tahun 2008 itu juga namun berhasil digagalkan. Hal yang menguntungkan bagi pemerintahan AKP adalah dukungan dari negara-negara Uni Eropa yang walaupun belum mengabdikan proposal bergabungnya secara penuh Turki ke Uni Eropa telah memberikan peringatan keras kepada militer Turki bahwa bila terjadi kudeta militer maka proses masuknya Turki ke Uni Eropa akan semakin sulit. Penegakan demokrasi dengan posisi militer berada di bawah kendali pemerintahan sipil memang merupakan syarat yang masih harus terus dipenuhi Turki selain aspek kesejahteraan ekonomi. Sementara militer Turki di sisi lain mengetahui besarnya keinginan rakyat Turki untuk bergabung ke Uni Eropa, sehingga mau tak mau harus berusaha lebih menahan diri.

Oleh karena itu tidak heran Asef Bayat menilai AKP adalah partai Pos-Islamis yakni secara formal tidak menyebut dirinya partai Islam namun secara substantif nilai-nilai Islam

tercermin dalam banyak pernyataan dan kebijakannya. Pidato Erdogan bahwa melayani rakyat berarti juga melayani Tuhan adalah intisari hadits Nabi SAW: “*sayyidul qaumi khadimuhum*” yakni pemimpin suatu negeri adalah pelayan bagi rakyatnya. Aplikasi ideologi Islam pemerintahan AKP yang membuatnya terkategori ke dalam partai Pos-Islamis memberi pengaruh positif bagi kemenangan AKP. Ciri Pos-Islamis AKP yang mencita-citakan masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam dan bukannya memaksakan berdirinya *Islamic State*, juga Mehmet Altan sebagai penyebab keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

IV.2. Kekokohan dan Independensi Organisasi *Branch* AKP Berpengaruh Positif Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)

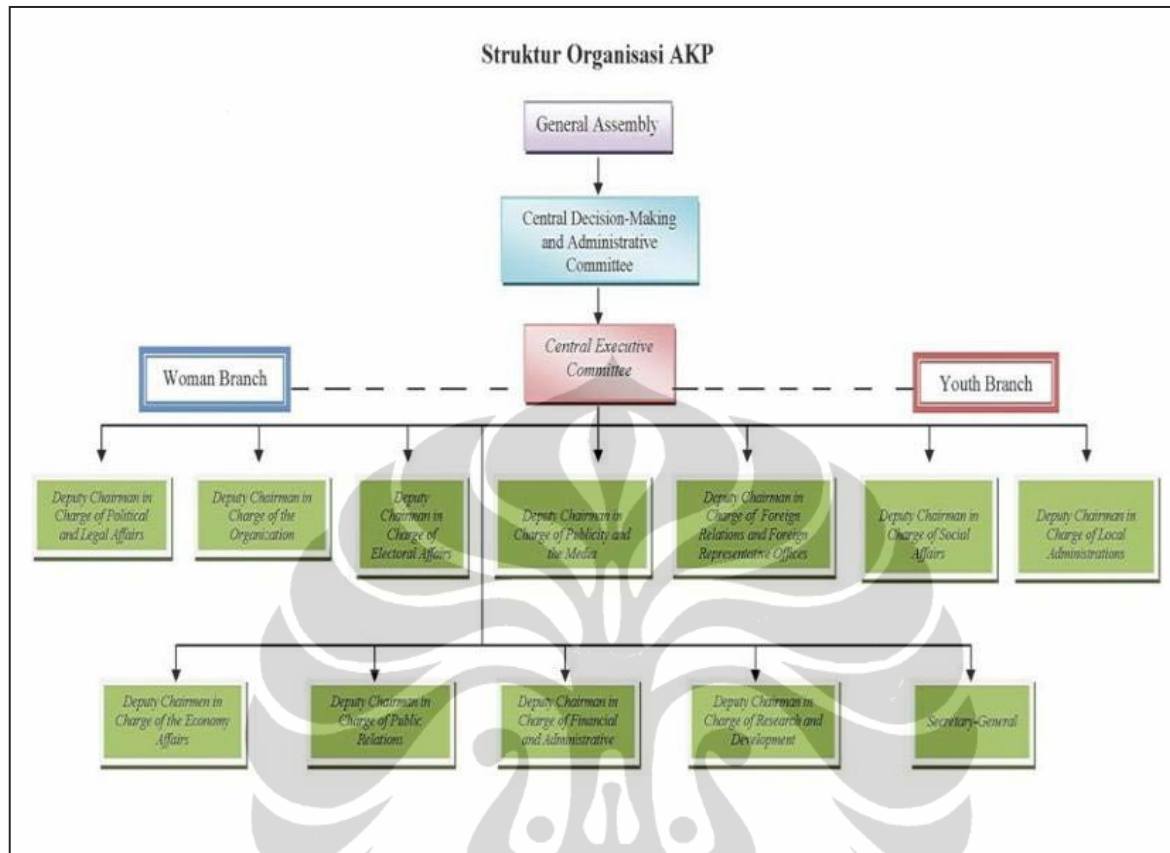
Tidak lama setelah dideklarasikan pada 14 Agustus 2001, AKP segera mengembangkan struktur organisasinya dan dalam satu tahun sudah terbentuk jaringan organisasi secara nasional di seluruh Turki termasuk 2 organisasi sayap yakni *Women Branch* dan *Youth Branch* yang segera memulai aktivitasnya dalam skala nasional. Kelebihan AKP dari segi organisasi adalah karena memiliki 2 organisasi sayap yakni *Woman Branch* dan *Youth Branch* yang independen sehingga optimal berfungsi dan menurut Huseyin Kansu menjadi kunci kemenangan AKP.²⁷

Bila dilihat dari tipologi Duverger, AKP memiliki struktur organisasi “branch” yang bersifat otonom atau desentralistik atau disebut juga partai massa. Demikian pula berdasarkan klasifikasi model partai menurut Richard S. Katz & William Crotty, AKP termasuk *mass-party* (partai massa) yang menempatkan kegiatan penambahan jumlah keanggotaan dalam partai sebagai kegiatan utama yang bersifat sukarela dan tidak eksklusif. Struktur sumber daya didapat dari kontribusi wajib anggota dan sumbangan sukarela simpatisan, dari organisasi-organisasi pendukung partai serta donasi dari donator-donatur yang tidak mengikat.²⁸

²⁷ Huseyin Kansu. *Op. Cit.*

²⁸ Richard S Katz & William Crotty. *Handbook of Party Politics*. Designs and Patents Act, 1988. Hal: 251.

Bagan IV.2. Struktur Organisasi AKP



Sumber: Presentasi Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*). *Introductory Brief About AKP*. 2008.

Kelengkapan struktur di tingkat pusat terlihat dari bagan organisasi AKP di atas. Struktur organisasi AKP di Pusat terdiri dari beberapa lembaga. *Pertama*, *General Assembly* adalah lembaga pengawasan dan pengambilan keputusan tertinggi di partai yang para anggotanya terdiri dari dewan pendiri dan perwakilan yang dipilih oleh pengurus provinsi. Jumlah anggota Majelis Umum tidak boleh melebihi dua kali lipat anggota parlemen. Tugas utama Majelis Umum yang merupakan majelis tertinggi di AKP ini adalah melakukan pemilihan Ketua Umum Partai, anggota tetap dan anggota cadangan CDAC dan *Central Disciplinary Board* (Badan Penegakan Disiplin Pusat) dan juga anggota Badan Penengah Pertikaian di dalam Partai. Melakukan perubahan AD/ART, platform dan program partai, mengesahkan atau menolak pengajuan anggaran ataupun laporan pertanggungjawaban tahunan CDAC. Bila ada kekosongan

keanggotaan karena mundur atau berhalangan maka Ketua Umum Partai yang sekaligus merupakan presiden CDAC bisa memanggil anggota cadangan CDAC.²⁹

Kedua, The Central Decision-Making and Administrative Committee (CDAC) atau Komite Pusat Administratif dan Pengambilan Keputusan merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi kedua dan terdiri dari 50 orang yang dipilih dalam pengambilan suara tertutup. Tugas *CDAC* adalah melaksanakan berbagai keputusan Majelis Umum, mengimplementasikan *platform* dan program-program partai yang disahkan di Majelis Umum, kemudian memastikan organisasi partai dalam kondisi produktif dan efektif serta melakukan koordinasi dengan semua tingkatan organisasi di partai. Selain itu tugas *CDAC* lainnya adalah menetapkan para kader yang akan menjadi calon anggota legislatif atau calon pejabat-pejabat eksekutif.³⁰

Ketiga, Central Executive Committee atau CEC (Komite Pimpinan Pusat) merupakan badan eksekutif tertinggi di AKP yang terdiri dari Ketua Umum partai, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal dan kelompok pembantu Presiden CDAC beserta wakil-wakilnya yang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit sepekan sekali dan bila memenuhi kuorum maka bisa mengambil keputusan. Struktur *Central Executive Committee (CEC)* merupakan *main body* atau struktur utama dan ada dua struktur sayap organisasi yakni *Youth Branch* dan *Woman Branch* yang independen dalam melakukan kegiatan-kegiatannya sehingga dihubungkan dengan garis terputus-putus dengan CEC. Tugas CEC melaksanakan keputusan-keputusan yang sudah diambil oleh Majelis Umum dan CDAC serta membantu menyiapkan agenda CDAC. Selain itu CEC menyelenggarakan pelatihan-pelatihan agar seluruh organisasi dan para anggotanya dapat melakukan pekerjaannya secara efektif kemudian juga melihara hubungan dengan pemerintah dan anggota parlemen. Selain itu CEC juga yang menentukan sikap dan posisi partai terhadap pemerintahan dan memberi masukan berkala kepada Ketua Umum Partai. Para pembantu Ketua Umum atau Presiden CDAC disebut sebagai *Deputy Chairman of Departments* yang terdiri dari 11 Departemen diantara adalah :

1. *Deputy Chairman in Charge of Political and Legal Affairs* (Wakil Ketua CEC Bidang Politik dan Hukum).

²⁹ Cüneyt Yuksel. Deputy Chairman of Political and Legal Affairs Department. *Introductory Brief about Justice and Development Party (AK Parti)*. 2008.

³⁰ *Ibid.*,

2. *Deputy Chairman in Charge of the Organization* (Wakil Ketua CEC Bidang Organisasi).
3. *Deputy Chairman in Charge of Electoral Affairs* (Wakil Ketua CEC Bidang Pemilu).
4. *Deputy Chairman in Charge of Publicity and the Media* (Wakil Ketua Bidang Publisitas dan Media).
5. *Deputy Chairman in Charge of Foreign Relations and Foreign Representative Offices* (Wakil Ketua CEC Bidang Hubungan Luar negeri dan Kantor Perwakilan Luar Negeri).
6. *Deputy Chairman in Charge of Social Affairs* (Wakil Ketua CEC Bidang Sosial).
7. *Deputy Chairman in Charge of Local Administrations* (Wakil Ketua CEC Bidang Administrasi internal Partai).
8. *Deputy Chairmen in Charge of the Economy Affairs* (Wakil Ketua CEC Bidang Ekonomi).
9. *Deputy Chairman in Charge of Public Relations* (Wakil Ketua CEC Bidang Hubungan Kemasyarakatan (Humas)).
10. *Deputy Chairman in Charge of Financial and Administrative Affairs* (Wakil Ketua Bidang Keuangan dan Administrasi).
11. *Deputy Chairman in Charge of Research and Development* (Wakil Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan/Litbang).

Kemudian *Secretary-General* (Sekretaris Jendral). Selain lembaga-lembaga tersebut di atas, ada pula *Referee Board for Democracy within the Party* (Badan Penengah Demokrasi di dalam Partai) dan *Party Disciplinary Boards* (Badan Penegak Disiplin Partai).³¹

Kelebihan AKP lainnya di bidang organisasi adalah 3 lembaga profesional yang dimilikinya yakni lembaga Humas yang melayani konstituen AKP 24 jam non-stop. Sejak AKP berdiri pada 2001, lembaga Humas ini sudah melayani konstituen secara penuh atau menjadi AK *Party Communication Center* (AKİM). Humas AKP bisa dihubungi melalui saluran resmi melalui telepon dan *short message service* (sms) yang direspon dengan cepat melalui petugas yang secara bergiliran *stand-by* di kantor selama 24 jam dan lembaga tersebut ada di 81 propinsi di seluruh Turki untuk menampung aspirasi rakyat. Selain Humas, AKP juga memiliki lembaga profesional untuk mengadvokasi regulasi bagi para penyandang cacat *Özürlüler Kordinasyon Merkezi* (ÖKM atau Pusat Kordinasi Orang Cacat) dan lembaga yang ketiga adalah lembaga yang mengurus para lansia yang berusia 65 tahun ke atas *Yaşlılar Kordinasyon Merkezi* (YKM

³¹ *Ibid.*,

atau Pusat Kordinasi Lansia). Lembaga ini melakukan kontak langsung dengan para lansia dan memberikan beragam aktifitas kepada mereka.³²

AKP memastikan di semua lini struktur masyarakat terbentuk unit partai yang menjadi representasi terkecil partai seperti pendirian *caravan* (pos pemenangan) dengan jumlah dan manajemen yang sangat signifikan. Kemudian memberikan pembekalan muatan-muatan dan ketrampilan berkampanye seperti pengetahuan tentang capaian yang sudah dilakukan dalam masa pemerintahan Erdoğan dibandingkan dengan sebelum AKP berkuasa dan rencana jangka panjang pemerintahan AKP menuju Turki 2023. Khusus menjelang Pemilu dilakukan *training* khusus bagi para anggota yang dilakukan di *political academy* dalam jangka waktu 3 bulan.

Terkait dengan jumlah kepengurusan struktural di organisasi pusat AKP yang memiliki 3 pilar yakni *Main Board*, *Youth Branch* dan *Woman Branch* maka di masing-masing struktur tersebut terdiri dari 50 orang. Di *il* (provinsi) Istanbul misalnya ada 39 distrik (*ilce*) dan masing-masing distrik memiliki 30 pengurus untuk *Main Board* di tingkat distrik, 30 orang untuk *Youth Branch*, 30 untuk *Woman Branch*. Setiap *ilce* (distrik) terbagi atas beberapa *neighborhood* (*mahalle*) dan di 39 distrik yang ada di Istanbul bila digabungkan memiliki lebih dari 1000 *mahalle* atau kecamatan dengan di setiap terdapat 10 orang pengurus *Main board*, *Youth Branch* dan *Woman Branch*.

Komposisi minimal kepengurusan di organisasi AKP tersebut membuat partai ini memiliki ribuan orang yang akan bekerja di garda terdepan partai, karena untuk menjaga *box* atau gerai informasi AKP tentu saja diperlukan para *member* (anggota) dan *volunteer* (relawan). AKP juga menganggap pemuda dan wanita adalah segmen penting untuk mengkapitalisasi suara sehingga memberikan ruang berkiprah yang luas, keleluasaan dan independensi bagi segmen ini melalui *Youth Branch* dan *Women Branch*, yang bila dilihat terlihat dari strukturnya sejajar dengan wakil ketua namun tidak terpisah dari strukur umum AKP.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Bilal Erdoğan, putra Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan berani menyebutkan bahwa selain faktor pemimpin kharismatis yang dimiliki AKP maka faktor organisasi AKP yang kuat dan lengkap serta terorganisir baik turut menjadi penyebab kemenangan AKP dalam setiap pemilu di Turki sejak 2002.³³ Omer Faruk Kalayci³⁴,

³² *Ibid.*

³³ Dialog dengan Bilal Erdoğan di Istanbul, 9 Juni 2011. Pukul 12.00 waktu Turki.

Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri AKP DPW Istanbul, bahkan meyakini bahwa faktor kekuatan struktur organisasi AKP berpengaruh besar pada kemenangan AKP selain faktor kepemimpinan:

“The reason of our success we can shortly say are the leadership, the political structure and our organization capability. Yah, we have the most powerfull organization as a political party in Turkey. For example we have in Istambul 39 districts and in all districts we have organization. We devide into 3 part, our main body, our youth branch, and our woman branch. In our success, our youth and woman branch are so important. Our political organization’s powerfull I said to you, our youth branch and women branch is very important as I said before.”

Alasan bagi kemenangan kami secara singkat dapat kami katakan adalah faktor kepemimpinan, struktur politik dan kemampuan organisasi kami. Ya kami adalah partai politik dengan organisasi terkuat di Turki. Sebagai contoh misalnya, kami memiliki di Istanbul terdiri dari 39 distrik dan kami memiliki organisasi di setiap distrik yang terdiri dari 3 bagian, struktur utama, organisasi “sayap” pemuda dan organisasi “sayap” perempuan yang sangat berperan penting dalam keberhasilan kami.

AKP memiliki kelengkapan struktur organisasi yang menjalankan fungsinya masing-masing baik di pusat maupun di 81 *il* (Provinsi) dan *ilce* (seperti Kabupaten) yang merupakan pembagian wilayah administrasi satu tingkat di bawah provinsi. Setiap provinsi memiliki jumlah kabupaten yang berbeda-beda tergantung luas provinsinya, misalnya di Istanbul ada 39 *ilce* atau kabupaten. Di setiap kabupaten juga ada tiga bagian struktur yakni struktur utama *youth branch* (struktur sayap pemuda) dan *woman branch* (struktur sayap perempuan). Setiap bagian struktur di kabupaten memiliki 30 orang pengurus yang terpilih.³⁵

Selain masing-masing Departemen di CEC AKP berjalan, maka badan-badan organisasi lainnya berfungsi dengan baik seperti misalnya Humas yang menjadi pusat informasi partai yang siaga 24 jam melayani masyarakat. Humas siap memberikan klarifikasi jika ada yang bertanya tentang fitnah atau berita buruk yang ditujukan terhadap AKP, namun juga siap menjadi mediator kepentingan rakyat untuk disampaikan ke anggota legislatif AKP maupun pemerintah. Kemampuan Humas memberikan informasi tentang jati diri AKP, visi, misi dan program-

³⁴ Wawancara dengan Omer Faruk Kalayci, Ketua Departemen Hubungan Luar Negeri AKP DPW Istanbul. Kamis, 14 Agustus 2009.

³⁵ Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Jakarta, 2011. Hal: 141.

program pemerintah yang sedang dijalankan ikut berkontribusi mengatasi usaha militer dan Mahkamah Konstitusi yang akan membekukan AKP.

Selain Humas yang berfungsi sebagai pusat informasi, badan sosial AKP untuk membantu para orang tua lanjut usia dan penyandang cacat juga dirasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Ditambah lagi para aktivis, anggota dan relawan perempuan yang bergabung dalam *Woman branch* benar-benar turun membantu berbagai persoalan masyarakat, demikian pula dengan para pemuda yang menjadi pengurus *Youth branch* selain ikut mengunjungi masyarakat juga aktif di klub-klub olah raga, seni dan ilmiah di kampus-kampus dan sekolah-sekolah.

Namun Ozkaya mengatakan bahwa *Saadet Partisi* memiliki organisasi yang lebih kokoh dibanding AKP, walaupun Ozkaya menilai struktur organisasi AKP juga cukup baik dan bukan merupakan *Erdoğan's Fans Club Party*:

*"No, not bubble party. Actually, AK Party has also good organization. But we can not tell that AK Party has very powerfull organization like Saadet Parti. Saadet has more powerfull organization."*³⁶

Bukan, bukan *bubble party*. AKP sebenarnya juga memiliki organisasi yang baik, namun tidak bisa dikatakan bahwa AKP memiliki organisasi yang kuat seperti *Saadet Partisi*. *Saadet Partisi* memiliki organisasi yang lebih kuat.

Namun faktanya menunjukkan bahwa kedua partai yang sama-sama didirikan oleh kader-kader *Milli Görüş* memiliki kecenderungan perolehan suara yang sangat berbeda sejak Pemilu pertama yang mereka ikuti yakni Pemilu 2002 dan 2007. AKP terus menerus menjadi pemenang dengan perolehan suara 34% di 2002, 47% di 2007 dan 39% di 2009, sementara perolehan suara *Saadet Partisi* cenderung statis yakni berkisar di angka 2% sehingga gagal menempatkan wakilnya di parlemen pusat. Bila ditilik dari tipe organisasinya, *Saadet Partisi* terkategori berbentuk *cell* sehingga sangat sentralistik dan relatif tertutup sehingga tidak leluasa bergerak, sementara sebagaimana diuraikan di awal AKP memiliki bentuk organisasi *branch* dan bersifat lebih terbuka dan leluasa karena desentralistik.

Oleh karena itu bila disimpulkan, bentuk organisasi AKP walaupun tidak sekokoh dan sesolid *Saadet Partisi* berfungsi sebagai mesin partai yang efektif. Soliditas dan kerapian

³⁶ Wawancara dengan Mustafa Ozkaya. Direktur TV-Net. Istanbul, Turki. Kamis, 13 Agustus 2009.

organisasi di *Fazilet Partisi* diwarisi oleh AKP karena para pendiri AKP sebelumnya adalah para kader aktivis di *Milli Gorus* dan partai-partai politik yang dilahirkannya yakni *Milli Slamet Partisi*, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi*. Bedanya kini bila dilihat dengan teori Duverger, AKP memperbesar dan mengubah bentuk organisasi *cell Fazilet Partisi* menjadi model *branch* yakni dengan memberi keleluasaan dan otonomi serta independensi pada struktur organisasi misalnya di DPW Istanbul, Omer Faruq Kalaychi mengatakan bahwa pemilihan Ketua DPW berlangsung demokratis dengan syarat seorang calon memiliki dukungan basis massa dengan jumlah dukungan minimal yang disepakati. Semua proses tersebut berlangsung tanpa diintervensi oleh struktur pusat atau DPP AKP. Otonomi yang tetap dalam koordinasi serta arahan secara normatif telah memberikan kesempatan kepada struktur-struktur organisasi cabang untuk berinovasi demi kemajuan partai.³⁷

Hal tersebut secara internal berpengaruh positif bagi para kader AKP. Demikian pula bentuk *Youth Branch* dan *Woman Branch* yang independen namun tetap terkoordinasi dengan Ketua Umum partai yakni Erdogan memberikan pengaruh yang positif pula. Kemudian pengaruh positifnya kepada eksternal adalah berupa layanannya ketika organisasi AKP yang lengkap termasuk Badan Humas yang bertugas selama 24 jam menerima masukan, keluhan permintaan tolong maupun kritikan dan kecaman terhadap pemerintahan AKP. Demikian pula dengan Lembaga yang melayani para Lansia atau warga lanjut usia dan lembaga yang membantu orang cacat. Lembaga-lembaga tersebut telah memberikan kesempatan bagi banyak relawan yang terekrut untuk terlibat dalam pengelolaan organisasi partai. Sedangkan masyarakat yang sangat terbantu dengan pelayanan dan advokasi badan-badan organisasi maupun para anggota legislatifnya menjadi terpengaruh secara positif untuk memberikan dukungannya pada AKP. Sehingga bila disimpulkan pengaruh organisasi yang positif bagi kemenangan Pemilu AKP di Pemilu 2002 dan 2007 adalah dengan independensinya yang melahirkan inovasi-inovasi kerja serta kapasitasnya yang besar sebagai mesin partai, sarana rekrutmen dan berperannya para relawan dan anggota yang baru bergabung serta pelayanan yang diberikan struktur organisasi partai kepada masyarakat. Kenyataan di atas juga membantah asumsi bahwa partai yang memiliki tokoh besar cenderung mengabaikan faktor lainnya karena mengandalkan kemenangan Pemilunya hanya pada daya tarik pemimpinnya.

³⁷ Sitaresmi S. Soekanto. *Pengembangan Budaya "Knowledge Sharing" Melalui Lima "Enabler" Ba Nonaka Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. Tesis Program Pascasarjana, Depok: F. Psikologi UI, 2006

IV.3. Perluasan dan Keberagaman Basis Massa AKP Berpengaruh Positif Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)

AKP yang berasal dari gerakan *Milli Görüş* dan partai-partai Islam sebelumnya (MSP, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi*) merupakan partai politik yang didirikan oleh kelas menengah berpendidikan. Partai ini memiliki basis massa utama dari kelas menengah yang terus bertambah seiring dengan membaiknya perekonomian dan meningkatnya taraf pendidikan sejak awal 1970-an. Hal tersebut sesuai dengan teori Lipset bahwa salah satu indikator kelompok *middle class* (kelas menengah) adalah meningkatnya lama masa studi rata-rata di sebuah negara.³⁸ Data statistik di Turki di tahun 2007 menunjukkan bahwa rakyat Turki yang masih aktif berpartisipasi dalam pendidikan formal dan non formal adalah dari kelompok lulusan pendidikan tinggi adalah sebesar 44,8% dan rata-rata yang masih aktif menempuh pendidikan adalah di usia rata-rata 18-24 tahun sebesar 40,5% dan tingkat partisipasi pendidikan bagi laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan.³⁹

Tanpa mengabaikan lapisan masyarakat kelas bawah (*lower class*) dan kelas atas (*upper class*), penggerak utama perubahan dan kemajuan di suatu negeri adalah basis massa masyarakat kelas menengah (*middle class*). Oleh karena itu basis massa utama AKP di Turki yang mayoritas berasal dari kelas menengah nampak sangat mempengaruhi kemenangan Pemilu AKP sejak Pemilu 2002, Pemilu 2007 hingga Pemilu lokal 2004 dan 2009. Namun demikian AKP juga memiliki basis massa yang beragam, tak terkecuali dari kalangan kelas bawah dan juga terdiri dari beragam profesi mulai dari intelektual muslim dan pengusaha hingga guru, polisi dan penjaga toko. Selain itu AKP juga mengoptimalkan jaringan-jaringan LSM berbasis Islam dan jaringan *grass root* (akar rumput) yang memiliki akar kultural, kepribadian dan budaya Islam serta kelompok-kelompok religius yang memiliki komitmen kuat pada terwujudnya partisipasi langsung dan keadilan sosial di masyarakat. AKP juga mampu meraih dukungan dari jaringan lembaga-lembaga Islam dan tarekat-tarekat Islam, sehingga jamaah yang besar seperti Said Nursi yang kini terwujud dalam *Fetullah Gulen* ataupun *Hayrat Foundation* juga menjadi pendukung utama AKP. Selain itu juga Tarekat Naksabandiyah menjadi pendukung AKP. Selain memiliki basis massa dari kalangan religius AKP juga mendapat dukungan dari basis massa

³⁸ Seymour Martin Lipset. *Political Man, Basis Sosial Tentang Politik* (ed. Terj). Pustaka Pelajar, 2007. Hal: 24-25.

³⁹ www.turkstat.gov.tr 2/11/2008 17:13:00. Adult Education Survey. By the results of 2007.

nasionalis-sekuler yang sebelumnya merupakan konstituen CHP dan MHP. Keberhasilan AKP memperbaiki perekonomian menyebabkan mereka mendapatkan dukungan dari basis massa tersebut.⁴⁰

AKP berhasil memperoleh dukungan dari basis massa yang beragam karena memiliki prinsip-prinsip universal yang bisa diterima semua golongan yakni memperjuangkan perbaikan ekonomi dan mensejahterakan rakyat Turki:

*“AKP has something to say for all of the groups. Every group can agree on some basic ideas of AKP. We see that they are religious people. So it’s good for us. We never seen religious people in power. So we want to make them in power. And also AK party has a moderate policy. Modern, but also moderate that change person to person, that can meet with different needs. For instance, you know CHP? Some of the people who are interesting in bussiness economic they are pro for CHP for many years. Some of them said before the election that we support AKP because of economic development, but we will our vote to CHP because of ideological reason”.*⁴¹

AKP memiliki satu hal yang bisa diterima semua orang. Setiap kelompok dapat menyetujui beberapa ide dasar AKP. Kami melihat mereka adalah orang-orang yang relijius. Maka hal itu baik bagi kami karena kami belum pernah melihat sebelumnya orang relijius berada di kekuasaan, maka kami ingin menjadikan mereka tetap berkuasa. AKP juga memiliki kebijakan moderat. Modern tapi juga moderat yang bisa memenuhi setiap kebutuhan orang yang berbeda-beda. Misalnya, kamu tahu tentang CHP? Beberapa orang pelaku bisnis sangat mendukung CHP selama bertahun-tahun, namun kini sebelum pemilu sebagian mereka mengatakan bahwa kami mendukung AKP karena pembangunan ekonominya. Tapi kami memilih CHP karena alasan ideologis.

Banyak orang yang semula adalah konstituen CHP dan MHP kemudian memilih AKP dan beralih demi kebaikan masa depan anak-cucu mereka karena AKP terbukti mampu mensejahterakan rakyat Turki walaupun basis ideologi mereka berbeda namun secara realistis mereka memilih AKP. AKP menurut Julie Hwang memiliki kemampuan merangkul semua lapisan masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau

⁴⁰ Profesor Özer Sencar . *Op. Cit.*

⁴¹ “Focus Group Discussion” dengan Mahasiswi-mahasiswi Turki: Nuseybe, Mahasiswi Kedokteran (21 thn), Fatmanur Samasti Mahasiswa S2 Sosiologi dan sudah diterima di program Ph.D (26 tahun), Nagehan, Mahasiswi Pendidikan Taman Kanak-Kanak, Hatice, Mahasiswi Filsafat, Fatma Esmâ, Mahasiswi Psikologi. Fatma Zehra, Mahasiswi Pendidikan Kimia, pengurus *Youth Branch* di AKP dan Sena Nur, mahasiswi Hubungan Internasional dan sekaligus Psikologi yang sedang mengikuti *Youth Camp III* (dihadiri 110 peserta dari 22 negara). Restaurant Paparonz, Depok Mall 19 Januari 2010 jam 20.00-22.00.

rendah dan relijius atau sekuler dan luasnya dukungan basis massa yang dimiliki oleh AKP berpengaruh signifikan pada kemenangan pemilu AKP.⁴²

“I think that the raise of educated is definitely part of AKP’s social base. And so the muslim middle class is predict target AKP. The majority urban educated but not just the muslim middle class but also lower class but no in the upper class cause upper class is secular.”

Saya berpikir bahwa meningkatnya jumlah orang berpendidikan menjadi basis utama AKP. Dan oleh karena itu kelas menengah Muslim menjadi target utama AKP. Secara umum juga masyarakat kota berpendidikan, jadi bukan hanya kelas menengah Muslim yang taat. AKP juga berhasil meraih basis massa dari kelas bawah, namun tidak demikian halnya dengan kelas atas. Karena kelas atas sangat sekuler.

Keunggulan AKP pada basis sosialnya yang berakar kuat di masyarakat membuat AKP lebih berhasil dibandingkan pendahulunya, *Refah Partisi*. Jumlah muslim di Turki saat ini adalah 99% dari 74 juta penduduk Turki. AKP bahkan didukung oleh kaum minoritas Kristen dan Yahudi yang hanya berjumlah 1% di Turki, karena menganggap AKP dan Erdoğan inklusif dan tidak diskriminatif serta mampu menciptakan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi.⁴³ Di Turki saat ini terjadi peningkatan jumlah kelas menengah sebagaimana dalam buku Vali Nasr sehingga menyebabkan kemajuan yang dicapai umat Islam di Turki dalam melakukan interaksi dengan golongan masyarakat yang non Islam seperti masyarakat Uni Eropa jauh lebih matang, rasional dan tidak emosional.⁴⁴

Dari data statistik didapati bahwa faktor pendidikan dan pendapatan menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Turki berada di kelas menengah dibanding kelas bawah.⁴⁵ Fenomena kelas menengah di perkotaan yang berpendidikan membuat mereka lebih rasional dalam memilih partai politik di Pemilu. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi AKP dan menyebabkan basis massa menjadi faktor yang signifikan berpengaruh pada kemenangan pemilu AKP. Selain itu AKP memang tetap mempertahankan kalangan kelas menengah relijius yang tinggal di perkotaan sebagai basis utamanya karena akan menjadi penyeimbang di antara kubu nasionalis-sekuler dan kelompok Islam tradisional. Akan tetapi kalangan kelas menengah-relijius tetap

⁴² Wawancara dengan Julie Chernov Hwang. MD Building, Jakarta. Rabu 20 Januari 2010.

⁴³ Wawancara dengan Greg Fealy pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 di Munas PKS II, Ritz Carlton, Jakarta. Pukul 16.00-16.30 WIB.

⁴⁴ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. Free Press, New York. 2009. Hal: 232.

⁴⁵ Turkish Statistical Institute, Prime Ministry, Republic of Turkey. January 25 2010. Pukul 10.00.

menjadi basis utama AKP dan menjadi perekat dan penyeimbang di antara kelompok Islam tradisional (tarekat dan jamaah) dan kubu nasionalis-sekuler (mantan konstituen CHP dan MHP). Menurut Mehmet Altan, Turki harus memunculkan keseimbangan antara konservatisme dan demokratisasi dengan cara di satu sisi mempertahankan relijiusitas namun di sisi lain mengikuti sistem demokrasi yang berlaku. Kelas menengah relijius perkotaan diharapkan dapat membangun Turki sehingga menjadi contoh bagi dunia Islam, apalagi di antara 57 negara muslim terbesar di dunia, Turki memiliki produktivitas tertinggi di bidang ekonomi dan industri, bahkan berada di peringkat ke-6 di Eropa dari segi pertumbuhan ekonomi.⁴⁶ Menurut Ihsan Dagi pergeseran ideologi AKP bila dibandingkan partai pendahulunya *Fazilet Partisi* dengan tidak menunjukkan ciri-ciri kelompok Islamis menghilangkan resistensi kelompok masyarakat yang semula merupakan basis massa CHP atau MHP kini beralih ke AKP. Terlebih lagi Profesor Sencar menyatakan di Turki telah terjadi perubahan polarisasi ideologi dari semula ideologi kanan dan kiri, kemudian sekuler dan anti sekuler yang diidentikkan dengan Islamis kini berganti menjadi antara yang pro dan anti AKP atau antara yang pro dan anti Erdoğan.

Hal yang menarik adalah bahwa cukup banyak basis massa *Fazilet Partisi* dengan karakteristik kader *Milli Görüş* yang loyal yang memilih AKP dan berjumlah sekitar 15 persen dari seluruh suara yang diperoleh AKP di Pemilu 2002, sementara yang memilih *Saadet Partisi* yang menurut Ihsan Dagi didirikan oleh kader-kader *Milli Görüş* yang Islamis tradisional hanya sejumlah 2% karena perolehan suara *Saadet Partisi* di Pemilu 2002 hanya 2% sehingga tidak lolos batas ambang masuk parlemen sebesar 10%. Bahkan menurut Sencar basis massa sejumlah 15% tersebut yang terdiri dari masyarakat kelas menengah, urban dan relijius adalah pendukung setia AKP yang kemudian menarik basis massa lainnya terutama dari *lower class* (kelas bawah) sejumlah 40% dan sisanya adalah basis massa yang rasional dan pragmatis serta tidak loyal seperti misalnya *swing voter* dari konstituen CHP dan MHP. Sementara basis massa dari kelas bawah tertarik memilih AKP karena merasakan kepedulian sosial dari para kader AKP melalui kegiatan-kegiatan sosialnya terutama para aktivis perempuan AKP di *Woman Branch*. Selain itu mereka juga berharap banyak bahwa kader-kader AKP yang berasal dari *Milli Görüş* yang dikenal memiliki integritas bila menang akan mampu menghentikan korupsi dan memberikan harapan tentang perbaikan ekonomi. Bila dilihat komposisinya, maka sebagian besar pemilih

⁴⁶*Ibid.*

AKP adalah pemilih pragmatis rasional yang erat kaitannya dengan keinginan akan perbaikan kehidupan ekonomi mereka.

Oleh karena itu di Pemilu 2002 AKP memperoleh suara sebesar 34% dan CHP yang semula adalah partai pemerintah hanya memperoleh sebesar 19% di Pemilu 2002, sementara partai konservatif sekuler MHP hanya memperoleh 8,3% suara sehingga tidak menempatkan seorangpun wakilnya di parlemen karena tidak lolos *parliamentary threshold* 10%. Namun dinamika terjadi dan MHP yang semula tidak memperoleh kursi di Pemilu 2002 berhasil meraih suara sebesar 14,3% di Pemilu 22 Juli 2007 serta memperoleh 71 kursi di parlemen.

Hal tersebut ada kaitannya dengan basis massa pemilih masing-masing partai. Partai-parati oposisi baik CHP maupun MHP menekankan sekali tentang bahaya kemungkinan agenda terselubung kelompok Islamis yang kini berada di AKP. Bahkan pada tahun tersebut terjadi upaya kudeta militer namun berhasil diatasi, demikian pula pada 2008 AKP berhasil lolos dari upaya pembekuan yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi atas usulan militer. Semua gejolak tersebut ditambah efek krisis ekonomi global yang juga terasa di Turki antara lain menyebabkan berkurangnya dukungan suara dari kelas menengah atas di kota-kota besar Turki. AKP kehilangan pengaruhnya di dua sisi metropolitan yakni Adana dan Antalya. Namun di kota-kota besar tersebut AKP masih memiliki dukungan yang sangat kuat dari kaum profesional dan pekerja konservatif menengah bawah.⁴⁷

Oleh karena itu menurut Mehmet Altan yang dapat menjadi penengah antara kelompok kelas menengah atas dan kelas atas yakni elit Kemalis sekuler dan kelompok konservatif adalah keberadaan *urban religiosity* atau masyarakat perkotaan, kelas menengah berpendidikan yang taat beragama, toleran dan inklusif. Seiring dengan membaiknya perekonomian Turki dan sebagaimana Vali Nasr mengatakan bahwa terjadi “the rise of new Muslim middle class” di Turki, maka kelompok urban religius tersebut selain menjadi mediator untuk mengatasi konflik antara barak militer (simbol militer sekuler) dan masjid (simbol Islamis), juga sekaligus menyebabkan keberhasilan perolehan suara AKP di Pemilu dan Pemilihan Lokal para senator karena menjadi basis massa utama AKP.

Bila disimpulkan maka dengan menyebut dirinya sebagai partai konservatif demokrat, AKP berhasil mempertahankan basis massa tradisionalnya yang sejak awal memilih *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi* yakni para Muslim konservatif di perkotaan sebagai basis massa

⁴⁷ www.hidayatullah.com dan www.detikislam.com, 08 Juni 2008

utamanya. Basis massa utama AKP adalah kelas menengah dengan karakteristik yang disebutkan oleh Martin Lipset dan Daniel Lerner namun memiliki satu tambahan karakteristik yakni religius seperti diungkapkan oleh Vali Nasr, Esposito, Asef Bayat dan Mehmet Altan serta berbeda dengan teori Huntington bahwa kelas menengah anti agama. Kelompok basis massa utama AKP menjadi *vote getter* yang menjadi penghubung sekaligus penarik *floating mass*.

Namun kemampuan AKP memperluas basis massa membuatnya juga memperoleh dukungan suara dari kelas bawah di perkotaan dan di pedesaan serta dari kantong-kantong Muslim sekuler di Izmir dan Ankara selain Istanbul yang memang merupakan basis utama AKP. Oleh karena itu secara keseluruhan di 81 Provinsi di Turki, AKP memperoleh dukungan yang merata dan berpengaruh positif di Pemilu 2002 ketika AKP memenangkan Pemilu dengan 34%. Selanjutnya keberhasilan pemerintahan AKP memimpin selama 2002 hingga 2007 juga berpengaruh positif kepada AKP di Pemilu 2007 mendapatkan dukungan pula dari Muslim sekuler yang sebelumnya mendukung CHP dan MHP serta kelompok minoritas Nasrani dan Yahudi yang berjumlah 1% dari 74 juta penduduk Turki. Aspek keberagaman basis massa lintas kelas dan ideologi juga turut memastikan keunggulan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

IV.4. Aspek Keragaman dan Kemudahan dalam Sistem Rekrutmen Berpengaruh Positif Pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)

AKP memberikan peluang yang sangat luas bagi setiap warga Negara Turki untuk bergabung dengannya baik sebagai *supporter* (relawan), *member* (anggota) maupun *activist* (pengurus). Hal itu sesuai dengan teori Alan Ware bahwa partai-partai konservatif seperti misalnya di Inggris yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya kini memiliki jumlah anggota yang relatif besar.⁴⁸ Dalam kaitannya dengan kegiatan kampanye menjelang Pemilu, peran serta para aktivis partai sangat penting terutama ketika partai tidak mampu membiayai tenaga profesional untuk keperluan kampanye. Keterbatasan pendanaan juga memaksa struktur organisasi di tingkat kecamatan dan kota untuk menggunakan aktivis-aktivis relawan yang tidak dibayar dalam kampanye. Pada umumnya para politisi mendekati konstituen atau calon pemilih dengan mendatangi rumah-rumah, desa-desa dan warung-warung kopi di Turki karena interaksi *face to face* sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan. Para aktivis partai yang militan

⁴⁸ Alan Ware. *Partai Politik dan Sistem Partai*. Oxford University Press.1996. Hal: 66.

dan para relawan yang ingin membantu partai sangat dibutuhkan karena berjalan mengunjungi rumah-rumah membutuhkan banyak tenaga.⁴⁹

Walaupun partisipasi aktivis partai ini ada yang benar-benar sukarela, kajian literatur tentang partai politik menengarai adanya penggunaan insentif material oleh para politisi untuk memotivasi para aktivis bekerja di pemilu dan aktivitas kepartaian. Antara lain tulisan Alan Ware (1996), Eppstein (1986), Steed (1998) menyatakan walaupun ada penurunan peran insentif material bagi aktivis politik di negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, tidak tertutup kemungkinan kondisi yang berbeda di negara-negara lain. Di Turki misalnya tidak ada aturan yang sistemik dalam hal rekrutmen aktivis partai, namun beberapa pejabat partai dan pejabat publik menyatakan bahwa insentif material di Turki masih memainkan peranan cukup penting. Di dalam setiap kampanye, walaupun ada partisipasi para aktivis militan yang luar biasa dan sejumlah relawan yang sukarela, tetap ada pula yang mendapatkan honor dari para anggota legislatif atau insentif baik material maupun berupa tawaran mendapatkan pekerjaan dan beberapa proyek di pemerintahan nantinya jika sang kandidat terpilih.⁵⁰

Bila dilihat dari sistem rekrutmen dan kaderisasinya sekilas AKP seolah tidak selektif, namun bila diamati sebenarnya AKP tetap melakukan seleksi dengan cara mengkategorisasi. Prioritas rekrutmen dalam jumlah massal mereka tujukan pada kategori kelompok relawan yang menghimpun berbagai jenis manusia mulai dari orang yang bertato hingga perempuan berpakaian *sexy* yang kesemuanya pro AKP dan dilibatkan di kegiatan-kegiatan yang bersifat *charity*, kegiatan sosial, kegiatan seni dan budaya serta kegiatan politik. Kemudian mereka menerapkan pola rekrutmen yang berbeda untuk anggota dan pengurus inti karena para kader ideologisnya memiliki visi dan misi yang jelas.

Solusi yang dimiliki AKP dalam pengelolaan relawan yang terekrut secara masif adalah dengan melibatkan mereka di wadah-wadah yang dimiliki AKP yang berjumlah sangat memadai. Misalnya, ada banyak orang yang bisa direkrut secara profesional di lembaga Humas yang ada di 81 provinsi yang ada di Turki. Demikian pula di lembaga penyandang cacat dan lansia yang dimiliki AKP. Belum lagi yang bisa tertampung di organisasi sayap mereka *Youth*

⁴⁹ Ozge Kemahlioglu. *Intra-party Competition and Clientelism: An Analysis of Public Sector Employment in Argentina and Turkey* (Department of Political Science, Columbia University "Prepared for delivery at the 2005 Annual Meeting of the American Political Science Association, September 1 - September 4, 2005. Copyright by the American Political Science Association." *Intra-party Competition and Clientelism: An Analysis of Public Sector Employment in Argentina and Turkey*). Hal: 10-11.

⁵⁰ *Ibid.*, Hal: 12

Branch dan *Woman Branch*. Sementara untuk bergabung sebagai anggota dan pengurus inti memang umumnya didasari oleh alasan ideologis dan merekalah yang memiliki rentang kendali terhadap relawan yang berjumlah sangat banyak tersebut. Dari penelitian Prof. Onze Sencar, pemilih AKP yang memiliki ideologi *Milli Görüş* hanya berkisar di angka 15%.

Oleh karena itu AKP memberikan peluang yang sangat luas bagi setiap warga negara Turki untuk bergabung dengannya baik sebagai relawan, anggota maupun pengurus. Di setiap stand atau gerai baik di musim kampanye maupun tidak AKP selalu membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin menjadi anggota dan relawan AKP serta data-data diri mereka ke dalam *database* anggota dan relawan yang setiap saat akan mendapatkan informasi peristiwa, kegiatan dan temu tokoh AKP. Jumlah anggota AKP saat ini di seluruh Turki ada 5 juta (10% dari suara pemilih) dan di Istanbul hampir 1,5 juta, sementara misalnya partai kompetitor utama CHP memiliki 700 ribu anggota di seluruh Turki.

Siapapun yang bergabung dengan AKP memiliki hak yang sama untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi di partai. Kalayci menyebutkan tidak ada penjenjangan anggota di dalam AKP sehingga memudahkan AKP untuk menerima siapa saja yang memiliki visi dan misi yang sama untuk terlibat di struktur partai berdasarkan profesionalitasnya. Bagi para anggota dan pengurus diadakan pertemuan-pertemuan rutin pekanan di tingkat *Mahalle*, sementara mobilisasi relawan terutama bila ada kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Di 39 distrik di Istanbul ada 1,5 juta anggota dan yang aktif menjadi *volunteer* (relawan) sekitar 200.000 yang tiap pekan datang ke partai untuk menjaga kotak suara di setiap tempat pemungutan suara. Di Istanbul ada 31.000 kotak suara dan di setiap tempat pemungutan suara ada minimal 3 orang relawan dan artinya untuk pemungutan suara AKP punya lebih dari 100.000 relawan yang tidak dibayar. Di kantor DPW Istanbul ini misalnya ada beberapa orang sekretaris eksekutif yang dibayar profesional, tetapi para *member of board* atau para ketua di kepengurusan DPW tidak dibayar dan memperoleh pendapatannya di luar partai seperti Omer Faruk yang dalam kesehariannya adalah seorang pengacara.⁵¹

Walaupun di dalam kegiatan kampanye Turki menurut Ozkaya dan narasumber lainnya boleh dibilang tidak ada “money politic”, faktor *material incentive* secara tidak langsung masih menjadi alasan dominan banyak orang memilih atau bergabung ke dalam AKP karena bila

⁵¹ Erza Saladin, Suhfi Majid dan Tim Istanbul. Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. *Op.Cit.* Hal: 146.

memilih AKP mereka yakin kondisi perekonomian Turki akan membaik dan dapat menjaahaterakan mereka. Namun demikian tetap ada kekhawatiran tentang peluang AKP untuk memenangkan Pemilu ketiga kalinya di tahun 2011 karena dianggap Mustafa Ozkaya, kader AKP dan juga Direktur TV-Net, AKP kurang selektif dalam merekrut orang-orang yang bergabung dengan AKP baik sebagai relawan, anggota, aktivis maupun dalam hal rekrutmen pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif. Menurut Ozkaya sebagai partai terbesar saat ini, AKP memang memiliki daya tarik yang sangat besar bagi orang-orang yang membutuhkan kendaraan politik untuk mengejar keinginan pribadinya, sehingga di AKP ikut bergabung juga orang-orang yang sekedar ingin menjadi anggota parlemen atau Walikota. Bila AKP tidak menyelesaikan masalah seleksi rekrutmen kader dan pejabat publik, boleh jadi rakyat akan memberi pelajaran dengan tidak memilih AKP di Pemilu berikutnya yakni di tahun 2011 ini.

Menurut Ozkaya pula, saat ini para politisi memang lebih suka bergabung dengan partai yang menang dalam hal ini AKP. Hassan Denmir, sahabat dekat Erdoğan dan Erbakan yang kini menetap di Jerman, ketika pulang melihat banyak orang yang semula di *Refah Partisi* kini ramai-ramai pindah bergabung dengan AKP. Jawaban mereka menurut Denmir sangat sederhana yakni agar bisa hidup tenang dengan menjadi anggota Dewan, sesuatu yang akan sulit mereka raih jika tetap bertahan di *Saadet Partisi*.⁵²

Hal yang dikhawatirkan oleh Ozkaya tersebut selain bisa diatasi dengan kategorisasi keanggotaan apakah sebagai relawan, anggota atau aktivis, maka struktur organisasi AKP yang lengkap dan kuat memberi ruang yang cukup luas bagi para anggota AKP untuk dibina melalui aktivitas di berbagai wadah tersebut berkiprah. Selain itu juga akan tersaring dengan proses seleksi kandidat pejabat publik yang berlapis. Struktur organisasi AKP yang memiliki struktur sayap organisasi berupa *women branch* dan *youth branch*, membuat peran perempuan dan pemuda menjadi luar biasa besar karena diberikan independensi dan keleluasaan berkiprah.⁵³ Peran anggota dan pengurus perempuan dan pemuda diakui Huseyin Kansu sangat signifikan di dua Pemilu yakni 2002 dan 2007 karena aktivitas yang luas ke seluruh penjuru Turki.⁵⁴

Para pengurus, anggota dan relawan AKP terjun ke masyarakat untuk membantu memecahkan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui berbagai organisasi

⁵² Mustafa Ozkaya. *Op. Cit.*

⁵³ Wawancara dengan Omer Faruk Kalayci. *Op.Cit.*

⁵⁴ Hüseyin Kansu .*Op. Cit.*

yang dimiliki AKP.⁵⁵ AKP memiliki pula Pusat Informasi AKP serta lembaga-lembaga yang membantu para penyandang cacat dan para lansia yang menjadi wadah pembinaan para anggota. Dari segi rekrutmen anggota, AKP memang jauh lebih terbuka dibandingkan dengan *Saadet Partisi*. Fatmanur, kandidat Doktor sosiologi yang memiliki banyak teman di AKP melihat bahwa anggota-anggota *Saadet Partisi* bersikap seolah-olah paling memahami ajaran Islam. Sementara di AKP walaupun bukan anggota AKP, ia bisa kapan saja ikut dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan AKP, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya di *Saadet Partisi* karena sistem rekrutmen keanggotaannya yang ketat dan kaku.⁵⁶

Yunus Sonmez yang pernah menjadi pengurus *Youth Branch* di partai Refah menyatakan bahwa dulu di partai Refah semua anggota partai memiliki nilai dan pemikiran yang sama, sementara kini di AKP walaupun tradisi itu masih menjadi ciri penting, bisa pula ditemui pengurus lokal yang memiliki *lifestyle* berbeda. Sementara terkait dengan rekrutmen pejabat publik seperti walikota masalah kompetensi menjadi pertimbangan utama, sehingga bila di dalam AKP tidak ditemukan kader yang memiliki kapasitas tersebut, maka AKP bersedia bekerja sama dengan merekrut orang di luar AKP yang memenuhi kriteria untuk dicalonkan.⁵⁷ Terkait dengan rekrutmen anggota, AKP memiliki dasar dan pola pembinaan yang sama dengan di *Saadet Partisi*. Ozkaya menilai bahwa Necmettin Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan atau Abdullah Gul dan tokoh-tokoh AKP lainnya bukanlah ulama, melainkan orang-orang dengan pendidikan modern yang belajar dan memperoleh ilmu spiritual, kebijaksanaan serta cara hidup yang Islami dari para ulama dan ahli Tasawuf.⁵⁸

Mahasiswa, pelajar dan orang muda pada umumnya menjadi target rekrutmen AKP yang utama selain perempuan. Pemanfaatan kegiatan sosial seperti yang dilakukan oleh LSM-LSM juga dilakukan oleh *Youth Branch* di kampus-kampus dan kegiatan kepemudaan.

“We are studying, we are working at all election like NGO because we are youth organization. And we are organizing the social activities, and we go to universities. We are students at the universities and also members of the club with social

⁵⁵ Wawancara dengan Esra Korkmaz aktivis di *Youth Branch* AKP di Istanbul via email: fatmanurs@gmail.com, tanggal 23 Maret 2010.

⁵⁶ Wawancara dengan Fatmanur, kandidat Doktor ilmu sejarah di Bosphorus University, Istanbul, dalam forum FGD (Focus Group Discussion), 19 Januari 2010.

⁵⁷ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

⁵⁸ *Ibid.*

*activities. And then we promote AK Party at that event and that club indirectly. Because it's forbidden in our universities, but we promote it indirectly.”*⁵⁹

Kami belajar (di kampus), kami juga bekerja di setiap pemilu, seperti halnya LSM karena kami organisasi pemuda dan kami mengorganisir aktifitas-aktifitas sosial sementara kami juga kuliah di universitas-universitas. Jadi kami sekaligus mahasiswa di kampus namun juga sekaligus anggota klub-klub sosial. Dan kemudian kami memperkenalkan AKP secara tidak langsung di klub tersebut dan di setiap acara. Kami mempromosikan AKP secara tidak langsung karena (kampanye politik terlarang di kampus-kampus).

Para kader AKP yang berstatus mahasiswa aktif mengorganisir berbagai kegiatan sosial dan masuk ke dalam kelompok-kelompok kegiatan mahasiswa terutama yang ada kaitannya dengan aktivitas sosial kemasyarakatan kemudian secara tidak langsung mempromosikan AKP dan merekrut teman-teman yang ingin aktif di AKP agar menjadi kader AKP. Menurutnya tentu saja strategi itu dilakukan mereka secara halus karena undang-undang melarang adanya aktivitas atau kampanye politik di kampus.

Rekrutmen dilakukan melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan seperti diskusi, seminar, tanpa mempromosikan secara terang-terangan, namun yang hadir tahu bahwa panitia penyelenggaranya adalah *Youth Branch* AKP. Para pemuda yang beraktivitas di *Youth Branch* memiliki keleluasaan bertemu dan berdialog dengan para seniornya di AKP karena tidak ada “gap”:

*“Anyone can be the member. And now, we have campaign that to reach 1 million members. As a youth branches we have that campaign and all doors are open to anyone else. We didn't say anything, but when sometimes of course we organize seminars education they should know that it is youth do voluntary.. I just want to add that as youth branch, we have right to say to anything else, to our big brother, uncles. We really have the freedom to express your opinion. I can say anything else, you know, you could talk there's no gap between old member and young member”.*⁶⁰

“Setiap orang dapat menjadi anggota AKP dan kami saat ini sedang berkampanye tentang rekrutmen 1 juta anggota *Youth Branch* (di seluruh Turki). Pintu kami terbuka bagi siapapun. Kami tidak menyatakan secara langsung, namun misalnya kadang-kadang kami menyelenggarakan seminar pendidikan, mereka harus diupayakan tahu bahwa ini adalah acara yang diselenggarakan oleh *Youth Branch*

⁵⁹ Emre Elchkan adalah sekjen Youth Branch AKP di seluruh Turki dan sekaligus anggota Dewan Pimpinan Pusat. Wawancara dilakukan saat penutupan Youth Branch di Bandung, Sabtu 26 Januari 2010.

⁶⁰ Wawancara dengan Fatma Zehra (Youth the board member of AK Party Assembly Samlias Branch). Dia mahasiswi di Bosphorus University dan mengajar di Chemistry Department. Wawancara dilakukan di forum FGD, 19 Januari 2010.

AKP. Saya juga hanya ingin menambahkan bahwa sebagai pengurus dan anggota *Youth Branch* kami juga berhak mengekspresikan pendapat kami atau berbicara pada para senior kami di AKP, sehingga tidak ada *gap*”.

Jumlah anggota terdaftar AKP menurut data tahun 2011 mencapai 5 Juta dan hampir 2 Juta di antaranya adalah perempuan. Banyak tokoh AKP yang mengakui peran penting perempuan dalam kemenangan Pemilu AKP oleh karena itu perempuan juga menjadi target. Menurut Kalayci pada tahun 2009 jumlah anggota AKP 3,5 juta dan di 2011 menurut data resmi terbaru jumlah anggota AKP secara keseluruhan di 81 Provinsi mencapai 5,3 juta dan 1,7 juta diantaranya adalah perempuan. Setiap bulan selalu terjadi penambahan anggota baru.⁶¹

Salah seorang pimpinan AKP Ekrem Erdem mengatakan bahwa AKP menghargai peran politik perempuan dan memiliki banyak anggota perempuan. Istanbul di antara 81 provinsi di Turki merupakan provinsi yang memiliki jumlah anggota terbanyak yakni 1.288.262 dan dari jumlah tersebut 549.392 di antaranya adalah perempuan. Setelah Istanbul, Ankara adalah provinsi kedua yang memiliki jumlah anggota AKP terbanyak dengan jumlah 304.285 dengan jumlah anggota perempuan sebesar 123.170, sedangkan di tempat ketiga provinsi Izmir dengan jumlah anggota sebanyak 214.907 anggota dan 78.828 di antaranya adalah anggota perempuan.⁶²

Kesimpulannya bila ditilik dari teori Duverger, maka AKP menggunakan sistem rekrutmen “hybrid” yang memungkinkan terjadinya hibridisasi atau penggabungan antara aktivis anggota dan relawan di AKP. Jenis rekrutmen ‘hybrid’ AKP juga memungkinkan terjadinya rekrutmen masif relawan dan anggota yang kini telah berjumlah 5 juta orang dari 74 juta penduduk Turki..⁶³ Jumlah aktivis, anggota dan relawan yang besar membuat AKP tidak pernah kekurangan SDM untuk menjalankan berbagai program partai termasuk upaya merawat dan melayani konstituen sehingga rakyat Turki merasakan bahwa AKP selalu hadir bersama mereka sepanjang tahun sehingga berpengaruh positif bagi perolehan suara AKP di Pemilu 2002 dan 2007. Kebijakan AKP memperluas kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam AKP tanpa mengabaikan faktor pembinaan dan seleksi dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam kategori relawan, anggota dan aktivis/pengurus, membuat setiap orang yang bergabung

⁶¹ <http://www.Todayszaman.com>, Istanbul, 22 maret 2011.

⁶² *Ibid.*,

⁶³ Wawancara dengan Bilal Erdogan...

memiliki jalur dan wadahnya masing-masing. Hal itulah yang menyebabkan faktor rekrutmen turut menjadi salah satu faktor kemenangan Pemilu AKP yang signifikan karena terjadi secara masif.

Namun demikian sistem rekrutmen anggota dan relawan yang cenderung massif melalui jenis rekrutmen 'hybrid' mendapatkan kritikan dari salah seorang kader utama Mustafa Ozkaya yang juga Direktur TV-Net. Ozkaya mengingatkan bahwa betapapun sistem rekrutmen di AKP begitu memudahkan siapa saja untuk bergabung dengan AKP, tetap saja menurutnya harus ada seleksi untuk para pengurus partai dan calon-calon pejabat publik dari AKP. Sebab menurutnya sebagai partai yang tengah berkuasa, AKP dianggap menarik dan dapat menjanjikan baik materi maupun kedudukan sehingga banyak pula orang yang berwatak tidak baik, pragmatis dan boleh jadi mantan koruptor di masa pemerintahan CHP kini ikut bergabung dengan AKP. Bila tidak dicermati, diwaspadai dan diatasi dengan bijaksana maka bukan tidak mungkin bila suatu saat menjabat akan mencoreng citra partai.

IV.5. Aspek Kepemimpinan Erdogan adalah Aspek Dominan pada Kemenangan Pemilu AKP (2002-2007)

Faktor kepemimpinan merupakan faktor terpenting bagi kemenangan Pemilu AKP setelah faktor ideologi Pos-Islamisnya yang sangat toleran dan terbuka. Para kader dan aktivis AKP memang tidak semata-mata mengandalkan faktor Erdoğan untuk memenangkan Pemilu, karena mereka juga memiliki *uniting value*, yakni nilai-nilai yang menyatukan mereka. Namun mereka juga menyadari bahwa mereka juga membutuhkan sosok yang dapat dijual ke masyarakat yakni Erdoğan, ketua umum AKP sekaligus Perdana Menteri Turki. Terlebih lagi saat itu pemimpin partai-partai *incumbent* CHP dan MHP sudah berusia antara 60-70 tahun sehingga sosok Erdoğan dengan reputasi sebagai Walikota Istanbul yang sukses dan citra dirinya sebagai pemimpin muda yang kuat, cakap dan profesional berhasil menimbulkan harapan dan kepercayaan rakyat Turki sehingga memilih AKP dan menjadi partai pertama setelah sekian dekade yang berhasil memenangkan Pemilu (34%) tanpa harus berkoalisi.

Model kepemimpinan politik kontemporer memang harus dilihat secara integratif sehingga untuk menganalisis fenomena AKP dan Erdoğan harus dilihat dari perspektif bahwa kepemimpinan politik adalah hasil interaksi antara faktor karakter personal pemimpin, karakteristik konstituen yang dipimpin, pola interaksi di antara keduanya serta pengaruh

konteks sejarah, politik, sosial dan budaya tertentu. Bila dilihat dari faktor karakter personal maka definisi Scruton bahwa kepemimpinan adalah kapasitas untuk menginspirasi keyakinan akan kebenaran tujuannya, keberanian dalam pelaksanaan kolektifnya dan kemampuannya menghadapi resistensi dimiliki oleh Erdoğan. Banyak yang menyebutnya sebagai pemimpin kharismatis yang pandai berorasi, sementara faktor karakteristik rakyat Turki yang dipimpinnya juga dikenal pekerja keras yang rajin dan disiplin. Selanjutnya konteks sejarah politik, sosial dan budaya yang sudah panjang juga menguntungkan bagi AKP dan Erdoğan untuk memimpin. Faktor budaya misalnya, rakyat Turki tidak mengenal budaya instan karena memang pekerja keras sehingga pragmatisme yang dikenal bukanlah dalam bentuk *money politics* atau pembelian suara, melainkan mereka hanya akan memberikan suara pada pemimpin yang terbukti tidak korupsi dan mampu memperbaiki ekonomi serta mensejahterakan rakyat secara adil.

Bila dikaitkan dengan teori Max Weber tentang tipe kepemimpinan berdasarkan jenis otoritasnya yang terdiri dari kepemimpinan kharismatis, tradisional dan legal formal memperlihatkan bahwa kepemimpinan Erdoğan merupakan gabungan dari ketiga jenis kepemimpinan Weber tersebut namun tidak sepenuhnya sesuai dengan definisi Weber. Erdoğan merupakan pemimpin kharismatis yang diyakini pengikutnya sebagai anugerah Allah bahwa ia memiliki keunggulan karakter pribadi.⁶⁴ Namun jika jenis kepemimpinan tradisional dipahami Weber memperoleh otoritas karena masyarakat dan bukan karena faktor leluhur, maka Erdoğan menunjukkan sebagai pemimpin yang berasal dari kelompok Islamis *Milli Görüş* diterima secara luas oleh masyarakat Turki yang terpelihara semangat dan tradisi Islamnya walaupun negaranya sekuler. Selanjutnya, Erdoğan jelas merupakan pemimpin yang berotoritas legal formal karena partainya memenangkan secara berturut-turut dua kali Pemilu (2002 dan 2007) serta dua Pemilu Lokal (2004 dan 2007). Ketiga tipe kepemimpinan Weber tersebut dimiliki Erdoğan juga karena rakyat Turki sekaligus perilaku afektif terkait dengan kharismanya, perilaku tradisional dan sekaligus perilaku rasional dalam memilihnya karena konservatisme Erdoğan dan kemampuannya memperbaiki perekonomian dan kesejahteraan rakyat Turki.⁶⁵

Erdoğan sebagai pemimpin muda yang mendirikan AKP di saat berusia 47 tahun memberikan rakyat Turki harapan karena reputasi atau rekam jejak keberhasilannya sebagai Walikota Istanbul di usia 40 hingga 44 tahun (1994-1998) yang mampu menyelesaikan sebagian

⁶⁴ Hampir semua tokoh AKP yang diwawancarai baik Huseyin Kansu, Omer Faruk Kalayci maupun Bilal Erdoğan, putra Erdoğan meyakini faktor utama kemenangan AKP adalah faktor Recep Tayyip Erdoğan sebagai *strong and charismatic leader*.

⁶⁵ Ratmond Aron. *Main Currents in Sociological Thought. Volume II Durkheim, Pareto, Weber*. Anchor Books Doubleday and Company, New York. 1970. Hal: 286.

besar masalah di Istanbul. Banyak orang yang awalnya mengkhawatirkan Erdoğan setelah terpilih menjadi Walikota akan menerapkan undang-undang syariah Islam, menjadi kagum karena Erdoğan langsung menangani masalah-masalah kronis di Istanbul seperti masalah kekurangan air bersih, polusi dan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Masalah kekurangan air diatasi dengan memasang pipa air bersih sepanjang ratusan kilometer dari pegunungan ke Istanbul sehingga untuk pertama kalinya penduduk Istanbul dapat minum langsung dari keran air di rumah dan masalah sampah diatasi dengan membuat fasilitas-fasilitas mesin pendaur ulang sampah. Kemudian polusi udara dikurangi dengan penggunaan bahan bakar dari gas alam dan mengganti bis-bis yang ada dengan bis-bis ramah lingkungan serta mengatasi kemacetan lalu lintas dan transportasi diatasi dengan membangun lebih dari 50 jembatan, terowongan dan jalan layang. Untuk mencegah korupsi Erdoğan melakukan langkah-langkah yang cermat untuk memastikan bahwa penggunaan APBD digunakan secara hati-hati dan tepat. Erdoğan juga membayar sebagian besar hutang kota Istanbul sebesar 2 juta dolar yang ditinggalkan pemerintah terdahulu dan berhasil menanamkan investasi sebesar 4 juta dolar. Prestasi lainnya adalah menyelesaikan masalah upah buruh yang selama ini tidak berhasil diselesaikan serta membuat kesepakatan dengan serikat buruh. Kesemua rekam jejak keberhasilan Erdoğan membuatnya menjadi pemimpin Turki yang layak dipercaya karena bila seseorang bisa menguasai Istanbul maka diyakini ia akan bisa menguasai Turki. PBB memberikan *UN Habitat Award* pada Erdoğan yang merupakan sebuah penghargaan untuk kota yang ramah lingkungan dan minim polusi.⁶⁶

Pareto (1848-1923) meyakini bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas terbaik untuk menjangkau kekuasaan sosial dan politik dan dikenal sebagai elit. Menurut Pareto para elit umumnya berasal dari kelas yang sama, yaitu kelas orang-orang yang kaya, pandai dan mempunyai kelebihan dalam matematika, musik, karakter moral dan sebagainya. Bila teori Pareto⁶⁷ menggolongkan elit ke dalam kelas atas yang terbagi menjadi elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*), maka teori Mosca memperkenalkan konsep “sub-elit” yang terdiri dari seluruh “kelas menengah baru” yakni para pegawai sipil, manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa serta menganggapnya juga sebagai elemen penting dalam masyarakat. Bahkan menurut Mosca

⁶⁶ www.un.org/apps/news/story.asp. Dikutip juga dari: en.wikipedia.org/wiki/recep_tayyip_Erdoğan

⁶⁷ SP. Varma. *Teori Politik Modern*. PT RajaGrafindo. Jakarta, 1995. Hal 202.

stabilitas politik tergantung pada tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas para sub-elit ini.⁶⁸ Bahwa para elit umumnya memiliki kelebihan kualitas sebagaimana pendapat Pareto dan Mosca memang tidak diragukan, namun tidak harus dari kelas atas yang kaya raya, karena kelompok kelas menengah memiliki berbagai kelebihan yang disebutkan Mosca dalam hal kepandaian dan moralitas, walaupun Mosca menyebutnya sebagai sub elit. Kondisi di Turki memperlihatkan bahwa para pemimpin CHP dan MHP yang hampir semua berasal dari kelas atas yang kaya raya namun memiliki kelemahan moralitas yang terlihat dari isu skandal seks yang terungkap dan berbagai kasus korupsi yang membuat ekonomi Turki terpuruk. Sementara Erdoğan bahkan berasal dari keluarga *lower class* di Reiz, kota kecil di pinggir pantai karena ayahnya seorang penjaga pantai yang memiliki lima orang anak. Keluarga Erdoğan kemudian urbanisasi ke kota besar Istanbul. Berkat pendidikannya sebagai sarjana manajemen di Universitas Marmara, Istanbul dan juga aktivitas politiknya di MSP bentukan *Milli Görüş*, Erdoğan masuk ke dalam kelompok masyarakat *middle class* yang disebut Mosca sebagai sub-elit yang merupakan elemen penting di masyarakat. Kepandaiannya berorganisasi, berorasi dan kepemimpinannya sudah terlihat sejak muda sehingga ia sudah terpilih menjadi Walikota Istanbul di usia 40 tahun pada tahun 1994.⁶⁹

Teori pergantian atau sirkulasi elit menurut Pareto dan Gaetano Mosca (1858-1941) akan terjadi bila elit pengganti memiliki kecakapan memimpin dan melakukan kontrol politik sementara elit yang berkuasa tidak mampu lagi memberikan layanan-layanan yang diperlukan rakyat sehingga mendapat hukuman publik dengan tidak dipilih lagi dan itu terbukti di Pemilu 2002 ketika rakyat Turki menghukum pemimpin-pemimpin CHP dan MHP (Bulent Ecevit dan David Bahçelli) dengan tidak memilihnya lagi disebabkan tingginya tingkat korupsi dan terpuruknya ekonomi Turki. Rakyat kemudian memilih Erdoğan karena berharap keberhasilannya memimpin Istanbul akan menjadi modal untuk memimpin Turki. Selanjutnya saat ini di Turki pergantian elit dari partai-partai oposan CHP dan MHP belum terjadi karena layanan pemerintahan AKP terhadap rakyat Turki masih dianggap memuaskan.⁷⁰

Selain itu prestasi luar biasa pemerintahan AKP di bawah Erdoğan adalah mengubah Turki dari sebuah negara miskin yang kerap mengirim tenaga kerja migran di negara-negara Eropa sehingga kini Turki telah menjadi salah satu negara maju atau kaya di urutan ke-enam di

⁶⁸ *Ibid.*, Hal: 206.

⁶⁹ Wikipedia. *Op.cit.*

⁷⁰ *Ibid.*, Hal: 204.

Eropa, jauh di atas Yunani, Spanyol. Kondisi demikian kontras dengan kondisi perekonomian Turki yang terpuruk di masa pemimpin CHP menjadi PM Turki dan pemimpin MHP menjadi Wakil PM. Hal itu nampak dalam tabel komparasi di bawah ini yang membuat rakyat Turki yang semula bukan konstituen pun memilih AKP.⁷¹ Perbedaan tersebut nampak dalam tabel komparasi reputasi antara pemerintahan AKP dengan pemerintahan CHP-MHP sebelumnya:

Tabel IV.1. Komparasi Hasil yang Dicapai Oleh CHP – MHP dengan AKP

Prestasi	Di masa Bulent Ecevit PM (CHP) dan Devlet Bahçeli Wakil PM (MHP) dari 1999 –2002	Di masa Erdoğan (AKP) dari 2002-2010
Bantuan ke mahasiswa	Memberi 45 Lira kepada para mahasiswa program S1 di Universitas.	Mahasiswa program S1 mendapatkan 240 lira, mahasiswa program master 490 lira dan mahasiswa program doktor mendapatkan 720 Lira.
Pendapatan nasional	230 milyar dollar	740 milyar dollar
Upah Minimum Pekerja	184 lira	upah minimum 630 lira
Nilai Ekspor	36 milyar dollar	132 milyar dollar
Utang Luar Negeri	bunga pinjaman utang luar negeri 63%	7%
Angka Inflasi	30%	7%.
Simpanan di bank negara	27 milyar dollar	97 milyar dollar
Fasilitas umum	jalan dua arah sepanjang 6700 km	menjadi lebih dari dua kali lipatnya yakni 13.600 km

Sumber: Pidato Erdoğan yang dikutip dari buku Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011.

Necmettin Bilal Erdoğan mengatakan bahwa faktor kepemimpinan Erdoğan yang menjadi tokoh AKP masih sangat dominan perannya dalam kemenangan Pemilu AKP:

“Obviously, in Turkey charismatic leader is very important that the people really look up to. So this is the demanding. The dynamization of this organization based on the strategy. Really important to keep this huge organization still dynamic and active because you can give to the voters. Also try to solidify this organization. So

⁷¹ Sencar. *Op.Cit.*

I think the most important thing is charisma first, leadership first. The fact is people trust them. Definitely, the quality of organization and the dynamization are also important, the fact that the party from the top to the bottom. Erdoğan is really hard worker. In the eight years of this power except if you keep Istanbul-Ankara out, he has traveled 700 to 81 provinces. He travels most of the time to make hundreds visit.”⁷²

Jelas sekali bahwa kepemimpinan kharismatik sangat penting di Turki karena hal itu yang terutama dilihat oleh rakyat. Jadi hal itu adalah sebuah tuntutan. Organisasi ini mendinamisasi dirinya melalui strategi, oleh karena itu sangat penting untuk menjaga organisasi yang besar untuk tetap aktif sehingga bisa memberi sesuatu kepada konstituen. Oleh karena itu harus selalu ada upaya menjaga soliditas organisasi, namun tetap saja saya berpendapat bahwa hal paling penting adalah masalah kepemimpinan yang kharismatik. Karena hal itulah yang dipercayai oleh rakyat. Tentu saja kualitas organisasi dan dinamikanya juga sangat penting yakni bahwa struktur partai berfungsi mulai dari atas hingga ke bawah. Erdoğan adalah seorang pekerja keras. Dalam 8 tahun masa kepemimpinannya ia telah bepergian 700 kali ke 81 provinsi selain Istanbul dan Ankara. Hampir sebagian besar waktunya dia gunakan untuk melakukan ratusan kunjungan.

Demikian pula menurut Huseyin Kansu, walaupun ada beberapa faktor yang turut menjadi faktor kemenangan AKP, tetap saja faktor kepemimpinan adalah yang terpenting. Terlebih lagi dilihat dari reputasi atau rekam jejaknya, Erdoğan adalah sosok yang sangat berhasil selama menjadi walikota Istanbul dengan pengadaan air bersihnya dan meningkatkan jumlah wisatawan yang datang ke Istanbul. Selain itu rakyat Turki melihat bahwa Erdoğan pernah dizalimi dengan dipenjarakan karena membaca puisi yang bernafaskan Islam. Menurut Kansu di Turki, tidak peduli sebagus apapun partainya, tidak akan berhasil jika tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan kharismatik.⁷³

Masih terkait dengan aspek kepemimpinan, Yunus Sonmez⁷⁴ mengatakan bahwa isu kepemimpinan adalah hal penting bukan hanya bagi AKP namun bagi hampir semua partai politik. Perbedaannya di AKP cukup banyak figur pemimpin yang memiliki kelebihan masing-masing dan Erdoğan tidak menempatkan dirinya sebagai figur sentral:

“I have to say that not just speaking for Mr. Erdoğan, leadership is an important issue for all of the party at least most of the parties in the Turkish political history.

⁷² Dialog dengan Bilal Erdoğan. Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Hal: 58.

⁷³ Huseyin Kansu. *Op. Cit.*

⁷⁴ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

But in Justice and Development Party case there are some differences. First of all, at the beginning of the establishment state of the party, not just Mr. Erdoğan but also Mr. Gul the current president and Mr. Blunt Arinc the vice prime minister now, leading figures of the AKP so all of them have some different characters and all of them representing some part of the country some part of the people. So but now at this stage sure we have, in Justice and Development Party, strong leadership which is restricted with the party rules and also the government's rules together. There is strong, personal leadership of the leader at the party but also this that his power is restricted by the party rules and also government rule. The prime minister and also as party leader Erdoğan talked for the next term he is going to be a last time deputy in his party. Because there are restrictions like you have to be, you can't be President party, leader for three terms or four terms. There are these kinds of restrictions”.

Saya harus mengatakan bukan hanya terkait dengan Erdoğan, kepemimpinan adalah isu penting bagi semua partai paling tidak bagi sebagian besar partai di dalam sejarah politik Turki. Akan tetapi di dalam kasus AKP ada beberapa perbedaan. Di AKP bukan hanya PM Erdoğan saja yang berperan karena juga ada Abdullah Gul, presiden Turki dan Bulent Arinc, wakil PM saat ini. Tokoh-tokoh penting di AKP tersebut memiliki perbedaan karakter kepemimpinannya masing-masing yang mewakili kekhasan sebagian wilayah dan rakyat Turki, Erdoğan memang memiliki kepemimpinan personal yang kuat, namun tetap saja dibatasi oleh sistem, peraturan partai dan juga undang-undang negara. Maka tak heran kalau Erdoğan sudah menyatakan bahwa periode ini adalah periode terakhir ia menjadi Ketua Umum AKP dan juga sebagai Perdana Menteri.

Mustafa Ozkaya menilai Erdoğan adalah seorang sederhana yang apa adanya dan terkadang seolah tidak memikirkan pencitraan dirinya:

“Actually, he is the factor of the AKP's success. The actor is Recep Tayyip Erdoğan. He is very sincere person. Actually not very charismatic. But it is an advantage, because people want to see one of them from this street, very angry sometimes. Can hit somebody. But sometimes he can also cries in Sudan for example. When he was talking with children, he couldn't get himself and burst into tears. People sees he is sincere person, he can represented, he does not lie. He is not holyman and he gets his mind is not very very powerful like Necmettin Erbakan. Necmettin Erbakan sometimes think he knows everything. But Recep Tayyip Erdoğan ask many professors for advices for example professor Ahmed Demirel. He takes very important person to very important position and make istisyaroh with them. And takes the decision of istisyaroh.”⁷⁵

Memang sebenarnya dia (Erdoğan) adalah faktor keberhasilan AKP. Aktor utamanya adalah Recep Tayyip Erdoğan. Dia seorang yang sangat jujur. Namun

⁷⁵ Mustafa Ozkaya. *Op.Cit.*

ini adalah keuntungan karena rakyat ingin melihat seorang pemimpin seperti dirinya yang kadang bisa sangat marah memukul seseorang, tapi di lain kesempatan dia tidak bisa menahan dirinya untuk mengeluarkan air mata, menangis ketika berbicara dengan anak-anak di Sudan. Rakyat melihat dia sebagai orang yang jujur, apa adanya dan tidak pernah berbohong. Rakyat melihat itu bukan sebagai sesuatu yang dibuat-buat. Walaupun Erdoğan juga bukan orang suci dan intelektualitasnya tidak sehebat Erbakan. Jika Erbakan kadang kala bersikap seolah mengetahui segala sesuatu, Erdoğan justru banyak meminta saran dan nasehat dari para profesor seperti misalnya Prof. Ahmed Demirel. Erdoğan menempatkan orang yang penting di tempat yang penting dan musyawarah dengan mereka. Baru kemudian dia mengambil keputusan setelah melakukan *syuro*.

Saat ini hampir semua pemimpin partai lain termasuk dari MHP dan CHP mencoba menampilkan sosok Ketua Umumnya sebagai seorang pemimpin yang dekat dengan rakyat jelata, nenek-nenek dan anak kecil, namun Bilal berkomentar bahwa hal itu tidak terkesan natural karena mereka berasal dari kalangan “*upper class*” (kelas atas) yang tidak bisa merasakan penderitaan rakyat kecil:

*“Erdoğan comes from the grassroots and from the youth has joined politics in the high school. He comes from the grassroots, not from the rich family, so he can easily makes a contact with them, have a table with the poor. The others can’t do this. This is disadvantage for them. The opposition party can’t really touch very deep with the soul of the conservative based of the country. Recep Tayyip Erdoğan really closed with the conservative soul of the country. He can easily contact with the people and this is natural for him”.*⁷⁶

Erdoğan datang dari kelompok akar rumput dan tidak berasal dari keluarga kaya. Ia mudah berhubungan dengan masyarakat dan biasa duduk dengan rakyat miskin. Kelompok lain belum tentu bisa melakukan hal ini dan merupakan hal yang merugikan bagi partainya. Partai oposisi belum tentu bisa menyentuh secara mendalam jiwa kelompok konservatif di Negara ini. Recep Tayyip Erdoğan sangat dekat dengan jiwa konservatif Negara ini. Dia mudah berhubungan dengan masyarakat secara natural.

Profesor Ozer Sencar misalnya menilai Erdoğan adalah “the rising star” yang membuatnya menjadi pahlawan bagi rakyat Turki dan menjadi negarawan terbesar kedua setelah Mustafa Kemal Atatürk, “Erdoğan may become a rising star as a national hero. He may become the second-greatest stateman after Mustafa Kemal Atatürk.”⁷⁷ Selain itu Sencar juga menilai

⁷⁶ Bilal Erdoğan. *Op.Cit.*

⁷⁷ Prof. Ozer Sencar. *Op.Cit.*

kekuatan orasi Erdoğan merupakan daya tarik yang membuatnya layak dipercaya dan menjadi faktor pemersatu:

“Two things were very influential in this new polarization. The first involves the AK Party’s campaigning style and Erdoğan’s discourse. The second is the failure of the AK party’s rivals to respond to popular demands for change”.

Bahwa ada faktor yang sangat berpengaruh bagi terjadinya polarisasi baru yakni yang pertama meliputi model kampanye AKP dan orasi Erdoğan, sementara faktor kedua adalah kegagalan lawan-lawan AKP merespon tuntutan perubahan.”⁷⁸

Omer Faruk Kalayci menyebut AKP adalah “leader based party” dan bahwa reputasi rekam jejak keberhasilan kepemimpinan Erdoğan sejak menjadi anggota Dewan dari Partai Refah, lalu Walikota Istanbul terus berlanjut hingga saat ini menjadi Perdana Menteri. Erdoğan juga berani menggunakan strategi politik yang berbeda, termasuk memberikan kesempatan bagi perempuan untuk terlibat dalam politik baik sebagai anggota, pengurus maupun calon anggota legislatif padahal saat itu tidak lazim di Turki untuk melibatkan perempuan dalam kehidupan dan struktur politik, terlebih lagi bagi orang-orang konservatif. Namun Erdoğan mencoba dan berhasil karena perempuan kemudian menjadi salah satu motor penggerak yang penting bagi kemenangan AKP di setiap Pemilu.⁷⁹

Hal yang luar biasa lainnya adalah ternyata proses regenerasi kepemimpinan juga berjalan dengan baik di AKP. Figur Erdoğan yang sedemikian kuat daya tariknya baik bagi para konstituen AKP maupun rakyat Turki ternyata tidak menghalangi proses penyiapan pemimpin.⁸⁰ Proses kaderisasi kepemimpinan di AKP berlangsung dengan sangat baik karena generasi muda di AKP pada umumnya memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk menjadi pemimpin. Misalnya Omer Faruk Kalayci, Ketua Badan Hubungan Luar Negeri AKP Istanbul yang berusia 33 tahun memiliki kepercayaan diri yang besar dikunjungi oleh banyak tamu dan berbicara dalam bahasa Inggris yang fasih dan dengan tenang Kalayci juga mengatakan: *“I will be the next Erdoğan”*, bila Erdoğan tidak lagi menjadi Ketua Umum AKP. Begitu pula Emre Elchkan, Ketua Umum *Youth Branch* AKP di Ankara, mengatakan: *“Ya, kami semua siap untuk menjadi pengganti Erdoğan.”*⁸¹

⁷⁸ *Ibid.*

⁷⁹ Omer Faruk Kalayci. *Op. Cit.*

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ *Ibid.*

Generasi muda AKP seperti misalnya Omer Faruk Kalaychi menyatakan kesiapannya untuk menjadi *the next leader* dan di sisi lain ada kepercayaan dari para pemimpin AKP terhadap generasi muda AKP untuk praktek langsung di lapangan atau di masyarakat dengan memberikan kepada mereka otoritas, keleluasaan berkiperah di badan yang relatif otonom yakni *Youth Branch*. Ketika melakukan koordinasi di rapat pleno CEC (setara dengan DPP PKS) mereka memiliki kedudukan yang juga setara dengan ketua bidang dan badan di CEC padahal mereka masih muda. Sehingga ada proses magang yang berkesinambungan kerja praktek lapangan namun tetap mendapatkan *coaching* ketika mereka berkoordinasi di CEC.

Selain Erdoğan tokoh-tokoh AKP lainnya adalah Abdullah Gul, presiden Turki, lalu Ahmed Davetoglu yang saat ini menjabat Menteri Luar Negeri dan juga Walikota Istanbul Sayyin Topaz. Selain itu kelebihan AKP adalah tidak hanya mengandalkan sosok Erdoğan sebagai faktor yang sangat signifikan berpengaruh pada kemenangan AKP di Pemilu 2002 dan 2007 juga Pemilu lokal 2004 dan 2009, AKP menyetengahkan program-program kerja berupa perbaikan ekonomi, kesejahteraan rakyat dan demokratisasi. Walaupun Omer Faruk mengakui adanya tuduhan kurang adanya kebebasan berbicara terutama hal kebebasan pers menurutnya bagi rakyat Turki saat ini hal yang lebih penting adalah stabilitas yang dapat membawa kepada kemakmuran dan kebanggaan di bawah kepemimpinan Erdoğan.

Bila menghadapi *black campaign* dari partai-partai oposisi terhadap AKP dan dirinya, Erdoğan menjawab dengan tegas namun tetap santun misalnya dengan menyitir sebuah pepatah Turki bahwa keledai itu lebih dikenal karena suaranya yang buruk namun manusia dikenal karena karya baiknya. Hal yang penting pula Erdoğan tak sekalipun mengecilkan atau meremehkan partai-partai berhaluan Islam yang lahir dari rahim yang sama yakni *Milli Görüş*, yakni *Saadet Partisi* dan HAS Parti betapapun kedua partai tersebut terus mendiskreditkan AKP.⁸²

Dari semua uraian di atas nampak jelas bahwa faktor yang paling berpengaruh secara signifikan pada kemenangan Pemilu AKP adalah faktor kepemimpinan. Kalayci bahkan dengan bangga bahwa AKP adalah *leader based party* dan Huseyin Kansu beranggapan bahwa sebagus apapun organisasi dan strategi sebuah partai politik namun jika tidak memiliki tokoh yang hebat maka sulit untuk menang dalam pemilu. Faktor kepemimpinan menurut Huseyin Kansu, Omer

⁸² Kampanye terakhir Recep Tayyip Erdoğan Sabtu, 11 Juni 2011 di Uskudar. Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. *Op.Cit.* Hal: 88.

Faruk Kalaychi, Mustafa Ozkaya dan Necmettin Bilal Erdoğan masih sangat menentukan di Turki sehingga menyebabkan AKP memperoleh keberhasilan berturut-turut di dua Pemilu (2002 dan 2007) serta dua Pemilu Lokal (2004 dan 2009) karena memiliki icon utama yakni Erdoğan sebagai sosok kharismatik yang *decisive*, tegas dalam mengambil keputusan, berani mengambil keputusan dan dicintai oleh rakyat karena bersikap jujur apa adanya serta tidak memikirkan pencitraan.

Sementara partai-partai lain seperti CHP dan MHP tidak memiliki tokoh selain Deniz Baykal dan David Bahçelli yang sudah belasan tahun memimpin CHP dan MHP. Pengaruh faktor kepemimpinan pada elektabilitas sebuah partai politik juga nampak dalam kasus MHP yang menurun perolehan suaranya ketika mencuat berita tentang skandal seks beberapa anggota dewannya dan Ketua David Bahçelli tetap memimpin. Sedangkan CHP walaupun Ketua Umumnya Deniz Baykal terlibat skandal seks dan perselingkuhannya diunggah di internet serta beredar luas, perolehan suaranya tetap meningkat karena CHP segera mengganti Baykal dengan Kemal Kiriçdaroglu dan membuat slogan: *yeni CHP, yeni Lider* (CHP baru, pemimpin baru).⁸³

Saat ini Erdoğan tidak saja menjadi tokoh AKP melainkan juga bagi Turki, bahkan sebagian rakyat Turki memanggilnya dengan Papa Tayyip setelah sebelumnya hanya Mustafa Kemal yang mendapat julukan *Ataturk* (Bapak Turki). Di banyak tempat dan di berbagai kesempatan foto Erdoğan diletakkan setelah foto Mustafa Kemal, *founding father* Republik Turki, sehingga Erdoğan dianggap sebagai pemimpin Islam pertama yang setara dengan Mustafa Kemal. Setiap kali Erdoğan muncul di tengah-tengah rakyat Turki mereka acapkali meneriakkan namanya secara lengkap dengan: “Recep Tayyip Erdoğan..... Recep Tayyip Erdoğan” atau meneriakkan: *Turkiye Seninle Gurur Duyuyor* (Turki bangga padamu).⁸⁴ Ribuan rakyat Turki misalnya pada tanggal 30 Januari 2009 menyambut Perdana Menteri Erdoğan di Bandara Istanbul dengan mengibar-ngibarkan bendera Turki dan Palestina. Mereka bangga pada keberanian Erdoğan ketika mengkritik tegas Perdana Menteri Israel Simon Perez terkait dengan serangan militer Israel kepada rakyat sipil di Gaza. Erdoğan segera meninggalkan konferensi ekonomi di Davos, Swiss walaupun kemudian di konferensi pers menyatakan kemarahannya tertuju pada pemerintahan Israel dan bukan pada rakyat Israel.

⁸³ [http:// www. today's zaman Istanbul.// Baykal and Kiriçdaroglu to testify in harassment case. 2011-03-16](http://www.today's zaman Istanbul.// Baykal and Kiriçdaroglu to testify in harassment case. 2011-03-16).

⁸⁴ Laporan Observasi Pemilu Turki 2011. *Op.Cit.* Hal: 191.

Popularitas Erdoğan sebagai pemimpin yang tegas, berani namun mampu berkomunikasi dengan baik juga meluas hingga ke dunia Islam pada umumnya. Seperti misalnya ketika ke Mesir, Erdoğan disambut oleh ribuan rakyat Mesir yang sebagian besar menyatakan Erdoğan adalah pemimpin Islam di Timur Tengah dan sebagian lagi mengaguminya karena berani membela rakyat Palestina. Ketika Erdoğan ke Somalia untuk memberikan bantuan pada rakyat Somalia yang tengah mengalami kelaparan, Presiden Somalia Syarif Syekh Ahmed menyebut kunjungan Erdoğan sebagai kunjungan bersejarah, karena merupakan pemimpin pertama di luar Afrika yang mendatangi Somalia dalam kurun waktu 20 tahun terakhir. Demikian pula di Suriah, Erdoğan memiliki peran diplomasi yang penting karena menjadi mediator antara Suriah dan Israel. Presiden Suriah Bassar Asad pun melakukan kunjungan resmi ke Turki yang merupakan kunjungan pertama Presiden Suriah setelah 57 tahun dan melakukan kesepakatan perdagangan serta menghapuskan visa antara dua negara tersebut. Hubungan baik juga terus berlanjut antara Arab Saudi dan Turki yang sudah terjalin sejak 1929 dan kini mengalami kemajuan dalam hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi dan militer. Kunjungan Raja Abdullah bin Abdul Aziz As Sa'ud ke Turki di masa pemerintahan Erdoğan merupakan kunjungan pertama Raja Arab Saudi sejak 40 tahun yang lalu. Selanjutnya dengan Rusia yang selama berabad-abad dikenal bermusuhan, kini Turki menjalin kerjasama perdagangan termasuk pembangunan pipa gas alam di Turki-Rusia dan pada tahun 2004 Presiden Putin mengunjungi Turki setelah 32 tahun tidak pernah ada kunjungan pemimpin Rusia ke Turki.⁸⁵

Hubungan Turki-Israel mengalami pasang surut di masa Erdoğan yang sempat melakukan kunjungan resmi ke Israel pada tahun 2005 dan sebaliknya di tahun 2007 Simon Peres, Presiden Israel mengunjungi parlemen Turki yang merupakan kunjungan pertama ke sebuah parlemen yang di dominasi Muslim. Namun pada tahun 2009, di Davos, Swiss, Erdoğan mengkritik keras presiden Simon Peres atas serangan militernya kepada rakyat Gaza dan pada 2011 Turki memutuskan hubungan diplomatik dengan Israel, karena Israel tidak mau meminta maaf atas peristiwa penyerangan terhadap *Freedom Flotilla* di kapal Mavi Marmara yang akan menyampaikan bantuan ke rakyat Gaza dan menyebabkan terbunuhnya 9 orang Turki di tahun 2011.⁸⁶ Sebaliknya hubungan Turki dengan Yunani yang semula sangat buruk terkait dengan perebutan pulau Siprus, kembali membaik di masa Erdoğan dan terjadi kerja sama politik dan

⁸⁵ <http://middleeast.about.com/bio/pierre-tristam-28362.htm>

⁸⁶ *Ibid.*,

ekonomi. Sementara dengan Irak di masa kepemimpinan Erdoğan, Irak dan Turki melakukan 48 jenis perjanjian dagang dan membangun hubungan baik dengan kelompok Kurdi di Irak dengan membangun Konsulat di Mousul, Irak. Serta masih banyak lagi negara yang menjalin hubungan kerja sama sangat baik dengan Turki. Erdoğan mendapatkan berpuluh-puluh bintang penghargaan dan gelar Doktor Kehormatan atau Doktor *Honoris Causa* dari berbagai universitas di berbagai negara.⁸⁷

Bila disimpulkan dengan teori Max Weber, maka aspek kepemimpinan Erdogan memenuhi semua jenis otoritas kepemimpinan yang disebutkan Weber yakni kepemimpinan kharismatik yang juga diterima secara tradisional oleh masyarakat dan juga secara legal formal di mata undang-undang. Huseyin Kansu, Omer Faruq Kalaychi, Bilal Erdogan maupun pengamat politik dari Metropoll Prof. Ozer Sencar berpendapat sama bahwa Erdogan adalah daya tarik utama dan kunci kemenangan AKP. Kepribadiannya yang kuat dan tegas, berani membela Turki dan berkemauan keras menyejahterakan rakyat Turki membuatnya bahkan menjadi pemimpin dunia Islam yang bukan hanya dikenal di Turki melainkan juga di kawasan dan di dunia internasional. Erdogan bahkan disebut sebagai pemimpin kuat Turki dari kalangan Islamis yang sama terkenal dengan pemimpin Turki yang sekuler Kemal Pasha pendiri Republik Turki.

Menurut Huseyin Kansu, aspek kepemimpinan tetap menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai sehingga walaupun sebuah partai memiliki kekuatan organisasi dan kokohnya sistem kaderisasi bila tidak memiliki tokoh yang dikenal secara nasional maka akan sulit bagi rakyat untuk memilih partai tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan Erdogan berpengaruh paling dominan dalam kemenangan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

Namun bukan berarti Erdogan tidak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya kalangan pers dengan dipenjarakannya beberapa wartawan karena dianggap terus mendiskreditkan pemerintahan. Kemudian kalangan sekuler mengkritik bahwa Erdogan terus menerus melakukan pembangunan fisik dalam berbagai mega proyek namun mengabaikan hal-hal yang manusiawi sehingga menurut mereka kurang memberikan kesempatan bernafas bagi rakyat. Bila partai-partai sekuler terus mencurigai bahwa suatu saat pemerintahan AKP akan merealisasikan agenda islamisasi, maka sebaliknya partai berhaluan Islam seperti *Saadet Partisi*

⁸⁷ Jenny B. White. *Islamist Mobilization in Turkey, A Study in Vernacular Politics*. University Washington Press. Amerika, 2002. Hal: 273.

menulis daftar “dosa” AKP dan Erdogan yang dianggap mengkhianati perjuangan kelompok Islamis *Milli Gorus*. Selain itu juga ada kelompok pencinta dan pelestari ‘Turkish Heritage’ yang mengkritik bahwa pembangunan besar-besaran pemerintahan Erdogan acapkali mengabaikan pelestarian bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan terdesak oleh pembangunan mall atau pertokoan. Penulis menyimpulkan pengaruh positif sosok kharismatis Erdogan tetap paling dominan berpengaruh bagi kemenangan AKP di hampir setiap Pemilu, namun kiranya Erdogan harus merencanakan dengan matang kapan kiranya saat yang tepat baginya untuk mengundurkan diri yakni di puncak kejayaannya dan meletakkan tongkat estafeta kepemimpinan di AKP dan di Turki kepada penerusnya, sehingga ia akan tetap dikenang sebagai tokoh fenomenal atau bahkan Shalahuddin di abad ke-21.

IV.6. Optimalisasi Aspek Strategi Berpengaruh Positif pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007)

Terakhir, faktor yang berpengaruh pula pada kemenangan Pemilu AKP adalah strategi. AKP menerapkan strategi *permanent campaign* melalui *vernacular politic* atau politik kedaerahan yang merupakan upaya mensinergikan potensi yang dimiliki oleh partai politik dengan jejaring sosialnya, LSM-LSM dan pemerintah lokal (*local government*). Sebagai partai politik yang berasal dari gerakan Islam *Milli Görüş*, AKP memiliki kekuatan basis massa karena aktivitas dakwah dan sosial yang telah dijalaninya selama puluhan tahun. Kekuatan AKP tersebut memungkinkan bagi diterapkannya strategi *vernacular politic*. Dengan strategi ini AKP mampu menjalin komunikasi dengan pemilihnya secara terus menerus melalui kepedulian pada masyarakat, hubungan politik yang bersifat personal dan pesan ideologisnya disampaikan dengan bahasa lokal yang mudah dicerna.⁸⁸

Salah satu strategi kampanye AKP adalah melakukan kunjungan *door to door* untuk menjelaskan program-program partai dan pemerintah. Para anggota AKP mengunjungi langsung rumah-rumah konstituen lokal atau menjadikan rumah seorang anggota di sebuah jalan sebagai tempat pertemuan dan masyarakat sekitar berkumpul bersama-sama membahas strategi partai untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di daerah itu.⁸⁹ Para anggota *Youth*

⁸⁸ *Ibid.*,

⁸⁹ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

Branch di Istanbul mengunjungi rumah-rumah di pedesaan, di tanah-tanah pertanian dan menanyakan permasalahan yang mereka hadapi serta berusaha membantu mencari solusi:

*“We are at the Youth branch, we have 250 thousands members, members active is very little but there are lots of members. We do home visits to the counties to the old counties. We as Youth branch we did it, all board members went to visit farms and speak with them, speak with them the agenda, what is going on what is your problem things you know, and they said Erdoğan makes the best, he knows the best. We try to reach people, to touch them”.*⁹⁰

Kami di *Youth Branch* (Istanbul), memiliki 250 ribu anggota walaupun anggota aktif hanya sedikit. Kami melakukan kunjungan-kunjungan ke desa-desa, ke tempat pertanian, dan berbicara dengan mereka tentang agenda partai termasuk juga tentang permasalahan yang mereka hadapi. Pada umumnya mereka mengatakan, “Erdoğan sudah mengetahui dan melakukan hal terbaik”. Kami mencoba menjangkau dan menyentuh langsung ke masyarakat.

Selain itu AKP juga memiliki kelengkapan strategi, di antaranya strategi pemilihan isu utama yakni pembangunan, keadilan ekonomi dan kesejahteraan bagi rakyat, strategi merangkul kubu sekuler dan militer demi stabilitas politik dan strategi mengajukan kembali proposal Turki sebagai anggota Uni Eropa. Kemudian strategi lainnya yang tak kalah penting adalah strategi pendanaan, strategi media yang menjual reputasi dan mimpi AKP dan akhirnya strategi teritorial.

Interaksi para kader AKP yang menjadi relawan atau aktivis LSM dengan struktur partai menunjukkan bahwa AKP menggunakan strategi *vernacular politics* sebagai upaya mengoptimalkan potensi yang ada di partai, LSM dan kader partai yang menjadi pejabat pemerintah daerah. Seperti misalnya hubungan antara AKP dengan *Hayrat Foundation*, *IHH (Insan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı/The Foundation for Human Rights and Freedom and Humanitarian Relief)* atau asosiasi-asosiasi LSM seperti *UNIW (United Non-governmental of Islamic World)* yang beranggotakan 189 LSM dari 82 negara (Asia, Afrika dan Eropa) dengan 79 LSM di antaranya dari Turki. Hubungan yang kuat antara *UNIW* dengan AKP tersirat dari jawaban Necmi Sadikoglu, salah seorang pendiri *UNIW* yakni organisasi persatuan yang mewadahi banyak LSM di dunia Islam dan bersifat internasional:

“UNIW AK Parti ile doğrudan bir ilişkisi yoktur. Fakat, STK halkın sesi temsil eder ve halk arasında bir sorun bulduğunda hükümet bu sorunu öğrenmek

⁹⁰ Fatma Zehra . *Op. Cit.*

ister. UNIW kamu arzusunun temsilcisidir. Halk ve hükümet arasında bir köprüdür.”

“UNIW tidak memiliki hubungan langsung dengan AKP namun karena LSM itu merupakan suara masyarakat dan ketika mereka melihat ada masalah di masyarakat maka mereka ingin pemerintah mengetahui problem. UNIW hanya merepresentasikan keinginan publik. Menjadi jembatan antara pemerintah dengan masyarakat”.

Necmi Sadikoglu menyatakan UNIW memiliki beberapa kesamaan dengan AKP yakni berperan aktif dalam mencari solusi bagi problem-problem yang ada di masyarakat maupun di dunia Islam dan berperan aktif dalam problem Palestina.⁹¹ Sementara itu wakil UNIW di Istanbul, Erdoğan Kara menjelaskan bagaimana peran UNIW berusaha mengorganisir dan mensinergikan antara 163 LSM anggota UNIW pada tahun 2009 (kini sudah berjumlah 189 di tahun 2011) dengan berbagai konferensi internasional termasuk *Youth Camp* setahun dua kali yang melibatkan peserta dari puluhan negara di Asia, Afrika dan Eropa. Erdoğan Kara menyatakan bahwa UNIW tidak memiliki afiliasi politik dengan salah satu partai politik, namun ia mengakui bahwa keanggotaan di UNIW melingkupi beragam kelompok seperti 8 kelompok keagamaan, 4 sampai 5 partai politik yang berbeda dan beragam LSM yang kesemuanya dapat bergabung dengan UNIW.⁹²

Koordinator Asia di IHH: Senol Ozturk berpendapat kondisi sosial politik Turki saat ini baik, kondusif dan relatif stabil dan pemerintahan pun dinilainya sangat mendukung badan-badan nirlaba seperti IHH untuk membantu mengentaskan problem sosial ekonomi masyarakat Turki yang tidak bisa bila hanya ditangani pemerintah tanpa kerja proaktif *civil society*.⁹³ Sebelumnya Amerika Serikat pernah berusaha menghentikan lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang mengurus masalah *charity* internasional dengan membatasi donasi dari *muhsinin* (donatur) Timur Tengah namun pemerintah Turki dengan tegas melindungi dan tetap memberikan izin serta tidak mau membekukannya sebagaimana diminta AS. Dukungan dana bagi IHH didapatkan dari para *al aghniya* (orang-orang kaya) Turki yang mempercayakan *infaq* dan *shadaqahnya* atau *social cost* perusahaan-perusahaan mereka untuk dikelola dan disalurkan

⁹¹ Wawancara dengan Necmi Sadikoglu dilakukan di Istanbul pada hari Senin 10 Agustus 2009 jam 6 sore waktu Turki dalam bahasa Turki yang kemudian diterjemahkan oleh penerjemah.

⁹² Wawancara dengan Erdoğan Kara, pengurus UNIW Istanbul. Istanbul, Senin, 10 Agustus 2009.

⁹³ IHH atau The Foundation for Human Rights and Freedom and Humanitarian Relief (Insani Yardim Vakfi) adalah badan *charity* internasional yang memperjuangkan hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan. Terkenal ketika memimpin kafilah “Freedom Flotilla” dengan kapal: Mavi Marmara yang diserang tentara Israel di perairan internasional di dekat Gaza.

oleh IHH dan terutama untuk rakyat Turki. Walaupun kondisi ekonomi negara membaik, krisis global memicu banyak PHK yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat sehingga masih banyak juga rakyat Turki yang membutuhkan bantuan. IHH pun membantu rakyat Palestina dan di tahun 2010 meluncurkan aksi Freedom Flotila menggunakan kapal Mavi Marmara yang kemudian dibajak Israel pada saat akan menyalurkan bantuan ke rakyat Gaza. Selain itu IHH juga membantu negara-negara di Afrika dan Asia termasuk Aceh pada saat terjadi Tsunami pada 26 Desember 2004.⁹⁴

Walaupun Ozturk menyatakan tidak ada hubungan langsung antara IHH dengan AKP karena badan ini bersifat independen. IHH melakukan hubungan timbal balik yang menguntungkan dengan pemerintahan AKP saat ini. IHH memberikan dukungannya pada pemerintahan karena telah memberi payung perlindungan bagi kegiatan badan *charity* internasional, sehingga bisa lebih leluasa berbuat. Di sisi lain IHH melalui hubungan yang bersifat personal dengan beberapa anggota legislatif AKP seringkali mengajukan proposal dana atau menitipkan agenda untuk diperjuangkan misalnya tentang pembelaan pada rakyat Chechnya dan Palestina.⁹⁵

Kecakapan AKP menjalin hubungan dengan jejaring sosial melalui aktivitas para kadernya yang menyebar di berbagai LSM juga nampak di *Hayrat Foundation* yang merupakan salah satu pendiri UNIW. Ahmed Semiz pendiri *Hayrat Foundation* menyatakan optimis bahwa kondisi di Turki di bawah pemerintahan AKP akan semakin kondusif dan membaik di waktu-waktu mendatang. *Hayrat Foundation* berkonsentrasi pada pendidikan umat melalui upaya menerbitkan Qur'an-Qur'an dan buku-buku *Risala e Nur* atau melakukan *dakwah bil qalam* (dakwah dengan tulisan) serta merupakan badan *charity* atau LSM sosial yang banyak memberikan beasiswa bagi mahasiswa-mahasiswa muslim dari berbagai negara. Dukungan dana diperoleh Hayrat dari *infaq*, *shadaqah* dan laba penerbitan serta penjualan buku.⁹⁶

Strategi penting AKP lainnya untuk memenangkan Pemilu adalah ketepatan pemilihan isu utama, misalnya sesuai dengan nama AKP: Partai Keadilan dan Pembangunan, maka isu pembangunan dan keadilan ekonomi merupakan isu utama AKP yang dianggap paling penting

⁹⁴ Wawancara dengan Senol Ozturk (Asia koordinatoru/koordinator wilayah Asia), calon Ph.D (Asian Countries Coordinator), di Istanbul. Rabu 12 Agustus 2009, pukul 12.00 waktu Turki.

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ Wawancara dengan Ahmed Semiz, pendiri Hayrat Foundation. Sabtu 15 Agustus 2009.

dan dibutuhkan rakyat.⁹⁷ Di saat AKP didirikan, Turki sedang mengalami krisis besar dan dunia juga dilanda krisis ekonomi global. Setelah keluar sebagai pemenang pemilu, AKP berusaha mengatasi krisis ekonomi ini secara bertahap dalam dua dekade pemerintahannya, sehingga strategi umum bertumpu pada kesejahteraan ekonomi dan upaya mewujudkan keadilan di masyarakat. Maka pemilihan isu kampanye AKP merupakan hal yang penting dan isu utama yang “dijual” AKP dalam Pemilu adalah perbaikan ekonomi.⁹⁸

Selain itu AKP juga memiliki kebijakan yang modern dan moderat yang dapat memenuhi kebutuhan rakyat yang berbeda-beda dengan membuat kemajuan dalam sistem politik dan ekonomi.⁹⁹ Berkat kebijakan AKP yang modern dan moderat yang mementingkan pembangunan ekonomi, maka pelaku bisnis yang biasanya memilih partai sekuler CHP karena faktor ideologisnya, menyatakan bahwa kini sangat mendukung dan menghargai pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintahan AKP. Selain masalah pembangunan ekonomi dan keadilan, persoalan keseimbangan politik di Turki adalah hal penting yang akan menciptakan stabilitas politik sehingga AKP bukan hanya mengatasi masalah ekonomi, melainkan juga menjaga keseimbangan dalam negeri Turki misalnya dengan menggunakan strategi merangkul militer dan kubu sekuler. Selain itu AKP juga menggunakan isu demokratisasi dan upaya bergabung dengan Uni Eropa sebagai upaya yang komprehensif.¹⁰⁰

Strategi berikutnya adalah strategi pendanaan yang tepat. Pendanaan kegiatan di AKP termasuk dana kampanye diperoleh dari beberapa sumber; *pertama*, bantuan resmi pemerintah bagi partai-partai politik yang melewati batas *parliamentary threshold*: 10%. Pemerintah memberikan bantuan dana sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh sebagai bantuan dana untuk Pemilu berikutnya dan yang untuk AKP sebesar 1.5 juta TL. *Kedua*, dana pribadi para kandidat untuk membiaya sendiri kampanye sebagai calon anggota dewan dan calon walikota. Tentu saja ada beberapa calon yang tidak bisa memenuhi semua biaya kampanyenya, maka akan dibantu oleh partai. *Ketiga*, donasi dari luar seperti dari para pengusaha atau lembaga-lembaga yang mendukung AKP. Pada umumnya ketiga sumber tersebutlah yang memasok pendanaan bagi kegiatan-kegiatan partai. Keberadaan pengurus partai yang kaya raya karena sekaligus merupakan para pengusaha memberikan dukungan finansial yang sangat besar bagi partai.

⁹⁷ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

⁹⁸ Fatma Zehra. *Op. Cit.*

⁹⁹ “Focus Group Discussion”. *Op. Cit.*

¹⁰⁰ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

Menurut undang-undang di Turki sebuah partai politik dilarang membuat perusahaan atau divisi partai yang komersial untuk mendatangkan uang, sehingga yang memungkinkan adalah para kader secara personal sebagai pengusaha yang memiliki perusahaan pribadi menyumbangkan sebagian keuntungannya bagi pendanaan kegiatan partai.¹⁰¹

Oleh karena itu di AKP diupayakan ada sinergi antara kader partai yang menjadi pengusaha dan membantu mendanai partai dengan kader partai yang menjadi pejabat publik berupa pemberian informasi tentang proyek-proyek pemerintah yang dapat diakses oleh para kader pengusaha. Hal itu untuk mensinergikan antara kader yang berada di luar pemerintahan dan menjadi *entrepreneur* atau pengusaha dengan kader yang berada di pemerintahan namun dengan tetap memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas dan profesionalitas perusahaan yang dimiliki kader. Kelebihan AK Parti dari segi strategi pendanaan adalah mereka tinggal melanjutkan tradisi melatih para kader menjadi *entrepreneur* yang sudah dimulai sejak di masa *Refah Partisi*. Bahkan kebangkitan dan keberhasilan *Refah Partisi* tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan para kader yang menjadi pengusaha dan tergabung dalam MUSIAD.

Selanjutnya strategi mengajukan proposal bagi anggota Uni Eropa. Walaupun sampai sekarang Turki belum diterima sebagai anggota Eropa, Turki sudah menjadi mitra terhormat Uni Eropa. Salah satu penyebab Turki belum juga diterima menjadi anggota Uni Eropa sebenarnya ditengarai lebih karena persoalan perbedaan agama, ideologi dan budaya, namun tidak mungkin Uni Eropa menolak begitu saja permohonan Turki dengan alasan tersebut. Oleh karena itu Uni Eropa memakai strategi mempersulit Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa dengan begitu banyak persyaratan seperti tingkat kemajuan ekonomi, demokratisasi, kebebasan pers, dan penempatan militer di bawah pemerintahan sipil. Namun hikmahnya kesemua persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa kepada Turki malah AKP, karena selama ini militer selalu siap memberangus partai politik yang dianggap berideologi Islam.

Selanjutnya menurut Yunus Sonmez walaupun interaksi personal pengurus dan kader AKP dengan konstituen merupakan bagian penting dari strategi pemenangan Pemilu, berkembangnya teknologi informasi dimanfaatkan oleh AKP melalui strategi optimalisasi pemanfaatan media massa:

“Actually yes face to face interaction with the voters is an important part of the strategy. But comparing with ten years ago, face to face interaction strategy was more important. It was more important because media was not so wide at the time, the internet use was not so wide at the time but in last two decades both television

¹⁰¹ *Ibid.*, Sonmez

and internet media became more popular in the coffee. The mass media could be more effective. But on the other hand most in, of the eastern societies, face to face relations are still important. I mean listening Prime Minister at the television is important but one of your friend comes to you and tries to convince you is better for the party. So organization of the party mainly depends on the human resources but also the media strategy supports all these strategy”.

Sebenarnya ya, interaksi langsung (*face to face*) dengan para pemilih adalah bagian penting dari strategi. Namun bila dibandingkan dengan kondisi 10 tahun lalu, di mana interaksi langsung sangat penting, kini jauh lebih penting pemanfaatan media karena kini baik televisi maupun internet sudah menjadi sangat populer di kafe-kafe. Media massa bisa menjadi jauh lebih efektif walaupun di sisi lain di masyarakat Timur tetap saja interaksi langsung merupakan hal penting. Maksud saya mendengarkan orasi perdana menteri di TV penting tetapi akan lebih baik dan lebih menguntungkan bila salah seorang temanmu mendatangimu dan mencoba meyakinkanmu maka organisasi partai selain bergantung pada SDM juga membutuhkan dukungan strategi media.¹⁰²

Oleh karena itu strategi penting lainnya dalam kemenangan Pemilu AKP adalah strategi media karena diakui oleh AKP bahwa hubungan Erdoğan dan AKP dengan media massa di Turki buruk sejak Erdoğan mengikuti pemilihan Walikota Istanbul bahkan sampai sekarang. Setelah menjadi penguasa pun mereka menilai media tidak bersikap *fair* pada keberhasilan Erdoğan dan partai yang dipimpinnya. Oleh karena itu AKP menggunakan sosial media lainnya sebagai sarana kampanye seperti FB, *twitter* dan *web pages*. Strategi media adalah kombinasi cara untuk menyampaikan pesan-pesan yang integratif kepada para pemilih. Pesan-pesan penting yang ingin disampaikan kepada para konstituen dan rakyat Turki pada umumnya adalah tentang reputasi dan mimpi besar AKP untuk membangun kejayaan Turki. Erdoğan sering menyampaikan bagaimana AKP melayani masyarakat Turki selama lebih dari sembilan tahun dengan membangun kenyamanan dan keamanan yang menyentuh perempuan, lelaki, pensiunan dan penyandang cacat serta orang tua. Uraian Erdoğan ini juga disampaikan oleh aktivis-aktivis AKP di struktur AKP terkecil dengan bahasa *Nereden-Nereye* (Dahulu dan Kini).

Kemudian melalui strategi media, AKP juga menjual mimpi bagaimana merealisasikan cita-cita untuk menjadikan Turki sebagai bangsa besar di 2023 yakni pada saat Republik Turki berusia 100 tahun. Selain itu dalam strategi media, Erdoğan ditampilkan sebagai figur utama yang menyampaikan pesan partai ada di semua *campaign kit* dalam bentuk yang sangat variatif dan menarik, misalnya Erdoğan dengan anak-anak, orang tua dan momen-momen berharga

¹⁰² Yunus Sonmez. *Op.Cit.*

lainnya digunakan berbagai strategi yang diabadikan oleh tim media AKP. Secara umum *content branding* yang disampaikan oleh AKP dan para kompetitor utamanya yakni CHP dan MHP dirangkai dalam *branding general* dan *sub branding*. *Branding general* pada masing-masing partai misalnya *Hersye Turkiye Icin* (semuanya untuk Turki) adalah milik AKP, *Herkese Icin* (untuk semua orang) adalah *branding general* CHP dan *Ses Ver Turkiye* (Berikan Untuk Turki) milik MHP. *Branding general* yang masih sangat normatif memerlukan *sub branding* yang lebih spesifik dan tajam.

Sub content branding AKP yang bisa disaksikan adalah *Turkiye Hazir Hedef 2023* (visi 2023/rencana pembangunan sampai 2023) yang mengungkapkan visi pembangunan AKP yang jauh ke depan namun sudah sangat detil, yakni merencanakan pembangunan *tunnel* untuk menghubungkan Turki wilayah Asia dan Turki wilayah Eropa. Sedangkan *Istikrar Sursun Turkiye Buyusun* (lanjutkan pembangunan untuk Turki yang lebih maju) adalah kampanye untuk menjual keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan secara detil dan komplit.

Sementara salah satu *sub branding* CHP yang tak kalah tajamnya yakni *bis nefes alacak* (saatnya untuk bernafas) ditujukan untuk mengkritisi kampanye keberhasilan pembangunan pemerintah AKP yang dinilai mereka lebih banyak berorientasi pada proyek infrastruktur berskala besar dan kurang berdampak pada rakyat miskin dan sebagai partai sosialis sekuler mereka mengusung asuransi bagi rakyat miskin. Di samping itu CHP juga mengusung *sub-branding* yang kuat yaitu New CHP dengan pemimpin baru yakni Kemal Kilicdaroglu.

Strategi *branding* AKP menggunakan beberapa media utama seperti: TV dan materi iklan untuk TV dibuat dalam beberapa versi yang menarik, kemudian *direct selling*, *outlet*, *billboard*, *banner* dan juga ada beberapa kampanye akbar di lapangan yang diliput langsung oleh TV dan hanya memiliki agenda tunggal mendengarkan orasi Ketua Umum AKP yakni Erdoğan. Setelah kampanye usai, dokumentasi kampanye langsung disiapkan untuk menjadi alat peraga kampanye baru dalam berbagai versi seperti video dan *billboard* acara kampanye. Pertarungan *branding strategy* terutama nampak di antara AK Parti dan CHP serta menjadi simbol utama persaingan di Pemilu 2011 dan terbukti keberhasilannya, karena kedua partai tersebut mengalami peningkatan perolehan suara yakni AK Parti meningkat dari 47% (2007) menjadi 49,9% (2011) dan CHP meningkat dari 20,9% (2007) menjadi 25,9%.¹⁰³

¹⁰³ Ihsan Fadila, Tim Istanbul dan buku Laporan Observasi Pemilu Turki. *Op.Cit.* Hal: 155.

Tabel IV.2. Komparasi Strategi Media antara AKP dan CHP

	AKP	CHP
Figur Utama	Recep Tayyip Erdoğan	Kemal Kilicdaroglu
<i>Branding general</i>	<i>Hersey Turkiye Icin</i> (Semua untuk Turki)	<i>Herkesse Icin</i> (untuk semua orang)
<i>Sub branding</i>	<p>Untuk masa sekarang dengan menjual keberhasilan: <i>Istikrar Sursun Turkiye Buyusun</i> (Lanjutkan pembangunan untuk Turki yang lebih maju)</p> <p>Untuk masa depan dengan menjual “mimpi” dan gagasan besar: <i>Turkiye Hazir Hedef 2023</i> (Turki siap menyambut tahun 2023). Untuk mengungkapkan visi pembangunan AKP yang jauh ke depan yakni pembangunan <i>tunnel/</i> terowongan bawah laut untuk menghubungkan Turki wilayah Asia dan Turki wilayah Eropa.</p>	<p><i>rahat bir nefes alacak</i> (Saatnya untuk sejenak bernafas).</p> <p>Ditujukan untuk mengkritisi kampanye keberhasilan pembangunan pemerintah AKP yang dinilai lebih berorientasi pada proyek infrastruktur berskala besar dan kurang berdampak pada rakyat miskin.</p> <p>Untuk masa depan: Yeni CHP, Yeni Lider (New CHP. New Leader) yakni CHP baru dan Pemimpin Baru (Kemal Kilicdaroglu)</p>

Sumber: Buku Laporan Observasi Turki DPP PKS

Faktor strategi teritorial yang dilakukan AKP dengan cara mendirikan sebanyak mungkin posko atau *outlet* dan melakukan *canvassing* atau *direct selling* seintensif mungkin. Salah satu kunci kemenangan AKP adalah dengan menjangkau hingga ke kalangan *grass root* dan menyentuh langsung masyarakat dengan kampanye *direct selling*. Untuk menguatkan penetrasi tersebut, AKP membentuk posko pemenangan di berbagai tempat. Omer Faruk (Deputi Hubungan Luar Negeri AKP Istanbul) menyatakan bahwa ada lebih dari 1000 posko di Istanbul yang juga berfungsi sebagai rumah aspirasi. Posisi *outlet*/posko sangat strategis dengan desain ruangan yang sangat profesional seperti misalnya di salah satu posko pemenangan yang terletak di Taksim Square.¹⁰⁴

Ketua AKP di distrik Beyoglu Husein Ughur menyebutkan penguasaan strategi teritorial AKP dilakukan dengan mendirikan posko-posko pemenangan yang merupakan *outlet* strategis di seluruh wilayah dan AKP memberikan tanggung jawab pemenangan hingga di wilayah yang terkecil seperti RT (kalau di Indonesia). Posko pemenangan disewa dalam jangka waktu tiga

¹⁰⁴ *Ibid.*, Hal: 159.

bulan menjelang pemilu dan siap melayani masyarakat dari jam 9 pagi hingga jam 1 pagi serta dijaga oleh 3 orang yakni 1 orang petugas administrasi, 1 orang *office boy* dan 1 orang petugas Humas yang menjelaskan berbagai informasi soal AKP. Di posko tersebut tersedia brosur, *leaflet* dan poster-poster yang berisikan berbagai informasi tentang AKP. Selain itu film tentang profil dan kiprah AKP serta Erdoğan ditampilkan di layar besar tersebut. Pengelolaan posko dilakukan secara profesional dan struktur AKP Istanbul memberikan dukungan secara penuh. Posko seperti di atas berjumlah sekitar 42 buah di satu kecamatan dan bisa saja berbeda jumlahnya di kecamatan lainnya.¹⁰⁵

Omer Faruk menyebut jumlahnya lebih dari 1000 posko se-Istanbul berasal dari dana partai atau donasi simpatisan. Selain posko pemenangan, AKP juga melakukan kunjungan *door to door* dan *face to face communication*, yang didukung dengan penyediaan 100 unit mobil kampanye untuk seluruh wilayah Istanbul. Penguasaan teritorial ini dilakukan dengan cara kunjungan ke distrik-distrik dan para calon anggota legislatif (*caleg*) atau pemimpin AKP juga melakukan dialog langsung dengan masyarakat. Rapat-rapat umum tak terlalu banyak dilakukan dan kampanye dengan turunnya pemimpin AKP di berbagai komunitas masyarakat menjadi lebih efektif. Erdoğan juga berkunjung ke masyarakat di berbagai distrik di Turki. Di Istanbul, AKP memiliki 100 *caravan* yang sudah ditemplei dengan berbagai iklan AKP dan di dalamnya disiapkan kursi, meja, brosur untuk melakukan kampanye tatap muka dengan calon pemilih dan melayani pendaftaran anggota baru AKP yang sangat mudah prosesnya yakni cukup dengan membubuhkan tanda tangan saja dan mereka akan mendapatkan undangan melalui alamat e-mail mereka ke setiap acara AKP.¹⁰⁶

Di samping *outlet indoor* juga ada *outlet outdoor* yang disiapkan untuk tempat-tempat terbuka seperti di keramaian pasar, di lapangan terbuka yang ramai dikunjungi orang dan dermaga pelabuhan laut antara Turki Asia dan Eropa seperti di Dermaga Uskudar. Hampir semua partai politik membuka *outlet* di dermaga Uskudar, Istanbul dengan jarak *outlet* yang berdekatan antara yang satu dengan yang lain. Masing-masing partai politik berlomba-lomba menarik perhatian pemilih dengan menyebarkan brosur, menyanyi dan menari bersama, memberikan *merchandise* yang menarik dan memberikan kesempatan bertemu dengan pemimpin partai atau *caleg*.¹⁰⁷

¹⁰⁵ *Ibid.*, Hal: 160.

¹⁰⁶ *Ibid.*, Hal: 161.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Keberhasilan AKP memenangkan Pemilu 2002 dan 2007 berturut-turut di era demokrasi selain disebabkan oleh faktor sejarah yang panjang juga karena kapasitas yang besar menyangkut dua hal yakni aspek Erdoğan sebagai pemimpin yang tegas dan kharismatik ditambah aspek pendanaan yang cukup. Besarnya kapasitas pendanaan AKP selain dipengaruhi oleh undang-undang di Turki yang memberikan dukungan finansial yang besar kepada partai-partai yang berada di Parlemen juga merupakan hasil strategi *vernacular politics* yang menjamin ketersediaan dana yang memadai. Selain itu pendanaan juga diperoleh dari strategi menjual reputasi keberhasilan pemerintahan AKP dan menjual mimpi atau rencana pembangunan sehingga mengundang para investor untuk mendanai kampanye dengan kompensasi kemungkinan menjadi salah satu pelaksana proyek-proyek besar yang direncanakan.

Kesimpulannya adalah ketika aspek pelaksanaan strategi *vernacular politics* berjalan baik karena ditunjang dengan jumlah anggota dan relawan yang memadai, organisasi yang besar serta pendanaan yang cukup maka membuat AKP mampu melakukan kampanye permanen secara terus menerus sepanjang tahun. Selain itu AKP juga secara cermat melengkapinya dengan strategi penokohan melalui pemanfaatan media, belanja iklan di TV yang besar, penguasaan teritorial yang kuat, mengusung keberhasilan pemerintahan AKP dengan data-data dan bukti konkrit serta menjual “mimpi” membangun Turki menjadi bangsa yang besar. Memang ada kritikan dari partai oposan bahwa AKP banyak menggunakan fasilitas negara dalam penyelenggaraan kampanyenya serta pemberian mega-mega proyek hanya kepada para pengusaha besar yang berafiliasi kepada pemerintahan AKP. Namun semua fakta menegaskan bahwa salah satu kelebihan AKP selain faktor ideologi Pos-Islamisme yang terbuka dan inklusif serta faktor kepemimpinan Erdoğan, maka strategi adalah juga salah satu faktor terkuatnya yang berpengaruh bagi kemenangan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

IV.7. Aspek-aspek Eskternal ikut Berpengaruh pada Pemenangan Pemilu AKP (2002-2007).

Di Turki tidak henti-hentinya terjadi instabilitas politik yang salah satu penyebabnya adalah campur tangan militer di dalam pemerintahan di Turki. Pada tahun 1980, terjadi berbagai tindak kekerasan berupa kudeta militer. Walaupun keadaan ini berangsur-angsur mulai berkurang, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia secara terang-terangan masih sering terjadi. Perlawanan suku Kurdi dan etnis Armenia yang ada di negara ini merupakan sumber konflik politik yang terus berlangsung di negeri ini. Belum lagi dengan negara Armenia dan

Yunani sebagai negara tetangga Turki.¹⁰⁸ Pada tahun 1996 Turki menjalin kerja sama di bidang militer dengan Israel yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kemarahan bangsa Arab dan kaum Muslimin. Padahal sejak awal 1990 Turki sedang mengalami krisis sosial, politik dan ekonomi atau krisis multidimensional yang sangat berat. Krisis politik ditandai dengan bergantinya pemerintahan sejak tahun 1995, dimulai dari Necmettin Erbakan (Islam), kemudian Tansu Çiller yang berduet dengan Mesut Yılmaz, berganti lagi Erbakan bersama Çiller, kemudian Yılmaz. Pada tahun 1999, Yılmaz dipecat dan digantikan oleh Bülent Ecevit. Dan pada tahun 1999, pemerintah Turki menangkap Abdullah Öcalan (tokoh Kurdi) yang kemudian dijatuhi hukuman mati. Akibatnya kondisi politik di Turki semakin tidak stabil.

Instabilitas politik ditambah krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun 2001 telah meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Turki. Rakyat dan pihak swasta kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan dan menginginkan perubahan. Masalah serius di dalam aspek sosial, politik dan ekonomi sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari bangsa Turki. Selain kondisi sosial-politik dan ekonomi yang buruk sehingga menyebabkan krisis kepercayaan rakyat dan swasta terhadap pemerintahan, terjadi pula represi terhadap kebebasan *civil society*. Masyarakat Turki yang memiliki akar keislaman yang sangat kuat sangat ditekan oleh pemerintah ultra sekuler.¹⁰⁹

Situasi tersebut diungkapkan oleh Enez Tuzgen, kandidat Doktor di Bosphorus University, Istanbul:

“Before the military coup there was really active political live among youth from leftist, righthist, nationalist and islamist. But the coup has resulted in prisoning of thousands youth from different ideologies and after 1980s military coup, we had a period of default position but being in 1990-s the default decision reappeared because the multi party system. And Islamist are concerned the beginning of 1990s because of the Refah Party from Erbakan, so at that time I think both men and women on islamist side were really active. And there’s an article I remember I read about how Erdogan himself organized women to win the Mayor of Istanbul, but with 1997, 28th February, post modern Military coup the Islamism again, which being impacted of it, and there was I think reperiod, of not default position but we were going to more underground”¹¹⁰

“Sebelum intervensi militer, kehidupan politik para pemuda di Turki sangat aktif baik dari pemuda aliran kiri, nasionalis, konservatif maupun Islamis. Namun kudeta militer di tahun 1980 yang berujung dipenjarakannya ribuan pemuda dari berbagai ideologi

¹⁰⁸ Ahmad al-Usaury. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Akbar Media Eka Sarana. Jakarta, 2003. Hal: 495.

¹⁰⁹ Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*). Makalah: *Introductory Brief About AKP*. 2008.

¹¹⁰ Wawancara dengan Enez Tuzgen di Youth Camp UNIW di Jakarta, Januari 2010.

menyebabkan kevakuman politik. Kegagalan politik kembali muncul ketika Turki menganut sistem multi-partai yang menyebabkan instabilitas, tetapi situasi ini dihadapi kelompok Islamis dengan sungguh-sungguh melalui partai Refah di bawah pimpinan Erbakan. Saya ingat pernah membaca bagaimana Erdogan memimpin dan mengorganisir sendiri para wanita untuk memenangkan posisi sebagai Wali kota Istanbul pada tahun 1994, namun kemudian di tanggal 28 Februari 1997 terjadi kembali kudeta terhadap pemerintahan Islamis PM Erbakan dan sejak itu boleh dikatakan kembali terjadi kegagalan sehingga terpaksa menjadi gerakan bawah tanah”.

Oleh karena itu momentum yang tepat bagi kemunculan kembali partai berhaluan Islam adalah ketika Turki mengajukan proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa sehingga semakin menguat tuntutan melakukan demokratisasi yang secara tidak langsung melemahkan posisi militer dan sekuler yang represif terhadap Islam serta sebaliknya memberi keleluasaan pada partai berhaluan Islam. AKP muncul di saat yang tepat yakni pada tahun 2001 sehingga memperoleh respon yang positif karena dinilai memberikan harapan baru.

Selain itu faktor budaya Turki sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tidak bisa dilepaskan dari peradaban Islam khususnya sub kebudayaan Islam Turki turut menjadi faktor eksternal yang kondusif bagi keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.¹¹¹ Cihangir Isbilir¹¹², Ketua UNIW menyatakan bahwa kultur Islam di Turki memiliki akar sejarah yang sangat dalam dan lama. Islam di Turki menurut Isbilir berakar kuat di masyarakat dalam bentuk jama'ah-jama'ah dan tarekat-tarekat, sehingga sekularisasi yang dicanangkan Mustapha Kamal sejak 1923 tidak pernah membuat rakyat Turki menjadi benar-benar sekuler. Selain itu, Turki tidak pernah dijajah bahkan pernah menjadi imperium besar semasa Ottoman Empire atau Kekhilafahan Turki Utsmani sehingga nampak pada karakter bangsa Turki yang penuh percaya diri. Di Turki, unsur feodalisme di dalam budaya politiknya menjadi jauh berkurang di masa pemerintahan AKP dibanding masa pemerintahan sekuler CHP seperti nampak dalam orasi kemenangan Erdogan “Kami memimpin untuk melayani kalian, wahai rakyat Turki dan bukan untuk memerintah kalian”¹¹³.

Menurut Ahmad F. Syaifuddin, guru besar antropologi UI, bila dilihat dari perspektif antropologis maka banyak temuan arkelogis yang menunjukkan peradaban tinggi yang kuno berada di satu daerah yang subur membentuk bulan sabit (*fertile crescent*) yang sangat kaya dengan peninggalan-peninggalan sehingga membuat orang-orang di daerah tersebut sangat

¹¹¹ Samuel P. Huntington. *Op. Cit.* Hal: 48-49

¹¹² Wawancara dengan Cihangir Isbilir pada penutupan Youth Camp di Bandung, Sabtu 26 Januari 2010. Pukul 16.00-16.15 WIB.

¹¹³ Anthony Shadid, New York Times, Rabu, 1 Juni 2011.

bangga. Salah satu *cultur revival* adalah munculnya kebanggaan (*pride*) tradisi. Kebanggaan akan tradisi ini kemudian bercampur dengan keyakinan keagamaan sehingga terjadi sintesis atau peleburan antara nilai-nilai tradisi keunggulan sebagai bangsa yang memiliki banyak peninggalan peradaban pertama dengan nilai-nilai keislaman yang datang berikutnya. Menurut Ahmad kultur Islam di Turki yang jumlah penduduknya 99% Muslim menurutnya relatif homogen, terlebih lagi pernah menjadi pusat kekuasaan Islam di masa kekhilafahan Turki Utsmani atau *Ottoman Empire*. Sehingga faktor peradaban tinggi, kultur keislaman yang relatif homogen di Turki menjadi sebuah lahan yang baik bagi tumbuhnya partai politik berhaluan Islam yang modern seperti AKP.¹¹⁴ Oleh karena itu aspek-aspek eksternal berupa situasi sosial, politik, ekonomi serta tuntutan demokratisasi dari Uni Eropa ditambah faktor budaya yang homogen turut berpengaruh positif bagi kemenangan Pemilu AKP di Turki di Pemilu 2002 dan 2007.

Bila aspek-aspek internal partai diperbandingkan pengaruhnya bagi AKP, maka berdasarkan observasi ditambah kajian literatur serta wawancara dengan para pendiri dan petinggi AKP didapatkan aspek paling dominan berperan di kemenangan Pemilu 2002 dan 2007 adalah ideologi Pos-Islamis yang sudah secara utuh dipahami dan diterapkan, aspek kepemimpinan kharismatis Erdogan dan aspek strategi yang sangat komprehensif dilakukan oleh AKP. Sedangkan ketiga aspek lainnya yakni organisasi, basis massa dan sistem rekrutmen kader walaupun tidak dominan pengaruhnya, bukan menjadi aspek kelemahan AKP. Namun dalam kaitannya dengan aspek eksternal, kondisi sosial politik terkait dengan ancaman intervensi militer serta penegakan demokrasi yang masih berproses merupakan aspek eksternal yang masih berpengaruh negatif bagi AKP. Sedangkan aspek ekonomi dan budaya berpengaruh sangat positif bagi kemenangan Pemilu AKP di 2002 dan 2007.

¹¹⁴ Wawancara dengan Prof. Ahmad Fedyani Syaifuddin, staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Budaya dan Agama. Kamis, 21 April 2011, pukul 10.35-11.20 WIB.

BAB V

PERBANDINGAN PENGARUH ASPEK-ASPEK INTERNAL DAN EKSTERNAL PARTAI PADA PEMENANGAN PEMILU PKS DI INDONESIA (1999-2009) DAN AKP DI TURKI (2002-2007)

Bab V menguraikan perbandingan kemenangan Pemilu PKS di Indonesia pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009 dan AKP di Turki pada Pemilu 2002 dan 2007 dalam hal ini mengenai perbandingan pengaruh aspek-aspek internal dan eksternal partai pada keberhasilan AKP menjadi *the winning party* dan PKS sebagai *the survival party*. Perbandingan dimulai dengan deskripsi dan kategorisasi ideologi PKS dan AKP berikut pengaruhnya pada kemenangan pemilu masing-masing untuk selanjutnya diperbandingkan. Berikutnya dibahas jenis organisasi, basis massa, kaderisasi, kepemimpinan dan strategi PKS serta jenis organisasi, basis massa, kaderisasi dan kepemimpinan AKP serta pengaruh masing-masing faktor tersebut bagi kemenangan pemilu PKS dan AKP untuk kemudian diperbandingkan. Aspek terakhir yang juga dianalisis dan diperbandingkan pengaruhnya bagi kemenangan pemilu PKS dan AKP adalah aspek eksternal berupa aspek sosial, politik, ekonomi dan budaya kedua negara yang menjadi lingkungan tempat kedua partai tersebut didirikan dan berkembang. Seluruh perbandingan dimaksudkan untuk mengetahui penyebab kesenjangan perolehan kursi PKS dan AKP yang ada kaitannya dengan bagaimana kesemua aspek internal dan eksternal partai tersebut mempengaruhi kemenangan Pemilu kedua partai tersebut.

Globalisasi memungkinkan adanya internasionalisasi partai-partai yakni perbedaan dan pengkategorisasian partai secara global berdasarkan ideologi dan penggabungan kekuatan antar partai politik di berbagai negara yang memiliki kesamaan ideologi. Oleh karena itu menurut Sigmund Neumann ketika membandingkan partai politik pertama-tama perlu diperhatikan perbandingan ideologinya dalam ruang lingkup internasional.¹ Selain itu menurut Hans Keman dalam sebuah studi komparatif, sangat penting sejak awal sudah diketahui apa yang diperbandingkan, kemudian dalam rentang waktu kapan membandingkannya dan bagaimana cara membandingkan unit-unit analisis tersebut.² Beberapa aspek yang diungkapkan oleh Neumann digunakan sebagai unit analisis yang diperbandingkan dalam disertasi ini misalnya aspek

¹ Miriam Budiardjo. *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia, 1982. h: 14

² Hans Keman. *Comparative Methodology*, London: Sage Published, 1999. h: 39.

ideologi dan kepemimpinan PKS dan AKP serta bagaimana keterkaitan aspek-aspek tersebut dengan kemenangan Pemilu kedua partai politik tersebut. Selain itu dengan merujuk pendapat Hans Keman. Maka penulis dalam disertasi ini sejak awal telah menjelaskan bahwa yang diperbandingkan adalah aspek-aspek yang berpengaruh dalam kemenangan Pemilu PKS di Indonesia dalam rentang waktu 1999-2009 dan AKP di Turki dalam rentang waktu 2002-2007. Oleh karena itu pertanyaan-pertanyaan apa yang diperbandingkan, kapan dan bagaimana cara membandingkan unit-unit analisis antara PKS dan AKP sudah ditentukan sejak awal penelitian disertasi ini dimulai dan setelah itu dianalisis secara sistematis dan diinterpretasikan.

Presiden Turki Abdullah Gul dalam orasinya di Universitas Indonesia menyebutkan bahwa Turki dan Indonesia memiliki kesamaan dalam peran strategisnya di dunia Islam dengan mencontohkan demokratisasi yang terjadi di kedua negara tersebut.³ Sedangkan Soeripto tokoh PKS yang menjadi pengurus Komisi Perempuan, Keluarga dan Pemuda di lembaga *UNIW (The Union of NGO's of the Islamic World)* yang berpusat di Turki, mengatakan masih cukup panjang jalan yang harus ditempuh oleh Turki dan terutama Indonesia untuk menjadi pemimpin di dunia Islam terutama dalam kaitannya dengan penguasaan teknologi. Bila di masa kemerdekaan aspek yang menonjol di dunia Islam adalah perjuangan dan pembangunan politik, maka kini untuk dapat menjadi kiblat bagi negara-negara Muslim lainnya yang harus lebih mengemuka adalah keberhasilan menyejahterakan rakyat dengan pembangunan ekonominya.⁴

Dalam konteks tersebut di atas, peran partai politik seperti PKS dan AKP menjadi sangat penting sebagai salah satu unsur yang dapat menguatkan demokrasi. Ada beberapa persamaan antara PKS dan AKP yakni sama-sama disebut *Asef Bayat* sebagai partai-partai politik yang berideologi Pos-Islamis yakni partai politik yang berasal dari gerakan dakwah Islam dan saat ini bertujuan mewujudkan *good governance* dan *clean government*. Baik PKS maupun AKP memiliki basis massa utama yang sama yaitu *middle class* atau *urban educated* yakni Muslim terdidik yang konservatif dan tinggal di perkotaan. Kedua partai ini juga menggunakan strategi yang sama yakni *vernacular politic* yakni strategi berbasis lokal yang mensinergikan gerak horizontal kader melalui dakwah dan LSM sosial, pendidikan, budaya dan ekonomi serta mobilitas vertikal melalui kader-kadernya yang menjadi pejabat-pejabat publik di tingkat daerah.

³ Pidato Abdullah Gul di saat pelantikannya sebagai Doktor Honoris Causa di bidang Ilmu Politik. Balai Sidang UI, Kampus Depok. Rabu 6 April 2011.

⁴ Wawancara dengan Soeripto dari *Woman, Family and Youth Commission UNIW (The Union of NGO's of the Islamic World)* pada Rabu 22 Desember 2010. Pukul 09.30 – 09.45 WIB.

Namun tentu saja ada pula perbedaan-perbedaan di antara kedua partai politik tersebut. AKP telah memiliki akar historis dan pengalaman politis sejak awal 1970-an yakni berasal dari gerakan dakwah *Milli Görüş* yang didirikan oleh Necmettin Erbakan di tahun 1969 dan tak lama kemudian berturut-turut sejak tahun 1970-an mendirikan MNP (*Milli Nizam Partisi*) atau Partai Keteraturan Bangsa dan MSP (*Millî Selâmet Partisi*) atau Partai Keselamatan Bangsa. Kemudian di 1980-an dilanjutkan dengan keberhasilan *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan dan di awal tahun 2000, *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan yang akhirnya bercabang dua. Nurman Kurtulmus di bawah bimbingan Erbakan membentuk *Saadet Partisi* atau Partai Kebahagiaan sedangkan Recep Tayyip Erdoğan tanpa direstui gurunya yakni Erbakan, mendirikan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP atau Partai Keadilan dan Pembangunan) bersama kader-kader Erbakan lainnya seperti Abdullah Gül dan Huseyin Karsu.

Sementara PKS berasal dari gerakan Tarbiyah di bulan Januari 1980 yang baru memiliki pengalaman politik 18 tahun kemudian yakni ketika Partai Keadilan (PK) didirikan di tahun 1998. Selain perbedaan dari segi umur pertumbuhannya, PKS juga berbeda dari AKP dalam tahapan eksistensinya. PKS baru pada tahapan penguatan eksistensi sejak berdiri di tahun 1998 dan juga baru merupakan *the survival party* yang menjadi bagian dari *mainstream*, sementara AKP sudah *leading* dan menjadi *the ruling party*.⁵ Perbedaan lainnya adalah dalam hal aplikasi ideologi Pos-Islamis yang sudah lebih mapan di AKP dan masih terus berproses di PKS. Demikian pula halnya dengan bentuk organisasi dan model sistem rekrutmennya ada perbedaan antara PKS dan AKP.

Dari aspek kepemimpinannya pun ada perbedaan antara Necmettin Erbakan pendiri *Milli Görüş* di Turki yang melahirkan AKP dengan Hilmi Aminuddin, pendiri gerakan Tarbiyah yang melahirkan PKS. Erbakan memiliki masalah dalam penyerahan tongkat estafet regenerasi dan awalnya berbeda pandangan dengan Recep Tayyip Erdoğan yang mendirikan AKP namun kemudian Erbakan juga bermasalah dengan Nurman Kurtulmus di *Saadet Partisi* sehingga Kurtulmus keluar dan membentuk partai baru yakni *Halkın Sesi Partisi* (HAS Parti atau Partai Suara Rakyat) dan Erbakan kembali memimpin *Saadet Partisi* hingga wafatnya pada 27 Februari 2011.⁶ Sementara di PKS, proses pergantian Presiden PKS dan jabatan-jabatan publik adalah hal yang biasa karena Hilmi Aminuddin memilih menjadi *King Maker*, namun tidak demikian

⁵ Wawancara dengan Anis Matta, Sekjen PKS. Jakarta, Senin 22 Februari 2010, pukul 14.00-14.30 WIB.

⁶ Wawancara dengan Hilmi Aminuddin di Lembang, Jawa Barat. Minggu 6 Desember 2009, jam 17.00-17.45 WIB.

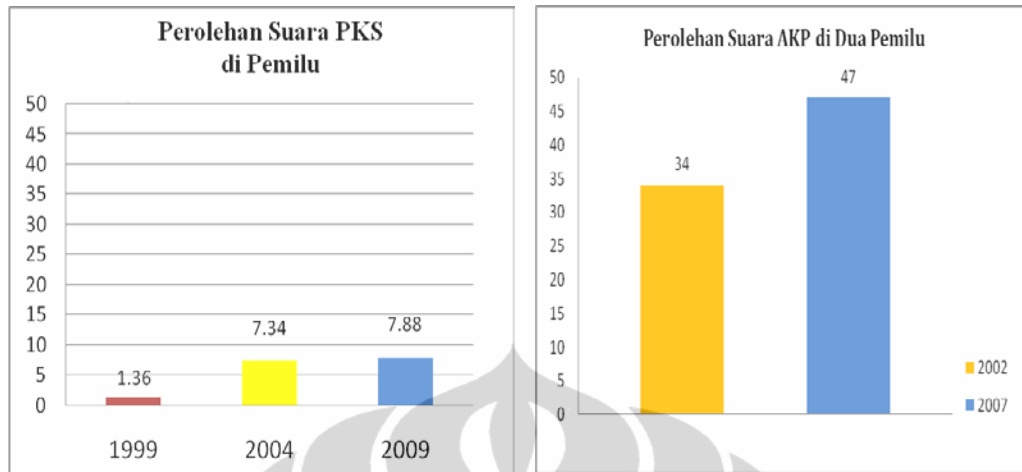
halnya dalam hal kepemimpinan di Majelis Syuro (MS) karena Hilmi Aminuddin berulang kali terpilih kembali menjadi Ketua MS, sesuatu yang sebenarnya tidak diharapkan. Beliau sempat menyatakan bahwa dirinya belum berhasil melakukan regenerasi kepemimpinan karena murid-muridnya belum ada yang mau menggantikan kepemimpinannya di MS. Namun di sisi lain beberapa mantan pendiri yang keluar dari PKS menuduh Hilmi Aminuddin melestarikan kedudukannya sebagai Ketua MS.

Terlepas dari adanya persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan di antara PKS di Indonesia dan AKP di Turki serta perbedaan dalam optimalisasi aspek-aspek internal yang diperbandingkan serta perbedaan aspek-aspek eksternal yang melingkupinya, faktanya ada kesenjangan dalam perolehan suara PKS dan AKP di beberapa Pemilu yang diikutinya. AKP berdiri pada tahun 2001 dan langsung mengikuti pemilihan umum legislatif pada 3 November 2002 serta keluar sebagai pemenang mengalahkan partai-partai lama dengan perolehan suara sebesar 34%. AKP kemudian menjadi partai berkuasa yang mengakhiri era pemerintahan koalisi yang sudah berlangsung sejak 1991. Kemenangan AKP berlanjut di Pemilu 2007 dengan perolehan sebesar 47%.⁷ Sementara perolehan suara PKS sejak masih berupa Partai Keadilan (PK) di Pemilu 1999 hingga menjadi PKS di Pemilu 2004 dan 2009 walaupun mengalami peningkatan namun tidak signifikan terutama dari Pemilu 2004 ke Pemilu 2009. Pada Pemilu 1999, PK memperoleh suara 1,4 %, tidak lolos *electoral threshold* 2% dan hanya mendapatkan 7 kursi di DPR pusat. Kemudian pada pemilu 2004 PK yang telah menjadi PKS mengalami kenaikan cukup besar yakni memperoleh 7,3% suara atau setara dengan 45 kursi (8%) dan pada Pemilu 2009, PKS hanya mengalami kenaikan kecil yakni 7,88 % perolehan suara dan setara dengan 57 kursi (10,3%). Walaupun hasil tersebut membuat PKS menjadi *the survival party* yang dapat meningkatkan representasinya di parlemen dari Pemilu ke Pemilu selama rentang waktu 1999-2009, tetap ada kesenjangan perolehan suara yang sangat besar dengan AKP yang memperoleh 34% suara di Pemilu 2002 dan kemudian meningkat menjadi 47% suara di Pemilu 2007 sehingga menjadi *the ruling party*.⁸

⁷ CD *Turkiye Istatik Kurumu* (Badan Statistik Turki) di Turki, 2009.

⁸ <http://www.kpu.go.id>.

Grafik V.1. Perbandingan Perolehan Suara PKS dan AKP



Sumber: Diolah dari www.kpu.go.id dan *Turkiye Istatik Kurumu* (Badan Statistik Turki) tahun 2009.

V.1. Perbedaan antara ideologi PKS yang masih berproses menjadi Pos-Islamis sejak 2004 dengan AKP yang sudah Pos-Islamis sejak 2001 mempengaruhi Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)

Terinspirasi oleh Gerakan Islam arus utama Ikhwanul Muslimin sehingga memperjuangkan cita-citanya melalui jalur politik, menyebabkan Greg Fealy awalnya menyebut PKS sebagai Islamis, namun Asef Bayat menyebut PKS sebagai salah satu kelompok Islamis yang mentransformasi dirinya menjadi Pos-Islamis.⁹ Greg Fealy pun kemudian membenarkan bahwa PKS sedang mengalami transisi dari partai Islamis ke partai Pos-Islamis dengan menjadi partai terbuka semakin inklusif dan heterogen walaupun hanya sampai batas tertentu.¹⁰ PKS di tahun 2008 di Mukernas PKS di Bali mulai mewacanakan nilai-nilai kebangsaan dan menyebut dirinya sebagai partai Islam terbuka sebagai upaya menjadikan PKS lebih inklusif dan toleran terhadap pluralitas masyarakat. Dengan menggelar acara Mukernas di Bali yang notabene berpenduduk mayoritas Hindu, merupakan langkah awal bersikap lebih toleran terhadap non-muslim. Walaupun proses transisi ideologi Islamis menuju pos-Islamis sempat memunculkan

⁹ Asef Bayat. *The Post-Islamist Revolutions. What the Revolts in the Arab World Mean*. April 26, 2011 for free weekly updates from ForeignAffairs.com.

¹⁰ Greg Fealy dalam bedah buku: *PKS dan kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Bedah buku ini diselenggarakan di FISIP UI, Jum'at 17 Februari 2012.

konflik internal di antara para pemimpin PKS, dengan tradisi ilmiah yang kuat di PKS persoalan tersebut relatif terselesaikan.

Perubahan yang nampak pada PKS dari sebelumnya PK sering dipahami orang bahwa PKS telah mengalami perubahan dalam hal ideologi. Hal tersebut terbantah dari pernyataan *founding father* PK, Hilmi Aminuddin, Ketua Majelis Syuro PKS yang menegaskan bahwa sejak awal bentuk ideal yang diperjuangkan oleh PKS bukan *Islamic state* atau model teokrasi seperti negara Islam Iran misalnya melainkan masyarakat Madani atau masyarakat yang berperadaban dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan Islam yang bersifat universal.¹¹ Dalam arahnya kepada para kader pimpinan PKS dari seluruh Indonesia, Hilmi Aminuddin juga menegaskan bahwa ada lima prinsip yang harus diperhatikan PKS dalam aktivitas politiknya. Kelima prinsip tersebut pertama adalah *ruhul wihdah*, jiwa persatuan dan kedua adalah *ruhud dimokratiah* atau semangat berdemokrasi. Selanjutnya prinsip ketiga adalah pengakuan pada pluralitas (*ta'adudiyah*) karena pluralitas adalah *fitrah* dan *fitrah* adalah *sunnatullah*. Berikutnya prinsip keempat yakni *al wasathiyah* atau sikap moderat yang juga merupakan prinsip ajaran Islam dan akhirnya prinsip kelima adalah *ruhul muwathonah*, semangat hidup berbangsa dan bernegara.¹² Fakta adanya pergeseran dinamis karakter PKS yang Islamis ke arah Pos-Islamisme bukan hanya pernyataan Hilmi Aminuddin selaku pendiri PKS karena beberapa dokumen terutama sejak PK menjadi PKS telah menunjukkan adanya proses transformasi tersebut. misalnya Anggaran dasar dan Manifesto PKS yang tidak menyebutkan keinginan mendirikan negara Islam melainkan masyarakat madani.¹³

Daniel Pipes, Martin Kramer dan Barry Rubin dari Amerika Serikat menulis Islamisme dengan pandangan negatif dan mengatakan bahwa Islamisme merupakan antitesa Demokrasi sehingga tidak mungkin kompatibel. Sedangkan yang secara khusus menulis kelompok Islamis di Indonesia termasuk PKS adalah Zachary Abuza, Bilveer Singh dan Sadanand Dhume. PKS bahkan dianggap Sadanand Dhume lebih berbahaya dari jaringan teroris Jama'ah Islamiyah.¹⁴ Namun sebaliknya para akademisi yang mempercayai ada kompatibilitas antara Islamisme dengan Demokrasi pada umumnya mengajukan contoh AKP di Turki, PKS di Indonesia dan

¹¹ Wawancara dengan Ustadz Hilmi Aminuddin, Pendiri Gerakan Tarbiyah dan Ketua Majelis Syuro PKS. Jakarta. Sabtu 17 Maret 2012.

¹² KH Hilmi Aminuddin. *Khitob Qiyadi* (Arahan Pemimpin) di Mukernas di Yogyakarta 25 Februari 2011.

¹³ Manifesto Partai Keadilan Sejahtera. DPP, Jakarta, 2004. h: 1.

¹⁴ Burhanuddin Muhtadi. *Dilema PKS, Suara dan Syariah*. Jakarta, Kepustakaan Populer Gramedia. Kata Pengantar Greg Fealy. h: xv-xvi.

PAS di Malaysia dengan melihat bukti kompromi partai-partai Islamis tersebut yang mau bekerja sama dalam sistem politik demokrasi.

Bahkan beberapa sarjana seperti Vali Nasr, Greg Fealy, Asef Bayat dan Peter Mandaville melihat bahwa banyak partai Islamis yang masuk ke dalam sistem demokrasi akhirnya beradaptasi dan mengenyampingkan cita-cita ideologis berupa pendirian negara Islam atau teokrasi dan pemberlakuan syariat Islam secara formal melalui instrumen negara serta kini lebih menekankan nilai-nilai substantif Islam dengan mengedepankan agenda yang universal terkait isu-isu tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Para intelektual tersebut meyakini adanya transformasi dari partai-partai Islami ke pos-Islamis.¹⁵ Sekjen PKS Anis Matta menjelaskan bahwa pergeseran aplikasi ideologi PKS merupakan cerminan ekspresi PKS dalam perjuangannya di ranah politik dan bukan sebuah strategi karena menyembunyikan jati diri dan agenda terselubung. Keterbukaan dan menghargai keberagaman di dunia yang semakin terjadi hibridisasi adalah merupakan karakter asli ajaran Islam yang menjadi ideologi PKS.¹⁶

Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur menyatakan bahwa Partai Keadilan di Pemilu 1999 di provinsi Kaltim sempat dianggap oleh masyarakat sebagai partai yang berideologi Islam garis keras yang eksklusif, sementara di daerah itu juga ada penduduk Kristen atau suku Dayak yang animis. Namun kesan itu berubah ketika PKS di Pemilu 2004 sudah nampak lebih cair, mau berkomunikasi dan mengurangi kesan eksklusifnya serta aktif menunjukkan kepeduliannya dengan aksi pelayanan sosial. Bahkan di tahun 2009 menurut Hadi Mulyadi PKS lebih dikenal sebagai partai terbuka yang religius nasionalis dan jauh dari kesan eksklusif sehingga membuat PKS semakin diterima di masyarakat Kaltim.¹⁷

Transisi ideologi PKS dari Islamis ke Pos-Islamis mempengaruhi beberapa kebijakan. Ideologi Pos-Islamis yang menunjukkan keterbukaan dan toleransi pada perbedaan sesuai dengan perkembangan tantangan bagi PKS di lapangan. Menurut Aidil, Wakil Ketua Wilayah Dakwah Indonesia Timur (Intim), di Papua, di beberapa kabupaten yang benar-benar hampir 100%

¹⁵ *Ibid*, h: xv-xvi.

¹⁶ *Ibid*. Kata Pengantar Anis Matta. h: xxiii.

¹⁷ Wawancara dengan Oktan Hidayat, Ketua Wilda Bali-Nusra. Jakarta, 13 Maret 2011.

Kristen, PKS memiliki total 10 anggota legislatif.¹⁸ Kabupaten-kabupaten tersebut keseluruhannya ada di Papua dengan jumlah alegnya sebagai berikut:

- 1) Kab. Yahukimo - 1 aleg PKS
- 2) Kab. Pegunungan Bintang - 1 aleg PKS
- 3) Kab. Yalimo - 2 aleg PKS
- 4) Kab. Lanny Jaya - 2 aleg PKS
- 5) Kab. Nduga - 1 aleg PKS
- 6) Kab. Jayawijaya - 1 aleg PKS
- 7) Kab. Pania - 1 aleg PKS
- 8) Kab. Intan Jaya - 2 aleg PKS

Kondisi tersebut bermula dari fakta di lapangan karena banyak orang-orang Kristen di kabupaten-kabupaten Kristen yang menuntut diizinkan membentuk DPC PKS dan ingin memperjuangkan nasib rakyat di daerahnya melalui PKS sementara AD/ART PKS mencantumkan anggota PKS adalah WNI yang beragama Islam, maka dengan berbagai pembahasan di Dewan Syariah Pusat dan Majelis Syuro maka pada tahun 2005 terjadi amandemen AD/ART PKS di pasal 6 ayat 1 yang terkait syarat keanggotaan PKS. Sehingga kini, anggota PKS adalah setiap Warga Negara RI dapat menjadi anggota PKS. Perubahan AD/ART yang kemudian berdampak pada perubahan kebijakan pendirian struktur organisasi PKS di daerah-daerah Kristen di Papua yang dengan sendirinya diisi oleh orang-orang Kristen dan juga mengajukan caleg-caleg Kristen di tingkat kabupaten ternyata meningkatkan perolehan suara dan kursi PKS di Papua, sehingga di daerah-daerah Kristen pun PKS memiliki wakil-wakilnya yang juga beragama Kristen namun menjalankan kebijakan partai terkait dengan peraturan tidak boleh korupsi dan berjuang menyejahterakan rakyat.

Dari semua uraian di atas nampak bahwa selain mempengaruhi kader untuk bergerak, aplikasi ideologi Pos-Islamis yang tercermin pada perilaku kadernya yang lebih terbuka dan inklusif serta kebijakan partai yang juga lebih akomodatif terhadap perbedaan seperti ditunjukkan dalam kasus di Papua yang ditunjukkan antara lain dengan adanya indikator-indikator kuantitatif berupa peningkatan perolehan kursi di daerah-daerah yang secara ideologis

¹⁸ Wawancara dengan Aidil, Wakil Ketua Wilda Intim, DPP PKS, Jakarta. Selasa 20 Juni 2012.

merupakan basis PKS seperti di Sumatera Barat misalnya dan relatif stagnan atau di daerah-daerah yang secara ideologis bukan basis PKS seperti Bali, NTT dan Papua. Hanya saja sebagaimana diungkapkan Nurcholish Madjid bahwa di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat lebih melihat substansi dari pada simbol, maka penulis beranggapan bila PKS tidak mampu mengartikulasikan ideologi Pos-Islamis dalam perspektif kepentingan masyarakat luas akan sulit untuk menjadi kekuatan utama di Indonesia.

Oleh karena itu PKS masih harus terus melakukan adaptasi dalam hal aplikasi ideologisnya dengan cara mengemas nilai-nilai Islam dengan bahasa yang lebih memasyarakat dan mudah dicerna rakyat Indonesia. Selain itu ideologi Pos-Islamis masih harus terus dibuktikan dan diterjemahkan lebih lanjut ke dalam program-program yang universal dan menyentuh semua komponen bangsa seperti program-program yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan rakyat.¹⁹ Hal itu masih merupakan kelemahan PKS yang harus diatasi oleh para pejabat publiknya karena belum menunjukkan keunggulan kerja dan kinerjanya sebagai bentuk aplikasi ideologi Islam.

Sementara AKP di Turki dinilai Greg Fealy sebagai contoh gerakan Islam yang paling mempengaruhi gerakan Islam lainnya di seluruh dunia. AKP memiliki identitas sebagai partai politik berhaluan Islam yang moderat dan terbuka karena orang bisa melihat sebagai partai politik berhaluan Islam dari aktivitas dakwahnya, para tokohnya dan basis massanya.²⁰ Julie Chernov Hwang dari Goucher University di AS juga menyebut AKP sebagai *moslem party*.²¹ Hamid Al Ghazali, tokoh Ikhwanul Muslimin bahkan menyatakan “Kemenangan AKP adalah kemenangan Islam moderat”. Gerakan Islam dianggap sukses mentransformasikan Islam dalam wacana modernisme dan demokrasi. Peran itu tidak terlepas dari kontribusi pemikiran Ikhwanul Muslimin yang mengembalikan relasi agama, politik dan negara ini.²² Tak heran seorang Kolonel di Turki masih sangat meyakini bahwa AKP adalah partai politik berorientasi Islam atau dengan kata lain Ikhwanul Muslimin dalam kemasan yang lebih baik. AKP secara ideologis tetap dianggap memiliki akar keislaman dari partai pendahulunya yakni *Refah Partisi* atau Partai Kesejahteraan dan *Fazilet Partisi* atau Partai Kebajikan sehingga dianggap partai berhaluan

¹⁹ Wawancara dengan Hidayat Nur Wahid. Presiden PKS periode 2002-2005 di DPR RI, Rabu, 3 Januari 2011.

²⁰ Greg Fealy dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah* (edisi Bahasa Indonesia). Mizan, 2005. h: 64.

²¹ Wawancara dengan Prof. Julie Chernov Hwang, di Jakarta, Rabu 20 Januari 2010.

²² Ahmad Dzakirin. *Transformasi Politik dan Demokrasi Kalangan Islamis: Potret Gerakan Islam di 2009*. Jakarta: INSURE, 2009, h:1

Islam.²³ Namun menurut Huseyin Kansu, salah seorang pendiri AKP, para pengamat Barat mengklasifikasikan AKP sebagai partai Islam, karena keseluruhan elit AKP mempraktekkan acara hidup Islami, mereka tidak minum alkohol, mereka memakai hijab, mereka mempraktekkan cara hidup Islami maka partainya pun dikatakan partai Islam.

Banyak pengamat politik seperti Ihsan Dagi, Jenny White, Asef Bayat maupun Greg Fealy pada awalnya menggolongkan AKP ke dalam kelompok Islam politik atau Islamis yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dengan masuk ke dalam sistem politik dan menganggap demokrasi sebagai alat untuk mencapai agenda sesungguhnya. Dalam perjalanannya perjuangan kelompok Islamis tersebut dianggap oleh Olivier Roy telah gagal yang ditandai dengan pembekuan beberapa partai kelompok Islamis seperti *Refah Partisi* di Turki dan FIS di Aljazair. Kegagalan kelompok Islamis tersebut menurut Roy menyebabkannya mengalami kemunduran dari Islamis ke Neo-fundamentalis yakni paham Salafy yang sepenuhnya menolak nilai-nilai Barat, menekankan pemberlakuan syariah Islam dan kurang memperhatikan aspek sosial, politik dan ekonomi.²⁴ Namun fenomena kemenangan demi kemenangan yang diperoleh oleh AKP dari Pemilu 2002 dan 2007 serta fakta bahwa selama 8 tahun berkuasa, tidak menunjukkan bahwa AKP memiliki karakter Neo-fundamentalis yang kemudian menggantikan sistem demokrasi menjadi represif atau mengganti konstitusi sekuler dengan teokrasi sebagaimana diutarakan oleh Ihsan Dagi, guru besar di Ankara University.²⁵

Menurut Ihsan Dagi kepemimpinan AKP memang tumbuh dari kader-kader organisasi politik kelompok Islamis di Turki yakni *Milli Görüş* yang didirikan oleh Erbakan dan Islamisme adalah aktivisme politik yang bertujuan membentuk masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan menginginkan pembentukan negara Islam melalui peran negara. Di Turki sejatinya tarik menarik dalam proses transformasi dari karakteristik Islamis menuju Pos-Islamis sudah lama berlangsung. Dahulu baik Erbakan maupun Erdoğan menyebut Uni Eropa sebagai *Christian Club* sehingga Erbakan lebih memilih mengembangkan hubungan dengan negara-negara Muslim yang tergabung dalam *Developing Eights* (D-8) seperti Suriah, Libya, Arab Saudi dan lain-lain.

²³ Vali Nasr. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. Free Press, New York. 2009. h: 249.

²⁴ Olivier Roy. *Gagalnya Islam Politik*. Ed. Terjemahan dari: *The Failure of Political Islam*. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996. h: 98-99.

²⁵ Ihsan Dagi is professor of international relations at the Middle East Technical University in Ankara, Turkey, and the editor-in-chief of the quarterly. *Insight Turkey*. He is the author of *Turkey Between Democracy and Militarism: Post-Kemalist Perspectives (2008)*. *Journal of Democracy Volume 19, Number 3 July 2008* © 2008 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press.

Bahkan Erdoğan Pada tahun 1997 ketika menjadi Walikota Istanbul membacakan puisi yang dianggap bernuansa Islam: “Masjid adalah barak kami. Kubah-kubahnya adalah helm kami, Menara-menaranya adalah pedang kami dan keimanan adalah tentara kami.” Erdoğan dituntut karena menyitir kalimat “an Army of jihad” (tentara jihad) dan menyebut demokrasi dengan sistem *thagut* (*jahiliyah* karena bukan berasal dari Islam). Erdoğan divonis 10 bulan penjara yang dijalannya setelah tidak lagi menjadi walikota di bulan Maret 1999, tetapi setelah 4 bulan ia dibebaskan.²⁶

Erol Erdoğan, salah seorang pemimpin *Saadet Partisi* di Istanbul menyatakan bahwa sahabat-sahabat mereka di *Fazilet Partisi* memisahkan diri dan mendirikan AKP yang tidak setia lagi dengan ideologi Islam yang pernah ada di masa *Ottoman Empire*. Sebenarnya yang terjadi pada AKP yang disebut *Saadet Partisi* sebagai keluar dari ideologi Islamis menurut Asef Bayat dan Greg Fealy adalah sebuah transformasi Islamis menjadi Pos-Islamis yang merupakan proses panjang lebih dari 30 tahun sejak 1970 hingga terjadi di tahun 2001. Sebagian kader Islamis yang bergabung di *Milli Görüş* seperti Recep Tayyip Erdoğan dan Abdullah Gul melihat hampir mustahil memaksakan paham Islamis di negeri yang militer serta elit Kemalisnya sangat teguh dalam mengawal konstitusi negara yakni sekulerisme.

Peristiwa 28 Februari 1996 berupa kudeta terhadap *Refah Partisi* menyisakan trauma karena kelompok-kelompok Islam seperti LSM-LSM dan jaringan-jaringan ekonomi yang berafiliasi ke *Refah Partisi* ikut dibekukan dan disita asetnya sehingga mereka menarik dukungannya pada aktivitas politik *Refah Partisi*. Oleh karena itu Recep Tayyip Erdoğan dan Abdullah Gul mulai mempertanyakan keabsahan cara perjuangan Islamis *Milli Görüş*. Erdoğan, mengajukan pada *murabbinya* atau mentor politiknya, Erbakan agar memperhalus metode perjuangan politiknya dengan menerima demokrasi, tidak menonjolkan nilai-nilai dan simbol Islam, merangkul kubu militer dan sekuler serta mengajukan kembali proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa. Namun usulan Erdoğan tersebut tidak diterima oleh Erbakan, yang saat itu sedang dipenjara, maka kemudian terjadi perpecahan kader-kader *Milli Görüş* dan masing-masing mendirikan partai politik baru di 2001 yang akan mengikuti Pemilu di 2002. *Saadet*

²⁶ <http://middleeast.oabout.com/od/middleeast101/ig/mideast-leaders-in-photos-recep-tayyip-erdogan.htm>

Partisi yang menjaga ciri Islamisnya dibentuk oleh kader-kader Islamis tradisional pada waktu itu dan Erdoğan yang mewakili kelompok Islamis moderat membentuk AKP.²⁷

Saat ini dilihat dari pernyataan-pernyataan publik AKP, basis massa, program dan sikap serta aktivitasnya setelah menjadi partai pemerintah di Turki lebih dari 5 tahun, AKP bukan lagi dikategorikan sebagai partai Islamis namun lebih sebagai partai konservatif yang di dalam tradisi politik Turki dikenal sebagai partai politik kanan-tengah. Asef Bayat menyebut AKP di Turki sebagai salah satu kelompok Islamis yang telah mentransformasi dirinya menjadi kelompok Pos-Islamis. Demikian pula menurut Greg Fealy, AKP sejak 2001 telah bertransformasi menjadi kelompok Pos-Islamis sebagai hasil interaksi mereka dengan kekuatan-kekuatan lain di dalam proses demokrasi. Berkembangnya gerakan demokratis di Timur Tengah menurut Bayat mendorong wacana Islamis menuju wacana Pos-Islamis.²⁸

Sementara di masyarakat Turki sendiri juga sedang terjadi perubahan sebagaimana dinyatakan oleh Hüseyin Kansu bahwa dewasa ini telah terjadi perubahan cara pandang ideologis di Turki sehingga rakyat lebih fleksibel dalam memandang ideologi dan tidak memiliki afiliasi ideologi yang kaku dengan partai politik tertentu. Mereka lebih realistis dan rasional dalam memilih sebuah partai politik sehingga hanya akan memilih partai politik yang dianggap mampu mengatasi pengangguran, memperbaiki perekonomian, memberikan rasa aman dan kesejahteraan serta jaminan hari tua. Selain itu era informasi turut mempengaruhi keinginan rakyat Turki agar negaranya menerapkan wacana global seperti demokrasi, penegakan HAM dan kebebasan.²⁹

Mustafa Ozkaya, direktur TV-Net bahkan meyakini bahwa pertimbangan rasional pragmatis berdasarkan kepentingan perbaikan ekonomi justru menjadi alasan utama rakyat Turki memilih AKP berturut-turut dalam Pemilu 2002 dan 2007 memilih AKP yang dinilainya mampu membaca keinginan rakyat Turki.³⁰ Prof Ozer Sencar, Ketua Pusat Riset Sosial dan Strategi Metropoll di Ankara membenarkan telah terjadi perubahan poros ideologi. Bila sebelumnya ada dikotomi ideologi antara ideologi kiri (komunis atau sosialis) dan ideologi kanan (liberalis) yang kemudian berubah menjadi polarisasi antara sekulerisme dan anti-sekulerisme, maka kini

²⁷ Wawancara dengan Mehmed Ali Behan, guru besar di Universitas Marmara, Istanbul di Bab-el-Aleem, Istanbul. Rabu, 12 Agustus 2009. Pukul 12.00-13.00 waktu Turki.

²⁸ Asef Bayat. *Op. Cit.*

²⁹ Hüseyin Kansu. *Op. Cit.* 10 Agustus 2009. (kalo bukan kedua kali berarti jgn opcit ya non

³⁰ Wawancara dengan Mustafa Ozkaya, Direktur TV-Net dilakukan di kantor TV-net pada hari Kamis, 13 Agustus 2009: pukul 14.15 – 15.00 waktu Turki dengan bahasa pengantar Inggris.

polarisasinya adalah antara yang mendukung AKP dan yang tidak, atau antara yang mempercayai Erdoğan dan yang tidak.³¹

Bila disimpulkan memang AKP sejak awal berdirinya yakni 2001 telah mendeklarasikan diri bukan partai Islam dan para pendirinya di antaranya Huseyin Kansu menyebut AKP sebagai partai konservatif demokrat, tetap saja pengamat dan kelompok militer cenderung meyakini AKP tetap merupakan partai Islamis sebagaimana *Fazilet Partisi*. Namun tidak ada alasan yang cukup bagi militer untuk membekukan AKP, selain itu AKP dengan keberhasilan pembangunan ekonominya telah berhasil menghilangkan resistensi pada partai Islamis sehingga banyak pula kelompok sekuler di Turki yang memberikan suaranya ke AKP. Seiring sejalan dengan itu AKP juga mengalami pergeseran dari Islamis ke Pos-Islamis seraya dengan cerdas melakukan uji coba kesiapan rakyat dan terutama juga militer dalam menerima nilai-nilai Islam misalnya ketika pemerintahan AKP hendak membatasi peredaran minuman keras (miras) di daerah-daerah wisata dan mendapat kecaman sangat keras maka kemudian dikoreksi dan ditunda lebih dulu kebijakannya. Demikian juga ketika pada tahun 2008, parlemen sepakat untuk mencabut larangan berjilbab di kampus-kampus dan kantor-kantor pemerintah, keputusan tersebut kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) karena dianggap bertentangan dengan UUD Turki yang sekuler. Pemerintahan AKP pun menerimanya dan perjuangan menghapuskan larangan berjilbab pun tetap dilanjutkan atas nama perjuangan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh *civil society* berupa LSM-LSM Islam yang berafiliasi ke AKP.

Ternyata usaha penghapusan larangan berjilbab di tahun 2008 itu menimbulkan kemarahan militer yang kemudian melakukan usaha kudeta militer di tahun 2008 itu juga namun berhasil digagalkan. Hal yang menguntungkan bagi pemerintahan AKP adalah dukungan dari negara-negara Uni Eropa yang walaupun belum mengabulkan proposal bergabungnya secara penuh Turki ke Uni Eropa telah memberikan peringatan keras kepada militer Turki bahwa bila terjadi kudeta militer maka proses masuknya Turki ke Uni Eropa akan semakin sulit. Penegakan demokrasi dengan posisi militer berada di bawah kendali pemerintahan sipil memang merupakan syarat yang masih harus terus dipenuhi Turki selain aspek kesejahteraan ekonomi. Sementara

³¹ Professor Özer Sencar (Head of the Ankara-based MetroPOLL Strategic and Social Research Center). *Social Polarization*. Sumber: www.sundayszaman.com. 12 Januari 2010.

militer Turki di sisi lain mengetahui besarnya keinginan rakyat Turki untuk bergabung ke Uni Eropa, sehingga mau tak mau harus berusaha lebih menahan diri.

Oleh karena itu tidak heran Asef Bayat menilai AKP adalah partai Pos-Islamis yakni secara formal tidak menyebut dirinya partai Islam namun secara substantif nilai-nilai Islam tercermin dalam banyak pernyataan dan kebijakannya. Pidato Erdogan bahwa melayani rakyat berarti juga melayani Tuhan adalah intisari hadits Nabi SAW: “*sayyidul qaumi khadimuhum*” yakni pemimpin suatu negeri adalah pelayan bagi rakyatnya. Aplikasi ideologi Islam pemerintahan AKP yang membuatnya terkategori ke dalam partai Pos-Islamis memberi pengaruh positif bagi kemenangan AKP. Ciri Pos-Islamis AKP menurut Asef Bayat dan Greg Fealy atau Islam sosial yang memiliki cita-cita masyarakat yang diilhami nilai-nilai Islam dan bukannya memaksakan mendirikan *Islamic State*, juga diyakini guru besar lainnya yakni Mehmet Altan sebagai penyebab keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

Ketika AKP sejak 2001 sudah dikategorikan sebagai partai politik yang Pos-Islamis, PKS masih tampil sebagai partai Islamis. Selanjutnya pada saat PKS mulai mentransformasi dirinya menjadi Pos-Islamis di 2008, AKP sudah berkuasa selama 6 tahun lamanya dan bahkan telah memenangkan Pemilu 2 kali. Demikian pula dalam hal pengalaman di Pemilu atau sebagai pejabat publik, pada saat saat 7 orang kader PKS menjadi anggota legislatif Pusat di parlemen pada tahun 1999, di Pemilu 1995 AKP ketika masih berupa *Refah Partisi* sudah memperoleh kursi sebesar 158 sehingga memimpin koalisi dan Erbakan menjadi PM walaupun setahun kemudian *Refah Partisi* dibekukan oleh MK. *Fazilet Partisi* yang merupakan pengganti *Refah Partisi* pada Pemilu 1999 masih memperoleh 111 kursi walaupun dua tahun kemudian kembali dibekukan yakni pada tahun 2001.

Pada saat kader mudanya yakni Erdoğan di usia ke 40 memimpin kota Istanbul sebagai Walikota (2004-2008) dan sangat berprestasi karena menyelesaikan sebagian besar persoalan kronis kota Istanbul seperti pengadaan air bersih, pengurangan polusi udara, kemacetan dan pengelolaan sampah, kader PKS, Nur Mahmudi Ismail, mantan Presiden PK baru pada tahun 2005 menjadi Walikota Depok di usia 45 tahun. Namun berbeda halnya dengan Erdoğan, sebagaimana dikatakan oleh Nursanita Nasution (Aleg DPR periode 2004-2009), Nur Mahmudi seperti halnya beberapa Kepala Daerah lainnya yang dari PKS lebih fokus dengan konsep moralitas. Nur Mahmudi misalnya mengedepankan slogan makan pakai tangan kanan atau para

pejabat di Pemerintah Kota harus pandai membaca Al Qur'an, sementara persoalan buruknya infra struktur, pengelolaan sampah dan kemacetan belum terselesaikan. Ditambah lagi masalah pemberantasan korupsi, pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan masyarakat.³²

Selama lebih kurang 10 tahun yakni sejak berdirinya Partai Keadilan pada 1998 hingga Mukernas di Bali 2008, PKS menampilkan ideologi Islam dan wacana keagamaan dalam komunikasi publik. Baru di Musyawarah Kerja Nasional di Denpasar, Bali pada tahun 2008 PKS mulai mengemukakan wacana kebangsaan dan bahkan mempromosikan isu-isu pluralitas kebangsaan.³³ Walaupun sebenarnya hal itu bukan hal baru bagi kader PKS, karena secara ideologis PKS menganggap kecintaan pada tanah air dan bangsa adalah hal yang fitrah, sehingga doktrin kecintaan pada tanah air dan bangsa telah ditanamkan sejak masa *tamhidiyah* atau masa pembinaan kader pemula.³⁴ Sejatinya ideologi Islam yang dianut PKS tidaklah berubah karena secara substantif tetap, namun yang mengalami perubahan atau pergeseran adalah dalam aspek pemahaman dan aplikasinya, karena memang kelompok Islamis senantiasa berkembang pemahamannya. Pendapat George William Liddle dan Syaiful Mujani yang mengatakan politik aliran tidak relevan lagi karena sudah digantikan dengan pragmatisme perlu dikoreksi.³⁵

Sikap partai politik yang dianggap menjadi pragmatis seperti halnya AKP maupun PKS sebenarnya juga merupakan aplikasi teori Alan Ware yang mengatakan bahwa partai melakukan adaptasi ideologi karena sistem demokrasi memberikan tekanan yang kuat bagi partai-partai politik untuk beradaptasi atau mengkompromikan ideologinya. Terkait dengan kompetisi dalam Pemilu di sistem demokrasi maka yang diadaptasikan sebenarnya adalah cara mengimplementasikan ideologi dalam bentuk kebijakan-kebijakan.³⁶ Namun wacana kebangsaan dan pengakuan akan pluralitas bangsa yang merupakan ciri Pos-Islamis kemudian memicu perbedaan dalam cara memahami dan mengaplikasikan ideologi Islam. Perbedaan tersebut memunculkan kelompok FKP (Forum Kader Peduli) di daerah Jakarta, Bogor, Depok,

³² Wawancara dengan Dr. Nursanita Nasution. staf Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS. Ketua Bidang Kewanitaan DPP 2000-2005, Anggota legislatif PKS 2004-2009. Wawancara hari Selasa 27 Maret 2012.

³³ Harian Kompas, 4/2/2008.

³⁴ Hilmi Aminuddin dalam banyak kesempatan sering memberikan arahan: "Siapa yang tidak mengakui keberagaman akan hancur dengan sendirinya". KH. Hilmi Aminuddin. *Komitmen Kebangsaan Kita*. Jakarta: Penerbitan oleh Sekretariat Jenderal DPP PKS Bidang Arsip dan Sejarah. Januari 2009. Hal: 15.

³⁵ Dr. Lili Romli, M.Si, pengamat politik LIPI di Seminar Politik: *Tren Suara Parpol di Pemilu 2009*. INSURE (Institute of Sustainable Reform), Rabu 27 Juli 2009, jam 10.00-12.00 WIB. Pengamat politik LIPI ini tidak sependapat dengan George William Liddle dan Syaiful Mujani yang mengatakan politik aliran telah mati.

³⁶ Alan Ware. *Political Parties and Party System*. Oxford University Press, New York, 1999. Hal: 90.

Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang menjadi salah satu sebab menurunnya perolehan suara PKS di wilayah Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Perbedaan pandangan tersebut tidak menjadi arus utama yang memecah PKS tetapi mengakibatkan dikeluarkannya beberapa orang yang tidak menyetujui langkah perubahan PKS seperti Tizar Zein, Mashadi, Daud Rasyid Sitorus dan Fathuddin Ja'far. Sementara kader-kader di daerah-daerah nyaris tidak terimbas isu perbedaan pandangan tersebut sehingga mengalami peningkatan perolehan suara yang cukup signifikan seperti di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi dan Kalimantan.

Sebenarnya bukan hanya PKS yang mengalami turbulensi terkait dengan pergeseran dari Islamis ke Pos-Islamis, karena AKP sejak tahun 2001 juga sudah lebih dulu mengalami hal tersebut yang bahkan ditandai dengan perpecahan menjadi 2 partai politik yang berbeda yakni AKP dan *Saadet Partisi*. AKP tidak henti-hentinya di satu sisi dituduh oleh Erbakan dan *Saadet Partisi* sebagai partai yang murtad dari Islam namun disisi lain tidak henti-hentinya dituduh Islamis yang anti sekulerisme sehingga hampir dikudeta pada tahun 2007 dan hampir dibekukan oleh MK pada tahun 2008, akan tetapi para pimpinan dan kader AKP memiliki mental yang tangguh serta mampu tetap berprestasi di bawah tekanan yang kemudian berhasil pula dikomunikasikan secara baik ke masyarakat.

Oleh karena itu pada saat PKS masih disibukkan dengan perbedaan pemahaman dan cara mengaplikasikan ideologi Islam, perbedaan penafsiran soal aplikasi ideologi di AKP sudah selesai sejak memilih berpisah dari teman-temannya di *Fazilet Partisi* yang setelah dibekukan MK mendirikan *Saadet Partisi* yang melanjutkan ideologi Islamis *Milli Görüş*. *Saadet Partisi* yang didirikan Erbakan serta Kurtulmus dan di dua Pemilu (2002 dan 2007) tidak lolos *parliamentary threshold* 10%, sementara AKP berturut-turut keluar sebagai pemenang Pemilu di 2002 dan 2007. Walaupun tokoh-tokoh *Saadet Partisi* mengatakan AKP tidak berideologi Islam, Greg Fealy, White dan Hwang meyakini AKP adalah partai Islam yang mengemas ideologinya dalam nilai-nilai universal dan kerja nyata memperbaiki ekonomi dan menyejahterakan rakyat.

Jullie Hwang melihat perbedaan nyata antara PKS dan AKP adalah bahwa AKP sejak awal sudah melepaskan diri dari gerakan Islam: *Milli Görüş* serta langsung mendeklarasikan sebagai partai konservatif-demokrat, sementara PKS tidak pernah melepaskan dirinya dari Jama'ah Tarbiyah yang melahirkannya. Bahkan menurut Hwang di PKS dikenal prinsip "Al Hizbu huwal Jama'ah wal Jama'ah hiyal Hizb" yakni Jama'ah (gerakan Tarbiyah) adalah partai

dan partai adalah Jama'ah, sesuatu yang menurutnya membatasi langkah PKS untuk memoderasi dirinya. Sebab, lanjut Hwang, ada perbedaan mendasar antara jama'ah yang merupakan gerakan keagamaan dengan pakem-pakem yang baku dan partai politik yang menuntut adanya fleksibilitas.³⁷ Akibatnya proses adaptasi terhadap transformasi ideologis di tahun 2009 masih belum selesai di tubuh PKS dan sempat terjadi diskusi berkepanjangan yang kontraproduktif bagi kemenangan pemilu di 2009. AKP memperoleh keberhasilan lebih karena kemampuannya mengaplikasikan ideologi dalam performa nyata dengan memperbaiki perekonomian Turki. Sehingga pada saat PKS baru dalam tahapan mewacanakan ideologi Islam terbuka atau Pos-Islamis, AKP sudah lebih dulu melaksanakannya.

Dalam kaitannya dengan demokrasi, menurut Ihsan Dagi, komitmen AKP kepada pelaksanaan demokrasi dapat dinilai melalui kinerja pemerintahannya yang tetap menyelenggarakan 2 kali Pemilu. Fenomena AKP dan PKS pada hakikatnya merupakan representasi pemikiran Pos-Islamis yang memiliki karakteristik terbuka, menerima demokrasi, toleran terhadap perbedaan karena mengakui adanya pluralitas, mengakui peran publik perempuan serta memberi perhatian pada proses regenerasi. Konsep masyarakat Madani yang diutarakan oleh Hilmi Aminuddin dan ada di Platform PKS atau konsep masyarakat urban kelas menengah yang religius Mehmet Altan, guru besar Universitas Marmara, Istanbul pada hakikatnya merupakan pewujudan aplikasi Pos-Islamisme dan di satu sisi dapat menjadi solusi yang menjembatani konflik ideologi yang terjadi sejak lama antara Islamisme dan Sekulerisme dan di sisi lain juga merupakan penguatan masyarakat sipil, sesuatu yang juga bermakna sebagai pengokohan sendi-sendi demokrasi.

V.2. Perbedaan Model Organisasi PKS dan AKP Berpengaruh pada Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)

Faktor berikutnya yang juga telah diperbandingkan adalah organisasi. Duverger berdasarkan elemen-elemen dasarnya membagi struktur organisasi partai ke dalam 4 tipologi yakni *caucus* yang merupakan struktur organisasi berbasis elit politik.³⁸ Kemudian *branch* yang bila dikategorisasikan berdasarkan keanggotaannya disebut juga partai massa yang merekrut

³⁷ Wawancara dengan Prof. Julie Chernov Hwang, asisten profesor di Departemen Ilmu Politik dan Hubungan Internasional. MD Building, Jakarta. Rabu 20 Januari 2010.

³⁸ Alan Ware. *Op. Cit.* h: 95.

anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya di setiap bagian dan bukan pengelompokan elit politik lokal.³⁹ Selanjutnya model *cell* (sel) yang awalnya merupakan temuan partai komunis dan berbeda dengan partai *branch*, partai *cell* lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya dan sangat sentralistik karena diarahkan oleh pusat.⁴⁰ Akhirnya bentuk *militia*, yaitu bentuk organisasi partai yang awalnya dimiliki oleh kaum fasis dan partai sayap kanan ekstrim dalam fase Perang Dunia serta dirancang untuk menghasilkan gugus-gugus tugas yang bekerja di luar jalur politik elektoral yang konvensional.⁴¹

Terbentuknya struktur organisasi di tingkat Dewan Pengurus Ranting (DPRa), Dewan Pengurus Kecamatan (DPC), Dewan Pengurus Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Wilayah (DPW) berawal dari terbentuknya kelompok-kelompok pembinaan berupa *usrah* (untuk kader inti) dan *halaqah* (untuk kader pendukung). Sehingga struktur organisasinya memang dimulai dari sebuah pembinaan model sistem sel (*cell system*). Organisasi PKS adalah organisasi berbasis kader yang berbentuk seperti sel. Organisasi PKS Model organisasi PKS, bila dianalisis dengan tipologi organisasi Duverger⁴² adalah model organisasi “cell”.

Struktur organisasi PKS pada Pemilu 1999 karena pada umumnya diisi oleh kader-kader terbaiknya yang umumnya adalah para *murabbi* maka berfungsi sangat efektif sebagai mesin partai. Berbagai program dikerjakan dengan efektif dan efisien melalui jalur komando struktural. Selain itu organisasi saat itu juga menjadi sarana pembinaan dan magang para kader dalam memimpin serta menggerakkan roda organisasi partai. Akibatnya walaupun belum lolos ET 2%, Partai Keadilan (PK) yang hanya memiliki kader sejumlah 30 ribu orang mampu memperoleh suara sebesar 1,4 juta. Setelah Pemilu 1999 yakni tepatnya tahun 2000 dilakukan konsolidasi struktural dan kader, kemudian tahun 2001 dijadikan tahun rekrutmen besar-besaran dan organisasi berbentuk sel ini menjadi jalur komando yang efektif untuk menginstruksikan kader melakukan rekrutmen. Pada saat itu kader-kader yang berada di struktur umumnya juga adalah para kader senior yang menjadi para instruktur atau Murabbi dan Naqib. Maka selama masa 4 tahun setelah 1999 terjadi lonjakan jumlah kader menjadi sebesar 372.746 orang dan kader inti 21.444 orang (394.190). Di Pemilu 2004 PKS memperoleh pula lonjakan suara 7 kali lipat

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*, Hal 96.

⁴¹ Maurice Duverger. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (edisi terjemahan). Editor: Afan Gaffar. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984. Hal: 10.

⁴² *Ibid.*

menjadi 7,2% dan dari 7 kursi anggota DPR RI menjadi 45 kursi, demikian pula di DPR Provinsi dan kota/kabupaten dari hanya 186 menjadi 1112.

Namun mobilitas vertikal berupa berpindahnya kader-kader terbaik di struktur organisasi partai terjadi secara besar-besaran sehingga menimbulkan kekosongan di struktur organisasi baik pusat maupun daerah. Walaupun sebagian masih melakukan rangkap jabatan antara posisinya di struktur lembaga tinggi Negara dan di struktur partai, jelas sangat tidak optimal karena keterbatasan waktu. Sementara regenerasi untuk menduduki jabatan struktural organisasi kurang dipersiapkan dengan baik. Dampaknya secara nyata segera terlihat sejak 2004 hingga 2009, boleh dibilang struktur organisasi kehilangan wibawa untuk menjalankan fungsi komandonya menggerakkan mesin organisasi. Ketaatan kepada Murabbi dan Naqib relatif masih terpelihara, namun ketaatan terhadap struktur berkurang drastis.⁴³

Kader-kader yang duduk di struktur organisasi baik pusat maupun daerah banyak yang masih baru atau masih muda usia tarbiyah atau pembinaannya sehingga sedikit pula pengalamannya dalam mengelola struktur organisasi. Akibatnya sulit memunculkan kewibawaan struktur, sementara bentuk organisasi sel yang bersifat sentralistik membutuhkan kewibawaan struktur. Lain halnya bila berbentuk *branch* yang desentralistik dan otonom, maka yang menonjol adalah kompetensi profesionalitas dan kapasitas tanpa harus ada beban menunjukkan kewibawaan. Selanjutnya struktur sel di 2004-2009 tidak menjadi sarana rekrutmen yang efektif karena kewibawaannya yang menurun. Di sisi lain, bentuk struktur yang terbatas dan cukup ketat aturannya untuk menjadi pengurus didalamnya membuatnya juga tidak cukup luas untuk menjadi sarana pembelajaran bagi para kader yang baru terekrut. Ada begitu banyak persyaratan bagi seseorang untuk menempati pos di struktur organisasi. Oleh karena itu pada tahun 2009, walaupun ada peningkatan jumlah yakni menjadi 532.803 orang terdiri dari 496.782 kader pendukung dan 36.021 kader inti, tetap tidak sebesar pertumbuhan jumlah kader dari 1999 ke 2004.⁴⁴ Demikian pula halnya dengan hasil perolehan suara di Pemilu 2009 yang mengecewakan karena jauh di bawah target 20% . Hal itu tidak mengherankan mengingat struktur organisasi sebagai mesin partai jauh berkurang lebih efektifitasnya.

⁴³ Sitaesmi S. Soekanto. *Pengembangan Budaya 'Knowledge Sharing' Melalui Pengadaan 5 'Enabler Nonaka' Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. Tesis Pascasarjana Psikologi UI. Depok 2006.

⁴⁴ Data dari Bidang Kaderisasi DPP PKS, Jakarta. 2011

Faktor kelengkapan struktur organisasi sekaligus soliditasnya diakui oleh Chairul Anwar, Ketua Wilda Sumatera memiliki pengaruh pada keberhasilan perolehan suara di wilayah Sumatera baik untuk tingkat Pusat (DPR-RI), Provinsi dan Kota Kabupaten/Kokab. Misalnya dibandingkan di Pemilu 1999 Partai Keadilan hanya memperoleh 2 kursi pusat dari seluruh wilayah Sumatera dari 10 DPW hanya Sumatera Barat dan Lampung, karena saat itu boleh di bilang kelengkapan struktur organisasinya masih minim. Sementara di 2004 wilayah Sumatera mengirim 11 kadernya ke Pusat (DPR-RI) dan meningkat lagi menjadi 15 di Pemilu 2009. Sedangkan kursi di tingkat Provinsi pada tahun 2004 berjumlah 53 menjadi 58 di tahun 2009, sedangkan kursi di tingkat Kokab sejumlah 321 menjadi 322. Chairul menambahkan daerah yang sudah lengkap kepengurusan strukturalnya, umumnya bisa meningkatkan perolehan.⁴⁵

Sementara menurut Ahmad Dzakirin, Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) aspek struktur organisasi belum terlalu berpengaruh di Jawa Tengah karena misalnya kelengkapan struktur DPC pada 2009 baru 75%. Kemudian mengenai sifat sentralistik struktur organisasi model sel yang dimiliki PKS menurut Dzakirin juga sempat menuai protes dari DPW Jawa Tengah terkait penentuan Anggota legislatif DPR-RI yang ditentukan oleh Pusat padahal bukan kader atau belum dikenal karena belum berinteraksi dengan para kader. Di Pemilu 2009, 3 dari 6 anggota legislatif pusat adalah dari tokoh eksternal atau bukan kader, sementara anggota legislatif di tingkat provinsi dan daerah adalah para kader dan memberikan kontribusi perolehan suara yang signifikan.⁴⁶

Sementara bentuk organisasi AKP berfungsi sebagai mesin partai yang efektif. Soliditas dan kerapian organisasi di *Fazilet Partisi* diwarisi oleh AKP karena para pendiri AKP sebelumnya adalah para kader aktivis di *Milli Gorus*. Bedanya kini bila dilihat dengan teori Duverger, AKP memperbesar dan mengubah bentuk organisasi *cell Fazilet Partisi* menjadi model *branch* yakni dengan memberi keleluasaan dan otonomi serta independensi pada struktur organisasi misalnya di DPW Istanbul, Omer Faruq Kalaychi mengatakan bahwa pemilihan Ketua DPW berlangsung demokratis dengan syarat seorang calon memiliki dukungan basis massa dengan jumlah dukungan minimal yang disepakati. Semua proses tersebut berlangsung tanpa diintervensi oleh struktur pusat atau DPP AKP. Otonomi yang tetap dalam koordinasi serta

⁴⁵ Wawancara dengan Chaerul Anwar. *Op. Cit.*

⁴⁶ Wawancara dengan Ahmad Dzakirin, ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) Jawa Tengah. Jakarta, 20 Maret 2012.

arahan secara normatif telah memberikan kesempatan kepada struktur-struktur organisasi cabang untuk berinovasi demi kemajuan partai.⁴⁷

Hal tersebut secara internal berpengaruh positif bagi para kader AKP. Demikian pula bentuk *Youth Branch* dan *Woman Branch* yang independen namun tetap terkoordinasi dengan Ketua Umum partai yakni Erdogan memberikan pengaruh yang positif pula. Kemudian pengaruh positifnya kepada eksternal adalah berupa layanannya ketika organisasi AKP yang lengkap termasuk Badan Humas yang bertugas selama 24 jam menerima masukan, keluhan permintaan tolong maupun kritikan dan kecaman terhadap pemerintahan AKP. Demikian pula dengan Lembaga yang melayani para Lansia atau warga lanjut usia dan lembaga yang membantu orang cacat. Lembaga-lembaga tersebut telah memberikan kesempatan bagi banyak relawan yang terekrut untuk terlibat dalam pengelolaan organisasi partai. Sedangkan masyarakat yang sangat terbantu dengan pelayanan dan advokasi badan-badan organisasi maupun para anggota legislatifnya menjadi terpengaruh secara positif untuk memberikan dukungannya pada AKP. Sehingga bila disimpulkan pengaruh organisasi yang positif bagi kemenangan Pemilu AKP di Pemilu 2002 dan 2007 adalah dengan independensinya yang melahirkan inovasi-inovasi kerja serta kapasitasnya yang besar sebagai mesin partai, sarana rekrutmen dan berperannya para relawan dan anggota yang baru bergabung serta pelayanan yang diberikan struktur organisasi partai kepada masyarakat. Kenyataan di atas juga membantah asumsi bahwa partai yang memiliki tokoh besar cenderung mengabaikan faktor lainnya karena mengandalkan kemenangan Pemilunya hanya pada daya tarik pemimpinnya.

Struktur organisasi AKP terdiri dari beberapa lembaga. Lembaga pertama yang tertinggi adalah *General Assembly* berupa lembaga pengawasan dan pengambilan keputusan tertinggi di partai yang para anggotanya terdiri dari dewan pendiri dan perwakilan yang dipilih oleh pengurus provinsi. Lembaga ini mirip dengan Majelis Syuro di PKS yang beranggotakan 99 orang yang juga merupakan representasi tokoh di seluruh DPW PKS di Indonesia. Lembaga kedua yakni *The Central Decision-Making and Administrative Committee* (CDAC) yakni Komite Pusat Administratif dan Pengambilan Keputusan yang merupakan lembaga pengambilan keputusan tertinggi kedua juga mirip dengan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) di PKS

⁴⁷ Nonaka dalam Thesis Sitaesmi S. Soekanto. *Op. Cit.*

yang merupakan badan pengurus harian Majelis Syuro yang terdiri dari Ketua Majelis Syuro, Presiden PKS, Sekjen PKS, Bendahara Umum PKS, Ketua MPP dan Ketua DSP.

Selanjutnya lembaga ketiga di AKP *Central Executive Committee* atau CEC (Komite Pimpinan Pusat) bila diperbandingkan dengan di PKS adalah DPP atau Badan Eksekutif. CEC juga merupakan badan eksekutif tertinggi di AKP, terdiri dari Ketua Umum partai, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jendral dan kelompok pembantu Presiden CDAC beserta wakil-wakilnya yang menyelenggarakan pertemuan paling sedikit sepekan sekali dan asalkan sudah memenuhi kuorum maka sudah bisa mengambil keputusan. Para pembantu Ketua Umum AKP atau Presiden CDAC disebut sebagai *Deputy Chairman of Departmens* terdiri dari Ketua 11 Departemen dan seorang Sekretaris Jendral yang bila dibandingkan dengan PKS adalah Ketua Bidang dan Badan, hanya saja di AKP lebih sederhana dengan 11 Ketua Bidang yakni Bidang Politik dan Hukum, Bidang Organisasi, Bidang Pemilu, Bidang Publisitas dan Media, Bidang Hubungan Luar negeri dan Kantor Perwakilan Luar Negeri, Bidang Sosial, Bidang Administrasi internal Partai, Bidang Ekonomi, Bidang Hubungan Kemasyarakatan (Humas), Bidang Keuangan dan Administrasi dan Bidang Penelitian dan Pengembangan/Litbang serta Sekretaris Jendral. Serta dua Badan yakni *Referee Board for Democracy within the Party* (Badan Penengah Demokrasi di dalam Partai) dan *Party Disciplinary Boards* (Badan Penegakan Disiplin Partai). Sementara di DPP PKS lebih gemuk organisasinya dengan 13 Bidang-Badan serta 6 wakil Sekjen yakni Bidang Kaderisasi, Bidang Pembangunan Keumatan, Bidang Kebijakan Publik, Bidang Kepanduan dan Olahraga, Bidang Generasi Muda dan Profesi, Bidang Perempuan, Badan Pemenangan Pemilu dan Pilkada, Bidang Pengembangan Kepemimpinan, Badan Hubungan Luar Negeri, Bidang Wilayah Dakwah, Bidang Pengembangan Ekonomi, Bidang Kelembagaan Sosial, Badan Penegak Disiplin dan Organisasi.

Hal lain yang berbeda antara AKP dengan PKS adalah bahwa di AKP ada dua struktur yang terpisah dan relatif independen dari struktur utama yakni *Women's Branch* (Cabang Perempuan) dan *Youth Branch* (Cabang Pemuda). AKP memiliki kelengkapan dan keragaman struktur organisasi yang menjalankan fungsinya masing-masing baik di pusat maupun di 81 provinsi dan di distrik-distrik. Setiap provinsi jumlah distrik yang berbeda-beda tergantung luas kotanya, misalnya di Istanbul ada 39 distrik dan di setiap distrik juga terdiri dari 3 bagian struktur yakni *main board* (struktur utama) *youth branch* (struktur sayap pemuda) dan *woman branch* (struktur sayap perempuan) yang di masing-masing struktur tersebut terdiri dari 50 orang.

Terkait dengan jumlah kepengurusan struktural di organisasi pusat AKP yang memiliki 3 pilar yakni *Main Board*, *Youth Branch* dan *Woman Branch* maka di *il* (provinsi) Istanbul misalnya ada 39 distrik (*ilce*) dan masing-masing distrik memiliki 30 pengurus untuk *Main Board* di tingkat distrik, 30 orang untuk *Youth Branch*, 30 untuk *Woman Branch*. Setiap distrik (*ilce*) terbagi atas beberapa *neighborhood* (*mahalle*) atau Kelurahan bila di Indonesia dan di 39 distrik yang ada di Istanbul bila digabungkan memiliki lebih dari 1000 *mahalle* dengan di setiap *mahalle* terdapat 10 orang pengurus *Main board*, *Youth Branch* dan *Woman Branch*.⁴⁸

Komposisi minimal kepengurusan di organisasi AKP tersebut membuat partai ini memiliki ribuan orang yang akan bekerja di garda terdepan partai, karena untuk menjaga *box* atau gerai informasi AKP tentu saja diperlukan para *member* (anggota) dan *volunteer* (relawan). AKP juga menganggap pemuda dan wanita adalah segmen penting untuk mengkapitalisasi suara sehingga memberikan ruang berkiprah yang luas, keleluasaan dan independensi bagi segmen ini melalui *Youth Branch* dan *Women Branch*, yang bila dilihat terlihat dari strukturnya sejajar dengan wakil ketua namun tidak terpisah dari struktur umum AKP. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Bilal Erdoğan, putra Perdana Menteri Recep Tayyip Erdoğan berani menyebutkan bahwa selain faktor pemimpin kharismatis yang dimiliki AKP maka faktor organisasi AKP yang kuat dan lengkap serta terorganisir baik turut menjadi penyebab kemenangan AKP dalam setiap pemilu di Turki sejak 2002.⁴⁹

Selain itu hal yang tidak dimiliki oleh PKS dan yang membuat AKP lebih mudah menjangkau masyarakat dan membuktikan kepedulian dan pelayanannya adalah dimilikinya *AK Party Communications Center* (AKİM) yang merupakan saluran resmi dan profesional di partai yang menghubungkan rakyat dengan pengurus partai. AKİM mencatat semua permintaan, keluhan dan pendapat tentang partai yang melalui telepon, sms dan menyampaikannya ke departemen atau organisasi partai yang terkait dengan masukan tersebut. Lembaga ini juga menjaga hubungan yang interaktif dengan masyarakat dan merespon setiap masukan dengan segera. Bertindak sebagai Kantor Pusat Humas AKP, AKİM menyediakan layanan 24 jam non-stop di 81 provinsi di seluruh Turki. Tujuan sistem ini adalah untuk mendengarkan aspirasi baik berupa permintaan, tuntutan maupun keluhan setiap rakyat. Kemudian ada lembaga *Coordination Center for the Handicapped* (ÖKM/(Özürlüler Koordinasyon Merkezi) atau Pusat

⁴⁸ Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Jakarta, 2011. Hal: 141.

⁴⁹ Dialog dengan Bilal Erdoğan di Istanbul, 9 Juni 2011.

Koordinasi Bantuan untuk Penyandang Cacat di AKP yang berusaha melayani setiap komponen masyarakat termasuk penyandang cacat. Lembaga ini memiliki misi untuk mendeteksi hambatan yang dialami penyandang cacat dan berusaha memecahkannya. Lembaga di pusat berkoordinasi dengan pengurus di wilayah dan berkoordinasi dengan lembaga sosial di seluruh Turki. Lembaga pelayanan lainnya adalah *Coordination Center for the Elderly (YKM/ Yaşlılar Koordinasyon Merkezleri)* atau Pusat Koordinasi Pelayanan Orang Lanjut Usia (Lansia). Lembaga ini mengusahakan kontak langsung dengan para lansia 65 tahun ke atas, menciptakan peluang aktivitas bagi kelompok usia lanjut ini serta merancang program-program yang akan dapat memecahkan persoalan mereka. Lembaga ini melayani di 16 provinsi terbesar dan akan mengembangkan aktivitasnya hingga ke seluruh perwakilan wilayah AKP di Turki.

Melihat komparasi organisasi PKS dan AKP di atas nampak bahwa organisasi dan manajemen PKS belum mampu menjangkau ke seluruh pelosok wilayah Indonesia yang luas. Sementara AKP terkategori murni 'branch' yang bersifat desentralistik sehingga memberikan keleluasaan dan independensi. Kelebihan AKP lainnya yang tidak dimiliki oleh PKS adalah dimilikinya dua cabang struktur yang otonom berperan signifikan dalam kemenangan Pemilu yakni *Youth Branch* dan *Women Branch*, sementara Pemuda dan Perempuan di PKS hanya sebatas berupa Bidang dan tidak memiliki keleluasaan yang cukup untuk melakukan manuver-manuver. Terakhir, kelebihan AKP yang sekaligus menjadi kelemahan PKS adalah keberadaan lembaga-lembaga yang bekerja secara profesional dan menjangkau seluruh komponen masyarakat di seluruh Turki berupa lembaga Humas yang berfungsi 24 jam melayani aspirasi masyarakat, lembaga untuk Lansia (Lanjut Usia) dan lembaga bagi penyandang cacat. Ketiga lembaga ini tidak dimiliki oleh PKS yang menyebabkan kurang terasanya pelayanan PKS di tengah-tengah masyarakat. Oleh karenanya faktor organisasi AKP merupakan faktor yang berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

Soliditas struktur organisasi PKS selama tiga Pemilu (1999, 2004 dan 2009) merupakan mesin partai yang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu PKS. Namun manajemen organisasi termasuk manajemen SDM, kaderisasi, informasi yang belum rapi dan profesional kesemuanya menyebabkan faktor organisasi berpengaruh secara signifikan hanya di Pemilu PKS di 2004, sementara di Pemilu 1999 belum berpengaruh karena tidak memiliki kelengkapan struktur. Sedangkan di Pemilu 2009, kurangnya kemampuan pengendalian struktur organisasi yang membesar menyebabkan pemanfaatan yang kurang optimal terutama di struktur terdepan yakni

DPRa sehingga kurang berpengaruh bagi kemenangan Pemilu 2009. Bentuk organisasi PKS berbasis kekaderan yang bila dilihat dari kategorisasi Duverger disebut *cell* dan bersifat sentralistik menyebabkan kurang adanya independensi dan keleluasaan untuk bermanuver atau berimprovisasi. Selain itu keterbatasan lainnya adalah kurangnya pemanfaatan organisasi di PKS sebagai sarana pembelajaran para kader dan juga sarana pelayanan masyarakat.

V.3. Perbedaan Ragam Basis Massa PKS (*middle class*) dengan AKP (*middle class plus*) Mempengaruhi Perbedaan Kemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)

Faktor basis massa diyakini ikut berperan dalam kemenangan. Lipset menguraikan tentang karakteristik kelas menengah (*middle class*) memiliki indikator berasal dari masyarakat perkotaan yang memiliki tingkat pendidikan dan penghasilan cukup tinggi.⁵⁰ Daniel Lerner menemukan hubungan erat antara urbanisasi, *literasi* (melek huruf), pendidikan dengan tingkat pemberian suara.⁵¹ Demikian juga Samuel Huntington yang meyakini perkembangan ekonomi telah mendorong meningkatnya jumlah kelas menengah dengan terjadinya mobilitas vertikal karena meningkatnya strata pendidikan dan taraf hidup yang kemudian berusaha memajukan kepentingan-kepentingannya melalui politik.⁵² Pendapat Huntington tersebut sejalan dengan kesimpulan Vali Nasr bahwa kebangkitan Islam politik diawali dengan kemajuan di bidang pemikiran dan ekonomi yang memunculkan *new muslim middle class* atau kelompok Muslim kelas menengah yang kemudian mendirikan partai-partai politik Islam.⁵³

Dalam teori *voting behavior* yang mengungkap alasan seseorang memilih sebuah partai politik, menurut Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt ada *mazhab* sosiologi yaitu perilaku pemilih yang memilih dengan didasari faktor-faktor sosiologis, psikologis dan umumnya berasal dari kelas menengah bawah dan kelas bawah.⁵⁴ Sementara Franz Urban Pappi menambahkan adanya jenis *mazhab* pilihan rasional (*rational choice theory*) yang umumnya berasal dari kelas menengah atas yakni *reasoning voter* yang lebih mementingkan faktor isu, kandidat serta

⁵⁰ Seymour Martin Lipset. *Political Man, Basis Sosial Tentang Politik* (ed. Terj). Pustaka Pelajar, 2007. Hal: 24-25.

⁵¹ *Ibid.*, h: 27-28.

⁵² Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (edisi terjemahan dari "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century"). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997. h: 81.

⁵³ Vali Nasr. *Op. Cit.* h: 249.

⁵⁴ Lihat Edward G. Carmines dan Robert Huckfeldt dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 228, 238.

program sebagai alasan untuk memilih sebuah partai politik. Jenis pemilih rasional ini cenderung tidak loyal dan dapat berubah-ubah pilihannya di setiap Pemilu karena tidak mendasarinya atas kedekatan sosiologis atau psikologis.⁵⁵

Basis massa utama PKS yang bila dianalisis dari teori Lipset, Lerner dan Huntington adalah kelas menengah yang kemudian dibenarkan oleh Hefner, Rachel Ricardo dan Saiful Mujani memiliki keuntungan dan sekaligus kerugian untuk daerah-daerah yang berbeda. Basis massa kelas menengah ini menurut teori Franz Urban Pappi pada umumnya menentukan pilihan atas sebuah partai politik berdasarkan mazhab *rational choice* sehingga cenderung pragmatis dan tidak loyal. Di daerah-daerah tertentu seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur karakteristik tersebut menguntungkan bagi PKS karena bisa membidik masyarakat kelas menengah Muslim abangan yang terdidik serta pada umumnya merupakan *swing voter* dan menurut Gus Pur, di Yogyakarta jauh lebih sulit untuk menarik basis massa Muslim santri berlatar belakang NU.

Basis massa utama PKS berasal dari kalangan perkotaan, sekolah dan kampus dan menunjukkan kesesuaian dengan karakteristik kelas menengah (*middle class*) yang diuraikan Lipset yang juga diyakini menjadi agen perubahan.⁵⁶ Bila disimpulkan segmen basis massa PKS terbatas hanya kelas menengah Muslim konservatif di perkotaan dan masih sedikit yang berasal dari kelompok Muslim tradisional ataupun Muslim sekuler di perkotaan dan jauh lebih sedikit lagi yang dari kelompok minoritas Kristen. Hal tersebut sesuai dengan yang diutarakan oleh Navis Murbiyanto, Sekretaris Bidang Kaderisasi, bahwa basis massa PKS terutama masih di Pesantren, Kampus dan Sekolah.⁵⁷ Ade Suherman, staf Wilda Banjabar membenarkan keterbatasan basis massa tersebut dan menengarai hal itu antara lain disebabkan oleh kegamangan kader-kader PKS untuk memperluas basis massa.⁵⁸

Para kader umumnya berpendapat bahwa untuk menasar kelas bawah di perkotaan dan kelas bawah di pedesaan membutuhkan dukungan pendanaan yang tidak sedikit. Sedangkan bila menasar ke kelas menengah sekuler ada kekhawatiran tidak dapat membinanya. Oleh karena itu keterbatasan basis massa PKS memiliki keterkaitan yang erat dengan sistem rekrutmen PKS yang sebenarnya tertutup dan sangat rumit, akibatnya disadari atau tidak disadari ada upaya menahan laju perluasan basis massa karena masalah keterbatasan pendanaan untuk merawat

⁵⁵ Franz Urban Pappi dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996. h: 255-256.

⁵⁶ Seymour Martin Lipset. *Op. Cit.* h: 24-25.

⁵⁷ Wawancara dengan Navis Murbiyanto. *Op. Cit.*

⁵⁸ Wawancara dengan Ade Suherman. *Op. Cit.*

basis massa serta keterbatasan kapasitas rekrutmen dan pembinaan kader. Keterbatasan basis massa PKS di kelas menengah Muslim konservatif di perkotaan membuat perolehan suara PKS pun terbanyak hanya di daerah kota-kota besar di pulau Jawa, yang nilai kursinya karena dihitung berdasarkan proporsi kepadatan penduduk merupakan kursi mahal. Padahal hasil Pemilu 2009 bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 sudah memperlihatkan bahwa ketika PKS juga mendapatkan dukungan dari kelas bawah di pedesaan atau Muslim abangan di berbagai daerah selain daerah basis kader PKS yakni Banjabar maka terdapat peningkatan perolehan kursi karena kursi murah. Akibatnya aspek basis massa tidak besar pengaruhnya bagi kemenangan Pemilu PKS di 1999, 2004 namun sedikit meningkat pengaruhnya di 2009.

Sementara AKP di Turki yang berasal dari gerakan *Milli Görüş* dan partai-partai Islam sebelumnya (*MSP*, *Refah Partisi* dan *Fazilet Partisi*) sama halnya dengan PKS merupakan partai politik yang didirikan oleh kelas menengah berpendidikan. Partai ini memiliki basis massa utama dari kelas menengah yang terus bertambah seiring dengan membaiknya perekonomian dan meningkatnya taraf pendidikan sejak awal 1970-an. Hal tersebut sesuai dengan teori Lipset bahwa salah satu indikator kelompok *middle class* adalah meningkatnya lama masa studi rata-rata di sebuah negara.⁵⁹

Namun kemampuan AKP memperluas basis massa membuatnya juga memperoleh dukungan suara dari kelas bawah di perkotaan dan di pedesaan serta dari kantong-kantong Muslim sekuler di Izmir dan Ankara selain Istanbul yang memang merupakan basis utama AKP. Oleh karena itu secara keseluruhan di 81 Provinsi di Turki, AKP memperoleh dukungan yang merata dan berpengaruh positif di Pemilu 2002 ketika AKP memenangkan Pemilu dengan 34%. Selanjutnya keberhasilan pemerintahan AKP memimpin selama 2002 hingga 2007 juga berpengaruh positif kepada AKP di Pemilu 2007 mendapatkan dukungan pula dari Muslim sekuler yang sebelumnya mendukung CHP dan MHP serta kelompok minoritas Nasrani dan Yahudi yang berjumlah 1% dari 74 juta penduduk Turki. AKP menurut Julie Hwang memiliki kemampuan merangkul semua lapisan masyarakat, baik laki-laki atau perempuan, kaya atau miskin, berpendidikan tinggi atau rendah dan religius atau sekuler dan luasnya dukungan basis massa yang dimiliki oleh AKP berpengaruh signifikan pada kemenangan pemilu AKP.⁶⁰ AKP

⁵⁹ Seymour Martin Lipset. *Op. Cit.* h: 24-25.

⁶⁰ Wawancara dengan Julie Chernov Hwang. *Op. Cit.*

bahkan didukung oleh kaum minoritas Kristen dan Yahudi yang hanya berjumlah 1% di Turki, karena menganggap AKP dan Erdoğan inklusif dan tidak diskriminatif serta mampu menciptakan stabilitas politik dan perbaikan ekonomi.⁶¹

Menurut Mehmet Altan keberadaan basis utama AKP tetap penting karena dapat menjadi penengah antara kelompok kelas menengah atas dan kelas atas yakni elit Kemalis sekuler dengan kelompok tradisional konservatif adalah yakni *urban religiosity* atau masyarakat perkotaan, kelas menengah berpendidikan yang taat beragama, toleran dan inklusif yang menjadi mediator untuk mengatasi konflik antara militer dan kelompok Islamis tradisional. Kelompok ini adalah kelas menengah dengan karakteristik yang disebutkan oleh Martin Lipset dan Daniel Lerner namun memiliki tambahan karakteristik yakni religius seperti diungkapkan oleh Vali Nasr, Esposito, Asef Bayat dan Mehmet Altan sehingga berbeda dengan teori Huntington bahwa kelas menengah anti agama. Kelompok basis massa utama AKP menjadi *vote getter* yang menjadi penghubung sekaligus penarik *floating mass*.

AKP benar-benar berusaha menjangkau konstituennya sampai ke *grass root* dan menjadi faktor kelebihan AKP dibanding PKS yang kurang berakar. Bila PKS ingin memperbesar perolehan suaranya di Pemilu mendatang dan mengikuti jejak keberhasilan AKP, PKS harus membangun dan memperluas sendiri basis massanya yang loyal. Sehingga upaya menahan laju ekspansi basis massa karena kekhawatiran tidak mampu membinanya dalam sistem kaderisasi partai tidak perlu terjadi. PKS perlu mempelajari dan mengikuti keberhasilan AKP merangkul berbagai segmen. Basis massa utama PKS yakni kelas menengah perkotaan dan terdidik menjadi modal awal yang baik buat PKS, tetapi kalangan tersebut sangat rasional dalam perilaku memilihnya sehingga sulit untuk loyal bila dirasakan sudah tidak menguntungkan. Sementara basis massa *grass root* bisa lebih loyal karena alasan-alasan sosiologis yakni kedekatan kekerabatan atau pertemanan ataukah psikologis seperti karena tokoh habib, namun PKS belum berhasil berakar dan memperluas *grass root* basis massa di kelas bawah dan masyarakat pedesaan.

Fokus PKS yang lebih terarah ke dalam yakni ke sistem pembinaan anggota membuat potensi memperluas basis dukungan kurang dioptimalkan dan belum cukup pula menjadikannya sebagai faktor yang berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu PKS. Sehingga PKS masih

⁶¹ Wawancara dengan Greg Fealy pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2010 di Munas PKS II, Ritz Carlton, Jakarta. Pukul 16.00-16.30 WIB.

lebih nampak sebagai partai kader (*cadre party*) yang eksklusif dan belum menjadi partai massa (*mass membership party*) yang memiliki basis massa berbagai kalangan masyarakat, sementara basis massa yang loyal justru dari kalangan kelas menengah bawah. Oleh karena itu bila faktor penguasaan basis massa menjadi faktor yang berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu AKP, namun tidak demikian halnya dengan PKS karena belum optimal memperluas jumlah basis massa yang mendukungnya.

AKP yang berasal dari gerakan *Milli Görüş* dan partai-partai Islam selain memiliki basis massa utama yang juga berasal dari kelas menengah mampu merangkul hingga ke *grass root* atau *lower class* (kelas bawah). Selain itu AKP juga mampu meraih dukungan dari jaringan lembaga-lembaga Islam dan tarekat-tarekat Islam, sehingga jamaah yang besar seperti Said Nursi yang kini terwujud dalam *Fetullah Gulen* ataupun *Hayrat Foundation* juga menjadi pendukung utama AKP. Kelebihan AKP lainnya dari segi basis massa adalah bahkan mendapatkan limpahan suara dari basis massa nasional-sekuler yang sebelumnya konstituen CHP dan MHP serta kaum minoritas Kristen dan Yahudi yang hanya berjumlah 1% di Turki karena keberhasilan AKP memperbaiki perekonomian Turki.

Bila diperbandingkan dengan PKS, menurut ketua Bidang Kaderisasi, Musyaffa dan Ketua Bidang Pembangunan Umat, Ahmad Zainuddin, didapati fakta bahwa basis massa utama PKS masih dari kalangan menengah terdidik dan belum berakar hingga ke *grass root*. Sementara dalam konteks hubungan dengan 2 ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU, PKS baru sampai pada tahapan menjalin hubungan untuk menghilangkan resistensi dan antipati kedua ormas Islam tersebut pada PKS dan belum pada tahapan menjadikan mereka sebagai pendukung PKS. Sementara AKP benar-benar menjangkau konstituennya sampai ke *grass root* dan menjadi faktor kelebihan AKP dibanding PKS yang kurang berakar. Bila PKS ingin memperbesar perolehan suaranya di Pemilu mendatang dan mengikuti jejak keberhasilan AKP, PKS harus membangun dan memperluas sendiri basis massanya.

Sehingga upaya menahan laju ekspansi basis massa karena kekhawatiran tidak mampu membinanya dalam sistem kaderisasi partai tidak perlu terjadi. PKS perlu mempelajari dan mengikuti keberhasilan AKP merangkul berbagai segmen. Basis massa utama PKS yakni kelas menengah perkotaan dan terdidik menjadi modal awal yang baik buat PKS, tetapi kalangan tersebut sangat rasional dalam perilaku memilihnya sehingga menjadi *swing voters*. Sementara basis massa *grass root* bisa menjadi basis massa tetap karena alasan-alasan sosiologis yakni

kedekatan kekerabatan atau pertemanan ataukah psikologis seperti karena tokoh Habib, namun sayangnya PKS belum berhasil berakar dan memperluas *grass root* basis massa di kelas bawah dan masyarakat pedesaan.

V.4. Perbedaan Model Sistem Rekrutmen “Cell” PKS dan “Hybrid” AKP Mempengaruhi Pemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)

Duverger mengkategorisasikan partai politik berdasarkan sistem rekrutmennya menjadi, *caucus* yang merekrut hanya elit politik,⁶² kemudian *branch* yang berdasarkan rekrutmen keanggotaannya yang luas disebut juga sebagai partai massa (*a mass membership party*) karena merekrut sebanyak-banyaknya anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya dan bukan pengelompokan elit politik. Berikutnya *cell* yang lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya serta *militia*, yaitu kaum fasis yang sangat selektif dalam rekrutmennya. Namun seiring perubahan konteks zaman, partai-partai yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya seperti misalnya partai konservatif menurut Alan Ware kini memiliki jumlah anggota yang relatif besar karena berubah menjadi lebih inklusif dengan sistem *hybrid* yakni sistem rekrutmen yang merupakan 'hibridisasi/percampuran' antara *supporter*, *member* dan *activist* di partainya.⁶³

Bila dilihat dari tipologi Duverger berdasarkan sistem rekrutmennya maka PKS termasuk jenis partai *cell* yang lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya. Di dalam AD/ART PKS keanggotaan dibedakan: anggota pendukung yang terdiri dari anggota pemula dan muda, serta anggota inti yang terdiri dari anggota madya, dewasa dan ahli.⁶⁴

Dari hasil penelusuran, penulis menyimpulkan bahwa di 9 daerah minoritas Muslim hampir tidak ada peningkatan jumlah kader bahkan cenderung menurun, namun ternyata terjadi peningkatan suara yang besar. Sementara di 10 provinsi mayoritas berpenduduk Muslim dan daerah basis kader malah menunjukkan fenomena sebaliknya, jumlah kader terus bertambah namun perolehan suara bila dibandingkan dengan Pemilu 2004 malah menurun di Pemilu 2009 termasuk daerah basis kader PKS yakni Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Sementara di 14

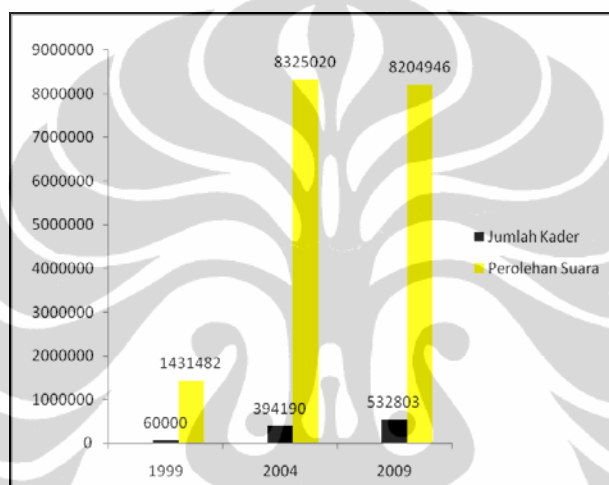
⁶² Alan Ware. *Op. Cit.* h: 95.

⁶³ *Ibid.*, h: 66.

⁶⁴ Data dari Bidang Kaderisasi DPP PKS, 2011

provinsi selebihnya berlaku aksioma yang diyakini PKS selama ini yaitu bahwa bila jumlah kader meningkat maka akan otomatis terjadi penambahan perolehan suara. Dengan demikian dari 33 provinsi hanya ada 14 provinsi yang pertumbuhan jumlah kadernya berbanding lurus dengan peningkatan perolehan suara PKS, karena di 9 provinsi yang minim jumlah kadernya terjadi peningkatan perolehan suara dan sebaliknya di 10 provinsi yang memiliki jumlah kepadatan kader PKS sangat tinggi malah terjadi penurunan perolehan suara.

Grafik III.2. Perbandingan Jumlah Kader Dengan Perolehan Suara 1999-2009



Sumber: Diolah dari Data Bidang Kaderisasi DPP PKS

Dari grafik di atas nampak bahwa di Pemilu 1999, peran kader sangat terlihat pengaruhnya bagi kemenangan PK karena saat itu hanya dengan jumlah kader inti 3000 orang dan kader pendukung 57 ribu orang atau keseluruhan berjumlah 60 ribu orang berhasil memperoleh 1,4 juta suara berarti diasumsikan satu kader berhasil menarik 24 orang pemilih. Hal tersebut dapat dikatakan murni hasil interaksi kader dengan masyarakat, karena PK tidak memiliki dana untuk iklan di media dan pendanaan kegiatan bakti sosial seperti pelayanan kesehatan gratis serta penjualan sembako murah pun dibiayai sepenuhnya oleh para kader.

Sedangkan di Pemilu 2004, walaupun faktor kader masih cukup berpengaruh namun mengalami penurunan karena dengan jumlah kader 394.190 atau hampir 400 ribu, PKS memperoleh suara 8 juta 325 ribu atau dengan kata lain 1 kader berhasil menarik 21 orang pemilih. Hasil perolehan suara PKS di 2004, berbeda dengan PK di 1999, tidak sepenuhnya bisa diklaim sebagai murni hasil kerja keras kader, karena sudah ada dukungan finansial dari 7

anggota dewan pusat dan 179 di tingkat Provinsi, Kota dan Kabupaten sehingga sudah bisa beriklan di media cetak maupun elektronik. Selain itu faktor ketokohan Hidayat Nurwahid sebagai Presiden PKS cukup membantu peningkatan perolehan suara ditambah pula slogan Bersih dan Peduli menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih PKS.

Demikian pula halnya di Pemilu 2009, peran kader kembali mengalami penurunan dalam hal pengaruhnya bagi kemenangan Pemilu PKS. Dengan jumlah kader sebesar 532.803 atau mengalami peningkatan yang luar biasa dibanding 30.000 di tahun 1999 dan 394.190 di tahun 2004 sehingga perbandingannya adalah 1 kader menarik 15 orang pemilih. Hal tersebut jelas menunjukkan menurunnya pengaruh kader bagi kemenangan Pemilu 2009 karena perolehan suara yang menurun sementara jumlah budget yang dikeluarkan struktur untuk mendukung kemenangan Pemilu termasuk untuk belanja iklan TV jauh lebih besar dibanding Pemilu-pemilu sebelumnya. Dukungan pendanaan meningkat mengingat sudah ada 45 kader di parlemen pusat dan bila digabung dengan aleg Provinsi dan Kota/Kabupaten berjumlah 1112.

Setiawan menyatakan bahwa faktor kader dari pemilu 1999 ke 2004 memang sangat berpengaruh, dalam kemenangan Pemilu, namun hal itu tidak lagi cukup di 2009 karena bila akan membesarkan partai tidak mungkin hanya mengandalkan kader. Menurutnya, boleh dibilang pertumbuhan kader ideologis sudah mencapai titik jenuh, sehingga harus ada variasi dalam sistem rekrutmen misalnya merekrut relawan atau *rabhtul 'am* (tokoh massa).⁶⁵ Oleh karena itu walaupun kader masih cukup penting perannya bagi kemenangan Pemilu PKS namun jelas bukan lagi satu-satunya aspek. Selain itu sistem rekrutmen model *cell* yang sangat mementingkan aspek kualitas dan tidak bisa massif menyebabkan di setiap Pemilu atau Pemilukada, mulai dirasakan kurangnya jumlah kader untuk melakukan *direct selling* dan menyelenggarakan berbagai kegiatan kampanye serta penjagaan di setiap TPS (Tempat pemungutan suara). Berpindahnya sebagian besar tokoh-tokoh utama kader yang selama ini menjadi *murabbi*, *naqib* yang memobilisasi kader juga menimbulkan kekosongan dan menurunnya pula tingkat mobilisasi kader. Maka dapat disimpulkan bahwa faktor kader masih tetap penting bagi perolehan suara PKS namun seiring dengan perkembangan partai, maka kader bukan lagi menjadi faktor pertama dan utama untuk memenangkan Pemilu.

Kesimpulannya bila ditilik dari teori Duverger, maka AKP menggunakan sistem rekrutmen “hybrid” yang memungkinkan terjadinya hibridisasi atau penggabungan antara aktivis

⁶⁵ Wawancara dengan Setiawan. *Op. Cit.*

anggota dan relawan di AKP. Jenis rekrutmen 'hybrid' AKP juga memungkinkan terjadinya rekrutmen masif relawan dan anggota yang kini telah berjumlah 5 juta orang dari 74 juta penduduk Turki.⁶⁶ Jumlah aktivis, anggota dan relawan yang besar membuat AKP tidak pernah kekurangan SDM untuk menjalankan berbagai program partai termasuk upaya merawat dan melayani konstituen sehingga rakyat Turki merasakan bahwa AKP selalu hadir bersama mereka sepanjang tahun sehingga berpengaruh positif bagi perolehan suara AKP di Pemilu 2002 dan 2007. Kebijakan AKP memperluas kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam AKP tanpa mengabaikan faktor pembinaan dan seleksi dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam kategori relawan, anggota dan aktivis/pengurus, membuat setiap orang yang bergabung memiliki jalur dan wadahnya masing-masing. Hal itulah yang menyebabkan faktor rekrutmen turut menjadi salah satu faktor kemenangan Pemilu AKP yang signifikan karena terjadi secara masif.

AKP memberikan peluang yang sangat luas bagi setiap warga Negara Turki untuk bergabung dengannya baik sebagai *supporter*, *member* maupun *activist*. Hal itu sesuai dengan teori Alan Ware bahwa partai-partai konservatif seperti misalnya di Inggris yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya kini memiliki jumlah anggota yang relatif besar.⁶⁷ Dalam kaitannya dengan kegiatan kampanye menjelang Pemilu, peningkatan jumlah aktivis, anggota dan relawan sangat penting terutama ketika partai tidak mampu membiayai tenaga profesional untuk keperluan kampanye. Keterbatasan pendanaan juga memaksa struktur organisasi di tingkat kecamatan dan kota untuk menggunakan aktivis-aktivis relawan yang tidak dibayar dalam kampanye. Pada umumnya para politisi mendekati konstituen atau calon pemilih dengan mendatangi rumah-rumah, desa-desa dan warung-warung kopi di Turki karena interaksi *face to face* sangat efektif untuk menyampaikan pesan-pesan. Para aktivis partai yang militan dan para relawan yang ingin membantu partai sangat dibutuhkan karena berjalan mengunjungi rumah-rumah membutuhkan banyak tenaga.⁶⁸

Walaupun partisipasi aktivis partai ini ada yang benar-benar sukarela, kajian literatur tentang partai politik menengarai adanya penggunaan insentif material oleh para politisi untuk

⁶⁶ Dialog dengan Bilal Erdoğan di Istanbul, 9 Juni 2011. Pukul 12.00 waktu Turki.

⁶⁷ Alan Ware. *Op. Cit.* h: 66.

⁶⁸ Ozge Kemahlioglu. *Intra-party Competition and Clientelism: An Analysis of Public Sector Employment in Argentina and Turkey* (Department of Political Science, Columbia University "Prepared for delivery at the 2005 Annual Meeting of the American Political Science Association, September 1 - September 4, 2005. Copyright by the American Political Science Association." *Intra-party Competition and Clientelism: An Analysis of Public Sector Employment in Argentina and Turkey*). h: 10-11.

memotivasi para aktivis bekerja di pemilu dan aktivitas kepartaian. Antara lain tulisan Alan ware (1996) menyatakan walaupun ada penurunan peran insentif material bagi aktivis politik di negara-negara di Eropa dan Amerika Utara, tidak tertutup kemungkinan kondisi yang berbeda di negara-negara lain. Di Turki misalnya tidak ada aturan yang sistemik dalam hal rekrutmen aktivis partai, namun beberapa pejabat partai dan pejabat publik menyatakan bahwa insentif material di Turki masih memainkan peranan cukup penting. Di dalam setiap kampanye, walaupun ada partisipasi para aktivis militan dan sejumlah relawan yang sukarela, tetap ada pula yang mendapatkan honor dari para anggota legislatif atau insentif baik material maupun berupa tawaran mendapatkan pekerjaan dan beberapa proyek di pemerintahan nantinya jika sang kandidat terpilih.⁶⁹

Bila dilihat dari sistem rekrutmen dan kaderisasinya sekilas AKP seolah tidak selektif, namun bila diamati sebenarnya AKP tetap melakukan seleksi dengan cara mengkategorisasi. Prioritas rekrutmen dalam jumlah massal mereka tujukan pada kategori kelompok relawan yang menghimpun berbagai jenis manusia yang kesemuanya pro AKP. Solusi yang dimiliki AKP dalam pengelolaan relawan yang terekrut secara *masif* adalah dengan melibatkan mereka di wadah-wadah yang dimiliki AKP yang berjumlah sangat memadai. Misalnya, ada banyak orang yang bisa direkrut secara profesional di lembaga Humas yang ada di 81 provinsi yang ada di Turki. Demikian pula di lembaga penyandang cacat dan lansia yang dimiliki AKP. Belum lagi yang bisa tertampung di organisasi sayap mereka *Youth Branch* dan *Woman Branch*. Sementara untuk bergabung sebagai anggota dan pengurus inti memang umumnya didasari oleh alasan ideologis dan merekalah yang memiliki rentang kendali terhadap relawan yang berjumlah sangat banyak tersebut. Oleh karena itu AKP memberikan peluang yang sangat luas bagi setiap warga negara Turki untuk bergabung dengannya baik sebagai *supporter* (relawan), *member* (anggota) maupun *activist* (pengurus). Di setiap gerai AKP, baik di musim kampanye maupun tidak AKP selalu membuka pendaftaran bagi mereka yang ingin menjadi anggota dan relawan AKP serta data-data diri mereka ke dalam *database* anggota dan relawan yang setiap saat akan mendapatkan informasi peristiwa, kegiatan dan temu tokoh AKP. Jumlah anggota AKP saat ini di seluruh Turki ada 5 juta (10% dari suara pemilih) dan di Istanbul hampir 1,5juta, sementara misalnya partai kompetitor utama CHP memiliki 700 ribu anggota di seluruh Turki.

⁶⁹ *Ibid.*, h: 12

Siapaapun yang bergabung dengan AKP memiliki hak yang sama untuk naik ke jenjang karir yang lebih tinggi di partai. Kalayci menyebutkan tidak ada penjenjangan anggota di dalam AKP sehingga memudahkan AKP untuk menerima siapa saja yang memiliki visi dan misi yang sama untuk terlibat di struktur partai berdasarkan profesionalitasnya. Bagi para anggota dan pengurus diadakan pertemuan-pertemuan rutin pekanan di tingkat *Mahalle*, sementara mobilisasi relawan terutama bila ada kegiatan-kegiatan sosial dan lain-lain. Di 39 distrik di Istanbul ada 1,5 juta anggota dan yang aktif menjadi *volunteer* sekitar 200.000 yang tiap pekan datang ke partai untuk menjaga kotak suara di setiap tempat pemungutan suara. Di Istanbul ada 31.000 kotak suara dan di setiap tempat pemungutan suara ada minimal 3 orang *volunteer* dan artinya untuk pemungutan suara AKP punya lebih dari 100.000 *volunteer* yang tidak dibayar. Di kantor DPW Istanbul ini misalnya ada beberapa orang sekretaris eksekutif yang dibayar profesional, tetapi para *member of board* atau para ketua di kepengurusan DPW tidak dibayar dan memperoleh pendapatannya di luar partai seperti Omer Faruk yang dalam kesehariannya adalah seorang pengacara.⁷⁰

Sistem rekrutmen model “hybrid” AKP bukannya tidak menuai kritikan, termasuk dari Mustafa Ozkaya, kader AKP dan juga Direktur TV-Net yang menilai AKP kurang selektif dalam merekrut orang-orang yang bergabung dengan AKP baik sebagai relawan, anggota, aktivis maupun dalam hal rekrutmen pejabat publik baik di legislatif maupun eksekutif. Menurut Ozkaya sebagai partai terbesar saat ini, AKP memang memiliki daya tarik yang sangat besar bagi orang-orang yang membutuhkan kendaraan politik untuk mengejar keinginan pribadinya. Bila AKP tidak menyelesaikan masalah seleksi rekrutmen kader dan pejabat publik, boleh jadi rakyat akan memberi pelajaran dengan tidak memilih AKP di Pemilu berikutnya yakni di tahun 2011 ini.⁷¹

Dari segi rekrutmen anggota, AKP memang jauh lebih terbuka dibandingkan dengan *Saadet Partisi*. Fatmanur, kandidat Doktor sosiologi yang memiliki banyak teman di AKP bisa kapan saja ikut dalam berbagai aktivitas yang diselenggarakan AKP, sesuatu yang tidak bisa dilakukannya di *Saadet Partisi* karena sistem rekrutmen keanggotaannya yang ketat dan kaku.⁷² Yunus Sonmez yang pernah menjadi pengurus *Youth Branch* di *Refah Partisi* menyatakan bahwa

⁷⁰ Erza Saladin, Suhfi Majid dan Tim Istanbul. Laporan Observasi Pemilu di Turki 2011. *Op.Cit.*:h: 146.

⁷¹ Mustafa Ozkaya. *Op. Cit.*

⁷² Wawancara dengan Fatmanur, kandidat Doktor ilmu sejarah di Bosphorus University, Istanbul, dalam forum FGD (Focus Group Discussion), 19 Januari 2010.

dulu di *Refah Partisi* semua anggota partai memiliki nilai dan pemikiran yang sama, sementara kini di AKP walaupun tradisi itu masih menjadi ciri penting, bisa pula ditemui pengurus lokal yang memiliki *lifestyle* berbeda. Sementara terkait dengan rekrutmen pejabat publik seperti walikota masalah kompetensi menjadi pertimbangan utama, sehingga bila di dalam AKP tidak ditemukan kader yang memiliki kapasitas tersebut, maka AKP bersedia bekerja sama dengan merekrut orang di luar AKP yang memenuhi kriteria untuk dicalonkan.⁷³

Mahasiswa, pelajar dan orang muda pada umumnya menjadi target rekrutmen AKP yang utama selain perempuan. Pemanfaatan kegiatan sosial seperti yang dilakukan oleh LSM-LSM juga dilakukan oleh *Youth Branch* di kampus-kampus dan kegiatan kepemudaan.⁷⁴ Para kader AKP yang berstatus mahasiswa aktif mengorganisir berbagai kegiatan sosial dan masuk ke dalam kelompok-kelompok kegiatan mahasiswa terutama yang ada kaitannya dengan aktivitas sosial kemasyarakatan kemudian secara tidak langsung mempromosikan AKP dan merekrut teman-teman yang ingin aktif di AKP agar menjadi kader AKP. Menurutny tentu saja strategi itu dilakukan mereka secara halus karena undang-undang melarang adanya aktivitas atau kampanye politik di kampus. Jumlah anggota terdaftar AKP menurut data tahun 2011 mencapai 5 juta dan hampir 2 juta di antaranya adalah perempuan. Banyak tokoh AKP yang mengakui peran penting perempuan dalam kemenangan Pemilu AKP oleh karena itu perempuan juga menjadi target. Menurut Kalayci pada tahun 2009 jumlah anggota AKP 3,5 juta dan di 2011 menurut data resmi terbaru jumlah anggota AKP secara keseluruhan di 81 Provinsi mencapai 5,3 juta dan 1,7 juta diantaranya adalah perempuan. Setiap bulan selalu terjadi penambahan anggota baru.⁷⁵

Kebijakan AKP memperluas kesempatan bagi masyarakat yang ingin bergabung dalam AKP tanpa mengabaikan faktor pembinaan dan seleksi dengan cara mengklasifikasikannya ke dalam kategori relawan, anggota dan aktivis membuat setiap orang yang bergabung memiliki jalur dan wadahnya masing-masing. Hal itulah yang menyebabkan faktor rekrutmen turut menjadi salah satu faktor kemenangan Pemilu AKP yang signifikan karena terjadi secara masif. Sementara di PKS sistem rekrutmen yang digunakan dengan dalih mementingkan kualitas kader, belum bisa bersifat masif dan cenderung stagnan, karena ada kekhawatiran tidak bisa

⁷³ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

⁷⁴ Emre Elchkan adalah sekjen Youth Branch AKP di seluruh Turki dan sekaligus anggota Dewan Pimpinan Pusat. Wawancara dilakukan saat penutupan Youth Branch di Bandung, Sabtu 26 Januari 2010.

⁷⁵ <http://www.Todayszaman.com>, Istanbul, 22 maret 2011.

mengelolanya secara baik. Solusi yang dimiliki AKP dalam pengelolaan relawan yang terekrut secara *masif* adalah dengan melibatkan mereka di wadah-wadah yang dimiliki AKP yang berjumlah sangat memadai. Dari penelitian Prof. Onze Sencar, bila AKP hanya mengandalkan pemilih yang memiliki ideologi *Milli Görüş* maka perolehan suaranya hanya berkisar di angka 15% atau diperbandingkan di PKS bila kita mengandalkan pemilih yang memiliki karakteristik *ikhwan* yang tarbiyah maka hanya akan sangat terbatas. Oleh karena itu dikaitkan dengan teori Alan Ware sistem rekrutmen anggotanya pun harus berubah dari sistem sel menjadi sistem *hybrid* sehingga harus ada perluasan segmentasi dandidak hanya merekrut kelas menengah relijius. Proses kenaikan jenjang yang panjang dan lama juga harus disederhanakan dan lebih difokuskan pada kemanfaatan atau fungsionalisasinya.

V.5. Kepemimpinan Kolektif PKS versus Pemimpin kharismatik AKP mempengaruhi Perbedaan Keberhasilan PKS di Pemilu (1999-2009) dan AKP di Pemilu (2002-2007)

Max Weber membahas tentang tipe kepemimpinan didasarkan sumber legitimasi atau otoritas yang dimilikinya. Kepemimpinan disebut kharismatis jika pengabsahannya tersebut berasal dari kekuatan supra natural yang diyakini para penganutnya. Kemudian kepemimpinan yang berotoritas tradisional terjadi manakala memperoleh pengakuan dari para leluhurnya dan masyarakatnya. Lalu, kepemimpinan yang berotoritas legal formal, pengabsahannya berasal dari pengakuan di depan hukum dan karena dipilih oleh mereka yang memiliki hak memilih melalui koridor aturan yang sudah dibakukan. Sedangkan Pareto (1848-1923) meyakini bahwa setiap masyarakat dipimpin oleh sekelompok kecil orang terbaik yang dikenal sebagai elit yang berhasil menduduki jabatan tinggi di masyarakat.⁷⁶ Baik Pareto maupun Mosca meyakini pendidikan dan latar belakang kelas dsb berpengaruh bagi seseorang untuk memimpin. Namun di Indonesia tidak mudah pelaksanaannya karena mayoritas Indonesia lebih melihat faktor popularitas seorang tokoh dibandingkan aspek kapasitas dan lebih melihat aspek citra dibandingkan reputasi.⁷⁷

Partai Keadilan (PK) memang memiliki tokoh kharismatis yang menjadi unsur perekat yakni Hilmi Aminuddin pendiri gerakan Tarbiyah yang melahirkan PK. Namun beliau menempatkan diri lebih sebagai *King-maker* dan berada di belakang layar, sehingga di Pemilu 1999 yang muncul ke publik adalah tokoh-tokoh muda seperti Hidayat Nurwahid (38 tahun)

⁷⁶ SP. Varma. *Teori Politik Modern*. PT RajaGrafindo. Jakarta, 1995. h: 202.

⁷⁷ *Ibid.*,

sebagai ketua MPP, Nur Mahmudi Ismail (38 tahun) sebagai Presiden PK dan Anis Matta (30 tahun) sebagai Sekjen PK. Tidak ada satupun dari ketiga tokoh PK tersebut yang sudah dikenal publik, apalagi secara nasional, sehingga kesan yang malah muncul dan identik dengan PK saat itu adalah partainya anak-anak muda terpelajar. Di periode 1998-2000, di masa kepemimpinan presiden PK Nur Mahmudi Ismail yang memberi pengaruh positif kepada perolehan suara PK pada pemilu 1999 adalah justru ketokohan lokal para kader yang menjadi juru dakwah di daerahnya masing-masing. Selain itu yang menonjol pula adalah ketokohan kader perempuan yang sejak awal berada di garda terdepan PK dalam berinteraksi dan merebut hati masyarakat melalui layanan-layanan sosial seperti baksos, khitanan massal dan layanan kesehatan gratis.

Kebijakan PKS yang menekankan *collective leadership* di satu sisi menguntungkan secara internal PKS karena setiap kader punya kesempatan menjadi pemimpin, Akan tetapi kelemahannya adalah tidak ada tokoh PKS yang sangat dikenal di masyarakat untuk tingkat nasional. Kepemimpinan merupakan aspek penting kemenangan Pemilu sebuah partai politik, namun kurang dioptimalkan oleh PKS sehingga tidak signifikan perannya dalam kemenangan PKS karena tak bisa dipungkiri PKS berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang masih melihat tokoh pemimpinnya bila akan memilih sebuah partai politik. Pada tahun 2003, di bawah kepemimpinan Hidayat Nur Wahid, Partai Keadilan Sejahtera berhasil melipatgandakan suaranya pada Pemilu 2004 sebesar 600% dari perolehan suara 1,4% suara nasional di pemilu 1999 menjadi meraih 7,34% pada pemilu 2004. Untuk sebuah partai yang baru dideklarasikan pada tahun 2003, menurut Saiful Mujani perolehan tersebut merupakan prestasi yang mengesankan. Lompatan suara PKS itulah yang akhirnya mengantarkan Hidayat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat sehingga semakin dikenal luas sebagai tokoh yang sederhana dan *tokoh* anti KKN. Menurut Azyumardi Azra fenomena kemunculan Hidayat dan kiprah PKS tersebut merupakan proses *mainstreaming of Islamic politics*, pengarusutamaan politik Islam.⁷⁸

Bila disimpulkan di periode kepemimpinan Hidayat Nur Wahid (2000-2005), ada tiga aspek yang berpengaruh dalam peningkatan perolehan suara PKS pada tahun 2004, yakni aspek ketokohan lokal para kader di daerah, ketokohan perempuan dan ditambah dengan ketokohan nasional Hidayat Nur Wahid. Jika perolehan suara PK di Pemilu 1999 dipengaruhi oleh ketokohan lokal para kader yang menjadi juru dakwah dan ketokohan kader perempuannya,

⁷⁸ <http://www.dakwatuna.com/2011/03/11469/sketsa-biografi-hidayat-nur-wahid/#>
23/3/2011 | 19 Rabbi al-Thanni 1432 H | Hits: 7.512. Oleh: Sigit kamseno.

maka di periode Hidayat Nur Wahid perolehan suara menjadi lebih masif karena kedua faktor tersebut diperkuat dengan faktor ketokohan nasional Presiden PKS, Hidayat Nur Wahid. Kesemua aspek kepemimpinan tersebut memiliki pengaruh pada lonjakan keberhasilan PKS di Pemilu 2004 yang memperoleh 7,2% dari sebelumnya 1,3% di Pemilu 1999.⁷⁹

Sedangkan di Pemilu 2009, aspek kepemimpinan di tingkat nasional malah menurun pengaruh positifnya bagi kemenangan Pemilu PKS. Kemunculan Tifatul Sembiring di berbagai media sebenarnya cukup memadai seiring dengan peningkatan kemampuan pendanaan partai, namun gaya komunikasinya dinilai sering kontroversial seperti misalnya pernyataannya tentang Presiden RI harus Balita (Bawah Lima Puluh Tahun) dianggap menyinggung Ketua Umum PDIP Megawati. Akibatnya kader yang bergerak di masyarakat secara langsung yang harus sibuk memberikan penjelasan-penjelasan dan menurut mereka malah menimbulkan pengaruh negatif bagi kemenangan Pemilu PKS. Bahkan para kader PKS yang terpilih menjadi Kepala Daerah sejak 2005, 2006 dan 2008 seperti di Depok, kabupaten Bekasi, Kabupaten Halmahera Selatan, Wakil Gubernur Bengkulu, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jawa Barat dan Gubernur Sumatera Barat juga tidak memberi pengaruh yang berarti pada kemenangan Pemilu 2009 karena umumnya kurang siap dan kurang berani mengambil langkah-langkah dan belum menunjukkan performa yang baik dalam kerjanya. Ketokohan lokal dan faktor ketokohan perempuan kembali memberi pengaruh positif pada perolehan suara PKS di Pemilu 2009 namun karena tidak ada pengaruh positif dari aspek kepemimpinan nasional maka perolehan suara PKS di 2009 relatif stagnan yakni 7,88% dan jauh dari target yang dicanangkan DPP PKS sebesar 20%.⁸⁰

Olivier Roy mengkritik partai-partai Islamis yang mengalami kegagalan ketika masuk ke dalam tahapan mengelola pemerintahan karena memilih pemimpin lebih atas dasar kesalehan dan bukannya kapasitas dan profesionalitas. Kritik tersebut relevan bila digunakan untuk membedah model rekrutmen kepemimpinan di PKS karena seringkali pertimbangan jenjang keanggotaan dan lamanya masa tarbiyah seorang kader lebih diutamakan dari kapasitas. Bila ada pilihan seseorang dengan jenjang keanggotaan tinggi namun kurang kapasitas sedangkan ada kader yang lebih kapasitasnya namun jenjang keanggotaannya lebih rendah, maka masih lebih sering kader yang lebih senior yang diutamakan. Sementara *stressing* pembinaan atau tarbiyah di

⁷⁹ Wawancara dengan Navis Murbiyanto. Sekretaris Bidang Kaderisasi 1998-sekarang. Jakarta, Sabtu 25 Desember 2010. Pukul: 11.00 WIB.

⁸⁰ Wawancara dengan Wahyu Tusy Wardani, kader perempuan PKS Yogyakarta dan staf Bidang Kaderisasi PKS. Jakarta, 13 Maret 2012.

masa awal gerakan Tarbiyah memang mengutamakan peningkatan kesalehan dan ketaatan, bahkan kadang kala ada *taqwim*, pengujian apakah seseorang mau meninggalkan kewajibannya di kantor untuk ikut demonstrasi di hari kerja. Bila kader tersebut tidak mau mangkir dari kantor maka ia akan dinilai tidak taat kepada murabbi dan lebih mementingkan urusan duniawi.

Penulis menjadi staf di Bidang Kaderisasi selama 12 tahun melihat hal itu lebih sebagai kemampuan para Pembina dan struktur Kaderisasi memahami dan mengaplikasikan manhaj tarbiyah atau kurikulum pembinaan. Sebelumnya ada aksioma bahwa sebaiknya kader Tarbiyah tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), ketika penulis mengkonfirmasi ke Ketua Majelis Syuro tentang muatan manhaj tarbiyah tersebut maka jawabannya mencengangkan. Beliau menjawab tidak pernah ada larangan, melainkan dilarang menyalahgunakan jabatan sebagai PNS untuk memperkaya diri sendiri. Pada awal-awal masa tarbiyah, setiap kader dengan latar belakang pendidikan apapun akan merasa kurang *afdhol* bila tidak menjadi ustadz atau mubaligh di mimbar-mimbar. Oleh karena itu tak heran bila masih cukup banyak pejabat publik dari PKS yang kurang menunjukkan kemampuan dan profesionalitasnya.

Ada satu lagi kesalahan aksioma dalam kaitannya dengan pemahaman soal pemimpin berkharisma yang acapkali diidentikkan kader dengan pemahaman soal pengkultusan. Di satu sisi seseorang jika diproyeksikan menjadi pemimpin berkharisma takut dikultuskan sementara para kader PKS di sisi lain juga memiliki budaya egaliter dan anti pengkultusan. Pemahaman dan budaya internal PKS tidak bisa dibawa ke ruang publik, karena masyarakat tetap membutuhkan pemimpin yang cakap dan kharismatik.

Bila PKS dengan bangga menyebut dirinya sebagai *cadre based party* yakni bahwa kaderlah yang dianggap faktor paling penting dalam kemenangan Pemilu sehingga tidak ada tokoh PKS yang menonjol dan dikenal luas oleh masyarakat.⁸¹ Sebaliknya di AKP Turki, Omer Faruk Kalayci dengan bangga menyatakan AKP adalah *leader based party* dan Huseyin Kansu beranggapan bahwa sebegus apapun organisasi dan strategi sebuah partai politik jika tidak memiliki tokoh yang hebat maka sulit untuk menang dalam pemilu. Aspek kepemimpinan menurut Huseyin Kansu, Omer Faruk Kalayci, Mustafa Ozkaya dan Necmettin Bilal Erdoğan masih sangat menentukan di Turki dan AKP memiliki tokoh kharismatis Erdogan.

⁸¹ Wawancara dengan Navis Murbiyanto. *Op. Cit.*

Sementara partai-partai lainnya di Turki seperti CHP dan MHP tidak memiliki tokoh selain Deniz Baykal dan David Bahçelli yang sudah belasan tahun memimpin CHP dan MHP. Pengaruh faktor kepemimpinan pada elektabilitas sebuah partai politik juga nampak dalam kasus MHP yang menurun perolehan suaranya ketika mencuat berita tentang skandal seks beberapa anggota dewannya dan Ketua David Bahçelli tetap memimpin. Sedangkan CHP walaupun Ketua Umumnya Deniz Baykal terlibat skandal seks dan perselingkuhannya diunggah di internet serta beredar luas, perolehan suaranya tetap meningkat karena CHP segera mengganti Baykal dengan Kemal Kiriçdarođlu dan membuat slogan: *yeni CHP, yeni Lider* (CHP baru, pemimpin baru).⁸²

Saat ini Erdoğan tidak saja menjadi tokoh AKP melainkan juga bagi Turki, bahkan sebagian rakyat Turki memanggilnya dengan Papa Tayyip setelah sebelumnya hanya Mustafa Kemal yang mendapat julukan *Ataturk* (Bapak Turki). Di banyak tempat dan di berbagai kesempatan foto Erdoğan diletakkan setelah foto Mustafa Kemal, *founding father* Republik Turki, sehingga Erdoğan dianggap sebagai pemimpin Islam pertama yang setara dengan Mustafa Kemal. Setiap kali Erdoğan muncul di tengah-tengah rakyat Turki mereka acapkali meneriakan namanya secara lengkap dengan: “Recep Tayyip Erdoğan.... Recep Tayyip Erdoğan” atau meneriakan: *Turkiye Seninle Gurur Duyuyor* (Turki bangga padamu). Bahkan dijuluki sebagai Shalahuddin Al Ayyubi abad ke-21 karena ketegasan sikapnya pada Israel.⁸³

Bila disimpulkan dengan teori Max Weber, maka aspek kepemimpinan Erdoğan memenuhi semua jenis otoritas kepemimpinan yang disebutkan Weber yakni kepemimpinan kharismatik yang juga diterima secara tradisional oleh masyarakat dan juga secara legal formal di mata undang-undang. Huseyin Kansu, Omer Faruq Kalayci, Bilal Erdogan maupun pengamat politik dari Metropoll Prof. Ozer Sencar berpendapat sama bahwa Erdogan adalah daya tarik utama dan kunci kemenangan AKP. Kepribadiannya yang kuat dan tegas, berani membela Turki dan berkemauan keras menyejahterakan rakyat Turki membuatnya bahkan menjadi pemimpin dunia Islam yang bukan hanya dikenal di Turki melainkan juga di kawasan dan di dunia internasional. Menurut Huseyin Kansu, aspek kepemimpinan tetap menjadi alasan utama seseorang memilih sebuah partai sehingga walaupun sebuah partai memiliki kekuatan organisasi dan kokohnya sistem kaderisasi bila tidak memiliki tokoh yang dikenal secara nasional maka

⁸² [http:// www. today's zaman Istanbul// Baykal and Kiriçdarođlu to testify in harassment case. 2011-03-16](http://www.today's zaman Istanbul// Baykal and Kiriçdarođlu to testify in harassment case. 2011-03-16).

⁸³ Laporan Observasi Pemilu Turki 2011. *Op.Cit.* h: 191.

akan sulit bagi rakyat untuk memilih partai tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan Erdogan berpengaruh paling dominan dalam kemenangan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.

Namun bukan berarti Erdogan tidak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya kalangan pers dengan dipenjarakannya beberapa wartawan karena dianggap terus mendiskreditkan pemerintahan. Kemudian kalangan sekuler mengkritik bahwa Erdogan terus menerus melakukan pembangunan fisik dalam berbagai mega proyek namun mengabaikan hal-hal yang manusiawi sehingga menurut mereka kurang memberikan kesempatan bernafas bagi rakyat. Bila partai-partai sekuler terus mencurigai bahwa suatu saat pemerintahan AKP akan merealisasikan agenda islamisasi, maka sebaliknya partai berhaluan Islam seperti *Saadet Partisi* menulis daftar “dosa” AKP dan Erdogan yang dianggap mengkhianati perjuangan kelompok Islamis *Milli Gorus*. Selain itu juga ada kelompok pencinta dan pelestari ‘Turkish Heritage’ yang mengkritik bahwa pembangunan besar-besaran pemerintahan Erdogan acapkali mengabaikan pelestarian bangunan-bangunan peninggalan sejarah dan terdesak oleh pembangunan mall atau pertokoan. Penulis menyimpulkan pengaruh positif sosok kharismatis Erdogan tetap paling dominan berpengaruh bagi kemenangan AKP di hampir setiap Pemilu, namun kiranya Erdogan harus merencanakan dengan matang kapan kiranya saat yang tepat baginya untuk mengundurkan diri yakni di puncak kejayaannya dan meletakkan tongkat estafeta kepemimpinan di AKP dan di Turki kepada penerusnya, sehingga ia akan tetap dikenang sebagai tokoh fenomenal atau bahkan Shalahuddin di abad ke-21.

Erdoğan sebagai pemimpin muda yang mendirikan AKP di saat berusia 47 tahun memberikan rakyat Turki harapan karena reputasi atau rekam jejak keberhasilannya sebagai Walikota Istanbul di usia 40 hingga 44 tahun (1994-1998) yang mampu menyelesaikan sebagian besar masalah di Istanbul. Banyak orang yang awalnya mengkhawatirkan Erdoğan setelah terpilih menjadi Walikota akan menerapkan undang-undang syariah Islam, menjadi kagum karena Erdoğan langsung menangani masalah-masalah kronis di Istanbul seperti masalah kekurangan air bersih, polusi dan kemacetan lalu lintas yang luar biasa. Masalah kekurangan air diatasi dengan memasang pipa air bersih sepanjang ratusan kilometer dari pegunungan ke Istanbul dan masalah sampah diatasi dengan membuat fasilitas-fasilitas mesin pendaur ulang sampah. Kemudian polusi udara dikurangi dengan mengganti bis-bis yang ada dengan bis-bis ramah lingkungan serta mengatasi kemacetan lalu lintas dengan membangun lebih dari 50

jembatan, terowongan dan jalan layang. Untuk mencegah korupsi Erdoğan melakukan langkah-langkah yang cermat untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara tepat. Erdoğan juga membayar sebagian besar hutang kota Istanbul sebesar 2 juta dolar yang ditinggalkan pemerintah terdahulu dan berhasil menanamkan investasi sebesar 4 juta dolar. Prestasi lainnya adalah menyelesaikan masalah upah buruh yang selama ini tidak berhasil diselesaikan serta membuat kesepakatan dengan serikat buruh. PBB pun memberikan *UN Habitat Award* pada Erdoğan yang merupakan sebuah penghargaan untuk kota yang ramah lingkungan dan minim polusi.⁸⁴

Dari semua uraian di atas nampak jelas bahwa faktor yang paling berpengaruh secara signifikan pada kemenangan Pemilu AKP adalah faktor *leadership*. Aspek kepemimpinan menurut Huseyin Kansu, Omer Faruk Kalayci, Mustafa Ozkaya dan Necmettin Bilal Erdoğan masih sangat menentukan di Turki sehingga menyebabkan AKP memperoleh keberhasilan berturut-turut di dua Pemilu (2002 dan 2007) karena memiliki *tokoh* utama yakni Erdoğan sebagai sosok kharismatik yang tegas dan dicintai oleh rakyatnya. Sementara di PKS yang dominan adalah sikap dan mengedepankan kolektif *leadership*, sementara secara realistis di tengah masyarakat Indonesia yang masih *patron client* harus ada satu tokoh pemimpin yang dikenal oleh rakyat. Dari uraian di atas nampak bahwa aspek kepemimpinan menjadi aspek paling dominan berpengaruh bagi kemenangan AKP, sementara di PKS aspek kepemimpinan tidak berpengaruh positif pada perolehan suara PKS di Pemilu 2009.

V.6. Optimalisasi Strategi *Vernacular Politics* PKS dan Strategi *Vernacular Politics Plus* AKP Berpengaruh pada Perbedaan Keberhasilan PKS di Pemilu (1999-2009) dan AKP di Pemilu (2002-2007)

Strategi merupakan aspek yang tak kalah pentingnya bagi partai politik untuk menuju pemerintahan. Demikian pula bagi PKS, walaupun ideologi dan sistem rekrutmen anggota berjalan baik dan berpengaruh signifikan bagi kemenangan PKS, namun bila faktor strategi tidak dimanfaatkan secara baik, maka akan sulit bagi PKS untuk memenangkan Pemilu. Pendefinisian strategi oleh Scruton sebagai penggalan dan pemanfaatan secara optimal kekuatan-kekuatan potensial sejalan dengan arahan Hilmi Aminuddin bahwa garis-garis besar strategi perjuangan politik PKS adalah menekankan pada strategi perencanaan dan penghimpunan serta pemanfaatan

⁸⁴ www.un.org/apps/news/story.asp. Dikutip juga dari: en.wikipedia.org/wiki/recep_tayyip_Erdoğan

potensi.⁸⁵ Penghimpunan dan pemanfaatan potensi nampak dalam strategi pemenangan Pemilu PKS yang utama yakni *permanent campaign* dalam bentuk *vernacular politics* berupa kerjasama jejaring masyarakat dengan partai politik dan lembaga-lembaga *civil society* serta pemerintah lokal dalam sebuah gerakan sosial politik.⁸⁶

Untung Wahono, Ketua Majelis Pertimbangan Pusat (MPP) PKS juga menyatakan bahwa salah satu aspek strategi *permanent campaign* melalui politik lokal yang erat kaitannya dengan strategi teritorial berbasis kelurahan atau bahkan TPS, sudah mulai digunakan sejak masih PK dengan turun langsung ke masyarakat secara terus menerus misalnya melalui *direct selling* oleh para kader. Namun menurut Untung belum optimal pengaruhnya bagi pemenangan PK dan PKS karena jumlah masyarakat di Indonesia yang perlu dibantu masih sangat banyak sementara kemampuan finansial para kader dan struktur PKS masih terbatas sehingga sebagian masih menjadi sekedar penyalur bantuan yang terkadang mengandung resiko.

Bila dilakukan kilas balik maka di Pemilu 1999, Partai Keadilan (PK) sangat mengandalkan strategi *vernacular politics* atau politik di tingkat lokal dengan memanfaatkan jejaring yang ada. Para kader PK umumnya menjadi tokoh yang aktif di masjid-masjid di dekat rumahnya atau di kampus-kampus dan di sekolah-sekolah, almaternya sehingga interaksi masyarakat di tingkat lokal seperti RT/RW, Kelurahan atau Kecamatan dengan para aktivis PK menjadi daya tarik masyarakat untuk memilih PK. Strategi kampanye permanen melalui interaksi, komunikasi dan pelayanan sosial, dakwah dan pendidikan para aktivis ke masyarakat di tingkat lokal termasuk dengan jejaring sosial dan struktur partai di tingkat DPC merupakan strategi satu-satunya yang digunakan PK dan berpengaruh positif bagi perolehan suara PK. Namun aspek kurangnya pendanaan dan masih sedikitnya kader PK yang berada di pemerintahan juga membuat strategi ini kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Selanjutnya Pemilu 2004 strategi yang khas digunakan oleh partai politik yang berasal dari gerakan dakwah masih tetap menjadi strategi utama dan Hidayat Nurwahid menganggap strategi seperti ini baik untuk digunakan seperti bagaimana memanfaatkan akses ke

⁸⁵ Hilmi Aminuddin. *Menyusun Langkah-langkah Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS*. Jakarta, 2008. h: 7-32.

⁸⁶ Jenny B. White. *Islamist Mobilization in Turkey, A Study in Vernacular Politics*. University Washington Press. Amerika, 2002. *Vernacular politics yang diutarakan Jenny White memiliki kesamaan dengan ordinary politics yang berlangsung di Mesir sebagaimana dijelaskan Asef Bayat dalam Life as Politics: How Ordinary people Change the Middle East*. Stanford University, California. 2010. h: 241-248.

pemerintahan sepanjang tetap transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁷ Namun PKS di masa kepemimpinan Hidayat Nurwahid tidak hanya mengandalkan strategi ini sebagai satu-satunya strategi yang digunakan melainkan juga dengan memanfaatkan strategi media, penokohan dan pembentukan citra partai melalui slogan Bersih dan Peduli sehingga memberi pengaruh positif pada lonjakan keberhasilan PKS di Pemilu 2004 yang memperoleh 7,2% dari sebelumnya 1,3% di Pemilu 1999.⁸⁸

Strategi *vernacular politics* pada periode awal 1999 hingga 2004 belum bisa diterapkan oleh PKS sebagai partai baru sehingga belum berpengaruh pada kemenangan Pemilu 1999 dan 2004 karena baru mulai diwacanakan sejak 2005 ketika Nur Mahmudi Ismail, Presiden Partai Keadilan pertama menjadi Walikota Depok untuk pertama kalinya. Kemudian berturut-turut Muhammad Kasuba menjadi Bupati Halmahera Selatan pada 2005, Sa'dudin menjadi Bupati Bekasi pada 2007, Ahmad Heryawan menjadi Gubernur Jawa Barat pada 2008, Gatot menjadi wakil Gubernur Sumatra Utara pada 2008 dan Irwan Prayitno menjadi Gubernur Sumatra Barat pada 2010.

Namun ternyata di Pemilu 2009 pun, strategi tersebut belum berjalan dengan baik, akibatnya strategi tersebut belum menjadi faktor yang mempengaruhi kemenangan Pemilu PKS. Nampak masih ada keengganan dan kegamangan beberapa kader yang menjadi Kepala daerah untuk memberikan akses pada para kadernya. Demikian pula dengan para kader PKS yang ada di LSM sosial, yang karena berusaha mengedepankan independensinya juga menjadi kurang memberikan alokasi bantuan kepada para kader dan simpatisan PKS.

Di Pemilu 2009, PKS memang masih menjadikan strategi *vernacular politic* berupa kampanye permanen sebagai andalan dengan menjadikan satu kecamatan sebagai *hadhonah* atau daerah binaan sebuah *usrah* atau grup kader inti, namun aspek pemanfaatan strategi *vernacular politics* menurun intensitasnya karena kesibukan kader yang luar biasa akibat mobilisasi kader-kader ke berbagai instansi pemerintah. Sementara kader-kader PKS yang menjadi pejabat atau menjadi penggiat LSM pada umumnya masih enggan bersinergi dengan jejaring sosial kemasyarakatan dan struktur partai di tingkat lokal.

Demikian pula dalam hal strategi pemilihan isu utama dan menjual keberhasilan belum digunakan secara baik sehingga tidak mempengaruhi secara positif perolehan suara PKS di

⁸⁷ Wawancara dengan Hidayat Nur Wahid. *Op. Cit.*

⁸⁸ *Ibid.*,

Pemilu 2009. Depok yang dipimpin oleh kader PKS sebagai Walikota belum bisa membuat skala prioritas yang benar dalam program-programnya karena mengedepankan program slogan yang tidak membunai yakni *cyber city* padahal persoalan pengelolaan sampah dan kemacetan di kota Depok belum selesai sampai saat ini. Akibatnya terkesan tidak fokus dalam penyelesaian masalah di kota Depok dan belum dapat menunjukkan keberhasilannya yang bisa dijual ke masyarakat.

Terkait dengan strategi media, belum semua kader PKS belum memiliki kesadaran tentang tidak bersahabatnya media massa dengan PKS, sehingga belum semuanya pula beralih ke strategi media lain yang efektif seperti misalnya mendirikan pusat-pusat informasi dengan akses yang luas kepada masyarakat. Strategi media adalah kombinasi cara untuk menyampaikan pesan-pesan yang terintegratif untuk sasaran target para pemilih dengan *content* reputasi para pejabat publik PKS dan visi ke depan yang ingin dibangun oleh PKS, namun hal itu masih sedikit sekali dilaksanakan. Selanjutnya PKS juga menerapkan strategi penguasaan teritorial dilakukan dengan cara mendirikan sebanyak mungkin posko/*outlet* dan melakukan *canvassing/direct selling* seintensif mungkin. Salah satu strategi pemenangan Pemilu PKS adalah dengan melakukan penetrasi kampanye hingga ke kalangan *grass root* dan menyentuh langsung masyarakat dengan kampanye *face to face* atau *direct selling*. Untuk menguatkan penetrasi tersebut, PKS memiliki Pos WK (Pos Wanita Keadilan) di berbagai wilayah di seluruh tanah air yang juga berfungsi sebagai rumah aspirasi dan menjadi pusat kegiatan para wanita. Tussy Wardani menyatakan bahwa keberhasilan PKS lebih karena interaksi intensif kader-kader lokal terutama kader-kader perempuan PKS dengan masyarakat.⁸⁹

Di Turki, AKP juga menerapkan strategi *permanent campaign* melalui *vernacular politic* atau politik kedaerahan yang merupakan upaya mensinergikan potensi yang dimiliki oleh partai politik dengan jejaring sosialnya, LSM-LSM dan pemerintah lokal (*local government*). Interaksi para kader AKP yang menjadi relawan atau aktivis LSM dengan struktur partai menunjukkan bahwa AKP menggunakan strategi *vernacular politics* sebagai upaya mengoptimalkan potensi yang ada di partai, LSM dan kader partai yang menjadi pejabat pemerintah daerah. Ciri *permanent campaign* dalam strategi *vernacular politics* ditunjukkan melalui komunikasi personal dengan konstituen secara terus menerus dan tidak hanya menjelang pemilu saja berupa kepedulian sosial kader-kader AKP yang langsung menjangkau konstituen. Salah satu strategi

⁸⁹ Wahyu Tussy Wardani. *Op. Cit.*

kampanye AKP adalah *door to door (direct selling)* untuk menjelaskan program-program partai dan pemerintah. AKP juga menjadikan rumah seorang anggota di sebuah jalan sebagai tempat pertemuan dan masyarakat sekitar berkumpul bersama-sama membahas strategi partai untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat di daerah itu.⁹⁰

Strategi penting AKP lainnya untuk memenangkan Pemilu adalah ketepatan pemilihan isu utama, misalnya sesuai dengan nama AKP: Partai Keadilan dan Pembangunan, maka isu pembangunan dan keadilan ekonomi merupakan isu utama AKP yang dianggap paling penting dan dibutuhkan rakyat.⁹¹ Di saat AKP didirikan, Turki sedang mengalami krisis besar dan dunia juga dilanda krisis ekonomi global. Maka pemilihan isu kampanye AKP merupakan hal yang penting dan isu utama yang “dijual” AKP dalam Pemilu adalah perbaikan ekonomi.⁹² Selain masalah pembangunan ekonomi dan keadilan, persoalan keseimbangan politik di Turki adalah hal penting yang menciptakan stabilitas politik sehingga AKP bukan hanya mengatasi masalah ekonomi, melainkan juga menjaga keseimbangan dalam negeri Turki misalnya dengan menggunakan strategi merangkul militer dan kubu sekuler. Selain itu AKP juga menggunakan isu demokratisasi dan upaya bergabung dengan Uni Eropa sebagai upaya yang komprehensif.⁹³

Berikutnya adalah strategi media yang menurut Yunus Sonmez merupakan bagian penting dari strategi pemenangan Pemilu, berkembangnya teknologi informasi dimanfaatkan oleh AKP melalui strategi optimalisasi pemanfaatan media massa.⁹⁴ Hubungan Erdoğan dan AKP dengan media massa di Turki buruk sejak Erdoğan mengikuti pemilihan Walikota Istanbul bahkan sampai sekarang membuat AKP menggunakan sosial media lainnya sebagai sarana kampanye seperti FB, *twitter* dan *web pages*. Strategi *branding* AKP menggunakan beberapa media utama seperti: TV dan materi iklan untuk TV dibuat dalam beberapa versi yang menarik, kemudian ada beberapa kampanye Akbar di lapangan yang diliput langsung oleh TV dan memiliki agenda tunggal mendengarkan orasi Ketua Umum AKP yakni Erdoğan.⁹⁵

Terakhir adalah faktor strategi teritorial yang dilakukan dengan cara mendirikan sebanyak mungkin posko/*outlet* dan melakukan *canvassing/direct selling* seintensif mungkin. Salah satu kunci kemenangan AKP adalah dengan melakukan penetrasi kampanye hingga ke

⁹⁰ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

⁹¹ *Ibid.*,

⁹² Fatma Zehra. *Op. Cit.*

⁹³ Yunus Sonmez. *Op. Cit.*

⁹⁴ *Ibid.*,

⁹⁵ Ihsan Fadila, Tim Istanbul dan buku Laporan Observasi Pemilu Turki. *Op.Cit.* h: 155.

kalangan *grass root* dan menyentuh langsung masyarakat dengan kampanye *face to face* atau *direct selling*. Untuk menguatkan penetrasi tersebut, AKP membentuk posko pemenangan di berbagai tempat. Di Istanbul ada lebih dari 1000 posko yang berfungsi sebagai rumah aspirasi. Posisi *outlet*/posko sangat strategis dengan desain ruangan yang sangat profesional seperti misalnya di salah satu posko pemenangan yang terletak di Taksim Square.⁹⁶

Bila disimpulkan keberhasilan AKP memenangkan tiga kali pemilu berturut-turut di era demokrasi disebabkan oleh faktor sejarah yang panjang dan kapasitas yang besar menyangkut dua hal yakni faktor Erdoğan sebagai pemimpin yang tegas dan kharismatik ditambah faktor pendanaan yang cukup. Kapasitas pendanaan AKP selain dipengaruhi oleh UU di Turki yang memberikan dukungan finansial yang besar kepada partai-partai yang berada di Parlemen juga merupakan hasil strategi *vernacular politics* yang menjamin ketersediaan dana yang memadai. Selain itu pendanaan juga diperoleh dari strategi menjual reputasi keberhasilan pemerintahan AKP dan menjual mimpi atau rencana pembangunan sehingga mengundang para investor untuk mendanai kampanye dengan kompensasi kemungkinan menjadi salah satu pelaksana proyek-proyek besar yang direncanakan. Dengan dukungan finansial yang cukup, maka AKP mampu melaksanakan strategi-strategi lainnya dengan baik seperti strategi media, strategi territorial, strategi *permanent campaign* dengan pelayanan sosial yang terus menerus dan membutuhkan dana yang besar. AKP juga secara cermat melengkapinya dengan strategi penokohan melalui pemanfaatan media, belanja iklan di TV yang besar, penguasaan teritorial yang kuat, mengusung keberhasilan pemerintahan AKP dengan data-data dan bukti konkrit serta menjual “mimpi” membangun Turki menjadi bangsa yang besar. Memang ada kritikan dari partai oposan bahwa AKP banyak menggunakan fasilitas negara dalam penyelenggaraan kampanyenya serta pemberian mega-mega proyek hanya kepada para pengusaha besar yang berafiliasi kepada pemerintahan AKP.

Namun banyak fakta menunjukkan bahwa salah satu kelebihan AKP selain aspek ideologi Pos-Islamisme yang terbuka dan aspek kepemimpinan Erdoğan, maka strategi adalah juga salah satu aspek terkuatnya yang berpengaruh bagi pemenangan AKP di Pemilu 2002 dan 2007. Sebaliknya PKS hanya memusatkan perhatian pada strategi *permanent campaign* saja dalam bentuk strategi *vernacular politic* dan tidak optimal di aspek strategi-strategi lainnya seperti strategi penokohan, pengusungan isu atau jargon, pencitraan partai dan pemanfaatan

⁹⁶ *Ibid.*, h: 159.

media kurang dioptimalkan. Akibatnya aspek strategi kurang memberikan pengaruh positif bagi kemenangan Pemilu PKS di 2009 yang relatif stagnan yakni 7,88%.

III.7. Perbandingan Aspek-aspek Eksternal yang Ikut Mempengaruhi Kemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007)

PKS lahir di tahun 1998 di saat situasi sosial politik dan ekonomi Indonesia sedang terpuruk dan di saat itu pula Indonesia menurun peran kepemimpinannya di kawasan Asia Tenggara. Sejak krisis moneter 1998, posisi Indonesia terus merosot di mata negara-negara tetangga. Namun Reformasi yang sudah berjalan selama 14 Tahun masih belum berhasil menciptakan stabilitas sosial politik ekonomi di Indonesia termasuk di periode kedua. Sebagai mitra koalisi maka keberhasilan pemerintahan SBY periode 2004-2009 di bidang pertanian misalnya tidak bisa diklaim sebagai keberhasilan PKS walaupun Menteri Pertaniannya dari PKS, sehingga tidak berpengaruh pada kemenangan Pemilu PKS. Sebaliknya ironisnya ketika kinerja pemerintahan SBY dianggap gagal menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, maka walaupun PKS mengkritisi dan memberikan alternatif solusi tetap saja dianggap sebagai bagian dari koalisi yang harus ikut bertanggung jawab.

Sementara di Turki instabilitas politik terjadi dalam kurun waktu yang panjang disebabkan oleh intervensi militer di dalam pemerintahan di Turki terutama sejak kudeta militer di tahun 1980.⁹⁷ Kemudian berlanjut di awal 1990 di saat itu Turki sedang mengalami krisis sosial, politik dan ekonomi atau krisis multidimensional yang sangat berat sedangkan krisis politik ditandai dengan berganti-gantinya pemerintahan sejak tahun 1995 ketika Perdana Menteri (PM) Necmettin Erbakan dari Refah Parti dipaksa mundur. Instabilitas politik ditambah krisis ekonomi yang mencapai puncaknya pada tahun 2001 telah meruntuhkan sendi-sendi perekonomian Turki ditambah pula terjadinya represi terhadap *civil society* yang memiliki akar keislaman yang kuat ditekan oleh pemerintah ultra sekuler. Sehingga kemunculan AKP di tahun 2001 yang menyatakan bahwa Turki akan mengajukan kembali proposal untuk menjadi anggota Uni Eropa menguatkan tuntutan demokratisasi yang secara tidak langsung melemahkan posisi militer. Selanjutnya kondisi tersebut memberi keleluasaan pada partai berhaluan Islam AKP yang memperoleh respon positif karena memberikan harapan baru.⁹⁸

⁹⁷Ahmad al-Usairy. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Akbar Media Eka Sarana. Jakarta, 2003. h: 495.

⁹⁸ Prof. Dr. Cüneyt Yüksel (*Member of Turkish Parliament*). Makalah: *Introductory Brief About AKP*. 2008.

Selain itu faktor budaya Turki sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim dan tidak bisa dilepaskan dari sub kebudayaan Islam Turki turut menjadi faktor eksternal yang kondusif bagi keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007.⁹⁹ Cihangir Isbilir¹⁰⁰, Ketua UNIW menyatakan bahwa budaya Islam di Turki memiliki akar sejarah yang sangat dalam di masyarakat dalam bentuk jama'ah-jama'ah dan tarekat-tarekat, sehingga sekularisasi yang dicanangkan Mustapha Kamal sejak 1923 tidak pernah membuat rakyat Turki menjadi benar-benar sekuler. Selain itu, Turki tidak pernah dijajah bahkan pernah menjadi imperium besar atau Kekhilafahan Turki Utsmani sehingga menyebabkan karakter bangsa Turki penuh percaya diri.

Menurut Ahmad F. Syaifuddin, guru besar antropologi UI, bila dilihat dari perspektif antropologis maka banyak temuan arkelogis yang menunjukkan peradaban tinggi yang kuno berada di satu daerah yang subur membentuk bulan sabit (*fertile crescent*) dan di antaranya adalah di Turki yang sangat kaya dengan peninggalan-peninggalan sehingga membuat penduduknya sangat bangga. Kebanggaan akan tradisi ini kemudian bercampur dengan keyakinan keagamaan sehingga terjadi sintesis atau peleburan antara nilai-nilai tradisi sebagai bangsa yang memiliki banyak peninggalan peradaban kuno dengan nilai-nilai keislaman yang datang di masa berikutnya.¹⁰¹ Indonesia dan Turki merupakan dua negara yang berpenduduk mayoritas Muslim, namun memiliki perbedaan karena peradaban Islam memiliki beberapa sub peradaban yang terdiri dari kebudayaan Arab, Turki, Persia dan Melayu sehingga kebudayaan Islam Turki berbeda dengan kebudayaan Islam Melayu.¹⁰²

Julie Hwang dari Goucher University, AS, juga beranggapan bahwa perbedaan peradaban dan budaya juga berpengaruh pada perbedaan budaya politik Indonesia dan Turki¹⁰³ Di Turki, unsur feodalisme di dalam budaya politiknya menjadi jauh berkurang di masa pemerintahan AKP dibanding di masa pemerintahan sekuler CHP seperti nampak dalam orasi Erdogan “Kami memimpin untuk melayani kalian, wahai rakyat Turki dan bukan untuk memerintah kalian”.¹⁰⁴ Sementara menurutnya di Indonesia unsur feodalisme masih cukup

⁹⁹ Samuel P. Huntington. *Op. Cit.*h: 48-49

¹⁰⁰ Wawancara dengan Cihangir Isbilir pada penutupan Youth Camp di Bandung, Sabtu 26 Januari 2010. Pukul 16.00-16.15 WIB.

¹⁰¹ Wawancara dengan Prof. Ahmad Fedyani Syaifuddin, staf ahli Menteri Pertahanan Bidang Sosial, Budaya dan Agama. Kamis, 21 April 2011, pukul 10.35-11.20 WIB.

¹⁰² Samuel P. Huntington. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (edisi terjemahan dari “The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century”). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997, h: 48-49

¹⁰³ Julie C. Hwang. *Op. Cit.*

¹⁰⁴ Anthony Shadid, New York Times, Rabu, 1 Juni 2011.

kental mewarnai kultur politik Indonesia yang berasal dari model aristokrasi Jawa yakni pemimpin harus dihormati dan dilayani. Konteks budaya politik yang sangat berbeda ini membuat PKS menghadapi tantangan yang berat bila ingin mengejar ketertinggalannya dibandingkan AKP.

Pernyataan Hwang dibenarkan oleh Ahmad F. Syaifuddin bahwa ada perbedaan dalam budaya keislaman di Indonesia dan di Turki. Budaya Islam di Turki yang jumlah penduduknya 99% Muslim menurutnya relatif homogen apalagi pernah menjadi pusat kekuasaan Islam di masa kekhilafahan Turki Utsmani atau *Ottoman Empire*. Sedangkan budaya Islam di Indonesia sangat heterogen karena terdiri dari peradaban Jawa, Hindu dan Islam yang datang belakangan sehingga memunculkan istilah Islam abangan yang sinkretis antara nilai-nilai Jawa lokal, Hindu dan Islam. Hal itu juga menyebabkan heterogenitas budaya politik Islam dan terfragmentasi karena karakter kelompok Islam yang berbeda-beda sehingga membuat umat Islam di Indonesia sulit bersatu dalam satu payung politik Islam yang besar.¹⁰⁵

Bila dilihat dari pernyataan di atas jelas perbedaan dalam latar belakang peradaban dan budaya bangsa serta kultur politik kedua negara membawa dampak yang sangat menentukan perbedaan keberhasilan *electoral* PKS dan AKP di Indonesia. Sehingga faktor peradaban tua dan kultur keislaman yang relatif homogen di Turki menjadi sebuah lahan yang baik bagi tumbuhnya partai politik berhaluan Islam AKP. Sementara PKS tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang masih dalam proses menuju *civilized society* sehingga tidak mudah “menjual” program dan *platform*, karena di setiap Pemilu yang lebih berperan adalah serangan subuh dengan *money politics* sehingga menghilangkan usaha edukasi konstituen yang dilakukan PKS melalui *permanent campaign*.

Dalam perkembangannya, kesenjangan peradaban dan kultur politik dianggap juga berdampak pada perbedaan dalam budaya internal PKS dan AKP. Greg Fealy menengarai adanya penurunan dalam kultur “bersih” secara politis dan moralitas di elit PKS dengan menyebut kasus Misbakhun, Nunun istri Adang Darajatun, kasus daging berjanggut di Kementerian Pertanian, terakhir tuduhan tersangka kasus mafia Anggaran di Banggar DPR RI,

¹⁰⁵ Wawancara Ahmad F Syaifuddin. *Op. Cit.*

Wa Ode yang menyebut pula nama Tamsil Linrung dan Anis Matta. Menurut Greg Fealy, penurunan moralitas elit seperti itu belum terjadi di AKP.¹⁰⁶

Sebagian kasus tersebut pada umumnya akan dijawab oleh Bidang Kaderisasi bahwa Misbakhun baru ikut pembinaan atau *tarbiyah* setelah direkrut menjadi caleg yang kemudian terpilih, demikian pula dengan Adang Darajatun. Berikutnya terkait berita kasus daging berjanggut di Tempo, pihak Tempo kemudian menarik kembali berita itu dan meminta maaf setelah dilakukan klarifikasi. Sedangkan tersangka Wa Ode dalam kasus mafia ditengarai erat kaitannya dengan muatan politis seperti misalnya saksi di persidangan Nando, ketika diklarifikasi oleh Marzuki Ali, Ketua DPR RI membantah telah menyebut nama-nama pimpinan DPR termasuk Anis Matta sebagaimana disebutkan oleh Wa Ode, ““Saya tidak pernah menyebut nama Ketua DPR Bapak Marzuki Alie dalam BAP saya waktu diperiksa di KPK,” ucap Nando, Sekretaris Badan Anggaran DPR RI dalam jumpa pers. Nando juga mengaku tidak pernah menyebut nama pimpinan DPR lain.¹⁰⁷

Terlepas dari argumen-argumen yang dapat membantah asumsi Greg Fealy tersebut harus diakui oleh PKS bahwa tetap harus selektif dalam hal kualifikasi calon pejabat publik dari PKS. Kemudian terkait tuduhan terhadap Tamsil Linrung dan Anis Matta walau telah dibantah dan tidak terbukti di persidangan, tetap saja diperlukan keterbukaan dan sikap pro aktif Humas DPP PKS untuk memberikan penjelasan dan menepis tuduhan miring terhadap elit partai PKS. Karena sebenarnya apa yang ditengarai oleh Greg Fealy bahwa persoalan tuduhan penurunan moralitas tersebut belum mengenai elit partai AKP tidak sepenuhnya benar, namun Humas AKP berfungsi dengan sangat baik. As’ad, warga Turki di Uskudar, Istanbul misalnya menyebutkan bahwa pemberian proyek-proyek pembangunan kepada para kontraktor atau pengusaha yang merupakan kader AKP atau berafiliasi ke AKP walaupun tidak menyalahi undang-undang namun dianggap tidak etis. Demikian pula Sefik, kandidat anggota legislatif dari HAS Parti menyatakan: “Our difference from AKP: we will not use the public resources to enrich ourselves”.¹⁰⁸

Penulis disertasi pun menyaksikan beberapa kampanye yang dilakukan oleh *Youth Branch* AKP misalnya diselenggarakan di gedung milik Negara. *Saadet Partisi* bahkan selama kampanye membagi-bagikan brosur tentang daftar dosa AKP. Bahkan Ali Yelgun dari *Saadet*

¹⁰⁶ Greg Fealy. The Australian National University. Email dari greg.fealy@anu.edu.au. Selasa 9 Juni 2012.

¹⁰⁷ Laela Zahra. Nasional - <http://nasional.inilah.com/read/detail/1874584/disebut-terima-rp-300-m-marzuki-panggil-nando>. Kamis, 21 Juni 2012 | 13:24 WIB

¹⁰⁸ Wawancara dengan Sefik, caleg HAS Partisi, Uskudar, Istanbul, Jum’at 10 Juni 2012.

Partisi, mengungkapkan kasus kader AKP yang dianggap melakukan penggelapan dana *charity* di Jerman yang disalurkan melalui *Milli Gorus*.¹⁰⁹ Mustafa Ozkaya, kader AKP juga sudah memberikan peringatan kepada para elit AKP agar lebih selektif dalam pencalonan anggota legislatif atau pejabat publik lainnya karena ada juga satu dua kasus yang terjadi dan memang kemudian diberhentikan. Menurut Ozkaya jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka akan mencoreng citra partai.¹¹⁰

Memang ketika partai semakin membesar baik sebagai *the survival party* apalagi sebagai *the ruling party*, semakin sulit untuk tetap menjaga kohesifitas dan kemurnian ideologi para kader karena ada saja beragam manusia yang memiliki beragam i'tikad yang ikut terekrut kedalam partai. Namun sebenarnya baik PKS maupun AKP memiliki mekanisme yang diberlakukan untuk menjaga partai tetap berjalan di jalurnya yang benar. Firman Noor, Doktor lulusan Islamic Studies, School of Humanities and Social Sciences, University of Exeter, Inggris meneliti perbandingan antara PKS dan PKB dalam hal institusionalisasi penyelesaian konflik:

“Proses standarisasi dan penjagaan nilai-nilai melalui *liqo* atau pertemuan rutin tarbiyah tidak terhenti manakala seorang kader telah berada di puncak tertinggi kepemimpinan partai, bahkan ketua Majelis Syuro pun memiliki dan berinteraksi dengan *liqo*-nya. Dengan demikian standarisasi nilai-nilai itu menjadi terjaga relatif baik di semua *level* kader, meski jelas tidak sempurna namun mempengaruhi kinerja elemen-elemen partai karena nilai-nilai diibaratkan darah yang mengalir diseluruh organ-organ partai. Di sisi lain, organ-organ partai bertugas mengembangkan dan melindungi bekerjanya ideologi dalam partai itu, baik secara langsung maupun tidak. Keberadaan Dewan Syariah Pusat (DSP) secara normatif berperan sebagai lembaga yudikatif dan mengawasi agar partai tidak menyimpang dari ajaran Islam dan semangat dakwah yang diemban. Adapun lembaga MPP bertugas menjabarkan dan mensosialisasikan draft kebijakan partai yang didasari oleh nilai-nilai ideologis partai dan kepentingan dakwah. Selain itu terdapat pula Badan Pembinaan Kader (BPK) DPP yang mengembangkan kegiatan kaderisasi sebagai salah satu sarana utama infusi ideologi kepada para kader. Situasi ini menyebabkan munculnya *code of conduct* di partai, yang menjadi rujukan setiap elemen partai dan kader. Ada semacam standarisasi pola sikap dan tingkah laku baik dalam tingkat *decision making process* hingga pada tingkat personal. Selain itu ada standarisasi pengawasan atas pelaksanaan ideologi dalam konteks organisasi oleh Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO). Mekanisme baku untuk pengawasan infusi ideologi yang relatif baik ini menyebabkan penyimpangan dapat terdeteksi dengan cepat. Sistem

¹⁰⁹ Wawancara dengan Ali Yelgun. *Op. Cit.*

¹¹⁰ Wawancara Mustafa Ozkaya. *Op. Cit.*

hierarki infusi ideologi menyebabkan terjadi “sentralisasi” atau standarisasi infusi ideologi yang menopang kesatuan gerak proses ini.¹¹¹

Sehingga bila pun ada pelanggaran etika atau penurunan moralitas di kader-kader atau elit partai maka akan dikenai pasal pelanggaran *code of conduct*. Bila kasus pelanggarannya masih terbilang ringan maka akan diatasi di tingkat pembinaan atau dalam ruang lingkup Kaderisasi, bila cukup berat dan merupakan pelanggaran tertib berorganisasi maka akan diproses di BPDO sedangkan bila merupakan pelanggaran berat dan melanggar ajaran Islam seperti korupsi dan berzina maka akan diproses di DSP serta mendapatkan sanksi. Dalam kasus-kasus khusus seperti Yusuf Suspendi, mantan anggota pendiri PK dan Majelis Syuro maka akan ada kerjasama antara tiga lembaga yakni BPK, BPDO dan DSP. Namun sekali lagi kelemahan PKS yang membedakannya dari AKP adalah para elit PKS kurang turun ke bawah menyatu dengan masyarakat dan dapat berinteraksi menjawab berbagai kontroversi seputar PKS dan elit partainya serta ditambah pula Humas DPP kurang berfungsi sebagaimana harusnya.

Bila disimpulkan dari perbandingan aspek-aspek internal maupun eksternal partai maka ada perbedaan-perbedaan yang membuat adanya kesenjangan hasil kemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009) dengan AKP di Turki (2002-2007). Penerapan ideologi Pos-Islamis di AKP kompatibel dengan kelima aspek internal lainnya yakni organisasi model *branch* dari Duverger sehingga lebih desentralistik dan otonom serta memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk bisa mengelolanya secara profesional. Berikutnya jenis basis massa AKP meluas dari hanya kelas menengah terdidik di perkotaan (Lipset) menjadi melingkupi pula kelas bawah di pedesaan. Sistem rekrutmen anggota AKP (Alan Ware) sistem *hybrid* sehingga ada perluasan segmentasi. Faktor kepemimpinan AKP diselaraskan dengan ideologi Pos-Islamis yang terbuka dan inklusif menjembatani antarsuku, golongan dan agama dibutuhkan ketokohan atau kepemimpinan yang kuat sehingga model elit partai Pareto *governing dan non-governing elite* harus dipadukan serta memenuhi sekaligus sebagai *charismatic leader dan traditional leader* menurut Weber. Strategi yang digunakan AKP selain *vernacular politics* juga ditambah

¹¹¹ Firman Noor. *Moderate Islamic Fundamentalism in Indonesia: A Study of Political Thinking and Behaviour of The Prosperous Justice Party (PKS), 1998-2005. A sub-thesis submitted for the degree of Master of Arts (Asian Studies) of the Australian National University.* The Australian National University. Faculty of Asian Studies. 2006. h: 10.

dengan strategi media, penguasaan teritorial, menjual keberhasilan dan mimpi-mimpi serta pendanaan yang memadai memberi pengaruh yang luar biasa bagi keberhasilan AKP.

Sebaliknya penerapan ideologi Pos-Islamis PKS harus diikuti dengan perubahan-perubahan dalam kelima faktor lainnya yakni organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi. Bentuk organisasi PKS model *cell* Duverger sehingga sentralistik dan tidak otonom. Basis massa kelas menengah (Lipset) masih tetap menjadi basis massa utama dan satu-satunya. Sistem rekrutmen anggota (Alan Ware) PKS sistem sel dan proses kenaikan jenjang sangat rumit. Agar dapat dipilih menjadi *governing elite* Pareto atau pemimpin yang legal formal versi Weber yakni dipilih di Pemilu dan pemilihan Presiden, seseorang juga sebaiknya bermula dari kelompok *sub-elite* Mosca atau *non-governing elite* Pareto dan idealnya juga dari *charismatic* serta *traditional leader* di masyarakat. Namun di PKS belum dipersiapkan ketokohan personal yang kharismatik dalam skala nasional. Selain strategi *vernacular politics* seharusnya PKS juga menggunakan berbagai strategi lainnya sehingga tidak hanya mengandalkan satu strategi saja. Selain perbedaan dalam aspek-aspek internal di atas, maka perbedaan tingkat peradaban, budaya dan kultur politik di Indonesia dan Turki sangat mempengaruhi kesenjangan hasil kemenangan Pemilu PKS di Indonesia (1999-2009) dengan AKP di Turki (2002-2007).

Tabel V.1 Komparasi AKP dan PKS

	PKS	AKP
Aspek-aspek Internal		
Ideologi	Pos-Islamis sejak 2004	Pos Islamis sejak 2001
Organisasi	<i>Cell</i> , bersifat sentralistik	<i>Branch</i> , bersifat desentralistik
Basis Massa	Kelas menengah perkotaan (<i>Middle Class</i>)	Kelas menengah perkotaan religius, kelas bawah dan kelompok nasionalis sekuler (<i>Middle Class Plus</i>)
Sistem Rekrutmen	<i>Cell system</i> tertutup, segmen relatif terbatas	<i>Hybrid system</i> , terbuka, beragam segmen
Kepemimpinan	Terpisah antara <i>charismatic leader</i> (ulama, tokoh lokal) dan <i>legal formal leader</i> (Gubernur dan Walikota)	Model <i>charismatic and legal formal leader</i> dipadukan dalam 1 figur
Strategi	<i>Vernacular politic</i>	<i>Vernacular politic plus</i>

Aspek-aspek Eksternal		
Peradaban	Bukan termasuk peradaban tua	Termasuk wilayah peradaban tua
Budaya Islam	Sub-Melayu, Heterogen	Sub-Turki, Homogen
Budaya Politik	Feodalisme masih dominan	Feodalisme tidak dominan
Sosial-Ekonomi	Masih belum stabil	Stabil
Iklim politik	Relatif stabil	Rawan ancaman militer dan separatis Kurdi

Sumber: Penulis disertasi diolah dari berbagai data

Dari hasil perbandingan aspek-aspek internal nampak bahwa ada perbedaan pilihan antara aspek-aspek internal PKS dan AKP. Terkait aspek ideologi Pos-Islamis antara PKS dan AKP didapatkan perbedaan bahwa di AKP transformasi tersebut sudah dirintis Erdogan ketika menjadi Wali Kota Istanbul pada 1994 dan dideklarasikan penuh di saat berdirinya AKP pada tahun 2001 sehingga dalam perjalanan AKP tidak pernah menjadi masalah yang berarti. Sedangkan di PKS, aplikasi ideologi Pos-Islamis baru mulai terjadi di tahun 2004 dan dideklarasikan di Bali pada tahun 2008 sehingga masih dalam proses transformasi serta dalam perjalanannya masih menemui banyak kendala.

Kemudian menyangkut perbedaan pilihan bentuk organisasi *cell* PKS dan *branch* AKP juga mempengaruhi tingkat keleluasaan, kapasitas dan kemampuan organisasi PKS dan AKP melayani konstituen sehingga mempengaruhi pula perbedaan hasil perolehan suara kedua partai politik tersebut. Berikutnya aspek basis massa yang dimiliki PKS dan AKP juga memiliki perbedaan. Basis massa PKS masih lebih terbatas di kelas menengah Muslim konservatif, sedangkan basis massa PKS juga melingkupi kelas menengah Muslim konservatif dan Muslim sekuler serta pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Selain itu AKP juga memiliki basis massa dari kelas bawah, walaupun sangat sedikit yang berasal dari kelas atas. Perbedaan jenis dan ragam basis massa yang dimiliki PKS dan AKP juga menyebabkan perbedaan besarnya pengaruh basis massa bagi keberhasilan PKS dan AKP di Pemilu.

Berikutnya aspek sistem rekrutmen *cell* PKS dan *hybrid* AKP juga menyebabkan adanya perbedaan dalam kecepatan rekrutmen dan ketersediaan SDM di PKS dan AKP. Proses rekrutmen kader di PKS yang sangat selektif menyebabkan proses berjalan lambat dan tidak bisa masif seperti yang terjadi di AKP. Akibatnya terjadi pula perbedaan dalam pengaruh aspek sistem rekrutmen kader di PKS dan AKP bagi kemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007). Perbedaan yang jauh lebih nampak di aspek kepemimpinan dan strategi PKS dan AKP bila kedua aspek tersebut diperbandingkan. Bila kepemimpinan kharismatis dan strategi

komprehensif berupa *vernacular politics* plus di AKP menjadi aspek paling dominan berpengaruh bagi keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007, maka pilihan kepemimpinan kolektif serta strategi *vernacular politics* yang belum optimal justru menjadi dua aspek terlemah di PKS.

Akhirnya bila disimpulkan berdasarkan observasi dan wawancara kepada para pendiri dan pengurus senior PKS maka aspek internal partai yang paling berpengaruh bagi kemenangan Pemilu PKS di tiga Pemilu (1999-2009) adalah ideologi dan sistem rekrutmen kader dan kaderisasinya. Namun bila ideologi semakin berpengaruh positif dari Pemilu 1999 ke 2004 dan ke 2009, maka peran kader berpengaruh paling positif di Pemilu 2004 dan menurun di 2009. Sedangkan aspek yang paling lemah mempengaruhi kemenangan Pemilu PKS adalah aspek kepemimpinan dan strategi. Sedangkan di AKP didapatkan aspek paling dominan berperan di kemenangan Pemilu 2002 dan 2007 adalah ideologi Pos-Islamis yang sudah secara utuh dipahami dan diterapkan, aspek kepemimpinan kharismatis Erdogan dan aspek strategi yang sangat komprehensif dilakukan oleh AKP. Sementara ketiga aspek lainnya yakni organisasi, basis massa dan sistem rekrutmen kader walaupun tidak dominan pengaruhnya, bukan menjadi aspek kelemahan AKP.

Berikutnya bila aspek eksternal yang berpengaruh positif bagi PKS adalah iklim demokrasi di Indonesia yang cukup kondusif, maka kondisi politik di Turki terkait dengan ancaman intervensi militer, bahaya separatist Kurdi serta penegakan demokrasi yang masih berproses merupakan aspek eksternal yang masih berpengaruh negatif bagi AKP. Namun kondisi ekonomi, sosial dan budaya berpengaruh sangat positif bagi kemenangan Pemilu AKP di 2002 dan 2007, sementara kondisi sosial dan ekonomi yang belum kondusif serta budaya politik Islam yang heterogen masih berpengaruh negatif bagi kemenangan Pemilu PKS.

BAB VI

KESIMPULAN

Bab VI merupakan kesimpulan dari keseluruhan uraian di bab-bab sebelumnya. Di dalam bab ini dijelaskan pula implikasi teoritis penelitian ini yakni bahwa kerangka teoritis aspek-aspek ideologi, organisasi, basis massa, rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi yang dimiliki sebuah partai politik dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian disertasi ini. Selain itu juga diutarakan implikasi empiris dari penelitian ini berupa rekomendasi langkah-langkah kongkrit kepada PKS di Indonesia dan AKP di Turki serta bagi partai politik Islam manapun yang ingin berhasil di Pemilu.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa globalisasi menyebarkan gelombang demokrasi melalui teknologi informasi yang kemudian juga memunculkan gejala kebangkitan Islam dalam bentuk reformasi politik. Gejala tersebut tidak terlepas dari pemikiran gerakan Islam *mainstream* saat ini yakni Ikhwanul Muslimin yang terus mengalami perkembangan dan penyesuaian dalam konteks perubahan zaman. Fenomena kebangkitan AKP di Turki, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia, *Front Islamic du Salut* (FIS) atau Kubu Penyelamat Islam di Aljazair, Partai *Nahdhah* atau Partai Kebangkitan di Tunisia, *Justice and Development Party* (JDP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Maroko tidak bisa dilepaskan dari gejala kebangkitan Islam yang ditandai dengan munculnya gerakan kelompok Islamis Ikhwanul Muslimin di Mesir, Jami'at Islami Pakistan dan Jama'ah Said Nursi di Turki di abad 20 yang kemudian berevolusi menjadi partai-partai Pos-Islamis di awal abad ke-21.

Tabel I.1. Komparasi antara Neo-fundamentalisme, Islamisme dan Pos-Islamisme

Neo-fundamentalisme	Islamisme	Pos-Islamisme
<p>Neo-fundamentalisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam yang secara parsial mengkhuskan pada pemurnian tata cara ritual peribadatnya saja dan menjauhi politik (apolitis dan anti demokrasi)</p> <p>Neo-fundamentalisme merupakan sebuah aliran pemikiran hasil gabungan dari westernisasi, individualisme, kesenjangan antargenerasi, krisis sosial dan sikap keberagamaan yang emosional, sehingga tidak menekankan aspek intelektualisme.</p> <p>Neo-fundamentalisme merupakan gerakan yang bersifat global menolak baik budaya Muslim yang dianggap bid'ah maupun budaya Barat modern yang dianggap sesat.</p> <p>Kelompok Neo-fundamentalis dianggap paling eksklusif dan paling sulit menerima perbedaan. Mereka bergerak dalam skala internasional dan mengedepankan <i>transnational-ummah</i> serta menolak demokrasi karena dianggap sistem kafir.</p> <p>Contohnya adalah Hizbut Tahrir (berpusat di Yordania), dan Salafiy (Saudi Arabia)</p>	<p>Islamisme adalah sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama dan mengajarkan tentang <i>syumuliyatul Islam</i> yakni bahwa tidak ada satu aspek kehidupanpun yang tidak tersentuh aturan Islam.</p> <p>Islamisme merupakan gerakan global yang berupaya mewujudkan negara Islam (<i>Daulah Islamiyah</i>) atau teokrasi melalui kontestasi di dalam sistem demokrasi di negaranya masing-masing. Kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir haruslah terwujudnya <i>Islamic State</i> dan tegaknya syariah Islam.</p> <p>Kelompok Islamis menyuarakan pesan-pesan moral secara eksplisit dalam bentuk jargon-jargon politik. Mereka dianggap cukup eksklusif dan sulit menerima perbedaan.</p> <p>Kelompok Islamis menerima demokrasi dan melakukan perjuangan politik melalui kontestasi Pemilu</p> <p>Islamisme diinisiasi oleh gerakan Islam <i>mainstream</i> Ikhwanul Muslimin (IM) Contoh kelompok-kelompok Islamis adalah gerakan Tarbiyah di Indonesia yang menjadi PK, gerakan Milli Gorus menjadi Partai Refah yang Islamis, Parti Islam Se-Malaysia (PAS) di Malaysia. <i>Front Islamic du Salut</i> (FIS)</p>	<p>Pos-Islamisme adalah juga sebuah paham tentang kembali kepada prinsip-prinsip orisinal agama Islam dan juga mengajarkan tentang <i>syumuliyatul Islam</i> yakni bahwa ajaran Islam meliputi pula semua aspek kehidupan.</p> <p>Pos Islamisme juga merupakan gerakan global yang menekankan aspek substantif sehingga menganggap <i>clean government</i> dan <i>good governance</i> merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Pos-Islamisme mengusung konsep masyarakat Madani.</p> <p>Kelompok Pos-Islamis menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktivis dan pemimpinnya.</p> <p>Kelompok yang mengusung Pos-Islamis paling inklusif dan toleran terhadap perbedaan dan keberagaman.</p> <p>Kelompok Pos-Islamis menerima demokrasi dan mengikuti Pemilu</p> <p>Partai-partai politik Islamis tersebut (AKP, PKS, FIS) kemudian berevolusi menjadi partai Pos-Islamis di awal abad ke-21.</p>

Bila dilihat dari tabel komparasi atau perbandingan antara ideologi Neo-fundamentalis, Islamis dan Pos-Islamis sebenarnya baik paham Neo-fundamentalis, Islamis maupun Pos-Islamis memiliki keyakinan yang sama tentang urgensi kembali kepada sumber utama ajaran Islam yakni Al Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Namun perbedaan mulai muncul antara Neo-fundamentalis di satu sisi dengan Islamis dan Pos-Islamis di sisi lain bila terkait dengan prinsip integralitas (*syumuliyatul Islam*) yakni bahwa ajaran Islam tidak hanya dibatasi dalam ruang lingkup peribadatan ritual saja melainkan meliputi pula semua aspek kehidupan,. Hal itu tidak lain karena Neo-fundamentalis bersifat apolitis dan hanya menekankan aspek peribadatan serta *muamalah* sebatas di ruang lingkup keluarga dan masyarakat sementara Islamis dan Pos-Islamis meyakini paham integralitas Islam yang melingkup pula hingga negara.

Namun dalam persamaan yang dimiliki oleh Islamis dan Pos-Islamis terdapat perbedaan paling mendasar yakni dalam cara menafsirkan visi perjuangan gerakan Islam. Bila kelompok Islamis menekankan bahwa tujuan akhir perjuangan haruslah berupa terwujudnya *Islamic State* atau Negara Islam dan tegaknya syariah Islam, maka kelompok Pos-Islamis lebih menekankan aspek substantifnya sehingga menganggap *clean government* dan *good governance* juga merupakan perwujudan nilai-nilai kebaikan dalam Islam yang universal. Kemudian bila ada penerapan syariah Islam, maka hal itu harus merupakan konsensus bersama yang dilandasi kesadaran sebagai keberhasilan dakwah dan bukan pemaksaan dari negara. Bila Islamis mengemukakan konsep *Daulah Islamiyah* maka Pos-Islamis mengusung konsep masyarakat Madani. Kemudian kelompok Islamis menyuarakan pesan-pesan moral secara eksplisit dalam bentuk jargon-jargon politik, sedangkan kelompok Pos-Islamis menekankan secara implisit pesan-pesan moral Islam melalui moralitas yang ditunjukkan oleh para aktivis dan pemimpinnya. Oleh karena itu perbedaan selanjutnya pun nampak yakni bahwa kelompok Islamis lebih eksklusif dan sulit menerima perbedaan, sedangkan kelompok yang mengusung Pos-Islamis relatif lebih inklusif dan toleran terhadap keberagaman.

Tesis Olivier Roy di akhir 1990-an menyebutkan bahwa Islam politik atau Islamis telah gagal dan mundur menjadi gerakan Neo-fundamentalis yang apolitis dan dipertegasnya lagi dalam buku terbarunya "Globalized Islam" (2006). Menurut Roy bila Islamis berjuang mewujudkan teokrasi atau negara Islam melalui jalur politik di dalam sistem demokrasi, maka Neo-fundamentalis berjuang dalam skala internasional melalui gerakan dakwah atau aktivisme

dan tidak melalui jalur politik melainkan dengan mengedepankan *transnational-ummah* atau keumatan yang mendunia. Isu sentral Neo-fundamentalis menurut Roy didasari oleh proses westernisasi, individualisme, kesenjangan antar-generasi, krisis sosial, sikap keberagamaan yang emosional sehingga tidak menekankan aspek intelektualisme serta memisahkan antara keimanan dan budaya.

Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa awal abad ke-21 cukup banyak partai politik Islam atau berhaluan Islam yang memperoleh keberhasilan seperti *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP) atau Partai Keadilan dan Pembangunan di Turki atau Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Indonesia yang juga berevolusi dari Islamis ke Pos-Islamis. Pemisahan antara aktivisme dakwah dan perjuangan politik di dalam sistem demokrasi tidak terjadi di partai-partai Islamis yang terkenal dengan strategi *vernacular politics* yang mensinergikan antara aktivisme atau gerakan dakwah di tengah masyarakat melalui LSM-LSM keagamaan dan sosial dengan institusi partai politik maupun institusi pemerintahan lokal.

Transformasi ideologi AKP sudah terjadi sejak awal AKP didirikan pada tahun 2001 yakni dari ideologi *Milli Gorus* dan *Refah Partisi* yang Islamis menjadi Pos-Islamis. Hal itu yang membedakannya dari *Saadet Partisi* yang tetap menganut Islamis. Selama memimpin Turki (2002-2007), AKP sudah membuktikan aplikasi ideologis Pos-Islamisnya yang tercermin dari pernyataan para elitnya dan kebijakan-kebijakan yang digulirkannya. Sementara di PKS perubahan ideologi dari Islamis menjadi Pos-Islamis di PKS baru dimulai enam tahun setelah masa berdirinya (PK di tahun 1998) yakni sejak masa Hidayat Nur Wahid di tahun 2004. Hal itu terlihat dalam perubahan jargon PKS yang semula dalam bahasa Arab: *I'dilu* (Hendaklah berlaku adil) menjadi jargon sederhana yang universal yakni Bersih dan Peduli. Sejak 2008 karakter Pos-Islamis semakin dimunculkan dengan mengadakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) di Bali, tempat di mana umat Muslim adalah minoritas dan merupakan daerah wisata yang dianggap oleh aktivis Islam penuh maksiat. Di dalam Mukernas di Bali tersebut PKS juga mulai menyebut dirinya sebagai partai Islam terbuka, walaupun diprotes oleh sebagian kader yang kemudian menyempal menjadi Forum Kader Peduli (FKP). Kelompok yang tidak siap dengan perubahan PKS dari Islamis menjadi Pos-Islamis ini kemudian keluar atau dikeluarkan dari PKS, namun jumlahnya tidak signifikan sehingga tidak menjadi arus utama yang membentuk faksi. PKS dengan ciri Pos-Islamisnya juga mulai mengeluarkan wacana-

wacana kebangsaan seperti: Bangkitlah Negeriku, Harapan itu masih ada dan menyatakan menerima Pancasila serta NKRI sebagai bentuk final negara ini.

VI. 1. Temuan Penelitian

Partai Islam yang berasal dari kelompok Islamis dapat memperoleh kemenangan dan menjadi partai *mainstream* atau *the ruling party* seperti dalam kasus AKP di Turki, atau berhasil menjadi *the survival party* dalam kasus PKS di Indonesia dengan berevolusi menjadi partai politik yang berideologi Pos-Islamis. Sebab karakteristik Pos-Islamis yang toleran, fleksibel, terbuka dan inklusif menghilangkan resistensi kepada kedua partai politik tersebut. Namun karakteristik Pos-Islamis juga harus didukung oleh sistem dan perangkat serta lingkungan eksternal yang sesuai atau kompatibel dengan pilihan ideologi tersebut.

Transformasi ideologi AKP diikuti pula dengan model organisasi, sistem rekrutmen dan kepemimpinan serta ragam basis massa dan jenis strategi yang berbeda dengan partai-partai berhaluan Islam yang dilahirkan *Milli Gorus* seperti *Refah Parti* dan *Fazilet Partisi*. Kompatibilitas ideologi Pos-Islamis AKP dengan bentuk organisasinya *branch* membuat mesin politik AKP berjalan efektif. AKP memiliki 2 sayap organisasi yakni *Woman Branch* dan *Youth Branch* yang otonom dan independen sesuai dengan sifat model *branch* menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kemenangan AKP. Ditambah pula AKP memiliki 3 lembaga profesional yakni di antaranya lembaga Humas yang melayani konstituen AKP 24 jam non-stop sejak 2001 dan menjadi Pusat Komunikasi AKP. Kompatibilitas ideologi Pos-Islamis AKP juga terjadi dengan ragam basis massa AKP yang bukan hanya kelas menengah melainkan juga kelas bawah. Bukti keragaman basis massa AKP tercermin dari dukungan yang diperolehnya dari jaringan lembaga-lembaga Islam dan tarekat-tarekat Islam namun juga mendapatkan limpahan suara dari basis massa nasional-sekuler yang sebelumnya adalah konstituen CHP dan MHP. Selain itu AKP didukung pula oleh minoritas Kristen dan Yahudi yang berjumlah 1% di Turki, karena menganggap pemerintahan AKP bersikap inklusif, tidak diskriminatif dan mampu menyejahterakan.

Kompatibilitas antara ideologi Pos-Islamis yang inklusif juga terjadi dengan faktor sistem rekrutmen anggota AKP. AKP menggunakan sistem hibridisasi dalam sistem rekrutmennya sehingga semua orang dari berbagai kalangan bisa bergabung ke dalam AKP melalui kanalnya

masing-masing. Walaupun dianggap tidak selektif, AKP tetap melakukan rekrutmen massal dengan kategorisasi jenis keanggotaan sebagai jalan keluarnya. Solusi AKP dalam pengelolaan relawan yang terekrut secara *masif* adalah dengan melibatkan mereka di lembaga-lembaga yang dimiliki AKP. Prioritas rekrutmen dalam jumlah massal adalah kelompok relawan yang sangat beragam termasuk juga orang bertato dan perempuan berpakaian *sexy*. Mereka dilibatkan di kegiatan-kegiatan *charity*, seni dan budaya serta politik. Kompatibilitas ideologi Pos-Islamis dengan model kepemimpinan AKP nampak dalam kepemimpinan kharismatis Erdogan yang diterima masyarakat luas. Ketua Umum AKP sekaligus PM Turki, Recep Tayyip Erdogan memenuhi semua kriteria Weber tentang pemimpin legal formal yang kharismatis dan diterima di masyarakat.

Terakhir, kompatibilitas juga terwujud antara ideologi Pos-Islamis dengan strategi yang mensinergikan seluruh komponen yang dimiliki partai Islam tersebut baik di struktur partai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun di pemerintahan lokal yakni strategi *vernacular politics*. Strategi politik lokal tersebut mensinergikan potensi kader AKP di struktur kepengurusan partai dengan potensi kader AKP di LSM dan juga potensi kader AKP di pemerintahan daerah. Hasil pelaksanaan *vernacular politics* yang optimal di AKP membuat tersedianya dukungan pendanaan yang memadai untuk semua kegiatan partai. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dari kesuksesan para kader pengusaha yang menjadi operator proyek-proyek di pemerintahan dengan tetap memperhatikan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena di dalam undang-undang di Indonesia maupun di Turki, partai politik tidak boleh membuat badan usaha maka dukungan finansial bagi partai diperoleh dari para kadernya yang menjadi pengusaha atau dari pengusaha non-kader yang bersifat tidak mengikat.

Sebaliknya di PKS, evolusi ideologi PKS dari Islamis menjadi Pos-Islamis tidak segera diikuti pula dengan perubahan dari model organisasi *cell* menjadi *branch* sehingga tidak leluasa bergerak melayani konstituennya. Demikian pula belum sepenuhnya terjadi perluasan basis massa dari kelas menengah perkotaan yang terdidik dan religius menjadi basis massa yang beragam. Basis massa PKS belum berakar hingga ke *grass root* serta hanya sedikit memperoleh dukungan dari kelas menengah sekuler ataupun dari kelompok minoritas.

Selanjutnya model rekrutmen PKS pun masih sistem *cell* dan belum berubah menjadi sistem *hybrid* sehingga masih lebih mengutamakan aspek pembinaan anggota inti dibandingkan

fokus pada akselerasi rekrutmen anggota sehingga masih terkesan eksklusif dan tidak masif. Demikian pula model kepemimpinan kolektif yang dipilih PKS belum berubah menjadi model kepemimpinan kharismatis seperti yang diuraikan Weber. PKS memiliki sikap anti figuritas dan mengedepankan kepemimpinan kolektif sehingga di Pemilu 2009 sempat memunculkan delapan orang Calon Presiden (Capres) sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat tentang siapa sebenarnya capres PKS. Walaupun PKS mengutamakan kekuatan sistem dan organisasi, secara realistis di tengah masyarakat yang paternalistik tetap harus ada tokoh pemimpin PKS yang dikenal secara nasional.

Di PKS strategi *vernacular politics* sudah mulai dilaksanakan sejak awal PK berdiri, namun mengalami kesulitan pendanaan karena masih ada keengganan beberapa orang kader yang menjabat sebagai kepala daerah untuk memberikan akses. Demikian pula para kader PKS di LSM sosial karena berusaha mengedepankan independensinya menjadi kurang memberikan alokasi bantuan kepada para kader dan simpatisan PKS. Kemudian kelemahan lainnya di aspek strategi, PKS cenderung hanya mengandalkan satu jenis strategi saja yakni strategi *vernacular politics* padahal seharusnya diikuti pula dengan strategi-strategi lainnya seperti misalnya mengoptimalkan strategi media.

Dari hasil perbandingan aspek-aspek internal nampak bahwa ada perbedaan pilihan antara aspek-aspek internal PKS dan AKP. Terkait aspek ideologi Pos-Islamis antara PKS dan AKP didapatkan perbedaan bahwa di AKP transformasi tersebut sudah dirintis Erdogan ketika menjadi Wali Kota Istanbul pada 1994 dan dideklarasikan di saat berdirinya AKP pada tahun 2001 sehingga dalam perjalanan AKP tidak pernah menjadi masalah yang berarti. Sedangkan di PKS, aplikasi ideologi Pos-Islamis baru dimulai di tahun 2004 dan dideklarasikan di Bali pada tahun 2008 sehingga masih dalam proses transformasi yang menghadapi banyak kendala.

Kemudian perbedaan bentuk organisasi *cell* PKS dan *branch* AKP juga mempengaruhi tingkat keleluasaan dan kemampuan organisasi PKS dan AKP dalam melayani konstituen. Akibatnya ada perbedaan perolehan suara kedua partai politik tersebut. Berikutnya ada perbedaan dalam ragam basis massa yang dimiliki PKS dan AKP. Basis massa PKS masih lebih terbatas di kelas menengah Muslim konservatif, sedangkan basis massa AKP melingkupi kelas menengah Muslim konservatif dan Muslim sekuler serta pemeluk agama Kristen dan Yahudi. Selain itu AKP juga memiliki basis massa dari kelas bawah, walaupun sangat sedikit yang

berasal dari kelas atas. Perbedaan ragam basis massa yang dimiliki PKS dan AKP menyebabkan perbedaan besarnya pengaruh aspek basis massa bagi keberhasilan PKS dan AKP di Pemilu.

Berikutnya perbedaan model sistem rekrutmen *cell* PKS dan *hybrid* AKP juga menyebabkan adanya perbedaan dalam kecepatan rekrutmen dan ketersediaan SDM di PKS dan AKP. Proses rekrutmen kader di PKS yang sangat selektif menyebabkan proses berjalan lambat dan tidak masif seperti yang terjadi di AKP. Akibatnya terjadi pula perbedaan dalam pengaruh aspek sistem rekrutmen kader di PKS dan AKP bagi kemenangan Pemilu PKS (1999-2009) dan AKP (2002-2007). Perbedaan yang jauh lebih nampak di aspek kepemimpinan dan strategi PKS dan AKP. Bila kepemimpinan kharismatis dan strategi komprehensif berupa *vernacular politics* plus di AKP menjadi aspek paling dominan berpengaruh bagi keberhasilan AKP di Pemilu 2002 dan 2007, maka pilihan kepemimpinan kolektif serta strategi *vernacular politics* yang belum optimal justru menjadi dua aspek terlemah di PKS.

Kesenjangan keberhasilan antara PKS dengan AKP disebabkan adanya perbedaan formula kemenangan Pemilu antara PKS dan AKP. Komparasi antara aspek-aspek yang berpengaruh bagi kemenangan PKS dan AKP dalam beberapa Pemilu menunjukkan bahwa formula kemenangan AKP adalah kompatibilitas antara ideologi Pos-Islamis dengan pilihan model organisasi *branch* yang bersifat desentralistik dan jenis basis massa *middle class plus* yakni terdiri dari kelas menengah perkotaan religius, kelas bawah dan kelompok nasionalis sekuler. Selain itu kompatibel pula dengan sistem rekrutmen anggota yang *hybrid system*, terbuka, beragam segmen dan tipe kepemimpinan model *charismatic and legal formal leader* yang dipadukan dalam satu figur serta *vernacular politic* plus yakni ditambah strategi media dan pendanaan.

Sedangkan di PKS ada inkompatibilitas antara proses evolusi ideologi dengan model organisasi, jenis basis massa, model sistem rekrutmen, model kepemimpinan dan ragam strategi PKS yang menyebabkan hambatan optimalisasi pengaruh keenam aspek tersebut. Ideologi Pos-Islamis sudah diusung PKS sejak 2004, namun model organisasi PKS hingga 2009 masih tetap *cell* yang bersifat sentralistik, basis massa yang dimiliki masih terbatas yakni *middle class*, kelas menengah perkotaan. Demikian pula dengan sistem rekrutmen anggotanya masih *cell system* yang tertutup dengan segmen relatif terbatas, model kepemimpinan kolektif serta hanya mengandalkan strategi *vernacular politic* yang belum pula optimal pelaksanaannya.

Akhirnya berdasarkan observasi dan wawancara dengan para pendiri dan pengurus senior PKS bila disimpulkan aspek internal partai yang paling berpengaruh bagi pemenangan Pemilu PKS di tiga Pemilu (1999-2009) adalah ideologi dan sistem rekrutmen kadernya. Namun bila ideologi semakin berpengaruh positif dari Pemilu ke Pemilu (1999-2009), maka peran kader berpengaruh paling positif di Pemilu 2004 dan menurun di 2009. Sedangkan aspek yang paling lemah mempengaruhi pemenangan Pemilu PKS adalah aspek kepemimpinan dan strategi. Sebaliknya di AKP didapatkan aspek paling dominan berperan di pemenangan Pemilu 2002 dan 2007 adalah ideologi Pos-Islamis yang sudah secara utuh dipahami dan diterapkan, aspek kepemimpinan kharismatis Erdogan dan aspek strategi yang sangat komprehensif dilakukan oleh AKP. Sementara ketiga aspek lainnya yakni organisasi, basis massa dan sistem rekrutmen kader walaupun tidak dominan pengaruhnya, tidak menjadi aspek kelemahan AKP.

Kesenjangan keberhasilan antara PKS di Indonesia dengan AKP di Turki selain disebabkan adanya perbedaan formula pemenangan Pemilu antara PKS dan AKP berupa kompatibilitas aspek-aspek internal juga karena adanya perbedaan aspek-aspek eksternal kedua partai tersebut. Perbedaan latar belakang peradaban dan budaya bangsa serta budaya politik kedua negara sangat menentukan pula perbedaan keberhasilan elektoral PKS dan AKP di Indonesia. Faktor peradaban tua dan budaya keislaman yang relatif homogen sehingga tidak ada fragmentasi partai-partai Islam di Turki menjadi sebuah lahan yang baik bagi AKP. Sementara PKS tumbuh di tengah-tengah masyarakat yang masih berproses menuju *civilized society* sehingga tidak mudah “menjual” program dan *platform*, karena di setiap Pemilu yang lebih berperan adalah serangan subuh dengan *money politics* sehingga menghilangkan usaha edukasi konstituen yang dilakukan PKS melalui *permanent campaign*.

Bila aspek eksternal yang berpengaruh positif bagi PKS adalah iklim demokrasi di Indonesia yang cukup kondusif, maka kondisi politik di Turki terkait dengan ancaman intervensi militer, bahaya separatis Kurdi serta penegakan demokrasi yang masih berproses tetap merupakan ancaman bagi AKP. Namun kondisi ekonomi, sosial dan budaya berpengaruh sangat positif bagi pemenangan Pemilu AKP di 2002 dan 2007, sementara kondisi sosial dan ekonomi yang belum kondusif serta budaya politik Islam yang heterogen berpengaruh negatif bagi pemenangan Pemilu PKS.

VI.2 Implikasi Teoritis

Keberhasilan kelompok Islamis yang direpresentasikan oleh PKS dan AKP membuktikan bahwa politik aliran masih relevan dalam konteks politik di Indonesia dan Turki. Selain itu fenomena tersebut juga sekaligus membuktikan bahwa tesis Olivier Roy yang menyatakan Islamis telah gagal dan mengalami kemunduran ke Neo-fundamentalis terpatahkan karena kedua partai politik tersebut tidak mundur menjadi apolitis. Keduanya berevolusi menjadi Pos-Islamis yang memberi peluang lebih untuk menjadi partai *mainstream* dibanding ketika masih Islamis.

Implikasi teoritis lainnya adalah membuktikan bahwa ideologi Islam kompatibel dengan demokrasi. Ada simbiosis mutualisme antara partai politik Islam yang berasal dari gerakan Islam dengan demokrasi. Di satu sisi demokrasi memberikan keleluasaan kepada gerakan-gerakan Islam untuk memperjuangkan aspirasi dan cita-citanya dengan membentuk partai-partai politik Islam. Di sisi lain, penguatan demokrasi di suatu negara membutuhkan partai-partai politik yang kokoh dan di antaranya memiliki kejelasan ideologi dan *human capital* hasil rekrutmen kader dan pemimpin serta *social capital* berupa basis massa. Aspek-aspek tersebut ada pada partai-partai politik Islam yang berasal dari gerakan Islam. Sementara salah satu ciri demokrasi adalah adanya keterwakilan dan di negara-negara yang mayoritas berpenduduk Muslim jelas harus terepresentasikan oleh partai-partai politik Islam.

Karakteristik Pos-Islamis yang inklusif, toleran, mengakui pluralitas dan terbuka harus didukung pula oleh sistem dan perangkat serta lingkungan eksternal yang sesuai dengan pilihan ideologi tersebut. Bila formula kompatibilitas antara ideologi Pos-Islamis dengan faktor-faktor ideologi, organisasi, basis massa, sistem rekrutmen, kepemimpinan dan strategi yang mendukung terealisasi dalam sebuah partai politik Islam, maka partai tersebut diyakini akan menang. Oleh karena itu penerapan ideologi Pos-Islamis harus diikuti dengan perubahan-perubahan dalam kelima aspek internal lainnya yakni organisasi, basis massa, sistem rekrutmen anggota, kepemimpinan dan strategi:

- a. Bentuk organisasi dari model *cell* Duverger harus berubah menjadi model *branch* sehingga lebih desentralistik dan otonom serta memiliki sumber pendanaan yang memadai untuk bisa mengelolanya secara profesional.
- b. Perluasan jenis basis massa dari hanya kelas menengah terdidik di perkotaan seperti yang diutarakan Lipset, menjadi melingkupi pula kelas bawah di pedesaan. Basis

- massa kelas menengah tetap menjadi basis massa utama yang bisa menarik basis massa lainnya yang lebih beragam termasuk kelompok minoritas.
- c. Sistem rekrutmen anggotanya bila dikaitkan dengan teori Alan Ware harus berubah dari sistem sel menjadi sistem *hybrid* sehingga harus ada perluasan segmentasi dan tidak hanya merekrut kelas menengah religius. Proses kenaikan jenjang yang panjang dan lama juga harus disederhanakan dan lebih difokuskan pada fungsionalisasinya.
 - d. Faktor kepemimpinan pun harus diselaraskan dengan ideologi Pos-Islamis yang terbuka dan inklusif sehingga dibutuhkan ketokohan atau kepemimpinan yang kuat untuk menjembatani antar suku, golongan dan agama. Oleh karena itu model elit partai Pareto *governing dan non-governing elite* harus dipadukan. Di satu sisi tetap melakukan mobilitas vertikal untuk mengantarkan kader-kader ke posisi sebagai *governing elite*, namun di sisi lain juga harus tetap dikembangkan ketokohan informal yakni *non-governing elite* berupa ulama, tokoh Pesantren, dosen atau tokoh masyarakat yang lebih memenuhi syarat sebagai *charismatic leader* dan *traditional leader* menurut Weber. Agar dapat dipilih menjadi *governing elite* atau pemimpin yang legal formal dipilih di Pemilu dan pemilihan Presiden, seseorang sebaiknya bermula dari kelompok *sub-elite* atau *non-governing elite* dan idealnya juga dari *charismatic* serta *traditional leader* di masyarakat. Oleh karena itu membangun ketokohan personal yang kharismatik baik secara lokal tradisional maupun dalam skala nasional merupakan keharusan jika ingin terpilih secara legal formal dan terjaga legitimasinya secara utuh selama masa pemerintahannya.
 - e. Strategi yang digunakan pun harus kompatibel dengan ideologi Pos-Islamis yakni strategi *vernacular politics* atau strategi politik kedaerahan yang mensinergikan seluruh komponen yang dimiliki partai Islam tersebut baik di struktur partai, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun di pemerintahan lokal. Selain itu juga harus dilengkapi dengan strategi-strategi lainnya.

VI. 3 Implikasi Empiris

Agar karakteristik Pos-Islamis tercermin dalam semua sisi wajah PKS maka penulis disertapun merekomendasikan bahwa karakteristik Pos-Islamis harus tercermin dalam semua sisi wajah PKS karena ideologi Pos-Islamis harus kompatibel dengan model organisasi, keragaman jenis basis massa, sistem rekrutmen, model kepemimpinan dan strategi yang digunakan agar berpengaruh signifikan bagi kemenangan Pemilu PKS. Oleh karena itu organisasi *cell* PKS harus berubah menjadi model *branch*, demikian pula peralihan dari hanya memperoleh dukungan dari jenis basis massa yang *segmented* yakni kelas menengah perkotaan yang terdidik dan religius menuju dukungan dari basis massa yang beragam.

Selanjutnya model rekrutmen sistem sel di PKS juga seharusnya berubah menjadi sistem *hybrid* serta model kepemimpinan kolektif di PKS harus diubah menjadi model kepemimpinan kharismatis (*charismatic leader*) Weber yang diterima luas lebih dulu di masyarakat (pemimpin informal, *traditional leader* menurut Weber atau *non-governing elite* menurut Pareto) agar dapat dipilih menjadi pemimpin legal formal (*legal formal leader* menurut Weber dan *governing elite* Pareto) serta menjadi faktor penting untuk meningkatkan elektabilitas PKS.

Evolusi PKS dari Islamis ke Pos-Islamis dan menjadi partai yang lebih terbuka sehingga mulai cukup banyak pejabat publik PKS yang bukan berasal dari kader PKS sempat membawa efek turbulensi di internal PKS, namun kondisi tersebut cepat teratasi dengan tradisi diskusi ilmiah di PKS. Proses evolusi Islamis ke Pos-Islamis adalah suatu proses yang dinamis, sehingga diperlukan penelitian lanjutan apakah dengan ideologi Pos-Islamis yang kompatibel dengan bentuk struktur organisasi, ragam basis massa, sistem rekrutmen anggota, model kepemimpinan dan ragam strategi yang digunakan akan pasti membuat PKS memperoleh keberhasilan seperti AKP. Sebab belum tentu pemilih PKS yang Islamis konservatif atau tradisional seperti misalnya Hidayatullah di Kalimantan lebih menyukai wajah PKS sebelum menjadi partai Islam terbuka.

Hal tersebut boleh ada kaitannya dengan komposisi pemilih PKS yakni apakah lebih dominan proporsi kelompok konservatifnya atautkah yang sekuler. Bila pemilih PKS yang dominan adalah kalangan Muslim perkotaan yang konservatif seperti di DKI Jakarta dan Jawa Barat maka perubahan PKS tersebut malah berpengaruh negatif karena mereka menganggap PKS telah berubah dari jatidirinya dengan munculnya ekses-ekses akibat keterbukaannya.

Sebaliknya bila segmen pemilih PKS juga telah meluas ke pemilih Muslim sekuler di perkotaan dan kelas bawah di perkotaan dan pedesaan serta daerah-daerah minoritas Muslim, maka perubahan ke arah Pos-Islamis dalam bentuk partai Islam terbuka menjadi hal yang berpengaruh positif, terbukti dengan meningkatnya suara PKS di daerah-daerah pedesaan di Jawa Tengah dan Jawa Timur serta di daerah-daerah minoritas Muslim seperti Bali, NTT, Papua dan sebagian wilayah Kalimantan.

Sebaliknya di AKP penelitian di Turki yang juga melibatkan masyarakat akademis, rakyat dan partai-partai oposisi memberikan *insight* pada penulis bahwa tidak ada yang sempurna sehingga AKP pun membutuhkan masukan-masukan atau rekomendasi sebagai implikasi empiris penelitian ini. Pertama terkait dengan sistem rekrutmen kadernya yang cenderung masif melalui jenis rekrutmen 'hybrid' telah mendapatkan kritikan dari salah seorang kader utama Mustafa Ozkaya yang juga Direktur TV-Net. Ozkaya mengingatkan bahwa betapapun sistem rekrutmen di AKP begitu memudahkan siapa saja untuk bergabung dengan AKP, tetap saja menurutnya harus ada seleksi untuk para pengurus partai dan calon-calon pejabat publik dari AKP. Sebab menurutnya sebagai partai yang tengah berkuasa, AKP dianggap menarik dan dapat menjanjikan baik materi maupun kedudukan sehingga banyak pula orang yang berwatak tidak baik, pragmatis dan boleh jadi mantan koruptor di masa pemerintahan CHP kini ikut bergabung dengan AKP. Bila tidak dicermati, diwaspadai dan diatasi dengan bijaksana maka bukan tidak mungkin bila suatu saat menjabat akan mencoreng citra partai. Penulis menjadikan masukan Ozkaya tersebut sebagai rekomendasi awal bagi AKP.

Berikutnya ada pula masukan-masukan justru terhadap dua aspek yang paling dominan dalam kemenangan Pemilu AKP yakni terkait sosok kharismatis Erdogan dan aspek strategi. Erdogan walaupun dipuja oleh sebagian besar rakyatnya bukan berarti tidak mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Di antaranya dari kalangan pers dengan kasus dipenjarakannya beberapa wartawan yang dianggap terus mendiskreditkan pemerintahan. Erdogan menurut mereka mulai menunjukkan keotoriterannya karena sudah 1 dekade atau 10 tahun memerintah. Kemudian partai oposan utama CHP mengkritik bahwa Erdogan terus menerus melakukan pembangunan fisik dalam berbagai mega proyek sehingga mengabaikan hal-hal yang manusiawi. Menurut CHP, seharusnya AKP memberikan kesempatan bernafas bagi rakyat. Bila partai-partai sekuler terus mencurigai bahwa suatu saat pemerintahan AKP akan merealisasikan agenda

Islamisasi, maka sebaliknya partai berhaluan Islam seperti *Saadet Partisi* menuliskan daftar “dosa” AKP dalam brosur kampanyenya karena dianggap telah mengkhianati perjuangan kelompok Islamis *Milli Gorus*. Selain itu juga ada kelompok pencinta ‘Turkish Heritage’ yang mengkritik bahwa pembangunan besar-besaran pemerintahan Erdogan acapkali mengabaikan pelestarian bangunan-bangunan peninggalan sejarah karena terdesak oleh pembangunan *mall* dan pertokoan. Penulis menyimpulkan pengaruh positif sosok kharismatis Erdogan tetap paling dominan berpengaruh bagi kemenangan AKP di hampir setiap Pemilu, namun penulis juga merekomendasikan sebaiknya Erdogan merencanakan dengan matang kapan saat yang tepat baginya untuk mengundurkan diri. Penulis beranggapan sebaiknya Erdogan mundur dengan elegan di puncak kejayaannya dan meletakkan tongkat estafeta kepemimpinan di AKP dan di Turki kepada penerusnya, sehingga ia akan tetap dikenang sebagai tokoh fenomenal atau bahkan Shalahuddin di abad ke-21.

Akhirnya terkait pula dengan aspek terpenting lainnya dalam pemenangan AKP yakni strategi termasuk strategi pendanaan. Salah satu sumber pendanaan diperoleh AKP dari strategi menjual reputasi keberhasilan pemerintahan AKP dan juga dengan menjual rencana pembangunan sehingga para investor tertarik untuk mendanai kampanye dengan kompensasi menjadi salah satu pelaksana proyek-proyek besar yang direncanakan. Strategi pendanaan tersebut mendapatkan banyak kritikan dari partai oposan seperti HAS Partisi yakni bahwa AKP banyak menggunakan fasilitas negara dalam penyelenggaraan kampanyenya serta hanya memberikan mega-mega proyek kepada para pengusaha besar yang berafiliasi kepada pemerintahan AKP dan menjadi penyandang dana AKP. As’ad seorang warga Uskudar, Istanbul mengatakan bahwa walaupun tidak melanggar Undang-undang di Turki, tetap saja hal itu dianggap sebagai nepotisme yang tidak etis. Oleh karena itu rekomendasi terakhir penulis adalah AKP harus lebih berhati-hati dalam strategi pendanaan partainya agar tidak dikesankan telah melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

- Al Banna, Hasan. *Risalah Pergerakan Ikhwanul Muslimun 1*. Solo, Era Intermedia, 2008.
- Al Usairy, Ahmad. *Sejarah Islam Sejak Zaman Nabi Adam Hingga Abad XX*. Akbar Media EkaSarana. Jakarta, 2003.
- Amal, Ichlasul. *Teori-teori Mutakhir Partai politik*. PT. Tiara Wacana Yogya, 1988.
- Aminuddin, Hilmi. *Menyusun Langkah-langkah* (dalam buku *Selalu Ada Alasan Untuk Menang*). Sekretariat Jenderal Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS. Jakarta, 2008
- Carmines, Edward G dan Robert Huckfeldt dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann(ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996.
- Bayat, Asef. *Life as Politics: How Ordinary people Change the Middle East*. Stanford University, California. 2010
- Budiardjo, Miriam. (ed.) *Partisipasi dan Partai Politik. Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: PT Gramedia, 1982.
- Dahl, Robert. *Demokrasi dan Para Pengeritiknya*, Jakarta: Yayasan Obor, 1992.
- Damanik, Ali Said. *Fenomena Partai Keadilan; Transformasi 20 tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*. Jakarta: Penerbit TERAJU, 2002.
- Demiralp, Seda, and Todd A. Eisenstadt. *Prisoner Erdogan's Dilemma and the Origins of Moderate Islam in Turkey*. Departement of Government American University, August 31.
- Diamond, Larry. *Developing Democracy Toward Consolidation*, (terj.), Yogyakarta: IRE Press, 2003.
- Draft Kronologi Sejarah PKS. Bidang Arsip dan Sejarah DPP PKS, Jakarta, 2007
- Duverger, Maurice. *Partai Politik dan Kelompok-kelompok Penekan* (edisi terjemahan). Editor Afan Gaffar. Yogyakarta: PT. Bina Aksara, 1984.

Dzakirin, Ahmad. *Transformasi Politik dan Demokrasi Kalangan Islamis: Potret Gerakan Islam di 2009*. Jakarta: INSURE, 2009.

Effendy, Bahtiar. *Islam and The State in Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2003.

Esposito, Jhon L. et. al. *Siapakah Muslim Moderat?* Gaung Persada Press Group, 2008

Evans, Kevin Raymond. *Sejarah Pemilu dan Partai Politik di Indonesia*. Jakarta: PT Arise Consultancies, 2003.

Fealy, Greg dan Anthony Bubalo. *Jejak Kafilah, Pengaruh Radikalisme Timur Tengah di Indonesia*. Mizan, 2007.

----- dan Whit Mason. *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Lowy Institute 2008. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia oleh Komunitas Bambu.

Feith, Herbert. *Pemilihan Umum di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 1999.

Firmanzah. *Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2008.

Furkon, Aay Muhammad. *Partai Keadilan Sejahtera, Ideologi dan Praksis Politik Kaum Muda Muslim Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Penerbit TERAJU, 2004.

Glain, Stephen. *Mullahs, Merchants, and Militans. The Economic Collaps of the Arab World*. St Martin's Press, New York, 2004.

Hefner, Robert W. *Islam in Indonesia's Political Future*. Project Asia, CAN, Alexandria, Virginia, 2002.

----- *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*. Jakarta: Penerbit ISAI, 2001.

Hooker, MB Indonesian Syariah, *Defining a National School of Islamic Law*, ISEAS, Singapura, 2006.

Howe, Marvine. *Turkey a Nation Divided over Islam's Revival*. Wetsview Press, 2000.

Huntington, Samuel P. *Gelombang Demokratisasi Ketiga* (edisi terjemahan dari "The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century"). Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1997.

- Benturan Antarperadaban dan Masa Depan Politik Dunia*, diterjemahkan dari: *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. Yogyakarta: Penerbit Qalam, 2002.
- Hwang, Jullie Chernov. *Peaceful Islamist Mobilization in the Muslim World. What Went Right*. Pai Grave MacMillan, New York, 2009. Johnson, David W & Frank P. Johnson. *Joining together: Group Theory and Group Skills*, 7th ed. USA, 2000.
- Keman, Hans. *Comparative Methodology*, London: Sage Published, 1999.
- Khaldun, Ibnu. Muqaddimah, (terj. Ahmadie Thoha), Tim Pustaka Firdaus, Jakarta, 1986
- Lijphart, Arend. *Democracies, Patterns of Majoritarian and Consensus Government in Twenty-One Countries*, Yale University Press, New Haven and London, 1984.
- Lipset, Seymour Martin. *Political Man, Basis Sosial Tentang Politik* (ed. Terj). Pustaka Pelajar, 2007.
- Lively, Jack. *The Meaning of Democracy; The Majority Principle and The Rule of the People*, dalam *Democracy*, Basic Blackwell, 1975.
- Mahendra, Yusril Ihza. *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam (Perbandingan Partai Masyumi/ Indonesia dan Partai Jama'at Islami/Pakistan)*. Jakarta: Penerbit Paramadina, 1999.
- Mahmudi, Yon. *Partai Keadilan Sejahtera, Wajah Baru Islam Politik Indonesia*. Bandung: Harakatuna Publishing, 2005.
- Majelis Pertimbangan Pusat PKS. *Memperjuangkan Masyarakat Madani*. Jakarta, Maret 2006.
- Majid, Nurcholis. *Surat-surat Politik Nurcholis Majid Dengan Moch. Roem*. Jakarta: Penerbit Djambatan, 2004.
- Muluk, Prof. Dr. Hamdi. *Mozaik Psikologi Politik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2010.
- Mutalib, Hussin and Taj ul-Islam Hashmi (Ed.). *Islam, Muslims and the Modern State. Case-Studies of Muslims in Thirteen Countries*. Macmillan Press LTD, Houndmills, Basingstoke and London: 1996.

- Nasr, Vali. *Forces of Fortune: The Rise of the New Muslim Middle Class and What It Will Mean For Our World*. Free Press, New York. 2009.
- Nawawi, Hadari dan H. Mimi Martini. *Penelitian Terapan*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Nonaka, Ikujiro & Takeuchi Hirotaka. *The Knowledge-creating company: How Japanese companies create the dynamics of innovation*. 1995. New York: Oxford University Press
- Pappi, Franz Urban dalam Robert E. Goodin and Hans-Dieter Klingemann (ed.) *A New Handbook of Political Science*. Oxford University Press, New York, 1996.
- Rahmat, Imdadun. *Ideologi Politik PKS; Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKIS, 2008.
- Rinaldo, Rachel. *Mobilizing Piety: Women, Islam, and the Public Sphere in Indonesia*. A dissertation Submitted to Faculty of the Division of the Social Science in Candidacy for the Degree of Doctor of Philosophy. The University of Chicago, August 2007.
- Roy, Olivier. *Gagalnya Islam Politik*. Ed. Terjemahan dari *The Failure of Islamic Islam*. PT. Serambi Ilmu Semesta, 1996.
- Scruton, Roger. *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought*. Macmillan Press. New York, 1982.
- Seliger, Martin. *The Marxist conception of Ideology (a critical essay)*. London: Cambridge University, 1979.
- Shelling, Thomas C. *The Strategy of Conflict*. Lihat dalam *The Palgrave Macmillan Dictionary of Political Thought* karya Roger Scruton.
- Sikap Kami (Kumpulan Seruan, Pernyataan Politik, Bayanat dan Pidato Politik DPP PK)*. Humas DPP PK, Jakarta, 2001.
- Sveiby, Karl Erik. *The New organizational wealth: Managing and measuring knowledge-based assets*. San Francisco: Berrett-Koehler Publishers. 1997
- Tezel, Yahya Seza. *Transformation of State and Society in Turkey: from the Ottoman Empire to the Turkish Republic*. Pozitif Matbaacilik, 2005.
- Utomo, Dr. Setiawan Budi. *Fikih Kontemporer: Tanya Jawab Politik, Ekonomi, Sosial dan Kesehatan Kontemporer*. Utan Kayu, Pustaka SAKSI, 2000.

Ware, Alan. *Political Parties and Party System*. OxfordUniversity Press, New York, 1999.

Yavuz , M.Yakan. *Islamic Political Identity in Turkey*. New York : University Press, 2003.

Yüksel, Prof. Dr. Cüneyt (*Member of Turkish Parliament*). *Introductory Brief About AKP*. 2008.

Zamjani, Irsyad. *Sekularisasi Setengah Hati. Politik Islam Indonesia dalam Periode Formatif*.

Dian Rakyat. Jakarta, 2009. Hlm: 216

II. Disertasi, Naskah Akademik, Paper dan Makalah

Ardono, TW. seperti dikutip Syahrul Hidayat. *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Politik*. FISIP Jurusan Ilmu Politik. Jakarta, 2002.

Chairiyah, Sri Zul. *Dominasi Golkar (1971-1997) dan “Liberal Democratic Party” (1955-1993) di Indonesia dan Jepang*. Disertasi Program Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Indonesia, Jakarta, 2008.

Jurnal Politika. *Jurnal Pencerahan Politik untuk Demokrasi*, Volume 3, no. 1, Akbar Tandjung Institute, Jakarta, 2007.

Murniarti, Sri. *Conditions for Moderation: Unpacking the Inclusion Experience of Islamist Parties in Three Different Political Systems in Indonesia*. A thesis presented to the faculty of the College of Arts and Sciences of Ohio University, August 2008.

Mujani, Saiful MA. *Religious Democrats: Democratic Culture and Muslim Political Participation in Post-Suharto Indonesia*. Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in Political Science at The Ohio State University. 2003.

Soekanto, Sitaesmi S. *Pengembangan Budaya “Knowledge Sharing” Melalui Lima “Enabler” Ba Nonaka Akan Meningkatkan Kapasitas Rekrutmen Kader PKS*. Tesis Program Pascasarjana, Depok: F. Psikologi UI, 2006.

White, Jenny B. *Islamist Mobilization in Turkey, a Study in Vernacular Politics*. University of Washington Press, Seattle and London, 2002.

III. Media Koran, Majalah dan CD

Sencar, Prof. Özer (Head of the Ankara-based MetroPOLL Strategic and Social Research Center). *Today's Zaman*. 7 Maret 2011.

Schorr, Daniel (Ed.). *History and Faith Cradle & Crucible in the Middle East*. National Geographic Society, 2002.

Forum Pembaca KOMPAS. Senin, 28 Apr 2008.

Data Sekretariat DPP PKS pada bulan Desember 2009

IV. Internet

Apakabar: <http://apakabar.ws/forum>

dbahar@indo.net.id (Sabtu 1 September 2007).

Human Rights Watch, 1999. <http://www.hrw.org/worldreport99/europe/turkey.html>

Superkoran: www.apakabar.ws&Forum

www.hidayatullah.com dan www.detikislam.com, 08 Juni 2008.

<http://id.wikipedia.org/wiki/Malari>

http://id.wikipedia.org/wiki/Daoed_Joesoef

<http://www.allaboutturkey.com/ozal.htm>

http://en.wikipedia.org/wiki/Necmettin_Erbakan

<http://www.igmg.de/verband/islamic-community-milli-goerues/what-does-milli-goerues-mean.html>

http://en.wikipedia.org/wiki/Welfare_Party

www.surrey.ac.uk/politics

<http://www.cnnturk.com>, November 2010.

www.Eramuslim.com Selasa, 14/09/2010 07:42 WIB

<http://hukumpolitik.com/berita-dan-politik/tizar-zein-kader-akar-rumput-pks-hanya-taklid-pengurus-hanya-pentingkan-duit.html>.

http://www.today.co.id/read/2011/03/26/20118/soeripto_kisruh_pks_bukan_soal_petentangan_kelompok_tua_dan_muda.

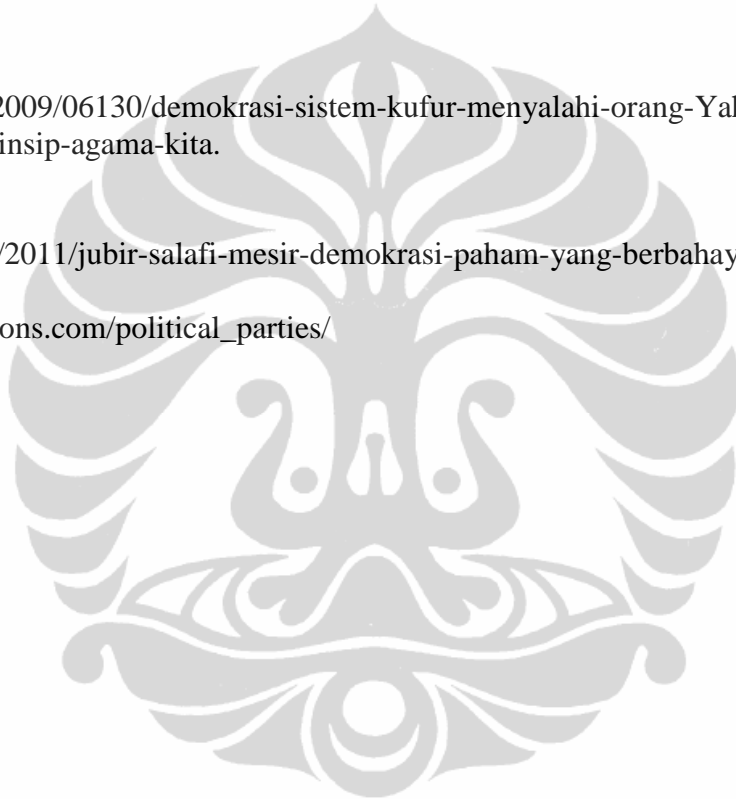
<http://matanews.com/2011/03/19/kisruh-pks-bom-waktu-yang-meledak/>

BBC Indonesia.com – detikNews, Minggu, 27/02/2011 22:03 WIB.

<http://hizbuttahrir.or.id/2009/06130/demokrasi-sistem-kufur-menyalahi-orang-Yahudi-dan-Nasrani-termasuk-prinsip-agama-kita>.

<http://koranmuslim.com/2011/jubir-salafi-mesir-demokrasi-paham-yang-berbahaya/>

http://www.turkishelections.com/political_parties/



Lampiran 1. TEORI YANG DIGUNAKAN.

I. Partai Politik

1. Maurice Duverger

Untuk membandingkan antara partai politik yang satu dengan partai politik yang lain tidak cukup hanya melihat satu aspek saja misalnya organisasinya saja, melainkan juga harus melihat faktor basis sosial, ideologi, kepemimpinannya dan lain-lain.

2. Sigmund Neumann dalam Miriam Budiardjo

Ada beberapa unit analisis yang lazim diperbandingkan di antara partai-partai politik, di antaranya adalah ideologi, basis sosial dan kepemimpinan.

3. Alan Ware

- Keberadaan partai politik dalam dinamika politik di negara modern adalah keniscayaan.
- Partai politik merupakan institusi yang membawa rakyat mencapai tujuan bersama dengan cara menjalankan kekuasaan di dalam negara.
- Partai politik adalah sebuah institusi yang mencari pengaruh dalam sebuah negara dengan cara merebut posisi-posisi di pemerintahan dan membawa lebih dari satu kepentingan di masyarakat serta berusaha mengagregasi kepentingan-kepentingan tersebut.

II. Ideologi

1. Alan Ware

Faktor penting yang membuat partai politik dapat bertahan lama, walaupun kompetisi membuat partai politik harus bersikap realistis dan pragmatis dengan mengadaptasikan ideologinya

2. Klaus von Beyme dalam Alan Ware

Dalam kurun waktu panjang hanya partai-partai politik berbasis ideologi yang akan mampu bertahan lama.

3. Greg Fealy dan Antonio Bubalo mengutip Samuel Huntington

Dengan berakhirnya perang dingin maka bentuk konflik yang akan datang lebih bersifat benturan budaya dan peradaban atau konflik antara Barat dan Muslim.

4. Ahmad Moussalli

Ada dua jenis fundamentalis yakni Islam fundamentalis radikal dan moderat. Fundamentalis radikal adalah sebuah gerakan yang didukung oleh sekelompok minoritas yang memiliki perilaku eksklusif dan *rigid* (kaku). Sedang fundamentalisme moderat

dalam batas tertentu mau membuka dialog dan menunjukkan bahwa mereka menerima sistem dan pemikiran politik Barat dalam rangka mencapai tujuan mereka yang lebih besar dan selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam

5. John L. Esposito

Mengkritisi penggunaan kata fundamentalis dan kata moderat secara dangkal sehingga mempersulit Barat dalam memahami Islam. Istilah “fundamentalis” secara berlebihan diterapkan setiap kali konservatisme terhubung dengan kekuatan politik dan mengancam pemerintahan dan kebijakan liberal

6. Ian Adams

- Ideologi merupakan konsep netral yang terdiri dari seperangkat kepercayaan (*beliefs*) politik untuk mengatur bagaimana masyarakat seharusnya dibentuk dan bagaimana memperbaikinya tanpa memandang apakah ide itu benar atau salah, baik atau buruk.
- Ideologi juga berkenaan dengan nilai (*values*), yakni (sebelum yakni juga jangan ada koma, jangan kelebihan koma atau titik dua non) menawarkan visi tentang masyarakat ideal yang akan menegakkan nilai-nilai yang dianutnya tersebut. Ideologi mengarahkan pula tindakan politik.
- Ideologi memberi identitas dan tujuan (*goals*) tertentu pada yang menganutnya.
- Ideologi konservatisme adalah gagasan yang didasarkan pada pengalaman dan logika sehingga menurutnya konservatisme bersifat pragmatis dan bukannya ideologis.

7. Martin Seliger dan Alvin Gouldner

Ideologi merupakan istilah netral yang bisa mengacu pada pandangan hidup manapun serta tidak bisa dipisahkan dari politik.

8. Nurcholish Madjid

Di era Reformasi ini politik aliran tidak lagi dianggap sangat penting karena rakyat lebih melihat substansi dari pada simbol dan bila partai-partai politik Islam tidak mampu mengartikulasikan gagasannya dalam perspektif kepentingan masyarakat luas maka sangat sulit untuk menjadi kekuatan utama di Indonesia

9. Asef Bayat

Pos-Islamisme berbeda dengan Islamisme yang memaksakan *Islamic-State* atau teokrasi karena Pos-Islamisme menolak sekularisme yang memusuhi agama, namun juga menolak gagasan teokrasi

III. Organisasi

1. Alan Ware

- Bagaimana dan mengapa ada kesamaan-kesamaan sekaligus variasi yang berbeda dalam bentuk organisasi partai-partai politik.
- Penjelasan tentang sumber-sumber daya yang tersedia bagi organisasi partai dan bagaimana perubahan dalam ketersediaan beberapa sumber daya mempengaruhi partai-partai politik.
- Mempertimbangkan isu yang diajukan Michels tentang siapa yang mengontrol organisasi partai dan sumber daya yang dimilikinya.
- Apa yang sebenarnya dilakukan oleh organisasi-organisasi partai dewasa ini.

2. Maurice Duverger

Tipologi organisasi-organisasi partai dilihat dari elemen-elemen dasar partainya:

- **1. Caucus** atau kaukus adalah bentuk tertua organisasi partai dan bentuk dominan di parlemen pada masa sebelum fase ekspansif memperluas dukungan atau jumlah keanggotaan. Struktur partai model kaukus adalah struktur organisasi berbasis elit politik.
- **Branch** atau cabang dipadankan oleh Duverger bila berdasarkan keanggotaannya disebut partai massa (*a mass membership party*). Struktur “branch” berbeda dengan struktur kaukus karena merekrut anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya yang mereka miliki di setiap bagian dan bukan pengelompokan elit politik lokal.
- **Cell** atau sel merupakan model struktur organisasi temuan partai komunis dan ada sentralisasi di model organisasi sel diarahkan oleh pusat dan bukan elit lokal.
- **Militia** atau milisia adalah bentuk organisasi partai yang awalnya dimiliki oleh kaum fasis dan partai sayap kanan ekstrim lainnya dalam fase Perang Dunia. Bahkan lebih dari model partai komunis, organisasi ini dirancang untuk menghasilkan banyak gugus-gugus tugas yang bekerja di luar jalur politik elektoral yang konvensional. Karakter militer nampak struktur organisasinya yang dimulai dari grup yang sangat kecil yang dibangun ke atas membentuk piramida yang membentuk unit-unit yang lebih besar

IV. Basis Massa

1. Seymour Martin Lipset

Kelompok *middle class* atau kelas menengah memiliki ciri-ciri sekaligus indikator-indikator yang memiliki korelasi dengan proses demokratisasi di suatu negara yakni sebagai berikut:

1. Kemakmuran dengan ukuran-ukuran utamanya:
 - (a). Pendapatan per kapita atau per orang
 - (b). Perbandingan banyaknya orang per mobil
 - (c). Banyaknya orang per dokter.
2. Industrialisasi dengan ukuran-ukuran utamanya:

- (a). Prosentase penduduk pria yang bekerja di sektor pertanian
- (b). Pemakaian energi yang diproduksi secara komersial di negara tersebut.
- 3. Urbanisasi dengan ukuran-ukuran utamanya:
 - (a). Prosentase penduduk pada komunitas sedikitnya 20.000
 - (b). Prosentase penduduk pada komunitas antara 100.000 orang atau lebih
 - (c). Prosentase penduduk di kawasan metropolitan atau kota besar.
- 4. Pendidikan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
 - (a). Keyakinan mereka pada toleransi terhadap oposisi
 - (b). Perasaan mereka terhadap kelompok minoritas nasional dan ras
 - (c). Pendapat mereka tentang sistem politik dengan multi partai dibandingkan dengan sistem partai tunggal. Semakin tinggi tingkat pendidikan sebuah negara, maka akan semakin besar peluangnya bagi demokrasi.

2. Daniel Lerner

Menemukan hubungan erat antara urbanisasi, literasi (melek huruf), tingkat pemberian suara, media komunikasi dan produksi yang digunakan serta pendidikan meskipun terdapat perbedaan tingkat pembangunan di negara-negara yang diteliti.

3. Samuel Huntington

Perkembangan ekonomi memang mendorong meningkatnya jumlah kelas menengah karena terjadinya mobilitas vertikal seiring dengan meningkatnya strata pendidikan dan taraf hidup.

V. Sistem Rekrutmen

1. Alan Ware

Partai jenis *hybrid* yang memiliki 'hibridisasi/percampuran' keanggotaan dalam sistem rekrutmen kadernya yakni *supporter*, *member* dan *activist* di partainya. Partai Konservatif di Inggris misalnya yang semula bersifat eksklusif dalam keanggotaannya kini memiliki jumlah anggota yang relatif besar. Partai Sosialis bersifat lebih terbatas dalam rekrutmen kadernya namun memiliki hubungan lebih erat satu sama lain.

2. Maurice Duverger

- Rekrutmen keanggotaan partai *caucus* diperoleh hanya melalui pengkaderan yang bersifat intuitif (*tacit co-option*) atau melalui nominasi formal. Struktur partai model kaukus adalah struktur organisasi berbasis elit politik.
- Rekrutmen keanggotaan partai *branch* atau partai massa (*a mass membership party*) merekrut anggota sebagai cara meningkatkan sumber daya yang mereka miliki di setiap bagian
- Rekrutmen keanggotaan partai *cell* atau sel lebih memperhatikan kualitas rekrutmen daripada kuantitasnya
- Rekrutmen keanggotaan partai *militia* atau memiliki model jenjang keanggotaan yang mengikuti alur karir militer.

VI. Kepemimpinan

1. Hamdi Muluk

Model kepemimpinan politik kontemporer adalah model integratif (*integrative model*) yakni pemahaman yang utuh terhadap kepemimpinan politik pada konteks tertentu. Kepemimpinan politik adalah fungsi dan interaksi antara faktor atribut kepribadian pemimpin, pola hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin dan faktor konteks zamannya. Dengan kata lain kepemimpinan politik adalah pola interaksi antara faktor karakter personal pemimpin, karakteristik konstituen yang dipimpin, pola interaksi di antara keduanya serta pengaruh konteks sejarah, politik, sosial dan budaya tertentu.

2. Roger Scruton

Kepemimpinan adalah kapasitas untuk menginspirasi keyakinan akan kebenaran tujuan seseorang, keberanian dalam pelaksanaan kolektifnya, dan ketaatan dalam menghadapi ancaman resistensi. Kepemimpinan kadang-kadang dikemukakan sebagai kebajikan atau keutamaan politik tertinggi. Derajat kepemimpinan seseorang ditentukan dari sejauh mana dapat membangun kendali atas dasar pengaruh. Ada yang berpendapat bahwa kepemimpinan adalah hasil karisma yang merupakan karakteristik pribadi. Sementara yang lainnya menganggap kepemimpinan lebih tergantung pada konteks sosialnya, sehingga mereka yang menjadi pemimpin di dalam satu negara atau satu situasi tertentu belum tentu dapat menjadi pemimpin di negara lain atau di dalam situasi yang berbeda.

3. Harold D. Laswell

Kepemimpinan politik bila dibahas dari aspek atribut kepribadiannya dengan mengkategorikan ada politisi yang mengidap psikopatologi (gangguan kejiwaan) yakni para politisi "*agitator*" yang memiliki ciri-ciri: haus kekuasaan, suka mencari sensasi, banyak bicara, "*tricky*" dan menganggap politik sebagai arena permainan. Ada pula tipe politisi yang menggunakan kekuasaannya lebih untuk mengatur kegiatan politiknya demi mewujudkan program-program partai yakni tipe *administrator* atau *legislator* atau "*idealist*" yakni orang yang bekerja di politik demi sebuah ide, cita-cita dan keyakinan politik.

4. Pareto

Setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu yang terbaik dan dikenal sebagai elit. Elit merupakan orang-orang yang berhasil dan mampu menduduki jabatan tinggi di masyarakat. Para elit tersebut umumnya berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang yang kaya dan juga pandai, yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya. Masyarakat terdiri dari 2 kelas yakni lapisan atas yaitu elit, yang terbagi ke dalam elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan lapisan bawah yaitu non-elit.

5. Gaetano Mosca

- Menolak klasifikasi pemerintahan ke dalam bentuk Monarki, Aristokrasi dan Demokrasi yang dipakai sejak zaman Aristoteles dan menegaskan hanya ada satu bentuk pemerintahan yaitu Oligarki.
- Meyakini adanya teori pergantian elit. Karakteristik yang dapat menjadi elit pengganti adalah “kecakapan untuk memimpin dan melakukan kontrol politik”.
- Bila elit yang memerintah kehilangan kecakapannya dan orang-orang di luar elit penguasa menunjukkan kecakapan yang lebih baik, maka boleh jadi elit yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh elit penguasa yang baru.
- Bila elit yang berkuasa tidak lagi mampu memberikan layanan-layanan yang diperlukan oleh massa, atau layanan yang diberikannya dianggap tidak lagi bernilai, atau telah terjadi perubahan pada kekuatan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat, maka perubahan tidak dapat dihindari. Meneliti komposisi elit dengan mengenali peran “kekuatan sosial” tertentu.
- Memperkenalkan konsep “sub-elit” yang berisikan seluruh “kelas menengah baru” dari para pegawai sipil, manajer industri, ilmuwan dan mahasiswa serta menganggapnya sebagai elemen vital dalam masyarakat dan stabilitas politik tergantung pada tingkat moralitas, kepandaian dan aktivitas para sub-elit ini.

6. Max Weber

- Membahas tentang tipe kepemimpinan didasarkan sumber legitimasi atau otoritas yang dimilikinya.
- Otoritas kepemimpinan yang terdiri dari otoritas kepemimpinan kharismatis, tradisional dan legal formal memperlihatkan adanya proses evolusi secara linear yaitu dari otoritas kharismatis ke tradisional dan ke legal formal.
- Kepemimpinan disebut kharismatis jika pengabsahannya tersebut berasal dari kekuatan supra natural yang diyakini para penganutnya. Kemudian kepemimpinan yang berotoritas tradisional terjadi manakala memperoleh pengakuan dari para leluhurnya dan masyarakatnya.
- Kepemimpinan yang berotoritas legal formal, pengabsahannya berasal dari pengakuan di depan hukum dan karena dipilih oleh mereka yang memiliki hak memilih melalui koridor aturan yang sudah dibakukan.

VII. Strategi

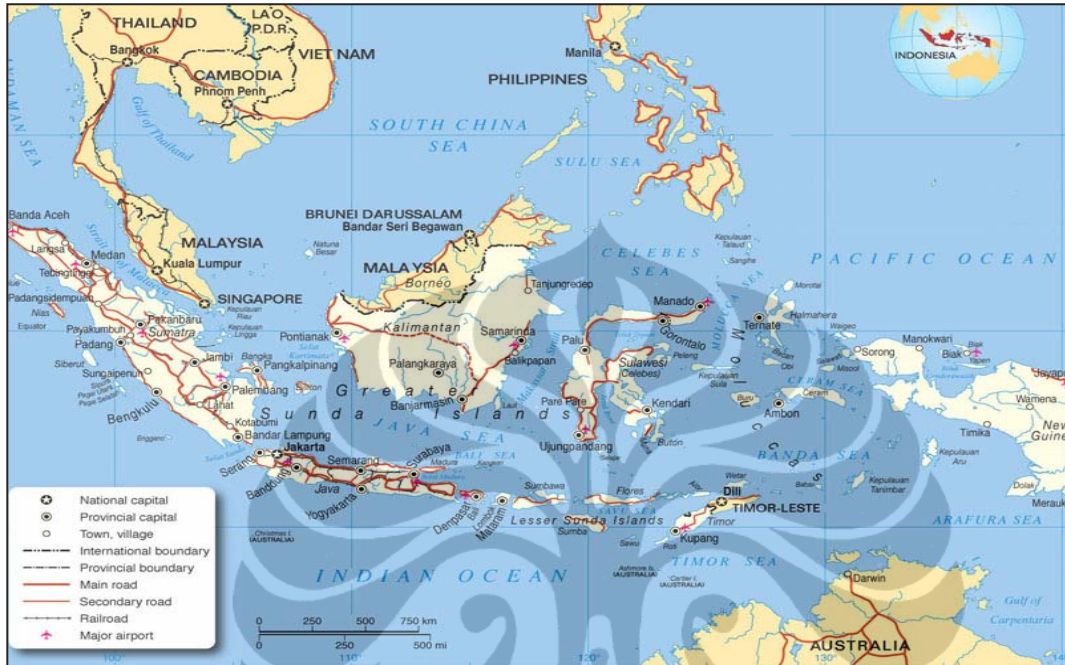
Jenny B. White

Vernacular politics adalah sebuah proses politik akar rumput yang otonom yang bergabung dengan beragam pelaku yang memiliki beragam ideologi. Di dalam proses *vernacular* tersebut jejaring masyarakat lokal bekerja sama atau *tandem* dengan partai politik dan lembaga-lembaga *civil society* dalam sebuah gerakan sosial politik yang berkesinambungan. Secara umum hal ini akan diasosiasikan dengan sebuah *platform* ideologis tertentu, akan tetapi jika diteliti lebih dekat lagi tampilan luar homogenitas di bawah satu ideologi tertentu menjadi hilang oleh kenyataan adanya begitu banyak perbedaan latar belakang, motivasi, dan masalah gender. Perbedaan-perbedaan tersebut dengan sendirinya menepiskan kecurigaan adanya pesan ideologis atau kepentingan politik praktis tertentu.



Lampiran 2.

Peta Indonesia



Peta Turki



Lampiran 3. Pemilu Indonesia



Contoh 4 Kertas suara



Bilik Suara



Kotak Suara



Tanda-tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu

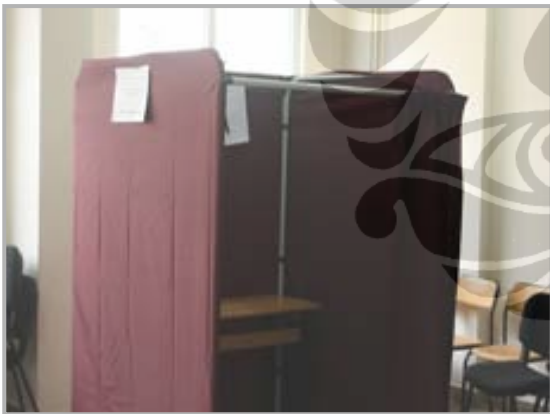
Pemilu Turki



Tanda Gambar Partai-Partai peserta Pemilu di Turki



Seorang petugas sedang mengverifikasi daftar pemilih tetap Pemilu di Turki



Bilik Suara



Petugas-petugas di TPS

Lampiran 4.

Logo PKS



Logo AKP



Lampiran 5. Partai-partai Kompetitor di Indonesia



PARTAI DEMOKRAT

Ideologi	: Pancasila
Ketua Fraksi	: Anas Urbaningrum
Ketua Umum	: Hadi Utomo
Sekretaris Jendral	: Amir Syamsudin
Didirikan	: 9 September 2001 dan di sahkan pada 27 Agustus 2003.
Kantor Pusat	: DKI Jakarta
Kursi di DPR	: 148 kursi (dari total 560)

VISI

PARTAI DEMOKRAT bersama masyarakat luas berperan mewujudkan keinginan luhur rakyat Indonesia agar mencapai pencerahan dalam kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur, menjunjung tinggi semangat Nasionalisme, Humanisme dan Internasionalisme, atas dasar ketakwaan kepada Tuhan yang maha Esa dalam tatanan dunia baru yang damai, demokratis dan sejahtera.

MISI

1. Memberikan garis yang jelas agar partai berfungsi secara optimal dengan peranan yang signifikan di dalam seluruh proses pembangunan Indonesia baru yang dijiwai oleh semangat reformasi serta pembaharuan dalam semua bidang kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan kedalam formasi semula sebagaimana telah diikrarkan oleh para pejuang, pendiri pencetus Proklamasi kemerdekaan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan titik berat kepada upaya mewujudkan perdamaian, demokrasi (Kedaulatan rakyat) dan kesejahteraan.
2. Meneruskan perjuangan bangsa dengan semangat kebangsaan baru dalam melanjutkan dan merevisi strategi pembangunan Nasional sebagai tumpuan sejarah bahwa kehadiran partai Demokrat adalah melanjutkan perjuangan generasi-generasi sebelumnya yang telah aktif sepanjang sejarah perjuangan bangsa Indonesia, sejak melawan penjajah merebut Kemerdekaan, merumuskan Pancasila dan UUD 1945, mengisi kemerdekaan secara berkesinambungan hingga memasuki era reformasi.
3. Memperjuangkan tegaknya persamaan hak dan kewajiban Warganegara tanpa membedakan ras, agama, suku dan golongan dalam rangka menciptakan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, otonomi daerah yang luas serta terwujudnya representasi kedaulatan rakyat pada struktur lembaga perwakilan dan permusyawaratan.



PARTAI GOLKAR

Ideologi	: Pancasila
Ketua Fraksi	: Priyobudi Santoso
Ketua Umum	: Aburizal Bakrie
Sekretaris Jendral	: Idrus Marham
Didirikan	: 20 Oktober 1964
Kantor Pusat	: DKI Jakarta
Kursi di DPR	: 107 (dari total 560 kursi)

VISI

PARTAI GOLKAR berjuang demi terwujudnya Indonesia baru yang maju, modern, bersatu, damai, adil dan makmur dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa, berakhlak baik, menjunjung tinggi hak asasi manusia, cinta tanah air, demokratis, dan adil dalam tatanan masyarakat madani yang mandiri, terbuka, egaliter, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja dan semangat kekaryaannya, serta disiplin yang tinggi.

MISI

1. Mempertegas komitmen untuk menyerap, memadukan, mengartikulasikan, dan memperjuangkan aspirasi serta kepentingan rakyat sehingga menjadi kebijakan politik yang bersifat publik.
2. Melakukan rekrutmen kader-kader yang berkualitas melalui sistem prestasi (merit system) untuk dapat dipilih oleh rakyat menduduki posisi-posisi politik atau jabatan-jabatan publik. Dengan posisi atau jabatan politik ini maka para kader dapat mengontrol atau mempengaruhi jalannya pemerintahan untuk diabdikan sepenuhnya bagi kepentingan dan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan proses pendidikan dan komunikasi politik yang dialogis dan partisipatif, yaitu membuka diri terhadap berbagai pikiran, aspirasi dan kritik dari masyarakat.



PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

Ideologi	: Marhaenisme
Ketua Fraksi	: Tjahyo Kumolo
Ketua Umum	: Megawati Soekarnoputri
Sekretaris Jendral	: Pramono Anung
Didirikan	: 10 Januari 1973 (PDI) diteruskan 14 Februari 1999 (PDIP)
Kantor Pusat	: Lenteng Agung, Jagakarsa, Jakarta Selatan
Kursi di DPR	: 94 (dari total 560 kursi)

VISI

1. Mewujudkan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Membangun masyarakat Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis, adil dan makmur.

MISI

1. Menghimpun dan membangun kekuatan politik rakyat.
2. Memperjuangkan kepentingan rakyat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya secara demokratis.
3. Berjuang mendapatkan kekuasaan politik secara konstitusional guna mewujudkan pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia.



PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

Ideologi	: Islam
Ketua Fraksi	: Hasrul Azwar
Ketua Umum	: Suryadharma Ali
Sekretaris Jendral	: Irgan Chairul Mahfidz
Didirikan	: 5 Januari 1953
Kantor Pusat	: DKI Jakarta
Kursi di DPR	: 37 (dari total 560 kursi)

VISI

adalah “Terwujudnya masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT dan negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, bermoral, demokratis, tegaknya supremasi hukum, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), serta menjunjung tinggi harkat-martabat kemanusiaan dan keadilan sosial yang berlandaskan kepada nilai-nilai keislaman”.

MISI

1. PPP berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan *ukhuwah Islamiyah* (persaudaraan sesama muslim). Dengan demikian PPP mencegah berkembangnya faham-faham atheisme, komunisme/marxisme/leninisme, serta sekularisme, dan pendangkalan agama dalam kehidupan bangsa Indonesia;
2. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sesuai harkat dan martabatnya dengan memperhatikan nilai-nilai agama terutama nilai-nilai ajaran Islam, dengan mengembangkan *ukhuwah basyariyah* (persaudaraan sesama manusia). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang berkembangnya neo-feodalisme, faham-faham yang melecehkan
3. PPP berkhidmat untuk berjuang memelihara rasa aman, mempertahankan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa dengan mengembangkan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan sebangsa). Dengan demikian PPP mencegah dan menentang proses disintegrasi, perpecahan dan konflik sosial yang membahayakan keutuhan bangsa Indonesia yang ber-bhineka tunggal mika;

4. PPP berkhidmat untuk berjuang melaksanakan dan mengembangkan kehidupan politik yang mencerminkan demokrasi dan kedaulatan rakyat yang sejati dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian PPP mencegah dan menentang setiap bentuk otoritarianisme, fasisme, kediktatoran, hegemoni, serta kesewenang-wenangan yang mendzalimi rakyat;
5. PPP berkhidmat untuk memperjuangkan berbagai upaya dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridloi oleh Allah SWT, *baladun thayyibatun wa rabbun ghofur*. Dengan demikian PPP mencegah berbagai bentuk kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, kesenjangan budaya, pola kehidupan yang konsumeristis, materialistis, permisif, dan hedonistis di tengah-tengah kehidupan rakyat banyak yang masih hidup di bawah garis kemiskinan.



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Ideologi	: Islam
Ketua Fraksi	: Marwan Jafar
Ketua Umum	: Muhaimin Iskandar
Didirikan	: 23 Juli 1998
Kantor Pusat	: DKI Jakarta
Kursi di DPR	: 28 (dari total 560 kursi)

VISI

1. Mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945;
2. Mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara lahir dan batin, material dan spiritual;

MISI

1. Bidang Agama: meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. Bidang Politik: mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Menegakkan kedaulatan rakyat; mewujudkan pemerintahan yang demokratis, bersih dan terpercaya; melaksanakan pembangunan nasional untuk kemakmuran rakyat; melaksanakan politik

- luar negeri yang bebas dan aktif serta mengembangkan kerjasama luar negeri untuk menciptakan perdamaian dunia yang abadi, adil, dan sejahtera;
3. Bidang Ekonomi: menegakkan dan mengembangkan kehidupan ekonomi kerakyatan yang adil dan demokratis;
 4. Bidang Hukum: berusaha menegakkan dan mengembangkan negara hukum yang beradab, mampu mengayomi seluruh rakyat, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, dan berkeadilan sosial;
 5. Bidang Sosial Budaya: berusaha membangun budaya yang maju dan modern dengan tetap memelihara jatidiri bangsa yang baik demi meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
 6. Bidang Pendidikan: berusaha meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berakhlak mulia, mandiri, terampil, profesional dan kritis terhadap lingkungan sosial di sekitarnya; mengusahakan terwujudnya sistem pendidikan nasional yang berorientasi kerakyatan, murah dan berkesinambungan;
 7. Bidang Pertahanan: membangun kesadaran setiap warga negara terhadap kewajiban untuk turut serta dalam usaha pertahanan negara; mendorong terwujudnya swabela masyarakat terhadap perlakuan-perlakuan yang menimbulkan rasa tidak aman, baik yang datang dari pribadi-pribadi maupun institusi tertentu dalam masyarakat



PARTAI GERINDRA

Ideologi	: Pancasila
Ketua Fraksi	: Mujiyono Hariyanto
Ketua Umum	: Suhardi
Sekretaris Jendral	: Ahmad Muzani
Didirikan	:
Kantor Pusat	: DKI Jakarta
Kursi di DPR	: 26 (dari total 560 kursi)

VISI

Menjadi partai politik yang mampu menciptakan kesejahteraan rakyat, keadilan social dan tatanan.

MISI

1. Meningkatkan pendidikan Nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. Meningkatkan taraf hidup rakyat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.



PARTAI HANURA

Ideologi	: Pancasila
Ketua Fraksi	: Ahmad Fauzi
Ketua Umum	: H. Wiranto. S.H.
Sekretaris Jendral	: Dossy Iskandar Prasetyo
Didirikan	: 14 November 2006
Kantor Pusat	: Menteng, Jakarta Pusat
Kursi di DPR	: 17 (dari total 560 kursi)

VISI

1. Kemandirian Bangsa. Bangsa Indonesia saat ini terasa tidak mandiri lagi. Banyak tekanan dan intervensi asing yang sudah merajalela dan merugikan kehidupan seluruh bangsa. Kita harus rebut kembali, bangun kembali kemandirian kita dalam penyelenggaraan negara.
2. Kesejahteraan Rakyat. Sebuah kata yang sudah sangat sering diucapkan tetapi sangat sulit diwujudkan. Semua kader Partai HANURA yang juga calon pemimpin bangsa, di benaknya harus selalu tertanam kalimat 'kesejahteraan rakyat Indonesia', sekaligus mampu berusaha menghadirkannya.

MISI

1. Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan negara yang demokratis, transparan, akuntabel, dengan senantiasa berdasar pada Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Melahirkan pemimpin yang bertakwa, jujur, berani, tegas, dan berkemampuan, yang dalam menjalankan tugas selalu mengedepankan hati nurani.
3. Menegakkan hak dan kewajiban asasi manusia dan supremasi hukum yang berkeadilan secara konsisten, sehingga dapat menghadirkan kepastian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Membangun sumber daya manusia yang sehat dan terdidik yang didasari akhlak dan moral yang baik serta memberi kesempatan seluas-luasnya kepada kaum perempuan dan pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa.
5. Membangun ekonomi nasional yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan serta membuka kesempatan usaha dan lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat.
6. Memberantas korupsi secara total dalam rangka mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan bermartabat.
7. Mengembangkan Otonomi Daerah untuk lebih memacu pembangunan di seluruh tanah air dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.



PARTAI AMANAT NASIONAL

Ideologi	: Pancasila
Ketua Fraksi	: Asma Abnur
Ketua Umum	: Hatta Rajasa
Sekretaris Jendral	: Taufik Kurniawan
Didirikan	: 23 Agustus 1998
Kantor Pusat	: Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Kursi di DPR	: 46 (dari total 560 kursi)

VISI

Terwujudnya PAN sebagai partai politik terdepan yang mewujudkan masyarakat mandiri yang adil dan makmur, dengan pemerintahan yang baik dan bersih, di dalam social Indonesia yang demokratis dan berdaulat , serta diridloi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

MISI

1. Memenangkan PAN dalam setiap Pemilu;
2. Mewujudkan kader yang berkesadaran spiritual, sosial dan politik yang tinggi, cerdas, ikhlas, pluralis, tangguh, profesional, mandiri, progresif, inovatif, konsisten;
3. Mewujudkan PAN yang dekat dan membela kepentingan rakyat;
4. Membangun Organisasi PAN yang modern berdasarkan sosial, manajemen dan budaya organisasi yang kuat dan mengakar;
5. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang baru yang demokratis, berkeadilan sosial, makmur, damai, cerdas, mandiri dan partisipat



Lampiran 5.

Yel –yel PKS

1. I'dilu (Berlakulah Adil) pada saat PK (Pemilu1999)
2. Bersih dan Peduli pada saat sudah PKS (Pemilu 2004)
3. Bersih,Peduli dan Profesional (Pemilu 2009)

Yel –yel AKP

1. Istikrar Sursun, Turkiye Buyusun (Lanjutkan stabilitas untuk membangun Turki yang lebih Jaya)
2. HAZIR HEDEF 2023 (Turki siap mencapai visi 2023)
3. *Hersye Turkiye Icin* (semuanya untuk Turki)

Lagu PKS

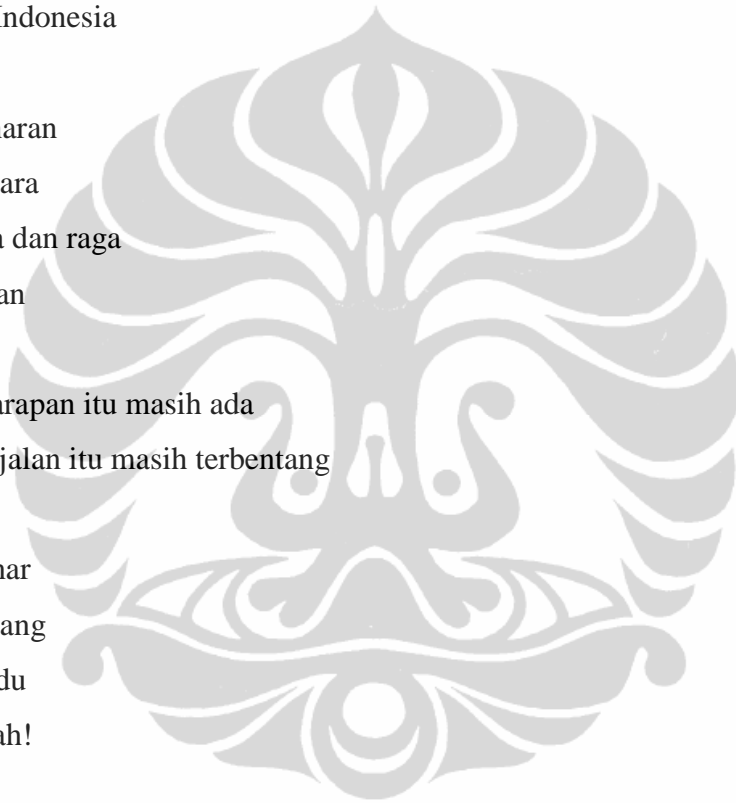
Bangkitlah Negeriku

Tatap tegaklah masa depan
Tersenyumlah tuk kehidupan
Dengan cinta dan sejuta asa
Bersama membangun Indonesia

Pegang teguhlah kebenaran
Buang jauh nafsu angkara
Berkorban dengan jiwa dan raga
Untuk tegaknya keadilan

Bangkitlah negeriku harapan itu masih ada
Berjuanglah bangsaku jalan itu masih terbentang

Selama matahari bersinar
Selama kita terus berjuang
Selama kita satu berpadu
Jayalah negeriku jayalah!



Lagu AKP Turki

Biz Birlikte Türkiye'yiz

Kita Turki Bersama-sama (bersama-sama menjadi turki)

Aynı yoldan geçmişiz biz / kita melewati jalan yang sama

Aynı sudan içmişiz biz / kita minum air yang sama

Yazımız bir kışımız bir/ musim panas kita satu, musim dingin kita satu

Aynı dağın yeliyiz biz/ kita angin dari gunung yang sama (kata kiasan)

Şarkılar bir türküler bir/ nyanyian satu, dendang pun satu

Hep beraber söyleriz biz/ kita menyanyikannya bersama-sama

Halaylar bir horonlar bir/ gendang satu, tarian satu

Aynı sazın teliyiz biz/ kita dawai instrument yang sama

Gönüller bir dualar bir/ hati-hati satu, doa-doa satu

BİR Allahın kuluyuz biz/ kita adalah hamba Allah

Has bahçemiz yurdumuzdur/ taman khusus (private) kita tanah air kita

Aynı bağın gülüyüz biz/ kita bunga di ikatan yang satu

Haydi bi daha bidaha bidaha/ ayo sekali lagi ayo sekali lagi

Hep beraber söyleyelim/ ayo kita lantunkan bersama

Vur şu davula bidaha bidaha/ pukul gendang itu sekali lagi sekali lagi

Hem çoşup hem söyleyelim. /sambil bergembira sambil berdendang

Lampiran 6.

Tokoh Gerakan Tarbiyah



Hilmi Aminuddin

Tokoh *Milli Gorus*



Erbakan

Tokoh-tokoh PKS



Rahmat Abdullah

Tokoh-tokoh AKP



Huseyin Kansu

Tokoh-tokoh PKS



Suharna Surapranata

Tokoh-tokoh AKP



Abdullah Gull



Luthfi Hasan Ishaq



Recep Tayyip Erdogan

Tokoh-tokoh PKS



Salim Assegaf

Tokoh-tokoh AKP



Ahmet Davutoglu



Surahman Hidayat



Mustafa Ozkaya

Tokoh-tokoh PKS



Untung Wahono

Tokoh-tokoh AKP



Omer Faruk Kalayci

Tokoh-tokoh PKS



Nurmahmudi Ismail



Hidayat Nur Wahid



Tifatul Sembiring

Lampiran 7.

Suasana Kampanye PKS



Suasana kampanye AKP



Lampiran 7.

Iklan Kampanye PKS

**PKS itu..
Partai Kita Semua...**

Kakak, Adik, Ayah, Ibu, Paman, Kakek, Sepupu. Semuanya Ikhlas PILIH PKS...

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BERSIH | PEDULI | PROFESIONAL

"Sampai Kempes, Tetap PKS"

Jika Anda yakin, dukunglah kami. Jika Anda simpati, doakan kami. Jika Anda ragu, pelajariiah kami. Dan jika Anda tidak setuju, kami akan tetap memperjuangkan aspirasi Anda...

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

Partai Keadilan Sejahtera

SUARA TERBERSIH
sepanjang nusantara

jangkauan luas

8 **PKS**

DIJAMIN!
Nikmati 8 Keuntungan Pilih

1. Suara Terbersih se-Nusantara
2. Jangkauan Luas
3. foratis layanan masyarakat
4. Terwujud content luar negeri
5. Bebas roaming KKN
6. Sinyal kuat sekuat anak muda
7. Aktivasi kapan saja dimana saja
8. Masa aktif sepanjang masa

Puaaassss Pilih PKS

Bersih Peduli Profesional

bersih peduli profesional

nomor **8**

terbukti nyata sepanjang nusantara

Ayo pilih langsung

PKS masa aktif seumur hidup

punya rakyat

HARGA DIRI TAK BISA DIBELI

Komitmen kami terus bekerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera

PASTI PKS!

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Bersih - Peduli - Profesional

SELAMATKAN INDONESIA BERGABUNGLAH BERSAMA

PKS SEKARANG

8 BERSIH PEDULI PROFESIONAL

PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

dari mana pun Anda berasal

8 PENURU MATA ANGIN

8 PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

semua pilih **PILIHAN KITA SEMUA**

Iklan Kampanye AKP

